



**QANUN KOTA LHOKEUMAWE  
NOMOR : 6 TAHUN 2025**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota

**RPJMK  
LHOKEUMAWE  
TAHUN 2025-2029**



Pemerintah Kota Lhokseumawe  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tahun 2025





WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYANYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang:
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe berperan sebagai penjabaran Visi dan Misi Wali Kota/Wakil Wali Kota yang bertujuan dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan Kota, sehingga terwujudnya cita-cita pembangunan Kota Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan, pemerataan dan kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2025 Nomor 8), Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 151);
15. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9);
16. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2);
17. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE**

dan

**WALI KOTA LHOKSEUMAWE**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.



3. Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi kewenangannya masing-masing.
4. Pemerintah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Pemerintah Kota.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kota sebagaimana unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
7. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Lhokseumawe.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMK, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disingkat RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPA serta memerhatikan RPJMN.



14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
18. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.

## BAB II RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) RPJMK merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Wali Kota terpilih hasil pemilihan Wali Kota Tahun 2024.
- (2) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, Arah Kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2029.
- (3) RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada:
  - a. RPJPK;
  - b. RTRW;
  - c. RPJMN;
  - d. RPJMA; dan
  - e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



- (4) Penyusunan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota sekitar.

#### Pasal 3

RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai periode RPJMK;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPK sesuai periode RPJMK;
- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMK; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota sesuai periode RPJMK.

#### Pasal 4

Sistematika RPJMK disusun sebagai berikut:

- a. bab I, berisi pendahuluan;
- b. bab II, berisi gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III, berisi Visi, Misi dan program prioritas pembangunan Daerah;
- d. bab IV, berisi program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota; dan
- e. bab V, berisi penutup.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Kepala Bappeda bertanggung jawab atas Pengendalian dan Evaluasi RPJMK.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMK bertujuan untuk menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. capaian target tujuan dan sasaran kinerja Daerah;
  - b. capaian target indikator kinerja Daerah;
  - c. efektivitas program prioritas dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK; dan
  - d. efektivitas program perangkat daerah dalam mendukung pencapaian indikator kinerja daerah.
- (4) Pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap tahunnya.



#### Pasal 5

- (1) Bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan:
  - a. pemantauan; dan
  - b. supervisi.
- (2) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin konsistensi kinerja:
  - a. RKPK dengan RPJMK; dan
  - b. Renja PD dengan Renstra PD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai umpan balik untuk memastikan bahwa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dituangkan pada RKPK dan Renja PD berkontribusi mendukung pencapaian target tujuan dan sasaran RPJMK.

### BAB IV PERUBAHAN RPJMK DAN RENSTRA PD

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMK hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
  - b. hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, dan/atau merugikan kepentingan nasional/daerah/masyarakat luas.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Perubahan RPJMK menjadi pedoman dalam perubahan Renstra PD dan perubahan RKPK.
- (4) Tata cara perubahan RPJMK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 7

- (1) RKPK Tahun 2025 dan RKPK Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Qanun ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyusunan RKPK Tahun 2030 berpedoman pada RPJPK pada tahapan lima tahun kedua yaitu tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMA Tahun 2025-2029 dan RPJMK Tahun 2025-2029.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kota Lhokseumawe ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Desember 2025 M  
4 Rajab 1447 H



WALIKOTA LHOKEUMAWA,

YUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 24 Desember 2025 M  
4 Rajab 1447 H



SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKEUMAWA,

HARIS

LEMBARAN DAERAH KOTA LHOKEUMAWA TAHUN 2025 NOMOR 6  
NOREG QANUN KOTA LHOKEUMAWA PROVINSI ACEH: (5/155/2025)



**LAMPIRAN  
QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR : 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029**



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2025**





**DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR**

**RPJMK  
LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2025-2029**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum .....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	I-7
1.3.1. RPJMK Lhokseumawe dengan RPJM Aceh 2025-2029.....	I-7
1.3.2. RPJMK Lhokseumawe dengan RPJM Aceh 2025-2029.....	I-8
1.3.3. RPJMK Lhokseumawe RPJK Lhokseumawe 2025-2029 .....	I-8
1.3.4. RPJMK Lhokseumawe dengan RTRW 2024-2044 .....	I-9
1.3.5. RPJMK Lhokseumawe dengan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 .....	I-9
1.3.6. RPJMK Lhokseumawe dengan RPKP .....	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I-10
1.5. Sistematika Penyusunan .....	I-11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe .....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ...	II-1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi .....	II-1
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis.....	II-2
2.1.1.1.3. Kondisi Topografi .....	II-2
2.1.1.1.4. Kondisi Geologi .....	II-3
2.1.1.1.5. Kondisi Hidrologi .....	II-4
2.1.1.1.6. Kondisi Klimatologi .....	II-5
2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan .....	II-7
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam .....	II-8
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah .....	II-9
2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....	II-16
2.1.1.4.1. Daya Dukung Pangan .....	II-16
2.1.1.4.2. Daya Dukung Air .....	II-19
2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan.....	II-21
2.1.1.5.1. Indeks Ketahanan Pangan .....	II-21
2.1.1.5.2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan .....	II-21
2.1.1.5.3. Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum .....	II-22
2.1.1.6. Lingkungan Hidup Berkualitas .....	II-23
2.1.1.6.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup...	II-23



2.1.1.6.2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah .....	II-25
2.1.1.6.3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah .....	II-26
2.1.1.6.4	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman .....	II-26
2.1.1.7.	Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim .....	II-27
2.1.1.7.1.	Indeks Risiko Bencana.....	II-27
2.1.1.7.2.	Indeks Ketahanan Daerah .....	II-29
2.1.1.8.	Demografi .....	II-29
2.1.1.8.1.	Jumlah Penduduk .....	II-29
2.1.1.8.2.	Kepadatan dan Persebaran Penduduk .....	II-30
2.1.1.8.3.	Pertumbuhan Penduduk.....	II-31
2.1.1.8.4.	Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	II-32
2.1.1.8.5.	Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-33
2.1.1.8.6.	Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun Kedepan .....	II-33
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-35
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi .....	II-35
2.1.2.1.1.	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	II-35
2.1.2.1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	II-38
2.1.2.1.3.	Distribusi Persentase PDRB .....	II-39
2.1.2.1.4.	PDRB Per Kapita .....	II-40
2.1.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka .....	II-42
2.1.2.1.6.	Indeks Gini .....	II-43
2.1.2.1.7.	Tingkat Kemiskinan .....	II-44
2.1.2.1.8.	Indeks Pembangunan Manusia .....	II-46
2.1.2.2.	Kesehatan Untuk Semua .....	II-47
2.1.2.2.1.	Usia Harapan Hidup .....	II-47
2.1.2.2.2.	Indeks Keluarga Sehat .....	II-48
2.1.2.2.3.	Prevalensi Stunting .....	II-49
2.1.2.2.4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional .....	II-50
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-50
2.1.2.3.1.	Rata-rata Lama sekolah .....	II-50
2.1.2.3.2.	Harapan Lama Sekolah.....	II-51
2.1.2.3.3.	Angka Literasi/Numerasi.....	II-52
2.1.2.3.4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	II-53
2.1.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	II-54
2.1.2.4.1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	II-54
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju .....	II-54
2.1.2.5.1.	Fokus Seni Budaya .....	II-54
2.1.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.....	II-56



2.1.2.6.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) .....	II-56
2.1.2.6.2.	Indeks Perlindungan Anak.....	II-56
2.1.2.6.3.	Indeks Ketimpangan Gender .....	II-57
2.1.2.6.4.	Indeks Pembangunan Gender .....	II-58
2.1.2.6.5.	Indeks Pemberdayaan Gender.....	II-58
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah.....	II-59
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia ...	II-59
2.1.3.1.1	Angka Ketergantungan .....	II-59
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi .....	II-60
2.1.3.2.1.	Rasio PDRB Perdagangan .....	II-60
2.1.3.2.2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan .....	II-60
2.1.3.2.3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum .....	II-61
2.1.3.2.4	Rasio Kewirausahaan.....	II-61
2.1.3.2.5	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB .....	II-62
2.1.3.2.6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian.....	II-63
2.1.3.2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ...	II-63
2.1.3.2.8	Indeks Inovasi Daerah .....	II-64
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru..	II-66
2.1.3.3.1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB .....	II-66
2.1.3.4.	Transformasi Digital .....	II-67
2.1.3.4.1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	II-67
2.1.3.5.	Integritas Ekonomi Domestik dan Global .....	II-68
2.1.3.5.1	Pembentukan Modal tetap Bruto .....	II-68
2.1.3.5.2	Ekspor Barang dan Jasa.....	II-68
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Petumbuhan Ekonomi .....	II-69
2.1.3.6.1	Indeks Infrastruktur .....	II-69
2.1.3.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak .....	II-69
2.1.3.6.3	Presentase Desa Mandiri.....	II-70
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro.....	II-73
2.1.3.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB..	II-73
2.1.3.7.2	Tingkat Inflasi.....	II-74
2.1.3.7.3	Total Kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga/PDRB .....	II-75
2.1.3.7.4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) .....	II-76
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum .....	II-76
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif .....	II-76
2.1.4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-76
2.1.4.1.2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) .....	II-77
2.1.4.1.3	Indeks Reformasi Hukum .....	II-79



2.1.4.1.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	II-79
2.1.4.1.5	Indeks Pelayanan Publik.....	II-79
2.1.4.1.6	Indeks Integritas Nasional.....	II-80
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substantial .....	II-81
2.1.4.2.1	Persentase Penegakan Perda.....	II-81
2.1.4.2.2	Presentase Capaian Aksi HAM .....	II-81
2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan .....	II-82
2.1.4.3.1.	Indeks Daya Saing Daerah.....	II-82
2.1.4.3.2.	Indeks Pembangunan Syariah .....	II-83
2.1.4.4	Kinerja Urusan Pemerintah Daerah ..	II-84
2.1.4.4.1	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..	II-84
2.1.4.4.1.1	Pendidikan.....	II-84
2.1.4.4.1.2	Kesehatan.....	II-89
2.1.4.4.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-114
2.1.4.4.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	II-121
2.1.4.4.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	II-124
2.1.4.4.5	Sosial.....	II-129
2.1.4.4.2	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .....	II-132
2.1.4.4.2.1	Tenaga Kerja.....	II-132
2.1.4.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	II-135
2.1.4.4.2.3	Pangan.....	II-138
2.1.4.4.2.4	Pertanahan.....	II-140
2.1.4.4.2.5	Lingkungan Hidup.....	II-141
2.1.4.4.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II-144
2.1.4.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-148
2.1.4.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-151
2.1.4.4.2.9	Perhubungan .....	II-152
2.1.4.4.2.10	Komunikasi dan Informatika.....	II-158
2.1.4.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-159
2.1.4.4.2.12	Penanaman Modal .....	II-161
2.1.4.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga.....	II-163
2.1.4.4.2.14	Statistik .....	II-164
2.1.4.4.2.15	Persandian.....	II-165
2.1.4.4.2.16	Kebudayaan.....	II-166
2.1.4.4.2.17	Perpustakaan.....	II-167
2.1.4.4.2.18	Kearsipan .....	II-170
2.1.4.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-171



2.1.4.4.3.1	Pariwisata .....	II-171
2.1.4.4.3.2	Pertanian .....	II-173
2.1.4.4.3.3	Energi dan Sumber Daya Mineral .....	II-174
2.1.4.4.3.4	Perdagangan .....	II-175
2.1.4.4.3.5	Perindustrian .....	II-176
2.1.4.4.3.6	Kelautan dan Perikanan .....	II-177
2.1.4.4.4	Aspek Penunjang Urusan.....	II-177
2.1.4.4.4.1	Perencanaan Pembangunan.....	II-177
2.1.4.4.4.2	Keuangan .....	II-180
2.1.4.4.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-183
2.1.4.4.4.4	Penelitian dan Pengembangan .....	II-186
2.1.4.4.4.5	Pengawasan .....	II-188
2.1.4.4.4.6	Sekretariat DPRK.....	II-190
2.1.4.4.4.7	Sekretariat Daerah.....	II-190
2.1.4.4.4.8	Unsur Kekhususan.....	II-191
2.2.	Gambaran Keuangan Lhokseumawe .....	II-193
2.2.1.	Kinerja Masa Lalu .....	II-194
2.2.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBK.....	II-196
2.2.1.1.1.	Pendapatan Daerah .....	II-202
2.2.1.1.2.	Belanja Daerah .....	II-214
2.2.1.1.3.	Pembiayaan Daerah .....	II-220
2.2.1.2.	Neraca Daerah .....	II-222
2.2.2.	Kebijakan pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....	II-228
2.2.2.1.	Proporsi Penggunaan Anggaran .....	II-228
2.2.2.2.	Analisa Pembayaran .....	II-229
2.2.3.	Kerangka Pendanaan.....	II-230
2.2.3.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan .....	II-230
2.2.3.1.1.	Pendapatan.....	II-230
2.2.3.1.2.	Belanja .....	II-233
2.2.3.1.3.	Pembiayaan .....	II-236
2.2.3.2.	Proyeksi Kerangka Pendanaan.....	II-238
2.3.	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kota Lhokseumawe .....	II-242
2.3.1.	Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe.....	II-242
2.3.1.1.	Belum Optimalnya Implementasi keistimewaan Aceh .....	II-242
2.3.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada dibawah rata-rata Aceh dan Nasional	II-242
2.3.1.3.	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal.....	II-246
2.3.1.4.	Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan .....	II-252



	2.3.1.5.	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan .....	II-254
	2.3.1.6.	Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal.....	II-254
	2.3.2.	Isu Strategis.....	II-257
	2.3.2.1.	Isu Strategis Global.....	II-257
	2.3.2.2.	Isu Strategis Nasional .....	II-263
	2.3.2.3.	Isu Strategis Aceh .....	II-266
	2.3.2.4.	Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan .....	II-273
	2.3.2.5.	Isu Strategis Kota Lhokseumawe .....	II-273
	2.3.2.5.1.	Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita...	II-274
	2.3.2.5.2.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka .....	II-274
	2.3.2.5.3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat .....	II-274
	2.3.2.5.4.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana.....	II-275
	2.3.2.5.5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas .....	II-276
	2.3.2.5.6.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal.....	II-276
	2.3.2.5.7.	Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan.....	II-277
<b>BAB III</b>	<b>VISI, MISI DAN PROGRAM</b>	<b>PRIORITAS</b>	
		<b>PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
	3.1	Visi .....	III-1
	3.2	Misi .....	III-4
	3.2.1	Misi 1 .....	III-8
	3.2.2	Misi 2.....	III-9
	3.2.3	Misi 3.....	III-10
	3.2.4	Misi 4.....	III-10
	3.2.5	Misi 5.....	III-11
	3.3	Tujuan dan Sasaran .....	III-15
	3.3.1	Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi.....	III-15

3.3.2	Tujuan II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualias dan Memiliki Daya Saing .....	III-17
3.3.3	Tujuan III : Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan .....	III-18
3.3.4	Tujuan IV : Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah.....	III-19
3.3.5	Tujuan V : Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya .....	III-21
3.4	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	III-28
3.4.1	Strategi Pembangunan Daerah .....	III-28
3.4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	III-31
3.4.3	Prioritas Pembangunan.....	III-68
<b>BAB VI</b>	<b>PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
4.1	Program Perangkat Daerah .....	VI-4
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	VI-23
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	IV-23
4.2.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD) .....	IV-28
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>V-1</b>
5.1	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi....	V-1
5.2	Pedoman Transisi.....	V-1
5.3	Kaidah Pelaksanaan.....	V-2



### DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe .....	II-1
Tabel	2.2	Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-5
Tabel	2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-6
Tabel	2.4	Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-7
Tabel	2.5	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe.....	II-7
Tabel	2.6	Luas Jasa Penyediaan Pangan Per Kecamatan Kota Lhokseumawe .....	II-18
Tabel	2.7	Luas Jasa Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan Kota Lhokseumawe .....	II-20
Tabel	2.8	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-22
Tabel	2.9	Tahapan Area Pelayanan Jaringan Perpipaan Siap Minum Kota Lhokseumawe .....	II-23
Tabel	2.10	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Kota lhokseumawe 2020-2024.....	II-26
Tabel	2.11	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ....	II-27
Tabel	2.12	Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe 2020-2024.....	II-27
Tabel	2.13	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-28
Tabel	2.14	Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2020-2024 .....	II-30
Tabel	2.15	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2020-2024 .....	II-31
Tabel	2.16	laju pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 .....	II-31
Tabel	2.17	Mutasi penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-32
Tabel	2.18	Perkembangan jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.....	II-32
Tabel	2.19	Proyeksi Jumlah penduduk Kota lhokseumawe Tahun 2025.....	II-34
Tabel	2.20	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah) .....	II-35
Tabel	2.21	Kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe terhadap PDRB Aceh Tahun 2020-2024 (dalam milyar).....	II-36
Tabel	2.22	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah).....	II-37

Tabel	2.23	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-38
Tabel	2.24	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel	2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-42
Tabel	2.26	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-44
Tabel	2.27	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe 2020-2024.....	II-45
Tabel	2.28	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-46
Tabel	2.29	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasiona Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-50
Tabel	2.30	Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024.....	II-52
Tabel	2.31	Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-54
Tabel	2.32	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs .	II-55
Tabel	2.33	Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-59
Tabel	2.34	Rasio PDRB Perdagangan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-60
Tabel	2.35	Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-61
Tabel	2.36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel	2.37	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-62
Tabel	2.38	Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel	2.39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel	2.40	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024.....	II-65
Tabel	2.41	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-67
Tabel	2.42	Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah) .....	II-68
Tabel	2.43	Ekspor Barang dan Jasa PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah) .....	II-68



Tabel	2.44	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-69
Tabel	2.45	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-70
Tabel	2.46	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-71
Tabel	2.47	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-71
Tabel	2.48	Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	II-72
Tabel	2.49	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-73
Tabel	2.50	Inflasi Kota Lhokseumawe menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2020-2024.....	II-74
Tabel	2.51	Total Kredit dan dana Pihak Ketiga Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta) .....	II-76
Tabel	2.52	Capaian Komponen nilai SAKIP ta Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	II-78
Tabel	2.53	Nilai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-79
Tabel	2.54	Capaian Survei Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023 .....	II-80
Tabel	2.55	Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-81
Tabel	2.56	Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-82
Tabel	2.57	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024 .....	II-83
Tabel	2.58	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-88
Tabel	2.59	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024 .....	II-89
Tabel	2.60	Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel	2.61	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-90
Tabel	2.62	Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-91
Tabel	2.63	Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-91
Tabel	2.64	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-92
Tabel	2.65	Rasio Posyandu Per Satuan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel	2.66	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .	II-93
Tabel	2.67	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-94
Tabel	2.68	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-95
Tabel	2.69	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-95

Tabel	2.70	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-96
Tabel	2.71	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-97
Tabel	2.72	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-98
Tabel	2.73	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-98
Tabel	2.74	Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-99
Tabel	2.75	Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-100
Tabel	2.76	Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-101
Tabel	2.77	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-101
Tabel	2.78	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-102
Tabel	2.79	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-103
Tabel	2.80	Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024 .....	II-103
Tabel	2.81	Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024 .....	II-104
Tabel	2.82	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-105
Tabel	2.83	Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-106
Tabel	2.84	Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-106
Tabel	2.85	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-107
Tabel	2.86	Cakupan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-108
Tabel	2.87	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-108
Tabel	2.88	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-109
Tabel	2.89	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-109
Tabel	2.90	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ..	II-110



Tabel	2.91	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-111
Tabel	2.92	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-112
Tabel	2.93	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi $\leq$ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-113
Tabel	2.94	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 .....	II-113
Tabel	2.95	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-115
Tabel	2.96	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Km) .....	II-115
Tabel	2.97	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-117
Tabel	2.98	Persentase Akses Rumah Tangga (RT) berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-118
Tabel	2.99	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-118
Tabel	2.100	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-119
Tabel	2.101	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-120
Tabel	2.102	Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-121
Tabel	2.103	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....	II-121
Tabel	2.104	Luas Permukiman Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-122
Tabel	2.105	Areal Kawasan Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-122
Tabel	2.106	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024.....	II-123
Tabel	2.107	Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-124
Tabel	2.108	Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-125
Tabel	2.109	Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-126
Tabel	2.110	Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-127
Tabel	2.111	Persentase Cakupan Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-128

Tabel	2.112	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....	II-128
Tabel	2.113	Penanganan PPKS Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-129
Tabel	2.114	PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-130
Tabel	2.115	Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-130
Tabel	2.116	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024 .....	II-131
Tabel	2.117	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d 2024 Kota Lhokseumawe .....	II-132
Tabel	2.118	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-133
Tabel	2.119	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-134
Tabel	2.120	Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-134
Tabel	2.121	Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-135
Tabel	2.122	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-135
Tabel	2.123	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-136
Tabel	2.124	Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-136
Tabel	2.125	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-137
Tabel	2.126	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ....	II-137
Tabel	2.127	Capaian Kota Layak Anak dan Gampong Layak Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023 .....	II-138
Tabel	2.128	Pola Pangan Harapan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-138
Tabel	2.129	Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-139
Tabel	2.130	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-139
Tabel	2.131	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-140
Tabel	2.132	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-141
Tabel	2.133	Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .	II-141
Tabel	2.134	Timbulan Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-142
Tabel	2.135	Sarana Prasarana Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	II-143



Tabel	2.136	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-143
Tabel	2.137	Capaian Indeks Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 .....	II-144
Tabel	2.138	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-145
Tabel	2.139	Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-146
Tabel	2.140	Rasio Pasangan Berakta Nikah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-146
Tabel	2.141	Rasio Anak yang Memiliki KIA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-147
Tabel	2.142	Jumlah Akte Kematian yang dikeluarkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-148
Tabel	2.143	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-148
Tabel	2.144	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-149
Tabel	2.145	Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-149
Tabel	2.146	Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-150
Tabel	2.147	Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-151
Tabel	2.148	Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-151
Tabel	2.149	Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-152
Tabel	2.150	Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-153
Tabel	2.151	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-154
Tabel	2.152	Jumlah Terminal Bus di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-154
Tabel	2.153	Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-155
Tabel	2.154	Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-155
Tabel	2.155	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-157
Tabel	2.156	VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota Lhokseumawe Tahun 2020 .....	II-158
Tabel	2.157	Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-159
Tabel	2.158	Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-160

Tabel	2.159	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-160
Tabel	2.160	Nilai Omset UKM yang dibina Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-161
Tabel	2.161	Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	II-161
Tabel	2.162	Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (milyar rupiah) .....	II-162
Tabel	2.163	Pelayanan Perizinan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-163
Tabel	2.164	Organisasi Pemuda yang aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-163
Tabel	2.165	Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-164
Tabel	2.166	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-164
Tabel	2.167	Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-165
Tabel	2.168	Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024 .....	II-166
Tabel	2.169	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe .....	II-167
Tabel	2.170	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 ...	II-168
Tabel	2.171	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-168
Tabel	2.172	Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-169
Tabel	2.173	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-170
Tabel	2.174	Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-170
Tabel	2.175	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-171
Tabel	2.176	Objek Wisata Kota Lhokseumawe.....	II-172
Tabel	2.177	PAD Sektor Pariwisata Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-173
Tabel	2.178	Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-173
Tabel	2.179	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-174
Tabel	2.180	Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-175
Tabel	2.181	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah) .....	II-175
Tabel	2.182	Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-176



Tabel	2.183	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-176
Tabel	2.184	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-177
Tabel	2.185	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA.....	II-177
Tabel	2.186	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA .....	II-178
Tabel	2.187	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA .....	II-179
Tabel	2.188	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Lhokseumawe .....	II-179
Tabel	2.189	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-180
Tabel	2.190	Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-181
Tabel	2.191	Persentase SILPA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-181
Tabel	2.192	Persentase Belanja Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-181
Tabel	2.193	Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020.....	II-182
Tabel	2.194	Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	II-182
Tabel	2.195	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2023 .....	II-183
Tabel	2.196	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-183
Tabel	2.197	Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-184
Tabel	2.198	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-184
Tabel	2.199	Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 .....	II-185
Tabel	2.200	Indeks Profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2023.....	II-186
Tabel	2.201	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 .....	II-187
Tabel	2.202	Capaian Kapabilitas APiP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-189
Tabel	2.203	Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-189
Tabel	2.204	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-190
Tabel	2.205	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	II-191

Tabel	2.206	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024.....	II-191
Tabel	2.207	Jumlah Dayah Terakreditasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-192
Tabel	2.208	Pendapatan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sadaqah Tahun 2020-2024 .....	II-192
Tabel	2.209	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2020-2024.....	II-193
Tabel	2.210	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-195
Tabel	2.211	Penetapan APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-196
Tabel	2.212	Anggaran dan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-198
Tabel	2.213	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-199
Tabel	2.214	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-202
Tabel	2.215	Anggaran dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-203
Tabel	2.216	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-204
Tabel	2.217	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-205
Tabel	2.218	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-206
Tabel	2.219	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-206
Tabel	2.220	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-207
Tabel	2.221	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pusat Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-209
Tabel	2.222	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-209
Tabel	2.223	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-210
Tabel	2.224	Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-211
Tabel	2.225	Anggaran dan Realisasi Dana Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-212
Tabel	2.226	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-212
Tabel	2.227	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-214
Tabel	2.228	Anggaran dan Realisasi Total Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-215
Tabel	2.229	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-215



Tabel	2.230	Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Operasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-216
Tabel	2.231	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-217
Tabel	2.232	Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Modal Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-218
Tabel	2.233	Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-219
Tabel	2.234	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-219
Tabel	2.235	Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Transfer Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-220
Tabel	2.236	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-221
Tabel	2.237	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024.....	II-221
Tabel	2.238	Neraca Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-223
Tabel	2.239	Balance Sheet Ratio Neraca Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-227
Tabel	2.240	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-229
Tabel	2.241	Surplus/(Defisit) Riil Anggaran dan Penutup Defisit Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-229
Tabel	2.242	Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030.....	II-232
Tabel	2.243	Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030.....	II-235
Tabel	2.244	Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe.....	II-237
Tabel	2.245	Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBK Lhokseumawe Tahun 2026-2030 .....	II-239
Tabel	2.246	Keterkaitan antara Isu KLHS, Isu Strategis Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe ...	II-279
Tabel	3.1	Penyelarasan Visi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 .....	III-2
Tabel	3.2	Keterkaitan Visi dengan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel	3.3	Penyelarasan Misi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 .....	III-13
Tabel	3.4	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 .....	III-23
Tabel	3.5	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 .....	III-28
Tabel	3.6	Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe .....	III-35

Tabel	3.7	Pentahapan dan Prioritas Kewilayahan Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030 .....	III-40
Tabel	3.8	Penyelarasan Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029.....	III-62
Tabel	3.9	Prioritas Pembangunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	III-68
Tabel	3.10	Integrasi Janji Politik dan Implementasi Program Unggulan dengan Program Nomenklatur .....	III-71
Tabel	3.11	Program Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2029 .....	III-76
Tabel	4.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030 .....	IV-2
Tabel	4.2	Program Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030.....	IV-5
Tabel	4.3	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 .....	IV-24
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 .....	IV-29



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan RPJMK Lhokseumawe 2025-2045 .....	I-1
Gambar 1.2	Arsitektur Perencanaan Pembangunan .....	I-1
Gambar 1.3	Misi RPJMN, RPJMA dan RPJMK 2025-2029 .....	I-3
Gambar 1.4	Tahapan Penyusunan RPJMK Tahun 2025-2029....	I-4
Gambar 1.5	RJMK Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen Lainnya .....	I-7
Gambar 1.6	Habungan RPJMN dan RPJMK Tahun 2025-2029 ..	I-8
Gambar 1.7	Penyelarasan Misi RPJMK Tahun 2025-2029 dengan RPJPK Tahun 2025-2045 .....	I-9
Gambar 1.8	Permasalahan dan Isu Strategis RPJPK 2025-2045 dan RPJMK Tahun 2025-2029.....	I-9
Gambar 1.9	Hubungan RPJMK Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029 .....	I-10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Lhokseumawe .....	II-2
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe .....	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe .....	II-3
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe .....	II-5
Gambar 2.5	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Lhokseumawe .....	II-17
Gambar 2.6	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Lhokseumawe.....	II-19
Gambar 2.7	Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-21
Gambar 2.8	Prevelensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020- 2024 .....	II-22
Gambar 2.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2020-2024 .....	II-24
Gambar 2.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024 .....	II-25
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-28
Gambar 2.12	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	II-29
Gambar 2.13	Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2024 .....	II-30
Gambar 2.14	Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2024.....	II-33
Gambar 2.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-39
Gambar 2.16	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-41
Gambar 2.17	PDRB Perkapita Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	II-41
Gambar 2.18	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	II-42

Gambar 2.19	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	II-43
Gambar 2.20	Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	II-45
Gambar 2.21	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-46
Gambar 2.22	Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	II-47
Gambar 2.23	Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-48
Gambar 2.24	Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2023 .....	II-49
Gambar 2.25	Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-49
Gambar 2.26	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-51
Gambar 2.27	Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-51
Gambar 2.28	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024.....	II-53
Gambar 2.29	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-56
Gambar 2.30	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Lhokseumawe 2020-2023.....	II-57
Gambar 2.31	Indeks Ketimpangan Gender Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2020-2024 .....	II-57
Gambar 2.32	Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-58
Gambar 2.33	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-59
Gambar 2.34	Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	II-62
Gambar 2.35	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024 .....	II-64
Gambar 2.36	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	II-66
Gambar 2.37	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	II-67
Gambar 2.38	Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-70
Gambar 2.39	Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh,Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-75
Gambar 2.40	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-77
Gambar 2.41	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.	II-78
Gambar 2.42	Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024.....	II-80

Gambar 2.43	Persentase Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024.....	II-82
Gambar 2.44	Angka Partisipasi Kasar Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-84
Gambar 2.45	Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-85
Gambar 2.46	Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-86
Gambar 2.47	Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-87
Gambar 2.48	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 .....	II-116
Gambar 2.49	Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Milyar Rp).....	II-197
Gambar 2.50	Kontribusi Masing-Masing Komponen PAD terhadap Total PAD Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	II-203
Gambar 2.51	Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 (Persen) .....	II-208
Gambar 3.1	Sasaran Pembangunan Daerah RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029.....	III-3
Gambar 3.2	Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah .....	III-5
Gambar 3.3	Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 .....	III-6
Gambar 3.4	Proses Bisnis Pencapaian Visi Pembangunan .....	III-7
Gambar 3.5	Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 1 ....	III-8
Gambar 3.6	Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 2 ....	III-9
Gambar 3.7	Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 3 ....	III-10
Gambar 3.8	Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 4 ....	III-11
Gambar 3.9	Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 5 ....	III-12
Gambar 3.10	Cascading Pencapaian Tujuan 1 .....	III-16
Gambar 3.11	Cascading Pencapaian Tujuan 2 .....	III-17
Gambar 3.12	Cascading Pencapaian Tujuan 3 .....	III-19
Gambar 3.13	Cascading Pencapaian Tujuan 4 .....	III-20
Gambar 3.14	Cascading Pencapaian Tujuan 5 .....	III-21
Gambar 3.15	Sasaran Utama Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 .....	III-31
Gambar 3.16	Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029.....	III-32
Gambar 3.17	Tema Pembangunan untuk Perwujudan Tujuan dan Sasaran RPJMK Lhokseumawe Tahun 2026-2030 .....	III-39





# BAB - I

## PENDAHULUAN

**RPJMK**  
**LHOKSEUMAWE**  
**TAHUN 2025-2029**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Ketentuan mengenai penyusunan RPJMD tersebut, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan dan merupakan pelaksanaan tahapan pertama RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yaitu Penguatan Modal Transformasi, dengan arsitektur perencanaan sebagaimana tergambar dibawah ini.

**Gambar 1.1 Tahapan RPJPK Lhokseumawe 2025-2045**



**Gambar 1.2 Arsitektur Perencanaan Pembangunan**



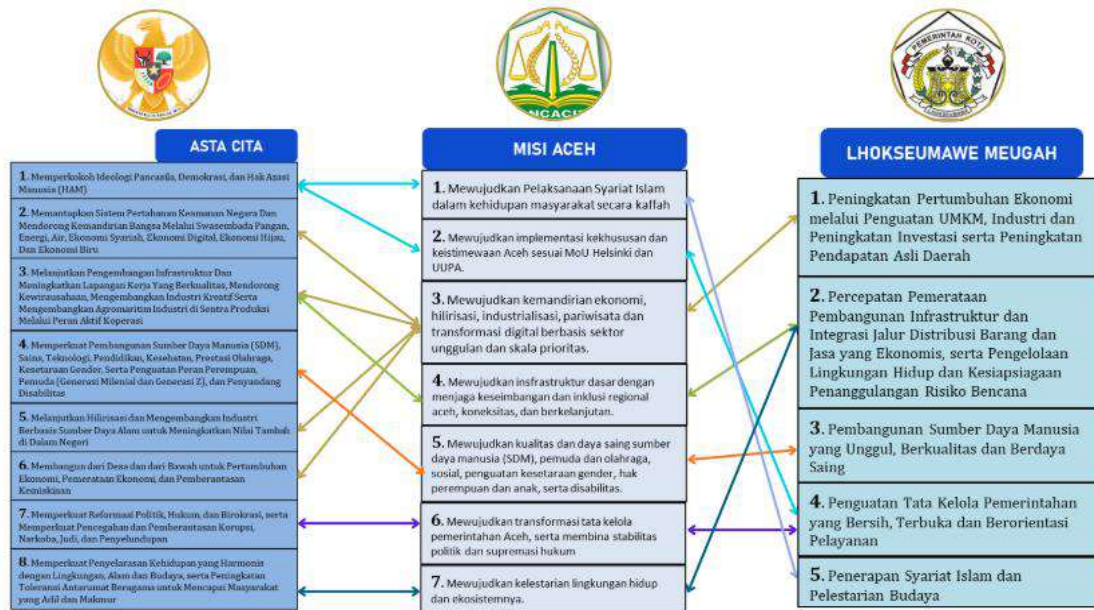
Dengan terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Dr. Sayuti Abubakar, SH.,MH sebagai Wali Kota dan Husaini, SE sebagai Wakil Wali Kota yang dilantik pada tanggal 18 Februari 2025 untuk periode tahun 2025-2030, maka dokumen teknokratik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disempurnakan sesuai dengan Visi, Misi dan Program prioritas dan arah kebijakan jangka menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan mempedomani kebijakan nasional, Misi Asta Cita yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan menjadikan Kota Lhokseumawe sebagai lokasi prioritas, dengan indikasi intervensi dalam arah pengembangan kewilayahan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun meliputi, 1) Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe melalui penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu, pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau, penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan dan penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan; 2) Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe (*sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, dan industri energi dat: green hydrogen*); 3) Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekada, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lhokseumawe (PHTC); 4) Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara; 5) Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe; dan 6) Pengembangan kota agropolitan Lhokseumawe.

RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Misi Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh, yaitu, 1) Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah; 2) Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA); 3) Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas; 4) Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan; 5) Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas; 6) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum; 7) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.



Gambar 1.3 Misi RPJMN, RPJMA dan RPJMK 2025-2029



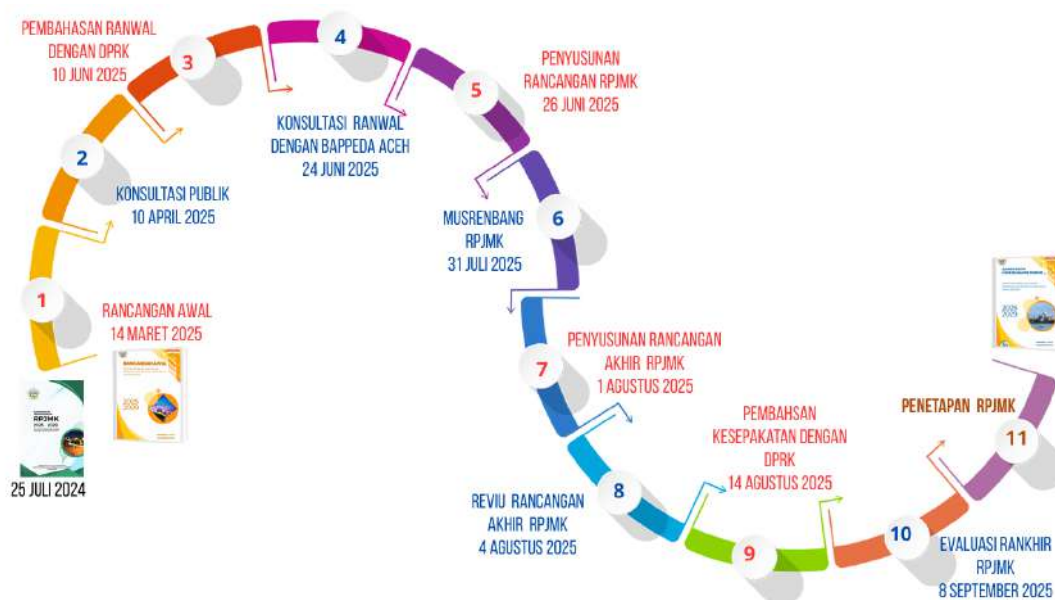
Penyusunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 berorientasi dengan menggunakan metode partisipatif, teknokratif, politis, serta top-down dan bottom-up, dengan berorientasi secara Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah serta melalui pendekatan spasial yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Selain itu dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 juga menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program strategis atau *money follow programme priority*.

Tahapan penyusunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik RPJMK dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kota, yang diselesaikan pada tanggal 25 Juli 2024 dan dilanjutkan dengan tahapan:

1. Pada tanggal 14 Maret 2025 dikeluarkan Surat Edaran Wali Kota Lhokseumawe Nomor 050/05/SE/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai dasar dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMK Lhokseumawe;
2. Konsultasi Publik RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 April 2025;
3. Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan DPRK Lhokseumawe pada tanggal 10 Juni 2025;

4. Konsultasi Rancangan Awal RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan Bappeda Aceh pada tanggal 24 Juni 2025;
5. Penyempurnaan dokumen Rancangan Awal menjadi Rancangan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 pada tanggal 26 Juni 2025;
6. Musrenbang Rancangan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 31 Juli 2025;
7. Penyempurnaan dokumen Rancangan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjadi Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 pada tanggal 1 Agustus 2025;
8. Reviu Inspektorat terhadap Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 pada tanggal 4 Agustus 2025;
9. Pembahasan dua pihak dengan DPRK dalam rangka persetujuan bersama anatar Wali Kota Lhokseumawe dan DPRK Lhokseumawe terhadap Rancangan Qanun tentang RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 pada tanggal 14 Agustus 2025;
10. Evaluasi Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 oleh Bappeda Aceh pada 8 September 2025; dan
11. Penetapan Qanun RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

**Gambar 1.4 Tahapan Penyusunan RPJMK Tahun 2025-2029**



## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045



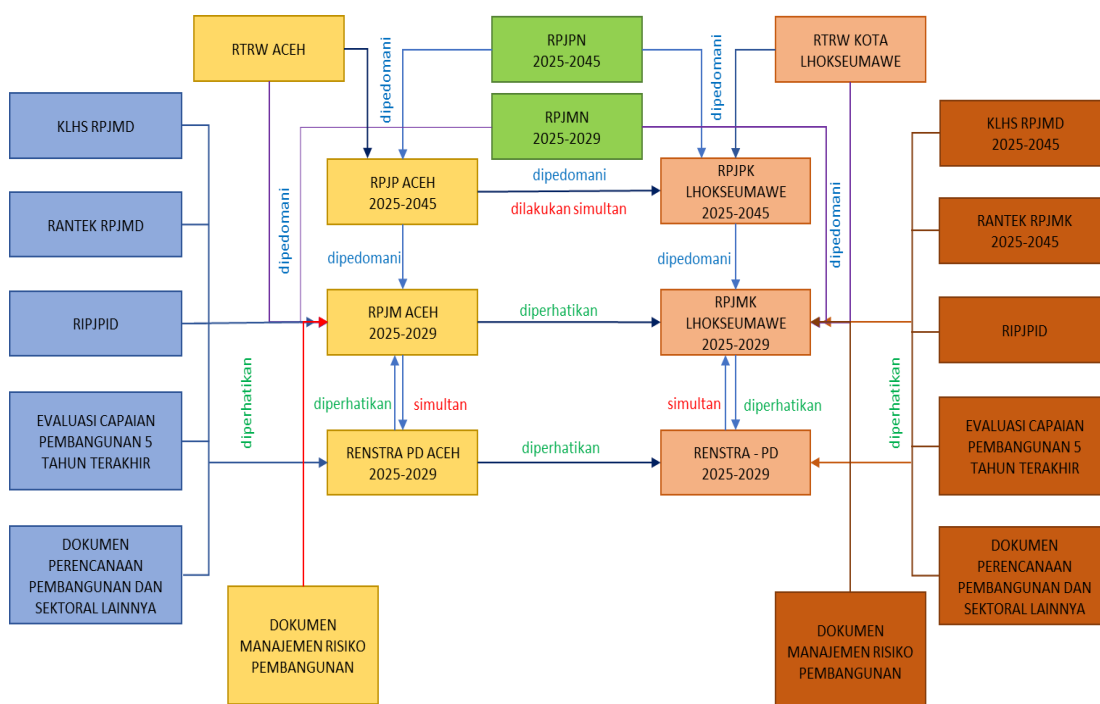
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
  16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
  19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
  20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
  21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
  22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
  23. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh tahun 2025-2045;

24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 2);
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Aceh, oleh karena itu RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani RPJMN Tahun 2025-2029 dan memperhatikan RPJM Aceh Tahun 2025-2029, disamping mempedomani pada RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044, serta hasil evaluasi RPJMK Lhokseumawe Tahun 2017-2022.

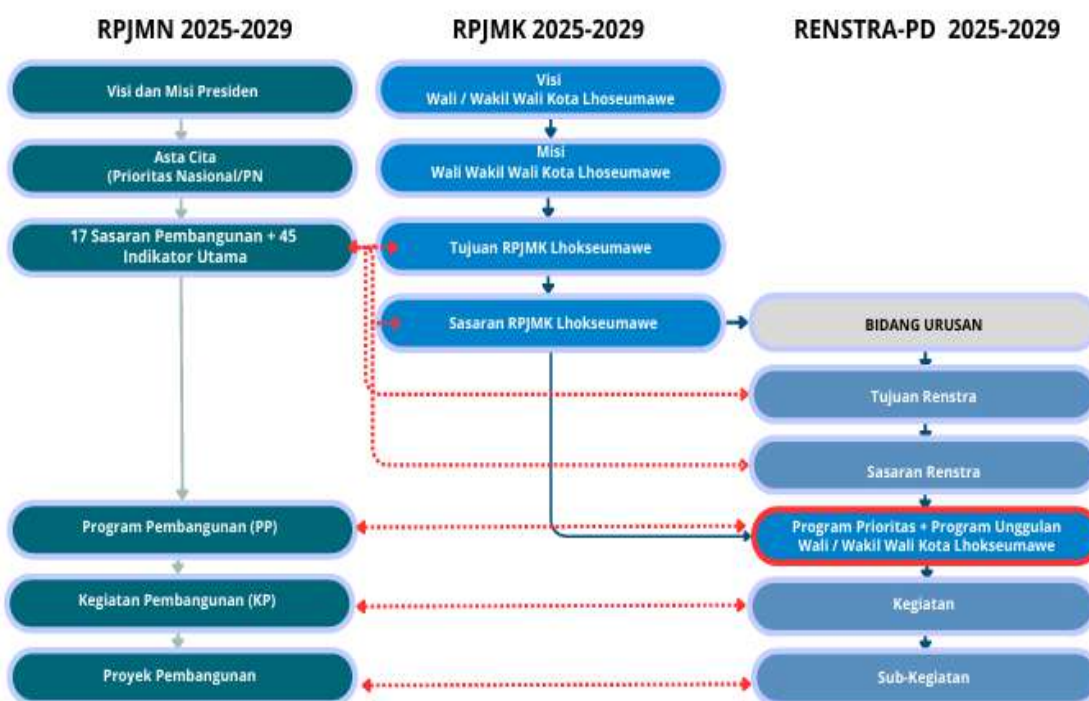
**Gambar 1.5 RPJMK Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen Lainnya**



#### 1.3.1 RPJMK Lhokseumawe dengan RPJMN 2025-2029

Penyusunan dokumen RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan mempedomani RPJMN 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Kota Lhokseumawe dengan RPJMN tersebut sesuai dengan kewenangan dan kondisi fiskal Kota Lhokseumawe.

**Gambar 1.6 Hubungan RPJMN dan RPJMK Tahun 2025-2029**



### 1.3.2 RPJMK Lhokseumawe dengan RPJM Aceh 2025-2029

RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dengan Visi Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berlanjutan. Selain itu juga memperhatikan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Lhokseumawe dengan tujuan dan sasaran dalam RPJM Aceh Tahun 2025-2029.

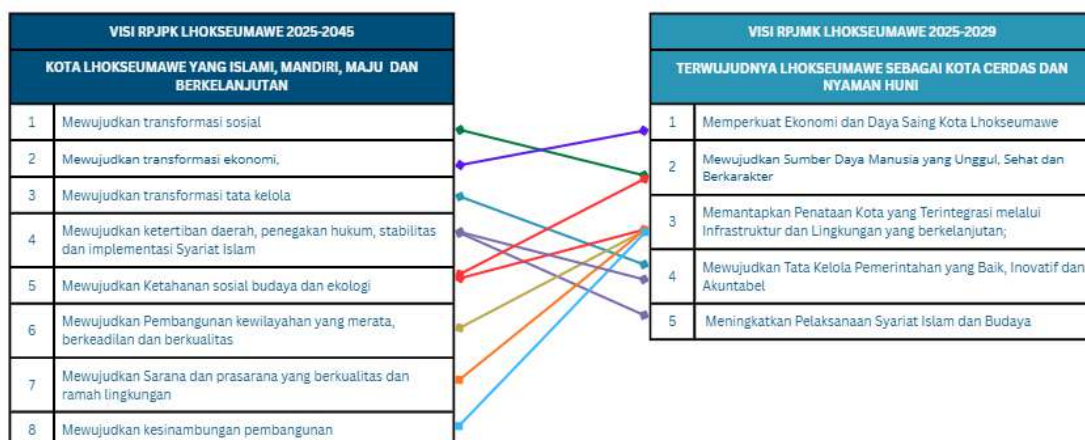
### 1.3.3 RPJMK Lhokseumawe RPJPK Lhokseumawe 2025-2045

Penyusunan dokumen RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 mempedomani dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang memiliki Visi Kota Lhokseumawe Yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan. RPJMK 2025-2029 merupakan tahapan pertama dalam RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 sehingga berperan sebagai fondasi dalam mewujudkan visi jangka panjang tersebut. Untuk itu, RPJMK 2025-2029 menjadi terjemahan operasional fase pertama dalam mencapai cita-cita jangka panjang Kota Lhokseumawe yang dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPK tahunan selama periode tahun 2025-2029.

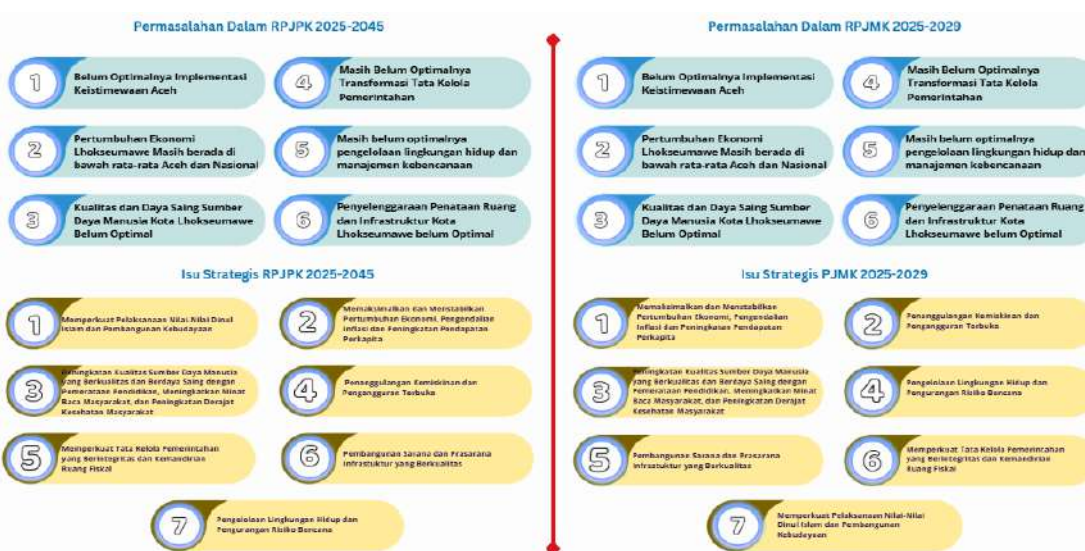
Dalam proses penyusunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 juga memperhatikan 39 (tiga puluh sembilan) Indikator Utama Pembangunan (IUP), 27 (dua puluh tujuh) Arah Kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045.



**Gambar 1.7** Penyelarasan Misi RPJMK Tahun 2025-2029 dengan RPJPK Tahun 2025-2045



**Gambar 1.8** Permasalahan dan Isu Strategis RPJPK 2025-2045 dan RPJMK Tahun 2025-2029



### 1.3.4 RPJMK Lhokseumawe dengan RTRW 2024-2044

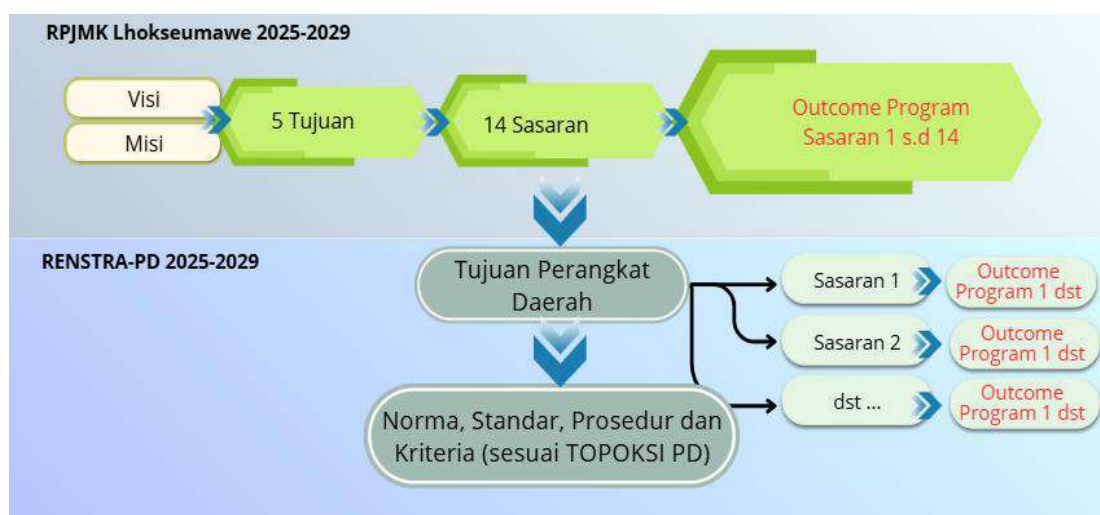
Penyusunan dokumen RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 berpedoman pada Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 dengan tujuan penataan ruang wilayah kota untuk mewujudkan ruang kota yang aman, produktif, nyaman, terpadu, religius dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip berwawasan lingkungan dan tangguh bencana melalui pengembangan potensi unggulan sebagai kawasan industri, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, pariwisata dan energi untuk mendukung perwujudan Pusat Kegiatan Strategis Nasional dan Kawasan Perbatasan Negara.

### 1.3.5 RPJMK Lhokseumawe dengan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari Visi, Misi Wali Kota/Wakil Wali Kota serta rencana pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMK sesuai dengan bidang pemerintahan, tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pengampu.

**Gambar 1.9 Hubungan RPJMK Tahun 2025-2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029**



### 1.3.6 RPJMK Lhokseumawe dengan RKPK

RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPK tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Dalam penyusunan RKPK, prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah diselaraskan dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMK. Target dan pagu indikatif program yang dalam RPJMK masih bersifat indikatif dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pada saat penyusunan RKPK.

## 1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arah pembangunan jangka menengah Kota Lhokseumawe pada periode tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama guna mewujudkan Visi, Misi dan Program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe secara berkesinambungan. Tujuan dari penyusunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai fondasi awal dalam mewujudkan Visi RPJP Nasional 2025-2045 “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”, RPJPA 2025-2045 “Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan” dan RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 “Kota Lhokseumawe Yang Islami, Mandiri, Maju Dan Berkelanjutan”.
2. Menjabarkan Visi, Misi dan Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah, melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.

3. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran pembangunan agar lebih efisien dan efektif, serta tepat sasaran dengan kebutuhan daerah;
4. Memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, menjaga kesinambungan antara satu periode kepemimpinan dengan periode berikutnya;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD;
6. Meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemerintahan;
7. Membangun sinergitas perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kota Lhokseumawe, Pusat , Provinsi Aceh.
8. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
9. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**BAB I - PENDAHULUAN** Menjelaskan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud, dan tujuan penyusunan RPJMK Lhokseumawe, serta sistematika penulisan.

**BAB II - GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** Menjelaskan tentang kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Subbab gambaran keuangan daerah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan gambaran kapasitas riil keuangan untuk pendanaan pembangunan dalam 5 tahun ke depan Kota Lhokseumawe serta memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir masa periode pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

**BAB III - VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE** Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran 5 tahun mendatang serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran 5 tahun mendatang.

**BAB IV - PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH** Menjelaskan program Perangkat Daerah selama 5 tahun mendatang dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan mengenai indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah selama 5 tahun mendatang .

**BAB V - PENUTUP** Menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.





# **BAB - II**

## **GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE**

**RPJMK  
LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2025-2029**

## BAB II GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE

### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota di Aceh yang terletak persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga Kota Lhokseumawe merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Kota Lhokseumawe tidak bersinggungan langsung dengan Ibu Kota Propinsi yaitu Kota Banda Aceh dan harus menempuh jarak kurang lebih 207 km untuk mencapainya. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya.

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

##### 2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi ditampilkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

##### 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 Km<sup>2</sup> atau 18.106 Ha. Kota Lhokseumawe berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 Kecamatan, 9 kemukiman dan 68 Gampong. Secara rinci Kecamatan dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

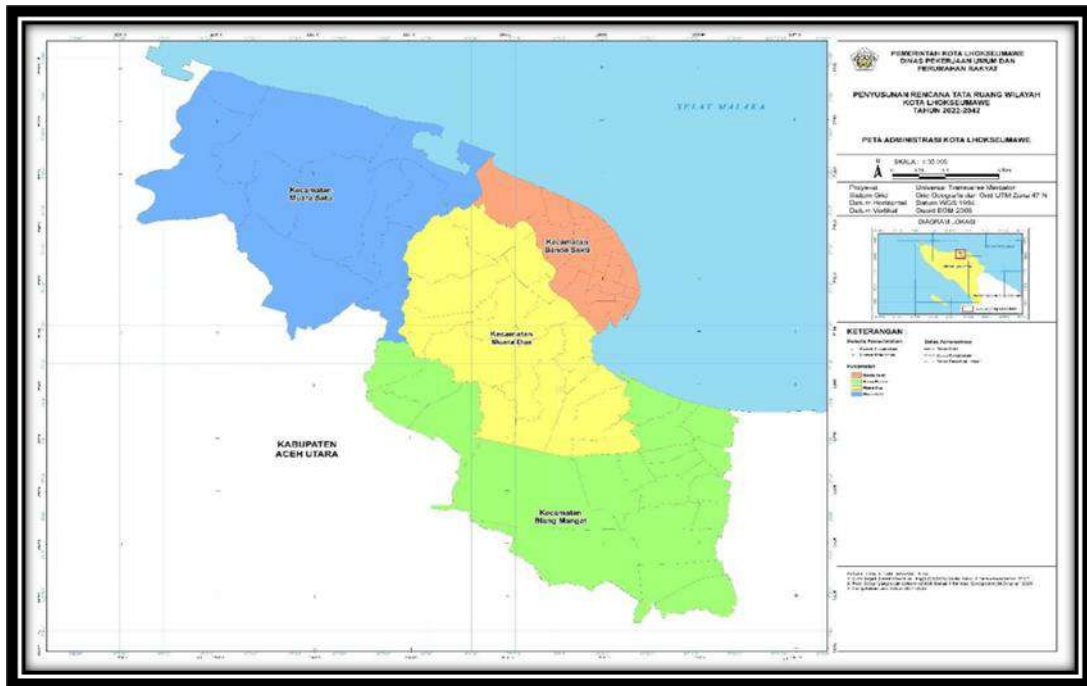
**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan**  
**Kota Lhokseumawe**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Banda Sakti	11.24	6.21
2	Muara Dua	57.80	31.92
3	Blang Mangat	56.12	31.00
4	Muara Satu	55.90	30.87
<b>Kota Lhokseumawe</b>		<b>181.06</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2025*

Kecamatan Muara Dua merupakan Kecamatan terluas yaitu dengan luas wilayah sebesar 57.80 km<sup>2</sup> atau 31.92% dari luasan Kota Lhokseumawe dan Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Banda Sakti yaitu seluas 11.24 km<sup>2</sup> atau sebesar 6.21% dari luasan Kota Lhokseumawe.

**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kota Lhokseumawe**



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

#### 2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Lhokseumawe terletak diantara  $04^{\circ}54'$  Lintang Utara  $05^{\circ}18'$  Lintang Selatan serta  $96^{\circ}20'$ - $97^{\circ}21'$  Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

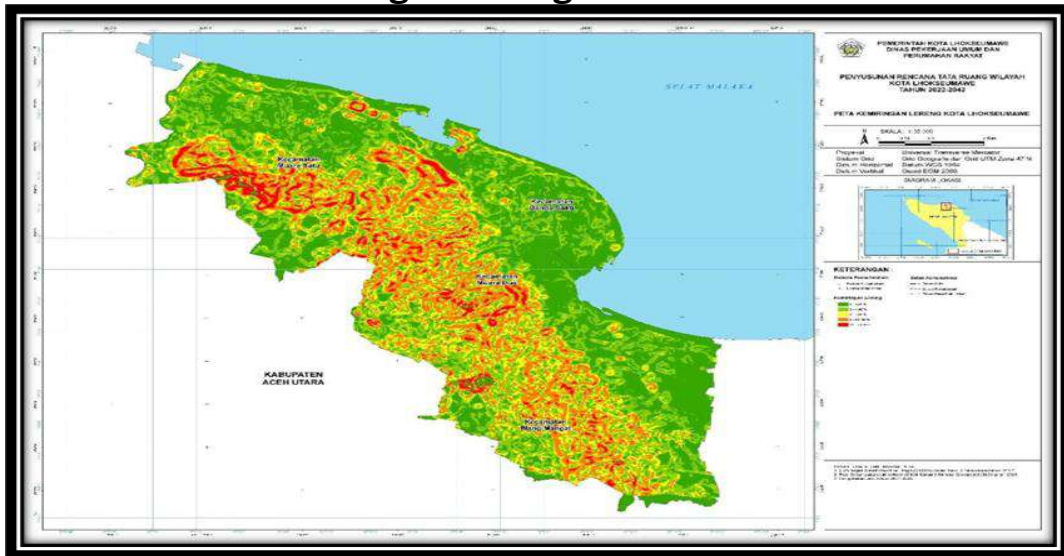
- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

#### 2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.



**Gambar 2.2**  
**Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe**

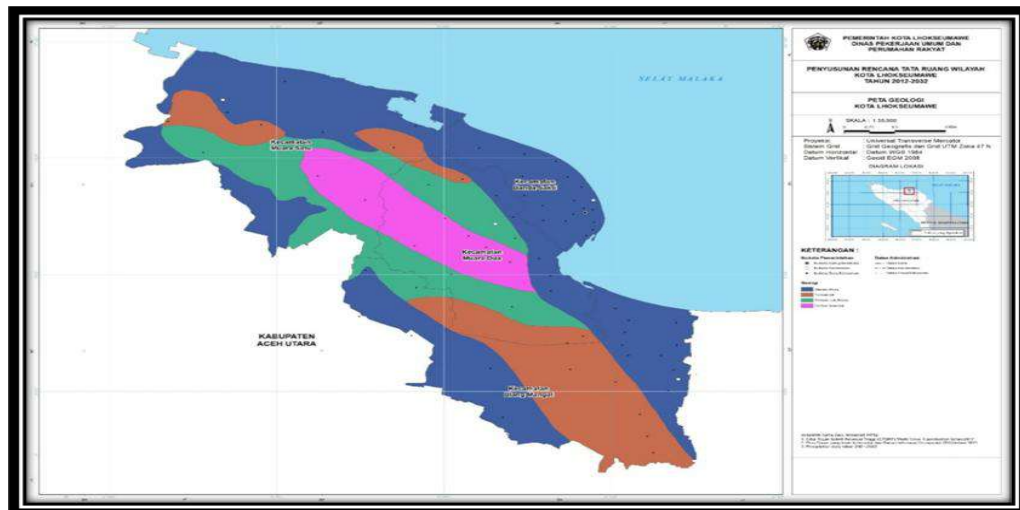


Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

#### 2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeue dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluvial berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeue berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

**Gambar 2.3**  
**Peta Geologi Kota Lhokseumawe**



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

#### **2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi**

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

##### **A. Air Tanah**

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Kota Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara

##### **B. Sungai**

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bagian cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Geukeuh dan Krueng Pase. Cakupan DAS Krueng Geukeuh meliputi seluruh Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu serta sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sedangkan cakupan DAS Krueng Pase meliputi sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.

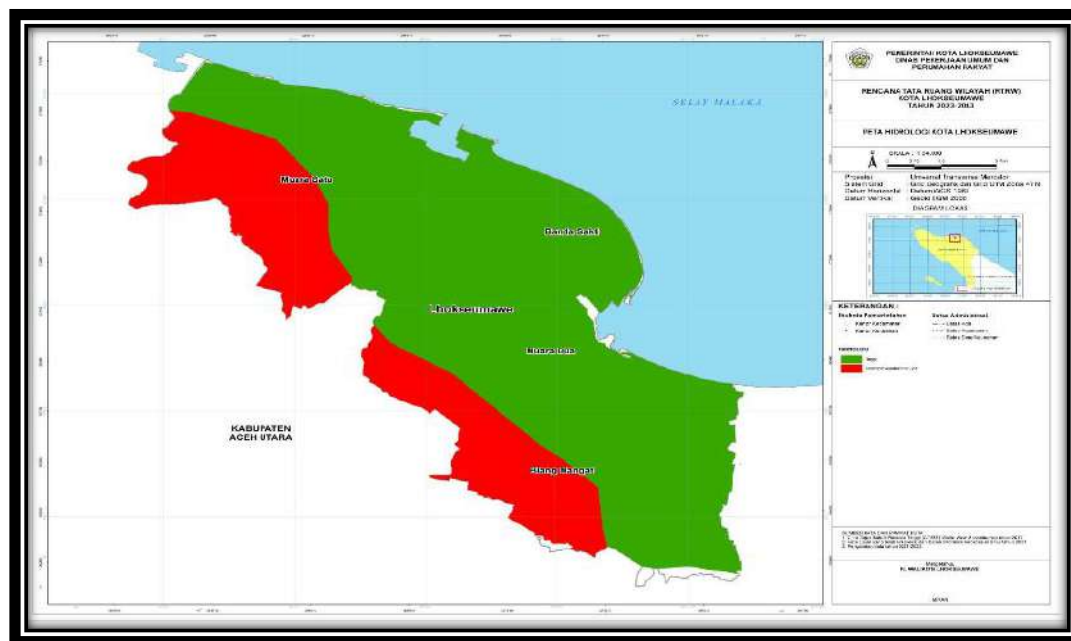
##### **C. Waduk**

Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, waduk Jeulikat, Seuneubok, Paya Itek, Lhok Kuaci, Mane Kareung dan rencana pengembangan waduk/embung lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.

##### **D. Cekungan Air Tanah**

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe terdiri dari Kabupaten Aceh timur seluas 114,35 Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 171,61 Ha, Bireun seluas 1.38 Ha dan Lhokseumawe seluas 15,34 Ha.

**Gambar 2.4**  
**Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe**



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

#### 2.1.1.1.6 Klimatologi

Iklm di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu dan angin atau penguapan. Kota Lhokseumawe memiliki iklim muson tropis (*Am*) dengan dua musim yang jelas, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara di Kota Lhokseumawe ini cenderung konstan antara 21°-34°C dengan rata-rata suhu udara antara 25°-27°.

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Bulan	Suhu Udara (°C)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata
1	Januari	21.2-32.4	26.5	21.2-32.4	26.5	22.8-30.8	26.2	19.70-32.40	26.30	21.6-33.2	26.8
2	Februari	21.0-32.5	26.5	21.0-32.5	26.5	22.8-30.4	25.9	20.80-31.80	26.50	22.2-34	27.7
3	Maret	21.0-33.8	27.4	21.0-33.8	27.4	23.2-31.0	25.9	20.00-33.20	27.10	21-34	28.2
4	April	22.5-33.6	27.3	22.5-33.6	27.3	23.3-31.3	26.6	21.20-33.80	27.90	23.5-34.6	29
5	Mei	23.2-33.1	27.2	23.2-33.1	27.2	23.7-32.1	27.1	22.40-34.20	28.20	24-35.3	28.7
6	Juni	23.1-32.9	27.1	23.1-32.9	27.1	23.2-31.4	26.5	22.60-33.80	27.90	22.5-35	28.3
7	Juli	21.4-32.8	26.7	21.4-32.8	26.7	23.8-32.0	27.2	22.80-33.60	28.00	22.6-35.2	28.3



		Suhu Udara (°C)									
No	Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata
8	Agustus	23.2-33.5	27.4	23.2-33.5	27.4	23.2-31.9	26.8	22.60-34.40	27.70	22.8-33.9	26.6
9	September	23.0-34.6	26.8	23.0-34.6	26.8	23.1-31.5	26.7	22.60-34.40	27.30	23-34.1	27.7
10	Oktober	22.6-33.7	27.0	22.6-33.7	27.0	23.3-30.4	26.1	22.60-32.50	26.80	22.6-33	27.2
11	November	22.9-32.0	26.2	22.9-32.0	26.2	23.2-29.7	25.8	22.60-33.00	26.50	23-32.6	26.7
12	Desember	21.9-31.7	25.7	21.9-31.7	25.7	22.6-29.2	25.3	23.40-32.40	26.70	22-32.2	26.8

*Sumber: BPS Lhokseumawe 2025*

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run off, maupun evaporasi. Tingkat hujan yang diukur dalam satuan 1 (satu) mm adalah air hujan setinggi 1 (satu) mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap. Pada tahun 2020 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan Mei dan Desember dengan hari hujan terbanyak 17 hari dan pada tahun 2024 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan November dengan hari hujan terbanyak mencapai 15 hari pada tahun 2024.

**Tabel 2.3**  
**Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Januari	20.5	3	20.5	3	129	9	171.40	16	33.8	7
2	Februari	48.5	3	48.5	3	296	14	52.90	11	7	3
3	Maret	34.5	3	34.5	3	61	11	35.00	9	23.9	4
4	April	44.5	6	44.5	6	112	9	26.60	4	88.5	4
5	Mei	287.5	17	287.5	17	62	7	165.70	13	154	7
6	Juni	150.5	9	150.5	9	182	11	161.90	15	135.3	8
7	Juli	160	7	160	7	31	4	41.90	9	69.5	3
8	Agustus	6.5	2	6.5	2	132	12	131.60	9	140.5	12
9	September	83.5	5	83.5	5	56	10	135.40	16	133.2	8
10	Oktober	41.5	6	41.5	6	359	17	173.30	24	72.6	13
11	November	151	11	150.5	11	271	15	241.70	23	297.8	15
12	Desember	455	17	455	17	379	22	342.70	22	132.3	13

*Sumber: BPS Lhokseumawe 2025*

Kelembaban udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Kandungan air pada suatu wilayah bisa memengaruhi kelembaban di udara. Semakin tinggi ketersediaan air di suatu tempat semakin tinggi pula kelembaban di wilayah tersebut. Kelembaban udara Lhokseumawe minimum pada tahun 2024 berkisar

49% sampai dengan 64%. Dan kelembaban udara maksimum berkisar sampai dengan 100% dengan tekanan udara berkisar 1008 sampai 1011.

**Tabel 2.4**  
**Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Bulan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara
1	Januari	73.3-86.8	1010.7	73.3-86.8	1010.7	61-98	1007.3	54-100	1011.40	58-100	1011.5
2	Februari	74.5-93.8	1011.5	74.5-93.8	1011.5	60-100	1005.9	58-100	1012.20	47-100	1011.9
3	Maret	76.0-87.3	1009.9	76.0-87.3	1009.9	65-99	1005.5	53-100	1013.90	51-100	1010.7
4	April	81.0-89.0	1010.0	81.0-89.0	1010.0	64-98	1005.8	44-100	1011.60	51-99	1008.4
5	Mei	78.8-95.0	1008.9	78.8-95.0	1008.9	50-98	1004.8	47-100	1011.90	52-100	1008.2
6	Juni	80.3-91.0	1008.9	80.3-91.0	1008.9	51-98	1005.5	52-100	1009.50	49-99	1009.5
7	Juli	70.8-90.8	1008.5	70.8-90.8	1008.5	51-98	1004.3	53-100	1009.90	51-100	1008.5
8	Agustus	77.5-90.3	1008.5	77.5-90.3	1008.5	50-99	1005.2	57-100	1011.40	53-100	1009.8
9	September	76.3-92.8	1009.2	76.3-92.8	1009.2	53-100	1005.3	53-100	1010.70	53-100	1008.9
10	Oktober	69.5-89.5	1008.6	69.5-89.5	1008.6	65-100	1006.7	61-100	1011.90	56-100	1010
11	November	81.3-95.8	1009.6	81.3-95.8	1009.6	67-100	1006.7	62-100	1011.00	64-100	1009.2
12	Desember	82.5-97.5	1010.0	82.5-97.5	1010.0	64-100	1006.4	56-100	1012.00	51-100	1009.5

*Sumber: BPS Lhokseumawe 2025*

#### 2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km<sup>2</sup> atau 18106 Ha dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budi daya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat.

**Tabel 2.5**  
**Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	2861,79	15,81
2.	Perdagangan dan Jasa	49,36	0,27
3.	Industri Besar	923,76	5,1
4.	Sawah	987,13	5,45
5.	Tambak	1595,3	8,81
6.	PPI	2,77	0,02
7.	Mangrove	12,86	0,07
8.	Sungai	80,48	0,44

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
9.	Pendidikan	0,6	0,003
10.	Perkantoran	14,35	0,08
11.	Kebun	11452,1	63,25
12.	Waduk	57,75	0,32
13.	Danau	16,6	0,09
14.	Lapangan Golf	51,14	0,28
Total		18106	100

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe 2025*

### 2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, mampu memberikan dampak positif bagi penduduk di sekitarnya, salah satunya dalam bidang perekonomian. Industri ekstraktif merupakan industri yang bahan baku diambil langsung dari alam. Kota Lhokseumawe memiliki potensi perekonomian sekitar meliputi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

#### A. Perikanan

Kota Lhokseumawe sebagai daerah pesisir memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Berdasarkan data aplikasi desktop validasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan total produksi perikanan tangkap Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 8.102.538 kg untuk non pelabuhan dan 4.866.229 kg untuk pelabuhan dengan total produksi perikanan tangkap sebesar 12.968.767 kg. Komoditas unggulan meliputi budidaya ikan lele, budidaya udang vaname, budidaya ikan bandeng, budidaya ikan mujair, budidaya ikan kerapu dan ikan kakap. Lokasi budidaya tersebar di seluruh pesisir pantai Kota Lhokseumawe, meliputi keramba jaring apung, tambak dan kolam yang ada di beberapa kecamatan di Kota Lhokseumawe yang meliputi Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.

Luas lahan tambak di Kota Lhokseumawe sebesar 8.558.000 m<sup>2</sup> dan tahun 2024 produksi perjenis pembesaran mencapai 2006,657 ton dengan jumlah produksi terbesar pada budidaya udang vaname sebesar 808,864 kg disusul dengan ikan lele sebesar 539,410 kg, kemudian ikan bandeng sebesar 271,272 kg, selanjutnya ikan nila sebesar 150,196 kg dan ikan mujair 129.025 kg, untuk ikan kerapu, ikan kakap dan udang windu dengan total 107,887 kg.

Untuk hasil perikanan Kota Lhokseumawe telah memiliki 31 (tiga puluh satu) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang merupakan usaha mikro dan kecil yang bergerak dibidang pengolahan ikan dan tersebar 4 kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. UPI ini berperan penting dalam perekonomian Kota Lhokseumawe terutama dalam sektor perikanan baik dari segi ekonomi maupun ketahanan pangan. Produk Olahan hasil kelautan dan perikanan Kota Lhokseumawe berupa teri kering dan ikan asin, kerupuk tuna, pempek ikan, keumamah, bileh crispy, nugget ikan, peyek udang, dendeng ikan, ikan gabus crispy, bandeng isi dan hasreng.



## **B. Pertanian**

Sebagai sebuah Kota, Lhokseumawe juga memiliki potensi kawasan pertanian di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu. Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Luas tanam pada tahun 2024 sebesar 1.586 ha dengan luas panen sebesar 1.326,31 Ha dan produksi padi sebesar 7.294,71 ton dengan produktivitas sebesar 5.5 ha.

## **C. Perkebunan**

Potensi Perkebunan Kota Lhokseumawe tersebar di beberapa kecamatan di Kota Lhokseumawe. Secara keseluruhan luas areal tanaman perkebunan sebesar 474 ha pada tahun 2023 dengan nilai produksi sebesar 7,912 ton. Produksi terbesar adalah kelapa sawit, diikuti tebu, kakao, dan kelapa.

### **2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
  1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lhokseumawe, meliputi:
    - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran;
    - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota;
    - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman;
    - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata;
    - e) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan; dan
    - f) Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR).
  2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Lhokseumawe, meliputi:
    - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan permukiman dan kegiatan perkantoran;
    - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan kawasan pendidikan;
    - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, Kawasan industri dan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
    - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan permukiman, Kawasan perkantoran dan kegiatan pertanian.
  3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kota Lhokseumawe, meliputi:

- a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata, kawasan permukiman, dan kegiatan perikanan;
  - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan campuran, kawasan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kawasan perkantoran;
  - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan perikanan budidaya;
  - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan, Kawasan industri dan kegiatan perkantoran; dan
  - e) Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
    - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
    - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
    - c) Rehabilitasi Jalan;
    - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional,
    - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota,
    - f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi,
    - g) peningkatan status jalan nasional pada ruas jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe;
    - h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota,
    - i) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
    - j) Rencana umum (masterplan) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
    - k) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
    - l) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan line pipa di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
    - m) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe yang merupakan kewenangan nasional di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;

- n) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses KEK Arun di Kecamatan Muara Satu;
  - o) Pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
  - p) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
  - q) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
  - r) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
  - s) Pengembangan terminal penumpang tipe A Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
  - t) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti;
  - u) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi di Kota Lhokseumawe;
  - v) Pengembangan Terminal Barang Kota Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua;
  - w) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
  - x) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
  - y) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) pengembangan terminal khusus Migas V di Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
  - b) Pengembangan Terminal khusus Energi Listrik II Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti; dan
  - c) Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujong Blang di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
- a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
    - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
    - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe;
  - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.
2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
- a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:



- 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
  - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
  - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
- b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
- 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
  - 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan
  - 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
- c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu;
- d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
- 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
  - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan tetap, meliputi:
    - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di Kota Lhokseumawe;
    - b) Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan Menara di Kota Lhokseumawe;
    - c) Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel di Kota Lhokseumawe; dan
    - d) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
  2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua;
  3. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:
    - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe;
    - b) Kajian pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital di Kota Lhokseumawe;
    - c) Kajian Pembangunan menara BTS di Kota Lhokseumawe;

- d) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe; dan
- e) Pembangunan menara bersama di Kota Lhokseumawe;
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
  - 1. Perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
    - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua;
    - b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
    - c) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
  - 2. Perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
    - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe; dan
    - b) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.
  - 3. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
    - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
    - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
    - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
    - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
    - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
    - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
  - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
    - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
    - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
    - c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM di Kota Lhokseumawe;
    - d) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;
    - e) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
      - 1) pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;

- 2) pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
  - 3) pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
  - 4) pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
  - f) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
- a) Penyusunan Masterplan Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
  - b) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kota Lhokseumawe;
  - c) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;
  - d) Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Lhokseumawe;
  - e) Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah di Kota Lhokseumawe;
  - f) Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
  - g) Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
  - h) Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe;
  - i) Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
- a) Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat;
  - b) Penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat; dan
  - c) Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
- a) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat;
  - b) Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;

- c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
  - d) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
  - e) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (*gerobak, dump truck, amroll truck, bulldozer*) di Kota Lhokseumawe;
  - f) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
  - g) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) Penyediaan jalur evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe;
  - b) Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe; dan
  - c) Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
  - b) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
    - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
    - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
    - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
    - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
    - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
    - 6) Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan di Kota Lhokseumawe; dan
    - 7) Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer di Kota Lhokseumawe.
  - c) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
    - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
    - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
  - d) Perwujudan Jaringan Drainase, meliputi:
    - 1) Pemeliharaan jaringan drainase Tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan



- 2) Peningkatan jaringan drainase Tersier di Kota Lhokseumawe.
7. Penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
  - a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
  - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
  - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.

#### **2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam dokumen KLHS RPJM Kota Lhokseumawe telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Lhokseumawe tahun 2023 dijelaskan bahwa tutupan lahan menjadi bagian penting dari jasa ekosistem, dikarenakan perbedaan jenis tutupan lahan akan memberi pengaruh terhadap besarnya nilai jasa yang dihasilkan oleh suatu ekosistem, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, gunung atau hutan bahkan lahan budidaya manusia.

Hasil analisis Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Lhokseumawe berbasis jasa ekosistem bersifat indikatif, yakni digunakan dalam menggambarkan suatu wilayah atau lokasi sebagai informasi awal dari proses kebijakan terkait alokasi atau penyediaan lokasi untuk tujuan tertentu yang bersifat sementara dalam menuju situasi pasti (definitif). DDDT LH jasa ekosistem digunakan untuk mendapatkan gambaran potensi jasa ekosistem di suatu wilayah tertentu dengan pendekatan keruangan yang melibatkan unsur-unsur fisik dan lahan di wilayah tersebut.

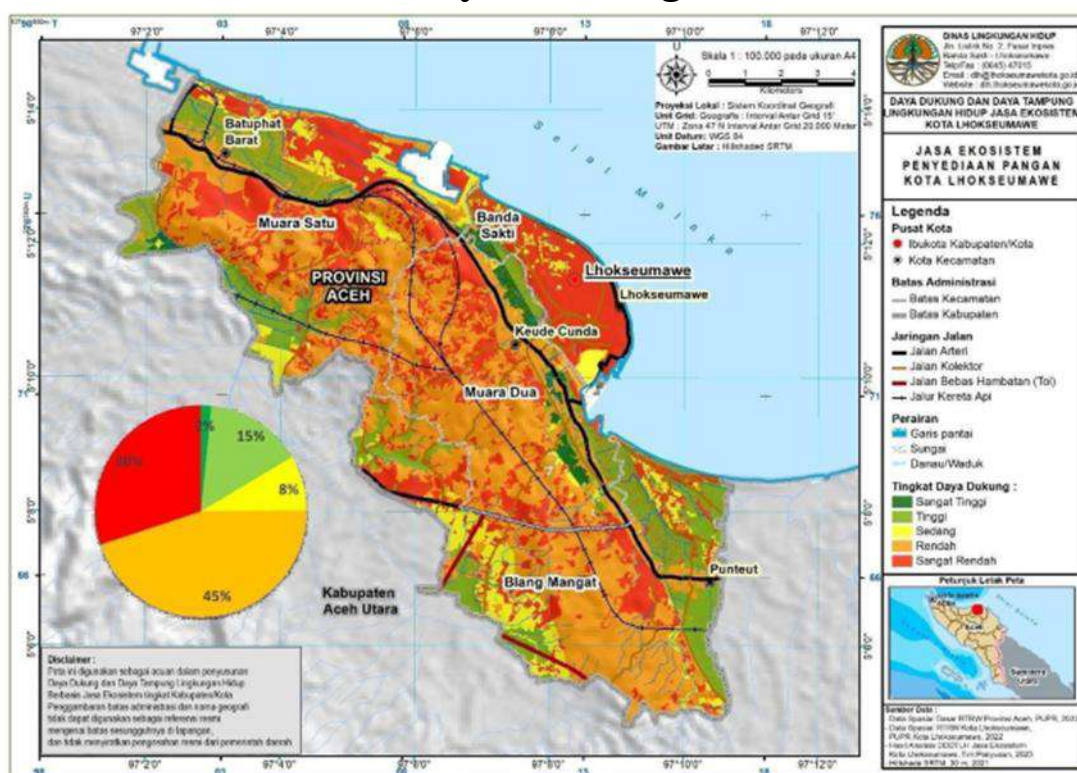
##### **2.1.1.4.1 Daya Dukung Pangan**

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem penyedia pangan berkaitan dengan segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati berupa tumbuhan dan hewan, termasuk didalamnya ikan. Jasa ekosistem penyedia pangan menjadi

penting karena memiliki manfaat sebagai penyedia makanan dan minuman bagi konsumsi manusia.

Jasa ekosistem penyedia pangan dapat berasal dari banyak sumber, diantaranya adalah hasil pangan pertanian, hasil perkebunan, hasil laut dan perikanan darat, hasil peternakan, serta hasil hutan. Hasil pangan dari sumber-sumber tersebut dapat berupa beras, jagung, ketela, ikan, telur, daging, buah-buahan, sayur-mayur, dan segala jenis bahan makanan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari tanaman dan hewan. Budidaya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun dari hasil hutan menjadi aktivitas utama untuk penyediaan pangan.

**Gambar 2.5**  
**Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Lhokseumawe**



Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2025

Suatu ekoregion memiliki karakteristik fisik tertentu yang menyebabkan variasi potensi pangan. Dataran aluvial sesuai untuk pertanian lahan basah seperti persawahan, daerah berbukit dan pegunungan dapat dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering (hortikultura dan perkebunan) dan sebagainya. Tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering sangat tergantung kepada karakteristik iklim dan karakteristik tanah. Alih fungsi lahan pertanian lahan sawah seperti sawah menjadi permukiman dan kawasan perdagangan dapat memberikan tekanan terhadap penurunan jasa penyediaan pangan. Peta jasa ekosistem penyediaan pangan Kota Lhokseumawe disajikan pada gambar di atas.

Berdasarkan hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, potensi jasa ekosistem

penyediaan pangan di Kota Lhokseumawe memiliki indeks yang Rendah, yakni 2,36. Luas jasa ekosistem penyediaan pangan di masing-masing kecamatan di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.6**  
**Luas Jasa Penyediaan Pangan Per Kecamatan Kota Lhokseumawe**

Kecamatan	Jasa Penyediaan Pangan (Ha)					Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Banda Sakti	34,50	29,13	132,31	86,55	840,20	1.102,69
Blang Mangat		953,04	545,10	2.050,57	919,65	4.468,35
Muara Dua	137,59	262,84	56,16	1.762	807,82	3.026,41
Muara Satu	37,82	730,55	383,79	2.114,51	1.436,24	4.702,91
<b>Lhokseumawe</b>	<b>209,91</b>	<b>1.975,56</b>	<b>1.117,36</b>	<b>5.993,62</b>	<b>4.003,90</b>	<b>13.300,36</b>

*Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2025*

Tabel diatas memberikan informasi bahwa jasa ekosistem penyediaan pangan yang tergolong Sangat Tinggi seluas 209,91 Ha (1,58%), Tinggi seluas 1.975,56 Ha (14,85 %), dan Sedang seluas 1.117,36 Ha (8,40%) dari total luas Kota Lhokseumawe. Sementara sisanya tergolong ke dalam jasa penyediaan pangan Rendah seluas 5.993,62 Ha (45,06 %) dan Sangat Rendah seluas 4.003,90 Ha (30,10%). Beberapa kecamatan berdasarkan luas yang memilikipotensi penyedia pangan Sangat Tinggi adalah Kecamatan Muara Dua dengan luas mencapai 137,59 Ha (4,55%). Selanjutnya, kecamatan yang memiliki potensi jasa lingkungan Tinggi adalah Kecamatan Blang Mangat dengan luasan 953,04 Ha (21,33%). Kecamatan yang memiliki potensi jasa ekosistem penyediaan pangan Rendah dan Sangat Rendah berdasarkan luas adalah Kecamatan Muara Dua, yakni 1.762,00 Ha (58,22%) dan Banda Sakti 840,20 Ha (76,20%) dari luas wilayah kecamatannya.

Berdasarkan arahan rencana pola ruang Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan di Kota Lhokseumawe dengan luas ±927,09 Ha terletak di kecamatan: (1) Blang Mangat ±610,56 Ha, (2) Muara Satu dengan luas ±256,11 Ha dan (3) Muara Dua dengan luas ±60,42 Ha. Begitupula halnya dengan rencana pola ruang kawasan perkebunan rakyat seluas ±1.645 Ha yang diarahkan pada ketiga kecamatan tersebut dengan rincian di Kecamatan Blang Mangat berada pada 18 gampong, di Kecamatan Muara Satu berada pada 7 gampong dan di Kecamatan Muara Dua berada pada 12 gampong .

Berdasarkan hasil analisis DDDT LH jasa ekosistem penyediaan pangan, pengembangan kawasan pertanian disarankan untuk diarahkan pada Kecamatan Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat karena potensi jasa ekosistem penyediaan pangan di wilayah tersebut kategori Sangat Tinggi dan Tinggi. Untuk wilayah dengan potensi jasa ekosistem penyediaan pangan karegori Rendah dan Sangat Rendah, yaitu Kecamatan Banda Sakti perlu melakukan langkah-langkah intensifikasi lahan pertanian dan diversifikasi pangan.

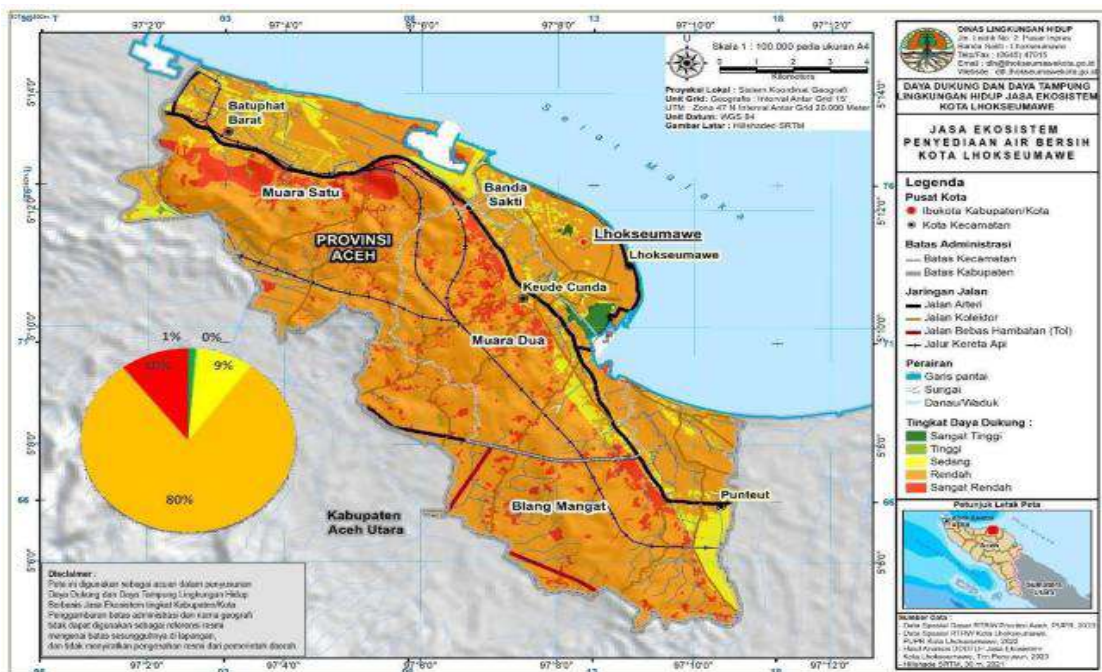


### 2.1.1.4.2 Daya Dukung Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan maupun air tanah bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion bentanglahan. Ketersediaan air bersih di suatu wilayah bergantung kepada pasokan dan cadangan air tanah dan permukaan. Karakteristik tanah mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan meng-alirkan air. Jenis batuan tiap ekoregion Kota Lhokseumawe akan menggambarkan potensi akuifer atau impermeable layer. Hal ini berpengaruh untuk penyerapan air hujan ke dalam tanah.

Ekoregion Kota Lhokseumawe yang berupa lembah antar perbukitan (8%), dataran aluvial (17%), dataran fluviomarin (19%) merupakan ekosistem yang potensial sebagai jasa penyedia air bersih. Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan menyediakan air bersih melalui sungai-sungai yang berasal dari lembah lipatan. Sementara dataran aluvial memiliki sistem akuifer yang baik, di mana air hujan atau air sungai menembus lapisan sedimen dan tersimpan sebagai cadangan air tanah sehingga dataran aluvial menjadi sumber air yang penting bagi kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan konsumsi manusia. Hujan yang tercurah di Kota Lhokseumawe ditampung dalam Cekungan Air Tanah, yang menjadi potensi sumber air paling utama yang airnya mengalir sepanjang tahun dan memenuhi sumur bor penduduk. Potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Lhokseumawe digambarkan pada peta di bawah ini.

**Gambar 2.6**  
**Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Lhokseumawe**



Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2025



Potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Lhokseumawe terdistribusi dari kategori Sangat Rendah sampai Sangat Tinggi. Jasa penyediaan air bersih yang Sangat Tinggi (hijau tua) berada pada wilayah pesisir dengan penggunaan lahan berupa waduk, kolam, sungai, saluran air, kuala/laguna dan empang dengan vegetasi alami berupa hutan pantai, hutan terna air tawar dan hutan terna tepian sungai payau. Sedangkan jasa ekosistem penyediaan air bersih Sangat Rendah (merah) berada pada kawasan peralihan fluvioarin dengan penggunaan lahan dominan berupa permukiman, lahan terbangun non-permukiman, lahan terbuka dan semak belukar dengan vegetasi hutan dipterokarpa pamah. Pada peta juga dapat dilihat bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih yang dominan adalah kategori Rendah (jingga) yang berada pada bentang lahan perbukitan lipatan dan dataran fluvio-marin, penggunaan lahan berupa semak belukar dan vegetasi hutan dipterokarpa pamah dan non- pamah. Kategori Rendah ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe. Luas jasa penyediaan air bersih perkecamatan di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.7**  
**Luas Jasa Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan**  
**Kota Lhokseumawe**

Kecamatan	Jasa Penyediaan Pangan (Ha)					Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Banda Sakti	94,06	1,02	163,69	807,72	36,21	1.102,69
Blang Mangat	2,87	6,32	315,83	3.786,03	357,31	4.468,35
Muara Dua	27,04	11,67	185,45	2.445,93	356,31	3.026,41
Muara Satu	22,55	23,16	477,69	3.543,33	636,18	4.702,91
<b>Lhokseumawe</b>	<b>146,51</b>	<b>42,17</b>	<b>1.142,66</b>	<b>10.583,01</b>	<b>1.386,01</b>	<b>13.300,36</b>

*Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2025*

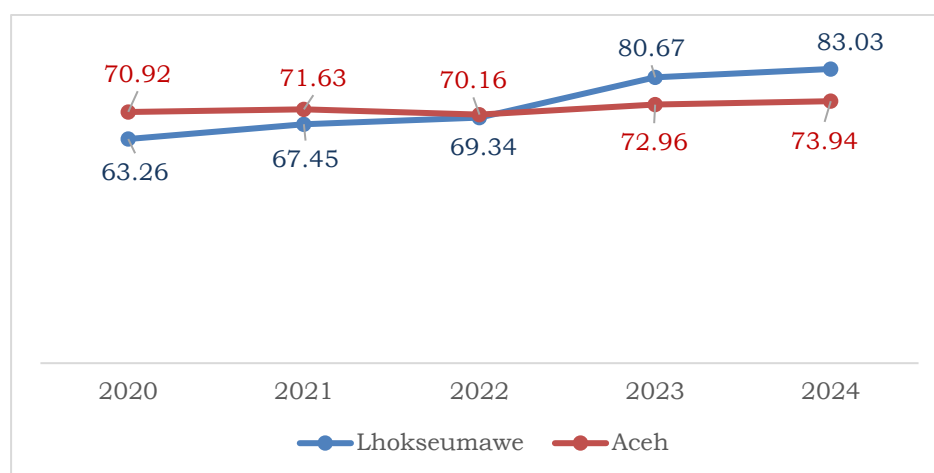
Tabel diatas memberikan informasi bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih yang tergolong Sangat Tinggi seluas 146,51 Ha (1,10%), Tinggi seluas 42,13 Ha (0,32 %), dan Sedang seluas 1.142,66 Ha (8,59%) dari total luas Kota Lhokseumawe. Sementara sisanya tergolong ke dalam jasa penyediaan air bersih Rendah seluas 10.583,01 Ha (45,06 %) dan Sangat Rendah seluas 1.384,19 Ha (30,10%). Jasa penyediaan air kategori Sangat Tinggi seluas 94,06 Ha (8,53%) terbesar berada di Kecamatan Banda Sakti dengan penggunaan lahan waduk dan saluran air. Sementara jasa penyediaan air kategori Tinggi seluas 23,16 Ha (0,49%) terbesar berada di Kecamatan Muara Satu, namun potensi jasa ekosistem penyedia air kategori Sangat Rendah dengan luasan mencapai 636,18 Ha (13,53%) juga berada di kecamatan Muara Satu, terutama pada lahan dengan penggunaan berupa permukiman kepadatan tinggi dan lahan terbuka. Kecamatan yang memiliki potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih Rendah berdasarkan luas adalah Kecamatan Blang Mangat mencapai 3.786,03 Ha (84,73%) dari luas wilayahnya.

### 2.1.1.5 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

#### 2.1.1.5.1 Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

**Gambar 2.7**  
**Indeks Ketahanan Pangan Aceh dan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**



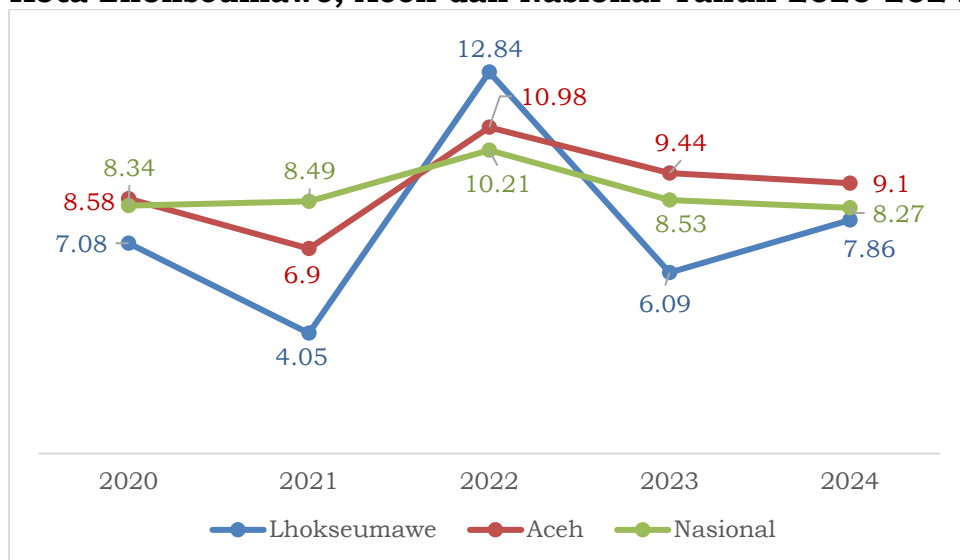
Sumber: DKPPP Lhokseumawe, 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar 83.03, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020-2023, dan menjadi Indeks Ketahanan Pangan tertinggi selama 5 tahun terakhir. Meningkatnya Angka Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe dikarenakan aspek ketersediaan yaitu meningkatnya produksi komoditas khususnya padi. Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 63.26 berada dibawah IKP Aceh sebesar 70.92. Sedangkan tahun 2023-2024 IKP Kota Lhokseumawe meningkat dan berada di atas IKP Aceh.

#### 2.1.1.5.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada gambar berikut dapat dilihat prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional tahun 2020-2024.

**Gambar 2.8**  
**Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan**  
**Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Nasional, 2025

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 7.08 persen berada dibawah Aceh sebesar 8.58 dan Nasional sebesar 8.34 dan pada tahun 2024 Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 7.86 persen dan masih di bawah Aceh yang sebesar 9.10 persen dan Nasional sebesar 8.27 persen.

### 2.1.1.5.3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe bersumber dari PDAM Ie Beusare Rata Lhokseumawe, PDAM Tirta Mon Pase milik Aceh Utara, air sumur dalam terlindungi maupun sumur gali dan sumur bor.

**Tabel 2.8**  
**Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga terhadap Konsumsi**  
**Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	1.896	1.954	2.419	2.350	2.349
2	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mon Pase	4.778	4.942	4.848	4.936	5.023
3	Sumur dalam terlindungi	-	148	148	148	538
4	Jumlah Rumah Tangga	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315
<b>Persentase</b>		<b>16.01</b>	<b>16.63</b>	<b>16.88</b>	<b>16.34</b>	<b>17.07</b>

Sumber : PUPR Kota Lhokseumawe, 2025

Persentase jumlah rumah tangga terhadap konsumsi air minum Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 masih stagna di 16 persen, hal ini di karenakan Kota Lhokseumawe yang tidak memiliki sumber air baku. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Lhokseumawe juga melakukan penyediaan Air Minum melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/sumur dalam terlindungi/sumur pompa yang diakses melalui perpipaan sambungan rumah yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan penyediaan SPAM secara optimal dalam hal ini PDAM Ie Besare Rata bekerjasama dengan PT Toya Perdana Lhokseumawe membangun proyek jaringan SPAM yang menggunakan teknologi pengolahan air minum yang aman dikonsumsi langsung baik bagi kesehatan keluarga dan ramah lingkungan. Proyek SPAM Lhokseumawe diharapkan menjadi pionir dalam pengembangan dan penyediaan solusi infrastruktur air minum berkualitas tinggi yang unggul dan berkelanjutan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.

Jaringan SPAM Siap Minum Kota Lhokseumawe dengan target pelanggan sebanyak 22.137 pelanggan domestik dan non domestik, yang pada tahun pertama dengan target sebanyak 7.884 pelanggan, tahun kedua dengan target 7.051 pelanggan dan tahun ketiga sebanyak 7.202 pelanggan dengan area pelayanan di 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.9**  
**Tahapan Area Pelayanan Jaringan Perpipaan Siap Minum**  
**Kota Lhokseumawe**

Kecamatan	Total Property Area Layanan	Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3	
		Domestik	Non Domes tik	Domestik	Non Domes tik	Domestik	Non Domes tik
Banda Sakti	10.113	5.783	2.101	1.158	1.071		
Blang Mangat	1.666					1.467	199
Muara Dua	5.177			3.934	888	231	124
Muara Satu	5.181					3.454	1.727
<b>Total</b>	<b>22.137</b>	<b>5.783</b>	<b>2.101</b>	<b>5.092</b>	<b>1.959</b>	<b>5.152</b>	<b>2.050</b>
			<b>7.884</b>		<b>7.051</b>		<b>7.202</b>

Sumber : PT. Aceh Water, 2025

### 2.1.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas

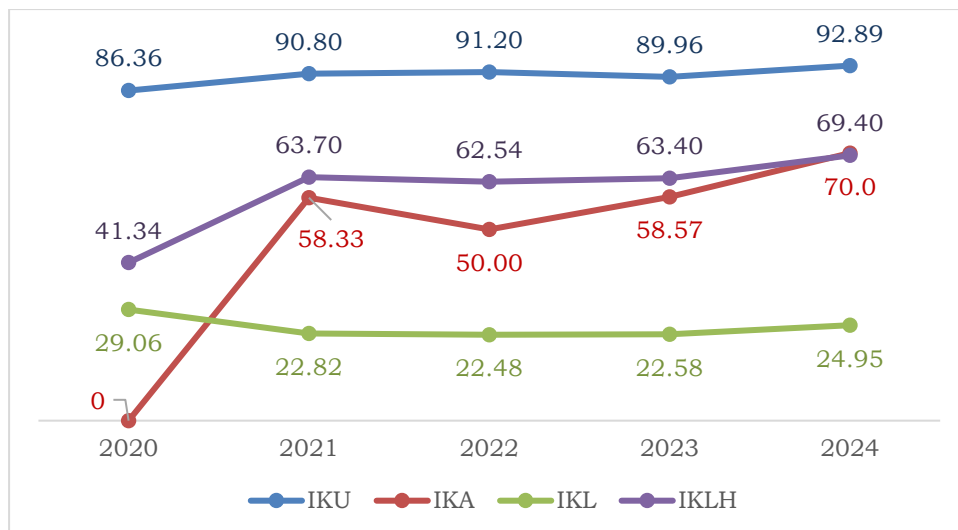
#### 2.1.1.6.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO<sub>3</sub>-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah:

**Gambar 2.9**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH)**  
**Tahun 2020-2024**

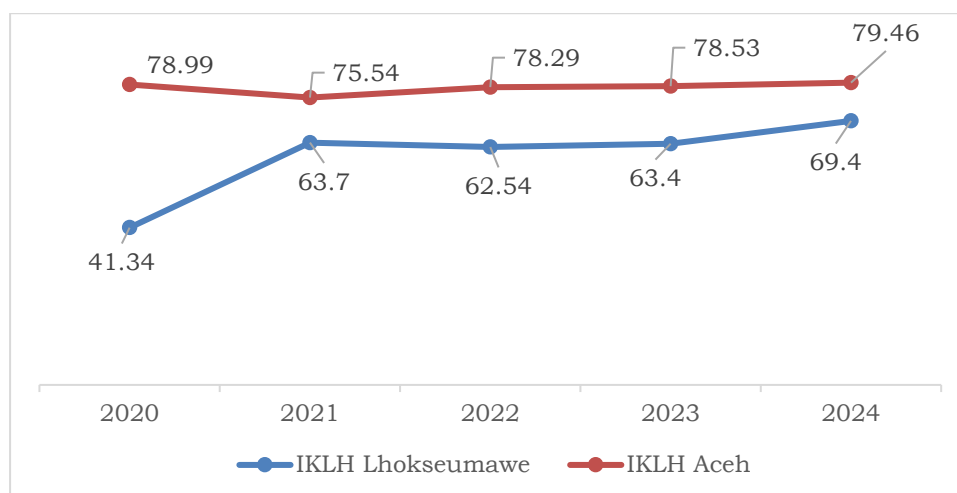


Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025

Dari Gambar di atas Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk hal ini disebabkan karena tidak dilakukannya dalam komponen IKLH secara keseluruhan. Pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 63.4 dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi 69,40. Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 89.96 tahun 2023, pada Tahun 2024 meningkat menjadi 92.89. Untuk Indeks Kualitas Air pada Tahun 2023 sebesar 58.57 dan tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 70.00. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 22.58 pada tahun 2023. Dan sedikit meningkat menjadi 24.95 di Tahun 2024.

Perkembangan negatif dari Indeks kualitas lahan Kota Lhokseumawe terjadi karena luasan tutupan lahan Kota Lhokseumawe yang mengalami pengurangan dalam dokumen RTRW Lhokseumawe 2024-2044. Faktor yang menyebabkan Kota Lhokseumawe mengalami degradasi kualitas lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari hutan atau pertanian menjadi area terbangun, penggundulan hutan atau perkebunan/pertanian untuk keperluan pertambangan, abrasi tanah, pencemaran tanah dan perubahan iklim.

**Gambar 2.10**  
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020 s.d 2024**



Sumber: DLHK Aceh, 2025

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2020 sebesar 41,34 berada jauh dibawah IKLH Aceh sebesar 78,99. IKLH Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan dan menjadi 69,40 pada tahun 2024 namun masih berada dibawah IKLH Aceh sebesar 79,46.

#### **2.1.1.6.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan persentase sampah yang berhasil diolah dan dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah yang tidak terolah menunjukkan sampah yang tidak dapat diolah dan memerlukan pembuangan akhir. Sampah terolah dapat berupa hasil daur ulang, kompos, atau energi dari sampah.

Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih memerlukan perhatian khusus dikarenakan TPA Alue Lim yang terletak di gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat menjadi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Lhokseumawe masih dengan sistem *open dumping*, telah mendapat peringatan untuk ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Lhokseumawe dan mencegah ditutupnya TPA Alue Lim, pada tahun 2025 melalui pendanaan yang bersumber dari Otonomi Khusus Aceh Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pengadaan 1 paket Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah menjadi Energy Terbarukan yang diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah dan dapat menciptakan nilai tambah dari barang yang tidak berguna menjadi energy terbarukan.

Menangani sampah memerlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota perlu memperkuat infrastruktur (armada, TPS, TPA yang dikelola baik), menegakkan regulasi (Qanun No. 9 Tahun 2015), dan terus menggalakkan edukasi. Namun, peran aktif masyarakat adalah kunci: memilah sampah dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah seperti Bank Sampah. Dengan fokus pada

transformasi tata kelola, peningkatan kesadaran lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan penegakan hukum, Kota Lhokseumawe berupaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

#### **2.1.1.6.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

Layanan penuh pengelolaan sampah mencakup semua aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Layanan ini juga mencakup upaya untuk mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat, seperti kompos atau energi. Kondisi sistem pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe masih dengan paradigma klasik yaitu kumpul, angkut dan buang dan bahkan ada sebagian yang dibakar di lingkungan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk diharapkan pengelolaan persampahan secara terpadu akan lebih optimal. Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA di Kota Lhokseumawe berada pada Gampong Alue Lim masih dioperasikan secara *open dumping*, perlu dukungan semua unsur dan kalangan untuk ditingkatkan menjadi *sanitary landfill* atau melalui pengelolaan sampah menjadi energy yang terbarukan. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

**Tabel 2.10**  
**Proporsi rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga yang dilayani	400	410	415	425
2	Jumlah Rumah Tangga	42.354	43.930	45.504	46.315
3	Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	<b>0.94</b>	<b>0.93</b>	<b>0.91</b>	<b>0.92</b>

*Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2025*

#### **2.1.1.6.4 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman**

Cakupan layanan sanitasi ini terbagi sesuai dengan kondisi akses layanan sanitasi. Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau IPAL. Sedangkan akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT. Dari hasil pendataan didapatkan jumlah capaian sanitasi berdasarkan akses layanan sebagai berikut.

**Tabel 2.11**  
**Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Akses Layanan	Satuan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Akses Aman	%	<b>6.90</b>	<b>7.34</b>	<b>7.06</b>	<b>8.36</b>	<b>9.43</b>
	RT	2.876	3.110	3.102	3.802	4.367
Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	<b>81.17</b>	<b>85.76</b>	<b>83.21</b>	<b>82.01</b>	<b>84.28</b>
	RT	33.827	36.321	36.554	37.316	39.033
Akses Belum Layak	%	<b>7.56</b>	<b>3.80</b>	<b>6.64</b>	<b>6.38</b>	<b>3.40</b>
	RT	3.149	1.611	2.918	2.904	1.573
Tidak Ada Akses	%	<b>4.37</b>	<b>3.10</b>	<b>3.09</b>	<b>3.26</b>	<b>2.90</b>
	RT	1.823	1.312	1.356	1.482	1.342
<b>Jumlah Cakupan Layanan Sanitasi</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	RT	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Dari data diatas, terlihat bahwa masih terdapat akses sanitasi yang belum layak dari tahun 2020, namun terlihat menurun sampai dengan tahun 2024. Akses sanitasi yang dikatakan belum layak ini apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, dan kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Secara umum, cakupan layanan sanitasi di Kota Lhokseumawe sebagian besar sudah dalam kondisi layak. Namun, jumlah akses sanitasi yang layak tetapi tidak termasuk aman masih mendominasi, hal ini dikarenakan rumah tangga yang tidak rutin melakukan penyedotan dan tidak dibuang ke instalasi pengolah tinja (IPLT).

### 2.1.1.7 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

#### 2.1.1.7.1 Indeks Risiko Bencana

Secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Jenis Bencana	Bahaya	
	Total Luas	Kelas
Banjir	6,784.38	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13,914.45	Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	136.44	Tinggi
Gempa Bumi	13,937.04	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	855.18	Tinggi
Kekeringan	13,937.04	Rendah
Longsor	231.84	Sedang
Tsunami	207.80	Sedang

Sumber : BPBD Kota Lhokseumawe, 2025

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe memiliki tingkat bahaya tinggi, sedang dan tinggi. Adapun potensi bencana dengan tingkat bahaya rendah adalah kekeringan, potensi bencana dengan tingkat bahaya sedang adalah gempa bumi, longsor, dan tsunami. Sedangkan potensi bencana



dengan tingkat bahaya tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) untuk Kota Lhokseumawe tahun 2020-2023 menunjukkan kecenderungan menurun dari 143,20 (tinggi) di tahun 2020 menjadi 124.22 (sedang) di tahun 2023. Pada tahun 2024 IRB Kota Lhokseumawe sedikit meningkat menjadi 136,99 hal ini ditandai dengan menurunnya Indeks Ketahanan Daerah. Berikut series data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

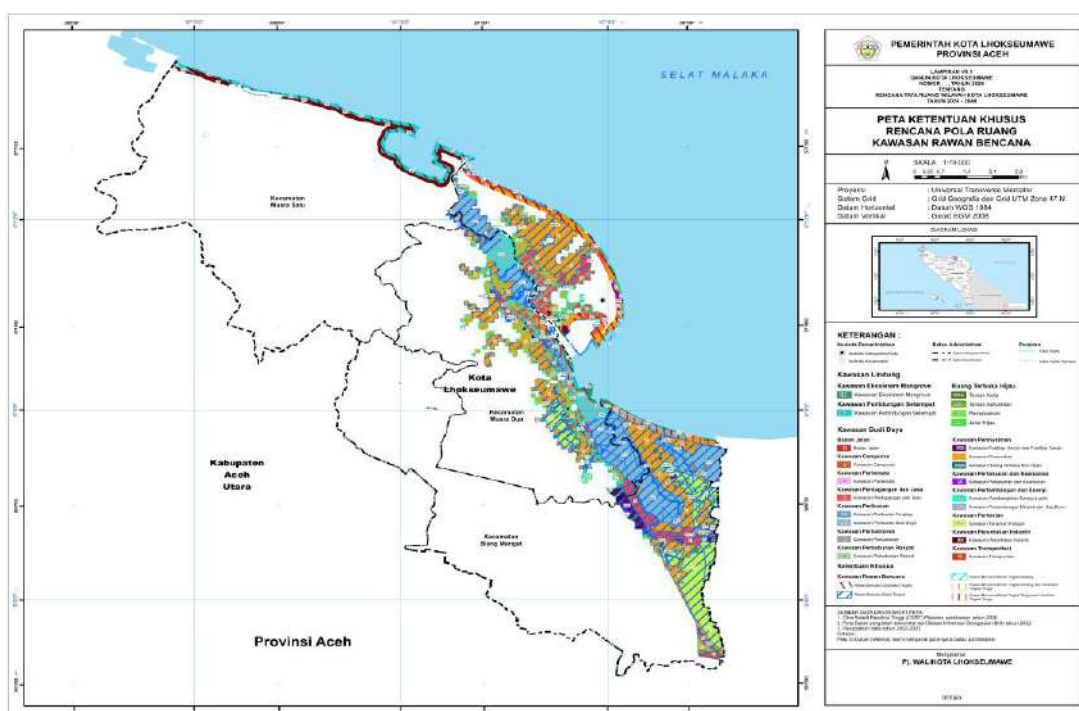
**Tabel 2.13**  
**Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Kab/Kota	Tahun					Kelas Risiko
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Lhokseumawe	130.11	130.11	128.61	134.83	136.99	Sedang
2	Aceh	153.58	149.99	149.10	146.90	144.29	Sedang
3	Nasional	141.85	138.81	135.56	132.25	128.50	Sedang

Sumber: <https://inarisk.bnppb.go.id/irbi>

IRB Kota Lhokseumawe 2020-2024 berada di bawah IRB Aceh dan Nasional. Namun tahun 2023-2024 IRB Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan sehingga masih berda di bawah Aceh dan di atas Nasional. Potensi bencana di Kota Lhokseumawe teridentifikasi pada 4 Kecamatan, baik bencana banjir, gelombang ekstrim dan Abrasi, serta tsunami. Sedangkan bahaya kebakaran hutan dan lahan teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu serta tanah longsor teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.

**Gambar 2.11**  
**Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe**

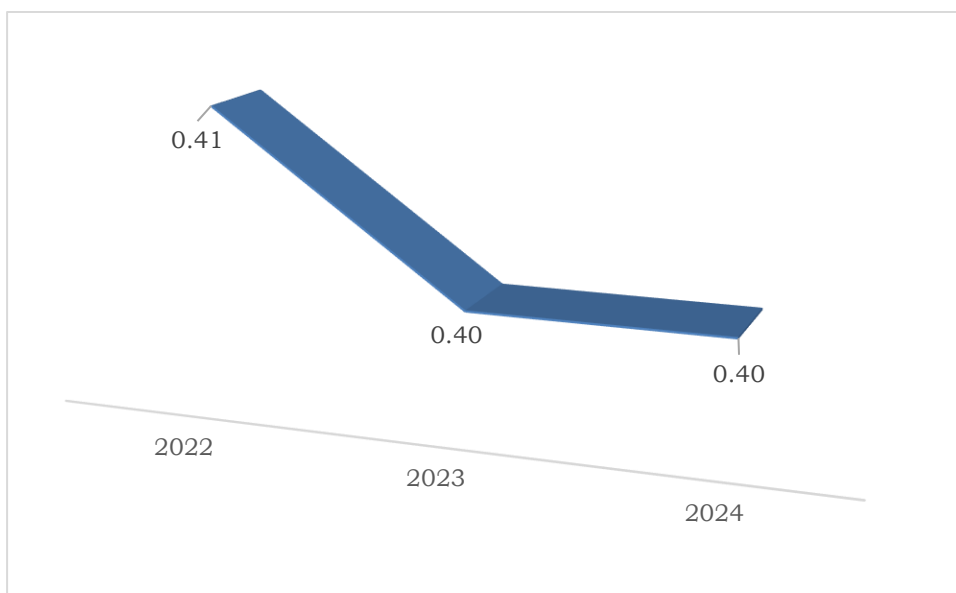


Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

#### 2.1.1.7.2 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik Kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Kota Lhokseumawe menunjukkan tren positif yaitu sebesar 0,33 pada tahun 2021 menjadi 0,40 pada tahun 2024.

**Gambar 2.12**  
**Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2022-2024**



Sumber: BNPB, 2025

#### 2.1.1.8 Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

##### 2.1.1.8.1 Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

**Tabel 2.14**  
**Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan**  
**Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banda Sakti	77.802	77.985	78.256	79.850	80.672
2	Muara Dua	50.929	51.472	52.079	53.068	53.764
3	Blang Mangat	26.162	26.559	26.992	28.146	28.775
4	Muara Satu	33.820	33.925	34.069	35.003	35.494
		<b>188.713</b>	<b>189.941</b>	<b>191.396</b>	<b>196.067</b>	<b>198.705</b>

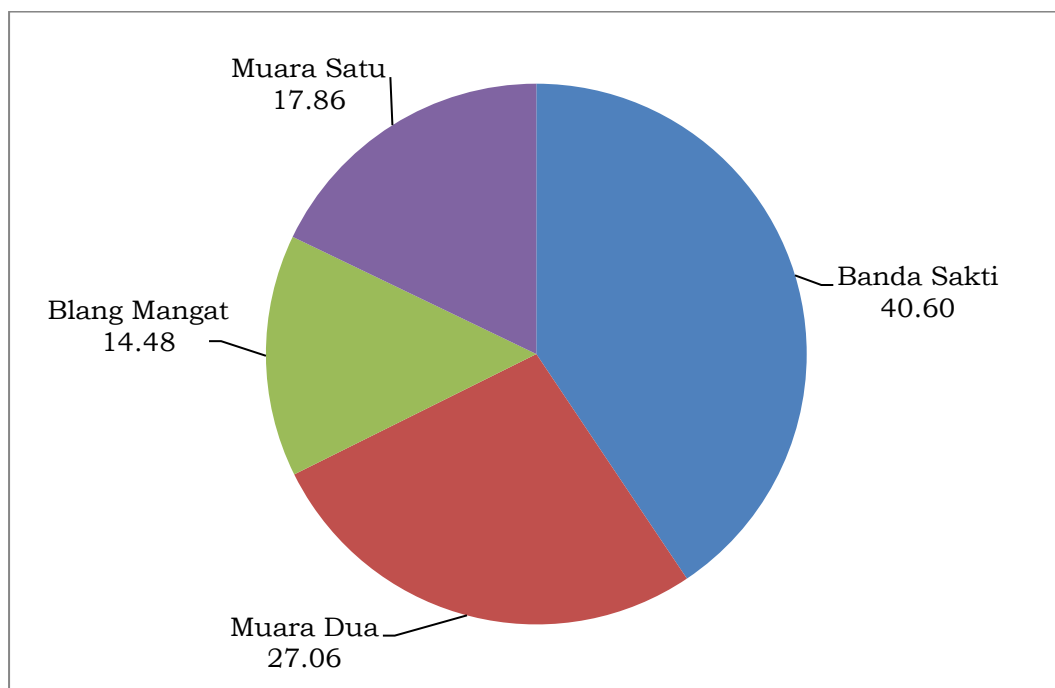
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2025

Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memilik kecenderungan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sebanyak 196.067 jiwa menjadi 198.705 jiwa di tahun 2024. Pertambahan jumlah penduduk tahun 2024 disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah dating penduduk.

#### 2.1.1.8.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Selain menjadi Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti dari tahun ke tahun merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 80.672 Jiwa pada tahun 2024. Kebalikan dengan Kecamatan Blang Mangat selain menjadi wilayah terbesar ke dua di Kota Lhokseumawe juga merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 28.775 jiwa pada tahun 2024.

**Gambar 2.13**  
**Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan**  
**Tahun 2024**



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe 2025

Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Pada tahun 2024, Kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Lhokseumawe adalah Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 7.177 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk terlenggang adalah Kecamatan Blang Mangat dengan angka kepadatan sebesar 513 Jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe di Tahun 2024 ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 1.097 jiwa/km<sup>2</sup>, hal ini dipengaruhi adanya mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk.

**Tabel 2.15**  
**Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan**  
**Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banda Sakti	6.922	6.938	6.962	7.104	7.177
2	Muara Dua	881	891	901	918	930
3	Blang Mangat	406	473	481	502	513
4	Muara Satu	605	607	609	626	632
<b>Lhokseumawe</b>		<b>1.042</b>	<b>1.161</b>	<b>1.057</b>	<b>1.083</b>	<b>1.097</b>

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe 2025*

### 2.1.1.8.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan di setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya sensus penduduk tahun 2020 dan secara langsung berpengaruh pula terhadap laju pertumbuhan penduduk di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.16**  
**Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.45	1.42	0.77	1.66	1.3

*Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2025*

Laju pertumbuhan penduduk tahun kurun waktu 2020-2024 menunjukkan angka dengan kecenderungan menurun. Pada 2020 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka 1.45% kemudian terus menurun hingga tahun 2024 dengan laju pertumbuhan menjadi 1.3%. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk menurun karena pada tahun tersebut dilaksanakan sensus penduduk oleh BPS Kota Lhokseumawe, selain itu adanya pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup besar pada jumlah penduduk Kota Lhokseumawe karena kematian penduduk akibat covid-19. Kemudian, pada tahun 2022 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang cukup signifikan



menjadi 0,77%. Hal ini dikarenakan adanya proses mobilisasi penduduk, seperti lahir, mati, maupun perpindahan penduduk selama tahun 2022. Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori  $r > 0$  menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Berikut detail data mutasi penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe pada kurun waktu tahun 2020-2024.

**Tabel 2.17**  
**Mutasi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Kategori Mutasi Penduduk	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelahiran	jiwa	2.982	4321	4.083	3.533	3.576
2	Kematian	jiwa	994*	979*	867**	1.154*	1.162
3	Kedatangan	jiwa	4.148	4.518	3.552	5.563	4.949
4	Perpindahan	jiwa	6.717	7.857	4.525	6.395	5.659

*Sumber: BPS dan Disducapil Kota Lhokseumawe, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 jumlah kelahiran sebanyak 3.576 jiwa. Selanjutnya jumlah kematian sebanyak 1.162 jiwa. Kemudian jumlah pendatang sebanyak 4.949 Jiwa serta jumlah yang pindah sebanyak 5.659 Jiwa.

#### 2.1.1.8.4 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

**Tabel 2.18**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2020	93.676	95.037	188.713	99
2	2021	94.303	95.638	189.941	99
3	2022	95.042	96.354	191.396	99
4	2023	97.339	98.728	196.067	98.59
5	2024	98.717	99.988	198.705	98.72

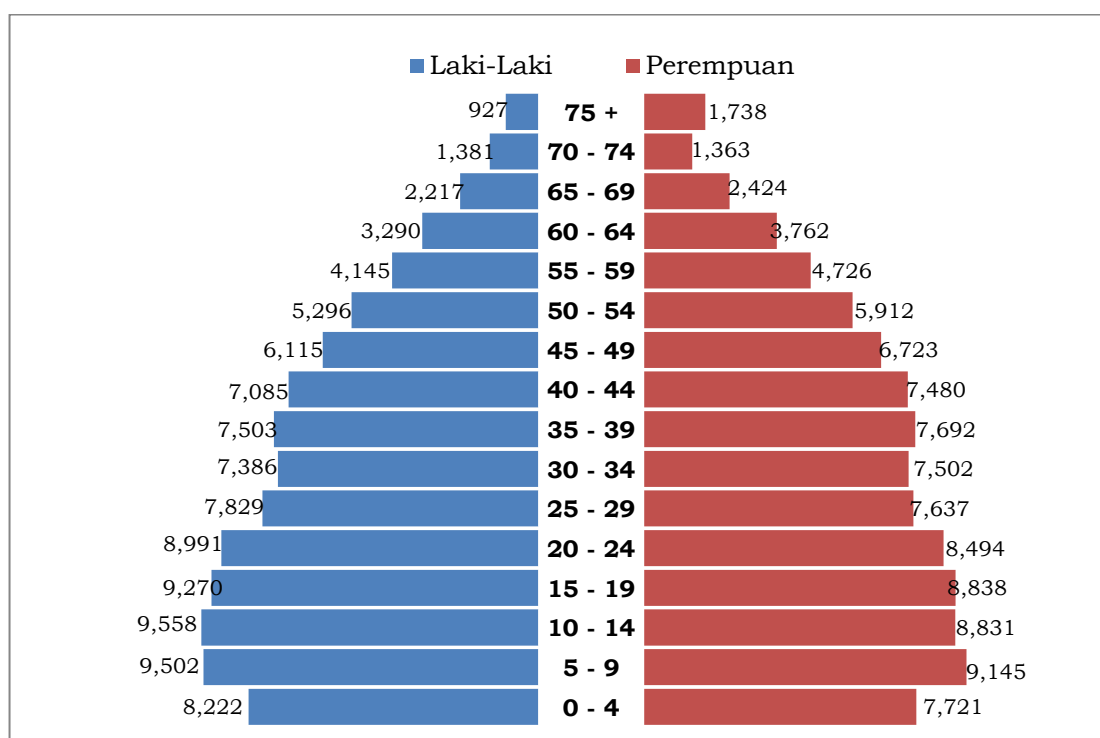
*Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2025*

Secara umum dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2022, besaran nilai sex ratio di Kota Lhokseumawe menunjukkan angka tetap 99. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan seimbang kenaikannya, sehingga mempengaruhi sex rasionya. Pada tahun 2024, angka sex ratio menunjukkan angka 98.72, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang.

### 2.1.1.8.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Lhokseumawe memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah total sebesar 18.647 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 5-9 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 9.502 jiwa dan perempuan sebanyak 9.145 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 75+ tahun yaitu sebesar 2.665 jiwa.

**Gambar 2.14**  
**Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2024**



Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Kota Lhokseumawe 2025

### 2.1.1.8.6 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun kedepan

Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu.

Kegunaan Proyeksi Penduduk dalam perencanaan diantaranya, proyeksi penduduk membantu dalam perencanaan penyediaan infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai Kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan dan papan. Pemerintah memerlukan proyeksi penduduk untuk melihat jumlah penduduk di masa depan. Hal ini berguna supaya pemerintah dapat memperkirakan jumlah pangan, air dan perumahan yang dibutuhkan oleh penduduknya.

**Tabel 2.19**  
**Proyeksi Jumlah Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2025**

No	Uraian	Jumlah Penduduk 2023	Proyeksi Penduduk 2025	Proyeksi Penduduk 2030
1	Penduduk	197,35	203,41	217,83
2	- Laki-laki	98,03	101,08	108,27
3	- Perempuan	99,32	102,33	109,56
4	Sex Rasio Penduduk	98,7	98,8	98,8
5	Angka ketergantungan	45,7	45,8	47,3
	- Usia 0-14	52,37	52,84	54,48
	- Usia 15-64	135,49	139,53	147,92
	- Usia 65+	9,51	11,06	15,45

*Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Dari data di atas proyeksi penduduk di atas terlihat bahwa penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,06 ribu jiwa. Penambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor fertilitas, mortalitas atau mobilitas. Untuk jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada jumlah penduduk perempuan. Untuk angka *sex ratio* tahun 2023 sebesar 98,7 dan naik di tahun 2025 dan 2030 menjadi sebesar 98,8. Bila dilihat dari rasio ketergantungan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2023 masih tinggi sebesar 45,7 persen ini artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 orang penduduk non produktif. Pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tahun 2030 meningkat menjadi sebesar 47,3 persen.

Indonesia termasuk Aceh saat ini tengah menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2025 hingga tahun 2030, begitu juga untuk Kota Lhokseumawe puncak bonus demografi akan terjadi antara 2025 sampai dengan 2030. Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (sekitar 15-64 tahun) dalam suatu negara lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), bonus demografi bisa menjadi momentum untuk menjadikan Kota Lhokseumawe maju karena berbagai keuntungan yang bisa didapat, seperti dampak positif dari bonus demografi dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri, membuka peluang tenaga kerja yang berkompeten, membantu perkembangan ekonomi, ini artinya semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan.

Dampak negatif dari bonus demografi bila tidak di persiapkan secara matang maka akan membludaknya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang jika pemerintah tidak menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik.

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

### 2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

#### 2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024, nilai PDRB yang terbesar 2.753.463,5 juta rupiah atau sebesar 23,24% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 1.978.225,7 juta rupiah atau 16,70% di tahun 2024. Selanjutnya, pada posisi ketiga adalah sektor konstruksi menghasilkan PDRB sebesar 12,96% atau 1.535.276,1 juta rupiah dari total PDRB. Nilai PDRB berdasar ADHB dapat dicermati pada tabel berikut.

**Tabel 2.20**  
**PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2020r	2021*	2022**	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	895,154.5	922,451.3	965,874.2	1,025,598.0	1,102,178.5
B	Pertambangan dan Penggalian	34,647.6	36,957.5	40,065.6	41,754.4	43,035.9



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029**

No	Lapangan Usaha	2020r	2021*	2022**	2023	2024
C	Industri Pengolahan	1,672,124.6	1,793,400.5	2,002,471.4	2.023,961.6	1,978,225.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,557.6	15,753.9	16,169.9	17,544.0	18,766.6
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,438.3	1,481.4	1,627.8	1,745.5	1,996.6
F	Konstruksi	1,375,488.6	1,364,872.5	1,454,765.8	1,487.217.80	1,535,276.1
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,889,921.5	2,013,276.4	2,184,656.3	2.561,330.4	2,753,463.5
H	Transportasi dan Pergudangan	726,190.8	902,547.1	1,022,517.0	1.267,330.9	1,470,903.4
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	167,578.1	168,466.8	225,635.0	256,396.8	272,390.8
J	Informasi dan Komunikasi	313,008.4	333,007.8	366,897.7	402,754.4	408,712.8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	269,367.5	272,137.9	280,387.5	254,387.7	317,291.5
L	Real Estat	431,928.7	452,445.2	475,763.5	508.542.1	519,468.6
M,N	Jasa Perusahaan	90,592.4	94,894.3	112,782.7	116,063.5	122,623.4
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	404,463.6	441,252.7	434,765.4	476,478.0	534,641.4
P	Jasa Pendidikan	147,476.1	148,982.3	154,734.5	164.979.5	178,510.1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	309,552.8	338,571.7	389,765.8	400,412.4	421,815.8
R,S,T,U	Jasa Lainnya	122,775.4	127,786.6	144,745.3	163,135.1	168,936.1
<b>PDRB MIGAS</b>		<b>8,867,266.5</b>	<b>9.431.385.9</b>	<b>10.277.625.4</b>	<b>11.169.632.1</b>	<b>11,848,236.9</b>
<b>PDRB NONMIGAS</b>		<b>7,386,928.9</b>	<b>7.890.150.1</b>	<b>8.567.858.1</b>	<b>9.457.579.4</b>	<b>10,222,464.0</b>

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) kontribusi Kota Lhokseumawe terhadap PDRB ADHB Propinsi Aceh mengalami penurunan dikarenakan peningkatan PDRB Kota Lhokseumawe tidak signifikan dengan kenaikan PDRB Aceh dan pada tahun 2024 kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe sebesar 4.87%.

**Tabel 2.21  
Kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe terhadap PDRB Aceh  
Tahun 2020-2024 (dalam milyar)**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Lhokseumawe	8.867,27	9.431,39	10.277,63	11.169,63	11.848,24
PDRB Aceh	166.372,32	184.979,88	209.698,36	227.018,20	243.202,09
<b>% Kontribusi PDRB</b>	<b>5,33</b>	<b>5,10</b>	<b>4,90</b>	<b>4,92</b>	<b>4,87</b>

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2020-2024. Pada Tahun 2020 mencapai 6.984.713,3 juta rupiah dan pada Tahun 2024 mencapai sebesar 8.211.431,4 juta rupiah. Nilai PDRB 2024 tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 1.226.718,10 juta rupiah atau sebesar 17.56%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.22**  
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)**

No	Lapangan Usaha	2020r	2021*	2022**	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	622,995.8	612,746.7	602,948.8	608,700	645,707.9
B	Pertambangan dan Penggalian	28,186.2	30,187.3	30,287.3	31.400	32,160.6
C	Industri Pengolahan	1,330,546.4	1,331,428.6	1,368,986.0	1.387.500	1,395,382.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,559.0	14,515.0	14,836.1	15,800	16,704.4
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah dan daur ulang	894.5	915.2	1,002.2	1.100	1,099.5
F	Konstruksi	1,046,313.7	1,027,310.5	1,034,763.4	1.034.400	1,065,356.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	1,523,878.7	1,587,445.5	1,681,277.9	1.840.000	1,894.942.1
H	Transportasi dan Pergudangan	685,600.3	847,757.7	888,178.7	951.100	1,083,401.0
I	Penyediaan Makan Minum	106,394.1	105,493.3	136,910.3	150.400	152,782,7
J	Informasi dan Komunikasi	300,298.9	321,273.7	353,546.4	381.600	387,696.5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	177,058.9	170,306.0	163,188.5	145.882.8	175,682.6
L	Real Estate	342,345.30	355,052.50	372,743.50	355,052.5	381,036.4
M,N	Jasa Perusahaan	72,728.70	80,328.50	80,134.50	80,328.5	84,720.6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	307,619.20	306,976.70	320,743.50	306,976.7	338,923.1
P	Jasa Pendidikan	101,178.70	104,154.50	109,056.60	104,154.5	113,782.7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,925.50	310,034.70	310,956.30	310,034.7	318,085.2
R,S,TU	Jasa lainnya	98,727.80	111,265.50	119,524.40	111,265.5	123,966.6
<b>PDRB MIGAS</b>		<b>7,252,904.80</b>	<b>7,543,739.10</b>	<b>7,861,007.80</b>	<b>7,543,739.1</b>	<b>8,211,431.4</b>
<b>PDRB NONMIGAS</b>		<b>6,069,121.60</b>	<b>6,330,756.60</b>	<b>6,635,158.40</b>	<b>6,330,756.6</b>	<b>6,987,695.5</b>

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2024, nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu mencapai 1.894.942,1 juta rupiah atau sebesar 23.24% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 16,70% atau 1.395.382,7 juta

rupiah di tahun 2024 Selanjutnya, sektor kontruksi menghasilkan PDRB sebesar 1.065.356,5 juta rupiah atau 12,96% dari total PDRB. Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) kontribusi Kota Lhokseumawe terhadap PDRB ADHK Propinsi Aceh mencapai pada angka 6.07%.

### 2.1.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2020-2024), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama tanpa migas. Namun, Pertumbuhan ekonomi ini sama-sama mengalami kontraksi pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 diperlihatkan oleh gambar berikut:

**Tabel 2.23**  
**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

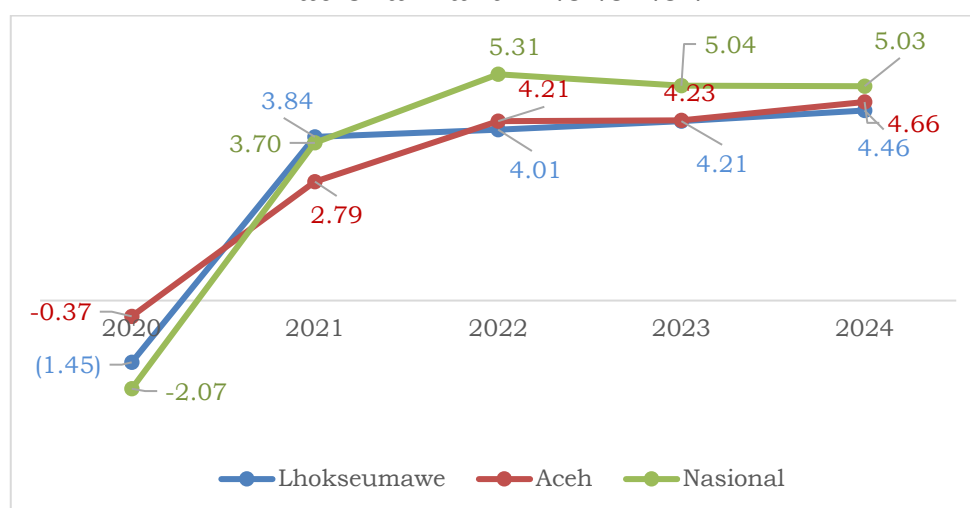
No	Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.85	-1.65	-1.60	0.96	6.07
B	Pertambangan dan Penggalian	2.53	7.1	0.33	3.79	2.31
C	Industri Pengolahan	1.15	0.07	2.82	1.35	0.57
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.84	-0.30	2.21	6.45	5.77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3.1	2.32	9.51	6.33	3.18
F	Konstruksi	4.08	-1.82	0.73	-0.04	3.00
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3.85	4.17	5.91	9.44	2.99
H	Transportasi dan Pergudangan	-22.31	23.65	4.77	7.09	13.91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-6.91	-0.85	29.78	9.82	1.61
J	Informasi dan Komunikasi	12.35	6.98	10.05	7.93	1.60
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.73	-3.81	-4.18	-10.60	20.43
L	Real Estat	2.80	3.57	3.71	4.98	2.22
M,N	Jasa Perusahaan	0.28	0.83	10.45	-0.24	5.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0.17	5.16	-0.21	4.48	5.67
P	Jasa Pendidikan	3.53	1.41	2.94	4.71	4.33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	3.63	9.52	10.36	0.30	2.29
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	2.12	2.28	12.70	7.42	3.72
<b>PDRB Migas</b>		<b>-1.80</b>	<b>3.84</b>	<b>4.01</b>	<b>4.21</b>	<b>4.46</b>
<b>PDRB Tanpa MigasMigas</b>		<b>-2.40</b>	<b>4.75</b>	<b>4.31</b>	<b>4.81</b>	<b>5.31</b>

*Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Pada tahun 2020 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 12.35% sedangkan paling kecil adalah sektor Transportasi dan Pergudangan dengan laju pertumbuhan sebesar -22.31%. Selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan yaitu sebesar 29.78% sedangkan yang paling kecil adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar -4.18%.

Kemudian pada tahun 2024 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 20.43%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor Industri Pengolahan dengan laju pertumbuhan 0.57%. Jika dilihat secara keseluruhan pada pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2024 hampir semua sektor mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Gambar 2.15**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

Pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar (1.45)% berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar (0.37)% dan di atas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar (2.07)%. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 sebesar 4.46% namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4.66% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.03%.

### 2.1.2.1.3 Distribusi Persentase PDRB

Pada kurun waktu 2020-2024, dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB tetap pada urutan pertama adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada posisi kedua penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe adalah Industri pengolahan dan disusul oleh sektor kontruksi di posisi ketiga.



Dilihat dari PDRB ADHB, terjadi kecenderungan penurunan di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor walaupun berada pada urutan pertama penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.31% dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 23.24%. Namun untuk sektor Industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 18.86% dan mengalami penurunan menjadi 16.70 pada tahun 2024. Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Lhokseumawe menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.24**  
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

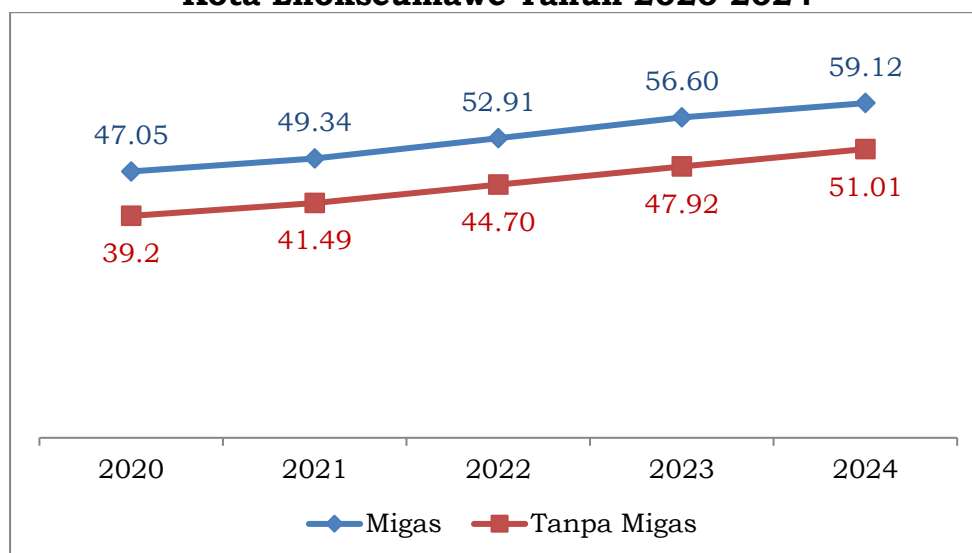
No	Lapangan Usaha / Industry	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,	10.10	9.80	9.40	9.18	9.30
B	Pertambangan dan Penggalian	0.39	0.39	0.39	0.37	0.36
C	Industri Pengolahan	18.86	19.02	19.48	18.12	16.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	15.51	14.47	14.15	13.31	12.96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.31	21.35	21.26	22.93	23.24
H	Transportasi dan Pergudangan	8.19	9.57	9.95	11.35	12.41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.89	1.79	2.20	2.30	2.30
J	Informasi dan Komunikasi	3.53	3.53	3.57	3.61	3.45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.04	2.89	2.73	2.28	2.68
L	Real Estat	4.87	4.80	4.63	4.55	4.38
M,N	Jasa Perusahaan	1.02	1.01	1.10	1.04	1.03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.56	4.69	4.27	4.27	4.51
P	Jasa Pendidikan	1.66	1.58	1.51	1.48	1.51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.49	3.59	3.79	3.58	3.56
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1.38	1.36	1.41	1.46	1.43
<b>PDRB Migas</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>PDRB tanpa Migas</b>		<b>83.31</b>	<b>83.64</b>	<b>83.34</b>	<b>84.67</b>	<b>86.28</b>

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

#### 2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

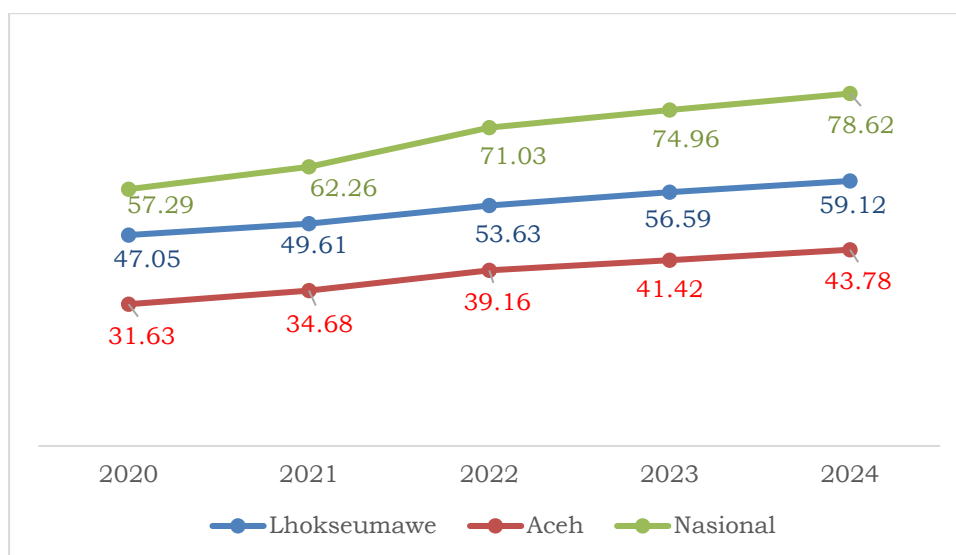
**Gambar 2.16**  
**PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

PDRB per kapita Kota Lhokseumawe kurun waktu 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita sebesar 47.05 juta rupiah dan pada tahun 2024 PDRB per kapita Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 59.12 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Lhokseumawe tahun 2024 meningkat sebesar 2.52 juta rupiah dari tahun 2023.

**Gambar 2.17**  
**PDRB Perkapita Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020 sebesar 47.05 juta berada di atas PDRB Aceh sebesar 31.63 juta dan masih di bawah PDRB nasional sebesar 57.29 juta. Selama kurun waktu 2020-2024 PDRB Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan menjadi 59.12 juta tahun 2024 namun masih tetap berada di bawah nasional pada tahun 2024 sebesar 78.62 juta dan di atas PDRB Aceh sebesar 43.78 juta.

### 2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

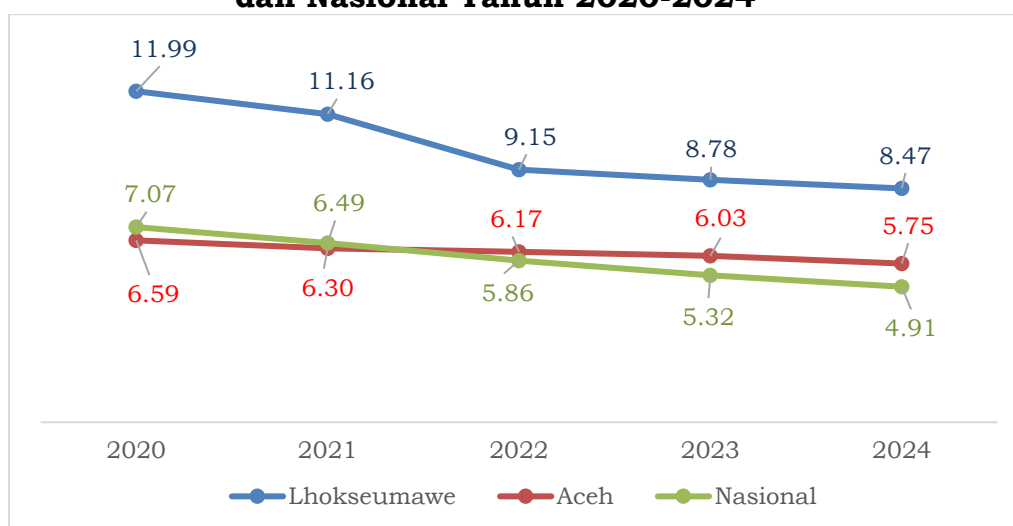
**Tabel 2.25**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	11,262	10,804	9,059	8.221	8.111
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	93,958	96,835	98,953	93.594	95.783
<b>3</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>%</b>	<b>11.99</b>	<b>11.16</b>	<b>9.15</b>	<b>8.78</b>	<b>8.47</b>

*Sumber : BPS, 2025*

Tingkat pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, TPT di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 11.99% kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 8.47% pada tahun 2024. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

**Gambar 2.18**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



*Sumber: BPS, 2025*

Pada periode Tahun 2020-2024, TPT Kota Lhokseumawe selalu di atas rata-rata TPT Aceh dan TPT nasional. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPT Kota Lhokseumawe jauh diatas TPT nasional, bahkan hampir separuh dari TPT nasional. Pada tahun 2020 TPT Kota Lhokseumawe sebesar 11.99 mengalami penurunan, menjadi 11.15 persen di tahun 2021. Selanjutnya pada Tahun 2024, TPT Kota

Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 8.47 persen, penurunan TPT ini tetapi masih menempakan Kota Lhokseumawe sebagai daerah dengan TPT tertinggi di Aceh.

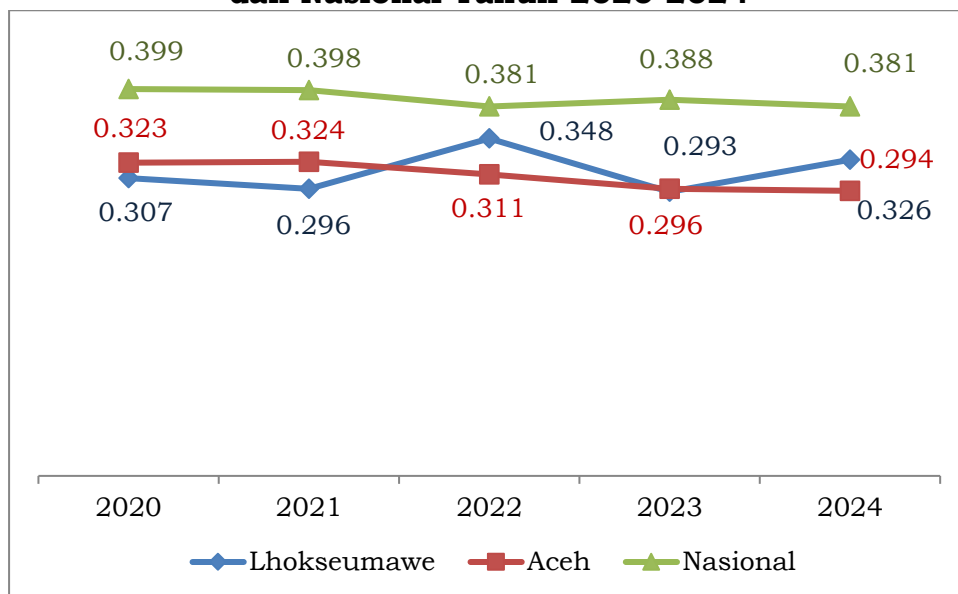
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Lhokseumawe adalah keterbatasan lapangan kerja, kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, kurangnya investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri turut menghambat penciptaan lapangan kerja, penurunan aktivitas industri besar seperti sektor migas juga berdampak pada pengurangan lapangan kerja.

Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu berupaya menciptakan lapangan kerja baru terutama sektor UMKM dan industri kreatif, program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, sektor usaha mikro, kecil dan menengah perlu didukung penuh melalui pemberian modal, pelatihan dan akses pasar. Pada tahun 2025 untuk mendukung kebutuhan industri bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja melakukan pendidikan dan pelatihan migas melalui dana TDBH Migas.

#### 2.1.2.1.6 Indeks Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

**Gambar 2.19**  
**Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Rasio Gini Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat termasuk dalam kondisi ketimpangan sedang/moderat (koefisien gini



berkisar antara 0.31-0.40). Besaran Rasio Gini Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Nasional namun lebih tinggi dari Aceh. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan di Kota Lhokseumawe yang lebih merata dibandingkan Nasional. Gini Rasio Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 0.307 turun menjadi 0.296 pada tahun 2021 namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0.348 dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0.296 dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0.326.

#### 2.1.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin sebagai berikut.

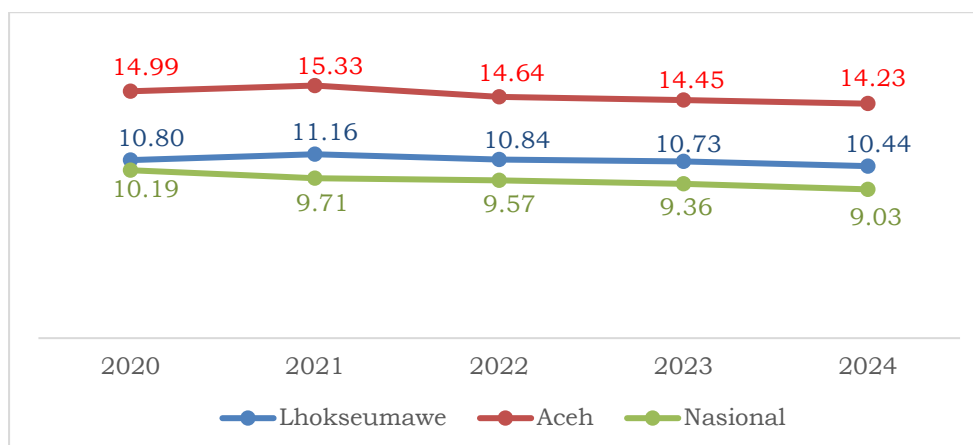
**Tabel 2.26**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kota Lhokseumawe</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	401.158	427.045	460.583	498.431	522.671
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	22,69	23,38	23,03	23,10	22,77
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	10,80	11,16	10,84	10,73	10,44
<b>Aceh</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	522.126	541.109	579.227	627.534	661.227
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	814,91	834,24	806,62	806,75	804,53
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	14.99	15.33	14.64	14.45	14.23

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Persentase penduduk miskin di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin sebanyak 22,69 ribu jiwa dan meningkat di tahun 2021 menjadi 23,38 ribu jiwa atau setara 11,16% dari total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2021. Angka kemiskinan yang meningkat ini sebagai akibat dan adanya pandemic Covid-19. Kemudian menurun menjadi 23.03 ribu jiwa di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 23,10 ribu jiwa atau setara 10.73% dan tahun 2024 menurun menjadi 22,77 ribu jiwa atau 10.44%.

**Gambar 2.20**  
**Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

Dibandingkan dengan Aceh, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe relatif lebih kecil. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Aceh 14,99% kemudian naik menjadi 15,33% pada tahun 2021 sebagai dampak dari terjadinya pandemic Covid 19 dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 14,64% dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 14,45% dan tahun 2024 turun menjadi 14,23%. Namun jika dibandingkan dengan nasional persentase jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe berada di atas persentase jumlah penduduk miskin nasional.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks kedalaman kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan mengalami peningkatan cukup drastik pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,98. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020-2024 fluktuatif namun pada tahun 2021 dan 2023 mengalami lonjakan yang cukup tinggi.

**Tabel 2.27**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan**  
**Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe 2020-2024**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	1.56	0.29
2021	1.87	0.54
2022	1.33	0.26
2023	2.23	0.70
2024	1.98	0,67

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

### 2.1.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah tabel Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.28**  
**Komponen Indeks Pembangunan Manusia**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (Metode Baru)	Tahun	74,34	74,38	74,59	74,76	74,93
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,20	15,21	15,27	15,54	15,55
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,91	11,11	11,12	11,27	11,31
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp.	11.367	11.390	11.701	12.125	12.694
<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Metode Baru)</b>		<b>78,65</b>	<b>78,92</b>	<b>79,38</b>	<b>80,26</b>	<b>80,89</b>

Sumber: BPS, 2025

Dari 4 (empat) komponen pembentuk IPM Kota Lhokseumawe, baik dari segi kesehatan, pendidikan dan standar hidup masih perlu perbaikan pada setiap komponen agar capaiannya IPM Kota Lhokseumawe bisa lebih meningkat posisinya dari tahun 2024 di posisi ke tiga setelah Kota Banda Aceh dan Kota Langsa.

IPM Kota Lhokseumawe menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, namun terdapat ketimpangan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Pada tahun 2024 IPM laki-laki Kota Lhokseumawe sebesar 83.55 sedangkan IPM perempuan Kota Lhokseumawe jauh lebih rendah yaitu sebesar 80.70. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

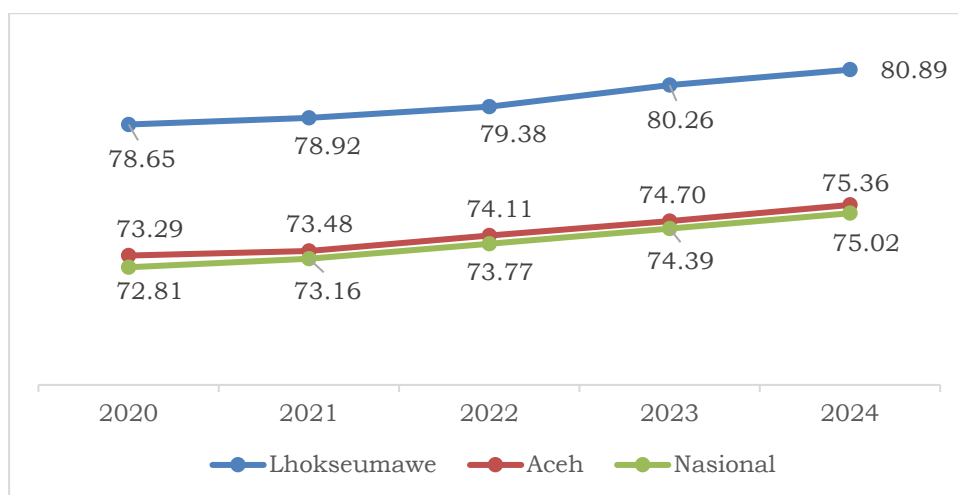
**Gambar 2.21**  
**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS, 2025

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe sebesar 78,65, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 80,89 pada tahun 2024. Perbandingan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional dapat di lihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.22**  
**Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, nilai IPM Kota Lhokseumawe jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM Aceh dan nilai IPM Nasional. IPM Kota Lhokseumawe menduduki peringkat ke tiga di Aceh. Nilai IPM Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 80,89. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Lhokseumawe ini termasuk kategori sangat tinggi (nilai IPM > 80). Hal ini tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

## 2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

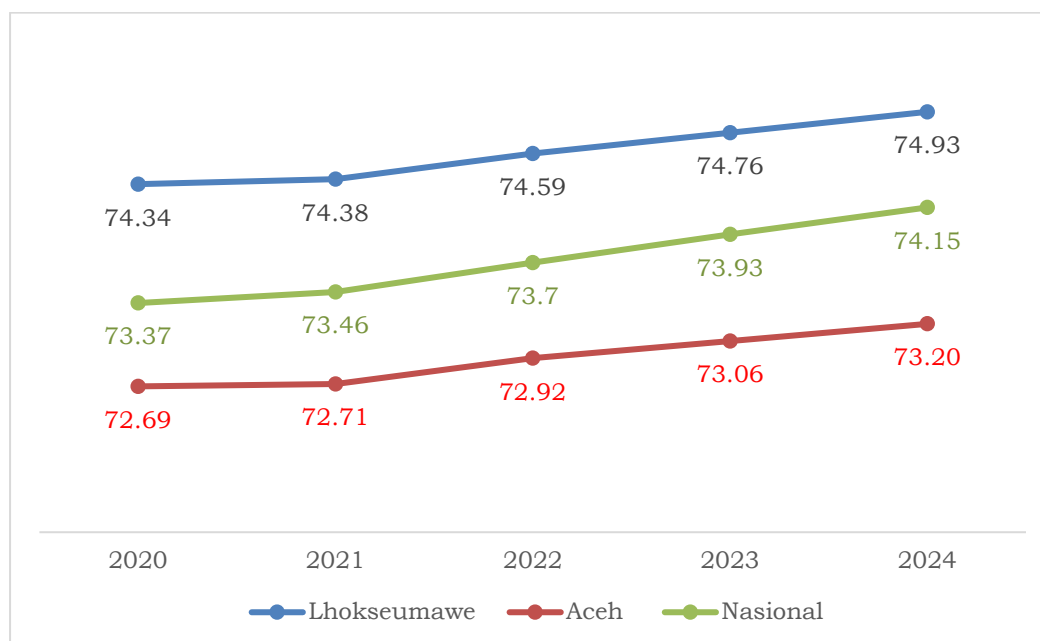
### 2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Lhokseumawe.

Usia Harapan Hidup kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 berada di atas Usia Harapan Hidup Aceh dan Nasional. Pada tahun 2024 UHH Kota Lhokseumawe sebesar 74,93 berada diatas UHH Nasional sebesar 74,15 dan UHH Aceh sebesar 73,20.



**Gambar 2.23**  
**Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

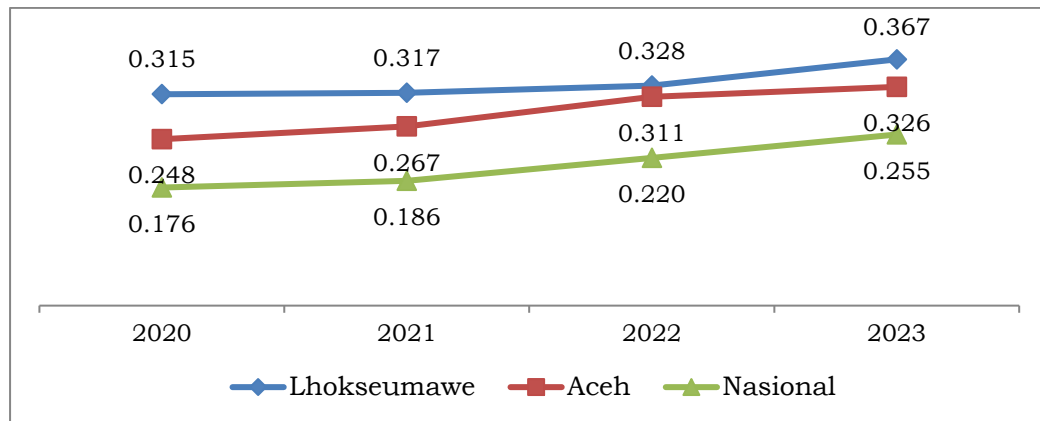
Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, angka usia harapan hidup terus meningkat. Pada tahun 2020 angka usia harapan hidup menunjukkan angka 74,34 tahun dan terus meningkat menjadi 74,93 tahun pada 2024. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Lhokseumawe cenderung semakin meningkat. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

#### 2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan keluarga. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

Indikator yang dinilai adalah Keluarga mengikuti KB, Ibu melakukan persalinan di fasyankes, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat ASI eksklusif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, Penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai standar, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota JKN, Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berikut Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

**Gambar 2.24**  
**Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional**  
**Tahun 2020-2023**



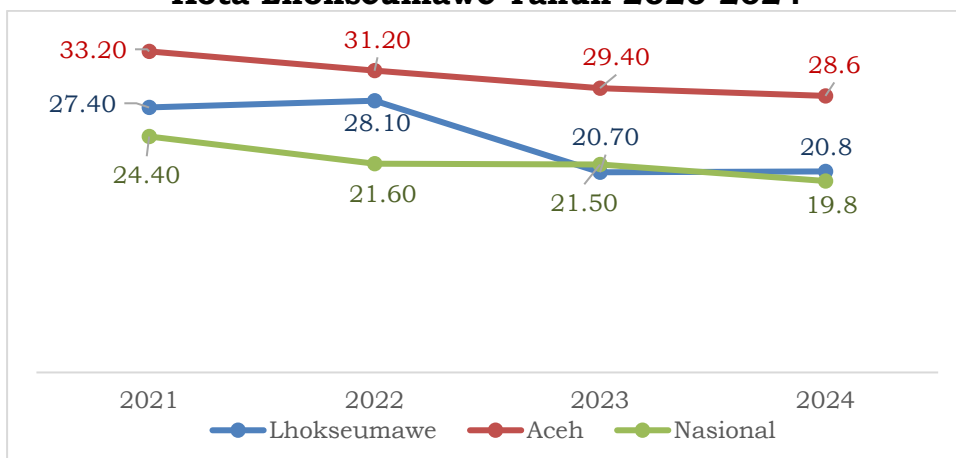
Sumber : Dinkes Aceh Tahun 2025

Capaian IKS Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 masih dalam kategori **keluarga tidak sehat** karena lebih kecil dari 0,500. Untuk pencapaian 12 (dua belas) indikator keluarga sehat harus diupayakan dengan kerja keras dan pembangunan kesehatan yang memadai serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga sangat diperlukan.

### 2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.25**  
**Prevelensi Balita Stunting**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2025

#### 2.1.2.2.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan dampak positif terhadap layanan Kesehatan di Kota Lhokseumawe. Program JKN memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Program JKN memastikan semua masyarakat Kota Lhokseumawe memiliki akses terhadap layanan kesehatan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan promosi kesehatan.

**Tabel 2.29**  
**Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta JKN	%
1	2020	188,713	182.427	96,67
2	2021	189,941	179.152	94,32
3	2022	191,396	188.248	98,35
4	2023	196,067	183.996	93,84
5	2024	198.705	185.363	93,28

*Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Kota Lhokseumawe, 2025*

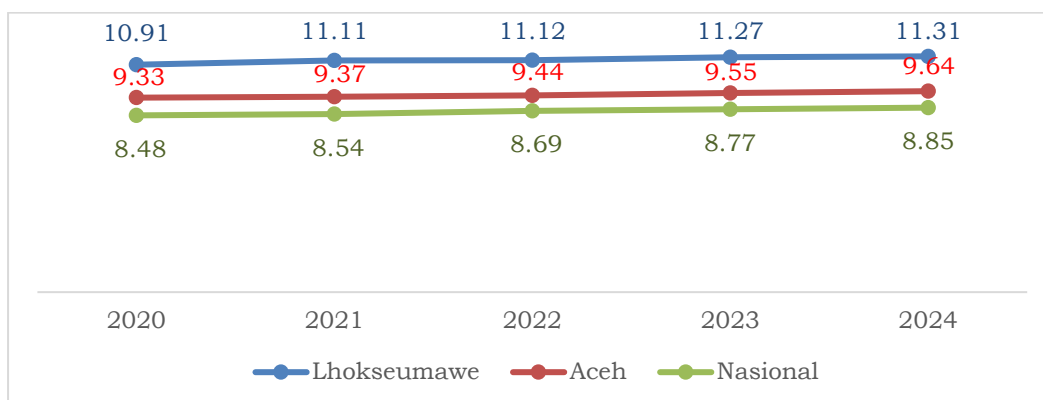
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 96.67% atau 182.427 peserta dari jumlah penduduk 188.713 jiwa. Dan pada tahun 2024 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menurun menjadi 93.28% atau 185.364 peserta dari 198.705 jiwa penduduk.

#### 2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

##### 2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.

**Gambar 2.26**  
**Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



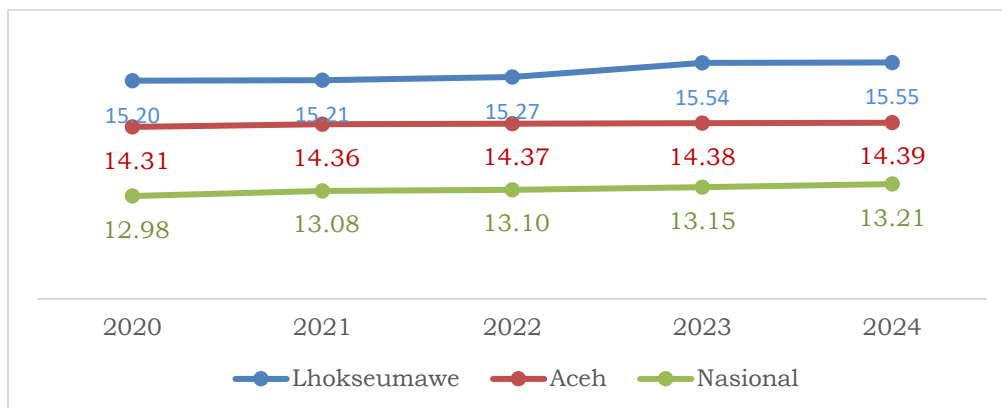
Sumber: BPS, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 adalah sebesar 10,90 tahun kemudian angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga menjadi 11,31 tahun pada tahun 2024. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata lama sekolah Aceh dan Nasional. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Lhokseumawe semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### 2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

**Gambar 2.27**  
**Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: BPS, 2025



Dari gambar di atas terlihat bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 angka Harapan Lama Sekolah sebesar 15.20 tahun dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 15.51 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Aceh dan Nasional.

### 2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Angka Kompetensi Minimum (AKM) adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat mengarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran yang menguji tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Perkembangan kompetensi literasi dan numerasi pada SD dan SMP di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.30**  
**Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024**

AKM	Lhokseumawe			Nasional		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Rerata Kompetensi literasi SD berdasarkan AN	63.32	64.84	56.72	61.53	61.53	70.62
Rerata Kompetensi Numerasi SD berdasarkan AN	39.51	55.43	49.44	46.67	46.67	62.62
Rerata Kompetensi literasi SMP berdasarkan AN	51.85	58.36	68.34	59.00	59.00	68.27
Rerata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan AN	35.36	39.5	59.94	40.63	40.63	65.00
Iklm Keamanan Sekolah SD	69.87	72.14	74.60	68.18	68.18	72.65
Iklm kebinekaan SD	60.31	67.98	71.74	67.64	67.64	72.74
Iklm Inklusivitas SD	53.62	56.24	58.07	55.39	55.39	55.45
Iklm Keamanan Sekolah SMP	66.66	66.58	71.06	65.29	65.29	68.97
Iklm kebinekaan SMP	58.85	64.61	69.77	64.33	64.33	72.53
Iklm Inklusivitas SMP	51.36	53.57	56.55	54.84	54.84	56.37

*Sumber: Rapor Pendidikan, 2025*

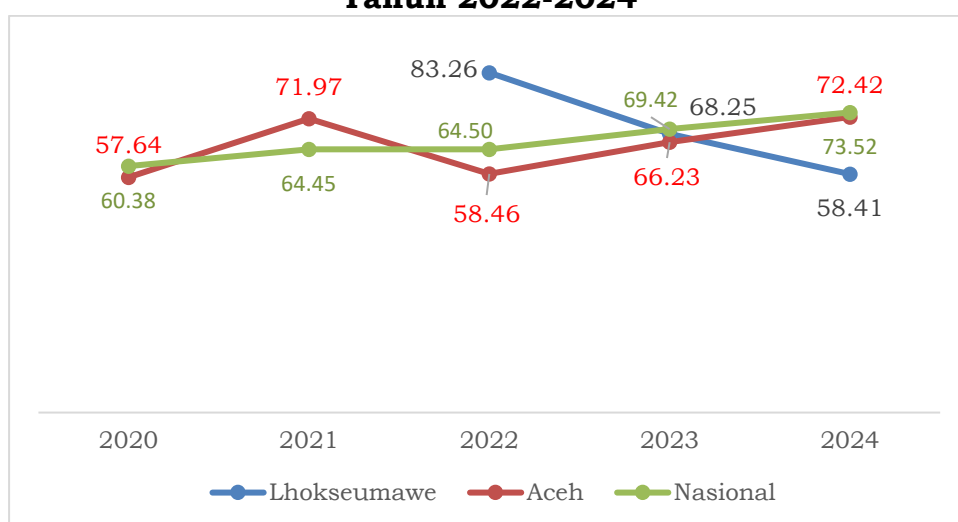
Kompetensi Literasi SD Kota Lhokseumawe sebesar 56.72 pada tahun 2024 berada di bawah Kompetensi Literasi SD Nasional. Untuk Kompetensi Numerasi SD Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 49.44 berada di bawah kompetensi numerasi SD nasional yaitu 62.62. Untuk kompetensi literasi dan numerasi SMP Kota Lhokseumawe masing-masing masih berada di bawah nasional.

#### 2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda terutama berkaitan dengan aspek masyarakat, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah yang akan berimplikasi pada kepadatan penduduk.

**Gambar 2.28**  
**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024**



Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 memperlihatkan IPLM Kota Lhokseumawe menduduki posisi 3 di Aceh yaitu sebesar 83.26 dengan kategori Tinggi. Namun pada Tahun 2023 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi kategori sedang. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Lhokseumawe sebesar 68.25 dalam karegori sedang. Kota Lhokseumawe berada pada posisi 5 dalam pencapaian IPLM di Aceh setelah Kota Sabang sebesar 74.66, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 72,17; Kabupaten Aceh Besar sebesar 71,20 dan Kota Banda Aceh sebesar 69.96. Pada tahun 2024 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penuriunan menjadi sebesar 58,41 dalam kategori sedang. Selama 3 (tiga) tahun terakhir IPLM Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan.

Jika dibandingkan dengan Aceh dan Nasional IPLM Kota Lhokseumawe tahun 2022 berada di atas IPLM Aceh sebesar 58.46 dan nasional sebesar 64.50 namun pada tahun 2024 IPLM Kota Lhokseumawe turun menjadi sebesar 58.41 berada di bawah IPLM Aceh sebesar 72.42 dan IPLM Nasional sebesar 73.52.

#### 2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

##### 2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja.

**Tabel 2.31**  
**Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Tenaga Kerja Persektor usaha	2020	2021		2022		2023		2024	
			Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	N/A	643	4.591	730	4.591	1.010	16.145	460	16.618
2.	Pertambangan dan Penggalian	N/A	293	202	295	202	346	700	352	722
3.	Industri Pengolahan	N/A	1.701	4.307	1770	4.307	2.008	9.589	2.024	9.898
4.	Listrik, Gas dan Air	N/A	1.159	283	1.183	283	1.082	451	792	466
5.	Konstruksi	N/A	6.402	7.273	10.246	7.273	3.157	7.436	4.010	7,551
6.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	N/A	2.901	20.104	3.351	20.104	4.262	18.237	4.232	18.822
7.	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	N/A	438	5.463	463	5.463	638	3.773	667	3.896
8.	Lembaga Keuangan, Asuransi, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	N/A	839	1.200	866	1.200	1.129	2.256	1.056	2.331
9.	Jasa Kemasyarakatan	N/A	9.251	14.780	13.327	14.780	10.515	7.971	13.513	8.228
10	<b>Jumlah peserta JAMSOSTEK / Jumlah tenaga kerja</b>	<b>N/A</b>	<b>23.627</b>	<b>58.203</b>	<b>32.231</b>	<b>58.203</b>	<b>24.047</b>	<b>66.558</b>	<b>27.106</b>	<b>68.532</b>
	<b>Persentase</b>	<b>N/A</b>	<b>40.59</b>		<b>55.38</b>		<b>36.13</b>		<b>39,55</b>	

*Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024*

Dari tahun 2021 hingga tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek terus bertambah, tetapi tidak lebih pesat dari peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum. Pada tahun 2021, persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek dari keseluruhan tenaga kerja adalah 40.59%, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 55.38%, tetapi di tahun 2023 menurun hingga sebesar 36.13% dan tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 39,55%.

#### 2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

##### 2.1.2.5.1 Fokus Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Warisan budaya adalah ekspresi cara hidup yang dikembangkan oleh suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya adalah peninggalan yang

merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Warisan budaya benda seperti situs Kurok-kurok, Gua Jepang, makam kuno, naskah/benda kuno dan cagar budaya lainnya yang seluruhnya berjumlah 22 cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Kota Lhokseumawe telah memiliki warisan budaya tak benda yaitu Canang Ceurekeh serta kesenian tradisional khas Lhokseumawe yaitu Rapai Uroh Duek. Selain itu kesenian Aceh seperti rapai, seurene kale, seudati, saman, ranup lampuan, syair, dalil khairat menjadi kekayaan budaya tak benda yang terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian.

Peninggalan budaya dapat dibuktikan dengan ditemukannya cagar budaya di Kota Lhokseumawe. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.32**  
**Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe**

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruék Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025.*

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa situs atau cagar budaya Kota Lhokseumawe terbanyak berada di kecamatan Banda Sakti yaitu 9 situs terdiri dari 6 makam, 1 Tugu, dan 1 kurok-kurok



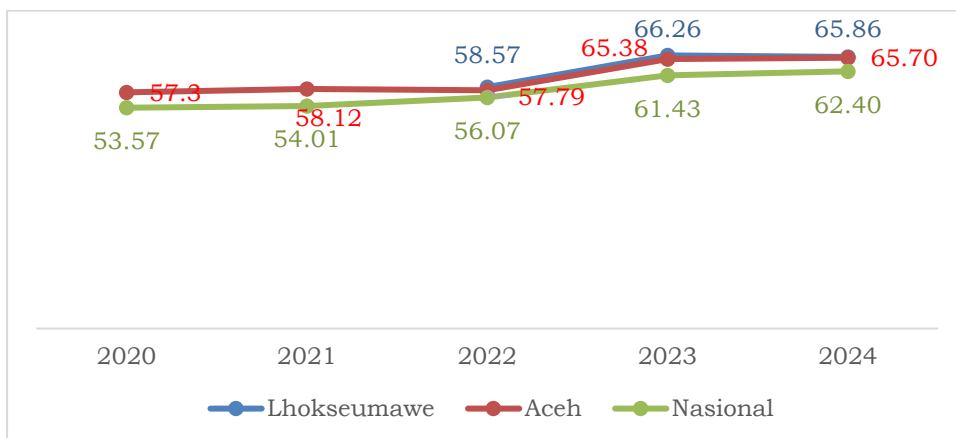
(benteng), Sedangkan situs atau cagar budaya paling sedikit terdapat di Kecamatan Muara Dua yaitu 1 Tugu dan 1 Rumah Adat Ulee Balang. Dari 22 situs atau cagar budaya di Kota Lhokseumawe, belum ada satupun yang terlegalisasi.

### 2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

#### 2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

**Gambar 2.29**  
**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



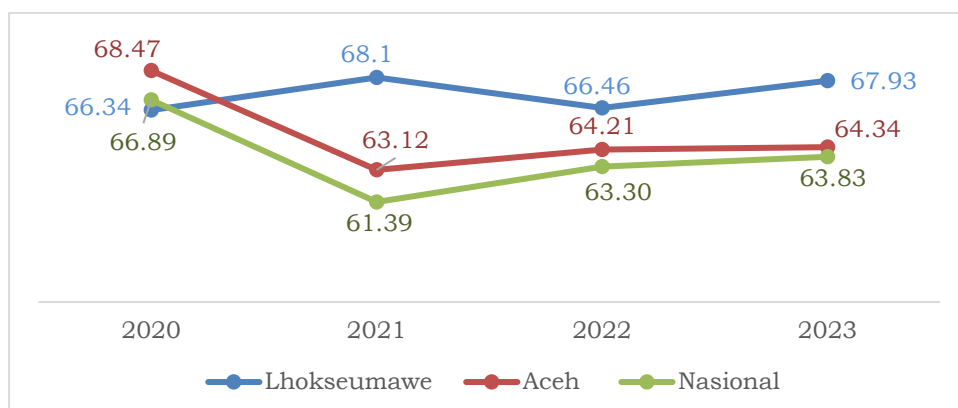
Sumber: BKKBN Aceh, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe pada kurun waktu tahun 2022-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 iBangga Kota Lhokseumawe sebesar 65.86 berada di atas iBangga Aceh sebesar 65.70 dan nasional sebesar 62.40.

#### 2.1.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak digunakan sebagai indikator pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan menjadi ukuran untuk memastikan program dan kebijakan sudah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan anak khususnya terkait perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor. Indeks Perlindungan Anak di lihat dari 5 (lima) klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.30**  
**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**  
**Lhokseumawe 2020-2023**



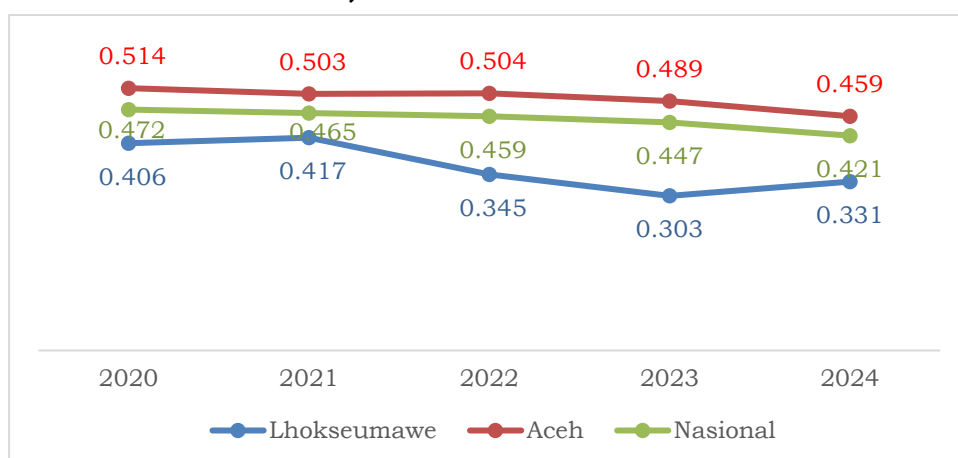
Sumber : DP3AP2KB, 2025

Pada gambar di atas terlihat Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2023 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 66,34 dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 67,93. IPA Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 67.93 berada diatas IPA Aceh sebesar 64.23 dan IPA Nasional sebesar 63.83.

### 2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Berikut Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut.

**Gambar 2.31**  
**Indeks Ketimpangan Gender**  
**Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2020-2024**



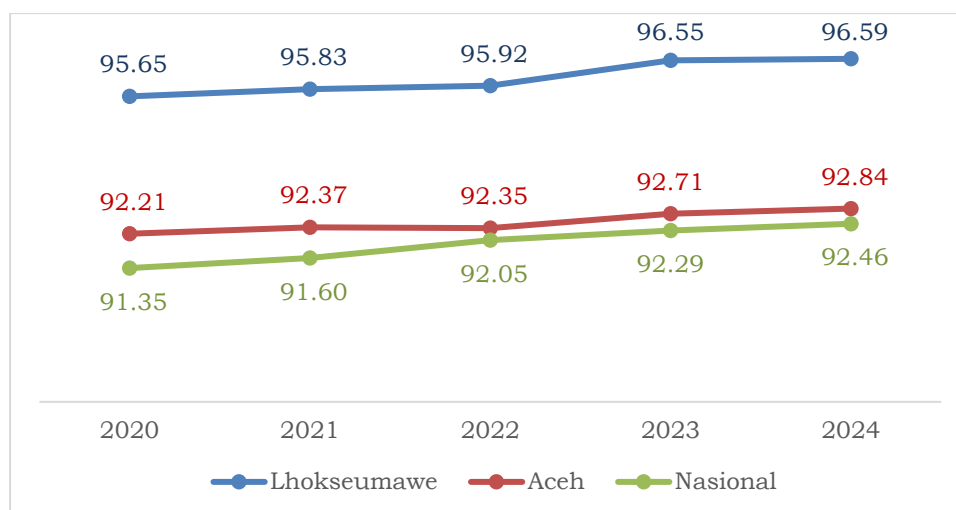
Sumber: BPS, 2025

Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe kurun waktu 2020-2024 cenderung tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2020 IKG Kota Lhokseumawe sebesar 0.406 lebih rendah dibandingkan dengan Aceh sebesar 0,514 dan Nasional sebesar 0,472. Sedangkan pada tahun 2024 IKG Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 0.331 masih lebih rendah dibandingkan Aceh sebesar 0.459 dan Nasional sebesar 0.421.

#### 2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 2.32**  
**Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

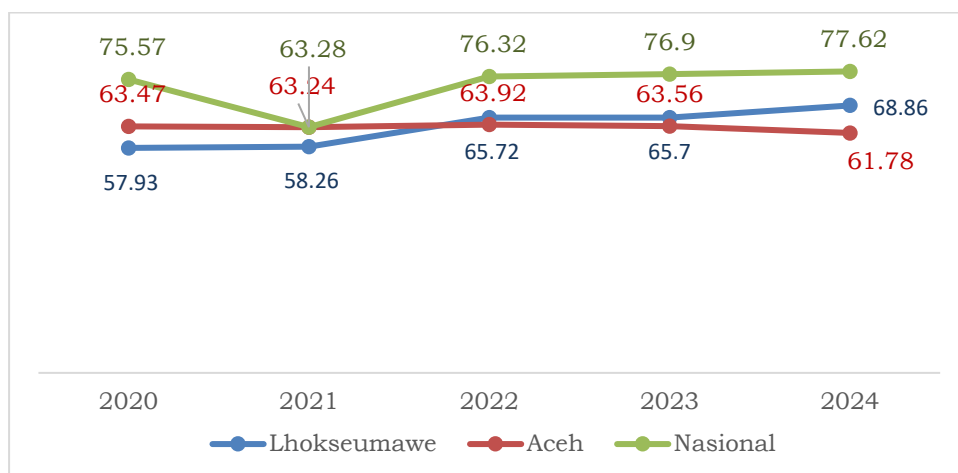
IPG Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2020-2024 terus mengalami kenaikan dan jika dibandingkan dengan IPG Aceh dan IPG Nasional IPG Kota Lhokseumawe berada di atas IPG Aceh dan Nasional. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

#### 2.1.2.6.5 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi

ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

**Gambar 2.33**  
**Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di Kota Lhokseumawe yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2020-2024 memperlihatkan perkembangan yang positif. Tahun 2024 IDG Kota Lhokseumawe berada di atas IDG Aceh namun berada di bawah IDG Nasional. Apabila dilihat dari data pilah gender di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024, terdapat 7 orang perempuan atau 28 persen yang menjadi anggota DPRK.

### 2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

##### 2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah 46.45%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Lhokseumawe memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

**Tabel 2.33**  
**Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk usia <15 th +usia>64th	60.029	59.536	59.668	62.875	63.029
2	Penduduk usia 15-64	128.684	130.405	131.728	133.192	135.676
	<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>46.65</b>	<b>45.65</b>	<b>45.30</b>	<b>47.21</b>	<b>46.45</b>

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024



Dari tahun 2020-2024, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Seperti halnya pada tahun 2020 angka rasio ketergantungan mencapai 46.65%, dan mengalami penurunan pada tahun 2021, kemudian angka ini kembali turun pada tahun 2022 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Lhokseumawe semakin berkurang setiap tahunnya.

### 2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

#### 2.1.3.2.1 Rasio PDRB Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian. Pada kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2020 sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 21.31%, lalu menurun menjadi 21.26% di tahun 2022. Selanjutnya kontribusi sektor perdagangan meningkat kembali menjadi 23,24% di tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 2.99%. Sektor perdagangan berposisi pada posisi pertama dalam penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.34**  
**Rasio PDRB Perdagangan (ADHB)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Perdagangan	1.889.921,5	2.013.276,4	2.184.656,3	2.561.330,4	2.753.463,5
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150,1	8.567.858,1	9.457.579,4	10.222.464,0
	<b>Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)</b>	<b>21.31</b>	<b>21.35</b>	<b>21.26</b>	<b>22.93</b>	<b>23.24</b>
	<b>Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)</b>	<b>25.58</b>	<b>25.52</b>	<b>25.49</b>	<b>27.08</b>	<b>26.94</b>
	<b>Laju Pertumbuhan sektor perdagangan</b>	<b>-3.85</b>	<b>4.17</b>	<b>5.91</b>	<b>9.44</b>	<b>2.99</b>

*Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2025*

#### 2.1.3.2.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Pada kurun waktu 2020-2024 Kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan positif. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 18.78%, lalu meningkat di tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 19.48% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 18.12%. dengan laju pertumbuhan 0.57%.

**Tabel 2.35**  
**Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Industri	1,672,124.6	1.793.400.5	2.002.471.4	2.023.961.6	1.978.225,7
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0
<b>Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)</b>		<b>18.86</b>	<b>19.02</b>	<b>19.48</b>	<b>18.12</b>	<b>16.70</b>
<b>Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)</b>		<b>22.64</b>	<b>22.73</b>	<b>23.37</b>	<b>21.40</b>	<b>19.36</b>
<b>Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan</b>		<b>1.15</b>	<b>0.07</b>	<b>2.82</b>	<b>1.35</b>	<b>0.57</b>

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2025*

#### 2.1.3.2.3 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Pada kurun waktu 2020-2024 Kontribusi sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan negatif, Pada tahun 2020 kontribusi sektor akomodasi penyediaan makan dan minum terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 1.89%, lalu menurun di tahun-tahun berikutnya hingga meningkat menjadi 2.30% di tahun 2024.

**Tabel 2.36**  
**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (ADHB)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makmin	167.578,10	168.466,80	225.635,00	256.396,8	272.390,8
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0
<b>Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)</b>		<b>1.89</b>	<b>1.79</b>	<b>2.20</b>	<b>2.30</b>	<b>2.30</b>
<b>Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)</b>		<b>2.27</b>	<b>2.14</b>	<b>2.63</b>	<b>2.71</b>	<b>2.67</b>
<b>Laju Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan minum</b>		<b>-6.91</b>	<b>-0.85</b>	<b>29.78</b>	<b>9.82</b>	<b>1.61</b>

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2025*

#### 2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

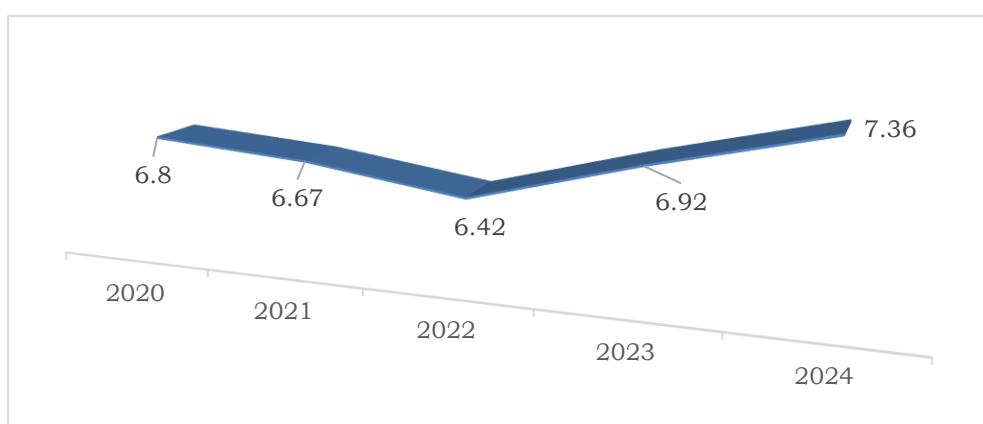
Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan/atau mengembangkan suatu usaha. Perpres itu membedakan wirausaha menjadi dua jenis, yaitu "wirausaha pemula" dan "wirausaha mapan". "Wirausaha pemula" adalah pelaku usaha yang berusaha sendiri, serta pelaku usaha yang dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar. Kemudian "wirausaha

mapan" adalah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Lampiran I Perpres No. 2 Tahun 2022 juga menetapkan tata cara penghitungan rasio kewirausahaan dengan rumus berikut:

- Rasio Wirausaha Pemula =  $\frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$
- Rasio Wirausaha Mapan =  $\frac{\text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$

Perkembangan rasio kewirausahaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut:

**Gambar 2.34**  
**Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : Disperindagkop Lhokseumawe, Kementerian Koperasi 2025

#### 2.1.3.2.5 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat dalam satuan rupiah. Perkembangan volume usaha koperasi dan PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.37**  
**Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Volume Usaha Koperasi	PDRB	Rasio
2020	30,185,344,000	8,867,266,500,000	0.34
2021	14,796,727,000	9,422,285,900,000	0.16
2022	15,573,222,000	10,263,425,400,000	0.15
2023	88.386.445.000	11.169.632.100.000	0.79
2024	24.349.881.000	11.848.236.900.000	0.21

Sumber: Disperindagkop, 2025

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 volume usaha koperasi sebesar 0.34 persen terus menurun hingga sebesar 0.15 persen 2022, namun tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 0.79 persen dan tahun 2024 kembali turun menjadi 0.21 persen.

### 2.1.3.2.6 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Sektor UMKM memegang peran penting dalam peningkatan perekonomian Kota Lhokseumawe. UMKM berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang memulai dengan modal terbatas dan memanfaatkan dapur rumah sebagai tempat produksi, mencerminkan semangat kewirausahaan dari skala kecil. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Berikut proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.38**  
**Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha Mikro	5.123	5.330	5852	6.346	6396
2	Jumlah Usaha Kecil	348	348	348	348	348
3	Jumlah Usaha Menengah	60	60	60	60	60
4	Jumlah UMKM	5.623	5.739	6353	6.848	6.897
	<b>Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)</b>	<b>7.26</b>	<b>7.11</b>	<b>6.42</b>	<b>5.96</b>	<b>5.92</b>

Sumber: Disperindagkop, 2025

Selama lima tahun terakhir, proporsi UKM non pertanian menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024 proporsi UKM non pertanian sebesar 5.93 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah UMKM yang tidak diikuti oleh peningkatan jumlah UKM non pertanian.

### 2.1.3.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun 2020–2024 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.39**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

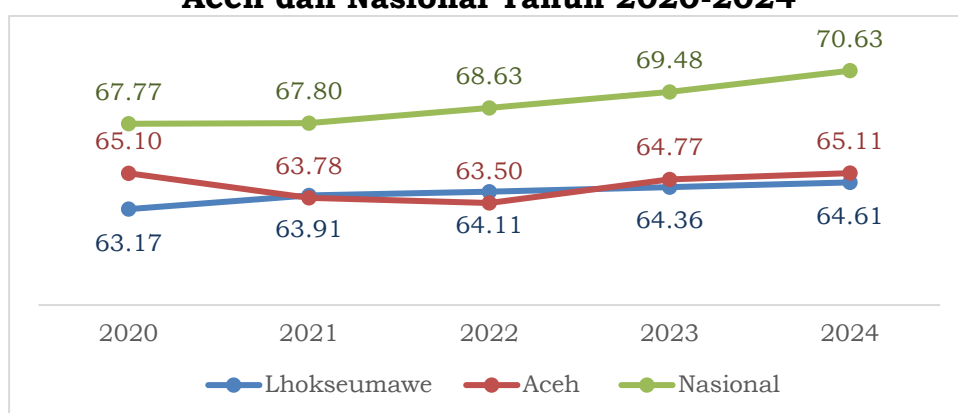
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2020	79.61	47.10	63.17
2021	80.02	48.15	63.91
2022	80.26	48.33	64.11
2023	77.64	51.50	64.36
2024	79.44	50.25	64.61

Sumber : BPS, 2025



Selama periode Agustus 2020-2024 menurut BPS Kota Lhokseumawe, TPAK mengalami peningkatan. Pada Agustus 2020 TPAK Kota Lhokseumawe sebesar 63.17%. Tahun 2024 TPAK mengalami kenaikan sebesar 1.44 poin menjadi 64.61%. Nilai TPAK sebesar 64.61% mengandung arti ada sekitar 64 penduduk kategori angkatan kerja diantara 100 penduduk usia kerja. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini bisa dijelaskan karena pada umumnya laki-laki sebagai penanggung nafkah utama yang aktif secara ekonomis untuk menghasilkan barang dan jasa.

**Gambar 2.35**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan data di atas menurut BPS Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 bila dicermati TPAK Kota Lhokseumawe lebih rendah dibandingkan TPAK Aceh dan nasional. Pada tahun 2021-2022 TPAK Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari Aceh namun, tetap lebih rendah dari nasional. Namun pada tahun 2023-2024 TPAK Lhokseumawe kembali lebih rendah dari Aceh dan Nasional. Rendahnya TPAK Kota Lhokseumawe disebabkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dimana ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran sehingga mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan.

#### 2.1.3.2.8 Indeks Inovasi Daerah

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

**Tabel 2.40**  
**Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024**

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
<b>Tahun 2023</b>			
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD Kota Lhokseumawe	70
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVAC)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	58
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	56
<b>Tahun 2024</b>			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Keajaiban)	Disperindagkop & UKM	75.00
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00
8	Pliek Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00

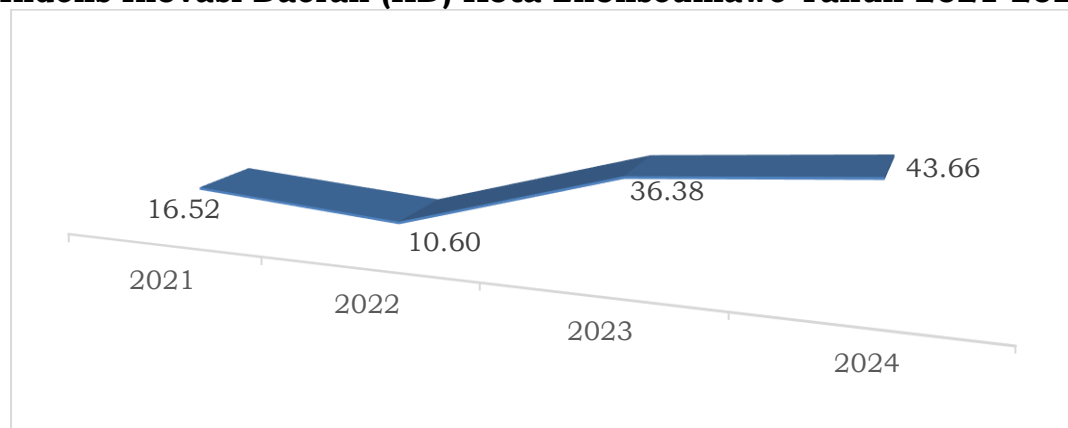
Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Untuk tahun 2024 Kota Lhokseumawe memiliki 11 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, dengan Tingkat kematangan inovasi tertinggi sebesar 91 dan terendah sebesar 63.

Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 36,38 berada pada peringkat ke 83 di Indonesia. Nilai IID ini tergolong dalam kelompok pemerintah kota yang inovatif. IID tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang pada saat itu IID Kota Lhokseumawe sebesar 10.60 dan berada pada peringkat ke 91 di Indonesia. Tahun 2024 IID Kota Lhokseumawe meningkat Kembali menjadi sebesar 43.66 dan berada pada peringkat ke 77 di Indonesia. Selanjutnya berikut ini merupakan posisi peringkat IID Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 s.d 2024.

**Gambar 2.36**

**Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024**



Sumber : SK Kemendagri tentang IID 2021-2024 (diolah)

**2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan Penerapan ekonomi hijau dan biru adalah kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB.

**2.1.3.3.1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB menggambarkan posisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu 2020-2024, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2020, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,10% per tahun dan menurun hingga 9,18% pada tahun 2023. Kemudian angka tersebut sedikit meningkat menjadi 9.30% pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan sebesar 6.07%. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Lhokseumawe kepada sektor-sektor tersier.

**Tabel 2.41**  
**Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	895.154.5	922.451.3	965.874.2	1.025.598.0	1.102.178,5
2	Jumlah PDRB dengan Migas	8.867.266,5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.386.928,9	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0
<b>Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)</b>		<b>10.10</b>	<b>9.80</b>	<b>9.40</b>	<b>9.18</b>	<b>9.30</b>
<b>Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)</b>		<b>12.12</b>	<b>11.70</b>	<b>11.27</b>	<b>10.84</b>	<b>10,79</b>
<b>Laju pertumbuhan</b>		<b>3.85</b>	<b>-1.65</b>	<b>1.60</b>	<b>0.96</b>	<b>6.07</b>

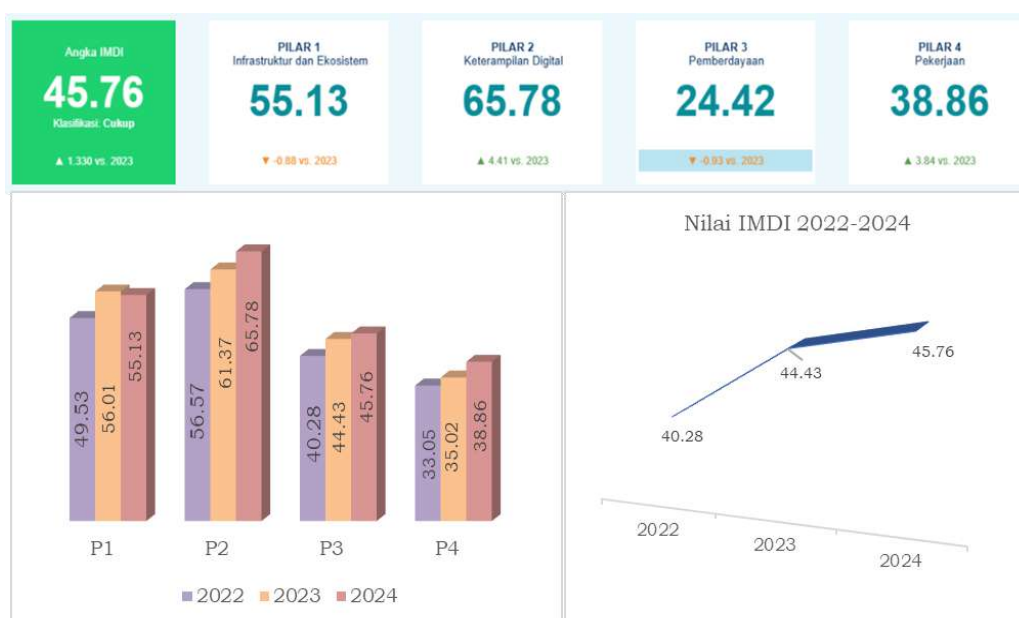
Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2025

### 2.1.3.4 Transformasi Digital

#### 2.1.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi. Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia untuk Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 s.d 2024 seperti gambar di bawah ini.

**Gambar 2.37**  
**Indeks Masyarakat Digital Indonesia**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024**



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/home>, 2025



Capaian IMDI Kota Lhokseumawe tahun 2024 kurun waktu 2022-2024 terus meningkat, tahun 2022 IMDI Kota Lhokseumawe sebesar 40.28 meningkat menjadi sebesar 45.76 tahun 2024. Dari 4 (empat) pilar dari 2022 s.d 2024 pilar 2 s.d pilar 4 mengalami peningkatan hanya pilar 1 yang mengalami penurunan.

### 2.1.3.5 Integritas Ekonomi Domestik dan Global

#### 2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah komponen pengeluaran terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menunjukkan seberapa besar nilai tambah baru dalam suatu perekonomian diinvestasikan dari pada dikonsumsi. Komponen ini mengukur nilai perolehan aset tetap baru atau yang sudah ada oleh sektor bisnis, pemerintah, dan rumah tangga murni (tidak termasuk perusahaan yang tidak berbadan hukum) dikurangi penjualan aset tetap.

**Tabel 2.42**  
**Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)**

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.048,44	3.049,79	3.045,85	3.047,56	3.255,85
2	PDRB Pengeluaran	6.984,71	7.252,90	7.543,74	7.861,01	8.211,43
	<b>Persentase</b>	43.65	42.05	40.38	38.77	39.65

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Pada kurun waktu 2020-2024, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 PMTB sebesar 3.048,44 juta atau 43,65% dari PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran dan terus menurun sampai tahun 2023 menjadi sebesar 3.047,56 juta atau 38,77% namun pada tahun 2024 PMTB sedikit mengalami peningkatan menjadi 3.255,85 atau sebesar 39,65% dari PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran.

#### 2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Nilai net ekspor antar daerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antar daerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah. Adapun perkiraan nilai net ekspor antar daerah saat ini menggunakan metode Cross Houlling.

**Tabel 2.43**  
**Ekspor Barang dan Jasa PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)**

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ekspor Neto	-546,92	-391,39	-43,67	105,85	34,51
2	PDRB Pengeluaran	6.984,71	7.252,90	7.543,74	7.861,01	8.211,43
	<b>Persentase</b>	-7.83	-5.4	-0.58	1.35	0.42

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Nilai Ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe periode 2020-2023 mengalami tren positif walaupun peningkatan tidak signifikan. Pada tahun 2020 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe sebesar (546,92) juta rupiah atau sebesar (-7,83)% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 105,85 juta rupiah atau 1,35% namun pada tahun 2024 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 34,51 juta rupiah atau 0,42%.

### 2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

#### 2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau City Development Index (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah, akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon.

#### 2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100. Indikator ini akan dapat menunjukkan persentase rumah layak huni yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series dari tahun 2020-2024.

**Tabel 2.44**  
**Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah seluruh rumah layak huni	35.856	37.074	36.780	37.878
2	Jumlah seluruh rumah	42.354	43.930	45.504	46.315
<b>Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni</b>		<b>84.65</b>	<b>84.39</b>	<b>80.83</b>	<b>81.78</b>

*Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025*

Berdasarkan data yang ada cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung meningkat, sedikit menurun tahun 2021 dan 2023. Indikator cakupan rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Lhokseumawe. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Dari halaman resmi Kementerian PUPR, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

**Tabel 2.45**  
**Jumlah Rumah Tidak Layak Huni**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tidak layak huni	15.969	18.587	17.199	8.430

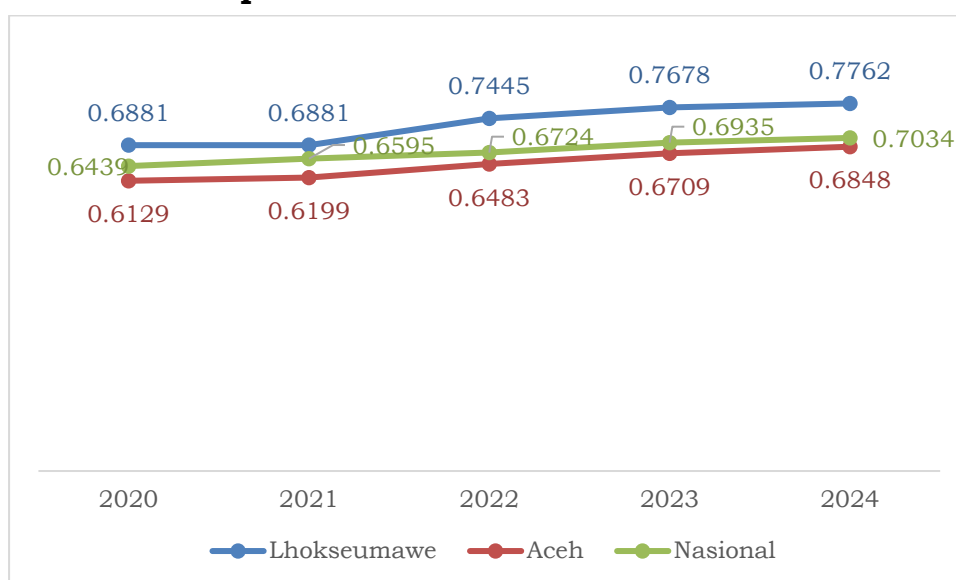
Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH belum efektif dilaksanakan.

### 2.1.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Gambar 2.38**  
**Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe**  
**Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.

Dari gambar dapat di lihat secara lengkap status perkembangan desa di Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Aceh dan nasional mulai tahun 2020-2024. Status IDM Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,6881 menjadi 0.7762 termasuk dalam kategori Maju dengan nilai 0.7762 lebih baik dari Provinsi Aceh Tahun 2024 masuk dalam Kategori Berkembang dengan nilai 0,6848, meningkat dibandingkan dengan status IDM Kota Lhokseumawe tahun 2021 dengan nilai 0,6881. Meskipun demikian, perolehan nilai

status IDM Kota Lhokseumawe Tahun 2022 berada di atas nilai rata-rata Aceh dan nasional yaitu 0,6724. Dan pada Tahun 2023 nilai IDM Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 0.7678 di atas Aceh dengan nilai 0,6709 dan nasional sebesar 0.6935 Adapun dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk IDM masing-masing Gampong di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.46**  
**Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No.	Nama Desa	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2004
<b>A Muara Dua</b>						
	- Mandiri	0	0	1	2	3
	- Maju	5	5	12	14	13
	- Berkembang	12	12	4	1	1
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
<b>B Banda Sakti</b>						
	- Mandiri	1	1	5	12	16
	- Maju	3	3	12	6	2
	- Berkembang	14	14	1	0	0
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
<b>C Blang Mangat</b>						
	- Mandiri	0	0	2	2	4
	- Maju	2	2	1	7	8
	- Berkembang	20	20	19	13	10
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
<b>D Muara Satu</b>						
	- Mandiri	1	1	2	2	2
	- Maju	3	3	6	6	6
	- Berkembang	7	7	3	3	3
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2025

Untuk lebih jelas jumlah status desa di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 dapat di lihat pada gambar dibawah ini:

**Tabel 2.47**  
**Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	2	2	10	18	25
2	Desa Maju	13	13	31	33	29
3	Desa Berkembang	53	53	27	7	14
4	Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
6	Jumlah Desa	68	68	68	68	68
<b>Persentase Desa Mandiri</b>		<b>2,94</b>	<b>2,94</b>	<b>14,71</b>	<b>26,47</b>	<b>36,76</b>

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kota Lhokseumawe tidak ada. Sedangkan status desa berkembang tahun 2020 dan 2021 sama yaitu 53 desa pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 27 desa yang berstatus desa berkembang dan tahun 2024 menjadi 14 desa atau



20,59%. Status desa maju terdapat pada 13 desa pada tahun 2020, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat jumlah desa yang berstatus maju menjadi sebanyak 13 desa dan tahun 2024 menjadi 29 desa maju atau 42,65%. Status desa mandiri pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 25 desa yang berstatus desa mandiri atau 36,76%

Penurunan atau peningkatan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dan sebaliknya dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut atau terdapat faktor-faktor yang mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.48**  
**Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS	
BANDA SAKTI	BANDA MASEN	0,7219	Maju	
	HAGU BARAT LAUT	0,8208	Mandiri	
	HAGU SELATAN	0,8324	Mandiri	
	HAGU TEUNGOH	0,8230	Mandiri	
	JAWA BAROE	0,8375	Mandiri	
	KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE	0,8959	Mandiri	
	KEUDE ACEH	0,8302	Mandiri	
	KOTA LHOKSEUMAWE	0,8930	Mandiri	
	KUTA BLANG	0,8990	Mandiri	
	LANCANG GARAM	0,9048	Mandiri	
	MON GEUDONG	0,8635	Mandiri	
	PUSONG BARU	0,8229	Mandiri	
	PUSONG LHOKSEUMAWE	0,8168	Mandiri	
	SIMPANG EMPAT	0,8710	Mandiri	
	TUMPOK TEUNGOH	0,8511	Mandiri	
	UJONG BLANG	0,8263	Mandiri	
	ULEE JALAN	0,8025	Maju	
	UTEUN BAYI	0,8362	Mandiri	
	BLANG MANGAT	ALUE LIM	0,6910	Berkembang
		ASAN KAREUNG	0,6873	Berkembang
BALOI		0,7329	Maju	
BLANG BULOH		0,7073	Maju	
BLANG CUT		0,8241	Mandiri	
BLANG PUNTEUET		0,7202	Maju	
BLANG TEUE		0,6817	Berkembang	
BLANG WEU BAROH		0,7002	Berkembang	
BLANG WEU PANJOE		0,6908	Berkembang	
JAMBO MESJID		0,7410	Maju	
JAMBO TIMU		0,7456	Maju	
JEULIKAT		0,7224	Maju	
KEUDE PUNTEUET		0,8319	Mandiri	
KUALA		0,7108	Maju	
KUMBANG PUNTEUET		0,6797	Berkembang	
MANE KAREUNG		0,6821	Berkembang	
MESJID PUNTEUET		0,8567	Mandiri	
RAYEUK KAREUNG		0,7390	Maju	
SEUNEUBOK		0,7000	Berkembang	
TEUNGOH		0,7035	Berkembang	
TUNONG	0,7032	Berkembang		
ULEE BLANG MANE	0,8181	Mandiri		

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	IDM	STATUS	
MUARA DUA	ALUE AWE	0,8468	Mandiri	
	BLANG CRUM	0,7419	Maju	
	BLANG POROH	0,7394	Maju	
	COT GIREK KANDANG	0,7710	Maju	
	CUT MAMPLAM	0,7314	Maju	
	KEUDE CUNDA	0,8002	Maju	
	LHOK MON PUTEH	0,7575	Maju	
	MEUNASAH ALUE	0,7210	Maju	
	MEUNASAH BLANG	0,7289	Maju	
	MEUNASAH MANYANG	0,7554	Maju	
	MEUNASAH MEE	0,8117	Maju	
	MEUNASAH MESJID	0,8529	Mandiri	
	MNS. PANGGOI	0,7783	Maju	
	PALOH BATEE	0,7197	Maju	
	PAYA BILI	0,6810	Berkembang	
	PAYA PUNTEUET	0,7898	Maju	
	UTEUNKOT	0,8270	Mandiri	
	MUARA SATU	BATUPHAT BARAT	0,8140	Maju
		BATUPHAT TIMUR	0,8511	Mandiri
BLANG NALEUNG MAMEH		0,8065	Maju	
BLANG PANYANG		0,7229	Maju	
BLANG PULO		0,8844	Mandiri	
COT TRIENG		0,7010	Berkembang	
MEUNASAH DAYAH		0,7063	Berkembang	
MEURIA PALOH		0,7984	Maju	
PADANG SAKTI		0,7881	Maju	
PALOH PUNTI		0,7494	Maju	
UJONG PACU		0,6940	Berkembang	

*Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2025*

### 2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

#### 2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu daerah. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu daerah. Ia berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Semakin tinggi nilai tax ratio suatu daerah, maka pemerintah daerah lebih dapat mengandalkan APBD untuk melakukan pembangunan. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak.

**Tabel 2.49**  
**Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Realisasi Pajak	PDRB	Tax Ratio
1	2020	105.069.641.024,00	8.867.266.500.000	1,18
2	2021	82.129.767.768,97	9.422.285.900.000	0,87
3	2022	88.725.171.946,20	10.263.425.400.000	0,86
4	2023	79.085.772.870,00	11.169.632.100.000	0,71
5	2024	86.431.498.758,00	11.848.236.900.000	0,73

*Sumber : BPS Lhokseumawe dan BPKD Lhokseumawe, 2025*

Dari tabel di atas rasio pajak terhadap PDRB Kota Lhokseumawe masih sangat minim, pada tahun 2020 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 1,18 persen. Persentase ini sedikit mengalami penurunan

pada tahun 2023, rasio pajak menurun menjadi 0,71 persen. Pemerintah Daerah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak dan mencari potensi pendapatan lainnya termasuk dari pajak dan retribusi.

### 2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi. Laju Inflasi Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Secara umum inflasi Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Inflasi tertinggi Kota Lhokseumawe adalah tahun 2022 yaitu sebesar 5.37% dan inflasi pada tahun 2023 adalah terendah yaitu sebesar 1.56%. Mulai Tahun 2020, perhitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2018 sehingga terdapat perbedaan pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Lhokseumawe menurut kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.50**  
**Inflasi Kota Lhokseumawe menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)**  
**Tahun 2020-2024**

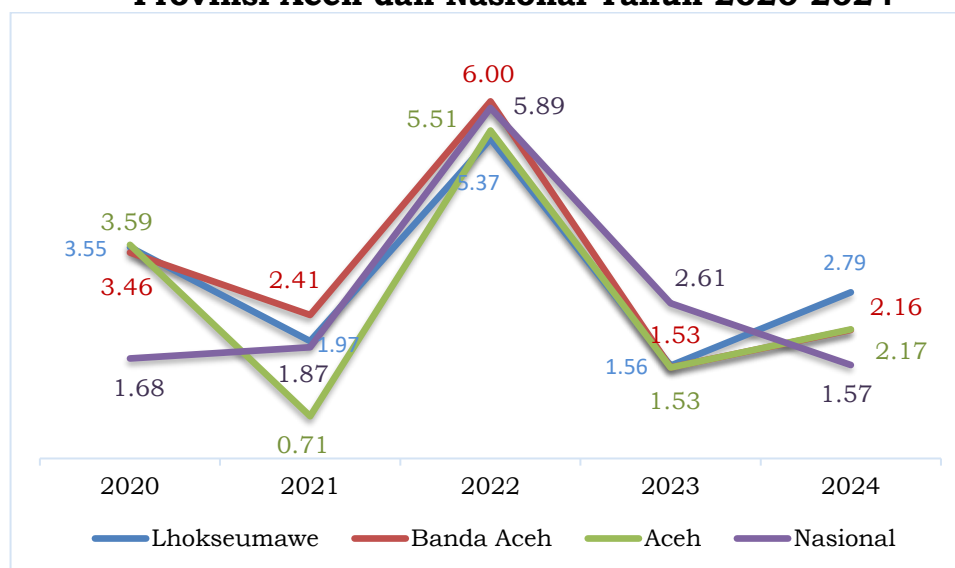
No	Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	8.01	3.36	5.13	1.34	5.28
2	Pakaian Dan Alas Kaki	2.72	2.94	5.12	4.20	1.36
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya	0.73	1.48	2.84	0.47	1.55
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.24	1.35	5.52	-0.71	2.85
5	Kesehatan	0.66	1.22	0.33	1.81	0.04
6	Transportasi	0.05	0.38	20.65	1.86	0.17
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	-1.21	0.25	-0.59	0.28	2.32
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	2.02	0.25	7.49	8.93	0.89
9	Pendidikan	5.82	1.44	1.13	0.52	3.86
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/restoran	-0.04	0.05	3.76	1.59	2.06
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	4.67	1.63	3.47	2.45	3.43
	Inflasi Kota Lhokseumawe	3.55	1.97	5.37	1.56	2.79

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025*

Inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 3.55% lebih rendah dibandingkan inflasi Aceh yaitu sebesar 3.59% dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 1.68%. Kemudian pada tahun 2021 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 1.97% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 0.71% dan inflasi nasional yaitu

sebesar 1.87%. Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 3.36% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu kesehatan yaitu sebesar 0.05%.

**Gambar 2.39**  
**Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya pada tahun 2024 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 2.79% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 2.17% inflasi nasional yaitu sebesar 1.57%. Penyumbang inflasi terbesar adalah Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu sebesar 5.28% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yaitu sebesar -0.71%.

### 2.1.3.7.3 Total Kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dalam proses intermediasi di sektor keuangan terdapat hubungan antara Ultimate Lender (UL), yaitu pemilik dana di masyarakat, dengan Ultimate Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bank memiliki tempat yang teramat penting dalam perekonomian. Karena peran bank sebagai lembaga yang dapat Borrower (UB), yaitu pengguna dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Ultimate Lender adalah kelompok “penabung”. Jumlah mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui perannya di dalam proses penciptaan kredit serta berbagai jasa keuangan lain yang diberikan. Seluruh tabungan kelompok ini membentuk penawaran loanable funds. Sementara ultimate borrower adalah kelompok masyarakat yang memerlukan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Jenis kelompok yang terakhir ini didominasi oleh golongan pengusaha, perusahaan, atau industri. Lembaga keuangan, termasuk dengan bank, berada di antara ultimate lender dan ultimate borrower untuk menjembatani hubungan khas antara keduanya, memberikan jasa intermediasi berupa proses keperantaraan antara surplus unit dengan defisit unit dalam ekonomi. Perkembangan intermediasi sektor keuangan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 sebagai berikut.



**Tabel 2.51**  
**Total Kredit dan dana Pihak Ketiga Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024 (juta)**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Kredit	5.683.259	3.870.255	4.332.324	4.352.104	5.528.759
2	Total Dana Pihak Ketiga	5.730.123	4.451.995	4.640.859	4.376.562	4.846.497
3	PDRB ADHB	8,867,266.5	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11,848,236.9
	<b>Kredit/PDRB</b>	<b>64,09</b>	<b>41,04</b>	<b>42,15</b>	<b>38,96</b>	<b>46,66</b>
	<b>Dana Pihak Ketiga/PDRB</b>	<b>64,62</b>	<b>47,20</b>	<b>45,15</b>	<b>39,18</b>	<b>40,90</b>

*Sumber : Bank Indonesia, 2025 dan LDA 2025*

#### **2.1.3.7.4 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)**

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Tujuan dari IKAD adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;
2. Memperkuat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan memberi informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;
3. Melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), memperluas cakupan, serta memberikan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam.

Hasil Pengukuran Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah sebesar 3,88 berada pada posisi ketiga setelah Kota Sabang sebesar 5,44 dan Kota Banda Aceh sebesar 5,26.

#### **2.1.4 Aspek Pelayanan Umum**

##### **2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

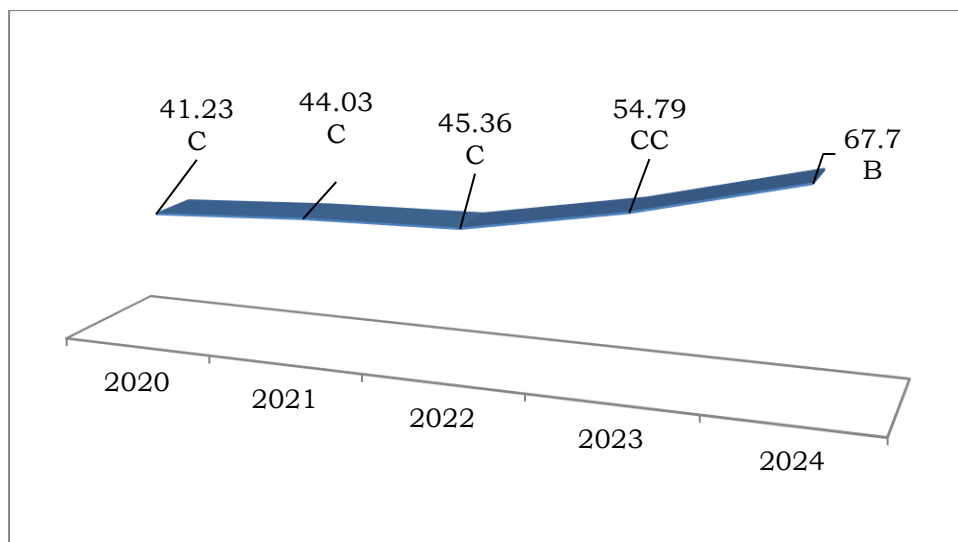
###### **2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi**

Pelayanan umum sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau melalui kualitas birokrasi sebagai sistem hulu dan kualitas pelayanan publik sebagai sistem hilir. Kualitas birokrasi dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis

tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berkenaan dengan roadmap nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.40**  
**Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

Kinerja reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe belum menunjukkan nilai yang baik setiap tahunnya ditandai dengan rendahnya capaian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun dengan predikat C (kurang), namun pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi prediket CC dengan poin 54.79 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 67.70 atau predikat B. Capaian yang meningkat ini tidak lepas dari perubahan metode pengukuran yang menyertakan komponen reformasi birokrasi tematik yang menjadi pengungkit utama. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi.

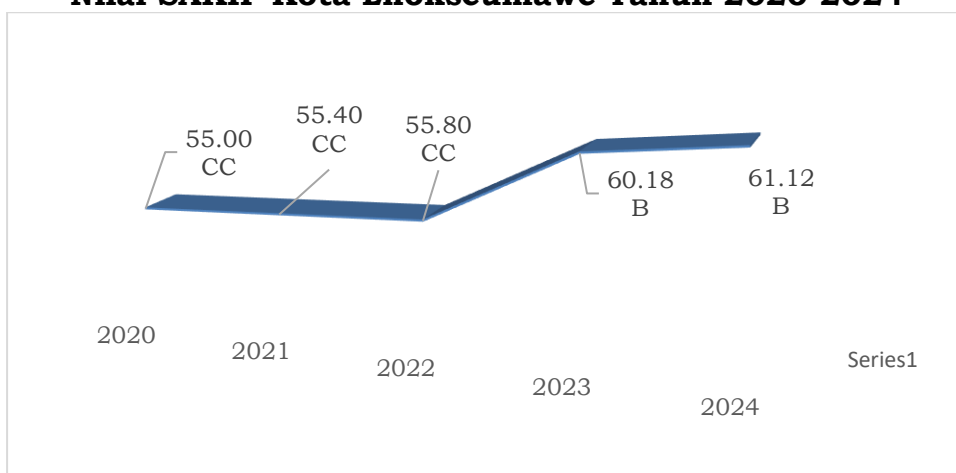
#### **2.1.4.1.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah. Evaluasi SAKIP dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 nilai SAKIP Kota Lhokseumawe sebesar 55.00 (kategori CC) sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 61.12 yang termasuk dalam kategori B. Perkembangan Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe periode 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 2.41**  
**Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

Selanjutnya nilai komponen nilai hasil evaluasi SAKIP Kota Lhokseumawe tahun 2020 s.d 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.52**  
**Capaian Komponen nilai SAKIP**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029**

No	Komponen Nilai SAKIP	Bobot	2020	2021	Bobot	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20.10	20.22	30	20.29	22.15	22.37
2	Pengukuran Kinerja	25	9.19	9.22	30	13.05	14.09	14.32
3	Pelaporan Kinerja	15	8.73	8.75	15	8.76	9.19	9.37
4	Evaluasi internal	10	5.80	5.83	25	13.70	14.75	15.06
5	Capaian Kinerja	20	11.18	11.38	-	-	-	-
<b>Nilai Hasil SAKIP</b>		<b>100</b>	<b>55.00</b>	<b>55.40</b>	<b>100</b>	<b>55.80</b>	<b>60.18</b>	<b>61.12</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			<b>CC</b>	<b>CC</b>		<b>CC</b>	<b>B</b>	<b>B</b>

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

### 2.1.4.1.3 Indeks Reformasi Hukum

Salah satu komponen strategis dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah yang diukur dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 55,13 dan pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 77,72.

### 2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan struktur penilaian:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian domain kebijakan SPBE terdiri atas kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE. Domain tata kelola SPBE akan dievaluasi dari aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sedangkan domain layanan SPBE akan dievaluasi dari aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

**Tabel 2.53**  
**Nilai Indeks SPBE**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Indeks SPBE	1.60 Kurang	1.54 Kurang	1.54 Kurang	2.35 Cukup	2.80 Baik

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2024*

Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2019-2022 masuk dalam kategori kurang dan tahun 2021-2022 Nilai Indeks SPBE kota Lhokseumawe menurun menjadi 1.54. Tahun 2023, evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe menunjukkan kategori cukup dengan nilai Indeks SPBE 2.35 dan tahun 2024 meningkat menjadi 2,80 dengan kategori baik.

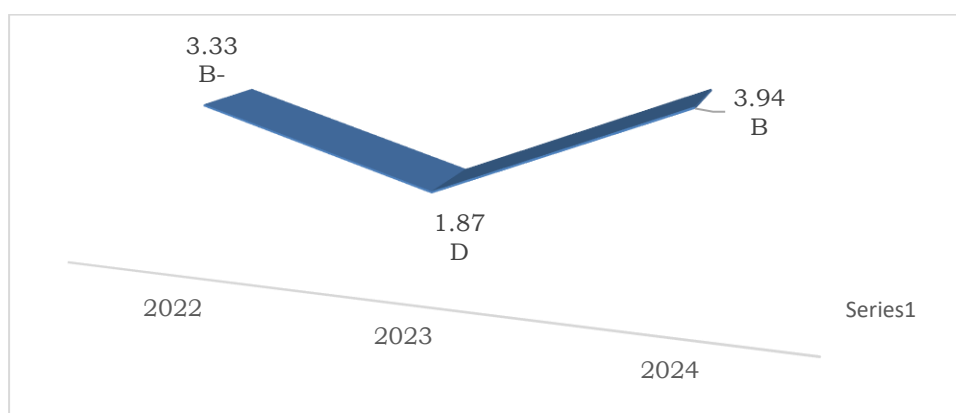
### 2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 (enam) Aspek Kebijakan Pelayanan yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan. Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2022 sebesar 3.33



dengan kategori (B-) dengan Lokus penilaian pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2023 Nilai IPP Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 1.87 dengan kategori (D) dengan lokus penilaian pada Dinas Sosial dan Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.94 dengan kategori B dengan Lokus Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Gambar 2.42**  
**Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2022-2024**



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

#### 2.1.4.1.6 Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.

**Tabel 2.54**  
**Capaian Survei Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2021-2023**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
SPI KPK	N/A	66,33	70,94	69,44	64,37

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 66,33 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 70,94 dan tahun 2023 menurun menjadi sebesar 69.44 selanjutnya tahun 2024 kembali turun menjadi sebesar 64,37. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau

meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini tidak efektif.

#### **2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial**

##### **2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan Represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

**Tabel 2.55**  
**Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penegakan Perda/Qanun	5	8	19	24	67
2.	Jumlah Pelanggaran Perda/Qanun	10	15	20	27	70
<b>Persentase</b>		<b>50,00</b>	<b>53,00</b>	<b>95,00</b>	<b>88,00</b>	<b>95,00</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, 2025*

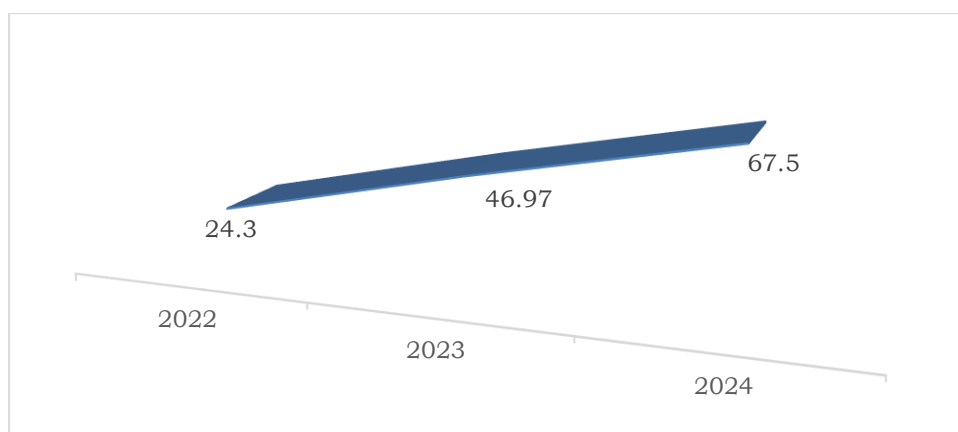
Dari tabel di atas, dapat terlihat pada tahun 2020-2024 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang terjadi di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun sebesar 50% dan peningkatan menjadi 53% di tahun 2021 selanjutnya di tahun 2022 meningkat tajam menjadi 95% dan menurun menjadi 88% di tahun 2023 an meningkat kembali menjadi 95%. Peningkatan persentase penegakan perda/qanun merupakan salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi.

##### **2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM**

RANHAM merupakan rencana aksi nasional yang memuat berbagai kegiatan dan target yang harus dicapai dalam rangka memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM diIndonesia. Pemerintah melalui RANHAM berusaha untuk memastikan Hak Asasi Manusia dihormati dan dilindungi serta dipenuhi dan ditegakkan dengan baik. RANHAM memiliki berbagai sasaran strategis sepertipeningkatan kapasitas aparatur negara dalampenanganan HAM peningkatan akses Masyarakat terhadap informasi HAM serta partisipasi masyarakat

dalam penegakan HAM. Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe tahun 2020 s.d 2024 adalah sebagai berikut.

**Gambar 2.43**  
**Persentase Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2022-2024**



Sumber : Kemenkumham, 2025

Capaian Aksi HAM kota Lhokseumawe dari tahun 2022 s.d 2024 terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 24.3 persen menjadi 67.5 persen pada tahun 2024.

### 2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

#### 2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem inovasi. Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Kota Lhokseumawe memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan kabupaten/kota lain. Namun saat ini Kota Lhokseumawe masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Kota Lhokseumawe. Dari hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022, Kota Lhokseumawe mencapai kategori tinggi yaitu 2,89. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.56**  
**Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

2020			Indeks					
Aspek	Pilar	Indeks	Aspek	Pilar	2021	2022	2023	2024
<b>Faktor Penguat</b>	Kelembagaan	3.25	<b>Lingkungan Pendukung</b>	Institusi	3.25	3.88	3.99	4.25
	Infrastruktur	1.75		Infrastruktur	1.75	1.74	2.48	2.98
	Perekonomian Daerah	2.02		Adopsi TIK	2.25	3.55	4.47	4.75
<b>SDM</b>	Kesehatan	4.25		Stabilitas ekonomi makro	2.02	2.15	2.88	4.11
	Pendidikan dan Keterampilan	2.45	<b>SDM</b>	Kesehatan	4.25	4.00	3.99	3.93

2020				Indeks				
Aspek	Pilar	Indeks	Aspek	Pilar	2021	2022	2023	2024
<b>PASAR</b>	Efisiensi Pasar Produk	1.58		Ketrampilan	2.46	4.02	4.21	3.82
	Ketenaga kerjaan	2.00	<b>PASAR</b>	Pasar produk	1.58	3.79	3.84	4.39
	Akses Keuangan	1.00		Pasar tenaga kerja	2.00	3.10	3.34	4.51
	Ukuran Pasar	4.67		Sistem keuangan	1.00	1.10	1.47	2.61
<b>Ekosistem Inovasi</b>	Dinamika Bisnis	0.42		Ukuran pasar	4.67	0.48	3.98	4.00
	Kapasitas Inovasi	1.42	<b>Ekosistem Inovasi</b>	Dinamisme bisnis	0.42	5.00	2.70	2.73
	Kesiapan Teknologi	2.25		Kapabilitas inovasi	0.42	1.94	3.51	2.87
<b>SKOR IDSD</b>		<b>2.25</b>	<b>SKOR IDSD</b>		<b>2.26</b>	<b>2.89</b>	<b>3.40</b>	<b>3.75</b>

*Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025*

Dari Tabel di atas Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 2,89 meningkat dari IDSD 2021 yaitu 2.26 namun masih berada di bawah Indeks Daya Saing Daerah Propinsi Aceh sebesar 3,15 dan di bawah Indeks Daya Saing Daerah Nasional yaitu sebesar 3.26. Dari 4 Komponen dan 12 Pilar IDSD, komponen pasar pada pilar 10: ukuran pasar skor nya masih rendah yaitu 0.48. Dan pada tahun 2023 Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 3.40 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.75 berada di atas IDSD Aceh sebesar 3.49 dan Nasional 3,43.

#### 2.1.4.3.2 Indeks Pembangunan Syariah

Pelaksanaan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi pelaksanaan syariat Islam salah satu capaiannya diukur dengan Survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).

Indeks Pembangunan Syariah terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al quran, Manajemen Mesjid, Hukum Jinayat dan Akhlak. Adapun Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 83,91 dengan skor masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57**  
**Dimensi Indeks Pembangunan Syariah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024**

No	Dimensi IPS	2021	2024
1	Akidah	95.83	85,74
2	Lembaga Keuangan Syariah	79.15	85.97
3	Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal	77.12	85.81
4	Melek Al Quran	87.59	84.56
5	Manajemen Mesjid	79.15	82.90



No	Dimensi IPS	2021	2024
6	Hukum Jinayat	73.03	79.60
7	Akhlak	88.01	82.76
<b>Indeks Pembangunan Syariah</b>		<b>80.65</b>	<b>83,91</b>

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2025

#### 2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

##### 2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

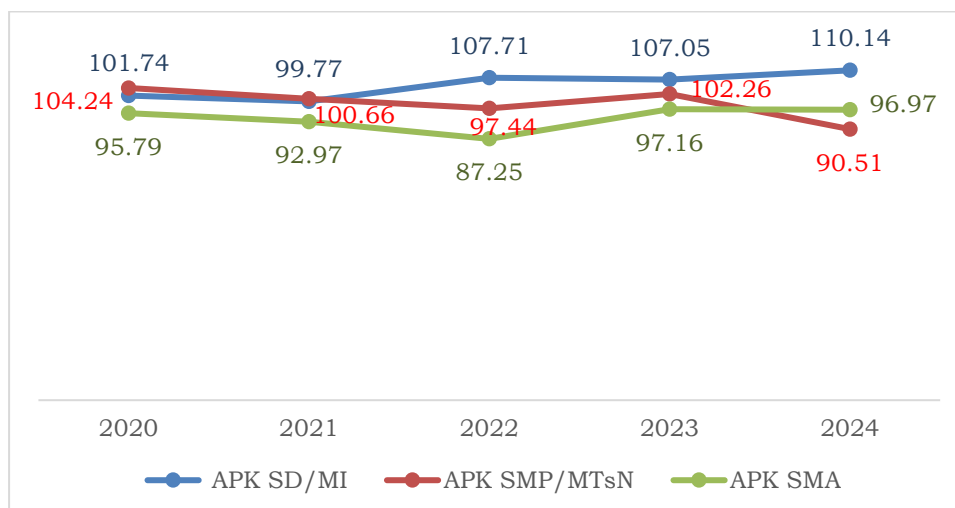
###### 2.1.4.4.1.1 Pendidikan

###### A. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Gambar 2.44**

##### Angka Partisipasi Kasar Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024



Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2025

Apabila melihat gambar di atas, nilai perentase APK dari jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTsN memiliki persentase lebih dari 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk dari luar Kota Lhokseumawe yang bersekolah di Kota Lhokseumawe. Angka partisipasi kasar pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2021-2022 mengalami penurunan dan tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan, namun tahun 2024 mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2022-2024 terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan tingginya daya tampung sekolah di Kota

Lhokseumawe dan mutu sekolah yang baik di Kota Lhokseumawe sehingga menjadi pilihan masyarakat dari daerah lain.

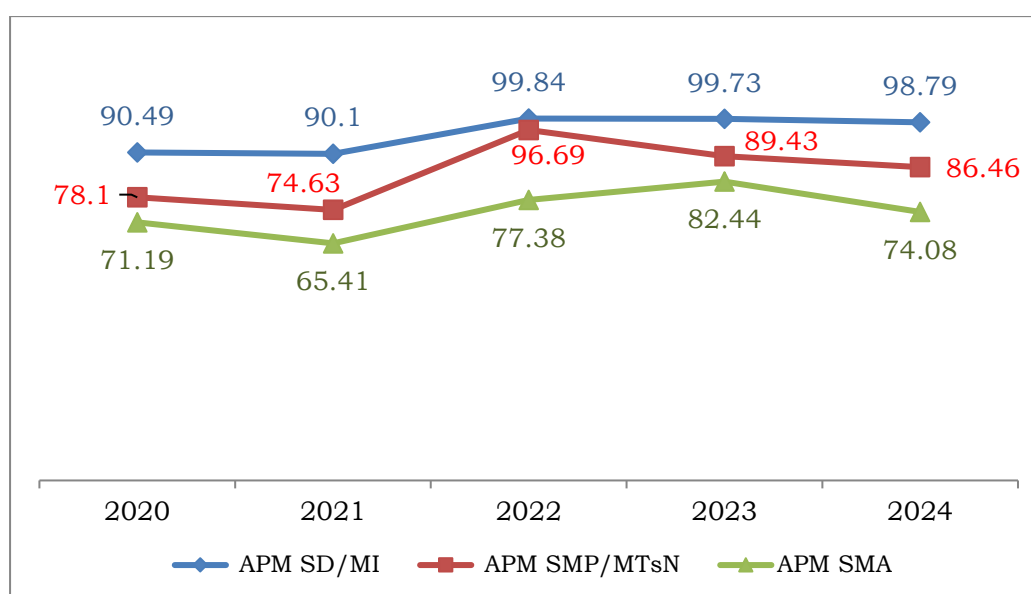
Pada kurun waktu 2020-2024 angka APK pada jenjang SMP/MTsN fluktuatif cenderung menurun. Penurunan tersebut karena penerapan Permendikbud tentang PPDB berdasar sistem zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan.

Angka APK pada jenjang SMA pada kurun waktu 2020-2022 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 95.79 persen di tahun 2020 menjadi 87.25 persen di tahun 2022. Selanjutnya di Tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan menjadi 97.16 persen. Peningkatan APK disebabkan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan SMA di Kota Lhokseumawe, namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 96.97 persen.

### B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Gambar 2.45**  
**Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2024

Angka APM SD/MI dalam kurun waktu 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 APM SD/MI sebesar 90.49 persen dan tahun 2021 menjadi sebesar 90.1 persen. Angka tersebut berfluktuasi menjadi 98.79 persen tahun 2024.

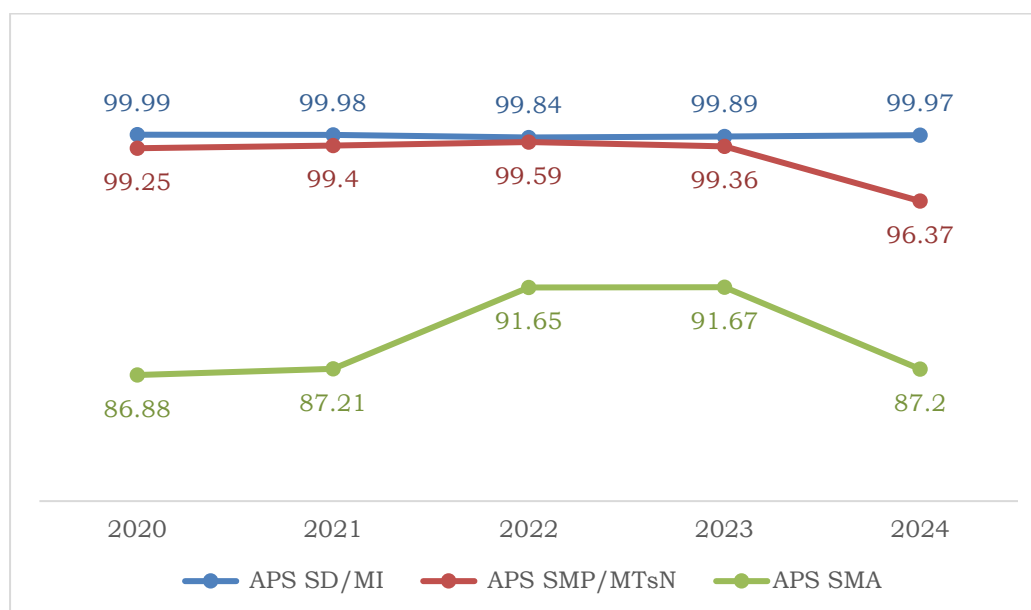
Adapun angka APM pada jenjang SMP/MTsN dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 APM SMP/MTsN sebesar 78.10 menurun hingga 74.63 pada tahun 2021. Namun tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 96.69 persen dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 89.43 persen dan kembali turun menjadi 86.46 pada tahun 2024. Pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami penurunan, namun pada tahun 2022-2023 terus meningkat. Peningkatan ini disebabkan sekolah di Lhokseumawe menjadi rujukan masyarakat, namun tahun 2024 mengalami penurunan kembali menjadi 74.08.

### C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat di bawah ini.

**Gambar 2.46**

#### **Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber : BPS, 2024

Berdasarkan gambar diatas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung menurun. Pada tahun 2020 APS SD/MI sebesar 99.99% kemudian pada tahun 2021-2022 terjadi penurunan APS menjadi 99.84% di tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 99.97% di tahun 2024. Adapun angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 APS SMP/MTS 99.25% dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 99.40% tahun 2020, pada tahun 2021-2022 sedikit meningkat sehingga menjadi 99.59% kemudian mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 99.36% dan sedikit meningkat menjadi 99.37 di tahun 2024.

Adapun APS pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 APS SMA sebesar 86.88% dan menjadi 91.67% pada tahun 2023. APS SMA mengalami peningkatan disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa SMP/MTs usia 16-18 tahun jumlah siswa sekolah madrasah 16-18 tahun yang mendapat dan memiliki kesempatan untuk bersekolah. Pada Tahun 2024 APS SMA mengalami penurunan menjadi 87.20%.

#### D. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

**Gambar 2.47**  
**Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan jenjang SD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 menunjukkan besaran yang tetap yakni 100%. Angka kelulusan jenjang SMP tahun 2020-2021 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020 Angka kelulusan SMP sebesar 99.00% dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 99.50% pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022-2024 angka kelulusan jenjang SMP mencapai 100%.

#### E. Fasilitas Pendidikan

Pelaksanaan Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.58**  
**Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas					Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total		
2020	SD	564	0	94	18	0	676	83.43
	SMP	252	0	55	15	0	322	78.26
2021	SD	406	415	0	0	0	821	49.45
	SMP	188	161	0	0	0	349	53.87
2022	SD	405	148	123	40	0	716	56.56
	SMP	212	64	64	24	0	364	58.24
2023	SD	405	150	148	42	0	745	54.36
	SMP	209	82	60	31	0	382	54.71
2024	SD	805	35	0	0	0	840	95.83
	SMP	427	17	0	0	0	444	96.17

Sumber: *npd.kemendikbud.go.id, dapodik 2025*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2020 sebesar 83.43% mengalami peningkatan pada tahun 2024 persentase ruang kelas dalam kondisi baik menjadi sebesar 95.83%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan ruang belajar dan kegiatan rehabilitasi ruang kelas.

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang SMP cenderung mengalami peningkatan dari 78.26% pada tahun 2020 terus meningkat menjadi 96.17% pada tahun 2024, hal ini dikarenakan adanya penambahan atau pembangunan gedung baru di beberapa sekolah SMP sehingga jumlah ruang kelas berkondisi baik menjadi bertambah.

#### **F. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian



Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.59**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	1878	1878	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	19702	19702	100	100
Pendidikan Kesetaraan;	Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	335	335	100	100

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025*

#### 2.1.4.4.1.2 Kesehatan

##### A. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.60**  
**Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	18	16	23	54	34
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4340	4069	3853	3533	3576
	<b>Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)</b>		<b>4.15</b>	<b>3.93</b>	<b>5.97</b>	<b>15.28</b>	<b>9.5</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2025*

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 angka kematian bayi sebesar 4.15 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 3.93 di tahun 2021. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2022, jumlah kematian bayi mencapai angka 23 kasus dari 3853 kelahiran hidup. Angka kematian bayi kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi 15.28. Penyebab tingginya kematian bayi di Kota Lhokseumawe yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan

kelainan konginental. Namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 8.39 per 1.000 kelahiran hidup.

Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella yang menyebabkan tingginya kematian bayi di Kota Lhokseumawe yang disebabkan BBLR, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginetal.

### B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut merupakan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.61**  
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	4.15	3.69	4.93	15.28	8.39
<b>Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB)→(1000 AKB)</b>		<b>995.85</b>	<b>996.31</b>	<b>995.07</b>	<b>984.72</b>	<b>991.61</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 angka kelangsungan hidup bayi sebesar 995.85 kemudian meningkat menjadi 996.31 di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 995.07, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 995 bayi yang dapat hidup sampai dengan usia satu tahun. Pada tahun 2023, angka kelangsungan bayi menurun menjadi 984.72. Tahun 2024 angka kelangsungan bayi meningkat menjadi 991.61. Peningkatan ini selaras dengan menurunnya angka kematian bayi pada tahun tersebut.

### C. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.62**  
**Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	4	2	2	2	31
2	Jumlah kelahiran Hidup	balita	4340	4069	3853	3533	3576
<b>Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran hidup)</b>			<b>0.92</b>	<b>0.49</b>	<b>0.51</b>	<b>0.56</b>	<b>8.6</b>

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Angka kematian balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami penurunan. Angka kematian balita pada tahun 2020 sebesar 0.92 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya tahun 2021, angka kematian balita mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 0.92 per 1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 0.49 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2021. Pada tahun 2024 angka kematian balita meningkat tajam menjadi 8.6 per 1000 kelahiran hidup.

Penurunan angka kematian balita ini menunjukkan derajat kesehatan balita setiap tahunnya cenderung lebih baik. Namun masih terdapatnya kematian balita perlu dijadikan kewaspadaan dini karena artinya prevalensi anemia ibu hamil masih tinggi, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan faktor dari balita itu sendiri. Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian anak balita di Kota Lhokseumawe adalah dengan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu dan berkualitas, peningkatan pemanfaatan buku KIA dan peningkatan ASI eksklusif.

#### **D. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup**

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Berikut merupakan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 angka kematian neonatus sebesar 3.92 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 menurun menjadi 1.12 per 1.000 kelahiran hidup.

**Tabel 2.63**  
**Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	bayi	17	16	20	37	4
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4340	4069	3853	3533	3576
<b>Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)</b>			<b>3.92</b>	<b>3.93</b>	<b>5.19</b>	<b>10.47</b>	<b>1.12</b>

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

#### **E. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan

persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.64**  
**Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	orang	7	14	3	8	1
2	Jumlah kelahiran Hidup	orang	4340	4069	3853	3533	3576
<b>Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup</b>			<b>161.29</b>	<b>344.06</b>	<b>77.86</b>	<b>226.44</b>	<b>27.96</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2025*

Pendataan angka kematian ibu dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang merupakan penduduk Kota Lhokseumawe dan menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Lhokseumawe. Angka kematian ibu pada kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 344.06. Selanjutnya, pada tahun 2024 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 27.96 sehingga menjadi angka kematian ibu terendah dalam lima tahun terakhir. Angka kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 226.44 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil antara lain:

- a. kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga adanya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mengenali tanda dan gejala permasalahan kesehatan;
- b. masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (Antenatal Care).

Kesehatan ibu merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu kesakitan dan kematian ibu, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, mengingat penyebab dan latar belakang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab sektor dan pihak lain sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama secara sinergis.

#### **F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita**

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Lhokseumawe dibedakan menjadi empat kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Pada perhitungan indikator ini, posyandu yang dihitung adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.65**  
**Rasio Posyandu Per Satuan**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Posyandu	unit	101	101	101	100	100
2	Jumlah Balita	Anak	21.626	20.231	19.948	15.677	14.171
	<b>Rasio posyandu per satuan balita</b>	<b>Unit/anak</b>	<b>4.67</b>	<b>4.99</b>	<b>5.06</b>	<b>6.38</b>	<b>7.05</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan, 2025*

Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, rasio posyandu per satuan balita sebesar 4.67, artinya setiap 1.000 balita dilayani oleh 4 posyandu. Pada tahun 2021 rasio posyandu per satuan balita meningkat menjadi 4.99. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 5.06 yang berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh 5 posyandu pada tahun 2022. Kenaikan rasio posyandu per satuan balita karena jumlah balita yang mengalami penurunan dari tahun lalu sedangkan jumlah posyandu tetap. Rasio posyandu per satuan balita kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 6.38 unit/anak, dikarenakan jumlah posyandu menurun, dan jumlah balita juga mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan pelayanan posyandu menjadi lebih padat. Pada tahun 2024 rasio posyandu meningkat menjadi 7.05.

#### **G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk**

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut adalah rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.66**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Puskesmas	7	7	7	7	7
	Poliklinik	10	10	10	10	10
	Puskesmas Pembantu	23	23	22	22	22
	Jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu	40	40	39	39	39
2	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	<b>Rasio Puskesmas persatuan penduduk</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*



Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, rasio puskesmas/klinik/pustu yaitu 0.21, artinya terdapat 0.21 puskesmas/klinik/pustu setiap 1.000 penduduk atau dalam 100.000 terdapat 21 puskesmas/klinik/pustu. Rasio puskesmas/klinik/pustu terus menurun hingga menjadi 0.20 puskesmas/klinik/pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Menurunnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya jumlah puskesmas dan pustu. Namun tahun 2023-2024 rasio puskesmas/klinik/pustu menurun menjadi 0.20 atau 20 puskesmas/klinik/pustu setiap 1.000 penduduk. Penurunan rasio puskesmas/klinik/pustu ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk namun jumlah puskesmas/klinik/pustu tetap.

#### H. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.67**  
**Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5	Rumah Sakit Swasta	9	9	9	9	9
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	10	10	10	10	10
7	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	<b>Rasio</b>	<b>0.053</b>	<b>0.053</b>	<b>0.052</b>	<b>0.051</b>	<b>0.050</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 terdapat 10 rumah sakit AD/swasta. Kemudian sampai dengan tahun 2024, jumlah rumah sakit tetap, dan rasio rumah sakit di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebesar 0.053 kemudian tahun 2024 sebesar 0,050 hanya di pengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit.

### I. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Lhokseumawe. Berikut merupakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.68**  
**Rasio Dokter per Satuan Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dokter Umum	58	67	32	55	51
2	Dokter Spesialis	0	0	0	4	5
3	Dokter Gigi	14	16	16	25	24
	<b>Jumlah Dokter</b>	<b>72</b>	<b>83</b>	<b>48</b>	<b>84</b>	<b>80</b>
	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	<b>Rasio dokter per satuan penduduk</b>	<b>0.38</b>	<b>0.35</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	<b>0.40</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio dokter sebesar 0.38 yang artinya terdapat satu dokter di setiap 1.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 0.35 di tahun 2021. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 0.43. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0.40 dikarenakan ada dokter yang sedang tugas belajar dan beralih ke jabatan struktural. Dari data di atas dapat terlihat bahwa Kota Lhokseumawe masih kekurangan Dokter, dimana dalam 1.000 terdapat 0.40 dokter tidak sampai 1 orang dokter.

### J. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk.

**Tabel 2.69**  
**Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perawat	510	212	212	289	306
2	Perawat Gigi	0	0	12	20	18
3	Bidan	456	248	248	302	293
	<b>Jumlah Total</b>	<b>966</b>	<b>460</b>	<b>478</b>	<b>611</b>	<b>617</b>
	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	Rasio Perawat	2.7	1.12	1.11	1.47	1.54
	Rasio Perawat Gigi	0	0	0.06	0.10	0.09
	Rasio Bidan	2.41	1.31	1.29	1.54	1.47
	<b>Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk</b>	<b>5.12</b>	<b>2.42</b>	<b>2.49</b>	<b>3.12</b>	<b>3.10</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Rasio tenaga kesehatan menurun dari tahun 2020 ke tahun 2024, namun menurun di tahun 2020-2021, dan rasio meningkat sedikit sampai dengan 3.10 di tahun 2024. Rasio perawat juga memiliki kecenderungan meningkat. Kenaikan ini terjadi akibat jumlah kelulusan tenaga kesehatan meningkat, sehingga pengajuan SIP juga meningkat. Rasio perawat gigi memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2020 sebesar 0 menjadi 0.09 di tahun 2024. Sedangkan rasio bidan fluktuatif, karena terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 1.29 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2024 menjadi 1.47 per satuan penduduk.

#### K. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda, dan (3) komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024.

**Tabel 2.70**  
**Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja	649	499	481	563	806
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	964	833	879	879	879
<b>Persentase</b>		<b>67.3</b>	<b>59.9</b>	<b>54.7</b>	<b>64.05</b>	<b>91.69</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Lhokseumawe mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 55.5% menjadi 91.69%. Cakupan tertinggi terjadi pada

tahun 2020. Persentase komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan trampil sesuai kompetensi menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus gawat-darurat kebidanan, ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kemudian tahun 2021, jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 59.9% dan tahun 2022 menurun menjadi sebesar 54.7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus komplikasi kebidanan belum semua dapat tertangani, tahun 2024 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 91.69%.

**L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024.

**Tabel 2.71**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh**  
**Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	4340	3687	3841	3543	3571
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	4599	3798	4198	4198	4198
<b>Persentase</b>		<b>94.37</b>	<b>97.08</b>	<b>91.50</b>	<b>84.40</b>	<b>85.06</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan dan pendampingan Ibu hamil yang kurang optimal. Pada tahun 2020, angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki Kompetensi Kebidanan sebesar 94.37% dan tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 85.06%, penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan juga karena mengikuti penurunan jumlah ibu hamil. Cakupan yang tertinggi adalah pada tahun 2020, menunjukkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan sudah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

**M. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)**

*Universal Child Immunization* (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan),

ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.72**  
**Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	13	11	9	15	15
2	Jumlah Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68
<b>Cakupan Desa UCI</b>		<b>19.11</b>	<b>16.20</b>	<b>13.24</b>	<b>22.06</b>	<b>22.06</b>

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024, fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 19.11%, pada tahun 2020 menurun menjadi 13.24% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023-2024 meningkat kembali menjadi 22.06%

#### **N. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus-kwasiorkor*). Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.73**  
**Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	7	8	33	61	20
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	7	8	33	61	20
<b>Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan</b>		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Jumlah balita gizi buruk dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2022-2023, jumlah balita gizi buruk meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2020 balita gizi buruk sebanyak 7 anak dan menjadi 61 anak di tahun 2023 dan menurun menjadi 20 anak di tahun 2024. Kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 seluruhnya telah mendapatkan perawatan.



#### O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

**Tabel 2.74**

#### **Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun	2627	2406	2413	2214	2449
2	Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama	11695	4299	4237	3874	3896
<b>Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak</b>		<b>22.46</b>	<b>55.97</b>	<b>56.95</b>	<b>57.15</b>	<b>62.85</b>

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 62.85% dan terendah adalah tahun 2020 dengan angka sebesar 22.46%. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak baru mencapai 62.85% hal ini disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dan terdapat sasaran balita yang tidak hadir untuk imunisasi campak sesuai jadwalnya.

#### P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Kasus AFP (*acute flaccid paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. *AFP non polio* adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus *AFP non polio* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator *non polio* AFP

*rate* ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.

**Tabel 2.75**  
**Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kasus SFP nonPolio yang dilaporkan	1	4	0	4	2
2	jumlah penduduk < 15 Tahun	64.756	44.294	58.338	53.558	58.338
<b>Cakupan Persentase Non PolioAFP rate per 100.000 penduduk</b>		<b>1.54</b>	<b>9.03</b>	<b>0</b>	<b>7.47</b>	<b>3.42</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025.*

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus AFP non polio di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 1 orang penderita. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus menjadi 4 orang. Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2020-2023, *rate*-nya berada pada rentang 0–9,03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 9.03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non polio AFP Rate adalah minimal 3. Kemudian tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sebanyak 4 orang, sehingga *rate* non polio AFP menjadi 7,47 per 100.000 penduduk. Tahun 2024 menurun menjadi 3.42 per 100.000 penduduk. Peningkatan non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

#### **Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani**

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi). Diberikan tatalaksana atau ditangani adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

**Tabel 2.76**  
**Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	1	22	16	24	122
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	2222	902	2223	950	973
<b>Cakupan Penemuan Pneumonia</b>		<b>0.04</b>	<b>2.43</b>	<b>0.72</b>	<b>2.53</b>	<b>12.5</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Pada kurun waktu 2020-2024, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan dari angka 0.04% di tahun 2020 hingga 12.5% di tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani yaitu sebesar 22 anak dari 1 anak pada tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani yaitu menjadi 16 anak. Dan tahun 2024 kembali terjadi peningkatan penderita balita pneumonia yang ditangani menjadi 122 anak. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening ke wilayah, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani.

#### **R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA**

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.77**  
**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita**  
**Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	128	569	833	1087	1006
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama	216	1115	1003	1071	692
<b>Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA</b>		<b>59,2</b>	<b>51.03</b>	<b>83.05</b>	<b>101.49</b>	<b>145.4</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 51.03% dari tahun 2020 sebesar 95.2%, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 83.05%. Penurunan angka cakupan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2022-2024 meningkat menjadi 83.05% dan 145.4%. Peningkatan angka cakupan karena skrining TB sudah dilakukan baik di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Dokter Praktik Mandiri sehingga penemuan kasus TB dapat ditemukan sedini mungkin.

**S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

**Tabel 2.78**  
**Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	297	569	833	1131	1006
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
<b>Tingkat Prevalensi Tuberkulosis</b>		<b>157.4</b>	<b>299.6</b>	<b>435.2</b>	<b>576.8</b>	<b>506.3</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Jumlah penderita kasus TBC (baru dan lama) di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan jumlah kasus terendah sebanyak 297 kasus di tahun 2020 dan kasus tertinggi sebanyak 1131 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2020 tingkat prevalensi tuberkulosis meningkat menjadi 157.4 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2021, tingkat prevalensi tuberkulosis mengalami peningkatan menjadi 299,6 per 100.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2022, terjadi peningkatan kasus penderita TBC sebesar 833 penderita dengan tingkat prevelensi 435,2. Dan pada tahun 2023 jumlah penderita kasus TBC menjadi 1131 penderita sehingga tingkat prevelensi menjadi 576,8 dan tahun 2024 jumlah penderita kasus TBC menjadi 1006 penderita sehingga tingkat prevelensi menjadi 506,3.

**T. Tingkat Kematian Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)**

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Tingkat kematian TB di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.79**  
**Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	1	6	2	2	18
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	<b>Tingkat Kematian Tuberkulosis</b>	0.52	3.15	1.04	1.02	9.05

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025*

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena 103uberculosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 tingkat kematian karena 103uberculosis sebesar 0.52 dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 1 orang. Tingkat kematian tertinggi karena 103uberculosis terjadi tahun 2024 sebesar 9.05 artinya terdapat 18 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kasus TB dengan komorbid, atau penyakit penyerta lainnya ditambah adanya pandemic Covid-19 pada tahun 2021 yang dapat memperburuk kondisi sehingga 103ubercu kematian penderita TB menjadi 3.15 per 100.000 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 tingkat kematian karena 103uberculosis sebesar 1.04 dan 1.02 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Penurunan angka kematian karena peningkatan tatalaksana pengobatan pasien TB di Puskesmas dan Rumah Sakit, deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah terjadinya perburukan penyakit dan pemberian penanganan yang tepat, namun tahun 2024 tingkat kematian penderita TB meningkat menjadi 9.05.

#### **U. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS**

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) adalah strategi pengendalian Tuberkulosis (TB) yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Berikut merupakan tabel proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

**Tabel 2.80**  
**Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam**  
**Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	216	277	344	1087	923
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	216	312	344	1028	1006
	<b>Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS</b>	<b>100</b>	<b>88,78</b>	<b>100</b>	<b>105.7</b>	<b>91.75</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 105,7%. Sementara itu, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 88,78%. Jumlah pasien baru TB paru BTA dari kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Kasus penemuan tuberkulosis meningkat ini karena adanya kegiatan penyisiran data kasus TB di rumah sakit untuk mengurangi data yang tidak dilaporkan (*under reporting*). Hal ini menyebabkan proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS meningkat menjadi 105.7%. Sedangkan tahun 2024 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menurun sebesar 91.75%.

#### V. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi indikator tersebut di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.81**  
**Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh**  
**Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2020 - 2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	79	243	870	655	957
2	Jumlah pasien TB paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	128	686	883	1076	1077
<b>Proporsi Kasus Tuberculosis Yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS</b>		<b>61.72</b>	<b>35.42</b>	<b>98.52</b>	<b>60.87</b>	<b>88.85</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Secara umum, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 persentase kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 61.72% dan menurun menjadi 35.42% di tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022, proporsi TB yang diobati dan sembuh meningkat drastis menjadi 98.52%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan tatalaksana, pemberian PMT, dan pemberian reward. Pada tahun 2020, proporsi TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan menjadi 71,13%. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah kasus tuberkulosis paru BTA yang sembuh, sehingga proporsi kasus yang diobati dan sembuh dalam program DOTS juga meningkat menjadi 98.52%. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi pengobatan serta pemantauan pasien TB selama tahun 2022. Namun Tahun 2023 proporsi TB yang

diobati menurun menjadi 60.87% dan tahun 2024 meningkat menjadi 88.85%. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien yang diobati berhasil sembuh.

#### W. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.82**  
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	79	58	47	86	68
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	79	58	47	86	68
<b>Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Dalam kurun waktu 2020-2024, jumlah penderita DBD terbanyak di tahun 2023. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2020-2022 terus menurun dari 79 penderita menjadi 47 penderita di tahun 2022. Tahun 2023 jumlah penderita DBD meningkat menjadi 86 penderita, dan tahun 2024 menurun menjadi 68 penderita, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), belum maksimalnya pemeriksaan jentik berkala, masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan masih adanya saluran air yang tidak lancar sehingga dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani.

#### X. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

**Tabel 2.83**  
**Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun	1885	3071	2568	5014	1115
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	5700	5555	9014	16108	4134
	Persentase	33.07	55.28	28.49	31.13	26.97

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Penderita diare yang ditangani di tahun 2020 sebesar 33.07% dan di tahun 2024 menurun menjadi 26.97%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan dari tahun 2020. Penurunan persentase penderita diare yang ditangani dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dikarenakan peningkatan sarana sanitasi. Pada tahun 2022 jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader menurun menjadi 28.49% dan di tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 31.13% dan tahun 2024 cakupan penderita diare yang ditangani menurun menjadi 26.97%.

#### Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.84**  
**Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x	3	8	4	25	27
2	Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	<b>Prevalensi HIV/AIDS</b>	0,001	0.004	0.002	0.013	0.013

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV AIDS di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0.001%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu mencapai 0,013% dengan jumlah pasien HIV AIDS mencapai 27 orang.

## Z. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.85**  
**Cakupan Kunjungan Bayi**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	2494	2268	2196	2338	2112
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	4340	4069	3853	3533	3576
<b>Cakupan kunjungan Bayi</b>		<b>57.46</b>	<b>55.74</b>	<b>56.99</b>	<b>66.17</b>	<b>59.06</b>

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.

Tabel di atas menggambarkan cakupan kunjungan bayi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sebesar 57.46%, selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2022 menjadi sebesar 56.99%.

Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Standar tersebut merupakan KN Lengkap (Kunjungan Lengkap). Pada saat bayi dilahirkan adalah KN 1 atau kunjungan yang pertama. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kembali. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 angka cakupan meningkat menjadi 59.06% di tahun 2024.

## AA. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah Kecamatan. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

**Tabel 2.86**  
**Cakupan Puskesmas**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7
2	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
<b>Cakupan Puskesmas</b>		<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 sebanyak 7 unit puskesmas. Jumlah Kecamatan di Kota Lhokseumawe berjumlah 4 Kecamatan, sehingga cakupan puskesmas adalah 175%%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kecamatan minimal sudah memiliki satu unit puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat Kecamatan, sehingga idealnya minimal dalam satu Kecamatan terdapat satu puskesmas sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki 2 puskesmas.

#### **BB. Cakupan Puskesmas Pembantu**

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

**Tabel 2.87**  
**Cakupan Puskesmas Pembantu**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pustu	23	23	22	22	22
2	Jumlah Desa	68	68	68	68	68
<b>Cakupan Puskesmas</b>		<b>33.82</b>	<b>33.82</b>	<b>32.35</b>	<b>32.35</b>	<b>32.35</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025.*

Cakupan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2021 sebesar 33.82%, namun tahun 2022-2024, cakupan puskesmas pembantu menjadi 32.35 karena jumlah puskesmas pembantu berkurang 1 unit di tahun 2022 sehingga puskesmas pembantu tersedia 22 unit.

#### **CC. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada



triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

**Tabel 2.88**  
**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	4597	4191	4069	3643	4134
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4818	4366	4397	4396	4397
<b>Persentase</b>		95,4	96.0	92.5	82.87	94.02

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025*

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 96.0% dan terendah pada tahun 2023 yaitu 82.87%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang didorong banyak faktor, antara lain: adanya perbaikan dalam upaya pencatatan dan pelaporan pemantauan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kehamilan seawal mungkin dan menurunnya jumlah sasaran ibu hamil di puskesmas setiap tahunnya. Cakupan kunjungan ibu hamil ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 92.5% dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 82.87%, namun tahun 2024 kembali meningkat menjadi 94.02%.

#### **DD. Cakupan Pelayanan Nifas**

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

**Tabel 2.89**  
**Cakupan Pelayanan Nifas**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4146	4064	3736	3458	3371
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	4599	4167	4198	4198	4198
<b>Cakupan Pelayanan Nifas</b>		<b>90,1</b>	<b>97.5</b>	<b>89.0</b>	<b>82.37</b>	<b>80.3</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025*

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2020-2024 di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu dari 90.1% menjadi 97.5%. Peningkatan terjadi seiring dengan meningkatnya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya tahun 2022-2024 cakupan pelayanan nifas mengalami penurunan menjadi 80.30 di tahun 2024. Pelayanan ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

#### **EE. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani**

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital*. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

**Tabel 2.90**  
**Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	381	314	285	274	152
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	651	648	639	274	799
	<b>Persentase</b>	<b>58.5</b>	<b>48.6</b>	<b>44.6</b>	<b>100</b>	<b>19.02</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025.

Secara umum cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 58.5%. Pada tahun 2021, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 48.6%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data diatas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus

komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2022, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 44.6% dan pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 100% artinya semua neonates dengan komplikasi berhasil ditangani. Pada tahun 2024 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 19.02%.

#### **FF. Cakupan Pelayanan Anak Balita**

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sedangkan pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, serta daya lihat.

**Tabel 2.91**  
**Cakupan Pelayanan Anak Balita**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	15200	13600	12698	13194	11378
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	17425	15933	15677	15677	15677
<b>Cakupan Pelayanan Anak Balita</b>		<b>87.23</b>	<b>85.3</b>	<b>81.0</b>	<b>84.16</b>	<b>72.57</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025*

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 87.23%. Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2024 yaitu 72.57%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan dari 85,3%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan

pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2022, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan penurunan kembali menjadi 81.0%, dan tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 84.16%, namun tahun 2024 menurun menjadi 72.57%.

**GG. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)**

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

**Tabel 2.92**  
**Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	9	9	10	10	10
2	Jumlah Rumah Sakit	10	10	10	10	10
<b>Persentase</b>		<b>90</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025*

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2021 belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RS yang ada di Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Hal ini disebabkan beberapa RS belum memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Namun pada tahun 2022 s.d 2024 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sudah mencapai 100%. Seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Lhokseumawe merupakan Rumah Sakit Swasta karena Kota Lhokseumawe belum memiliki Rumah Sakit Umum Pemerintah.

**HH. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam**

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

**Tabel 2.93**  
**Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan**  
**Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu	0	4	2	4	2
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	0	4	2	4	2
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	0	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2025

Berdasarkan data tabel di atas, selama periode tahun 2020-2024 terdapat sejumlah KLB di Kota Lhokseumawe. Tahun 2020 tidak ada KLB yang terjadi di Kota Lhokseumawe, sedangkan tahun 2021 jumlah kejadian KLB sebanyak 4 kasus. KLB yang tercatat pada tahun 2022 turun menjadi 2 kasus dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4 kasus dan 2024 menurun menjadi 2 kasus. Namun dari seluruh KLB yang terjadi, semuanya sudah mampu ditangani <24 jam. Sehingga cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah 100%. Keberhasilan penyelidikan epidemiologi <24 jam dikarenakan jejaring dan kemitraan yg bagus, adanya petugas surveilans puskesmas dan surveilans desa yang menjalankan tugas dengan baik, serta adanya sistem kewaspadaan dini dan respon yang baik.

## II. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.94**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan**  
**Tahun 2024**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	4.397	4.134	100	94.01
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	4.198	3.571	100	85.06
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.997	3.576	100	89.47
Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.948	15.776	100	79.08
Pelayanan kesehatan pada usia	Persentase anak pada usia pendidikan dasar	36.242	35.442	100	97.79



Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
pendidikan dasar	mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	144.144	144.144	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	16.747	16.447	100	98.21
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.631	13.196	100	96.81
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.563	4.458	100	97.70
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	448	448	100	100
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	3.365	3.365	100	100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	8.805	8.668	100	98.44

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2025*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum ada yang mencapai 100%. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2024 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.

#### **2.1.4.4.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

##### **A. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe, maka terdapat ketidaksesuaian panjang jalan, peningkatan status jalan dan pembukaan jalan baru sehingga Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya

Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 206 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.95**  
**Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
<b>Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk</b>		<b>2,186</b>	<b>2,171</b>	<b>2,155</b>	<b>2,104</b>	<b>2,076</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2025*

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki nilai yang fluktuatif. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor panjang jalan yang tidak bertambah setiap tahun dan faktor yang kedua yaitu jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang fluktuatif. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Lhokseumawe yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik.

### **B. Pesentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)**

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

**Tabel 2.96**  
**Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap**  
**(Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Km)**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan Baik	171,297	171,297	279,983	258,494	234,81
2	Panjang Jalan Sedang	106,994	106,994	37,493	28,254	30,81
3	Panjang Jalan Mantap	278,291	278,291	317,476	286,748	265,62
4	Panjang seluruh jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
<b>Persentase jalan dalam kondisi mantap</b>		<b>67.47</b>	<b>67.47</b>	<b>76,97</b>	<b>69,52</b>	<b>64,40</b>

*Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025*

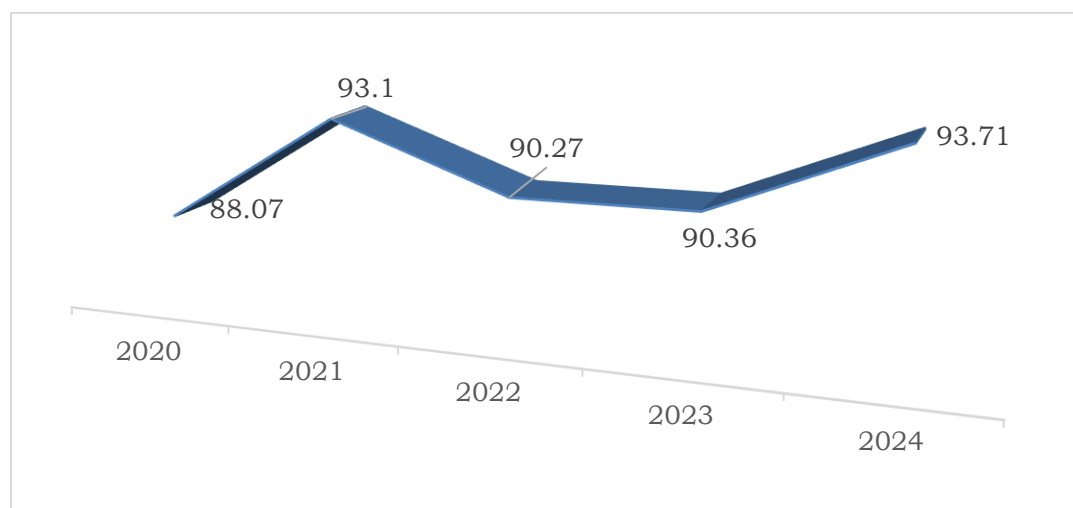
Kondisi jalan mantap di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 cenderung menurun. Dari tahun 2020 stagnan sampai dengan tahun 2021 tetap 67.47% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat pada tahun 2022 menjadi 76.97%. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan pembangunan, peningkatan/rekontruksi dan rehabilitasi jalan menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pada tahun 2023 jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 69.52% dan tahun 2024 menurun kembali menjadi 64.40%.

### C. Cakupan Layanan Sanitasi Layak

Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dengan jumlah rumah tangga. Berikut akses masyarakat atau rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kota Lhokseumawe.

**Gambar 2.48**  
**Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2025

Secara umum, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kota Lhokseumawe 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 88.07% dan pada tahun 2024 menjadi 93.71%.

#### **D. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

**Tabel 2.97**  
**Persentase Drainase dalam Kondisi Baik**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (km)	74,856	79,829	96,000	97,856	98,502
2	Panjang seluruh drainase (km)	116,408	116,408	116,408	117,408	131,462
<b>Persentase</b>		<b>64,30</b>	<b>68,58</b>	<b>82,47</b>	<b>83,35</b>	<b>74,93</b>

*Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025*

Tren panjang drainase di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yakni sebesar 116,408 km pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 131,462 km pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat secara umum menunjukkan grafik yang meningkat. Kondisi drainase di Kota Lhokseumawe sudah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan drainase dalam kondisi baik lebih besar dari 80%, walau terjadi penurunan pada tahun 2024 menjadi sebesar 74,93% dikarenakan panjang drainase seluruhnya bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Lhokseumawe terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

#### **E. Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Indikator persentase penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan Kota Lhokseumawe. Air Minum berkualitas (layak) di Kota Lhokseumawe bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa dan PDAM.

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang meningkat. Namun, persentase penduduk berakses air minum perpipaan di Kota Lhokseumawe secara umum baru sebesar 16.70%. Persentase air Minum Kota Lhokseumawe masih sangat kecil karena Kota Lhokseumawe tidak memiliki Sumber Air Baku.

**Tabel 2.98**  
**Persentase Akses Rumah Tangga (RT) berakses Air Minum**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	1.896	1.954	2.419	2.350	2.241
2	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mon Pase (Aceh Utara)	4.778	4.942	4.848	4.936	4.909
3	Sumur dalam terlindungi	-	148	148	148	410
4	PMSIMAS	-	-	-	-	49
5	Jumlah Rumah Tangga	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315
	<b>Persentase</b>	<b>16.01</b>	<b>16.63</b>	<b>16.88</b>	<b>16.34</b>	<b>16.42</b>

*Sumber: PDAM Ie Beusare Rata Tahun 2025*

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 7.372 rumah tangga atau sebesar 15,91% dan melalui sumur dalam terlindungi perpipaan sebesar 1.16%. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih ini dikarenakan jaringan pipa air PDAM baru terpasang untuk wilayah Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua dan Muara Satu.

#### **F. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk**

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Data jumlah tempat ibadah secara detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.99**  
**Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tempat Ibadah					
	a. Mesjid	51	52	52	52	52
	b. Mushalla	93	93	93	93	93
	c. Meunasah	68	68	68	68	68
	d. Gereja	3	3	3	3	3
	e. Vihara	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Ibadah	216	217	217	217	217
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
3	<b>Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk</b>					
	<b>a. Mesjid</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.26</b>	<b>0.26</b>
	<b>b. Mushalla</b>	<b>0.49</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.47</b>	<b>0.47</b>
	<b>c. Meunasah</b>	<b>0.36</b>	<b>0.35</b>	<b>0.35</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>
	<b>d. Gereja</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
	<b>e. Vihara</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

*Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2025*

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak adalah Mushalla. Keberadaan masjid di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebanyak 51 unit, kemudian meningkat hingga menjadi 52 unit pada tahun 2021. Terdapat



penambahan 1 masjid di tahun 2021 yaitu di daerah Blang Panyang yaitu Mesjid Teuku Muda Blang Panyang. Mushalla di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 berjumlah 93 unit. Meunasah pada tahun 2020-2024 berjumlah 68 unit sesuai jumlah Gampong di Kota Lhokseumawe.

Gereja dan Vihara di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 berjumlah tetap masing-masing 3 unit gereja dan 1 unit vihara. Secara umum kurun waktu 2020-2024 rasio jumlah tempat ibadah per 1000 penduduk di Kota Lhokseumawe memiliki rasio tetap, Penurunan dan peningkatan hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

#### **G. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB**

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Indikator dalam Lampiran 1 Permendagri No.86 Tahun 2017 salah satunya adalah indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah baik yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) maupun luas wilayah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe mencatat data luas wilayah berstatus HPL atau HGB berdasarkan sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya. Rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL atau HGB dihitung dengan membandingkan luas RTH terhadap luas wilayah yang berstatus HPL dan HGB.

**Tabel 2.100**  
**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	24.36	24.36	24.36	24.36	24.36
2	Luas wilyah ber HPL (Ha)	101	101	101	101	101
3	Luas wilayah ber HGB (Ha)	63,387	20,399	73,624	162,439	164,359
<b>Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL</b>		<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>
<b>Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HGU</b>		<b>0.38</b>	<b>1.19</b>	<b>0.33</b>	<b>0.15</b>	<b>0,15</b>

*Sumber: DLH Kota Lhoksemawe dan Badan Pertanahan Tahun 2025*

Berdasarkan data yang ada, rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL dari tahun 2020-2025 tetap. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan data berdasarkan usulan permohonan sertifikat yang masuk. Dengan adanya luas RTH dan tetapnya luas wilayah yang bertatus HPL, menyebabkan rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL tetap dari 2020-2024. rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HGB meningkat dari tahun 2020-2021 dikarenakan luas wilyah HGB berkurang, namun tahun 2022-2024 mengalami penurunan. Besaran luas wilayah ber-HPL dan ber-HGB tergantung pada jumlah permohonan yang diajukan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

## H. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai  $x > 90$ ; (2) Tinggi, dengan nilai  $75 < x \leq 90$ ; (3) Sedang, dengan nilai  $65 < x \leq 75$ ; (4) Rendah, dengan nilai  $50 < x \leq 65$ ; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai  $x < 50$ .

Kajian kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Lhokseumawe berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe, dan perhitungan kesesuaian untuk masing-masing fungsi didasarkan juga dengan data permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), pengadaan tanah, dan adanya penambahan angka kesesuaian pemanfaatan pola ruang Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat, dan Muara Satu.

Perubahan tata ruang ini bersifat dinamis, sehingga pemanfaatan ruang yang berbeda selalu diikuti dengan review RTRW maupun RDTR. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yaitu dengan cara melakukan review RTRW dan melakukan kebijakan ketentuan dominasi pada suatu cakupan wilayah, sehingga semisal pada peruntukkan perdagangan boleh saja digunakan untuk permukiman asal dominasinya masih pada perdagangan.

**Tabel 2.101**  
**Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemanfaatan Ruang sesuai zonasi	10.924,80	11.091,16	11.260,06	11.431,54	11.605,62
2	Luas Pola ruang sesuai RTRW	15.343,51	15.343,51	15.343,51	13.297,36	13.297,36
<b>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</b>		<b>71,20</b>	<b>72,29</b>	<b>73,39</b>	<b>85,96</b>	<b>87,28</b>

*Sumber : PUPR Kota Lhokseumawe, 2025*

## I. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung disyaratkan adanya rekomendasi teknis dari DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam penerbitan perijinan gedung oleh DPMPSTSP dan Naker (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga

Kerja) yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung serta prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. Letak geografis Kota Lhokseumawe yang masuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa sehingga membutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna.

**Tabel 2.102**  
**Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	133	224	234	280	126

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025*

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah permohonan rekomendasi teknis sebagai persyaratan dalam penerbitan perijinan bangunan gedung.

#### **J. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2024**

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

**Tabel 2.103**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pemenuhan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	542	542	100	100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	565	565	100	100

*Sumber : Laporan SPM Tahun 2024, Dinas PUPR Tahun 2025*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

#### **2.1.4.4.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

##### **A. Luas Permukiman Layak Huni**

Menurut Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di

kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Luas permukiman layak huni ini di Kota Lhokseumawe terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.104**  
**Luas Permukiman Layak Huni**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	4664,54	4664,54	4622,13	4700,33	4994,33

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2025*

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Lhokseumawe dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun luas permukiman layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 fluktuatif. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan updating data rumah layak huni Kemudian pada tahun 2020 jumlah penanganan yang dilakukan dari Dinas PUPR sangat sedikit, hal ini terkait kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 4 yang juga mengalami peningkatan luas permukiman layak huni menjadi 4994,33 Ha.

#### **B. Areal Kawasan Kumuh**

Indikator ini dapat merepresentasikan luasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series yaitu dari tahun 2020-2024. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan data yang cukup fluktuatif.

**Tabel 2.105**  
**Areal Kawasan Kumuh**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	78,46	78,46	78,46	42.67	42.67

*Sumber: 1. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019*  
*2. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020*  
*3. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024*

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2020-2022 tidak berubah tetap sebesar 78.46 Ha. Kenaikan luasan kawasan kumuh ini tidak bergantung pada alokasi APBK, melainkan bergantung pada pendataan yang dilakukan. Pada tahun 2020 dilakukan pendataan kembali luasan kawasan kumuh oleh Korkot Kota Lhokseumawe, Satker/PPK PIP Kota Lhokseumawe, dan Pokja PKP Kota Lhokseumawe maka didapatkan hasil peningkatan kumuh sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78.46 Ha.

Penanganan kumuh dilakukan intervensi sesuai dengan indikasi kegiatan yang ada dalam Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) yang telah disusun oleh gampong didanai oleh APBN dari pinjaman Luar Negeri melalui Islamic developman Bank (IDB). Secara garis besar kegiatan NSUP-KOTAKU di Kota Lhokseumawe pada tahun intervensi 2020-2021 meliputi

- a. kegiatan skala lingkungan meliputi
  1. infrastruktur lingkungan yaitu kegiatan bantuan Pemerintah untuk masyarakat (BPM) tahun 2019-2020, infrastruktur livelihood tahun 2021, Kegiatan bantuan masa pandemic covid dengan cash for work (CFW) dan kegiatan skala kota tahun 2020-2021
  2. peningkatan ekonomi yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang sudah punya usaha rumahan dan akan memulai usaha di program kotaku pendampingan dilakukan simpan pinjam kelompok usaha yang difasilitasi oleh unit pengelolaan keuangan (UPK)
  3. Kelembagaan dan kolaborasi, setiap gampong diharuskan membentuk suatu badan yang dinamai dengan LKM/BKM
- b. Kegiatan Skala Kawasan  
Kegiatan penentasan kumuh skala kawasan di Kota Lhokseumawe diusulkan dari tahun 2017 hasil memorandum program terdapat 4 kawasan prioritas yaitu:
  1. Kawasan Mongeudong
  2. Kawasan Bathupat
  3. Kawasan Jagu
  4. Kawasan Pusong

Pemerintah Kota Lhokseumawe masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa Gampong di Kota Lhokseumawe yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Lhokseumawe.

**C. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat**

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2024 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.106**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat**  
**Tahun 2024**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah yang aan ditangani pada tahun n	-	-	-	0%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah Tanggapenerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	300	-		0%

*Sumber : Laporan SPM Tahun 2024, Dinas PUPR Tahun 2025*



Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2023 seluruhnya sebesar 0%. Hal ini karena keterbatasan Anggaran Daerah dan Kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak tersedia.

#### **2.1.4.4.4 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

##### **A. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu Gampong. Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat atau Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Berikut adalah rasio polisi pamong praja dan petugas linmas di Kota Lhokseumawe per 10.000 penduduk.

**Tabel 2.107**  
**Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja	233	243	250	278	325
2	Jumlah Linmas	1040	1040	1040	1173	526
3	Jumlah penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
<b>Rasio Polisi Pamong Praja</b>		<b>12.34</b>	<b>12.79</b>	<b>13.06</b>	<b>14.17</b>	<b>16,35</b>
<b>Rasio Linmas</b>		<b>55.11</b>	<b>54.75</b>	<b>54.33</b>	<b>59.82</b>	<b>26,47</b>

*Sumber: Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2025*

Dari tabel rasio satuan polisi pamong praja dan petugas Linmas di atas, dapat dilihat rasio satuan polisi pamong praja dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 rasio satuan polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 12,34 dan pada

tahun 2024 menjadi 16,35. Sedangkan jumlah petugas Linmas Kota Lhokseumawe tahun 2020-2022 tetap sebanyak 1040 orang dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1173 orang hal ini terjadi untuk mencukupi jumlah petugas linmas di tiap TPS di Kota Lhokseumawe saat pemilu. Sedangkan rasio petugas linmas tahun 2020 sebesar 55,11 dan menjadi 59,82 dan tahun 2024 menurun menjadi 26,47.

### B. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.108**  
**Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pasal 15 tentang Khamar	13	-	-	1	30
2.	Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar	-	2	-	1	-
3.	Pasal 18 tentang Maisir	22	-	-	-	16
4.	Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir	1	4	7	-	-
5.	Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir	-	-	-	-	-
6.	Pasal 23 tentang Khalwat	49	31	124	60	242
7.	Pasal 25 tentang Ikhtilath	90	45	-	2	20
8.	Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya	-	-	-	-	-
9.	Pasal 33 tentang Zina	1	10	8	-	-
10.	Pasal 46 tentang Pelecehan Seksual	2	-	2	-	-
11.	Pasal 47 Pelecehan seksual terhadap anak	-	-	-	-	-
12.	Pasal 50 tentang melakukan Pemerksaan terhadap Anak	1	-	-	-	-
13.	Pasal 64 tentang Musahaqah	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>179</b>	<b>92</b>	<b>141</b>	<b>64</b>	<b>308</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2025*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah Pelanggaran Syariat Islam sejak tahun 2020-2023 menunjukkan angka yang menurun walaupun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2020 jumlah kasus pelanggaran syariat islam sebanyak 179 kasus dan menjadi 92 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya kasus Pelanggaran Khalwat menjadi kasus tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 124 kasus dimana pada tahun 2021 sebelumnya hanya ada 31 kasus. Sedangkan untuk kasus Ikhtilath mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 90 kasus ikhtilath dan tidak ditemukan kasus ikhtilath sama sekali di tahun 2022. Pada tahun 2024 kasus pelanggaran syariat islam mengalami peningkatan menjadi 308 kasus.

### C. Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Data Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

**Tabel 2.109**  
**Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Jenis Penertiban	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penertiban Pasar	249	249	250	5	5
2.	Penertiban IMB dan HO	2	-	-	10	-
3.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	249	249	250	6	12
4.	Penertiban Spanduk	5	-	2	-	6
5.	Penertiban Pelajar Bolos Sekolah	5	1	5	-	8
6.	Penertiban Café dan Tempat Hiburan Malam	-	-	-	-	60
7.	Penertiban Keramaian Umum	1	-	-	-	-
8.	Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	1	-	-	-	1
9.	Pengamanan Demo	-	-	-	3	6
10.	Pengamanan Upacara dan Hari Besar Lainnya	-	-	2	-	6
11.	Penertiban Pengelolaan Air Kotor/Limbah	-	-	-	-	-
12.	Penertiban Penindakan PNS	-	-	-	-	3
13.	Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis	40	2	250	-	98
14.	Penertiban Izin Milik Ruang Jalan (Galian C dll)	3	-	-	-	-
<b>Jumlah Kasus</b>		<b>555</b>	<b>501</b>	<b>759</b>	<b>25</b>	<b>205</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2025.*

Penertiban untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman yang dilakukan Tahun 2020 pada penertiban pasar sebanyak 249 penertiban dan tahun 2024 menurun menjadi 5 penertiban. Pada Tahun 2020 Penertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 249 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban, dan tahun 2024 menurun menjadi 12 penertiban. Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis pada tahun 2020 sebanyak 40 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban dan tahun 2024 menjadi 98 penertiban dilakukan.

#### **D. Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun 2020 hingga 2024. Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.110**  
**Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Jenis Bencanas	Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	6	5	3	8	1
Puting Beliung	5	1	6	2	5
Tanah Longsor	3	1	3	1	16
Gempa Bumi	-	-	-	-	-
Gelombang Ekstrim/Abrasi	1	2	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>22</b>

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025.*

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2024 kejadian bencana banjir menurun menjadi 1 kali, bencana puting beliung sebanyak 5 kali, bencana tanah longsor 16 kali, sedangkan gelombang ekstrim/abrasi juga tidak terjadi serta tidak ada kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerugian/bencana di Kota Lhokseumawe.

#### **E. Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Lhokseumawe sangat diperlukan. Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Api dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas.

Persentase cakupan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran tahun 2019-2023 sebagai berikut.

**Tabel 2.111**  
**Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi	41	32	38	103	109
2	Jumlah kejadian bencana non kebakaran yg ditanggulangi	15	9	12	23	22
3	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditanggulangi	56	41	50	126	131
4	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terjadi	56	41	50	126	131
<b>Persentase Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

**F. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.112**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	130	130	100	100
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	50	50	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50	50	100	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100

Sumber: Laporan SPM Tahun 2025



Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2024 SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

#### 2.1.4.4.5 Sosial

##### A. Penanganan PPKS

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Pelayanan dasar yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Bentuk pelayanan dasar yang diberikan merupakan penanganan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, pemberian permakanan dan pembinaan mental.

**Tabel 2.113**  
**Penanganan PPKS**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PPKS yang ditangani	15.105	10.814	16.450	16.851	13.223
2.	Jumlah PPKS yang ada	76.816	101.500	101.209	94.178	93.996
3.	Persentase PPKS yang ditangani	<b>19,66</b>	<b>10,65</b>	<b>16,25</b>	<b>17,89</b>	<b>14,07</b>
4.	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
5.	Persentase PPKS terhadap jumlah penduduk	40,70	53,43	52,87	48,03	47,30

*Sumber: Dinas Sosial, 2025*

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah PPKS di tahun 2024 meningkat dari 76.816 orang menjadi 93.996 orang, dengan persentase PPKS yang ditangani sebanyak 14,07 persen. Meski persentase penanganan tersebut mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2020, namun persentase PPKS terhadap jumlah penduduk cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya usaha yang lebih untuk dapat menurunkan rasio jumlah PPKS terhadap jumlah penduduk, meskipun ada jenis PMKS yang secara status memang tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap. Mereka semua tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan dan pembinaan mental.

## B. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Persentase PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

**Tabel 2.114**  
**PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	158	157	160	178	340
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	216	185	197	207	340
<b>Persentase</b>		<b>73.15</b>	<b>84.86</b>	<b>81.22</b>	<b>85.99</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dinas Sosial, 2025*

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 berada pada angka 73.15%, dan mengalami peningkatan tahun 2024 menjadi 100%.

## C. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial.

**Tabel 2.115**  
**Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	65	60	4515	14053	384
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	65	60	4515	14053	384
<b>Persentase</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: Dinas Sosial, 2025*

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2020-2024 sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya. Adanya kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial.

#### D. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatif-alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial. Adapun yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat di Kota Lhokseumawe terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 10 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak sebanyak 12 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lansia sebanyak 2 orang, Penyuluh Sosial sebanyak 6 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 4 orang dengan 1 orang pada masing-masing kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 75 orang yang tersebar pada 68 desa di Kota Lhokseumawe.

#### E. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial pada tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

**Tabel 2.116**  
**Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**  
**Tahun 2024**

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	138	138	100	100

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	90	90	100	100
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terkantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	90	90	100	100
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara tuna sosial khususnya gendangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	48	48	100	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	384	384	100	100

*Sumber : Laporan SPM Tahun 2025*

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2024 SPM bidang sosial yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

#### **2.1.4.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### **2.1.4.4.2.1 Tenaga Kerja**

###### **A. Produktivitas Tenaga Kerja**

Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran seberapa banyak hasil pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja meliputi keterampilan tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan strategi manajerial. Metode perhitungannya adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar. Capaian produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.117**  
**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2020 s.d 2024**  
**Kota Lhokseumawe**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PDRB (ADHB)	8.867.266,5	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1	11.848.236,9
2.	Jumlah tenaga kerja (orang)		86.031	89.894	85.373	87.132
<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (juta)</b>			<b>109,63</b>	<b>114,33</b>	<b>130,83</b>	<b>135,96</b>

*Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2025 (diolah)*

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe mencapai 135,96 juta per tenaga kerja pertahun. Angka ini jauh lebih besar dari capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 109,63 juta per tenaga kerja pertahun.

**B. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun**

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

**Tabel 2.118**  
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja	50	54	29	43	27
2.	Jumlah perusahaan	34	52	164	93	105
<b>Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja</b>		<b>147.05</b>	<b>103.85</b>	<b>17.68</b>	<b>46.24</b>	<b>25.71</b>

*Sumber: DPMTSP dan Naker, 2025*

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2020-2024, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 50 sengketa, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 54 sengketa. Dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29 sengketa dan meningkat kembali tahun 2023 menjadi 43 sengketa Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kota Lhokseumawe kurang kondusif mengingat tingkat kasus sengketa meningkat, tetapi jumlah perusahaan juga menurun. dan tahun 2024 kembali turun menjadi sebesar 27 sengketa.

**C. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama**

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun tersebut. Persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebesar 94% dan tahun 2021 semua kasus terselesaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 58.62%, dari 29 kasus terdapat 17 kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), sedangkan lainnya ada yang belum terselesaikan dan ada kasus yang dilimpahkan ke tingkat provinsi. Selanjutnya tahun 2023 tingkat penyelesaian kasus sebesar 90.47% dan tahun 2024 turun menjadi 33.33%.



**Tabel 2.119**  
**Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Pejanjian Bersama (PB)	47	46	17	38	9
2.	Jumlah kasus yang tercatat	50	46	29	42	27
<b>Tingkat Penyelesaian Kasus</b>		<b>94.00</b>	<b>100</b>	<b>58.62</b>	<b>90.47</b>	<b>33.33</b>

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2025

#### **D. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar.

**Tabel 2.120**  
**Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	331	189	44	30	23
2.	Pencari kerja yang mendaftar	695	482	549	402	258
<b>Pencari Kerja yang ditempatkan</b>		<b>47.62</b>	<b>39.21</b>	<b>8.01</b>	<b>7.46</b>	<b>8.91</b>

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2025

Pada tahun 2020, jumlah pencari kerja sebanyak 695 orang, tetapi mengalami penurunan mulai tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020 jumlah pencari kerja yang mendaftar mengalami peningkatan menjadi 695 orang, hal ini dikarenakan ada banyaknya peserta CPNS Kota Lhokseumawe yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi belum ada kepastian terkait penempatannya. Hal ini yang memberikan pengaruh terhadap turunya jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

#### **E. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan**

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2022, persentase tenaga kerja terbina kompetensi mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya dikarenakan jumlah pencari kerja yang terdaftar semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2020-2024 persentase tenaga kerja terbina kompetensi menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan penurunan. Pelatihan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beragam menurut bakat dan minat tenaga kerja yang diarahkan untuk lebih menguasai bidangnya seperti pelatihan perbengkelan, pelatihan tata rias dan pelatihan lainnya.

**Tabel 2.121**  
**Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	40	95	144	106	80
2.	Jumlah pencari kerja terdaftar	695	482	549	402	258
	<b>Persentase</b>	<b>5.75</b>	<b>19.71</b>	<b>26.22</b>	<b>26.37</b>	<b>31.01</b>

*Sumber: DPMTSP dan Naker, 2024*

#### **2.1.4.4.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

**Tabel 2.122**  
**Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.160	2121	2099	2036	2660
2.	Jumlah pekerja perempuan	31.346	32.529	34.992	33.681	33.742
	<b>Persentase</b>	<b>6,89</b>	<b>6,52</b>	<b>5,99</b>	<b>6,04</b>	<b>7,88</b>

*Sumber: DP3AP2KB, 2025*

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2020, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 6,89% hingga pada tahun 2023 turun menjadi 6,04%. Pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,88% hal tersebut disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, dan mutasi kerja di setiap tahunnya.

##### **B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK**

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRK. Jumlah kursi di keanggotaan DPRK Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki jumlah tetap, yakni 25 orang, sedangkan jumlah kursi keanggotaan yang diduduki oleh perempuan memiliki jumlah yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 4 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRK dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK sebesar 16%. Selanjutnya tetap hingga tahun 2023 di mana jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan meningkat menjadi 6 orang yang terdiri dari Partai Aceh 1 orang, Partai Gerindra 1 orang, Partai Demokrat 1 orang, PKB 1 orang, PKS 2 orang dan Partai Golkar 1 orang, dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 28% yang disebabkan karena adanya pergantian antar waktu (PAW). Namun, sejak tahun 2020-2024, besaran proporsi keterwakilan

perempuan di DPRK Lhokseumawe belum dapat memenuhi kuota yang ditentukan yakni sebesar 30%.

**Tabel 2.123**  
**Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK**  
**Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	4	4	4	6	7
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRK	25	25	25	25	25
<b>Persentase</b>		<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>28</b>

*Sumber: Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2025*

### C. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Lhokseumawe. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.124**  
**Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah KDRT	49	18	29	24	23
2.	Jumlah rumah tangga	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315
<b>Rasio KDRT</b>		<b>0.11</b>	<b>0.042</b>	<b>0.066</b>	<b>0.052</b>	<b>0.049</b>

*Sumber: DP3AP2KB, 2025*

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuasi kecenderungan menurun. Pada tahun 2020, jumlah KDRT adalah sebesar 49 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,11%, kemudian menurun di tahun 2021. Pada tahun 2022 jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan menjadi 29 dengan nilai rasio KDRT sebesar 0,066%. Kenaikan jumlah kasus KDRT di tahun 2020 terjadi karena jumlah korban yang melapor semakin banyak, hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tindak KDRT sudah baik. Kemudian, di tahun 2023, jumlah KDRT sedikit menurun daripada tahun 2022 menjadi sebanyak 24 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,052%. Meningkatnya jumlah KDRT tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, selain itu meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi.

#### D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.125**  
**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47.10	48.15	48.33	51.50	50.25

*Sumber: BPS, 2025*

Pada tahun 2020-2024, partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 47.10% hingga mencapai 50.25% pada tahun 2024. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja perempuan menandakan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Lhokseumawe yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

#### E. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT.

**Tabel 2.126**  
**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan**  
**yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh**  
**Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang ditindak lanjuti oleh UPT	86	56	75	68	72
2.	Jumlah Pengaduan/ Laporan yang masuk ke UPT	86	56	75	68	72
<b>Cakupan korban kekerasan</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: DP3AP2KB, 2025*

Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pengaduan/laporan yang cukup signifikan di tahun 2020 sebanyak 86 laporan, menurun pada tahun 2021 menjadi 56 laporan meningkat kembali tahun 2022 menjadi 75 laporan dan meningkat kembali

menjadi 72 laporan pada tahun 2024. Sosialisasi dan adanya penguatan dari pihak keluarga, pelatihan yang intensif terhadap masyarakat untuk penanganan kasus, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan.

**F. Kota Layak Anak (KLA)**

Kota Layak Anak merupakan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

**Tabel 2.127**  
**Capaian Kota Layak Anak dan Gampong Layak Anak**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2023**

No	Indikator	2021	2023
1	Gampong Layak Anak	6	11
2	Jumlah Gampong	68	68
3	Persentase Gampong Layak Anak	8.82	16.17
4	Nilai Kota Layak Anak	-	616,47
5	Predikat Kota Layak Anak	Pratama	Madya

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2025*

Pada tahun 2021, Kota Lhokseumawe mendapatkan predikat pratama untuk Kota Layak Anak dan tahun 2023 meningkat menjadi predikat madya dengan nilai 616,47.

**2.1.4.4.2.3 Pangan**

**A. Skor Pola Pangan Harapan**

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.

**Tabel 2.128**  
**Pola Pangan Harapan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	76.71	76.79	76.33	77.54	77.54
2	Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	73.4	77.10	81.60	76.47	84.92

*Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2025*

Dalam konteks ketahanan pangan, produksi pangan utama menjadi dasar untuk penentuan kecukupan rasio konsumsi normatif penduduk terhadap kebutuhan pangan. Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami defisit dalam pemenuhan karbohidrat utama karena daerah perkotaan.



Pada kurun tahun 2020-2024, skor pola pangan harapan Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan. Skor pola pangan harapan ketersediaan pada tahun 2020 sebesar 76.71 dan pada tahun 2024 Skor pola pangan harapan ketersediaan Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi sebesar 77.54. Pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang merupakan salah satu kunci dalam pencapaian skor PPH ideal. Pola pangan harapan konsumsi pada tahun 2020 sebesar 73,4 dan tahun 2024 meningkat menjadi 84.92. Capaian SPPH tingkat konsumsi pada tahun 2024 sebesar 84.92 poin. Dengan skor ini artinya pola konsumsi pangan di Kota Lhokseumawe masih perlu ditingkatkan kembali.

### B. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk.

**Tabel 2.129**  
**Ketersediaan Pangan Utama**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	20.808.800	23.610.220	24.981.840	26.689.340	54.135.790
2.	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
<b>Ketersediaan Pangan</b>		<b>110,26</b>	<b>124,30</b>	<b>130,52</b>	<b>136,12</b>	<b>272.44</b>

*Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2025*

Ketersediaan pangan di Kota Lhokseumawe berasal dari daerah lain di sekitar Kota Lhokseumawe dan juga hasil produksi di wilayah Kota Lhokseumawe. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Lhokseumawe ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

### C. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasionalkan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.

**Tabel 2.130**  
**Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>						
1.	Energi (Kkal)	NA	1960,97	2355	2460,64	2460,64
2.	Protein (Gram)	NA	66.53	98.11	84,65	84,65

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari</b>						
3	Energi (Kkal)	1870	1943.3	2046.7	1711.5	1885.3
4	Protein (Gram)	58.7	60.0	62.6	54.1	61.4
<b>Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Perkapita Perhari</b>						
5	Energi (%)	87.0	90.4	97.5	81.5	89.8
6	Protein (%)	103.0	105.3	109.8	94.5	107.7

*Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2024*

Ketersediaan energi dan protein di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Pada tahun 2024, tersedia energy sebesar 2460.64 kkal per kapita per hari dan protein sebanyak 84.65 gram per kapita per hari. Peningkatan ketersediaan energi per kapita per hari ini terjadi pada jenis bahan makanan, padi-padian, gula, buah-buahan, sayuran, daging, susu, ikan, dan minyak-lemak. Energi dan protein yang tersedia dapat memenuhi angka kecukupan gizi energi dan protein. Selain itu, ketersediaan bahan pangan sudah mencukupi.

#### 2.1.4.4.2.4 Pertanian

##### A. Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah milik pemerintah dan tanah milik masyarakat. Dari luas lahan wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 181.060.000 m<sup>2</sup>, Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki lahan bersertifikat hak milik sebesar 4.958.100 m<sup>2</sup> sedangkan lahan bersertifikat hak milik masyarakat sebesar 6.292.930 m<sup>2</sup>, kondisi tersebut merupakan kondisi sampai dengan tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 2.131**  
**Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik**  
**Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lahan bersertifikat milik pemerintah (m <sup>2</sup> )	682.430	1.433.330	3.550.630	4.958.100	6.384.610
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m <sup>2</sup> )	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	<b>Persentase</b>	<b>0,38</b>	<b>0,79</b>	<b>1,96</b>	<b>2,74</b>	<b>3,53</b>

*Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2024*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2020 lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluas 682.430 m<sup>2</sup> atau 0.38% dari total luas wilayah Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2024 luas lahan bersertifikat milik pemerintah seluas 6.384.610 m<sup>2</sup> yaitu sebesar 3.53% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.132**  
**Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas lahan bersertifikat milik masyarakat (m2)	1.713,953	2.932,830	1.964.782	6.292.930	49.496.998
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	<b>Persentase</b>	<b>0.95</b>	<b>1.62</b>	<b>1.08</b>	<b>3.5</b>	<b>27,33</b>

*Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2025*

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik masyarakat di Kota Lhokseumawe, tahun 2020 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 1.713.953 m<sup>2</sup> atau 0.95% dan tahun 2024 luas lahan bersertifikat milik masyarakat meningkat signifikan menjadi seluas 49.496.998 m<sup>2</sup> yaitu sebesar 27.33% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe karena meningkatnya pengurusan prona setiap tahunnya dan meningkatnya pembangunan perumahan KPR.

#### **B. Hak Guna Bangunan**

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang, sampai dengan tahun 2024 luas lahan yang digunakan untuk Hak Guna Bangunan (HGB) Kota Lhokseumawe seluas 16.435.900 m<sup>2</sup>.

**Tabel 2.133**  
**Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Hak Guna bangunan (m2)	633.870	203.990	73.624	1.624.390	16.435.900
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	<b>Persentase</b>	<b>0,35</b>	<b>0, 11</b>	<b>0,041</b>	<b>0.89</b>	<b>9.07</b>

*Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2025*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2020 sebesar 633.870 m<sup>2</sup> atau 0,35% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2024 Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe menjadi 16.435.900 m<sup>2</sup> atau 9.07% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena banyaknya Perusahaan yang membeli tanah Masyarakat sehingga menjadi penurunan hak menjadi SHGB.

#### **2.1.4.4.2.5 Lingkungan Hidup**

##### **A. Tersusunnya RPPLH Kota**

Perintisan RPPLH dilakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Daerah dan dimulai dengan penyusunan data melalui Inventarisasi RPPLH Kota Lhokseumawe. Dokumen RPPLH

Lhokseumawe masih dalam proses pengusulan penetapan Qanun. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencan Pembangunan Jangka Panjang Lhokseumawe (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

**B. Terselenggaranya KLHS untuk Kota**

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RTRW 2024-2044. Pada Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 dan Tahun 2024 sedang dilakukan penyusunan KLHS RPJMK 2025-2029.

**C. Timbulan Sampah yang ditangani**

Indikator timbulan sampah yang ditangani daidapatkan dari pembangian volume timbulan sampah yang ditangani dengan total timbulan sampah dikalikan dengan dengan bilangan 100. Timbulan sampah yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.134**  
**Timbulan Sampah yang ditangani**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	27.396	29.672	28.470	27.823,95	28.105
2	Total jumlah timbulan sampah di Kota (ton)	33.729	34.403	35.091	35.793	36.509
	<b>Persentase</b>	<b>81,22</b>	<b>86,25</b>	<b>81,13</b>	<b>77.73</b>	<b>76.98</b>

*Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025*

Dari tabel di atas Tahun 2020 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.729 ton yang ditangani sebanyak 27.396 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 81.22%. Meningkat pada tahun 2021 dengan jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, sehingga mencapai 86,25% sampah tertangani ditahun 2021. Pada Tahun 2022 persentase sampah yang tertangani menurun menjadi 81.13%. Selanjutnya pada tahun 2024 terus menurun jumlah timbulan sampah sebanyak 36.509 ton dan yang tertangani sebanyak 28.105 ton sehingga sebesar 76.98%.

Penyebab kurangnya tertangani sampah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 antara lain adalah banyaknya

keterbatasan armada pengangkutan sampah, sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan yang masih kurang serta kondisi armada pengangkut sampah yang sudah tua atau kurang baik. Sarana prasarana persampahan tahun 2020-2024 Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

**Tabel 2.135**  
**Sarana Prasarana Persampahan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Jenis Armada	Kondisi	Jumlah
1	Dump Truk (unit)	Baik	14
2	Arm Roll (unit)	Baik	4
3	Pick Up (unit)	Baik	5
		Rusak Ringan	2
4	Truck Penyedot Lumpur dan Penyiraman (unit)	Baik	1
5	Truck Tangga (unit)	Baik	1
6	Truck Siram (unit)	Baik	1
7	Alat Berat (unit)	Baik	1
		Rusak	2

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025

Tabel di atas menggambarkan jumlah sarana dan prasarana Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dimana jumlah dump truck yang dimiliki sebanyak 14 unit dalam kondisi baik, Arm Roll sebanyak 4 unit dalam kondisi baik, Pick Up sebanyak 7 unit yang terdiri dari 5 unit dalam kondisi baik, 2 unit dalam kondisi rusak ringan serta alat berat sebanyak 3 unit dalam kondisi baik 1 unit dan 2 unit rusak. Selain itu untuk menunjang permasalahan lingkungan DLH juga didukung dengan 1 unit truck tangga, 1 unit truck siram dan 1 unit truck penyedot lumpur dan penyiraman.

#### **D. Persentase Cakupan Area Pelayanan**

Indikator ini didapat dari luas area pelayanan pengelolaan sampah (km<sup>2</sup>/ha) dengan luas area kota(km<sup>2</sup>/ha) dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah. Persentase cakupan area pelayanan sampah di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.136**  
**Persentase Cakupan Area Pelayanan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km <sup>2</sup> /ha)	160	165	166	174	175
2.	Luas area kabupaten/kota (km <sup>2</sup> /ha)	181,06	181,06	181,06	181,06	181,06
	<b>Persentase</b>	<b>88,36</b>	<b>91,13</b>	<b>91,68</b>	<b>96,10</b>	<b>96,65</b>

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2020 persentase cakupan area pelayanan sebesar 88.36%, dan pada Tahun 2021 persentase



cakupan area pelayanan sebesar 91.13% dan Tahun 2022 meningkat menjadi 91.68% dan Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 96.10% tahun 2024 hanya bertambah 1 km<sup>2</sup>/ha sehingga tetap 96,10%.

#### **E. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS)**

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai *instrument* untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah. Entitas pengukuran IKPS dimulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional baik yang berkenaan dengan lingkup pengelolaan (penanganan dan pengurangan sampah) maupun yang berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya.

Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sangat berpengaruh pada nilai anggaran, nilai kebijakan, nilai sumber Daya Manusia (SDM), nilai sarana dan prasarana, nilai sosialisasi, nilai implementasi, nilai capaian target, nilai efisiensi anggaran, nilai kota bersih dan nilai Indeks Kualitas Air. Berikut capaian IKPS Kota Lhokseumawe tahun 2023-2024.

**Tabel 2.137**  
**Capaian Indeks Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2023-2024**

No	Indikator	2023	2024
1	Nilai Kebijakan	5.5	18
2	Nilai SDM	1	1
3	Nilai Sarpras	5	5
4	Nilai Anggaran	2	1
5	Nilai Sosialisasi	0	5
6	Nilai Implementasi	0	1
7	Nilai Capaian Target	6	4
8	Nilai Efisiensi Anggaran	0	1
9	Nilai Kota Bersih	0	0
10	Nilai IKA	6	7
<b>IKPS</b>		<b>25.5</b>	<b>43</b>

Sumber: DLHK Aceh, 2025

Capaian Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 25,5 poin dan tahun 2024 nilainya meningkat menjadi 43 poin, namun masih tetap dalam kuartal Pemerintah Kota yang memiliki kinerja sangat kurang dalam hal pengelolaan sampah. Dari keseluruhan dimensi penilaian IKPS poinnya dibawah rata-rata/standar, kecuali Indeks Kualitas Air.

#### **2.1.4.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

##### **A. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk**

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib

dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.138**  
**Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	125.483	126.300	129.740	132.586	135.902
2	Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah	130.141	130.633	132.102	138.705	138.099
	<b>Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,98</b>	<b>0,96</b>	<b>0,98</b>

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025*

Kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 cenderung meningkat. Jika dilihat dari nilai rasio penduduk ber-KTP memang nilainya cenderung tetap tetapi peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dari tahun 2020-2024. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio penduduk ber-KTP dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dan jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah meningkat lebih besar dan tahun 2024 kembali meningkat.

### **B. Rasio Bayi Berakte Kelahiran**

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Dengan kata lain, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

**Tabel 2.139**  
**Rasio Bayi ber Akta Kelahiran**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	18.159	18.532	20.567	19.563	18.990
2	Jumlah Bayi	20.296	18.589	20.753	20.234	19.591
	<b>Rasio</b>	<b>0,96</b>	<b>0,97</b>	<b>0,99</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada awal periode yaitu tahun 2020 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 0,96. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 0.99. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Pencapaian ini didukung dengan adanya program *3 in 1* di Dinas dan Rumah Sakit. Program *3 in 1* adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak di rumah sakit tempat dilahirkan. Adanya peningkatan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran juga disebabkan penambahan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk layanan kepengurusan Akta Kelahiran, diantaranya Rumah Sakit ABBY, Rumah Sakit Arun, dan Rumah Sakit MNC.

### C. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Lhokseumawe sudah berakta nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakta nikah di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.140**  
**Rasio Pasangan Berakta Nikah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pasangan berakta nikah	34.959	40.731	45.648	49.198	52.917
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	80.135	80.639	80.972	81.573	81.950
	<b>Rasio pasangan berakta nikah</b>	<b>0.44</b>	<b>0.51</b>	<b>0.56</b>	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio pasangan berakta nikah dari tahun 2020 ke 2024

menjadi 0,65 di tahun 2024. Akta nikah dikeluarkan untuk warga masyarakat non muslim. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan dari Bidang Capil agar warga secara aktif melaporkan akta nikah yang dimiliki. Namun, rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

#### D. Rasio Anak Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA berfungsi sama dengan KTP yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan KIA untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan foto.

Tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun secara fungsional sama dengan KTP-el, tetapi KIA tidak memiliki *chip* seperti KTP-el. Dilansir dari Permendagri 2 tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat di antara lain, (1) melindungi pemenuhan hak anak, (2) menjamin akses sarana umum, (3) menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk, (4) mencegah terjadinya perdagangan anak, dan (5) memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi. Berikut adalah data anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

**Tabel 2.141**  
**Rasio Anak yang Memiliki KIA**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak yang memiliki KIA	12.161	16.955	19.104	22.121	25.137
2	Jumlah penduduk wajib KIA <17 tahun	60.822	58.980	57.863	61.066	60.606
<b>Rasio anak yang memiliki KIA</b>		<b>0.20</b>	<b>0.29</b>	<b>0.33</b>	<b>0.36</b>	<b>0.41</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio anak yang memiliki KIA dari tahun 2020 ke 2024 menjadi 0,41 di tahun 2024. Namun, rasio anak yang memiliki KIA ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

#### E. Akta Kematian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam pencatatan peristiwa kematian atau lahir mati, maka pihak keluarga wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan sipil. Berikut data Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2024.

**Tabel 2.142**  
**Jumlah Akte Kematian yang dikeluarkan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah akta kematian	994	979	867	1.154	1.162

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025*

Berdasarkan data di atas jumlah akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 jumlah akte kematian berjumlah 994 lembar dan menjadi 1.162 lembar pada tahun 2024. Jumlah pembuatan akte kematian meningkat karena kebutuhan akan kelengkapan administrasi ahli waris.

#### 2.1.4.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

##### A. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik

Perkantoran pemerintahan gampong merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di tingkat gampong. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe. Kualitas perkantoran pemerintahan gampong yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.143**  
**Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong**  
**yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Kondisi Kantor	Jumlah Kondisi Kantor Geuchik				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kantor Dalam Kondisi Baik	54	59	59	60	57
2	Kantor Dalam Kondisi Rusak	9	4	4	3	6
3	Belum Memiliki Kantor	5	5	5	5	5
<b>Jumlah</b>		<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik</b>		<b>79.41</b>	<b>86.76</b>	<b>86.76</b>	<b>88.24</b>	<b>83.82</b>

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.*

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik cenderung meningkat, dari yang awalnya pada tahun 2020 adalah sebesar 79.41% meningkat mencapai 94.12% di tahun 2022. Pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 89.70%, Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi kantor gampong kondisi rusak menjadi bertambah menjadi 2 unit yaitu Gampong Kota Lhokseumawe dan Ulee Blang Mane. Sementara itu, terdapat 5 Gampong yang belum memiliki kantor pemerintah gampong yaitu Gampong Hagu Teungoh, Jambo Timu, Batuphat Timur, Blang Panyang, Batuphat Timurn Cot Trieng. Berikut cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik per Kecamatan tahun 2020-2024.



**Tabel 2.144**  
**Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	2020		2021		2022		2023		2024	
			Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana
1	Banda Sakti	18	16	88,88	16	88,88	16	88,88	16	88,88	16	88,88
2	Muara Satu	11	7	63,63	7	65,63	7	63,63	8	72,72	7	65,65
3	Blang Mangat	22	18	95,45	19	95,45	19	95,45	19	95,45	17	77,27
4	Muara Dua	17	13	94,11	17	100	17	100	17	100	17	100
<b>Jumlah</b>		<b>68</b>	<b>54</b>	<b>79.41</b>	<b>59</b>	<b>86.76</b>	<b>59</b>	<b>86.76</b>	<b>60</b>	<b>88.23</b>	<b>57</b>	<b>83.82</b>

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 79.41%, tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan menjadi sebesar 86.76%. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Pada tahun 2024 sedikit mengalami sedikit penurunan sehingga menjadi 83.82%.

#### **B. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Gampong**

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pemerintah Gampong dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah gampong sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Gampong digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong. Selain dana gampong sumber pendapatan gampong yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada gampong menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.145**  
**Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Realisasi Penyaluran Dana ke Gampong				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG	40.846.685.523	44.587.713.353	43.990.585.700	45.048.128.300	47.022.296.500
2	Dana Desa (DD)	60.285.819.000	61.858.474.338	53.900.119.902	61.401.253.255	62.402.165.000
3	Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)	-	1.542.801.500	1.659.031.000	2.843.458.400	3.493.888.252
4	Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	-	251.267.448	198.394.770	340.108.444	353.856.305
<b>Jumlah</b>		<b>101.579.702.858</b>	<b>108.319.969.912</b>	<b>107.831.150.469</b>	<b>109.632.948.399</b>	<b>113.272.206.057</b>

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada gampong berupa alokasi dana gampong mengalami peningkatan, pada tahun 2020 alokasi bantuan keuangan gampong sebesar Rp.101.579.702.858,- selanjutnya mengalami penurunan di Tahun 2020 dan Tahun 2022. Bagi hasil pajak mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk Bagi hasil retribusi mengalami fluktuasi disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

### C. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Lhokseumawe muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari Gampong, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

**Tabel 2.146**  
**Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah TP.PKK Kota Lhokseumawe	1	1	1	1	1
2	Jumlah TP.PKK Kecamatan se-Kota Lhokseumawe	4	4	4	4	4
3	Jumlah TP. PKK Gampong se Kota Lhokseumawe	68	68	68	68	68
4	Jumlah Kel PKK RW se-Kota Lhokseumawe	276	276	276	276	276
6	Jumlah Kel Dasawisma	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

*Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kelompok PKK di tingkat RT jumlahnya tetap sejak tahun 2020-2024, sudah semuanya aktif. Namun tetap perlu perhatian khusus, mengingat keaktifan kelompok PKK bertujuan untuk memantau usaha-usaha aktif di tingkat paling bawah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Tanpa adanya kegiatan PKK yang aktif, maka akan lebih sulit dalam kegiatan realisasi program pembangunan pada tingkatan bawah.

#### D. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, posyandu juga menjadi tempat pelayanan keluarga berencana. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.147**  
**Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
2	Jumlah seluruh Posyandu	100	100	100	100	100
<b>Persentase Posyandu Aktif</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2020-2024 sudah mencapai 100%. Posyandu yang masuk katagori posyandu aktif apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu jumlah hari buka minimal 10 kali dalam 12 bulan, jumlah kader minimal 5 orang, capaian program minimal 50%, kepemilikan sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan pengembangan. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif.

#### 2.1.4.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa. Pemerintah Kota Lhokseumawe terus memberikan dukungan dan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Lhokseumawe. Berikut Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 148**  
**Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga**  
**Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	n.a	n.a	48.36	43.82	50.2
Total Fertility Rate (TFR)	n.a	2.68	2.39	2.32	2.28
Unmet Need	n.a	n.a	17.23	18.5	15.9
Prevalensi Pemakaian MKJP	n.a	n.a	8.71	14.17	10.9
ASFR 15-19			10.1	11.9	8.5
DCR (Angka Putus Pakai KB)		26.8	22.3	17.81	20.3

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2025

Angka pemakaian kontrasepsi modern, atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), adalah persentase perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Metode kontrasepsi modern meliputi pil KB, kondom, suntik KB, implan, IUD, dan lain-lain. Pada tahun 2024 angka pemakaian kontrasepsi Modern CPR sebesar 57,8 persen.

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya 15-49 tahun) jika ia mengikuti pola kelahiran pada tahun tertentu. TFR adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesuburan rata-rata dalam suatu populasi. Capaian TFR Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar 2.32 lebih rendah dari capaian tahun 2023

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 10.4. capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 16.4. Selanjutnya untuk Prevelensi Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 sebesar 14.3% menjadi 17.9%.

ASFR adalah indikator demografi yang mengukur tingkat kelahiran pada kelompok umur tertentu, biasanya dihitung per 1000 wanita dalam kelompok usia tersebut. ASFR Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar 14.7% dan mengalami penurunan menjadi 13.9%. Selanjutnya Angka putus pakai KB adalah angka yang menunjukkan berapa banyak akseptor KB yang berhenti menggunakan alat atau cara kontrasepsi tertentu setelah periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan, karena berbagai alasan. DCR Kota Lhokseumawe Tahun 2021 sebesar 26.8% dan mengalami penurunan menjadi 20.3% pada tahun 2024.

#### 2.1.4.4.2.9 Perhubungan

##### A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kota Lhokseumawe adalah data penumpang bis yang masuk Terminal.

**Tabel 2.149**  
**Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Keluar	Masuk
2020	13.207	27.068	26.575
2021	15.151	33.160	31.176
2022	15.330	41.980	36.650
2023	17.155	71.550	37.550
2024	14.135	10.789	12.362

Sumber: Dinas Perhubungan, 2025.

Berdasarkan data diatas jumlah penumpang bus yang ada di Terminal Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 mengalami

fluktuatif kecenderungan meningkat. Tahun 2020 penurunan jumlah penumpang bis, akibat dari dampak Pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas dan pergerakan masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pada tahun 2021 kondisi pandemi masih belum berakhir dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat mengurangi mobilitasnya untuk bepergian keluar kota dengan kendaraan umum. Pada tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang dan pada tahun 2023 jumlah penumpang bis meningkat dari tahun 2022, namun tahun 2024 terjadi penurunan.

### B. Rasio Ijin trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas Negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Rasio ijin trayek didapat dari jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 sebagai berikut.

**Tabel 2.150**  
**Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Ijin Trayek	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
2	Jumlah Penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
	<b>Rasio Ijin Trayek</b>	<b>0,008</b>	<b>0,009</b>	<b>0.008</b>	<b>0.008</b>	<b>0.008</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2025*

Pada tabel di atas tahun 2020-2024 jumlah ijin trayek tetap sebanyak 1.636. Rasio ijin trayek pada tahun 2020 sebesar 0,008, dan tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 0.009 sedangkan untuk tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.008 Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dari Tahun 2021. Dan tahun 2024 jumlah ijin trayek tetap. Rasio ijin trayek dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

### C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian yang dimaksud meliputi (1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.



**Tabel 2.151**  
**Jumlah Uji KIR Angkutan Umum**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	2.006	3.078	3.154	3.252	2.107

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2025*

Berdasarkan data yang ada, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 cenderung meningkat yaitu sebanyak 2.006 unit pada tahun 2020 menjadi 3.252 unit pada tahun 2023. Peningkatan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe dikarenakan meningkatnya kesadaran untuk melakukan uji KIR dan beberapa kendaraan dari luar daerah Lhokseumawe melaksanakan numpang uji di Lhokseumawe karena gedung pengujian dan alat uji di kabupaten kota tetangga masih ada yang tidak beroperasi karena belum terakreditasi untuk gedung dan lulus kalibrasi alat uji oleh pusat sehingga Kota Lhokseumawe mendapat limpahan kendaraan yang melakukan uji kendaraan di gedung uji. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2.107 unit.

#### **D. Jumlah Terminal Bus**

Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

**Tabel 2.152**  
**Jumlah Terminal Bus**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Terminal Bus	3	2	2	2	2

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2025*

Terdapat dua terminal bus di Kota Lhokseumawe, yakni Terminal Keude Aceh yang merupakan Terminal Tipe C di Kecamatan Banda Sakti yang hanya melayani kendaraan umum angkutan perkotaan dan/atau pedesaan dan Terminal Kandang yang merupakan Terminal tipe A yang terdapat di Kecamatan Muara Dua yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum angkutan antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi dan angkutan pedesaan.

#### **E. Persentase Layanan Angkutan Darat**

Indikator persentase layanan angkutan darat ini didapatkan dari pembagian jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat lalu dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

**Tabel 2.153**  
**Persentase Layanan Angkutan Darat**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah angkutan darat	3.845	3.195	3.612	3.682	2.324
2	Jumlah Penumpang angkutan darat	27.068	33.160	41.980	171.550	36.720
	<b>Persentase layanan angkutan darat</b>	<b>14.20</b>	<b>9.63</b>	<b>8.60</b>	<b>2.15</b>	<b>6.32</b>

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Berdasarkan data yang ada, persentase layanan angkutan darat di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 cenderung menurun dari 14.20% pada tahun 2020 menjadi 6.32% di tahun 2024. Pada tahun 2020 jumlah penumpang angkutan darat di Kota Lhokseumawe menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga mempengaruhi persentase layanan angkutan darat mengalami kenaikan karena jumlah penumpangnya mengalami penurunan. Pada tahun 2024 persentase layanan angkutan darat mengalami penurunan dari tahun 2023.

#### **F. Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan**

Untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.154**  
**Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2020	2021	2022	2023	2024			
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	80	0	0	0	0	195	Buah	71.79
2	Cermin Tikungan	0	3	0	3	0	24	Unit	25.00
3	Marka Jalan	21.250	4.516	682	1.021	0	35.580	m <sup>2</sup>	95.3
4	Traffic Light (APILL)	0	0	0	0	0	0	Unit	0
5	Warning Light	0	0	0	0	0	12	Unit	0,0
6	Guard Rall (Pagar Pengaman)	0	0	0	0	0	3.000	Meter	0,0
7	Halte	0	0	0	0	0	0	Unit	0,0
8	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	0	10	0	0	485	Titik	2.06

Sumber : Dinas Perhubungan, 2025

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan yang menjadi kewenangan gampong belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan gampong juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan gampong bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah kota, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Lhokseumawe masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada.

Jumlah Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Arah) yang ada di Kota Lhokseumawe masih belum bisa memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan. Dari 195 buah rambu dan RPPJ yang dibutuhkan baru terpenuhi sejumlah 80 atau sebesar 71.79% pada Tahun 2024. Jumlah rambu yang ada masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk kelancaran para pengguna jalan serta meminimalkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Cermin tikungan dibutuhkan pada persimpangan jalan yang tertutup untuk dapat membantu pengemudi melihat situasi atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Jumlah cermin tikungan yang ada masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah rawan kecelakaan.

Dalam rangka memberikan informasi/panduan bagi pengguna jalan, marka jalan merupakan elemen perlengkapan jalan yang juga penting keberadaannya. Fungsi marka jalan secara umum adalah untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan, serta memberikan batasan daerah untuk kepentingan lalu lintas tersebut. Dalam lalu lintas jalan, salah satu perlengkapan jalan yang penting dan sangat dibutuhkan terutama persimpangan ruas jalan yang volume kendaraanya sudah tinggi yaitu lampu lalu lintas (APILL). Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. APILL sudah terpasang disetiap persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya sehingga telah cukup.

Selain APILL, warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati-hati. Warning light yang dibutuhkan Kota Lhokseumawe sebanyak 12 unit,

namun satupun belum ada. Sebagai konsekuensi dari kontur jalan di Kota Lhokseumawe yang sebagian berada pada daerah perbukitan, pagar pengaman jalan (*Guardrail*) sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak jatuh ke dalam tebing/ jurang yang berada di kanan kiri jalan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengaman jalan masih jauh dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan karena belum tersedia dari sekitar 3000 meter jumlah kebutuhan.

#### G. Rasio Panjang per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

**Tabel 2.155**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	412,468
2	Jumlah Kendaraan	59.064	55.461	50.546	50.646	50.646
<b>Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan</b>		<b>0.0069</b>	<b>0.0074</b>	<b>0.0081</b>	<b>0.0081</b>	<b>0.0081</b>

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2024*

Jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi, yakni 59.064 unit kendaraan pada tahun 2020 menurun menjadi 55.461 unit kendaraan pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya mutasi kendaraan keluar Kota Lhokseumawe. Jumlah kendaraan di kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah sebanyak 50.546 kendaraan, mengalami penurunan sebesar 4.915 kendaraan dibanding tahun 2021. Penurunan jumlah kendaraan ini dikarenakan kendaraan sudah pindah alamat, kendaraan sudah dijual dan ada pula kendaraan rusak berat sehingga tidak melakukan PU/perpanjangan STNK lagi. Hal tersebut juga karena kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid 19. Paa tahun 2023 dan 2024 jumlah kendaraan sedikit meningkat menjadi 50.646 unit.

#### H. Kinerja Jalan (V/C ratio atau rata-rata kecepatan kendaraan)

Kinerja lalu lintas jalan (V/C atau VCR) didapatkan dari survei yang dilakukan pada 3 (tiga) fungsi jalan yakni, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nilai V/C berada dalam skala 0 – 1, semakin kecil angka V/C nya atau semakin mendekati angka 0 maka semakin tinggi kinerjanya karena jumlah kendaraan yang lewat masih dalam batas lancar dan kecepatan di jalan tergolong normal.

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas biasa diukur dengan VC Ratio atau *Volume Capacity Ratio*, yaitu perbandingan antara volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan, semakin tinggi volume kendaraan yang lewat

maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2020 dari 3 ruas jalan Kota yang diukur VC Rationya 0.9. Tiga ruas jalan kota yang diukur terletak Kecamatan Banda Sakti dan Muara Dua. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.156**  
**VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota**  
**Lhokseumawe Tahun 2020**

No	Ruas Jalan	VC Ratio	Tingkat Pelayanan
1	Jl. Darussalam	0.81	D
2	JL. Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Medan)	0.99	E
3	JL. Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Banda Aceh)	1.05	F

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat Jalan Darussalam memiliki tingkat pelayanan jalan dengan skor D yaitu arus mendekati tidak stabil, dengan volume lalu lintas tinggi dan kecepatan masih ditelerir namun sangat terpengaruh oleh perubahan kondisi arus, kecepatan lalu lintas sedang namun fluktuasi volume lalu lintas dan hambatan temprer dapat menyebabkan penurunan kecepatan besar yang besar. Jalan Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Medan) memiliki tingkat pelayanan E yaitu kepadatan lalu lintas tinggi, pengemudi mulai merasakan kemacetan durasi pendek, sedangkan Jalan Medan Banda Aceh (Selat Malaka ke arah Banda Aceh) memiliki tingkat pelayanan F yaitu arus tertahan dan terjadi antrian kendaraan yang panjang dan terjadi kemacetan untuk durasi yang cukup lama.

#### **2.1.4.4.2.10 Komunikasi dan Informatika**

##### **A. Satu Data Indonesia**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan terselenggaranya SDI ini, dibutuhkan peran, kolaborasi serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 diatur pula mengenai penyelenggara SDI serta peran dan tugasnya. Pada tingkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berperan sebagai walidata, serta Perangkat Daerah berperan sebagai produsen data. Keterlibatan kepala daerah juga menjadi hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan SDI ini,



salah satunya untuk dapat menjalankan koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data.

Dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Lhoskeumawe telah menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2024 juga telah ditetapkan Form Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe. Untuk penyajian dan pengelolaan data, Pemerintah Kota Lhkseumawe melakukan penginputan data pada portal Satu Data Lhokseumawe yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku Walidata Kota Lhokseumawe, dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe selaku Produsen Data.

#### 2.1.4.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

##### A. Peresentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

**Tabel 2.157**  
**Persentase Koperasi Aktif**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi Aktif	106	107	107	181	130
2	Jumlah Koperasi	207	208	208	312	335
	<b>Persentase Koperasi Aktif</b>	<b>51.21</b>	<b>51.44</b>	<b>51.44</b>	<b>58.01</b>	<b>38.80</b>

*Sumber: Disperindagkop, 2025.*

Jumlah koperasi yang aktif di Kota Lhokseumawe selama tahun 2020-2023 menunjukkan nilai yang meningkat. Dari 106 unit koperasi aktif di tahun 2020, turun menjadi 181 unit koperasi aktif pada tahun 2023. Tahun 2024 jumlah koperasi aktif menurun menjadi 130 unit koperasi. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

##### B. Persentase BPR/LKM Aktif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi

masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya.

**Tabel 2.158**  
**Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Variabel	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Unit Simpan Pinjam	158	163	163	161	161
2	Koperasi Simpan Pinjam	6	6	4	2	2
3	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	-	1	5	6	6
4	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	-	-	10	12	12
<b>Jumlah</b>		<b>164</b>	<b>170</b>	<b>172</b>	<b>181</b>	<b>181</b>

*Sumber: Disperindagkop, 2025.*

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan jumlah LKM mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Namun untuk Koperasi Simpan Pinjam mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah LKM adalah karena jumlah anggota mengalami pengurangan sehingga menghambat operasional dari LKM tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri atau berhenti beroperasi. Selain itu disebabkan oleh angsuran yang kurang lancar dan pengajuan permohonan penundaan/perpanjangan jatuh tempo pinjaman, sehingga untuk penyaluran pinjaman sangat selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

### C. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

**Tabel 2.159**  
**Persentase Usaha Mikro dan Kecil**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	5563	5679	6292	6787	6837
2	Jumlah seluruh UKM	5623	5739	6353	6848	6898
<b>Persentase Usaha Mikro dan Kecil</b>		<b>98.93</b>	<b>98.95</b>	<b>99.04</b>	<b>99.11</b>	<b>99.12</b>

*Sumber: Disperindagkop, 2025.*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024 yaitu mencapai 6.837 unit. Pelaku yang memperoleh IUM melalui OSS tidak hanya pelaku

usaha mikro saja tapi juga pelaku usaha kecil. Dalam OSS spesifikasi usaha (meliputi perdagangan, perindustrian, perhubungan, transportasi) tidak seperti spesifikasi usaha yang menjadi kewenangan daerah (*fashion*, kuliner, kerajinan/ *craft*, dan jasa).

#### D. Nilai Omset UKM yang dibina

Nilai Omset UKM yang dibina menjadi salah satu indikator SDGs Kota Lhokseumawe. Capaian nilai omset UKM yang dibina di tahun 2020-2021 masih dibawah 100% namun tahun 2022-2024 sudah di atas 100%, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.160**  
**Nilai Omset UKM yang dibina**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah UKM	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)		
		Tahun Dasar (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2020	5623	4.846.05	4.615,49	95.24
2021	5739		4.615,60	95.24
2022	6353		5.510,65	113.71
2023	6848		5.525,80	114.02
2024	6898		8.027,90	165.66

Sumber: Disperindagkop, 2025.

#### 2.1.4.4.2.12 Pananaman Modal

##### A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Lhokseumawe banyak diarahkan pada sektor tersier, seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan dengan morfologi perkotaan.

**Tabel 2.161**  
**Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Investor PMA	2	1	1	1	3
2	Investor PMDN	434	432	459	412	475
<b>Total</b>		<b>436</b>	<b>433</b>	<b>460</b>	<b>413</b>	<b>478</b>

Sumber: DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2025.

Jumlah Investor PMA di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari 2 investor di tahun 2020 menjadi 3 investor di tahun 2024 dan turun menjadi 1 uit di tahun 2021-2023. Sedangkan jumlah Investor PMDN tahun 2020 sebanyak 434 investor, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 432 investor. Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 459 investor. Dan

tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 412 investor dan 2024 meningkat menjadi 475 investor. Jika dilihat dari total investor, di tahun 2020 dan 2022 mengalami peningkatan yang hingga sebesar 436 unit pada tahun 2020 dan 460 unit pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha secara elektronik, yaitu melalui *online single submission* (OSS) sehingga proses pengurusan izin dipermudah. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan total investor menjadi 433 unit. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha.

### **B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Jumlah Investasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 Investasi PMDN sebesar 168,453 (milyar), di tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 2.489,517 (milyar) dan pada tahun 2022 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami penurunan menjadi sebesar 1.112,716 (milyar) dan pada tahun 2023 menurun secara drastis menjadi sebesar 249,540 milyar dan tahun 2024 menurun kembali sebesar 238 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.162**  
**Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (milyar rupiah)**

No	Jenis Perusahaan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PMA	2,402	508	19,250	0	13,683
2	PMDN	166,051	2.489,008	1.093,466	249,540	512,508
<b>Total</b>		<b>168,453</b>	<b>2.489,517</b>	<b>1.112,716</b>	<b>249,540</b>	<b>526,191</b>

*Sumber: DPMPSTSP Kota Lhokseumawe, 2025.*

Jumlah investasi tahun 2022 Rp. 1.112.716.277.156 dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 249.539.799.410 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementrian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori: Usaha mikro < 1 M, Usaha kecil 1M-5 M, Usaha Menengah 5M-10 M dan Usaha Besar >10 M. maka pencatatan investasi berpengaruh pada klifikasi tersebut, sehingga terjadi penurunan nilai Investasi. Dengan berlakunya sistem OSS RBA, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara pelaku usaha UMK (<1M) tidak masuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMK, maka terjadi penurunan realisasi investasi.

### **C. Pelayanan Perizinan**

Dengan adanya Peraturan tentang kemudahan dalam penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dampak diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 adalah:

1. Pelaku usaha diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam melakukan proses perizinan dengan menggunakan aplikasi OSS. Pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan secara mandiri

tanpa harus datang ke DPMPTSP dan dapat dilakukan kapan saja karena OSS dapat di akses dimana saja dan kapan saja.

2. Pelaku usaha dimungkinkan mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen izin yang lain.

Dalam hal perizinan, kondisi pelayanan perizinan ditampilkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.163**  
**Pelayanan Perizinan**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	izin	1066	1174	2891	3349	3914
2	Jumlah pengajuan perizinan	izin	1749	1528	2901	3375	4249
	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>60.95</b>	<b>76.83</b>	<b>99.65</b>	<b>99.22</b>	<b>92.11</b>
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	aduan	21	5	9	22	18
4	Jumlah aduan yang masuk	aduan	21	5	9	22	18
	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
5	Jumlah survey yang dilakukan (dalam 1 tahun)	survei	93	61	68	73	33
6	Jumlah target izin wajib survey (dalam 1 tahun)	survei	96	96	96	69	55
	<b>Capaian</b>	<b>%</b>	<b>96.87</b>	<b>63.54</b>	<b>70.83</b>	<b>105.79</b>	<b>60.0</b>

Sumber: DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2025.

#### 2.1.4.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

##### A. Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

**Tabel 2.164**  
**Organisasi Pemuda yang aktif**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	50	50	16	16	16
2	Jumlah seluruh Organisasi Pemuda	60	60	20	20	16
	<b>Persentase</b>	<b>83.3</b>	<b>83.3</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025



Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami penurunan yaitu sebanyak 34 organisasi dari yang semula 50 organisasi pemuda yang aktif menjadi 16 organisasi pemuda yang aktif.

### B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator ini menggambarkan cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.165**  
**Cakupan Pembinaan Olahraga**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	36	36	35	35	35
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	44	44	45	45	45
<b>Persentase cakupan pembinaan olahraga</b>		<b>81.82</b>	<b>81.82</b>	<b>77.77</b>	<b>77.77</b>	<b>77.77</b>

*Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025*

Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dari tahun 2020-2024 terjadi peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 44. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat menjadi 45. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan cabang olahraga yang dibina, yaitu menjadi 35. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Lhokseumawe belum mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang terdaftar belum terbina dengan baik.

### C. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A, B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

**Tabel 2.166**  
**Cakupan Pelatih yang Bersertifikat**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelatih bersertifikat	53	53	60	60	49
2	Jumlah seluruh pelatih	146	146	87	87	84
<b>Persentase cakupan pelatih bersertifikat</b>		<b>36,3</b>	<b>36,3</b>	<b>68,9</b>	<b>68,9</b>	<b>58.3</b>

*Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025*

Kota Lhokseumawe memiliki 49 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2024 adalah 84. Terjadi penurunan persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa cabang olahraga yang tidak lagi aktif, pelatih yang meninggal dunia atau berpindah daerah.

#### 2.1.4.4.2.14 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat

sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan  $n+2$ , sedangkan data yang tersedia adalah  $n-1$ . Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data Kota Lhokseumawe serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS.

#### **2.1.4.4.2.15 Persandian**

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Lhokseumawe secara bertahap.

Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

**Tabel 2.167**  
**Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	1	1	1	1	34
2	Jumlah total perangkat daerah	34	34	34	34	34
<b>Persentase PD yang menggunakan sandi</b>		<b>2.94</b>	<b>2.94</b>	<b>2.94</b>	<b>2.94</b>	<b>100</b>

*Sumber : Dinas Komunikasi, informasi dan Persandian, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi hanya satu Perangkat Daerah saja yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Sedangkan Perangkat Daerah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 34 Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan sandi dalam komunikasi.

#### **2.1.4.4.2.16 Kebudayaan**

##### **A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Festival seni di setiap daerah merupakan perayaan tahunan yang menjadi wadah untuk mempertunjukan keunikan budaya dari berbagai daerah. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa hari yang dimeriahkan dengan musik, tarian, hingga ritual dalam paradnya.

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.168**  
**Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024**

No	Kegiatan	Tahun
1	Teluk Samawi	2022
2	Pameran Budaya	2022
3	Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8	2023
4	Panteu Meuseuraya	2023
5	Pameran Budaya	2023
6	Workshop Seni dan Budaya di era digitalisasi	2024
7	Pelatihan Hikayat dan Seumapa	2024
8	Belajar Bersama Canag Ceureukeuh	2024
9	Kajian Rapai Uroeh	2024

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025*

Dari Tabel di atas dapat tergambar bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 terdapat 4 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan.

##### **B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan

kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.169**  
**Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe**

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2025*

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki 22 (dua puluh dua) unit situs/bangunan cagar budaya diantaranya situs makam sebanyak 9 (sembilan) makam yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, situs tugu sebanyak 2 (dua) tugu di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat, situ benteng dan goa sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat) yang terdapat di Kecamatan Muara Satu.

#### **2.1.4.4.2.17 Perpustakaan**

##### **A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun**

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang

mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahunnya.

**Tabel 2.170**  
**Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	2037	1990	1990	1958	2866
2	Jumlah populasi yang harus dilayani	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
<b>Rasio jumlah pengunjung perpustakaan</b>		<b>0.010</b>	<b>0.010</b>	<b>0.010</b>	<b>0.009</b>	<b>0.014</b>

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025*

Data tersebut menunjukkan terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan, dimulai pada tahun 2021 yang kemudian diikuti pula dengan penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2023. Kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar dan juga adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mencakup masyarakat yang lebih luas.

#### **B. Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah**

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024.

**Tabel 2.171**  
**Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	6348	7625	8539	8539	9516
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan (Eksemplar)	23.500	27.276	29.512	29.512	30.456
<b>Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah</b>		<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.29</b>	<b>0.29</b>	<b>0.31</b>

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025*

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Hal ini mengindikasikan adanya tren yang baik dalam penyediaan jumlah koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan. Kenaikan jumlah buku maupun judul buku dikarenakan adanya penambahan yang berasal dari pengadaan yang dilakukan pihak perpustakaan daerah maupun dari hibah yang



didapat dari pusat maupun sumber lainnya. Peningkatan jumlah koleksi judul berangsur meningkat dari waktu ke waktu menandakan bahwa ada upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

**C. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk**

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

**Tabel 2.172**  
**Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perpustakaan Umum/ Perpustakaan Daerah	15	15	15	15	15
2	Perpustakaan Sekolah	163	163	163	158	158
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	13	13	13	14	14
4	Perpustakaan Khusus	14	14	14	12	13
5	Perpustakaan Pesantren/Dayah	8	8	14	8	6
6	Jumlah Perpustakaan	213	213	219	207	206
7	Jumlah penduduk	188.713	189.941	191.396	196.067	198.705
<b>Rasio jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk</b>		<b>1,13</b>	<b>1,12</b>	<b>1,14</b>	<b>1,06</b>	<b>1,04</b>

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024*

Dari tabel di atas, jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2020-2024, rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, yaitu dari 1,13 menjadi 1,04. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sekolah yang mengalami *regrouping*. Tahun 2021 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 1,12, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 1,14 karena penambahan jumlah penduduk. Tahun 2024 jumlah perpustakaan berkurang sehingga rasio jumlah perpustakaan menjadi 1,04.

**D. Jumlah rata-rata pengunjung Perpustakaan per Tahun**

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir. Jumlah rata-rata pengunjung dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2020 hingga tahun 2024 yaitu sebesar 2168.2 jiwa pengunjung.

**Tabel 2.173**  
**Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pengunjung	2037	1990	1990	1958	2866
2	Rata-rata jumlah pengunjung					2168.2

*Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2020-2024 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Lhokseumawe. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pihak perpustakaan mengambil kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya pembatasan kuota pengunjung dan penyesuaian jam layanan perpustakaan.

#### **E. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat**

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat. Terkait pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Kota Lhokseumawe belum memilikinya.

#### **2.1.4.4.2.18 Kearsipan**

##### **A. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku**

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

**Tabel 2.174**  
**Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	10	15	8	8	15
2	Jumlah OPD	34	34	34	34	34
	<b>Persentase</b>	<b>29.41</b>	<b>44.11</b>	<b>23.53</b>	<b>23.53</b>	<b>44.11</b>

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025.*

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, pada tahun 2020 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku sebesar 29.41% atau 10 OPD dari Jumlah 34 OPD. Persentase pengelolaan arsip ini meningkat dikarenakan jumlah OPD yang mengelola Arsip di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 menjadi 15 OPD. Dan pada tahun 2022-2023 menurun menjadi 8 OPD dan tahun 2024 bertambah menjadi 15 OPD.

### **2.1.4.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **2.1.4.4.3.1 Pariwisata**

##### **A. Kunjungan Wisata**

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

**Tabel 2.175**  
**Jumlah Kunjungan Wisatawan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Indikator	Jumlah Pengunjung				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan wisata	293.680	150.297	245.374	321.499	309.092

*Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2025*

Penurunan jumlah wisatawan di Kota Lhokseumawe di tahun 2020 dan 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi virus Covid-19. Dampak dari Pandemi Covid-19 dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, terutama dengan penerapan PPKM (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta. Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan.

##### **B. Objek Wisata**

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.176**  
**Objek Wisata Kota Lhokseumawe**

No	Uraian	Lokasi	Ket
<b>1.</b>	<b>Wisata Alam</b>		
a.	Pantai Ujon Blang	Kecamatan Banda Sakti	
b.	Pulau semadu	Kecamatan Muara Satu	
c.	Pantai pulo daruet	Kecamatan Muara Dua	
<b>2.</b>	<b>Wisata Budaya/Spiritual</b>		
a.	Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti)	
b.	Gua Jepang cot Panggoi	Gp. Blang Panyang (Muara Satu)	
c.	Meriam Belanda	Gp. Kuta Blang (Banda Sakti)	
d.	Tugu Pahlawan TKR	Gp. Peukan Cunda (Muara Dua)	
e.	Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat)	
f.	Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong	Gp. Jawa Lama (Banda Sakti)	
g.	Mon tujuh	Gp. Mesjid (Blang Mangat)	
h.	Makam Tgk. Dihokseumawe	Gp. Banda Masen (Banda Sakti)	
i.	Makam Tgk. Chik Ditunong	Gp. Mon Geudong (Banda Sakti)	
j.	Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Blang Mangat)	
k.	Makam Mualim Taufik Shaleh	Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat)	
l.	Makam Putroe Neng	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)	
m.	Makam Tgk. Syiah Hudam	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)	
n.	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
o.	Makam Tgk. Jrad Meuindram	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
p.	Makam Tgk. Chik Buket Krueng	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
q.	Museum P. Ramli	Gp. Paloh (Muara Dua)	
<b>3.</b>	<b>Wisata Buatan</b>		
a.	Reservoir (Waduk)	Gp. Pusong (Banda Sakti)	
b.	Taman Riyadah	Kecamatan Banda Sakti	
c.	Taman Mangat Cerita	Kecamatan Blang Mangat	
d.	Waduk Jeulikat	Kecamatan Blang Mangat	

*Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2025.*

### C. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada objek pariwisata di wilayah Kota Lhokseumawe. PAD sektor pariwisata selama lima tahun terakhir 2020-2024 mengalami peningkatan, di tahun 2020 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 4.45%. Namun di tahun 2021-2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 11.90% di tahun 2024.

**Tabel 2.177**  
**PAD Sektor Pariwisata**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel	105.194.000	287.803.500	534.054.623	744.194.756	1.020.576.163
2	Pajak Restoran	2.775.990.026	3.587.507.600	5.563.411.570	6.139.818.064	5.789.281.826
3	Pajak Hiburan	48.524.600	170.092.200	218.205.800	348.147.200	331.402.219
<b>4</b>	<b>Total Sektor Pariwisata</b>	<b>2.929.708.626</b>	<b>4.045.403.300</b>	<b>6.315.671.993</b>	<b>7.232.160.020</b>	<b>7.141.260.208</b>
<b>5</b>	<b>Total PAD</b>	<b>65.875.904.859</b>	<b>62.415.913.242</b>	<b>68.212.506.871</b>	<b>68.047.614.286</b>	<b>60.028.921.251</b>
<b>6</b>	<b>Persentase (%)</b>	<b>4.45</b>	<b>6.48</b>	<b>9.26</b>	<b>10.63</b>	<b>11.90</b>

*Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025 Hasil Olahan 2025*

Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata pada tahun 2020 merupakan dampak dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatasan jam operasional objek wisata ataupun penutupan tempat wisata untuk sementara.

#### **2.1.4.4.3.2 Pertanian**

##### **A. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya**

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Lhokseumawe sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

**Tabel 2.178**  
**Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya**  
**Di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi (Ton)	9.688	5.957	6.859	7294.71	9801
2	Luas Panen Padi (Ha)	1828	1083	1247	1326.31	1782
<b>Produktivitas Lahan (Ton/Ha)</b>		<b>5.3</b>	<b>5.3</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>	<b>5.5</b>

*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, DKPPP Kota Lhokseumawe, 2025.*

Pada tahun 2020-2021 produksi padi di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Tahun 2020 produksi padi mencapai 9.688 ton dan terus menurun menjadi 7.294.71 ton di tahun 2023 dan tahun 2024 meningkat menjadi 9.801 ton. Tahun 2020 luas lahan baku sawah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yaitu 1.102,34 Ha dari luasan sebelumnya 2.050 Ha, penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi padi.

Naik turunnya produksi padi ini secara umum disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kota Lhokseumawe. Tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya suatu wilayah akan



berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk berkegiatan, dimana ciri khas perkotaan dengan kegiatan bisnis sehingga berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan yang dinamis. Namun pada tahun 2022-2024 produksi padi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas lahan. Salah satu faktor pendorong peningkatan produktivitas lahan ini adalah dengan penerapan sistem-sistem budidaya pertanian yang telah dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia.

### 2.1.4.4.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

#### A. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Lhokseumawe. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik sering disebut juga dengan Rasio Elektrifikasi.

**Tabel 2.179**  
**Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah tangga penggun listrik	47.945	49.976	51.460	53.549	56.584
2	Jumlah rumah tangga	41.675	42.354	43.930	45.504	46.315
	<b>Persentase rumah tangga</b>	<b>115,04</b>	<b>117,99</b>	<b>117,14</b>	<b>117,68</b>	<b>122,17</b>

*Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2025*

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe sebesar 115.04% di tahun 2020 dan meningkat menjadi 122.17% di tahun 2024. Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2022 mengalami peningkatan dikarenakan pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga pengguna PLN. Adapun faktor persentase rumah tangga pengguna listrik PLN melebihi 100% yakni ada rumah tangga yang memasang meteran lebih dari satu atau rumah tangga yang memiliki rumah lebih dari satu atau penggunaan untuk rumah kontrakan/rumah kos.

#### B. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

**Tabel 2.180**  
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daya Listrik terpasang	240	240	240	240	240
2	Jumlah kebutuhan	94,00	106.72	111.42	117.07	129.08
<b>Rasio ketersediaan daya listrik</b>		<b>2.55</b>	<b>2.25</b>	<b>2.15</b>	<b>2.05</b>	<b>1.86</b>

Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2025

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

#### 2.1.4.4.3.4 Perdagangan

##### A. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik adalah nilai ekspor netto.

**Tabel 2.181**  
**Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (juta rupiah)**

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Ekspor Netto	-546.92	-391,39	-43,67	105,85	34,51
	Persentase nilai Ekspor Netto	-7.83	-5.4	-0.58	1.35	0.42

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tahun 2020-2024, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor, namun tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan.

##### B. Pendapatan Sektor Perdagangan

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.182**  
**Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Komponen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Persampahan /Kebersihan	520.207.500	312.692.500	464.260.000	370.105.000	284.485.000
2	Retribusi Pelayanan Pasar	167.900.000	746.525.000	708.311.000	922.465.000	862.610.000
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.345.600	14.449.500	11.323.000	12.535.000	0
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	650.937.000	30.217.000	41.400.000	57.750.000	50.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.342.392.120</b>	<b>1.103.886.021</b>	<b>1.225.296.022</b>	<b>1.362.857.023</b>	<b>1.197.095.000</b>

*Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025*

Pendapatan sektor perdagangan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12.16% dari tahun lalu dengan nilai penurunan sebesar Rp 165.762.023. Penurunan terbesar dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan penurunan sebesar 23.13% dan retribusi pelayanan pasar sebesar 6.49%, dilanjutkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan penurunan mencapai 100%. Penurunan jumlah retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 7.750.000 atau sebesar 13.41%. Pada tahun 2021 dampak Pandemi Covid-19 di sektor perdagangan antara lain penurunan aktivitas perdagangan di pasar.

#### 2.1.4.4.3.5 Perindustrian

##### A. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitasi dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.183**  
**Cakupan Bina Kelompok Pengrajin**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	17	25	40	43	37
2	Total Kelompok Pengrajin	87	96	107	107	109
<b>Persentase bina kelompok pengrajin</b>		<b>19,54</b>	<b>26,04</b>	<b>37,38</b>	<b>40,18</b>	<b>33,94</b>

*Sumber: Disperindagkop Kota Lhokseumawe, 2025*

Pada tahun 2020 terdapat 17 kelompok pengrajin dan angka tersebut meningkat menjadi 43 kelompok pada tahun 2023.

Persentase bina kelompok pengrajin pada tahun 2020 mencapai 19.54%, dan angka tersebut meningkat menjadi 40.18% pada tahun 2023. Namun di tahun 2024 jumlah kelompok pengrajin kembali turun menjadi 37 kelompok atau 33.94%, hal ini dikarenakan pemberian bantuan kepada pengrajin tidak dialokasikan secara rutin sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

#### 2.1.4.4.3.6 Kelautan dan Perikanan

##### A. Produksi Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Lhokseumawe sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.184**  
**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	9.725	14.615	12.852	13.119	12.968
2	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	3.350	3.400	8.065	1.995	2006.65
<b>Total Produksi (Ton)</b>		<b>13.075</b>	<b>18.015</b>	<b>20.917</b>	<b>15.114</b>	<b>14.974,65</b>

Sumber: DKPPP 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat total produksi perikanan tangkap dan budidaya Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 fluktuatif cenderung meningkat. Total produksi ikan tahun 2020 tercapai 13.075 Ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 14.974,65 ton.

#### 2.1.4.4.4 Aspek Penunjang Urusan

##### 2.1.4.4.4.1 Perencanaan Pembangunan

##### A. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

**Tabel 2.185**  
**Tersedianya Dokumen Perencanaan**  
**RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Lhokseumawe telah ada berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe tahun 2025-2045. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

**B. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

**Tabel 2.186**  
**Tersedianya Dokumen Perencanaan**  
**RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025*

Seperti halnya RPJPD, perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD juga telah tersedia di tataran pemerintahan Kota Lhokseumawe. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2017-2022, RPJMD ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Kemudian untuk tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

**C. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah ditetapkan Dengan PERKADA**

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh



Qanun. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 telah ditetapkan.

**Tabel 2.187**  
**Tersedianya Dokumen Perencanaan**  
**RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Perwal	Perwal	Perwal	Perwal	Perwal
		No 21	No.51	No.24	No 17	No 22
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023

*Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025*

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap OPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan koordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Qanun dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas, pemenuhan dasar hukum berupa Qanun yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian *outcome* yang diharapkan.

**D. Tersedianya RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA**

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

**Tabel 2.188**  
**Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan**  
**dengan PERDA Kota Lhokseumawe**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2025*

Dokumen RTRW yang berlaku 2024 merupakan dokumen RTRW yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2023-2044. Adanya ketersediaan RTRW ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka namun juga diimplementasikan dan menjadi dasar pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan daerah yang terjadi dapat sesuai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan.

**E. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD**

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang

menerjemahkan RPJMD. Di samping itu, keberadaan RKPD adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan.

**Tabel 2.189**  
**Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan	306	182	152	183	173
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun	301	189	189	182	186
<b>Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD</b>		<b>101,6</b>	<b>96.29</b>	<b>80.42</b>	<b>100</b>	<b>93.01</b>

*Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yaitu pada tahun 2020-2024 fiktual. Kecenderungan OPD memasukkan byk program dalam RPJMD namun tidak di masukkan dalam RKPD. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan *sequence* antar RKPD. Oleh karena itu ,dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022, hal ini dikarenakan Program RKPD tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

#### **2.1.4.4.2 Keuangan**

##### **A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2020-2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini BPK sangat baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Tabel 2.190**  
**Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK “WTP”	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

*Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025*

**B. Persentase SILPA**

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. Dalam kurun waktu 2020-2024, persentase SILPA Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi dengan besaran SILPA terbesar terjadi pada tahun 2021 dan SILPA terkecil di tahun 2024.

**Tabel 2.191**  
**Persentase SILPA Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
2020	42.045.667.332,97	898.210.311.849	4.68
2021	52.399.883.518,38	879.310.221.282	5.96
2022	10.541.034.674,37	874.851.664.000	1.28
2023	37.480.808.630	798.260.907.647	4.64
2024	1.264.786.679	847.032.964.141	0.15

*Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025*

**C. Persentase Belanja Pendidikan (20%)**

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2020-2024, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2024, yaitu senilai 26.26% dari total APBD Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.192**  
**Persentase Belanja Pendidikan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Belanja Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
2020	199.342.253.651	898.210.311.849	22.19
2021	194.345.855.680	879.310.221.282	22.10
2022	195.258.081.775	874.851.664.000	22.32
2023	177.628.068.026	798.260.907.647	22.25
2024	222.470.125.307	847.032.964.141	26.26

*Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025*

**D. Perbandingan Belanja Daerah**

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Lhokseumawe, khususnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum pada rentang tahun 2020, proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Proporsi seperti ini baik karena asumsinya akan lebih banyak anggaran yang digunakan untuk belanja barang atau jasa yang dapat

langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti pelayanan publik atau pembangunan daerah. Proporsi belanja langsung dan tidak langsung di Kota Lhokseumawe ini tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.193**  
**Proporsi Belanja Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020**

Variabel	2020
Jumlah Belanja Langsung	449.394.961.057
Total APBD	898.210.311.849,29
<b>Persentase</b>	<b>50,03</b>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	448.815.350.792,29
Total APBD	898.210.311.849,29
<b>Persentase</b>	<b>49,97</b>

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

Pada tahun 2021 terjadi perubahan klasifikasi belanja daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 0503708 tahun 2020. Klasifikasi belanja daerah pada APBD 2021 terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

**Tabel 2.194**  
**Proporsi Belanja Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024**

Variabel	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	590.366.995.636	605.522.237.180	595.256.623.128	619.101.810.114
	67.14	69.21	74.57	73.09
Belanja Modal	168.374.880.958	156.583.508.120	82.331.873.436	103.766.958.008
	19.15	17.90	10.31	12.25
Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	3.000.000.000	52.650.368	1.171.55.800
	0.51	0.34	0.01	0.14
Belanja Transfer	116.068.344.688	109.745.918.700	120.619.760.715	122.992.640.220
	13.20	12.54	15.11	14.52
<b>Total APBD</b>	<b>879.310.221.282</b>	<b>874.851.664.000</b>	<b>798.260.907.647</b>	<b>847.032.964.142</b>

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

#### **E. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Pengalokasian anggaran belanja APBD;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;

- e. Kondisi keuangan daerah; dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

**Tabel 2.195**  
**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2023**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	NA	61,5587 B	64,1924 B	71,262 B

Sumber: <https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id>, 2025

IPKD didapat dengan menjumlahkan Indeks pada setiap dimensi. IPKD Kota Lhokseumawe tahun 2023 mendapatkan skor sebesar 71,262. Rata-rata nilai IPKD di Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah rendah adalah 71.866. Nilai IPKD Kota Lhokseumawe ada di bawah rata-rata Nasional. Untuk tahun 2024 dilakukan pengukuran di tahun 2025.

#### 2.1.4.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

##### A. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selain pendidikan dan pelatihan formal yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total Struktural.

**Tabel 2.196**  
**Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan**  
**Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	56	45	0	37	24
2	Jumlah total struktural	495	513	305	208	307
<b>Persentase</b>		<b>11.31</b>	<b>8.77</b>	<b>0</b>	<b>17.78</b>	<b>7.82</b>

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya terus menurun dari tahun 2020 sejumlah 11.31% sampai dengan tahun 2022 menjadi 0%. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 17,78% dan tahun 2024 menurun menjadi 7.82%. Jika dicermati pada tabel diatas, penambahan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara dan pada tahun 2022 tidak tersedia anggaran untuk diklat struktural.

##### B. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat



diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

**Tabel 2.197**  
**Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	32	32	32	32

*Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025*

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Lhokseumawe sebanyak 32 orang. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

### **C. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah**

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

**Tabel 2.198**  
**Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.686	1770	1.939	1.749	912

*Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025*

Pada tabel di atas terlihat data mengenai jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebesar 1.686 orang meningkat pada tahun 2021 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu menjadi sebesar 1.770 orang, hal ini disebabkan adanya tambahan CPNS rekrutmen tahun 2021-2022 jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis fungsional lainnya. Namun di tahun 2023 jumlah ini kembali turun menjadi 1.749 orang hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru. Tahun 2024 kembali turun menjadi 912 orang.

Jabatan Fungsional sebagian besar pada Tenaga Kesehatan dan tenaga Pendidik dan sebagian kecil JFT teknis di OPD yang secara

berkala didata untuk pelaporan IKK (LPPD). Sebelum tahun 2020 pelaksanaan inpassing ke JFT masih rendah dari Lembaga Pembina dan pengangkatan JFT Teknis masih kecil. Akan tetapi pada awal Januari 2022 telah terjadi perampingan birokrasi (meritokrasi) sebagian jabatan eselon 4 setara pejabat pengawas menjadi sub koordinator sebagai JFT Ahli Muda di beberapa OPD.

#### D. Penilaian Sistem Merit

Penilaian mandiri penerapan sistem merit terdiri dari 8 tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Dan untuk tahun 2023-2024 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai buruk pada capaian penerapan sistem merit.

**Tabel 2.199**  
**Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2023-2024**

No	Aspek	Maksimal	2023	2024
1	Perencanaan Kebutuhan	40	5	12.5
2	Pengadaan	40	12	8
3	Pengembangan Karir	130	-	2.5
4	Promosi dan Mutasi	40	10	17.5
5	Manajemen Kinerja	80	5	27.5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	2.5	17.5
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	0	8
8	Sistem Informasi	24	0	2
Nilai Capaian		<b>410</b>	<b>34,5</b>	<b>95.5</b>
		<b>Kategori</b>	<b>Buruk</b>	<b>Buruk</b>
		<b>Indeks</b>	<b>0,08</b>	<b>0,23</b>

*Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025.*

Berdasarkan hasil penilain tersebut maka BKPSDM akan menindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain penyusunan pola karier, penyempurnaan SIMPEG, penyelenggaraan diklat, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

#### E. Penilaian Indeks Profesional ASN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Adapun prinsip pengukuran indeks profesionalisme ASN sebagai berikut:

- a. Koheran, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;
- b. Kelayakan, indeks profesionalisme ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data rill yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
- c. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
- d. Dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukurannya; dan
- e. Multi-dimensional.

Indeks profesionalisme ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN. Adapun penjelasan mengenai dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- b. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30% dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan).

Adapun lima kriteria indeks profesionalitas ASN yang dihasilkan dari pengukuran dimensi diatas, yaitu skor 91-100 dengan predikat “sangat tinggi”; skor 81-90 dengan predikat “tinggi”; skor 71-80 dengan predikat “sedang”; skor 61-70 dengan predikat “rendah”; serta skor dibawah 60 dengan predikat “sangat rendah”.

**Tabel 2.200**  
**Indeks Profesionalitas ASN**  
**di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2024**

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Kualifikasi	21.4	21.44	21.55
2	Kompetensi	8,59	25.89	27.51
3	Kinerja	3,01	24.57	25.37
4	Disiplin	5	5	4.99
Nilai Indeks Profesional ASN		37,98	76.89	79.42
Kategori		kurang	sedang	sedang

*Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025*

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 indeks profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe sebesar 37,98 sehingga masuk pada kategori kurang dan tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 76.89 masih dalam kategori sedang dan 2024 meningkat menjadi 79.42.

#### **2.1.4.4.4 Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan

indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

**Tabel 2.201**  
**Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024**

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
<b>Tahun 2023</b>			
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD Kota Lhokseumawe	70
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVAC)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	58

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMPTSP & Naker Kota Lhokseumawe	56
<b>Tahun 2024</b>			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Keajaiban)	Disperindagkop & UKM	75.00
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00
8	Pliék Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Untuk tahun 2024 Kota Lhokseumawe memiliki 11 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, dengan Tingkat kematangan inovasi tertinggi sebesar 91 dan terendah sebesar 63.

#### 2.1.4.4.4.5 Pengawasan

##### A. Level Kapabilitas APIP

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Pencapaian kapabilitas APIP



Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel, dimana di tahun 2020-2024 telah berada pada level 3 untuk Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.202**  
**Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

*Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2025*

### B. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan. Untuk capaian Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel.2.203**  
**Capaian Tingkat Maturitas SPIP**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas SPIP	Level 2	Level 2 2.314	Level 2 2.314	Level 3 3.031	Level 3 3.031

*Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2025*

### C. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 area dalam 3 komponen utama yaitu 1. Perencanaan dengan penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. 2. Kapabilitas dengan penilaian atas komponen terhadap area-area kepemimpinan, kapabilitas, SDM, kemitraan dan proses pengelolaan risiko. 3. Hasil dengan penilaian atas komponen aktivitas penanganan risiko dan outcome. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2022 masih sama yaitu level 2 dengan nilai 2,092. Dan pada tahun 2023 masih berada pada level 2 namun dengan nilai 2.832 meningkat sedikit dari tahun 2022.

#### **D. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompok dalam 3 (tiga) pilar yaitu pilar kapabilitas pengelola risiko korupsi, pilar penerapan strategi pencegahan dan pilar penanganan kejadian korupsi. Untuk tahun 2021-2022 IEPK Kota Lhokseumawe berada pada level 2 dengan nilai 2,276. Untuk tahun 2023 IEPK Kota Lhokseumawe masih berada pada level 2 dengan nilai 2.800 meningkat dari tahun 2022.

#### **2.1.4.4.4.6 Sekretariat DPRK**

##### **A. Pesentase Rancangan Qanun yang ditetapkan**

Dalam proses penyusunan Qanun, Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan Rancangan Qanun selama 1 tahun periode sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRK sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program Legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Qanun yang aspiratif dan partisipatif yang dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Qanun tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

**Tabel 2.204**  
**Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan	7	7	4	5	6
2	Jumlah Prolegda	21	17	10	8	11
	Persentase	33.33	41.18	40.00	65.50	54.55

*Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2025*

Persentase Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2019 persentase rancangan qanun yang ditetapkan sebesar 47.06% dan di tahun 2020 semakin menurun menjadi 33.33%. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase rancangan qanun yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 41.18%, walaupun ditahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 40.00% dan tahun 2023 meningkat menjadi 65.50%.

#### **2.1.4.4.4.7 Sekretariat Daerah**

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks reformasi hukum. Hasil capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.205**  
**Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024**

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C 41.23	C 44.03	C 45.36	CC 54.79	B 66.85
2	Nilai SAKIP	CC 55.00	CC 55.40	CC 55.80	B 60.18	B 61.12
3	Indeks Pelayanan Publik	N/A	N/A	B- 3.33	D 1.87	B 3.94
4	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	N/A	55.13	77.72

*Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025*

#### 2.1.4.4.8 Unsur Kekhususan

##### 1. Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi pelaksanaan syariat Islam salah satu capaiannya diukur dengan Survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).

Indeks Pembangunan Syariah terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al quran, Manajemen Mesjid, Hukum Jinayat dan Akhlak. Adapun Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 83,91 dengan skor masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.206**  
**Dimensi Indeks Pembangunan Syariah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024**

No	Dimensi IPS	2021	2024
1	Akidah	95.83	85,74
2	Lembaga Keuangan Syariah	79.15	85.97
3	Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal	77.12	85.81
4	Melek Al Quran	87.59	84.56
5	Manajemen Mesjid	79.15	82.90
6	Hukum Jinayat	73.03	79.60
7	Akhlak	88.01	82.76
<b>Indeks Pembangunan Syariah</b>		<b>80.65</b>	<b>83,91</b>

*Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2025*

##### 2. Pendidikan Dayah

Pemerintah Aceh terus berupaya dalam meningkatkan jumlah dayah yang berstandar dan terakreditasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu dayah dalam berbagai aspek, baik itu kurikulumnya, fasilitas sarana dan prasarana maupun para tenaga pendidik. Tahun 2021 Gubernur Aceh telah menetapkan/mengangkat anggota Majelis Akreditasi Dayah yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan akreditasi dayah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani akreditasi dayah, menetapkan kebijakan

pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi dayah serta menetapkan prosedur, mekanisme dan tahapan pelaksanaan akreditasi dayah dengan harapan kedepannya dayah-dayah yang terakreditasi di Aceh bisa lebih meningkat.

**Tabel 2.207**  
**Jumlah Dayah Terakreditasi Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Jumlah Dayah	Dayah				
			Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D (Non Tipe)
1	2021	55	1	5	8	27	12
2	2022	55	1	5	8	27	12
3	2023	60	1	5	11	27	16
4	2024	60	1	5	11	27	16

*Sumber : Dinas Syariat Islam, 2025*

Jumlah Dayah terakreditasi berdasarkan tipe datah di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan pada tahun 2021 jumlah dayah terakreditasi sebanyak 55 dayah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 60 dayah dengan tipe A plus sebanya 1 dayah, tipe A sebanyak 5 dayah , tipe B sebanyak 11 dayah, tipe C sebanyak 27 dayah dan tipe D (non tipe) sebanyak 16 dayah.

### **3. Baitul Mal**

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan umat.

**Tabel 2.208**  
**Pendapatan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah**  
**Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Pendapatan ZIS	Persentase	
			Peningkatan ZIS	Penyaluran ZIS
1	2020	7.647.102.813	0.03	6.611.208.400
2	2021	6.862.200.359	(10.26)	6.815.193.600
3	2022	7.009.819.033	2.15	8.449.648.975
4	2023	6.726.500.196,23	(4.04)	6.714.100.000
5	2024	7.296.324.646,79	8.47	6.883.851.000

*Sumber : Sekretariat Baitul Mal, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan ZIS Kota Lhokseumawe fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 ZIS mengalami penurunan dari tahun 2020, namun pada tahun 2022 dan 2024 mengalami peningkatan dan tahun 2023 sedikit menurun. Hal ini disebabkan ZIS Kota Lhokseumawe sangat bergantung kepada pendapatan ASN setiap tahunnya. Sedangkan untuk penyaluran ZIS tahun 2022 melebihi pendapatan ZIS, hal ini disebabkan oleh terdapat sisa-sisa ZIS tahun sebelumnya yang tidak habis dibagikan, direalisasikan pada tahun 2022.

#### 4. Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Aceh

Pembinaan adat istiadat dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan yaitu pembinaan Adat Seumapa/Narinet Maja dan Meunasib, sosialisasi adat istiadat, Pemasarakatan Adat Doda Idi, Pembinaan Keluarga meudadab dan Adat Perkawinan serta Pembinaan Putroe Phang tentang adat perkawinan. Namun dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial sangat rentan mempengaruhi kehidupan adat istiadat masyarakat Aceh oleh budaya luar. Adapun pembinaan adat istiadat yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.209**  
**Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2020-2024**

No	Nama Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelatihan Penyuluhan Peradilan Adat	8 Desa	-	-	50 Org	50 Org
2	Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong	8 Desa	-	-	-	-
3	Pelatihan Dalail Khairat dan Meurukon	5 Kelp	-	-	-	-
4	Peradilan Adat Gampong Bagi Pelajar	100 Org	-	-	-	-
5	Sosialisasi Adat Istiadat	-	5 Sekolah 150 Org	5 Sekolah 150 Org	50 Org	30 Org
6	Rapat Koordinasi Peradilan Adat Gampong	-	68 Desa	68 Desa	68 Desa	-
7	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja	-	-	-	-	50 Org
8	Pemasarakatan Adat Do DA Idi	-	-	-	-	50 Org

*Sumber : Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe, 2025*

Pembinaan dan pengembangan hukum adat untuk bertujuan penyelesaian sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat secara adat seperti Perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat mesum, pencurian ringan dan lain sebagainya.

## 2.2 Gambaran Keuangan Kota Lhokseumawe

Bagian ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan yang berisi tentang kinerja pelaksanaan APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan; perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas;



kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambaran pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe serta kerangka pendanaan berfungsi untuk mencari kapasitas riil yang digunakan untuk membiayai pembangunan Kota Lhokseumawe selama 5 (lima) tahun kedepan. Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi dan kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, maka dalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai perkembangan APBK Lhokseumawe selama periode 2020 sampai dengan 2024 yang mencakup tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)/*Audited*. Untuk mendukung perencanaan keuangan daerah kedepan, proyeksi anggaran pada periode 2026-2030 dalam dokumen ini disusun berdasarkan capaian kinerja masa lalu serta pendekatan dan metode perencanaan lainnya yang relevan, dengan mempertimbangkan tren realisasi keuangan yang telah diaudit.

### **2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). APBK pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBK merupakan salah satu bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang akan dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemanfaatan sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karena itu untuk mengetahui kinerja

keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing dalam APBK. Dalam rangka analisis kinerja keuangan Kota Lhokseumawe, maka akan diuraikan kinerja keuangan masa lalu, yaitu kinerja keuangan Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024.

Salah satu indikator kinerja penilaian capaian kinerja keuangan daerah antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode 2020 sampai dengan 2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga memperoleh opini WTP. Adapun opini laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.210**  
**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Capaian	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
2020	WTP	5.A/LHP/XVIII.BAC/04/2021	23 April 2021
2021	WTP	352/X/XVIII.BAC/04/2022	20 April 2022
2022	WTP	390/S/XVIII.BAC/05/2023	12 Mei 2023
2023	WTP-PSH	253/S/XVIII.BAC/05/2024	20 Mei 2024
2024	WTP-PSH	4.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025	21 Mei 2025

*Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode 2020-2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hanya saja opini terhadap laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH). Hal ini disebabkan karena BPK menemukan beberapa kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain:

- a. Penyusunan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 untuk menyelesaikan kewajiban Tahun Anggaran 2023 dan memulihkan kas yang dibatasi penggunaannya belum memadai;
- b. Kekurangan volume atas 28 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada dua perangkat daerah; dan
- c. Penyertaan modal Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak sepenuhnya memadai.

Secara umum, indeks kapasitas fiskal Kota Lhokseumawe berada pada kategori sangat rendah. Kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja APBK dari tahun ke tahun, khususnya dalam proses penetapan APBK yang harus disepakati bersama dengan DPRK. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Informasi tentang penetapan APBK Lhokseumawe selama kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2.211**  
**Penetapan APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Qanun Kota Lhokseumawe	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2020	Nomor 4 Tahun 2019	30 Desember 2019	932.428.473.462,-
2021	Nomor 10 Tahun 2020	29 Desember 2020	833.757.195.523,-
2022	Nomor 7 Tahun 2021	31 Desember 2021	820.651.428.592,-
2023	Nomor 5 Tahun 2022	30 Desember 2022	779.444.500.000,-
2024	Nomor 2 Tahun 2023	29 Desember 2023	800.078.811.672,-

*Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2025*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2020-2024 APBK Lhokseumawe telah ditetapkan secara tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

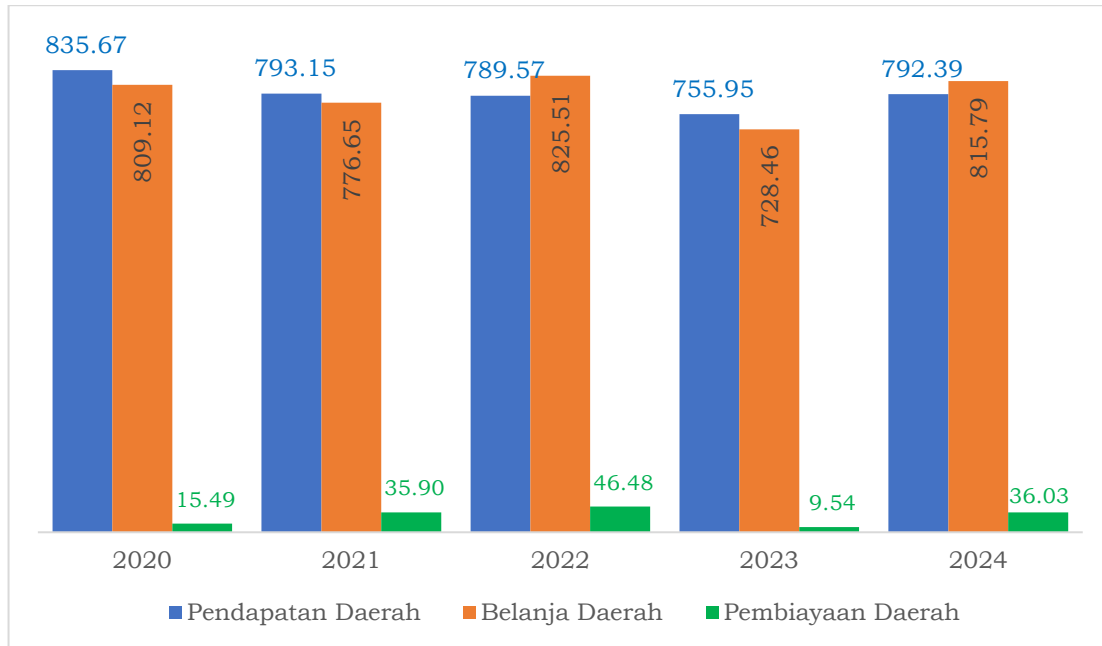
### **2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBK**

Kinerja pelaksanaan APBK Lhokseumawe dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe disusun dengan pendekatan kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe selama kurun tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.49**  
**Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Milyar Rp)**



Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Audited* selama kurun waktu tahun 2020-2024 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe sebesar Rp.835,67 milyar, mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi Rp.792,44 milyar dengan pertumbuhan minus 1,06 persen pertahunnya. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pendapatan daerah tertinggi tercatat pada tahun 2020, sedangkan realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.755,95 milyar.

Seiring dengan berfluktuasinya realisasi pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 0,16 persen pertahunnya. Realisasi belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp.809,12 milyar, turun pada tahun 2021 menjadi Rp.776,65 milyar, selanjutnya mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 menjadi Rp.825,51 milyar, akan tetapi pada tahun 2023 turun kembali menjadi Rp.728,46 milyar, dan tahun 2024 realisasi belanja daerah kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.815,798 milyar. Secara umum belanja daerah tertinggi selama lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp.825,50 milyar, dan realisasi belanja daerah terendah tercatat pada tahun 2023 yang sebesar Rp.728,46 milyar.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 *Audited*, selama kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi APBK Lhokseumawe sangat berfluktuatif, dimana realisasi APBK terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 88,41 persen atau sebesar Rp.782.796.321.455,- dari anggaran sebesar Rp.885.454.861.282,- dengan SILPA mencapai Rp.52.399.883.518,-. Realisasi APBK tertinggi

tercatat pada tahun 2024 yang mencapai 96,20 persen atau sebesar Rp.816.786.503.747,- dari anggaran sebesar Rp.849.032.964.142,- dengan SILPA sebesar Rp.12.634.946.009,-. Lebih jelasnya untuk mengetahui target dan realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.212**  
**Anggaran dan Realisasi APBK Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		SILPA
		Rp.	%	
2020	899,710,311,849	810,615,344,069	90.10	42,045,667,333
2021	885,454,861,282	782,796,321,455	88.41	52,399,883,518
2022	876,851,664,000	827,509,672,418	94.37	10,541,034,674
2023	800,260,907,647	729,461,011,932	91.15	37,029,821,414
2024	849,032,964,142	816,786,503,747	96.20	12,634,946,009

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 27 sampai dengan 28), diuraikan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selama kurun waktu 2020-2024 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan negatif sebesar (1,06) persen, sedangkan belanja daerah Kota Lhokseumawe mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,16 persen, dan pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan 18,39 persen. Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.213**  
**Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>835,667,970,983</b>	<b>793,150,537,641</b>	<b>789,566,096,080</b>	<b>755,949,798,672</b>	<b>792,391,628,341</b>	<b>(1.06)</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>65,875,904,859</b>	<b>62,415,913,243</b>	<b>68,212,506,871</b>	<b>67,901,946,334</b>	<b>64,522,601,603</b>	<b>(0.41)</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	35,168,842,182	30,115,978,587	40,032,463,310	39,586,915,813	41,649,012,954	3.44
4.1.2.	Retribusi Daerah	3,405,689,671	3,073,325,409	3,022,508,323	3,733,420,512	2,694,118,337	(4.58)
4.1.3.	HPKD Yang Dipisahkan	4,327,896,492	4,174,105,667	4,350,084,432	3,236,124,545	9,296,221,048	16.52
4.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	22,973,476,514	25,052,503,580	20,807,450,806	21,345,485,464	10,883,249,264	(13.88)
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>732,812,691,124</b>	<b>706,642,912,398</b>	<b>721,353,589,208</b>	<b>687,825,852,338</b>	<b>718,110,376,120</b>	<b>(0.40)</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>628,914,528,526</b>	<b>607,680,159,000</b>	<b>622,773,568,549</b>	<b>630,906,590,568</b>	<b>682,200,349,381</b>	<b>1.64</b>
	<i>DOKA dan Dana Tambahan Infrastruktur</i>					32,536,146,822	
	<i>Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat</i>	43,303,103,998	28,117,593,050	25,508,814,157	25,249,350,413	23,974,451,000	(11.15)
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	425,306,246,000	418,626,656,000	415,683,229,737	436,369,459,000	461,173,597,656	1.63
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	35,308,708,637	38,447,374,289	33,292,658,226	22,632,985,556	20,389,645,000	(10.40)
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	46,319,182,891	44,474,034,323	59,943,665,527	79,522,976,344	76,238,534,903	10.48
	<i>Insentif Fiskal</i>	18,391,468,000	16,156,027,000	34,445,081,000	5,730,566,000	5,485,809,000	(21.49)
	<i>Dana Desa</i>	60,285,819,000	61,858,474,338	53,900,119,902	61,401,253,255	62,402,165,000	0.69
<b>4.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>103,898,162,598</b>	<b>98,962,753,398</b>	<b>98,580,020,659</b>	<b>56,919,261,770</b>	<b>35,910,026,739</b>	<b>(19.14)</b>
	<i>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	31,220,106,455	27,269,583,603	29,261,429,715	34,250,277,597	35,910,026,739	2.84
	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	72,678,056,143	71,693,169,795	69,318,590,944	22,668,984,173	-	(100.00)

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>4.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>36,979,375,000</b>	<b>24,091,712,000</b>	-	<b>222,000,000</b>	<b>9,758,650,618</b>	<b>(23.39)</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	21,979,375,000	8,899,544,000	-	222,000,000	-	(60.11)
4.3.2.	Pendapatan Lainnya	15,000,000,000	15,192,168,000	-	-	9,758,650,618	(8.24)
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>809,115,344,069</b>	<b>776,651,681,455</b>	<b>825,509,672,418</b>	<b>728,461,011,932</b>	<b>815,786,503,747</b>	<b>0.16</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>519,576,952,633</b>	<b>521,495,267,967</b>	<b>576,374,939,708</b>	<b>548,509,273,989</b>	<b>597,233,963,150</b>	<b>2.83</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	283,796,919,084	283,308,654,473	304,916,122,038	316,584,344,048	340,436,176,707	3.71
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	203,976,543,666	169,787,596,364	185,425,254,292	177,812,072,024	187,048,276,820	(1.72)
5.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	200,000,000	470,000,000	1,143,000,000	41.71
5.1.5.	Belanja Hibah	7,780,367,500	26,757,974,805	36,702,542,385	22,501,686,262	39,556,499,966	38.43
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	24,023,122,383	41,641,042,325	49,131,020,993	31,141,171,655	29,050,009,657	3.87
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>177,257,389,327</b>	<b>137,196,135,419</b>	<b>142,251,751,256</b>	<b>60,336,467,761</b>	<b>102,279,876,677</b>	<b>(10.41)</b>
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	16,998,498,043	8,819,863,140	13,713,809,182	-	-	(4.20)
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26,266,396,053	27,807,298,336	21,363,441,916	15,627,696,279	18,620,998,870	(6.65)
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	109,317,854,810	34,414,916,470	40,945,930,770	21,923,145,455	27,920,996,675	(23.89)
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20,826,592,200	62,684,960,792	62,614,371,138	18,771,759,227	50,092,283,747	19.19
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,848,048,221	3,469,096,681	3,614,198,250	4,013,866,800	5,645,597,385	7.97
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>10,823,441,265</b>	<b>3,720,021,430</b>	<b>2,134,850,082</b>	<b>52,650,368</b>	<b>457,862</b>	<b>(86.66)</b>
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	10,823,441,265	3,720,021,430	2,134,850,082	52,650,368	457,862	(86.66)
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>101,457,560,844</b>	<b>114,240,256,639</b>	<b>104,748,131,372</b>	<b>119,562,619,814</b>	<b>116,272,206,058</b>	<b>2.76</b>
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	1,794,068,948	1,820,631,270	3,183,566,844	3,847,744,558	16.49
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	101,457,560,844	112,446,187,691	102,927,500,102	116,379,052,970	112,424,461,500	2.07

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>15,493,040,419</b>	<b>35,901,027,333</b>	<b>46,484,611,013</b>	<b>9,541,034,674</b>	<b>36,029,821,414</b>	<b>18.39</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>16,993,040,419</b>	<b>42,045,667,333</b>	<b>48,484,611,013</b>	<b>10,541,034,674</b>	<b>37,029,821,414</b>	(9.11)
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	16,993,040,419	42,045,667,333	48,484,611,013	10,541,034,674	37,029,821,414	(9.11)
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>6,144,640,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>(7.79)</b>
6.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,500,000,000	6,144,640,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	(7.79)

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

### 2.2.1.1.1 Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Selain itu, diuraikan bahwa pendapatan daerah dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dibagi menurut jenis pendapatan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b. Pendapatan Transfer; yang meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dan dana desa. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, bersumber dari pendapatan hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 *Audited* diketahui pencapaian realisasi pendapatan daerah Kota Lhokseumawe sangat berfluktuatif bahkan mengalami tren penurunan atau pertumbuhan negatif. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kota Lhokseumawe sebesar Rp.835.667.9870.983,- atau mencapai 94,67 persen dari anggaran yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah Kota Lhokseumawe sebesar Rp.792.391.628.341,- atau mencapai 97,58 persen dari anggaran yang ditargetkan. Selama lima tahun terakhir capaian realiasi pendapatan Kota Lhokseumawe yang tertinggi tercatat pada tahun 2023 yang mencapai 98,37 persen dari target yang dianggarkan. Sedangkan capaian realisasi terendah tercatat pada tahun 2021 yang mencapai 94,04 persen dari target yang dianggarkan. Untuk mengetahui perkembangan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.214**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	882,717,271,430	835,667,970,983	94.67	-2.25
2021	843,409,193,949	793,150,537,641	94.04	-5.09
2022	828,367,052,987	789,566,096,080	95.32	-0.45
2023	768,471,407,647	755,949,798,672	98.37	-4.26
2024	812,003,142,728	792,391,628,341	97.58	4.82

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Adapun rincian target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 diuraikan sebagai berikut.

**A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

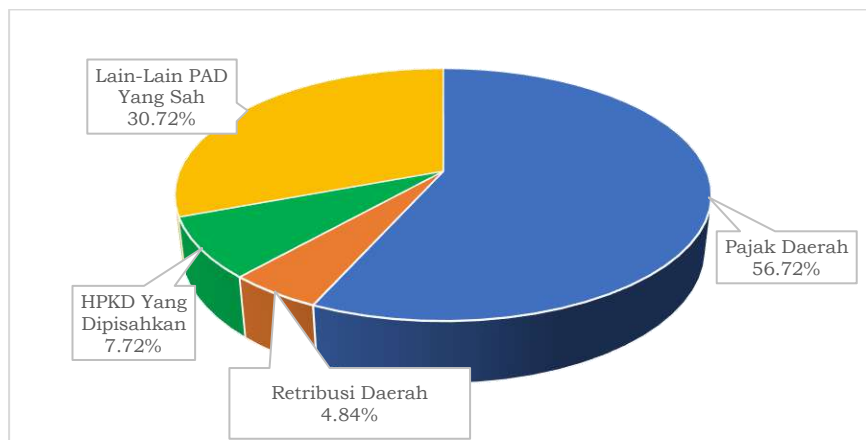
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selama lima tahun terakhir PAD Kota Lhokseumawe sangat berfluktuatif dengan realisasi PAD tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.68.212.506.871,-, sedangkan tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah realisasi PAD terendah yaitu sebesar Rp.62.415.913.243,-. Jika dilihat pertumbuhan pertahunnya, hanya pada tahun 2020 dan 2022 yang mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 7,29 persen dan 9,29 persen, sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan PAD menunjukkan pertumbuhan negatif dibandingkan tahun sebelumnya, begitu juga dengan tahun 2023 dan 2024 pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe juga tumbuh negatif. Jika dilihat tren pertumbuhannya selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata pertahunnya minus 0,41 persen. Lebih jelas tentang perkembangan pertumbuhan PAD Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.215**  
**Anggaran dan Realisasi PAD Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	70,342,465,350	65,875,904,859	93.65	7.29
2021	91,165,667,619	62,415,913,243	68.46	-5.25
2022	88,262,140,311	68,212,506,871	77.28	9.29
2023	75,120,033,625	67,901,946,334	90.39	-0.46
2024*)	76,093,680,442	64,522,601,603	84.79.46	-4.98

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

**Gambar 2.50**  
**Kontribusi Masing-Masing Komponen PAD terhadap Total PAD**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**



Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)



Capaian realisasi PAD Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2020-2024 didominasi oleh komponen Pajak Daerah, dimana secara kumulatif kontribusinya terhadap PAD Kota Lhokseumawe mencapai 56,72 persen. Kontribusi kedua disumbangkan oleh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang mencapai 30,72 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi sebesar 7,72 persen dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 4,84 persen.

### A.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah Kota Lhokseumawe terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mencapai Rp.186.553.212.846,- atau mencapai 88,23 persen dari target yang dianggarkan. Pertumbuhan Pajak Daerah menunjukkan tren positif selama kurun waktu lima tahun terakhir dengan pertumbuhan rata-rata 3,44 persen pertahun. Meski demikian Pemerintah Kota Lhokseumawe harus tetap melakukan upaya yang komprehensif dalam meningkatkan pendapatan dari Pajak Daerah. Untuk melihat perkembangan anggaran dan realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.216**  
**Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	35,237,500,000	35,168,842,182	99.81	23.51
2021	48,791,981,138	30,115,978,587	61.72	-14.37
2022	51,002,250,000	40,032,463,310	78.49	32.93
2023	34,060,750,000	39,586,915,813	116.22	-1.11
2024	42,355,409,096	41,649,012,954	98.33	5.21
<b>Total</b>	<b>211,447,890,234</b>	<b>186,553,212,846</b>	<b>88.23</b>	<b>3.44</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (*Audited*)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp.41.649.012.954,-. Namun jika dilihat pencapaian realisasi Pajak Daerah selama lima tahun terakhir, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 116,22 persen. Dari sisi pertumbuhan tiap tahunnya selama lima tahun terakhir, tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan tertinggi yang mencapai 32,93 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan minus 14,37 persen.

### A.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu. Secara umum perkembangan anggaran dan realisasi Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.217**  
**Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	4,471,983,350	3,405,689,671	76.16	-9.34
2021	4,319,500,000	3,073,325,409	71.15	-9.76
2022	3,996,000,000	3,022,508,323	75.64	-1.65
2023	4,087,500,000	3,733,420,512	91.34	23.52
2024	3,138,000,000	2,694,118,337	85.85	-27.84
<b>Total</b>	<b>20,012,983,350</b>	<b>15,929,062,252</b>	<b>79.59</b>	<b>-4.58</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir realisasi Retribusi Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai Rp.3.733.420.512,- dari target yang dianggarkan sebesar Rp.4.087.500.000,- atau 91,34 persen, sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp.2.694.118.337,- atau 85,85 persen dari target yang dianggarkan pada tahun tersebut sebesar Rp.3.138.000.000,-. Dari sisi pertumbuhan pertahunnya, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yang mencapai 23,52 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2024 yang menunjukkan pertumbuhan minus 27,84 persen.

### A.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Capaian realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang berasal dari Bagian Laba (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2024 sebesar Rp.9.296.221.048,- dan yang terendah pada tahun 2023 sebesar Rp.3.236.124.545,-. Dari sisi pertumbuhan tiap tahunnya juga berfluktuatif, dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 187,26 persen, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yang menunjukkan pertumbuhan negatif 25,61 persen. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.218**  
**Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	5,200,000,000	4,327,896,492	83.23	-15.28
2021	5,200,000,000	4,174,105,667	80.27	-3.55
2022	5,200,000,000	4,350,084,432	83.66	4.22
2023	5,200,000,000	3,236,124,545	62.23	-25.61
2024	16,200,000,000	9,296,221,048	57.38	187.26

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

#### A.4. Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi pendapatan yang berasal dari Lain-Lain PAD yang Sah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) berjumlah Rp.101.062.165.628,-. Pencapaian realisasi pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tersebut bersumber dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan; Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; Pendapatan Denda Pajak Daerah; Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP; Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah; dan Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf. Lebih lanjut untuk melihat perkembangan anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.219**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	25,432,982,000	22,973,476,514	90.33	-4.52
2021	32,854,186,481	25,052,503,580	76.25	9.05
2022	28,063,890,311	20,807,450,806	74.14	-16.94
2023	31,771,783,625	21,345,485,464	67.18	2.59
2024	14,400,271,346	10,883,249,2664	75.58	-49.01
<b>Total</b>	<b>132,523,113,763</b>	<b>101,062,165,628</b>	<b>76.26</b>	<b>-13.88</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 realisasi Lain-Lain PAD yang Sah tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar Rp.25.052.503.580,- dan yang terendah terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp.10.883.249.264,-. Penurunan yang terjadi secara drastis pada tahun 2024 dikarenakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tidak lagi menjadi komponen pendapatan pada Lain-Lain PAD yang Sah akan tetapi telah menjadi komponen pendapatan pada Lain-

Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Tren pertumbuhan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 13,88 persen pertahun. Sedangkan pertumbuhan per tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif, dimana selama lima tahun terakhir hanya tahun 2021 dan 2023 yang menunjukkan pertumbuhan positif dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 9,05 persen dan 2,59 persen, sedangkan tahun 2020, 2022 dan 2024 menunjukkan pertumbuhan negatif dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -4,52 persen, 16,94 persen, dan -49,01 persen.

### **B. Pendapatan Transfer**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pendapatan Transfer terdiri atas transfer dari Pemerintah Pusat, dan Transfer Antar Daerah. Realisasi pendapatan transfer selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 berjumlah sebesar Rp.3.566.745.421.188,-. Pendapatan transfer ini berasal dari transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pusat; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus; Dana Insentif Daerah; dan Dana Desa; dan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi; dan Bantuan Keuangan dari Provinsi.

Selama lima tahun terakhir (2020-2024) realisasi pendapatan transfer mengalami fluktuasi. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp.732.812.691.124, namun tahun 2021 realisasinya terus menurun hingga tahun 2024 sebesar Rp.718.110.376.120,-. Dari sisi pertumbuhan secara umum pendapatan transfer menunjukkan tren negatif, dimana rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir minus 0,40 per tahun. Jika ditinjau secara tahunan, pertumbuhan positif tercatat pada tahun 2022 dan 2024 yaitu sebesar 2,08 persen dan 4,40 persen, sedangkan tahun 2020, 2021, dan 2023 menunjukkan pertumbuhan negatif dengan masing-masing minus 6,25 persen, minus 3,57 persen, dan minus 4,65 persen.

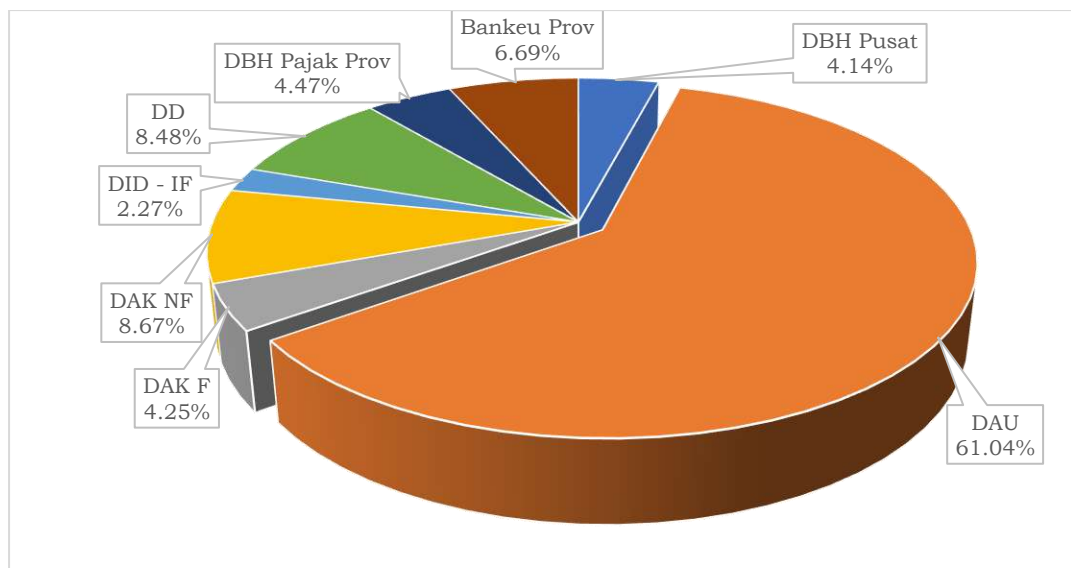
**Tabel 2.220**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	764,186,777,080	732,812,691,124	95.89	-6.25
2021	718,461,782,330	706,642,912,398	98.35	-3.57
2022	740,104,912,676	721,353,589,208	97.47	2.08
2023	692,811,374,022	687,825,852,338	99.28	-4.65
2024	722,562,844,443	718,110,376,120	99.38	4.40
<b>Total</b>	<b>3,638,127,690,551</b>	<b>3,566,745,421,188</b>	<b>98.04</b>	<b>-0.40</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Secara umum komponen terbesar dari pendapatan transfer selama tahun 2020-2024 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 61,04 persen, selanjutnya kontribusi terbesar kedua dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK NF) sebesar 8,67 persen, kontribusi terbesar ketiga dari Dana Desa sebesar 8,48 persen, dan kontribusi terbesar keempat dari Bantuan Keuangan dari Provinsi berupa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar 6,69 persen. Selebihnya disumbangkan oleh Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK F), Dana Bagi Hasil Pusat, dan Dana Insentif Daerah (DID). Secara umum kontribusi komponen masing-masing sumber pendapatan dalam pendapatan transfer dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.51**  
**Kontribusi Masing-Masing Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer Tahun 2020-2024 (Persen)**



Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited) (diolah)

Secara garis besar komposisi masing-masing pendapatan transfer diuraikan sebagai berikut.

### **B.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

#### **B.1.1. Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat**

Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat merupakan bagi dari Transfer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah serta kepada daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

DBH terdiri atas DBH Pajak Bumi dan Bangunan; DBH PPh Pasal 21; DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN; DBH Cukai Hasil Tembakau; DBH SDA Minyak Bumi; DBH SDA Gas Bumi; DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi; DBH SDA Mineral dan Batubara; DBH SDA Kehutanan; dan DBH SDA Perikanan. Selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 penerimaan Dana Bagi Hasil Pusat dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.221**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pusat**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	61,278,718,235	43,303,103,998	70.67	24.47
2021	27,803,662,449	28,117,593,050	101.13	-35.07
2022	25,978,449,889	25,508,814,157	98.19	-9.28
2023	25,268,064,383	25,249,350,413	99.93	-1.02
2024	19,384,221,000	23,974,451,000	123.68	-5.05
<b>Total</b>	<b>159,713,115,956</b>	<b>146,153,312,618</b>	<b>91.51</b>	<b>-11.15</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara kumulatif realisasi DBH dari Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sebesar Rp.146.153.312.618,- dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp.43.303.103.998,- dan yang terendah pada tahun 2024 sebesar Rp.23.963.915.000,-. Pertumbuhan DBH dari Pemerintah Pusat menunjukkan tren negatif, dimana pertumbuhan rata-rata pertahun minus 11,15 persen.

#### **B.1.2. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan daerah. Penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Realisasi DAU selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 mencapai Rp.2.157.159.188.393,- dengan capaian rata-rata 100,11 persen dari target yang dianggarkan. Realisasi tertinggi DAU Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 yang mencapai Rp.461.173.597.656,- sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar Rp.415.683.229.737,-. Secara umum pertumbuhan DAU Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 1,63 persen pertahun. Perkembangan mengenai anggaran dan realisasi DAU Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.222**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2019-2023**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	428,195,816,000	425,306,246,000	99.33	-9.41
2021	418,626,656,000	418,626,656,000	100.00	-1.57
2022	418,626,656,000	415,683,229,737	99.30	-0.70
2023	433,613,526,000	436,369,459,000	100.64	4.98
2024	455,755,284,000	461,173,597,656	101.19	5.68
<b>Total</b>	<b>2,154,817,938,000</b>	<b>2,157,159,188,393</b>	<b>100.11</b>	<b>1.63</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

### B.1.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. DAK dialokasikan dengan tujuan: (a) mencapai prioritas nasional, (b) mempercepat pembangunan daerah, (c) mengurangi kesenjangan layanan publik, (d) mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan (e) mendukung operasionalisasi layanan publik. DAK terdiri atas: (a) DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah, (b) DAK Non Fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 total penerimaan DAK mencapai Rp.456.569.765.696,- yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp.150.071.371.708,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp.306.498.393.988,-. Perkembangan anggaran dan realisasi DAK Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.223**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
<b>A.</b>	<b>DAK FISIK</b>			
2020	35,869,663,000	35,308,708,637	98.44	-42.37
2021	40,677,167,000	38,447,374,289	94.52	8.89
2022	35,772,994,000	33,292,658,226	93.07	-13.41
2023	23,192,612,000	22,632,985,556	97.59	-32.02
2024	20,409,944,000	20,389,645,000	99.90	-9.91
<b>Jumlah</b>	<b>155,922,380,000</b>	<b>150,071,371,708</b>	<b>96.25</b>	<b>-10.40</b>
<b>B.</b>	<b>DAK NON FISIK</b>			
2020	47,605,516,000	46,319,182,891	97.30	10.89
2021	49,281,321,000	44,474,034,323	90.25	-3.98
2022	73,081,242,000	59,943,665,527	82.02	34.78
2023	82,063,439,000	79,522,976,344	96.90	32.66
2024	83,302,489,000	76,238,534,903	91.52	-4.13
<b>Jumlah</b>	<b>335,334,007,000</b>	<b>306,498,393,988</b>	<b>91.40</b>	<b>10.48</b>
<b>Total</b>	<b>491,256,387,000</b>	<b>456,569,765,696</b>	<b>92.94</b>	

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Secara parsial, realisasi DAK Fisik Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 DAK Fisik Kota Lhokseumawe mencapai Rp.35.308.708.637,- selanjutnya turun hingga tahun 2024 menjadi Rp.20.389.645.000,- Sedangkan realisasi DAK Non Fisik menunjukkan kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp.46.319.182.891,- terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai Rp.76.238.534.903,-.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pertumbuhan penerimaan DAK Fisik Kota Lhokseumawe menunjukkan tren negatif

dengan rata-rata pertumbuhan minus 10,40 persen pertahun. Sedangkan pertumbuhan penerimaan DAK Non Fisik menunjukkan tren yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 10,48 persen pertahun.

#### B.1.4. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian dan penggunaan DID diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan kinerja tertentu. Kriteria utama penilaian DID meliputi Opini BPK atas LKPD; Penetapan Perda APBD tepat waktu; Penggunaan *e-Government (e-budgeting, dan e-procurement)*; dan Ketersediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Realisasi penerimaan DID Kota Lhokseumawe selama lima tahun terakhir mencapai Rp.80.208.951.000,- dengan realisasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar Rp.34.445.081.000,- dan realisasi terendah pada tahun 2024 sebesar Rp.5.485.809.000,-. Dari sisi pertumbuhan, tren penerimaan DID Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 21,49 persen setiap tahunnya. Perkembangan anggaran dan realisasi DID Kota Lhokseumawe tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.224**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	18,391,468,000	18,391,468,000	100.00	83.58
2021	16,156,027,000	16,156,027,000	100.00	-12.15
2022	22,949,580,000	34,445,081,000	150.09	113.20
2023	5,730,566,000	5,730,566,000	100.00	-83.36
2024	5,485,809,000	5,485,809,000	100.00	-4.27
<b>Total</b>	<b>68,713,450,000</b>	<b>80,208,951,000</b>	<b>116.73</b>	<b>-21.49</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

#### B.1.5. Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pengalokasian DD dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Penggunaan DD dapat ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. Perkembangan realisasi DD Kota Lhokseumawe selama kurun waktu lima tahun

terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan pertahun menunjukkan tren positif sebesar 0,69 persen. Secara kumulatif realisasi penerimaan DD selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mencapai Rp.299.847.831.495,-. Realisasi tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp.62.402.165.000,- sedangkan yang terendah pada tahun 2022 sebesar Rp.53.900.119.902,-. Perkembangan anggaran dan realisasi DD Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.225**  
**Anggaran dan Realisasi Dana Desa**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	60,285,819,000	60,285,819,000	100.00	3.68
2021	61,983,149,000	61,858,474,338	99.80	2.61
2022	53,928,333,000	53,900,119,902	99.95	-12.87
2023	61,827,136,000	61,401,253,255	99.31	13.92
2024	62,402,165,000	62,402,165,000	100	1.63
<b>Total</b>	<b>300,426,602,000</b>	<b>299,847,831,495</b>	<b>99.81</b>	<b>0.69</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

## B.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan transfer antar daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi. Pendapatan Bagi Hasil terdiri atas Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; dan Bagi Hasil Pajak Rokok. Sedangkan Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Khusus berupa Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 total penerimaan yang bersumber dari Transfer antar Daerah sebesar Rp.394.270.225.164,- yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dari Provinsi sebesar Rp.157.911.424.109,- dan Bantuan Keuangan sebesar Rp.236.358.801.055,-. Pendapatan transfer dari provinsi didominasi oleh penerimaan yang berasal DOKA dengan kontribusi sebesar 59,98 persen sedangkan Bagi Hasil dari Provinsi memberikan kontribusi sebesar 40,05 persen. Untuk mengetahui perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan Transfer antar Daerah selama periode 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.226**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
<b>A.</b>	<b>Dana Bagi Hasil dari Provinsi</b>			
2020	34,763,380,046	31,220,106,455	89.81	16.91
2021	29,372,956,024	27,269,583,603	92.84	-12.65

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2022	31,220,106,455	29,261,429,715	93.73	7.30
2023	31,220,106,455	34,250,277,597	109.71	17.05
2024	40,560,043,420	35,910,026,739	88.54	4.85
<b>Jumlah</b>	<b>167,136,592,400</b>	<b>157,911,424,109</b>	<b>94.48</b>	<b>2.84</b>
<b>B.</b>	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi</b>			
2020	77,796,396,799	72,678,056,143	93.42	-8.57
2021	74,560,843,857	71,693,169,795	96.15	-1.36
2022	78,547,551,332	69,318,590,944	88.25	-3.31
2023	29,895,924,184	22,668,984,173	75.83	-67.30
2024	35,262,889,023	-	0.00	-100.00
<b>Jumlah</b>	<b>296,063,605,195</b>	<b>236,358,801,055</b>	<b>79.83</b>	<b>-100.00</b>
<b>Total</b>	<b>463,200,197,595</b>	<b>394,270,225,164</b>	<b>85.12</b>	

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi sejak selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang berfluktuatif. Realisasi tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp.35.910.026.739,- sedangkan terendah pada tahun 2021 sebesar Rp.27.269.583.603,-. Pertumbuhan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi menunjukkan tren yang positif, dimana rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,84 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Selanjutnya, Pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi yang berasal dari DOKA, sejak tahun 2023 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena sejak tahun 2023 sampai dengan 2027 penerimaan Dana Otsus menjadi 1 persen dari DAU nasional, dan pada tahun 2028 tidak terdapat lagi alokasi dana otsus. Terhadap keberlanjutan dana otsus pasca tahun 2027 saat ini masih dalam tahapan kajian serta pembahasan dalam Program Legalisasi Nasional. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 penerimaan dana DOKA tidak dicatatkan lagi pada Bantuan Keuangan, karena sudah masuk dalam komponen pendapatan transfer pusat.

### C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi Hibah, Dana Darurat, dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 mencapai Rp.71.051.737.618,- yang terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya. Realisasi tertinggi terlihat pada tahun 2020 sebesar Rp.36.979.375.000,-, sedangkan pada tahun 2023 realisasinya hanya sebesar Rp.222.000.000,-. Sejak tahun 2023 terjadi penurunan yang sangat drastis, dikarenakan pendapatan hibah yang berasal dari Belanja Hibah BOS tidak lagi dianggarkan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, akan tetapi sudah menjadi komponen Pendapatan



Transfer dari Pusat. Untuk mengetahui perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.227**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	48,188,029,000	36,979,375,000	76.74	211.13
2021	33,781,744,000	24,091,712,000	71.32	-34.85
2022	-	-	-	-100.00
2023	540,000,000	222,000,000	41.11	-
2024	13,346,617,843	9,758,650,618	73.12	4295.79
<b>Total</b>	<b>95,856,390,843</b>	<b>71,051,737,618</b>	<b>74.12</b>	<b>-23.39</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

#### **2.2.1.1.2 Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Aceh yang memberi manfaat jangka pendek, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
3. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran atas beban APBK untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, yang meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Realisasi belanja Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2020 realisasi belanja sebesar Rp.809.115.344.069,- mengalami penurunan pada 2021 dengan realisasi sebesar Rp.776.651.681.455,- pada tahun 2022 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp.825.509.672.418,- pada tahun 2023 realisasi belanja kembali menunjukkan penurunan menjadi Rp.728.461.011.932,- dan pada tahun 2024 kembali mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar Rp.815.786.503.747,-. Secara total selama kurun waktu lima tahun terakhir total belanja Kota Lhokseumawe sebesar Rp.3.955.524.213.747,- dengan capaian rata-rata 92.04 persen dari

total anggaran 4.297.666.068.920,-. Pertumbuhan belanja Kota Lhokseumawe secara umum menunjukkan tren positif, dimana rata-rata pertumbuhan pertahunnya 0,16 persen. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.228**  
**Anggaran dan Realisasi Total Belanja Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	898,210,311,849	809,115,344,069	90.08	-6.41
2021	879,310,221,282	776,651,681,455	88.33	-4.01
2022	874,851,664,000	825,509,672,418	94.36	6.29
2023	798,260,907,647	728,461,011,932	91.26	-11.76
2024	847,032,964,142	815,786,503,747	96.31	11.99
<b>Total</b>	<b>4,297,666,068,920</b>	<b>3,955,524,213,621</b>	<b>92.04</b>	<b>0.16</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Secara lebih rinci anggaran dan realisasi masing-masing komponen belanja daerah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 diuraikan sebagai berikut.

#### A. Belanja Operasi

Belanja operasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja ini mencakup berbagai biaya, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 sebesar Rp.2.763.190.397.447,- atau sebesar 92,22 persen dari total anggaran selama lima tahun sebesar Rp.2.996.189.631.837,-. Lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja operasi selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.229**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	585,941,965,779	519,576,952,633	88.67	-6.12
2021	590,366,995,636	521,495,267,967	88.33	0.37
2022	605,522,237,180	576,374,939,708	95.19	10.52
2023	595,256,623,128	548,509,273,989	92.15	-4.83
2024	619,101,810,114	597,233,963,150	96.47	8.88
<b>Total</b>	<b>2,996,189,631,837</b>	<b>2,763,190,397,447</b>	<b>92.22</b>	<b>2.83</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir realisasi belanja operasi menunjukkan tren yang berfluktuasi. Secara kumulatif realiasi belanja operasi selama lima tahun terakhir berjumlah Rp.2.763.190.397.447,- atau sekitar 92,22 persen dari

target yang dianggarkan sebesar Rp.2.996.189.631.837,-. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp.597.233.963.150,- dan realisasi terendah pada tahun 2020 sebesar Rp.519.576.952.633,-. Pertumbuhan belanja operasi menunjukkan tren yang positif, dimana rata-rata pertumbuhannya mencapai 2,83 persen pertahunnya.

Realisasi belanja sebagaimana tabel di atas merupakan pengeluaran yang dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai Rp.1.529.042.216.350,-; belanja barang dan jasa Rp.924.049.743.166,-; belanja subsidi Rp.1.813.000.000,-; belanja hibah Rp.133.299.070.918,-; dan belanja bantuan sosial Rp.174.986.367.013,-.

Belanja Pegawai merupakan belanja yang berkontribusi paling besar dalam struktur belanja operasi, dimana kontribusinya selama lima tahun terakhir mencapai 55,34 persen, selanjutnya belanja barang dan jasa merupakan kontributor kedua sebesar 33,44 persen, belanja bantuan sosial menjadi penyumbang terbesar ketiga dalam pengeluaran belanja operasi yang mencapai 6,33 persen, selebihnya belanja hibah memberikan kontribusi sebesar 4,82 persen, dan belanja subsidi sebesar 0,07 persen. Untuk mengetahui perkembangan anggaran, realisasi, dan proporsi komponen belanja operasi berdasarkan kelompoknya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.230**  
**Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Operasi**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
<b>A.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
2020	297,130,883,403	283,796,919,084	95.51	
2021	297,039,601,519	283,308,654,473	95.38	
2022	311,129,275,068	304,916,122,038	98.00	
2023	333,590,854,673	316,584,344,048	94.90	
2024	349,697,492,150	340,436,176,707	97.35	
<b>Jumlah</b>	<b>1,588,588,106,813</b>	<b>1,529,042,216,350</b>	<b>96.25</b>	<b>55.34</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>			
2020	260,819,869,876	203,976,543,666	78.21	
2021	216,154,393,150	169,787,596,364	78.55	
2022	199,364,284,562	185,425,254,292	93.01	
2023	198,420,544,061	177,812,072,024	89.61	
2024	198,692,075,561	187,048,276,820	94.14	
<b>Jumlah</b>	<b>1,073,451,167,210</b>	<b>924,049,743,166</b>	<b>86.08</b>	<b>33.44</b>
<b>C.</b>	<b>Belanja Subsidi</b>			
2020	-	-	-	
2021	-	-	-	
2022	200,000,000	200,000,000	100.00	
2023	470,000,000	470,000,000	100.00	
2024	1,143,000,000	1,143,000,000	100.00	
<b>Jumlah</b>	<b>1,813,000,000</b>	<b>1,813,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0.07</b>
<b>D.</b>	<b>Belanja Hibah</b>			
2020	16,885,600,000	7,780,367,500	46.08	
2021	29,932,342,256	26,757,974,805	89.39	

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
2022	40,581,033,585	36,702,542,385	90.44	
2023	29,753,421,564	22,501,686,262	75.63	
2024	40,211,336,349	39,556,499,966	98.37	
<b>Jumlah</b>	<b>157,363,733,754</b>	<b>133,299,070,918</b>	<b>84.71</b>	<b>4.82</b>
<b>E.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2020	11,105,612,500	24,023,122,383	216.32	
2021	47,240,658,711	41,641,042,325	88.15	
2022	54,247,643,965	49,131,020,993	90.57	
2023	33,021,802,830	31,141,171,655	94.30	
2024	29,357,906,054	29,050,009,657	98.95	
<b>Jumlah</b>	<b>174,973,624,060</b>	<b>174,986,367,013</b>	<b>100.01</b>	<b>6.33</b>
<b>Total</b>	<b>2,996,189,631,837</b>	<b>2,763,190,397,447</b>	<b>92.22</b>	

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

### B. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Realisasi belanja modal Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 berjumlah sebesar Rp.619.321.620.440,- atau sebesar 88.52 persen dari anggaran sebesar Rp.699.632.311.703,- dan menunjukkan tren yang fluktuatif. Realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar Rp.177.257.398.327,- dan realisasi terendah tercatat pada tahun 2023 sebesar Rp.60.336.467.761,-. Pertumbuhan belanja modal selama lima tahun terakhir tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 69,52 persen, sedangkan pertumbuhan terkecil tercatat pada tahun 2023 yaitu minus 57,58 persen. Secara umum pertumbuhan belanja modal Kota Lhokseumawe menunjukkan tren yang negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 10,41 persen pertahun. Lebih rinci mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja modal Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.231**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	188,575,091,181	177,257,389,327	94.00	-12.17
2021	168,374,880,958	137,196,135,419	81.48	-22.60
2022	156,583,508,120	142,251,751,256	90.85	3.68
2023	82,331,873,436	60,336,467,761	73.28	-57.58
2024	103,766,958,008	102,279,876,677	98.57	69.52
<b>Total</b>	<b>699,632,311,703</b>	<b>619,321,620,440</b>	<b>88.52</b>	<b>-10.41</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Total belanja modal sebagaimana tabel di atas merupakan belanja yang dipergunakan untuk membiayai Belanja Modal Tanah sebesar Rp.39.532.170.365,- atau sebesar 6,38 persen; Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.109.685.831.454,- atau sebesar 17,71 persen; Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.234.522.844.180,- atau sebesar 37,87 persen; Belanja Modal

Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.214.989.967.104,- atau 34,71 persen; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.20.590.807.337,- atau 3,52 persen. Proporsi belanja modal selama lima tahun terakhir didominasi oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan, proporsi kedua adalah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; selanjutnya proporsi terbesar ketiga adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Untuk lebih jelasnya mengenai anggaran dan realisasi serta proporsi belanja modal menurut kelompoknya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.232**  
**Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Modal**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
<b>A. Belanja Modal Tanah</b>				
2020	18,294,926,262	16,998,498,043	92.91	
2021	9,830,000,000	8,819,863,140	89.72	
2022	15,878,345,366	13,713,809,182	86.37	
2023	523,400,000	-	0.00	
2024	-	-	0.00	
<b>Jumlah</b>	<b>44,526,671,628</b>	<b>39,532,170,365</b>	<b>88.78</b>	<b>6.38</b>
<b>B. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>				
2020	28,689,775,391	26,266,396,053	91.55	
2021	34,262,297,410	27,807,298,336	81.16	
2022	25,853,496,837	21,363,441,916	82.63	
2023	16,744,311,095	15,627,696,279	93.33	
2024	19,024,284,061	18,620,998,870	97.88	
<b>Jumlah</b>	<b>124,574,164,794</b>	<b>109,685,831,454</b>	<b>88.05</b>	<b>17.71</b>
<b>C. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>				
2020	113,727,250,350	109,317,854,810	96.12	
2021	38,017,772,330	34,414,916,470	90.52	
2022	46,887,676,045	40,945,930,770	87.33	
2023	36,586,560,395	21,923,145,455	59.92	
2024	28,186,576,818	27,920,996,675	99.06	
<b>Jumlah</b>	<b>263,405,835,938</b>	<b>234,522,844,180</b>	<b>89.03</b>	<b>37.87</b>
<b>D. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>				
2020	24,011,479,398	20,826,592,200	86.74	
2021	80,807,172,063	62,684,960,792	77.57	
2022	64,087,255,518	62,614,371,138	97.70	
2023	24,463,735,146	18,771,759,227	76.73	
2024	50,812,746,487	50,092,283,747	98.58	
<b>Jumlah</b>	<b>244,182,388,612</b>	<b>214,989,967,104</b>	<b>88.04</b>	<b>34.71</b>
<b>E. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>				
2020	3,851,659,780	3,848,048,221	99.91	
2021	5,457,639,155	3,469,096,681	63.56	
2022	3,876,734,354	3,614,198,250	93.23	
2023	4,013,866,800	4,013,866,800	100.00	
2024	5,743,350,642	5,645,597,385	98.30	
<b>Jumlah</b>	<b>22,943,250,731</b>	<b>20,590,807,337</b>	<b>89.75</b>	<b>3.32</b>
<b>Total</b>	<b>699,632,311,703</b>	<b>619,321,620,440</b>	<b>88.52</b>	

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

### C. Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBK Lhokseumawe untuk keperluan darurat termasuk



keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga Kota Lhokseumawe selama periode 2020 sampai dengan 2024 berjumlah sebesar Rp.16.731.421.007,- atau sebesar 75,53 persen dari anggaran sebesar Rp.22.152.780.291,- dan menunjukkan tren yang negatif. Untuk lebih jelas mengenai perkembangan anggaran dan realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.233**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	13,428,574,123	10,823,441,265	80.60	-
2021	4,500,000,000	3,720,021,430	82.67	-65.63
2022	3,000,000,000	2,134,850,082	71.16	-42.61
2023	52,650,368	52,650,368	100.00	-97.53
2024*)	1,171,555,800	457,862	0.04	-99.13
<b>Total</b>	<b>22,152,780,291</b>	<b>16,731,421,007</b>	<b>75.53</b>	<b>-86.66</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi terbesar Belanja Tak Terduga selama lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2020 yang mencapai Rp.10.823.441.265,-. Tingginya belanja tak terduga pada tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia, tidak terkecuali Lhokseumawe. Belanja tak terduga mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga tahun 2024.

#### **D. Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran Pemerintah Kota Lhokseumawe kepada Pemerintah Desa yang meliputi Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan Partai Politik. Realisasi belanja transfer selama lima tahun terakhir (2020-2024) sebesar Rp.556.280.774.727,- atau 95,96 persen dari anggaran Rp.579.691.345.089,-. Pertumbuhan belanja transfer menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,76 persen per tahun. Perkembangan anggaran dan realisasi belanja transfer Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.234**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	110,264,680,766	101,457,560,844	92.01	-7.00
2021	116,068,344,688	114,240,256,639	98.42	12.60
2022	109,745,918,700	104,748,131,372	95.45	-8.31
2023	120,619,760,715	119,562,619,814	99.12	14.14
2024	122,992,640,220	116,272,2060,058	94.54	-2.75
<b>Jumlah</b>	<b>579,691,345,089</b>	<b>556,280,774,727</b>	<b>95.96</b>	<b>2.76</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Besaran belanja transfer selama lima tahun terakhir sebagaimana tabel di atas merupakan belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp.10.646.011.620,- dengan proporsi sebesar 1,91 persen dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa, dan Partai Politik sebesar Rp.545.634.763.107,- atau dengan proporsi sebesar 98,97 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.235**  
**Anggaran, Realisasi dan Proporsi Kelompok Belanja Transfer Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Proporsi (%)
		Rp.	%	
<b>A.</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>			
2020	6,692,257,785	-	0.00	
2021	3,497,482,335	1,794,068,948	51.30	
2022	3,827,000,000	1,820,631,270	47.57	
2023	3,814,825,000	3,183,566,844	83.45	
2024	10,568,178,720	3,847,744,558	0.00	
<b>Jumlah</b>	<b>28,399,743,840</b>	<b>10,646,011,620</b>	<b>37.49</b>	<b>1.91</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2020	103,572,422,981	101,457,560,844	97.96	
2021	112,570,862,353	112,446,187,691	99.89	
2022	105,918,918,700	102,927,500,102	97.18	
2023	116,804,935,715	116,379,052,970	99.64	
2024*)	112,424,461,500	112,424,461,500	100.00	
<b>Jumlah</b>	<b>551,291,601,249</b>	<b>545,634,763,107</b>	<b>98.97</b>	<b>98.08</b>
<b>Total</b>	<b>579,691,345,089</b>	<b>556,280,774,727</b>	<b>95.96</b>	

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

### 2.2.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Daerah Kota Lhokseumawe meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu (SiLPA), dan Pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal daerah.

Selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 total realisasi pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe mencapai Rp.143.449.534.853,- atau 88,17 persen dari anggaran sebesar Rp.162.698.000.179,-. Realisasi tertinggi pembiayaan daerah tercatat pada tahun 2022 yang mencapai Rp.46.484.611.013,- dan yang terendah tercatat pada tahun 2023 dengan realisasi Rp.9.541.034.674,-. Perkembangan pembiayaan daerah selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.236**  
**Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
2020	15,493,040,419	15,493,040,419	100.00	-40.32
2021	35,901,027,333	35,901,027,333	100.00	131.72
2022	46,484,611,013	46,484,611,013	100.00	29.48
2023	29,789,500,000	9,541,034,674	32.03	-79.47
2024	35,029,821,414	36,029,821,414	102.85	277.63
<b>Jumlah</b>	<b>162,698,000,179</b>	<b>143,449,534,853</b>	<b>88.17</b>	<b>18.39</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Besar kecilnya realisasi pembiayaan daerah sangat tergantung dari besarnya penerimaan pembiayaan yang salah satu komponennya adalah SiLPA. Demikian juga dengan pengeluaran pembiayaan yang sangat tergantung pada besarnya peruntukkan dana untuk penyertaan modal pada BUMD. Gambaran mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Lhoskeumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.237**  
**Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan dan**  
**Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024**

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		Pertumbuhan (%)
		Rp.	%	
<b>A.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
2020	16,993,040,419	16,993,040,419	100.00	-36.97
2021	42,045,667,333	42,045,667,333	100.00	147.43
2022	48,484,611,013	48,484,611,013	100.00	15.31
2023	31,789,500,000	10,541,034,674	33.16	-78.26
2024	37,029,821,414	37,029,821,414	100.00	251.29
<b>Jumlah</b>	<b>176,342,640,179</b>	<b>155,094,174,853</b>	<b>87.95</b>	<b>16.86</b>
<b>B.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
2020	1,500,000,000	1,500,000,000	100.00	50.00
2021	6,144,640,000	6,144,640,000	100.00	309.64
2022	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	-67.45
2023	2,000,000,000	1,000,000,000	50.00	-50.00
2024	2,000,000,000	1,000,000,000	50.00	0.00
<b>Jumlah</b>	<b>13,644,640,000</b>	<b>11,644,640,000</b>	<b>85.34</b>	<b>-7.79</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan Kota Lhokseumawe yang berasal dari SiLPA selama kurun waktu lima tahun terakhir mencapai Rp.155.094.174.853,- atau sebesar 87,95 persen dari anggaran yang ditargetkan. SiLPA tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp.48.484.611.013,-. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Kota Lhokseumawe yang digunakan untuk penyertaan modal pada BUMD mencapai Rp.11.644.640.000,-.

### 2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Berdasarkan Neraca Kota Lhokseumawe diketahui Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,38 persen. Pertumbuhan aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset Lancar mengalami pertumbuhan negatif dengan rata-rata pertumbuhan minus 5,69 persen, sedangkan Aset Tetap mengalami pertumbuhan positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,08 persen, dan Aset Lainnya tumbuh sebesar 6,91 persen per tahunnya.

Selanjutnya pertumbuhan kewajiban keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,39 persen. Sedangkan pertumbuhan ekuitas dana mengalami pertumbuhan minus 1,71 persen. Lebih jelasnya mengenai perkembangan Neraca Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.238**  
**Neraca Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>ASET</b>	<b>1,950,181,640,698.35</b>	<b>2,099,007,467,471.58</b>	<b>2,191,335,492,092.24</b>	<b>2,200,505,853,300.86</b>	<b>2,088,111,046,799.41</b>	<b>1.38</b>
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas di Kas Daerah	40,515,949,305.97	48,189,789,614.01	10,334,150,946.69	33,408,590,754.69	11,629,466,576.93	(22.09)
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	2,650,000.00	42,113.00	-	(100.00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	467,766,572.00	8,265,100.00	26,900.00	567,776,147.00	-	(100.00)
Kas Dana BOS	107,912,255.00	111,660,304.00	4,587,180.00	4,227,000.00	-	(100.00)
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	957,311,927.00	203,621,981.84	204,216,827.68	1,720,331,153.68	540,306,507.68	(10.81)
Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	1,328,854,246.00	441,855,518.53	-
Kas Dana BOSP	-	-	-	-	8,463,206.21	-
Kas Lainnya	12,000,000.00	-	-	58,239,967.00	15,425,504.98	-
Piutang Pajak Daerah	43,523,221,278.01	29,142,995,234.01	27,614,851,292.00	29,821,469,331.00	32,045,380,601.00	(5.94)
Piutang Retribusi Daerah	-	3,790,948,084.00	4,278,923,084.00	4,456,647,851.00	4,886,977,851.00	4.53
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-	-	-	-	-
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	4,693,874,490.00	676,358.48	22,509,388,107.00	2,385,007,000.00	1,422.08
Piutang Transfer Antar Daerah	-	4,859,030,068.00	7,763,074,737.00	7,758,384,383.00	7,983,100,001.00	0.94
Piutang Lainnya	825,681,880.00	1,366,106,463.00	1,366,106,463.00	1,366,106,463.00	959,552,819.00	3.05
Penyisihan Piutang	(23,871,713,859.91)	(25,866,191,511.06)	(24,785,654,357.75)	(27,241,974,117.50)	(29,333,565,008.00)	4.21
Beban Dibayar Dimuka	376,197,464.15	679,552,756.78	376,496,187.83	218,201,653.87	326,371,150.05	(2.80)
Persediaan	27,662,942,754.36	43,228,432,061.00	56,015,157,515.35	43,244,906,326.79	35,681,123,517.41	5.22



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>90,577,269,576.58</b>	<b>110,408,084,645.58</b>	<b>83,175,263,134.28</b>	<b>119,221,191,379.53</b>	<b>67,569,465,245.79</b>	<b>(5.69)</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>						
<b>Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>						
Investasi Non Permanen Lainnya	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	124,500,000.00	-	(100.00)
Investasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen</b>	<b>124,500,000.00</b>	<b>124,500,000.00</b>	<b>124,500,000.00</b>	<b>124,500,000.00</b>	<b>-</b>	<b>(100.00)</b>
<b>Investasi Jangka Panjang Permanen</b>						
Penyertaan Modal	23,191,241,521.00	25,319,255,052.00	24,384,016,280.00	23,846,136,984.00	24,028,185,611.89	0.71
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen</b>	<b>23,191,241,521.00</b>	<b>25,319,255,052.00</b>	<b>24,384,016,280.00</b>	<b>23,846,136,984.00</b>	<b>24,028,185,611.89</b>	<b>0.71</b>
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>23,315,741,521.00</b>	<b>25,443,755,052.00</b>	<b>24,508,516,280.00</b>	<b>23,970,636,984.00</b>	<b>24,028,185,611.89</b>	<b>0.60</b>
<b>ASET TETAP</b>						
Tanah	606,547,036,587.38	654,257,241,344.38	769,004,582,939.24	775,155,473,039.24	808,856,198,039.24	5.93
Peralatan dan Mesin	282,540,868,967.28	304,910,762,771.91	322,182,283,002.91	335,705,052,210.58	350,804,087,896.78	4.42
Gedung dan Bangunan	575,619,755,254.13	656,528,290,480.59	701,845,960,348.09	732,100,853,803.09	738,637,873,700.72	5.11
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1,080,043,453,748.00	1,150,515,572,494.73	1,211,372,189,882.73	1,230,910,841,509.73	1,279,450,481,471.58	3.45
Aset Tetap Lainnya	14,300,667,519.00	15,050,701,194.00	15,458,801,449.00	16,468,602,833.00	16,787,972,393.00	3.26
Konstruksi Dalam Pengerjaan	53,840,245,000.00	18,686,213,050.00	18,686,213,050.00	11,876,358,050.00	9,501,011,442.00	(29.31)
Akumulasi Penyusutan	(816,694,418,525.02)	(877,231,987,755.01)	(997,185,512,556.01)	(1,088,983,491,094.31)	(1,308,426,747,846.54)	9.88
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,796,197,608,550.77</b>	<b>1,922,716,793,580.60</b>	<b>2,041,364,518,115.96</b>	<b>2,013,233,690,351.33</b>	<b>1,895,610,877,096.78</b>	<b>1.08</b>
<b>DANA CADANGAN</b>						

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	-	-	-	-	-	
<b>ASET LAINNYA</b>						
Tagihan Jangka Panjang	-	383,952,673.40	2,788,757,383.00	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	1,239,134,475.00	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	320,133,180.00	3,986,835,091.00	4,161,072,491.00	4,161,072,491.00	3,372,761,000.00	60.15
Aset Lain-lain	38,500,835,770.00	36,809,534,270.00	37,462,517,588.00	37,594,726,995.00	53,769,463,981.00	6.91
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(1,980,622,316.00)	(2,125,152,900.00)	(2,225,079,900.00)	(1,328,789,784.33)	(14.49)
Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	-	-	-	4,549,615,000.00	172,527,000.00	-
Aset DED	1,270,052,100.00	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>40,091,021,050.00</b>	<b>40,438,834,193.40</b>	<b>42,287,194,562.00</b>	<b>44,080,334,586.00</b>	<b>55,985,962,196.67</b>	<b>6.91</b>
<b>PROPERTI INVESTASI</b>						
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	19,838,910,000.00	
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	33,707,599,568.00	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	(8,629,952,919.72)	
<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	-	-	-	-	<b>44,916,556,648.28</b>	
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,950,181,640,698.35</b>	<b>2,099,007,467,471.58</b>	<b>2,191,335,492,092.24</b>	<b>2,200,505,853,300.86</b>	<b>2,088,111,046,799.41</b>	<b>1.38</b>
<b>KEWAJIBAN</b>						
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	15,272,727.00	28,725,987.00	4,597,180.00	4,210,967.00	-	(100.00)
Utang Bunga	-	-	-	-	-	
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-	-	-	-	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
Pendapatan Diterima Dimuka	302,681,843.28	2,144,480,984.84	365,104,768.82	994,895,840.06	249,841,615.39	(11.88)
Utang Belanja	44,584,723,172.23	48,853,240,415.23	39,806,720,922.76	31,526,194,189.23	27,307,315,705.63	(11.81)
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	383,952,673.40	-	14,927,644,376.00	18,143,657,000.00	261.53
Utang Retensi	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>44,902,677,742.51</b>	<b>51,410,400,060.47</b>	<b>40,176,422,871.58</b>	<b>47,452,945,372.29</b>	<b>45,700,814,321.02</b>	<b>4.39</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>						
Utang kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-	-	-	-
Utang kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>44,902,677,742.51</b>	<b>51,410,400,060.47</b>	<b>40,176,422,871.58</b>	<b>47,452,945,372.29</b>	<b>45,700,814,321.02</b>	<b>4.39</b>
<b>EKUITAS</b>						
EKUITAS	1,905,278,962,955.84	2,047,597,067,411.11	2,151,159,069,220.66	2,153,052,907,928.57	2,042,410,232,478.39	(1.71)
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>1,950,181,640,698.35</b>	<b>2,099,007,467,471.58</b>	<b>2,191,335,492,092.24</b>	<b>2,200,505,853,300.86</b>	<b>2,088,111,046,799.41</b>	<b>(1.60)</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap Neraca yang telah diselenggarakan dan disusun. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatannya, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah dan melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Terdapat dua analisis rasio keuangan yang digunakan yaitu:

1. Rasio Likuiditas, digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya. Rasio likuiditas dibagi menjadi dua jenis yaitu rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*);
2. Rasio Solvabilitas, digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio Solvabilitas dibagi menjadi dua yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

**Tabel 2.239**  
**Balance Sheet Ratio Neraca Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Balance Sheet Ratio		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Liquidity Ratio</b>	Current Ratio	2.017	2.148	2.070	2.512	1.479
	Quick Ratio	1.401	1.307	0.676	1.601	0.698
<b>Solvability Ratio</b>	Debt to Assets Ratio	0.023	0.024	0.018	0.022	0.022
	Debt to Equity Ratio	0.024	0.025	0.019	0.022	0.022

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio lancar (*current ratio*) selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan angka di atas 1 atau di atas 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa aktiva lancar (aset lancar) berada di atas hutang lancar, dengan kata lain kemampuan daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya semakin tinggi. Sementara itu *quick ratio* menunjukkan angka di bawah 1, yang berarti kemampuan aktiva lancar belum sepenuhnya mampu menutupi hutang lancar. Selain itu juga, nilai *total debt to total assets ratio* dan *debt to equity ratio* selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung berfluktuatif, namun masih dalam batas aman (*solvable*) dalam artian porsi hutang terhadap aktiva masih kecil. Hal ini mengindikasikan Pemerintah Kota Lhokseumawe mempunyai kemampuan dalam memenuhi segala kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

## **2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe tercermin pada komponen anggaran itu sendiri yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta ketepatan penggunaan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah seperti kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pendapatan agar memperoleh hasil yang optimal, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah, serta menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru.

Selanjutnya, kebijakan belanja daerah diarahkan pada kebutuhan obyektif, efektif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe. Sementara untuk kebijakan pembiayaan dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Hal ini merupakan upaya preventif dalam mensikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

### **2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Anggaran merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang digunakan untuk mendanai semua program dan kegiatan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah harus merencanakan, melaksanakan, mengendalikan seluruh program dan kegiatan sesuai dengan rencana keuangan pemerintah daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota. Diharapkan melalui pengelolaan APBK yang baik dapat menggapai cita-cita dan tujuan pembangunan daerah itu sendiri.

Belanja aparatur menjadi perhatian yang serius dalam pengeluaran anggaran daerah tiap tahunnya. Dominasi belanja pegawai dalam APBK pada setiap tahun anggaran akan mengurangi kesempatan belanja non aparatur yang digunakan semestinya untuk kesejahteraan masyarakat dan penyediaan fasilitas publik.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, rata-rata persentase belanja aparatur terhadap total pengeluaran adalah sebesar 38,54 persen atau sebesar Rp.1.529.042.216.350,- dari total



pengeluaran sebesar Rp.3.967.168.853.621,-. Hal ini menunjukkan bahwa postur belanja Kota Lhokseumawe masih dapat dikatakan ideal karena pemenuhan untuk belanja aparatur masih berada dibawah 50 persen, dengan kata lain postur belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik masih diatas 60 persen. Perkembangan proporsi belanja pemenuhan aparatur tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.240**  
**Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2020-2024**

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
2020	283,796,919,084	810,615,344,069	35.01
2021	283,308,654,473	782,796,321,455	36.19
2022	304,916,122,038	827,509,672,418	36.85
2023	316,584,344,048	729,461,011,932	43.40
2024	340,436,176,707	816,786,503,747	41.68
<b>Total</b>	<b>1,529,042,216,350</b>	<b>3,967,168,853,621</b>	<b>38.54</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

### 2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Salah satu kunci sukses pelaksanaan otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Defisit anggaran merupakan sekian dari permasalahan yang timbul dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Pembiayaan daerah ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh jumlah belanja daerah lebih besar dibanding dengan pendapatan daerah yang diperoleh.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pembiayaan di masa depan dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Dalam hal APBK diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut yang diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

**Tabel 2.241**  
**Surplus/(Defisit) Riil Anggaran dan Penutup Defisit Anggaran**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024**

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan	835,667,970,983	793,150,537,641	789,566,096,080	755,949,798,672	792,391,628,341
	<i>dikurangi realisasi:</i>					
2	Belanja Daerah	809,115,344,069	776,651,681,455	825,509,672,418	728,461,011,932	815,786,503,747
3	Pengeluaran Pembiayaan	1,500,000,000	6,144,640,000	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	<b>Surplus / (Defisit) Riil</b>	<b>25,052,626,914</b>	<b>10,354,216,185</b>	<b>(37,943,576,338)</b>	<b>26,488,786,740</b>	<b>(24,394,875,406)</b>
<b>Penutup Defisit Riil</b>						
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	16,993,040,419	42,045,667,333	48,484,611,013	10,541,034,674	37,029,821,414
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>42,045,667,333</b>	<b>52,399,883,518</b>	<b>10,541,034,674</b>	<b>37,029,821,414</b>	<b>12,634,946,009</b>

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2020-2024 (Audited)

Tabel di atas menggambarkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir, Kota Lhokseumawe mengalami surplus riil anggaran pada tahun 2020, 2021, dan 2023, sedangkan tahun 2022 dan 2024 mengalami defisit riil anggaran sebesar Rp.37.943.576.338,- dan Rp.24.394.875.406,-. Defisit yang terjadi pada tahun 2022 dan 2024 karena tingginya belanja dan pengeluaran daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Untuk menutupi defisit riil dalam APBK diperoleh dari sumber penerimaan pembiayaan terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dapat bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

### 2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan gambaran umum terhadap kondisi keuangan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut secara terstruktur akan menggambarkan komponen APBK yang meliputi: 1) Pendapatan; 2) Belanja; dan 3) Pembiayaan. Dalam menganalisis kerangka pendanaan tersebut terlebih dahulu harus memahami jenis objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBK. Selain itu juga diperlukan data perkembangan realisasi anggaran dan neraca daerah yang digunakan sebagai acuan dalam memproyeksikan kerangka pendanaan APBK selama 5 (lima) tahun mendatang dalam periode 2026-2030, kemudian dapat diproyeksikan yang disesuaikan dengan tren dan perkembangan serta asumsi dalam setiap komponen APBK.

#### 2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

##### 2.2.3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Kota Lhokseumawe untuk kurun waktu lima tahun mendatang (2026-2030) diproyeksikan akan mengalami fluktuasi.

Proyeksi peningkatan pendapatan bersumber dari PAD yaitu dari Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, serta dari Transfer Pemerintah Pusat yang berasal dari Dana Alokasi Umum.

Pada tahun 2026 pendapatan Kota Lhokseumawe diproyeksikan sebesar Rp.817.489.376.141,- yang berasal dari PAD sebesar Rp.80.802.475.448,-; Pendapatan Transfer Pusat sebesar Rp.690.777.280.000,-; Pendapatan Transfer antar Daerah sebesar Rp.31.895.671.958,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp.14.013.948.735,-.

Demikian juga dengan tahun 2027 pendapatan Kota Lhokseumawe diproyeksikan meningkat menjadi Rp.821.569.507.421,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.84.182.348.797,-; Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.690.777.280.000,-; Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp.30.298.976.958,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.16.310.901.666,-. Namun tahun 2028 hingga tahun 2030 pendapatan Kota Lhokseumawe diproyeksi akan mengalami penurunan terutama disebabkan oleh sudah tidak adanya penerimaan dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2026 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa alokasi dana otsus diberikan selama 20 tahun (hingga tahun 2027).

Dalam rangka mengantisipasi penurunan pendapatan sehubungan dengan berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Upaya digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memperluas akses pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Disamping itu upaya optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akselerasi pendapatan daerah selama lima tahun mendatang. Selanjutnya optimalisasi pendapatan dari Ziswaf juga diharapkan dapat menjadi salah satu penopang pendapatan daerah selama lima tahun mendatang. Penghimpunan dan pendistribusian dana Ziswaf diharapkan dapat menggerakkan sektor riil. Meskipun secara pemanfaatan dana zakat memiliki skema khusus yang diperuntukkan berdasarkan senifnya, namun pendistribusiannya diharapkan dapat memberikan dampak bagi penurunan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan pengumpulan dana ziswa antara lain: pemanfaatan teknologi digital, edukasi dan sosialisasi, kemitraan dengan dunia usaha, serta penguatan regulasi dan kebijakan. Untuk mengetahui proyeksi pendapatan Kota Lhokseumawe lima tahun kedepan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.242**  
**Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>792,391,628,341</b>	<b>817,489,376,141</b>	<b>821,569,507,421</b>	<b>791,016,858,681</b>	<b>795,109,925,177</b>	<b>797,970,786,046</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>64,522,601,603</b>	<b>80,802,475,448</b>	<b>84,182,348,797</b>	<b>87,852,498,040</b>	<b>91,780,824,430</b>	<b>94,475,297,791</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	41,649,012,954	55,589,193,344	59,981,678,354	63,599,849,065	67,283,397,604	69,301,899,532
4.1.2.	Retribusi Daerah	2,694,118,337	3,566,500,000	3,596,500,000	3,626,500,000	3,656,500,000	3,693,065,000
4.1.3.	HPKD Yang Dipisahkan	9,296,221,048	10,564,196,625	10,048,538,124	10,858,647,667	11,284,580,947	11,730,627,252
4.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	10,883,249,264	11,082,585,479	10,555,632,319	9,767,501,308	9,556,345,879	9,749,706,007
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>718,110,376,120</b>	<b>722,672,951,958</b>	<b>721,076,256,958</b>	<b>686,690,349,958</b>	<b>686,690,349,958</b>	<b>686,690,349,958</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>682,200,349,381</b>	<b>690,777,280,000</b>	<b>690,777,280,000</b>	<b>656,391,373,000</b>	<b>656,391,373,000</b>	<b>656,391,373,000</b>
	<i>Dana Otonomi Khusus Aceh</i>	<i>32,536,146,822</i>	<i>34,385,907,000</i>	<i>34,385,907,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Dana Desa</i>	<i>62,402,165,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>
	<i>Insentif Fiskal Untuk Kinerja</i>	<i>5,485,809,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>
	<i>Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat</i>	<i>23,974,451,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>461,173,597,656</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>20,389,645,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>76,238,534,903</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>
<b>4.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>35,910,026,739</b>	<b>31,895,671,958</b>	<b>30,298,976,958</b>	<b>30,298,976,958</b>	<b>30,298,976,958</b>	<b>30,298,976,958</b>
	<i>Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	<i>35,910,026,739</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>
	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	<i>-</i>	<i>1,596,695,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>4.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>9,758,650,618</b>	<b>14,013,948,735</b>	<b>16,310,901,666</b>	<b>16,474,010,683</b>	<b>16,638,750,789</b>	<b>16,805,138,297</b>
4.3.2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9,758,650,618	14,013,948,735	16,310,901,666	16,474,010,683	16,638,750,789	16,805,138,297
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>792,391,628,341</b>	<b>817,489,376,141</b>	<b>821,569,507,421</b>	<b>791,016,858,681</b>	<b>795,109,925,177</b>	<b>797,970,786,046</b>

Sumber: \*) LRA 2024 Audited, Proyeksi BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

### 2.2.3.1.2 Belanja

Seiring dengan proyeksi pendapatan yang mengalami fluktuasi selama kurun waktu lima tahun mendatang, proyeksi belanja Kota Lhokseumawe juga diproyeksi mengalami fluktuasi hingga lima tahun mendatang. Pada tahun 2026 belanja Kota Lhokseumawe diproyeksikan mencapai Rp.816.489.376.141,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.619.238.614.223,- yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai Rp.413.636.835.788,- Belanja Barang dan Jasa Rp.180.399.431.564,-, Belanja Subsidi sebesar Rp.1.000.050.000,-, Belanja Hibah sebesar Rp.11.498.765.637,- dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.12.703.531.234,-. Selanjutnya Belanja Modal sebesar Rp.78.636.668.918,- yang dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.7.687.560.918,-, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp.24.839.584.283,-, Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp.43.068.298.167,-, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.3.041.225.550,-. Kemudian untuk Belanja Tak Terduga sebesar Rp.3.435.485.200,-, serta untuk Belanja Transfer sebesar Rp.115.178.607.750,- yang dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.5.432.286.550,- dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp.109.746.321.200,-. Hingga akhir 2030 belanja Kota Lhokseumawe diproyeksikan mencapai Rp.796.970.786.046,-.

Belanja Kota Lhokseumawe selama kurun waktu lima tahun mendatang yang berasal dari berbagai sumber dana ditujukan untuk membiayai program pembangunan Kota Lhokseumawe, baik itu untuk pemenuhan *mandatory spending* yang ditentukan oleh pemerintah, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Aceh.

Disamping itu terhadap penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa melalui pembangunan dan peningkatan kualitas hidup, dengan fokus utama pada pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, penanganan stunting, serta transformasi menuju desa digital dan adaptif perubahan iklim. Dana Desa yang bersumber dari APBN disalurkan ke desa-desa melalui pemerintah daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis. Penggunaan dana diatur dalam peraturan seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Desa (Permendes). Adapun tujuan utama Kebijakan Dana Desa, yaitu:

- Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin ekstrem yang masih membutuhkan bantuan ekonomi.
- Ketahanan Pangan: Mendukung peningkatan produksi pangan lokal, pengolahan hasil pertanian, dan pendistribusian pangan untuk kemandirian desa.
- Penanganan Stunting: Meningkatkan penyediaan layanan dasar kesehatan di tingkat desa, termasuk penanganan stunting.
- Penguatan Desa Digital dan Adaptif Perubahan Iklim: Memanfaatkan teknologi informasi untuk percepatan pembangunan desa digital dan memperkuat desa dalam menghadapi perubahan iklim.



- Pengembangan Potensi dan Pembangunan Desa: Mendukung pengembangan potensi desa dan program prioritas lainnya, serta pembangunan infrastruktur yang padat karya tunai dengan memanfaatkan bahan baku lokal.

Untuk mengetahui proyeksi belanja Kota Lhokseumawe selama kurun waktu tahun 2026 hingga 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.243**  
**Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>815,786,503,747</b>	<b>816,489,376,141</b>	<b>820,569,507,421</b>	<b>790,016,858,680</b>	<b>794,109,925,177</b>	<b>796,970,786,046</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>597,233,963,150</b>	<b>619,238,614,223</b>	<b>587,352,157,766</b>	<b>570,437,527,993</b>	<b>568,339,552,018</b>	<b>574,210,332,749</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	340,436,176,707	413,636,835,788	365,812,522,289	366,747,536,043	367,685,607,758	368,626,746,969
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	187,048,276,820	180,399,431,564	196,439,461,892	186,543,546,160	184,435,203,986	186,956,037,712
5.1.4.	Belanja Subsidi	1,143,000,000	1,000,050,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
5.1.5.	Belanja Hibah	39,556,499,966	11,498,765,637	7,617,968,247	5,567,210,095	6,857,787,828	8,218,863,368
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	29,050,009,657	12,703,531,234	16,482,205,338	10,579,235,695	8,360,952,445	9,408,684,700
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>102,279,876,677</b>	<b>78,636,668,918</b>	<b>119,392,281,897</b>	<b>105,593,289,944</b>	<b>111,623,129,433</b>	<b>108,451,776,258</b>
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,620,998,870	7,687,560,918	21,736,470,736	18,862,769,803	19,961,433,758	19,019,065,187
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,920,996,675	24,839,584,283	32,592,447,451	28,282,388,789	30,430,329,078	29,516,743,721
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,092,283,747	43,068,298,167	58,473,203,687	52,122,863,870	54,876,185,737	54,543,313,536
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,645,597,385	3,041,225,550	6,590,160,023	6,325,267,482	6,355,180,860	5,372,653,813
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>457,862</b>	<b>3,435,485,250</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	457,862	3,435,485,250	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>116,272,206,058</b>	<b>115,178,607,750</b>	<b>113,325,067,758</b>	<b>113,486,040,743</b>	<b>113,647,243,726</b>	<b>113,808,677,039</b>
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	3,847,744,558	5,432,286,550	3,863,150,927	3,870,877,229	3,878,618,984	3,886,376,221
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	112,424,461,500	109,746,321,200	109,461,916,830	109,615,163,514	109,768,624,743	109,922,300,818
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>815,786,503,747</b>	<b>816,489,376,141</b>	<b>820,569,507,421</b>	<b>790,016,858,680</b>	<b>794,109,925,177</b>	<b>796,970,786,046</b>

Sumber: \*) LRA 2024 Audited, Proyeksi BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

#### **2.2.3.1.3 Pembiayaan**

Pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe untuk lima tahun mendatang (2026-2030) akan lebih kecil jika dibandingkan dengan capaian realisasi lima tahun sebelumnya. Dalam rangka memperkecil terjadinya SiLPA dapat dilakukan melalui optimalisasi belanja oleh perangkat daerah. Untuk lima tahun mendatang, dari sisi penerimaan pembiayaan belum diproyeksikan, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan untuk penyertaan modal hanya diproyeksikan sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap tahunnya. Untuk mengetahui gambaran proyeksi pembiayaan daerah dari tahun 2026 hingga 2030 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.244**  
**Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2026-2030**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>36,029,821,414</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>37,029,821,414</b>	-	-	-	-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37,029,821,414	-	-	-	-	-
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
6.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>12,634,946,009</b>	-	-	-	-	-

Sumber: \*) LRA 2024 Audited, Proyeksi BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

#### **2.2.3.2 Proyeksi Kerangka Pendanaan**

Proyeksi kerangka pendanaan bertujuan untuk melihat kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan untuk lima tahun mendatang (2026-2030) sebagaimana tabel berikut.



**Tabel 2.245**  
**Proyeksi Kerangka Pendanaan/Struktur APBK Lhokseumawe Tahun 2026-2030**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>792,391,628,341</b>	<b>817,489,376,141</b>	<b>821,569,507,421</b>	<b>791,016,858,681</b>	<b>795,109,925,177</b>	<b>797,970,786,046</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>64,522,601,603</b>	<b>80,802,475,448</b>	<b>84,182,348,797</b>	<b>87,852,498,040</b>	<b>91,780,824,430</b>	<b>94,475,297,791</b>
4.1.1.	Pajak Daerah	41,649,012,954	55,589,193,344	59,981,678,354	63,599,849,065	67,283,397,604	69,301,899,532
4.1.2.	Retribusi Daerah	2,694,118,337	3,566,500,000	3,596,500,000	3,626,500,000	3,656,500,000	3,693,065,000
4.1.3.	HPKD Yang Dipisahkan	9,296,221,048	10,564,196,625	10,048,538,124	10,858,647,667	11,284,580,947	11,730,627,252
4.1.4.	Lain-Lain PAD Yang Sah	10,883,249,264	11,082,585,479	10,555,632,319	9,767,501,308	9,556,345,879	9,749,706,007
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>718,110,376,120</b>	<b>722,672,951,958</b>	<b>721,076,256,958</b>	<b>686,690,349,958</b>	<b>686,690,349,958</b>	<b>686,690,349,958</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>682,200,349,381</b>	<b>690,777,280,000</b>	<b>690,777,280,000</b>	<b>656,391,373,000</b>	<b>656,391,373,000</b>	<b>656,391,373,000</b>
	<i>Dana Otonomi Khusus Aceh</i>	<i>32,536,146,822</i>	<i>34,385,907,000</i>	<i>34,385,907,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Dana Desa</i>	<i>62,402,165,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>	<i>60,814,139,000</i>
	<i>Insentif Fiskal Untuk Kinerja</i>	<i>5,485,809,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>	<i>7,385,226,000</i>
	<i>Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat</i>	<i>23,974,451,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>	<i>20,977,415,000</i>
	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>461,173,597,656</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>	<i>463,323,358,000</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>20,389,645,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>	<i>6,934,508,000</i>
	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>76,238,534,903</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>	<i>96,956,727,000</i>
<b>4.2.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>35,910,026,739</b>	<b>31,895,671,958</b>	<b>30,298,976,958</b>	<b>30,298,976,958</b>	<b>30,298,976,958</b>	<b>30,298,976,958</b>
	<i>Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</i>	<i>35,910,026,739</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>	<i>30,298,976,958</i>
	<i>Bantuan Keuangan dari Provinsi</i>	<i>-</i>	<i>1,596,695,000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>4.3.</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>9,758,650,618</b>	<b>14,013,948,735</b>	<b>16,310,901,666</b>	<b>16,474,010,683</b>	<b>16,638,750,789</b>	<b>16,805,138,297</b>
4.3.2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9,758,650,618	14,013,948,735	16,310,901,666	16,474,010,683	16,638,750,789	16,805,138,297
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>792,391,628,341</b>	<b>817,489,376,141</b>	<b>821,569,507,421</b>	<b>791,016,858,681</b>	<b>795,109,925,177</b>	<b>797,970,786,046</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>815,786,503,747</b>	<b>816,489,376,141</b>	<b>820,569,507,421</b>	<b>790,016,858,680</b>	<b>794,109,925,177</b>	<b>796,970,786,046</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>597,233,963,150</b>	<b>619,238,614,223</b>	<b>587,352,157,766</b>	<b>570,437,527,993</b>	<b>568,339,552,018</b>	<b>574,210,332,749</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	340,436,176,707	413,636,835,788	365,812,522,289	366,747,536,043	367,685,607,758	368,626,746,969
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	187,048,276,820	180,399,431,564	196,439,461,892	186,543,546,160	184,435,203,986	186,956,037,712
5.1.4.	Belanja Subsidi	1,143,000,000	1,000,050,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
5.1.5.	Belanja Hibah	39,556,499,966	11,498,765,637	7,617,968,247	5,567,210,095	6,857,787,828	8,218,863,368
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	29,050,009,657	12,703,531,234	16,482,205,338	10,579,235,695	8,360,952,445	9,408,684,700
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>102,279,876,677</b>	<b>78,636,668,918</b>	<b>119,392,281,897</b>	<b>105,593,289,944</b>	<b>111,623,129,433</b>	<b>108,451,776,258</b>
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,620,998,870	7,687,560,918	21,736,470,736	18,862,769,803	19,961,433,758	19,019,065,187
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,920,996,675	24,839,584,283	32,592,447,451	28,282,388,789	30,430,329,078	29,516,743,721
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,092,283,747	43,068,298,167	58,473,203,687	52,122,863,870	54,876,185,737	54,543,313,536
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,645,597,385	3,041,225,550	6,590,160,023	6,325,267,482	6,355,180,860	5,372,653,813
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>457,862</b>	<b>3,435,485,250</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	457,862	3,435,485,250	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>116,272,206,058</b>	<b>115,178,607,750</b>	<b>113,325,067,758</b>	<b>113,486,040,743</b>	<b>113,647,243,726</b>	<b>113,808,677,039</b>
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	3,847,744,558	5,432,286,550	3,863,150,927	3,870,877,229	3,878,618,984	3,886,376,221
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	112,424,461,500	109,746,321,200	109,461,916,830	109,615,163,514	109,768,624,743	109,922,300,818
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>815,786,503,747</b>	<b>816,489,376,141</b>	<b>820,569,507,421</b>	<b>790,016,858,680</b>	<b>794,109,925,177</b>	<b>796,970,786,046</b>
	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(23,394,875,406)</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>36,029,821,414</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>	<b>(1,000,000,000)</b>
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>37,029,821,414</b>	-	-	-	-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	37,029,821,414	-	-	-	-	-
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>1,000,000,000</b>
6.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	<b>12,634,946,009</b>	-	-	-	-	-

Sumber: \*) LRA 2024 Audited, Proyeksi BPKD Kota Lhokseumawe, 2025

### **2.3 Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kota Lhokseumawe**

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk menyesuaikan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan daerah, yang bersumber dari analisis data *existing condition* dan telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional. Analisis isu-isu strategis juga merupakan salah satu bagian terpenting dari dokumen RPJMK karena menjadi pijakan dalam perumusan program prioritas.

#### **2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Pembangunan di Kota Lhokseumawe masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan, diantaranya :

##### **2.3.1.1 Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh**

###### **1) Fokus Seni Budaya**

Kota Lhokseumawe memiliki 22 situs cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) kecamatan) situs cagar budaya tersebut terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda, namun keseluruhan situs cagar budaya di Kota Lhokseumawe belum terlegalisasi secara hukum atau belum ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Pengelolaan dan promosi terhadap situs dan cagar budaya yang masih belum optimal.

###### **2) Pelaksanaan Syariat Islam**

Pelaksanaan syariat islam diukur dengan survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS). IPS Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 80,65 dan ditahun 2024 sebesar 83,91 namun masih dibawah provinsi aceh sebesar 84,19. Dari peningkatan IPS Kota Lhokseumawe masih ada yang menjadi perhatian, dari tujuh dimensi IPS dimensi Melek Al Quran dan Melek Akhlak mengalami penurunan.

##### **2.3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional**

1) Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe yang masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi aceh dan nasional. Pada Tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe berada pada angka 4,46 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi aceh sebesar 4,66 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03 persen. Terdapat ketergantungan pada belanja transfer dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang rendah. Agar diversifikasi sumber pendapatan daerah. Perluasan akses pasar, pembiayaan, dan teknologi digital bagi UMKM, petani, dan nelayan untuk meningkatkan nilai tambah

2) Rasio pajak terhadap PDRB Kota Lhokseumawe masih sangat minim, pada tahun 2020 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 1,18 persen. Pada Tahun 2023 Persentase ini sedikit mengalami

penurunan menjadi 0,71 persen dan naik pada tahun 2024 sebesar 0,73. Meskipun terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya namun Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak dan mencari potensi pendapatan lainnya termasuk dari pajak dan retribusi.

3) Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 4,46 persen, sedangkan Aceh sebesar 4,66 persen dan nasional sebesar 5,03 persen.

4) Laju Inflasi

Inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 2.79% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 2.17% inflasi nasional yaitu sebesar 1.57%. Penyumbang inflasi terbesar adalah Makanan, Minuman dan Tembakau yaitu sebesar 5.28% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yaitu sebesar -0.71

5) PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita Kota Lhokseumawe masih berada di rata-rata nasional. Hal ini dapat ditandai pada tahun 2024 PDRB Per Kapita Lhokseumawe sebesar 59,12 juta rupiah, relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita Aceh sebesar 43,78 juta rupiah, namun masih berada di bawah PDRB Per Kapita Nasional sebesar 78,62 juta rupiah.

6) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada tahun 2020, TPT di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 11.99% kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 8.47% pada tahun 2024, Namun TPT Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Provinsi aceh sebesar 5,75 persen dan TPT Nasiona; 4,91 persen. terutama di kalangan pemuda. Masih ada ketimpangan IPM antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang disarankan antara lain: (1) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja; (2) Peningkatan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang merata.

7) Indeks Gini

Masih terjadinya ketimpangan pendapatan, hal ini ditandai pada tahun 2021 Indeks Gini Kota Lhokseumawe sebesar 0,296 mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi 0,348, lebih tinggi dari Indeks Gini Aceh 0,291. Pada tahun 2023 Indeks Gini Kota Lhokseumawe kembali mengalami penurunan menjadi 0,293, relatif lebih baik dari Indeks Gini Aceh sebesar 0,296 dan Nasional sebesar 0,388.



- 8) Kontribusi dan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih berfluktuasi. Hal ini ditandai pada tahun 2022 sebesar 19,48 persen, mengalami penurunan menjadi 18,12 persen pada tahun 2023 dan kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 16,70 persen.
- 9) Angka Kemiskinan  
Di Kota Lhokseumawe angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 10,73 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 23.100 jiwa. Angka kemiskinan Kota Lhokseumawe tahun 2023 relatif lebih baik dibandingkan angka kemiskinan Aceh sebesar 14,45 persen, namun masih berada di atas angka nasional sebesar 9,36 persen. Dari sisi kemiskinan ekstrem, pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrem di Kota Lhokseumawe sebesar 1,06 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2.250 jiwa. Kemudian Angka Kemiskinan Kota Lhokseumawe tahun 2024 kembali turun menjadi 10,44 persen masih lebih baik dibandingkan angka kemiskinan aceh sebesar 14,23 persen namun masih diatas angka kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen.
- 10) Pengangguran terbuka merupakan permasalahan nasional, Provinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe. Di Kota Lhokseumawe terbuka di Kota Lhokseumawe masih tinggi di bandingkan dengan pengangguran terbuka provinsi dan nasional. Pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 sebesar 8,78 persen, sedangkan pengangguran terbuka aceh sebesar 5,75 persen dan pengangguran terbuka nasional sebesar 4,91 persen.
- 11) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 7.08 persen berada dibawah Aceh sebesar 8.58 dan Nasional sebesar 8.34 dan pada tahun 2024 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 7.86 persen dan masih di bawah Aceh yang sebesar 9.10 persen dan Nasional sebesar 8.27 persen.
- 12) Ekspor Barang dan Jasa  
Nilai Ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe periode 2020-2023 mengalami tren positif walaupun peningkatan tidak signifikan. Pada tahun 2020 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe sebesar (546,92) juta rupiah atau sebesar (-7,83)% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 105,85 juta rupiah atau 1,35% namun pada tahun 2024 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 34,51 juta rupiah atau 0,42%.
- 13) Kunjungan Wisata  
Kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari tahun 2023. Pada Tahun 2024 jumlah kunjungan wisata sebesar 309.092 turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 321.499. Perlu upaya pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dengan meningkatkan objek wisatawan.

- 14) **Perdagangan**  
Ekspor bersih perdagangan Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2022 belum menunjukkan perbaikan, namun di tahun 2023 naik sebesar 1,35 persen namun di tahun 2024 turun kembali menjadi 0,42 persen.
- 15) **Pendapatan sektor perdagangan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 12.16% dari tahun lalu dengan nilai penurunan sebesar Rp 165.762.023. Penurunan terbesar dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan penurunan sebesar 23.13% dan retribusi pelayanan pasar sebesar 6.49%, dilanjutkan retribusi pelayanan tera/tera ulang dengan penurunan mencapai 100%. Penurunan jumlah retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp 7.750.000 atau sebesar 13.41%.**
- 16) **Perindustrian**  
Cakupan Bina Kelompok pengrajin mengalami peningkatan dari tahun 2020-2023 terakhir sebesar 40,18 persen namun pada tahun 2024 turun menjadi 33,94 persen.
- 17) **Kelautan dan Perikanan**  
Produksi perikanan tangkap dan budidaya untuk Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan mulai tahun 2020-2022 terakhir sebesar 20.917 ton namun terjadi penurunan pada tahun 2023 sebesar 15.114 ton dan kembali turun sebesar 14.974 ton.
- 18) **Rasio PDRB Industri Pengolahan**  
Pada kurun waktu 2020-2024 Kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 sebesar 19,48 persen namun terus menurun pada tahun 2023 sebesar 18,12 persen dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 16,70 persen.
- 19) **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan setiap tahunnya, tahun 2024 sebesar 64,61, namun kenaikan TPAK Kota Lhokseumawe masih lebih rendah dari Aceh sebesar 65,11 dan Nasional 70,63. Rendahnya TPAK Lhokseumawe dibandingkan dengan Aceh dan Nasional disebabkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dimana ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran sehingga mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan.
- 20) **Jumlah koperasi yang aktif di Kota Lhokseumawe selama tahun 2020-2023 menunjukkan nilai yang meningkat. Dari 106 unit koperasi aktif di tahun 2020, turun menjadi 181 unit koperasi aktif pada tahun 2023. Tahun 2024 jumlah koperasi aktif menurun menjadi 130 unit koperasi. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.**

- 21) Dalam pencapaian pengajuan perizinan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 92,11 persen dari 99,22 persen di tahun 2023. Untuk capaian aduan yang masuk dan terselesaikan sebesar 18 persen di tahun 2024 dari 22 persen di tahun 2023. Dan untuk capaian jumlah target ijin survey juga menurun di tahun 2024 sebesar 60 persen dari tahun 2023 sebesar 105,79 persen.

### **2.3.1.3 Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal**

- 1) Angka Literasi/Numerasi  
Untuk kompetensi literasi dan numerasi SMP Kota Lhokseumawe masing-masing masih berada di bawah nasional. Untuk rerata literasi SMP di Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 63,13 masih dibawah rerata literasi nasional sebesar 68,27 dan rerata numerasi SMP di Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 58,86 juga masih dibawah rerata numerasi nasional sebesar 65,00.
- 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  
Pada tahun 2024 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 58,41 dalam kategori sedang. Selama 3 (tiga) tahun terakhir IPLM Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan. Kota Lhokseumawe berada pada posisi 5 dalam pencapaian IPLM di Aceh setelah Kota Sabang sebesar 74.66, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 72,17; Kabupaten Aceh Besar sebesar 71,20 dan Kota Banda Aceh sebesar 69.96.
- 3) Angka Partisipasi Murni (APM)  
APM Kota Lhokseumawe untuk tahun 2024 tingkat SMP/MTsN mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 89,43 persen menjadi sebesar 86,46 persen di tahun 2024. Kemudian APM SMA juga mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 82,44 persen menjadi 74,08 persen.
- 4) Indeks Keluarga Sehat  
Capaian IKS Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2023 mengalami kenaikan walaupun masih dalam kategori keluarga tidak sehat karena lebih kecil dari 0,500, namun pada Tahun 2023 IKS Kota Lhokseumawe sebesar 0,367 masih lebih baik dari IKS Provinsi Aceh sebesar 0,326 dan IKS Nasional sebesar 0,255. Walaupun demikian IKS Kota Lhokseumawe harus ditingkatkan sehingga bisa melebihi standar IKS yaitu 0,500 untuk membentuk keluarga Sehat di Kota Lhokseumawe.
- 5) Jumlah Penduduk dan Kepadatan penduduk  
Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sebanyak 196.067 jiwa menjadi 198.705 jiwa di tahun 2024. Penambahan jumlah penduduk ini diiringi dengan kepadatan penduduk akan menjadikan permasalahan bila peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, akibat peningkatan jumlah penduduk akan

terkait dengan permasalahan lingkungan seperti kurang lahan, polusi krisis air bersih, terkait dengan masalah sosial yaitu kemiskinan, pengangguran serta masalah ekonomi seperti meningkatnya kebutuhan pangan dan layanan publik.

6) Prevelensi Stunting

Prevalensi stunting yang baik atau ideal menurut WHO adalah kurang dari 20%. Jika prevalensi stunting di suatu wilayah kurang dari 20%, maka wilayah tersebut dianggap memiliki kondisi stunting yang rendah. Kota Lhokseumawe Tahun 2023 prevelensi balita stunting sebesar 20,78 persen, masuk dalam kategori sedang, namun dibandingkan dengan provinsi aceh sebesar 29,40 persen dan Nasional 21,50 persen, Kota Lhokseumawe masih lebih baik, namun nilai prevelensi stunting harus terus diturunkan mencapai kurang dari 20% untuk mencapai nilai prevelensi stunting yang baik dan ideal.

7) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 96.67% atau 182.427 peserta dari jumlah penduduk 188.713 jiwa. Dan terus menurun dari tahun 2023 dan pada tahun 2024 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menurun menjadi 93.28% atau 185.364 peserta dari 198.705 jiwa penduduk.

8) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan kurun waktu 2020-2023, namun pada tahun 2024 angka kematian balita meningkat tajam menjadi 8,6 per 1000 kelahiran hidup atau sebanyak 31 kematian balita dari 3.576 jumlah kelahiran.

9) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2020 terdapat 10 rumah sakit AD/swasta. Kemudian sampai dengan tahun 2024, jumlah rumah sakit tetap, dan rasio rumah sakit di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sebesar 0.053 kemudian tahun 2024 sebesar 0,050 hanya di pengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit.

10) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024. Pada tahun 2020, rasio dokter sebesar 0.38 yang artinya terdapat satu dokter di setiap 1.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 0.35 di tahun 2021. Dan tahun 2023 meningkat menjadi 0.43. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0.40 dikarenakan ada dokter yang sedang tugas belajar dan beralih ke jabatan struktural. Dari data di atas dapat terlihat bahwa Kota Lhokseumawe masih kekurangan Dokter, dimana dalam 1.000 terdapat 0.40 dokter tidak sampai 1 orang dokter.

11) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Rasio tenaga kesehatan menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022, dan mengalami kenaikan di tahun 2024 sebesar 3,12 persen dan kemudian di tahun 2024 turun kembali menjadi 3,10 persen.

12) Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk.

Jumlah kasus AFP non polio di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 terdapat 1 orang penderita. Kemudian pada tahun 2021 terjadi kenaikan kasus menjadi 4 orang. Pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2020-2023, rate-nya berada pada rentang 0-9,03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 9.03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non polio AFP Rate adalah minimal 3. Kemudian tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sebanyak 4 orang, sehingga rate non polio AFP menjadi 7,47 per 100.000 penduduk. Tahun 2024 menurun menjadi 3.42 per 100.000 penduduk. Peningkatan non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

13) Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pada kurun waktu 2020-2024, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan dari angka 0.04% di tahun 2020 hingga 12.5% di tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani yaitu sebesar 22 anak dari 1 anak pada tahun 2020. Pada tahun 2022 mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani yaitu menjadi 16 anak. Dan tahun 2024 kembali terjadi peningkatan penderita balita pneumonia yang ditangani menjadi 122 anak. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening ke wilayah, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani.

14) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 51.03% dari tahun 2020 sebesar 95.2%, dan meningkat



pada tahun 2022 menjadi 83.05%. Penurunan angka cakupan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2022-2024 meningkat menjadi 83.05% dan 145.4%.

- 15) Tingkat Kematian Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)  
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena tuberkulosis bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2020 tingkat kematian karena tuberkulosis sebesar 0.52 dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 1 orang. Tingkat kematian tertinggi karena tuberkulosis terjadi tahun 2024 sebesar 9.05 artinya terdapat 18 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk.
- 16) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi  
Jumlah pasien HIV AIDS di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 0.001%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu mencapai 0,013% dengan jumlah pasien HIV AIDS mencapai 27 orang.
- 17) Cakupan Kunjungan Bayi  
Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2020 sebesar 57.46%, selanjutnya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 dan naik kembali ditahun 2022-2023 menjadi 56,99 persen dan 66,17 persen dan kemudia turun kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 59,06 persen.
- 18) Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kembali. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Lhokseumawe.
- 19) Cakupan Pelayanan Nifas  
Cakupan pelayanan nifas tahun 2020-2024 di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, yaitu dari 90.1% menjadi 97.5%. Peningkatan terjadi seiring dengan meningkatnya pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya tahun 2022-2024 cakupan pelayanan nifas mengalami penurunan menjadi 80.30 di tahun 2024. Pelayanan ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

20) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 58.5%. Pada tahun 2021, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 48.6%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data diatas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2022, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 44.6% dan pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 100% artinya semua neonates dengan komplikasi berhasil ditangani. Pada tahun 2024 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 19.02%.

21) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2020-2024 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu 87.23%. Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2024 yaitu 72.57%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan dari 85,3%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2022, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan penurunan kembali menjadi 81.0%, dan tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 84.16%, namun tahun 2024 menurun menjadi 72.57%.

22) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum ada yang mencapai 100%. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2024 artinya kinerja Pemerintah

Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.

23) Indeks Pembangunan Keluarga (iBAngga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 66,26 menjadi 65,85 di tahun 2024. Indeks iBangga Kota Lhokseumawe belum mencapai nilai ideal yaitu sebesar 70, masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai nilai ideal tersebut.

24) Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 66,34 dan pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,87, peningkatan nilai IPA Kota Lhokseumawe masih belum mencapai nilai IPA ideal sebesar 100, dibutuhkan kerja keras Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk peningkatan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

25) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan setiap tahunnya terakhir tahun 2023 sebesar 68,86. IDG Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi dibandingkan IDG Provinsi Aceh sebesar 61,78 namun masih lebih rendah dibandingkan IDG Nasional sebesar 77,62.

26) Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan Kota Lhokseumawe dari tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, yaitu 46,45 persen ini artinya ketergantungan di Kota Lhokseumawe memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

27) PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Perkembangan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 85,99 persen dari 81,22 persen di tahun 2022.

28) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Pada tahun 2020-2024, partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 47,10% hingga mencapai 51,50% pada tahun 2024, dan kemudian turun pada tahun 2024 menjadi 50,25 %.

- 29) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu.

Secara Umum penanganan korban kekerasan sudah mencapai 100 persen atau tertangani namun terjadi peningkatan pengaduan kasus kekerasan pada tahun 2024 sebesar 72 kasus dibandingkan tahun 2023 sebanyak 68 kasus.

- 30) Kepemudaan dan Olahraga

Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Di Kota Lhokseumawe pelatih yang bersertifikat mengalami penurunan di tahun 2024 yaitu sebesar 58,3 persen dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 68,9 persen.

#### **2.3.1.4 Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan**

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe belum menunjukkan nilai yang baik setiap tahunnya ditandai dengan rendahnya capaian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun dengan predikat C (kurang), namun pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi predikat CC dengan poin 54.79 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 67.70 atau predikat B. Capaian yang meningkat ini tidak lepas dari perubahan metode pengukuran yang menyertakan komponen reformasi birokrasi tematik yang menjadi pengungkit utama. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi. Dan diharapkan kedepannya IRB Kota Lhokseumawe bisa meningkat predikat BB.

- 2) Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik. Capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 66,33 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 70,94 dan tahun 2023 menurun menjadi sebesar 69.44 selanjutnya tahun 2024 kembali turun menjadi sebesar 64,37. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat rentan terpapar praktik korupsi. Disarankan dengan penguatan lembaga pengawasan internal, peningkatan kapasitas ASN, dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi untuk akuntabilitas dan transparansi.

- 3) Perencanaan Pembangunan

- a) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD

Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yaitu pada tahun 2020-2024 fluktuatif. Kecenderungan OPD memasukkan banyak program dalam RPJMD namun tidak di masukkan dalam RKPD. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan

memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan sequence antar RKPD. Oleh karena itu, dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022, hal ini dikarenakan Program RKPD tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

- 4) Keuangan
  - a) Rasio Pajak terhadap PDRB di Kota Lhokseumawe masih sangat minim dan berfluktuasi dan mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0.71 persen menjadi 0.73 persen di tahun 2024. Namun peningkatan ini masih belum cukup untuk membiayai pembangunan di Kota Lhokseumawe. Pemerintah daerah perlu berupaya untuk mencari potensi pendapatan dari pajak dan retribusi.
  - b) Masih tingginya ketergantungan pembiayaan terhadap dana pemerintah pusat, hal ini ditandai dengan besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan Kota Lhokseumawe.
  - c) Kemandirian Keuangan Daerah masih rendah yang diukur berdasarkan Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2022 sebesar 0,086.
  - d) Kemandirian pendanaan masih rendah. Pendanaan pembangunan masih bertumpu pada dana transfer pemerintah yang mencapai 82,20 persen pada tahun 2023, sedangkan kemampuan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 9,78 persen.
- 5) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
  - a) Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural untuk tahun 2024 menurun sebesar 7,2 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 17,78 persen. Ini disebabkan karena jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklay struktural berkurang ditahun 2024, Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara dan pada tahun 2022 tidak tersedia anggaran untuk diklat struktural.
  - b) Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah berkurang di tahun 2024 yaitu 912 orang dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 1.749 orang, hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru.
  - c) Indeks profesional ASN di Kota Lhokseumawe Tahun 2023 - 2024 mengalami peningkatan, dengan kategori sedang.



Diharapkan dapat ditingkaan indeks profesional ASN dengan predikat sangat tinggi.

- 6) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, tahun 2024 sebesar 83,82 persen dan tahun 2023 sebesar 88,24. Hal ini disebabkan karena 5 gampong yang belum memiliki kantor dan kantor dalam kondisi rusak pun meningkat.
- 7) Perpustakaan  
Rasio Perpustakaan per satuan penduduk mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 1,04 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1.06.

#### **2.3.1.5 Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan**

- 1) Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah alat penting untuk mengukur tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dan menjadi dasar dalam penyusunan strategi penanggulangan bencana. Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) untuk Kota Lhokseumawe tahun 2020-2023 menunjukkan kecenderungan menurun dari 143,20 (tinggi) di tahun 2020 menjadi 124.22 (sedang) di tahun 2023. Pada tahun 2024 IRB Kota Lhokseumawe sedikit meningkat menjadi 136,99 hal ini ditandai dengan menurunnya Indeks Ketahanan Daerah.
- 2) Semakin tinggi skor Indek Ketahan Daerah (IKD) semakin baik ketahanan daerah tersebut terhadap bencana. Sebaliknya, semakin rendah skornya, semakin rentan daerah tersebut. Untuk Kota Lhokseumawe IKD mengalami penurunan dari Tahun 2023 sebesar 0,45 menjadi 0,40 ditahun 2024.
- 3) Jumlah sampah yang tertangani pada tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 disertai dengan peningkatan jumlah timbulan sampah. Sehingga persentase penanganan sampah yang ditangani menurun dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 99,58 persen dan tahun 2024 sebesar 99,54 persen.

#### **2.3.1.6 Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal**

- 1) Indeks infrastruktur  
Kota Lhokseumawe belum mencantumkan nilai indeks infrastruktur.
- 2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak  
Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan sejak tahun 2023 sebesar 62,18 menjadi 55,32 pada tahun 2024, penurunan ini disebabkan pada perubahan variabel data perhitungan yang digunakan. Sedangkan untuk jumlah rumah tidak layak huni untuk tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 20,694 dari 17.219 pada Tahun 2023.
- 3) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk  
Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki nilai yang terus menurun. Bila dilihat dari data yang disajikan

jumlah panjang jalan di Kota Lhokseumawe tidak mengalami penambahan, namun jumlah penduduk terus mengalami penambahan ini yang menyebabkan rasi panjang jalan di Kota Lhokseumawe terus menurun dari tahun 2020-2024. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Lhokseumawe yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik.

- 4) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2023 seluruhnya sebesar 0%. Hal ini karena keterbatasan Anggaran Daerah dan Kegiatan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak tersedia.
- 5) Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)  
Kondisi jalan mantap di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 cenderung menurun. Dari tahun 2020 stagnan sampai dengan tahun 2021 tetap 67.47% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap meningkat pada tahun 2022 menjadi 76.97%. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pada tahun 2023 jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 69.52% dan tahun 2024 menurun Kembali menjadi 64.40%.
- 6) Daerah Dengan Potensi Genangan Tinggi  
Luasan daerah dengan potensi genangan tinggi di tahun 2020 sebesar 8,00 Ha dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7.00 Ha. Luas potensi genangan terus menurun hingga 4.90 Ha seiring dengan upaya pemeliharaan seperti pelumpuran berkala untuk menghilangkan sedimentasi, pembersihan sampah, penambahan SPAH (saluran pembuangan air hujan), rehabilitasi saluran dengan penambahan volume dan kapasitas saluran drainase serta penanganan titik-titik genangan. Namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 7 Ha. Dan kemudian pada tahun 2024 menjadi 8,5 Ha. Dikarenakan banjir kiriman dari Kabupaten Aceh Utara, kondisi ini harus menjadi perhatian.
- 7) Persentase Penduduk Berakses Air Minum  
Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang meningkat. Namun, persentase penduduk berakses air minum perpipaan di Kota Lhokseumawe secara umum baru sebesar 16.70%. Persentase air Minum Kota Lhokseumawe masih sangat kecil karena Kota Lhokseumawe tidak memiliki Sumber Air Baku.

8) Area Kawasan Kumuh

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2020-2022 tidak berubah tetap sebesar 78.46 Ha. Kenaikan luasan kawasan kumuh ini tidak bergantung pada alokasi APBD, melainkan bergantung pada pendataan yang dilakukan. Pada tahun 2020 dilakukan pendataan kembali luasan kawasan kumuh oleh Korkot Kota Lhokseumawe, Satker/PPK PIP Kota Lhokseumawe, dan Pokja PKP Kota Lhokseumawe maka didapatkan hasil peningkatan kumuh sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78.46 Ha.

Pemerintah Kota Lhokseumawe masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa Gampong di Kota Lhokseumawe yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Lhokseumawe. Dan pada tahun 2023 dan 2024 luas kawasan berkurang menjadi 42,67 Ha, dan masih perlu penanganan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Pada kurun waktu 2020-2024 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) persatuan luas wilayah HPL di Kota Lhokseumawe tidak mengalami perubahan, hal ini disebabkan karena tidak adanya perubahan luas lahan RTH dan luas wilayah ber HPL. Namun rasio RTH persatuan luas wilayah ber HGU dalam kurun waktu 2020-2021 mengalami peningkatan dari 0,30 persen menjadi 1,19 persen, kemudian dari tahun 2022-2024 terus mengalami penurunan menjadi 0,15 persen, hal ini dikarenakan luar RTH tidak bertambah tetapi luas wilayah ber HGB terus mengalami penambahan.

10) Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2024 Capaian indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 seluruh capaiannya belum mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2024 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.

11) Energi dan Sumber Daya Mineral

Rasio Ketersediaan daya listrik, mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 1,86 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,05.

12) Perhubungan

Jumlah uji KIR angkutan umum mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 2.107 yang sebelumnya sebesar 3.252 pada tahun 2023.

### **2.3.2 Isu Strategis**

Isu strategis merupakan keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe diidentifikasi berdasarkan pada isu strategis internasional, isu strategis nasional, isu strategis Aceh, dan kondisi Kota Lhokseumawe yang membutuhkan penanganan serius dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 20 tahun mendatang.

#### **2.3.2.1 Isu Strategis Global**

Banyaknya isu strategis pada lingkup global dan regional menjadi tantangan sekaligus peluang tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Perubahan kinerja perekonomian, stabilitas politik dan keamanan, kondisi kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain sebagainya yang terjadi di baik Benua Eropa maupun ASEAN secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kondisi daerah, tak terkecuali Kota Lhokseumawe.

Beberapa isu global apabila direspon dengan baik akan menjadi faktor pendukung bagi percepatan pembangunan, namun sebaliknya, akan menjadi faktor penghambat apabila pemerintah daerah dan stakeholder lainnya gagal menemukan strategi untuk merespon isu tersebut. Berikut merupakan isu pada lingkup global dan regional yang perlu dipertimbangkan bagi pembangunan wilayah:

##### **1) Perkembangan Demografi Global**

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kemandirian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju. Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Selain itu, turunnya angka kelahiran

disebabkan antara lain oleh fenomena tidak memiliki anak (childfree) dan menunda pernikahan.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di Kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di Kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

2) Dinamika geopolitik dan geoekonomi global  
a. Geopolitik

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan.

Persaingan geopolitik terutama di Kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik Kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di



tingkat global. Tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas (borderless) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

b. Geoekonomi

Perekonomian global diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan hingga tahun 2050, dengan nilai output yang meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar USD 74 triliun. Lima negara diproyeksikan menjadi kontributor utama terhadap pertumbuhan ini, yaitu Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang, dan Indonesia, yang secara kumulatif akan menyumbang sekitar 55 persen dari total output global.

Negara berkembang akan memainkan peran yang semakin dominan dalam perekonomian dunia. Pada tahun 2015, negara berkembang telah berkontribusi sebesar 55 persen terhadap output global, dan diperkirakan meningkat menjadi 71 persen pada tahun 2050. Kawasan Asia menjadi pendorong utama, menyumbang hingga 54 persen dari total output dunia. Pertumbuhan ini didukung oleh institusi ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang kredibel, serta investasi jangka panjang di bidang sumber daya manusia dan infrastruktur.

Negara-negara berkembang juga memiliki keunggulan demografis dan tingkat tabungan yang tinggi, yang jika diiringi dengan kebijakan perdagangan terbuka, iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan produktivitas dan inovasi, akan mempercepat pertumbuhan dan mengejar ketertinggalan dari negara maju.

Dalam konteks tersebut, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari 2025, menjadikannya anggota kesepuluh dalam aliansi ekonomi strategis yang sebelumnya terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Langkah ini menandai strategi penting dalam memperluas pengaruh Indonesia di kancah global, mendiversifikasi mitra strategis, serta membuka peluang besar bagi peningkatan investasi dan kerja sama antar negara berkembang (Global South). Namun demikian, perlu diantisipasi pula potensi tekanan geopolitik, terutama dalam hubungan dengan negara-negara G7, seiring dinamika global yang semakin kompleks.

Secara struktural, Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran geoekonomi strategis melalui beberapa kekuatan utama: sumber daya alam yang melimpah, demografi yang produktif, serta posisi geografis yang menghubungkan jalur perdagangan internasional utama. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi simpul penting dalam rantai pasok global, khususnya di sektor energi bersih, mineral strategis, dan manufaktur.

Namun, tantangan global seperti ketegangan perdagangan, fragmentasi rantai pasok, krisis pangan dan energi, serta proteksionisme baru menuntut Indonesia untuk memiliki kebijakan yang adaptif. Salah satunya adalah menghadapi potensi dampak dari kebijakan tarif resiprokal sebesar 47% oleh

Amerika Serikat, yang berpotensi menekan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar Amerika dan tenaga kerja nasional dimana Industri tekstil Indonesia juga dikhawatirkan kian merosot, dilaporkan bahwa 60 perusahaan tekstil tutup dua tahun terakhir dan 24 ribu buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2024. Lebih dari itu, PHK di industri kecil dan menengah (IKM) jauh lebih besar, diperkirakan mencapai 1.000 unit dengan tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian ratusan ribu uang.

3) Perkembangan teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan logidigital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, teknoHyper Connection, Artificial Intelligence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automstion (RPA), Edge Computing, Auto Robotic System, 3D, dan Future Technologies. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi akan mempengaruhi banyak sektor kehidupan di masa depan, diantaranya:

- a. Digitalisasi usaha pada UMKM dan koperasi dalam operasional usaha dan pemasaran produk usaha;
- b. Sektor manufaktur mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi, serta teknologi hijau termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan;
- c. Sektor pendidikan meliputi inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis Artificial Intelligence (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinyu, tanpa terbatas ruang dan waktu;
- d. Tergantikannya industri media dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence), termasuk pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) yang berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan;
- e. Pengusaha properti perkantoran dan real estate dapat terdampak akibat dari perkembangan pekerjaan dengan metode jarak jauh (remote working) atau work from anywhere (WFA);
- f. Cara kerja pemerintah yang dapat terdampak dengan adanya peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan

- kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya;
- g. Proses pembenahan perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi dapat terbantu dengan perkembangan teknologi menjadi lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara.
- 4) Peningkatan urbanisasi dunia  
Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Urbanisasi ini berimplikasi pada berbagai sektor, seperti perubahan guna lahan pertanian, perubahan aktivitas penduduk ke dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan, serta perkembangan teknologi informasi.
- 5) Konstelasi Perdagangan global  
Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di Kawasan AsiaAfrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Selain itu peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi penduduk di Kawasan Asia, Nigeria, dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi. Kerja sama kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di Kawasan Asia Pasifik.
- 6) Tata Kelola Keuangan Global  
Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada Tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju aging society pada Tahun 2045 akan

menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suka bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupti dalam industri keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial seperti bank digital, dan keuangan terdensentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.

7) Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new lifestyle*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerja melalui virtual-metaverse, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi.

8) Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9) Perubahan iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global – *The Triple Planetary Crisis*) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple Planetary Crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama

secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, Indonesia mendeklarasikan pada Tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadisumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama.

10) Pemanfaatan ruang angkasa.

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of humankind), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (space economy), kelestarian antariksa (space sustainability), dan keamanan antariksa (space security).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai USD469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai USD1,0 triliun hingga Tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

### 2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Beberapa fokus pembangunan nasional dalam kurun waktu lima tahun setidaknya sudah tertuang jelas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fokus tersebut juga menjadi isu yang berpengaruh terhadap agenda-agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Kemampuan stakeholder di daerah merupakan kunci dalam menerjemahkan isu-isu nasional secara baik sehingga respon yang diberikan dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan.



#### 1. Masih Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat dan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

#### 2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022, angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382. Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

#### 3. Pergeseran Struktur Kelas Menengah

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat dan jumlahnya 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat dalam lima tahun terakhir. Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, populasi kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan kerja. Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

#### 4. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan

perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

#### 5. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particular matter 2,5 (WHO, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (BPS, 2022). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Risiko triple planetary crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hak yang perlu diprioritaskan.

#### 6. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Krisis energi dan pangan dapat memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

## 7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi. Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dan Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia juga masih mengalami tantangan meskipun memiliki tren yang positif. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan sertapengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

### 2.3.2.3 Isu Strategis Aceh

Isu-isu strategis pembangunan Aceh yang disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi Aceh, serta memperhatikan isu-isu strategis pembangunan nasional maupun internasional yang diharapkan dapat teratasi dalam 20 tahun (2025-2045) mendatang yaitu:

#### 1. Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk memperkuat Syariat Islam, dan budaya Aceh dengan cara meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam dan budaya Aceh. Melakukan program pendidikan dan penyuluhan syariat Islam kepada masyarakat. Meningkatkan implementasi hukum syariat dalam berbagai aspek kehidupan dan mendorong promosi dan pelestarian cagar budaya dan objek kemajuan kebudayaan Aceh sebagai bagian dari identitas daerah. mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mengakui serta melindungi hak-hak masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka. Disamping itu, pengelolaan harta agama terhadap wakaf perlu ditangani secara serius seperti manajemen kelembagaan dan status hukum aset wakaf (sertifikasi tanah wakaf).

#### 2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting

Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan beberapa upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka stunting yang meliputi:

- a. Peningkatan Akses Makanan Bergizi dengan upaya meningkatkan akses masyarakat, terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak, ke makanan bergizi seimbang melalui promosi praktik pemberian makanan tambahan, edukasi tentang

pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan.

- b. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat termasuk daerah terpencil, terutama ibu hamil dan anak-anak, ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas, termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
  - c. Pendidikan Kesehatan dan Penyuluhan Gizi dilakukan dengan memberikan pendidikan kesehatan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat, terutama kepada ibu hamil dan keluarga dengan anak balita, tentang pentingnya pola makan sehat, praktik pemberian makan yang baik, dan pentingnya nutrisi selama masa kehamilan dan pertumbuhan anak.
  - d. Implementasi Program Pemberian Makanan Tambahan dengan mengimplementasikan program pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita yang mengalami stunting.
  - e. Akses Sanitasi dan Air Bersih dengan meningkatkan akses kepada masyarakat, terutama di pedesaan, ke sanitasi yang layak dan air bersih untuk mencegah penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi status gizi.
  - f. Kolaborasi dan Sinergi antara pemerintah daerah berbagai stakeholder termasuk lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya menurunkan stunting.
- 3. Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat.**

Pemerintah Aceh dapat mengimplentasikan pemerataan Pendidikan, perkuatan pendidikan vokasi dan meningkatkan minat baca Masyarakat dengan cara sebagai berikut:

- a. Menurunkan Disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Untuk menurunkan disparitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Aceh, diperlukan upaya lintas sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:
  - Meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat
  - Mendorong pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan
  - Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan
  - Pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya
  - Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil
- b. Memperkuat Pendidikan Vokasi  
Untuk memperkuat pendidikan vokasi, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi
  - Mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
  - Membangun kemitraan dengan industri dan perusahaan lokal
  - Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa
  - Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi
- c. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

- Peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan
- Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku
- Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan
- Pembangunan Keterampilan
- Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait
- Pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi
- Membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan

#### **4. Penanggulangan Kemiskinan**

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk mengurangi kemiskinan dengan peningkatan akses layanan dasar akses masyarakat terutama pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak; pemberdayaan ekonomi dengan memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, atau pengembangan pertanian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Upaya berikutnya dengan memberikan bantuan tunai, pangan, atau pendidikan kepada keluarga miskin; membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi kemiskinan. Disamping itu, perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

#### **5. Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh**

Pemerintah Aceh dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya mendukung peningkatan UMKM terhadap akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk bagi UMKM, dan pengembangan produk bersertifikasi halal. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, membangun jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas. Meningkatkan promosi investasi dan kemitraan dengan sektor swasta, serta menyediakan insentif dan kemudahan perizinan. Optimalisasi potensi pariwisata Aceh, termasuk wisata bahari, agrowisata, wisata budaya dan sejarah, ekowisata, wisata spiritual, wisata edukasi, wisata minat khusus lainnya serta membangun



membangun infrastruktur wilayah yang mendukung. Disamping itu, pengembangan pariwisata di Aceh perlu dilakukan dalam kerangka dan branding pada wisata halal/Muslim Friendly . Mengembangkan sektor-sektor baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

#### **6. Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital**

Riset dan Inovasi merupakan dua hal yang saling berkaitan erat dan sangat penting untuk kemajuan suatu daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk optimalisasi riset dan inovasi dengan cara pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi, mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik. membangun infrastruktur penelitian dan inovasi untuk mendorong kolaborasi antar lembaga pemerintahan, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta dengan dikoordinir oleh Bappeda Aceh. Selanjutnya membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang pengembangan riset dan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan melalui anggaran pemerintah dan kerjasama dengan lembaga penelitian.

#### **7. Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat.**

Permasalahan lapangan kerja di Aceh saat ini masih menjadi permasalahan utama yang didukung oleh beberapa faktor yaitu masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja. Hal ini tergambar dari rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja yang terbatas, serta lemahnya perlindungan tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Aceh yang belum cukup kuat dan terbatasnya investasi juga menjadi penghambat penciptaan lapangan kerja.

Berbagai upaya pembangunan yang dapat dilakukan dalam menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas masyarakat antara lain yaitu: 1) pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan penguatan mutu produk UMKM diarahkan pada sertifikasi produk terutama sertifikat halal; 2) memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan teknologi pertanian modern, pelatihan keterampilan, dan akses pasar; 3) meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan; 4) menyediakan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas; 5) mengembangkan sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, dan industri manufaktur sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif; 6) mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi; 7) mengembangkan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik dan pariwisata berbasis masyarakat; dan 8) mengembangkan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani.

## **8. Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor**

Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya untuk memperkuat industri pengolahan dan ekspor dengan cara mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan positioning pada Industri Halal sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang Islami di Aceh. Membangun infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat secara mamadai. Memberikan akses mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan. Mendorong diversifikasi produk-produk industri pengolahan dan mencari pasar ekspor baru. Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor, dan mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha dalam sertifikasi produk halal. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama dengan negara-negara lain untuk meningkatkan akses pasar internasional.

## **9. Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau.**

Pemerintah Aceh dapat mengambil upaya strategis untuk pengembangan produktivitas pangan dan ekonomi hijau dengan upaya meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan dengan dukungan kepada petani. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh sarana produksi yang ramah lingkungan dengan mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau. Selanjutnya mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan, serta mengembangkan strategi promosi dan pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk pangan lokal Aceh.

## **10. Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi**

Pembangunan saat ini juga diarahkan pada peningkatan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masa depan, dalam hal ini, Pemerintah Aceh dapat melakukan dengan upaya mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah melalui pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan. Memberikan dukungan kepada UMKM melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, dan promosi pasar. Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa-desa yang memiliki potensi wisata. Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi dan meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur di perkotaan dan pedesaan.

### **11. Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas**

Tata kelola pemerintahan merupakan cerminan kinerja pemerintahan dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dengan cara melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika dan integritas. Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik yang efektif. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika. Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas. Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.

### **12. Memperkuat Otonomi Khusus**

Otonomi Khusus Aceh memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur daerahnya, terutama terkait penerapan hukum Syariah, pendidikan, dan pengelolaan sumber daya alam. Otonomi khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh dapat mengimplementasikan upaya untuk memperkuat otonomi khusus kedepan di arahkan pada memperkuat implementasi hukum dan peraturan terkait otonomi khusus Aceh. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta dapat memberikan manfaat bagi semua komponen masyarakat Aceh. Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional serta membangun kerjasama yang baik antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Selanjutnya memperkuat peran lembaga adat dan agama dalam pengelolaan urusan keagamaan dan kebudayaan.

### **13. Kemandirian dalam Ruang Fiskal**

Kemandirian fiskal merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terlalu bergantung pada pendanaan pemerintah pusat atau sumber luar lainnya. Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian dalam ruang fiskal dengan cara memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan reformasi perpajakan dan penegakan hukum. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan dan perpajakan. Meningkatkan sumber pendapatan daerah di luar transfer pemerintah pusat. Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri. Membangun komitmen yang kuat bersama stakeholder untuk memperkuat kemandirian fiskal di Aceh.

#### **14. Penanganan PPKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga**

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk penanganan PPKS dan disabilitas, memperkuat gender dan keluarga dengan cara mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas, mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh serta pelatihan keterampilan, akses modal usaha bagi PPKS, penyandang disabilitas, dan perempuan. Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi dengan melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan kesetaraan gender. Selanjutnya memberikan dukungan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan keterampilan parenting.

#### **15. Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan**

Pemerintah Aceh dapat melakukan upaya untuk melaksanakan Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan dengan cara: mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor dan mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan. Selanjutnya melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat. Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk mengatasi degradasi, deforestasi, alam dan alih fungsi lahan kawasan hutan lindung, mangrove dan Kawasan Hidrologi Gambut (KHG)/Kawasan Lindung Aceh. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan.

#### **16. Pengurangan Risiko Bencana**

Aceh merupakan daerah dengan Indek Risiko Bencana yang tinggi. Beberapa bencana yang sering terjadi di Aceh antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Aceh dalam upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan membuat dan melaksanakan rencana penanggulangan bencana yang komprehensif dan terpadu. Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana dan tindakan darurat. Mengendalikan pemanfaatan lahan yang rawan bencana. Pengelolaan keanekaragaman hayati (flora dan fauna), pengendalian pencemaran lingkungan dan mitigasi ancaman perubahan iklim. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, dan shelter. Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana.

#### **17. Memperkuat Pembangunan Kewilayahan**

Pembangunan kewilayahan di Aceh mencakup pembangunan infrastruktur, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, perumahan, dan konektivitas antar wilayah. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi secara

merata, menyelesaikan ketimpangan antar wilayah dan antar sektor, potensi wilayah tertinggal juga menjadi perhatian dan mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah terpinggirkan. Pembangunan Aceh ke depan juga berfokus pada peningkatan infrastruktur layanan dasar masyarakat dan pembangunan jalan nasional dan provinsi menjadi prioritas utama dalam menjaga konektivitas antar wilayah. Selain itu, pemerintah Aceh juga mendorong pemanfaatan lahan transmigrasi untuk menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan peningkatan akses layanan kesehatan dan mendorong pengembangan ekonomi lokal di wilayah pinggiran dan terpencil serta memperkuat pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

#### **18. Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas**

Memperkuat sarana dan prasarana infrastruktur yang berkualitas Pemerintah Aceh dapat melakukan beberapa upaya penting seperti: 1). mengembangkan rencana pembangunan infrastruktur jangka panjang yang komprehensif dan terintegrasi serta alokasi anggaran sesuai dengan skala prioritas; 2). meningkatkan pengembangan infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara; 3). mengembangkan infrastruktur energi yang handal dan berkelanjutan; 4). memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak di seluruh wilayah Aceh; 5) meningkatkan akses dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi; 6) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan; dan 7) mengembangkan infrastruktur pariwisata yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

##### **2.3.2.4 Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan**

Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kota Lhokseumawe, yaitu :

- 1) Degradasi Kawasan Pesisir dan Laut.
- 2) Keterbatasan dan kerusakan lahan.
- 3) Penurunan kualitas udara akibat tingginya emisi GRK.
- 4) Rendahnya ketersediaan dan kualitas air bersih.
- 5) Kurang Optimalnya Pengelolaan Sanitasi, Limbah dan Sampah.

##### **2.3.2.5 Isu Strategis Kota Lhokseumawe**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Lhokseumawe dan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan Aceh serta nasional, maka disusun isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe untuk dapat teratasi dalam 5 tahun mendatang (2025-2030), yaitu:



#### **2.3.2.5.1 Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita**

Pemerintah Kota Lhokseumawe harus lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagai berikut :

- a. pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif. Selain itu juga dapat dilakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- b. Memberikan dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran dan pengembangan produk. Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan di wilayah Kota Lhokseumawe dengan melibatkan berbagai unsur baik dari Pemerintah Kota, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.

#### **2.3.2.5.2 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka**

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

- a. Bantuan sosial yang bersifat produktif, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, perbaikan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
- b. Pemberian pelatihan usaha dan bantuan modal usaha sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi mandiri dari sisi ekonomi.
- c. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan tingkat pengangguran adalah pembangunan infrastruktur, memberikan dukungan terhadap nelayan dengan menyediakan akses teknologi perikanan yang modern, pelatihan keterampilan dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan tenaga kerja siap pakai.
- d. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **2.3.2.5.3 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagai berikut :

- a. memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, memberikan perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas untuk menikmati pendidikan.
- b. Memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan berkelanjutan.

- c. meningkatkan minat baca, dapat dilakukan dengan pengembangan program promosi literasi, peningkatan akses terhadap bahan bacaan terutama di perpustakaan daerah.
- d. Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam keterampilan literasi digital, pelatihan keterampilan literasi, membangun budaya baca yang kuat dan berkelanjutan dengan menyediakan pojok-pojok baca di setiap ruang publik.
- e. meningkatkan akses kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan anak-anak dengan makanan bergizi seimbang, membentuk Dapur Pangan Sehat di setiap gampong dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi balita terutama balita stunting.
- f. Pemberian makanan tambahan kepada bayi, balita, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan, meningkatkan akses ibu hamil dan anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi dan layanan reproduksi yang komprehensif.
- g. Meningkatkan akses masyarakat ke sanitasi yang layak dan air bersih, serta penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

#### **2.3.2.5.4 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana**

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan upaya untuk mendorong pengelolaan hidup dan persampahan melalui, sebagai berikut :

- a. program kampanye promosi kebersihan lingkungan dan bebas sampah, penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan kebersihan, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan.
- b. membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui penataan tempat pengolahan sampah, menyediakan armada pengangkut sampah.
- c. Melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.
- d. penguatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko kebencanaan melalui penyusunan dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana.

- e. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan menghadapi bencana. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti pesisir, dan lereng-lereng bukit rawan longsong.
- f. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti pos evakuasi, pos-pos kesehatan, dan jalur evaluasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana, meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir terutama di waktu musim penghujan.
- g. meningkatkan institusi pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, membangun kerjasama dan sinergi antar pemerintah daerah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.

#### **2.3.2.5.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastuktur yang Berkualitas**

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak kepada seluruh masyarakat yang meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- b. Akses Air minum Kota Lhokseumawe yang masih rendah karena tidak memiliki air baku sehingga perlu dilakukan langkah pengembangan dan penguatan infrastruktur air minum seperti pembangunan sumur bor, instalasi pengolahan air laut (desalinasi), serta sistem penampungan air hujan secara komunal dan individual. Selain itu, diperlukan pendekatan partisipasi masyarakat melalui program seperti PAMSIMAS, inovasi teknologi pengolahan air yang efisien, pengawasan kualitas air, kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM, dan Program pengembangan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang terpadu dari hulu hingga ke konsumen. serta edukasi tentang pentingnya konservasi dan penghematan air. Untuk Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) akan dibangun SPAM regional antara 2 kabupaten/kota yaitu Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
- c. Melakukan penataan kawasan permukiman kumuh.
- d. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

#### **2.3.2.5.6 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal**

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dengan cara sebagai berikut :

- a. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat dan Bappeda untuk memastikan penggunaan sumberdaya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

- b. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.
- c. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan, mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.
- e. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi.
- f. Dalam meningkatkan ruang kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer, memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.
- g. Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.
- h. Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.
- i. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan perpajakan, dan pengelolaan sumber daya.
- j. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.
- k. Optimalisasi riset dan inovasi daerah serta pemanfaatan teknologi digital, penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan regulasi pengembangan riset dan inovasi, kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas sumber daya riset dan inovasi melalui program pelatihan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

#### **2.3.2.5.7 Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan**

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, diantaranya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH).

- b. Melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
- c. Menggalakkan sosialisasi dan kampanye program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Syariat Islam dan budaya Aceh.
- d. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi nilai-nilai Dinul Islam.
- e. Melakukan promosi kekayaan budaya serta melakukan legalisasi situs/cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe.

Dalam penentuan isu strategis pembangunan, dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu KLHS, isu regional, nasional dan global yang teridentifikasi terhadap isu Kota Lhokseumawe serta Keterkaitan antara isu KLHS, isu strategis Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe ditampilkan pada tabel sebagai berikut.



**Tabel 2.246**  
**Keterkaitan antara Isu KLHS, Isu Strategis Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Lhokseumawe**

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Syariah terdiri Kota Lhokseumawe yang mengalami peningkatan di tahun 2024 terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al quran, Manajemen Masjid, Hukum Jinayat dan Akhlak, potensi ini dapat memperkuat nilai-nilai dinul islam.	Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan nilai-nilai keislaman dan penyelenggaraan syariat islam</li> <li>- Pelestarian budaya aceh dan identitas daerah</li> </ul>			Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh	2.2.3.1.7 Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan
2	Lhokseumawe memiliki potensi pada Sektor Perikanan, yang terus mengalami peningkatan. Bila merujuk pada data BPS Kota Lhokseumawe (Tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 7,38 ) peningkatan strategi pemasaran dan inovasi pengemasan terus kembangkan kualitasnya dengan memanfaatkan teknologi digital.	Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Stabil</li> <li>- Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran</li> <li>- Pengembangan Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan pangan</li> </ul>		Produktivitas rendah	Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	sektor energi dan industri petrokimia (karena merupakan kota penghasil gas) sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe		- Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Stabil	Dinamika geopolitik dan geoekonomi global	Geopolitik dan Geoekonomi	Memperkuat Industri Pengolahan dan Ekspor	Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita
			- Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Perkembangan teknologi		Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau	
			- Pengembangan Pertanian Berkelanjutan dan Ketahanan pangan	Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam		Memperkuat Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	
					Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Peningkatan Pendapatan Perkapita, Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh	
						Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat	

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	IPM Kota Lhokseumawe tinggi diatas rata-rata Nasional dan provinsi. Bila merujuk pada data BPS Kota Lhokseumawe (Tahun 2024)	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (pendidikan dan kesehatan)	Perkembangan Demografi Global	Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia	Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
			Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan gender	Peningkatan urbanisasi dunia	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Penanganan PMKS dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga	
			Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran	Perubahan konstelasi global	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat	
				Pertumbuhan kelas menengah		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting	

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Smart City dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Lhokseumawe berkomitmen membangun fondasi kota cerdas yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti digitalisasi pelayanan publik dan transparansi proses pemerintahan. ini terbukti dengan meningkatnya penilaian SPBE Kota Lhokseumawe di Tahun 2024. Adanya Aplikasi Inovatif seperti Pengembangan aplikasi seperti SIJAKIR untuk pengelolaan parkir yang efisien, dan penerapan Aplikasi SRIKANDI untuk tertib administrasi kearsipan, menunjukkan arah transformasi digital.	Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Smart dan Good Governance	Pergeseran tata kelola keuangan global	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Kemandirian Dalam Ruang Fiskal	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal
			Inovasi dan Daya Saing Daerah			Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Digital	
			Penguatan Kelembagaan dan data Statistik			Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas	
						Memperkuat Otonomi Khusus	

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terdapat Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung. Letak geografis Kota Lhokseumawe yang masuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa sehingga membutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna.	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim	Perubahan iklim	Krisis Lingkungan;	Pembangunan Berorientasi Lingkungan dan Energi Terbarukan	
			Ketahanan Bencana				
						Pengurangan Risiko Bencana	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana



No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sudah terdapat Qanun RTRW Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024	Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal	Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi	Pemanfaatan ruang angkasa.		Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastuktur yang Berkualitas
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dasar				
						Memperkuat Pembangunan Kewilayahan	



# BAB - III

VISI, MISI, DAN PROGRAM  
PRIORITAS PEMBANGUNAN  
DAERAH

**RPJMK**  
**LHOKSEUMAWE**  
**TAHUN 2025-2029**

### BAB III

#### VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

##### 3.1 Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman RPJPD dan RPJMN.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (PILKADA). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai dengan misi yang diemban.

Penjabaran akan visi ini akan diimplementasikan dalam serangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama lima tahun kedepan. Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe tahun 2025-2029 yang hendak dicapai dalam tahapan pertama Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:



Penjabaran lebih lanjut mengenai visi ini merupakan salah satu upaya untuk mempertegas kembali perwujudan kota yang cerdas dan memiliki aspek mendasar sebagai kota nyaman huni.

**Kota Lhokseumawe sebagai kota cerdas** adalah:

1. meningkatnya sumber daya manusia yang adaptif terhadap peluang di era digital dan ekonomi digital,
2. terbangunnya sistem pelayanan dan kelembagaan yang mudah, cepat, dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya investasi yang memberikan manfaat bagi pembangunan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan unggul, sehat jasmani dan rohani serta berakhlak mulia.
4. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan gaya hidup sehat dan bersih.

5. meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem produksi dan distribusi sebagai pelayanan skala lingkungan kota.
6. meningkatnya peluang kerja yang bisa menampung tenaga kerja produktif.

**Kota Lhokseumawe sebagai kota nyaman huni** adalah:

1. kualitas hidup masyarakat Kota Lhokseumawe yang tinggi di atas rata-rata nasional, yang tercermin dalam nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi.
2. memiliki sarana dan prasarana pelayanan perkotaan yang layak dan memadai bagi aktifitas masyarakat.
3. pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat melampaui standar pelayanan minimal.
4. berkembangnya perekonomian yang mampu menggerakkan pembangunan kota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. memberikan ruang yang kondusif bagi pengembangan nilai-nilai dan aktifitas sosial dan budaya sehingga mampu meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.

Adapun penyelarasan Visi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Penyelarasan Visi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029**

 Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2045	 Visi RPJMA Tahun 2025-2029	 Visi RPJMK Tahun 2025-2029
BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045	ACEH ISLAMI, MAJU, BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN	TERWUJUDNYA LHOKSEUMAWE SEBAGAI KOTA CERDAS DAN NYAMAN HUNI

Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni tercermin dalam 5 sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penurunan pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang juga diperkuat dengan sasaran aspek lingkungan. Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Sasaran Pembangunan Daerah RPJMK Lhokseumawe**  
**Tahun 2025-2029**



Meningkatnya Pendapatan per Kapita

- ❖ Pertumbuhan Ekonomi dari 4.46 (2024) menjadi 4.40-4.50 (2025) dan menuju 4.53-4.88 (2030)
- ❖ PDRB per kapita dari 59.12 (2024) menjadi 62.38 (2025) dan menuju 77.00 (2030)
- ❖ Kontribusi PDRB Sub Perikanan dari 7.38 (2024) menjadi 7.51 (2025) dan menuju 8.0 (2030)
- ❖ Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dari 16.70 (2024) menjadi 16.72 (2025) menuju 17.35 (2030)
- ❖ Indeks Kemandirian Fiskal dari 0.974 Rendah (2024) menjadi 1.136 (2025) (rendah) menuju 1.200 (2030)(sedang)



Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

- ❖ Tingkat Kemiskinan dari 10.44 (2024) menjadi 9.01 (2025) dan menuju 8.45-8.35 (2030)
- ❖ Rasio Gini dari 0.326 (2024) menjadi 0.293 (2025) dan menuju 0.286-0.314 (2030)
- ❖ Kontribusi PDRB Kab/Kota dari 4.87 (2024) menjadi 4.92 (2025) dan menuju 5.20 (2030)



Penguatan Tata Kelola, Keamanan, demokrasi, stabilitas ekonomi dan syariat islam

- ❖ Indeks Pelayanan Publik dari 3.94 (2024) menjadi 4.20 (2025) dan menuju 4.70 (2030)
- ❖ Indeks Pembangunan Syariat dari 83.91 (2024) menjadi 84.25 (2025) dan menuju 86.97 (2030)
- ❖ Persentase dayah mandiri dari 9.37 (2024) menjadi 9.45 (2025) dan menuju 12.00 (2030)



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ❖ Indeks Pembangunan Manusia dari 80.89 (2024) menjadi 81.75 (2025) dan menuju 82.90-83.35 (2030)



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 69.40 (2024) menjadi 70.00 (2025) dan menuju 79.21-79.52 (2030).



### 3.2 Misi

Untuk mencapai visi Kota Lhokseumawe tahun 2025-2029 yaitu *Terwujudnya Lhokseumawe sebagai kota cerdas dan nyaman huni*, maka dalam Pilkada serentak Walikota dan Wakil Walikota terpilih menetapkan 14 (empat belas) misi sebagai berikut:

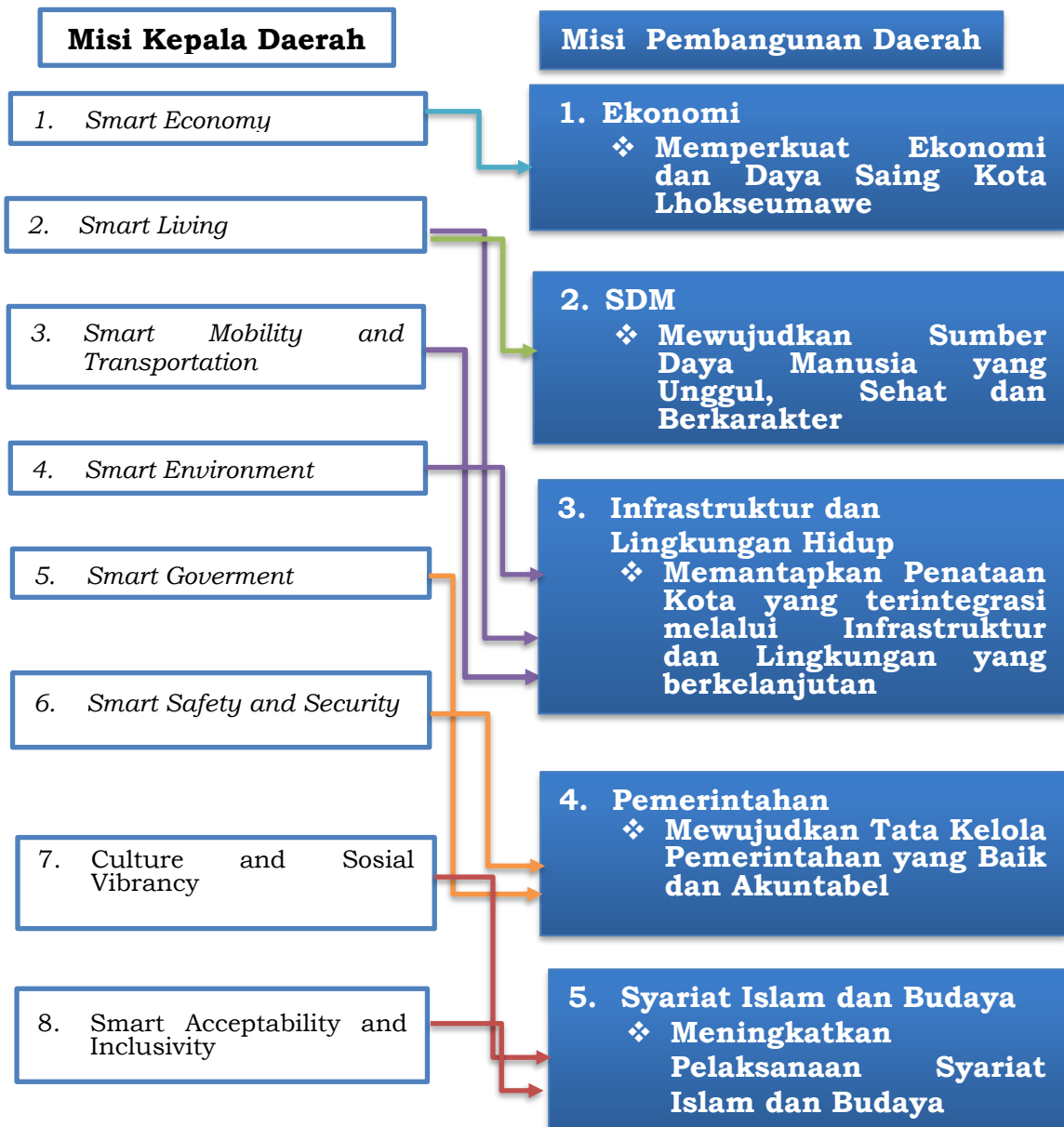
1. *Smart Economy*
2. *Smart Environment*
3. *Smart living*
4. *Smart Mobility*
5. *Smart People*
6. *Smart Government*
7. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (*Quality of Life*)
8. Mewujudkan Keselamatan dan Keamanan Masyarakat (*Safety and Security*)
9. Mengupayakan Mobilitas dan Transportasi (*Mobility and Transportation*)
10. Mengembangkan Akseptabilitas dan Inklusif (*Acsebility and Inclusivity*)
11. Pemerataan Kesempatan Ekonomi yang lebih luas di Bidang Industr, Migas, Jasa dan Perikanan (*Economic Opportunity Base On Industry, Service and Maritim*)
12. Mewujudkan Budaya Islami dan Semangat Hidup Warga Kota (*Culture and Social Vibrancy*)
13. Pengembangan Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (*Green and Suistanability*)
14. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel (*Good Government and Akuntability*).

Selanjutnya 14 (empat belas) Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe terpilih di kelompokkan kembali menjadi 8 Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe yaitu :

1. *Smart Economy;*
2. *Smart living;*
3. *Smart Mobility and Transportation;*
4. *Smart Environment;*
5. *Smart Government;*
6. *Smart Safety and Security;*
7. *Culture and Sosial Vibrancy;*
8. *Smart Acceptability and Inclusivity.*

Dalam penyusunan desain perencanaan pembangunan jangka menengah yang baik dan untuk memudahkan dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan, maka Misi kepala daerah di atas dilakukan transformasi menjadi Misi Pembangunan. Transformasi ini dilakukan dengan tidak menghilangkan makna dan substansi dari Misi Kepala Daerah yang dibawa pada saat pilkada serentak. Transformasi ini dilakukan dengan cara ekstraksi dari makna misi dan melakukan pengelompokan dengan mempertimbangkan bidang dan fungsi dari terjemahan misi tersebut. Berikut Gambar Transformasi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Misi Pembangunan.

**Gambar 3.2**  
**Transformasi Misi Kepala Daerah ke Misi Pembangunan Daerah**



Dengan memperhatikan proses transformasi Misi Kepala Daerah terpilih kepada Misi Pembangunan Daerah, maka Misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter;
3. Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel;
5. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.

Keterkaitan Visi dan Misi Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ada sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Keterkaitan Visi dengan Misi Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2025-2029**

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi
<b>Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni</b>	<b>Cerdas</b>	Misi 1 : Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe
		Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter
	<b>Nyaman Huni</b>	Misi 3 : Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan;
		Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel
		Misi 5 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya

Sumber: Hasil olah, 2025

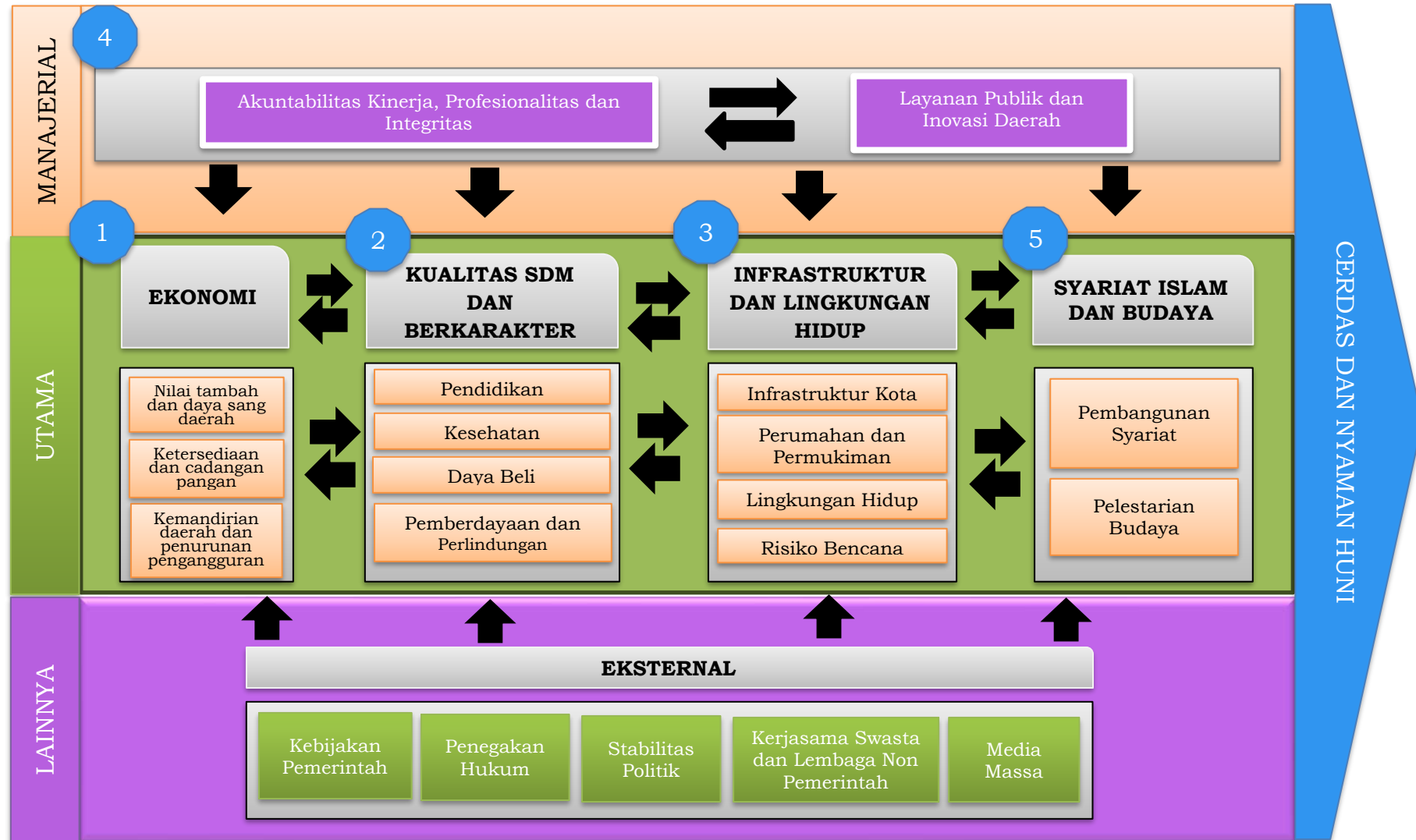
**Gambar 3.3**  
**Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029**



Sumber: Hasil olah, 2025

Misi pembangunan di atas selanjutnya dijadikan rujukan dalam menyusun kerangka berpikir pencapaian misi dalam bentuk cascading tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMK ini. Cascading pencapaian Misi Pembangunan daerah ini menunjukkan langkah-langkah intervensi yang harus dilakukan secara berjenjang, serta menunjukkan ukuran keberhasilan intervensi tersebut dan siapa yang harus melakukan intervensi tersebut. Kerangka ini disusun untuk memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun perencanaan strategis sektoral (Renstra Perangkat Daerah) yang harus tetap terhubung dan terintegrasi dengan RPJMK ini.

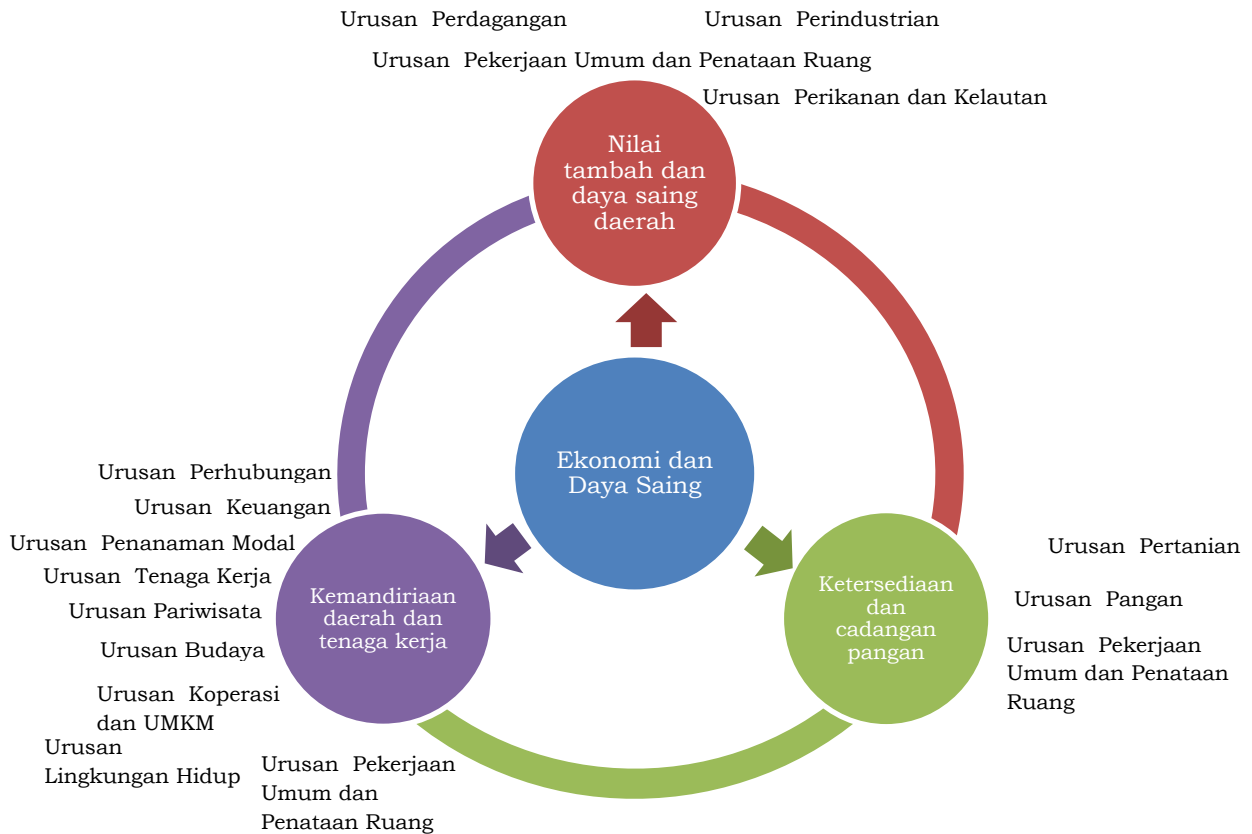
Gambar 3.4 Proses Bisnis Pencapaian Visi Pembangunan



### 3.2.1 Misi 1

*"Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe;"*

**Gambar 3.5 Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 1**



Memperkuat Ekonomi yang dimaksud adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Memperkuat Ekonomi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya yang dilaksanakan dalam memperkuat ekonomi melalui dukungan pemerataan infrastruktur di segala lini ekonomi yang berpotensi mendorong usaha masyarakat khususnya kelas ekonomi menengah kebawah, hal ini akan mengurangi kesenjangan di masyarakat.

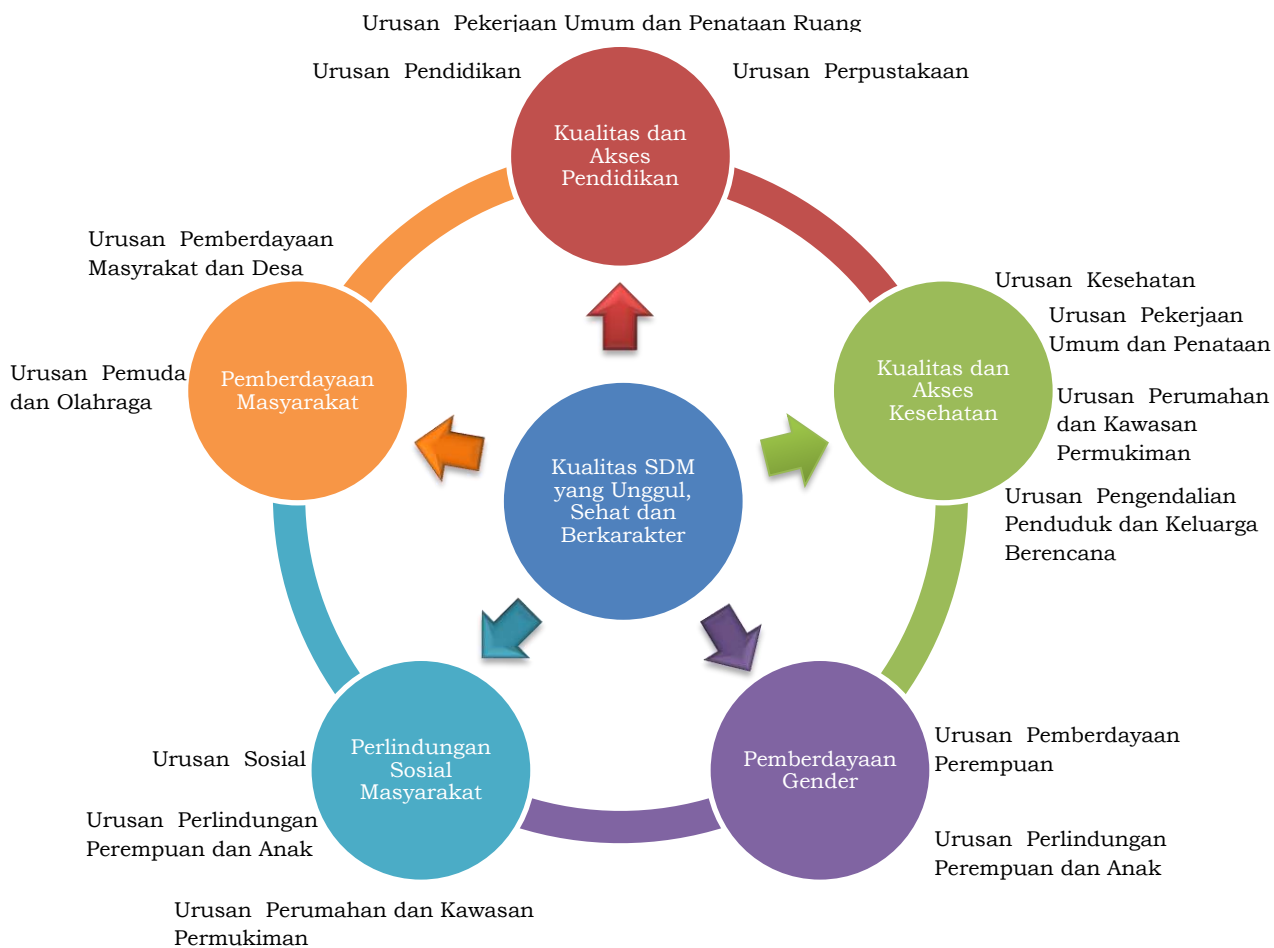
Penciptaan dorongan pada sektor pariwisata melalui peningkatan daya tarik pariwisata dan promosi wisata, Koperasi dan UMKM dapat meningkatkan daya saing Kota Lhokseumawe. Peningkatan daya saing dapat dicapai dengan kontribusi sektor industri pengolahan, kemudahan investasi, strategi penciptaan lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Memperkuat ekonomi dan daya saing Kota Lhokseumawe dilaksanakan oleh berbagai urusan yang saling bersinergi dalam mencapai tujuan.



### 3.2.2 Misi 2

*“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter;”*

**Gambar 3.6 Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 2**



Pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas dan tujuan dalam pembangunan nasional Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan manusia yang seutuhnya, kemampuan profesional dan kematangan kepribadian saling memperkuat satu sama lain. Pembangunan sumber daya manusia tolak ukur ketercapaian yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Misi ini berkomitmen dalam penguatan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

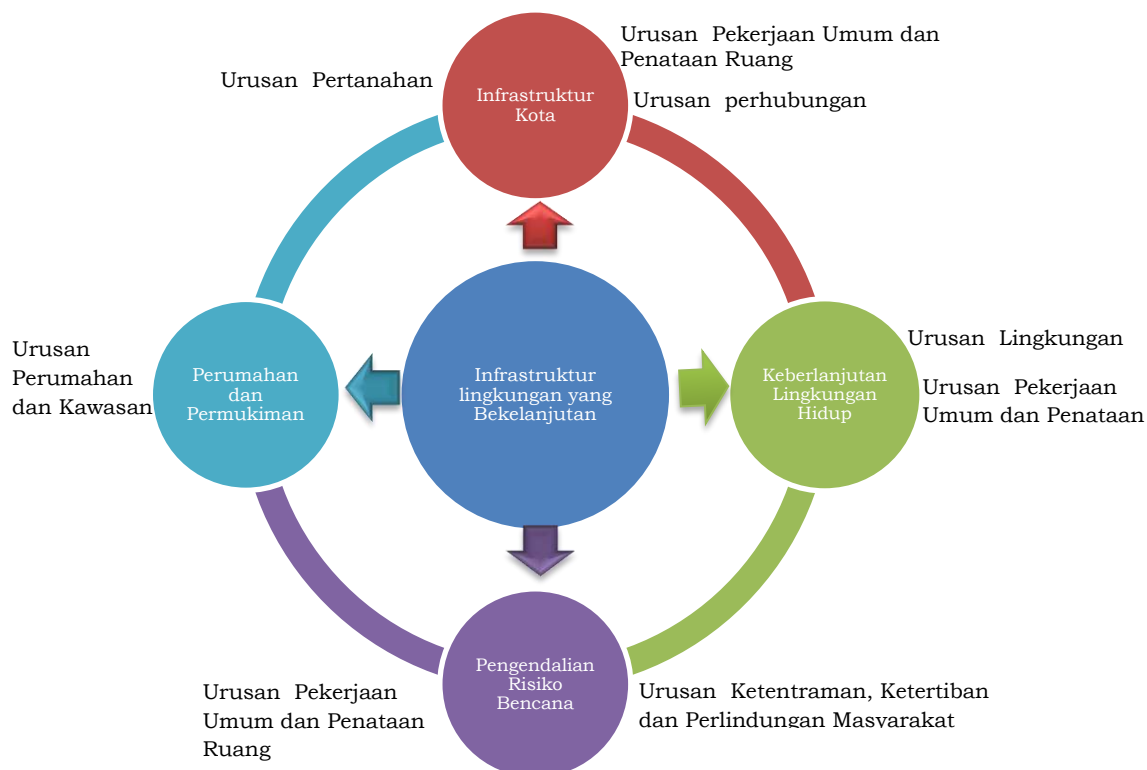
Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, adalah pertama sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan IPTEK. Kedua yaitu tingkat kesehatan masyarakat. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh

faktor lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas tidak dapat bertahan utamanya pendidikan tanpa adanya penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri.

### 3.2.3 Misi 3

*“Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan;”*

**Gambar 3.7 Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 3**



Pemantapan penataan Kota yang terintegrasi dilaksanakan melalui pemerataan infrastruktur pada jaringan fisik dan sistem yang mendukung kehidupan dan aktivitas kota, peningkatan pelayanan publik dasar dan dukungan kebijakan publik yang memadai. Untuk dimensi lingkungan berkelanjutan perlu keseimbangan lingkungan termasuk pengendalian risiko bencana untuk menghindari keterancaman pada produktivitas ekonomi masyarakat dan tercapainya kemandirian pangan. Pemantapan penataan kota dan lingkungan yang berkelanjutan dilaksanakan oleh berbagai urusan untuk saling bersinergi.

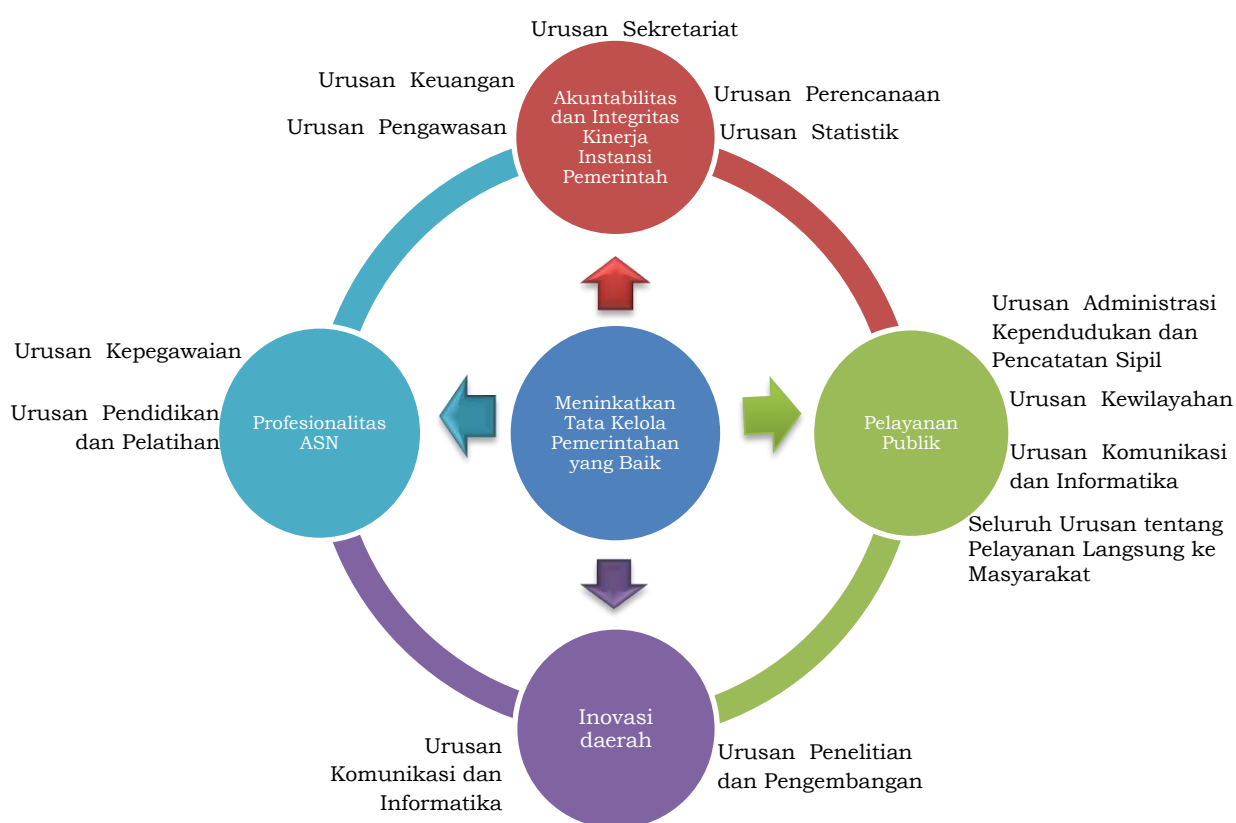
### 3.2.4 Misi 4

*“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel;”*

Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan akuntabel, bertujuan pada meningkatkan kepercayaan publik yang bermuara pada kesejahteraan

masyarakat. Birokrasi diharapkan dapat menjadi katalisator untuk reformasi dengan menghilangkan segala hambatan dalam birokrasi terkait dengan pelayanan kepada masyarakat melalui akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, inovasi daerah, kapasitas ASN, transformasi digital pada layanan publik. Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen kedepan akan lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan dengan mempelajari iklim perubahan yang sangat cepat mensyaratkan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi serta kemampuan yang membuat institusi pemerintah dapat terus tetapa relevan ketika kondisi berubah.

**Gambar 3.8 Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 4**

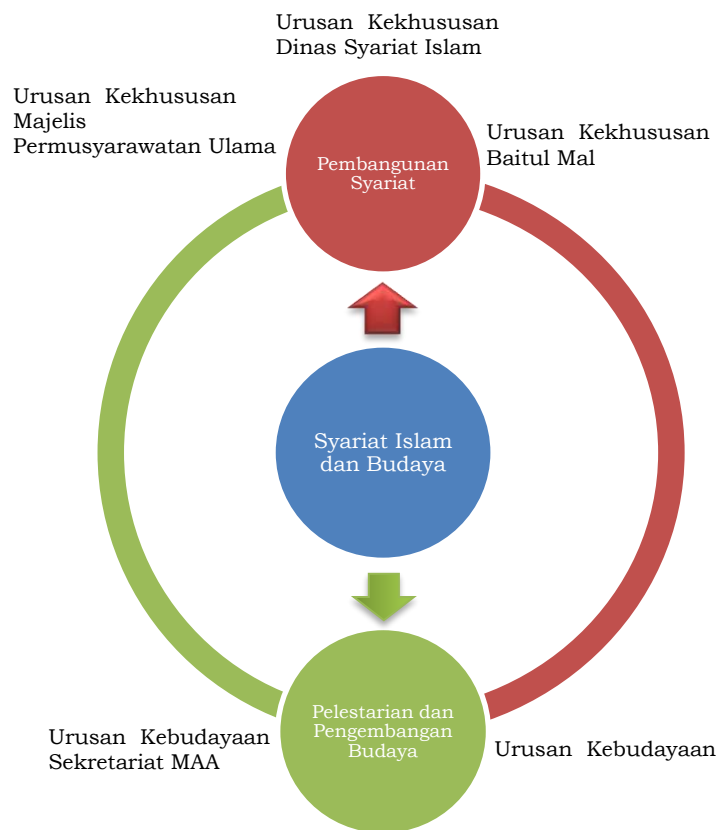


### 3.2.5 Misi 5

*"Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya."*

Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan daerah Islami yang seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupan atau melaksanakan aktivitas berdasarkan nilai-nilai keislaman dalam aspek aqidah, akhlak, ibadah, pendidikan Islami dan pengamalan ajaran islam secara konsisten maka memperkuat pelaksanaan nilai-nilai dinul islam melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat serta nilai-nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat Kota Lhokseumawe.

**Gambar 3.9 Kerangka Kerja Perencanaan Terintegrasi Misi 5**



Berikut Penyeragaman Antara Misi RPJMN Tahun 2025-2029, RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Penyelarasan Misi RPJMN Tahun 2025-2045, RPJM Aceh**  
**Tahun 2025-2045 dan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2045**

<b>Misi RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2029</b>		<b>Misi RPJMA Tahun 2025-2029</b>		<b>Misi RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029</b>	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	1	Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah	5	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya
		2	Mewujudkan Implementasi Kekhususan dan Keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA	5	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Hilirisasi, Industrilisasi, Pariwisata dan Transformasi Digital berbasis Sektor Unggulan dan Skala Prioritas	1	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan industry Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Hilirisasi, Industrilisasi, Pariwisata dan Transformasi Digital berbasis Sektor Unggulan dan Skala Prioritas	1	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe
		4	Mewujudkan insfrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional	3	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	5	Mewujudkan kualitas dan daya saing	2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter



<b>Misi RPJMN (Asta Cita) Tahun 2025-2029</b>		<b>Misi RPJMA Tahun 2025-2029</b>		<b>Misi RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029</b>	
	Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas		sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas		
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Hilirisasi, Industrilisasi, Pariwisata dan Transformasi Digital berbasis Sektor Unggulan dan Skala Prioritas	1	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	3	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi, Hilirisasi, Industrilisasi, Pariwisata dan Transformasi Digital berbasis Sektor Unggulan dan Skala Prioritas	1	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	6	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum	4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel
8	Memperkuat Penyelesaian Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	7	Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya	3	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan

### **3.3 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan Sasaran RPJMK Lhokseumawe merupakan hasil dari perumusan capaian strategis Kota Lhokseumawe yang merepresentasikan atau tolok ukur keberhasilan atau kegagalan pemerintah. Oleh karena itu, syarat utama penentuan tujuan dan sasaran adalah measurable yang direpresentasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir tahun perencanaan.

Tujuan dan sasaran merupakan acuan dalam penyusunan logframe Kota Lhokseumawe. Masing-masing sasaran terdapat intervensi program prioritas daerah yang ditransformasikan ke program nomenklatur di Permendagri 90 tahun 2019 yang memfokuskan langkah intervensi yang harus dilakukan bersama-sama oleh Perangkat Daerah. Program prioritas daerah dilaksanakan bersama dengan perangkat daerah yang berperan dalam pencapaian Misi.


Berikut merupakan penjabaran Tujuan dan Sasaran pembangunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang diikuti dengan gambar arsitektur kinerja Kota Lhokseumawe dalam bentuk cascading dan proses bisnis pencapaian tujuan pembangunan.

#### **3.3.1 Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi**

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 1 : Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- ❖ Memperkuat Ekonomi dan daya Saing Kota Lhokseumawe dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
  1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah;
  2. Meningkatnya Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau.
  3. Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran.

**Gambar 3.10 Cascading Pencapaian Tujuan 1**



<b>Misi 1</b>	<b>Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe</b>									
<b>Tujuan</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Ekonomi</b>									
<b>Indikator Tujuan</b>	Laju Pertumbuhan Ekonomi					Indeks Gini				
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah			Ketersediaan dan cadangan pangan		Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran				
<b>Indikator Sasaran</b>	Kontribusi PDRB Perdagangan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Indeks Ketahanan Pangan	Pembentukan Modal Tetap Bruto % PDRB per kapita	Indeks Kemandirian Fiskal	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum	Total Kredit / PDRE	TPT	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
<b>Program Prioritas</b>	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi Serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah</b>									

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan sebuah pertumbuhan harus mampu menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk pencari kerja, serta memastikan bahwa semua kelompok masyarakat yang terpinggirkan dapat terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan. Perkuatan Ekonomi dalam pembangunan diharapkan dapat menghasilkan pola pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Untuk mencapai tujuan dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi dirumuskan sasaran yaitu meningkatnya sektor potensi strategis daerah. Kedua, meningkatnya nilai investasi, daya saing dan lapangan kerja.

**Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah**, diartikan bahwa sektor perdagangan, industri pengolahan dan Sub sektor perikanan menjadi fokus dari Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe, sektor perdagangan terpresentasi pada kategori G lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Resparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta sektor industri terepresentasi pada kategori C lapangan usaha industri pengolahan, sedangkan sub sektor perikanan terepresentasi pada kategori A lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, sehingga indikator PDRB sektor unggulan merupakan kumulatif dari PDRB kategori A, C dan G.

**Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau**, diartikan bahwa ketahanan pangan merupakan pemenuhan kebutuhan pangan yang akan berdampak pada kualitas hidup dan akses secara ekonomi terhadap makanan yang cukup dan aman.

**Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran**, diartikan untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan dapat dicapai dengan


meningkatkan kemandirian daerah 5 tahun kedepan, sektor UMKM harus dapat menjadi lokomotif utama yang bisa menggerakkan perekonomian Kota Lhokseumawe. Dalam meningkatkan nilai investasi dan penurunan pengangguran mempunyai fokus pertama dengan pemberian kemudahan investasi guna peningkatan nilai investasi, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, retribusi dan aset daerah kedua dengan meningkatkan daya tarik dan promosi wisata ketiga peningkatan lapangan kerja melalui penciptaan wirausaha baru yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

### 3.3.2 Tujuan II : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualias dan Memiliki Daya Saing

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- ❖ Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:
  1. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat;
  2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
  3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
  4. Meningkatnya kualitas keluarga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta pembangunan pemuda.

**Gambar 3.11 Cascading Pencapaian Tujuan 2**



Misi 2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat dan Berkarakter			
Tujuan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing			
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Manusia			
Sasaran	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Meningkatnya kualitas keluarga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta pembangunan pemuda
Indikator Sasaran	Harapan Lama Sekolah ----- Rata-rata Lama Sekolah ----- Angka Literasi SD-SMP Angka Numerasi SD-SMP	Usia Harapan Hidup ----- Prevalansi Stunting	Tingkat Kemiskinan ----- Pengeluaran Riil Perkapita ----- Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Ketegakerjaan	Indeks Pembangunan Keluarga ----- Indeks Desa ----- Indeks Ketimpangan Gender, IPG, Nilai Kota Layak Anak ----- Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlet Berprestasi
Program Prioritas	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul Berkualitas dan Berdaya Saing			

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan Sumber Daya Manusia yang menghasilkan manusia yang cerdas, sehat dan mandiri. Untuk mewujudkan tujuan di atas dirumuskan sasaran pertama

meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat, kedua meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, ketiga meningkatnya taraf hidup masyarakat dan keempat, meningkatnya kualitas keluarga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta pembangunan pemuda.

**Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat**, sasaran pertama ini utamanya untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pendidikan secara merata dan berkualitas untuk menjalankan kehidupan yang produktif. Pemerataan kualitas pendidikan akan menjadi tantangan pembangunan manusia Kota Lhokseumawe untuk lima tahun mendatang. Pemerataan dan perbaikan kualitas pendidikan untuk adalah salah satu upaya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul.

Sasaran Kedua, **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang untuk menikmati umur panjang dan sehat. Derajat kesehatan masyarakat akan semakin tinggi dengan adanya peningkatan kualitas kesehatan di Kota Lhokseumawe melalui pemerataan sarana dan prasarana kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat.

**Meningkatnya taraf hidup masyarakat**, merupakan sasaran ketiga yang diarahkan pada pemantapan kualitas dan kuantitas kesejahteraan perseorangan, keluarga kelompok dan komunitas masyarakat, penguatan peran dan fungsi PSKS dalam penanganan PPKS dan peningkatan PPKS dengan mengefektifkan sistem perlindungan dan jaminan sosial.

Selanjutnya sasaran keempat, **Meningkatnya kualitas keluarga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta pembangunan pemuda**. Untuk meningkatkan kualitas keluarga dibutuhkan peran masyarakat dan keluarga khususnya dalam aktivitas ekonomi untuk keberdayaan keluarga serta memberikan perhatian kepada perlindungan perempuan dan anak dan keterlibatan pemuda dalam pembangunan

### **3.3.3 Tujuan III : Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan**

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 3 : Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- ❖ **Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan**, dengan sasaran pembangunan yaitu :
  1. Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Kota;
  2. Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman;
  3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Menurunnya Risiko Bencana;



**Gambar 3.12 Cascading Pencapaian Tujuan 3**



Misi 3	Memantapkan Penataan Kota Yang Terintegrasi Melalui Infrastruktur dan Lingkungan Yang Berkelanjutan			
Tujuan	Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan			
Indikator Tujuan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang			
Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan menurunnya risiko bencana	
Indikator Sasaran	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ----- Tingkat Pelayanan Jalan	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Risiko Bencana
Program Prioritas	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana			

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan sebuah pembangunan berkelanjutan harus mampu meningkatkan pelayanan infrastruktur, meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup, menurunnya risiko bencana. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan dirumuskan sasaran berikut.

**Meningkatnya pelayanan Infrastruktur Kota**, merupakan sasaran pertama untuk meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung penyelenggaraan wilayah kota yang sesuai dengan pemanfaatan ruang guna mendorong konektivitas perputaran perekonomian masyarakat.

Sasaran Kedua, **Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman**, merupakan pembangunan rumah yang layak huni, lingkungan yang bersih dan sehat, serta ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai.

**Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan menurunnya Risiko Bencana**. Makna berkelanjutan pada misi dan tujuan 3 adalah bahwa pembangunan infrastruktur tetap harus memperhatikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup baik dari segi daya dukung dan daya tampung lingkungan maupun ketahanan iklim serta penataan kota juga harus memperhatikan kesiapsiagaan, adaptasi dan penanggulangan bencana agar perekonomian masyarakat tetap stabil.

### 3.3.4 Tujuan IV : Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- ❖ **Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah,** dengan sasaran pembangunan yaitu :
1. Meningkatnya Akuntabilitas, Profesionalitas dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang Efektif dan Penerapan Inovasi Daerah.

**Gambar 3.13 Cascading Pencapaian Tujuan 4**



Misi 4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		
Tujuan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah		
Indikator Tujuan	Indeks Reformasi Birokrasi		
Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas, Profesionalitas dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Meningkatnya Pelayanan Publik yang efektif dan penerapan inovasi
Indikator Sasaran	Nilai SAKIP ----- Opini BPK	Indeks Profesionalisme ASN ----- Indeks Integritas (SPI) ----- Indeks Maturitas SPI	Indeks Pelayanan Publik ----- Indeks SPBE ----- Indeks Inovasi Daerah
Program Prioritas	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan		

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi untuk reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Organisasi Pemerintah dalam percepatan implementasi reformasi birokrasi secara optimal dengan peningkatan akuntabilitas, profesionalitas ASN dan pelayanan Publik yang baik kepada masyarakat dengan penerapan inovasi daerah. Untuk mencapai tujuan dari Reformasi Birokrasi Pemerintah dirumuskan sasaran berikut.

**Meningkatnya Akuntabilitas, Profesionalitas dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,** merupakan sasaran pertama yang diartikan pertanggungjawaban pemerintah atas segala aktivitasnya kepada masyarakat. Tujuan akuntabilitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah adalah menjamin keberlangsungan pemerintahan dengan transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran, menjaga kepercayaan publik serta memastikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, dan didukung dengan profesionalisme ASN yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

**Meningkatnya Pelayanan Publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah**, pada sasaran ketiga diharapkan kedepan pelayanan publik yang inovatif dan berkualitas di pemerintahan kota sampai di tingkat pemerintahan desa. Efektivitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintahan sendiri adalah dimana ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi tersebut dalam memberikan pelayanan kepada publik

### 3.3.5 Tujuan V : Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya

Dalam rangka pencapaian Misi Pembangunan 5 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya, maka tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- ❖ **Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya**, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
  1. Meningkatnya pembangunan Syariat;
  2. Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya.

**Gambar 3.14 Cascading Pencapaian Tujuan 5**



Misi 5	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	
Tujuan	Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	
Indikator Tujuan	Indeks Pembangunan Syariat	
Sasaran	Meningkatnya Pembangunan Syariat	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya
Indikator Sasaran	Indeks Pembangunan Syariat	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
Program Prioritas	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	

Rumusan dari tujuan di atas menerjemahkan pelaksanaan syariat islam dan budaya yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Pelaksanaan nilai Syariat Islam difokuskan dengan memaksimalkan fungsi dan peran ulama dalam pemahaman dan pengamalan aqidah dan akhlak kepada masyarakat dan pendidikan keagamaan secara optimal, pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius, melakukan legalitas cagar budaya serta memajukan kebudayaan lokal.

**Meningkatnya Pembangunan Syariat**, sasaran ini utamanya senantiasa harus menjunjung tinggi aturan-aturan, norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah dengan mengimplementasikan dan aktualisasi

pemahaman agama baik aqidah dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat.

Sasaran kedua, **Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya.** Pada sasaran ini difokuskan pada menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat dengan pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius, melakukan legalitas cagar budaya serta memajukan kebudayaan lokal.

**Tabel 3.4**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029**

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni</b>											
<b>1</b>	<b>Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe</b>	<b>Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	<b>%</b>	<b>4.21</b>	<b>4.46</b>	<b>4.40-4.50</b>	<b>4.53-4.80</b>	<b>4.53-4.82</b>	<b>4.53-4.84</b>	<b>4.53-4.86</b>	<b>4.53-4.88</b>
			<b>Indeks Gini</b>	<b>Nilai</b>	<b>0.293</b>	<b>0.326</b>	<b>0.293</b>	<b>0.295-0.322</b>	<b>0,293-0.320</b>	<b>0.290-0.318</b>	<b>0.288-0.316</b>	<b>0.286-0.314</b>
<b>1.1</b>		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	22,93	23.24	23.40	23.69	23.80	24.00	24.21	24.42
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	18,12	16.70	16.72	16.75	16.80	16.85	17.00	17.35
			Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.18	9.30	9.42	9.54	9.66	9.78	9.83	9.98
<b>1.2</b>		Meningkatnya Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	%	80.67	83.03	84.89	85.32	86.35	87.24	88.65	89.45
<b>1.3</b>		Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	38.77	39.65	40.53	40.95	41.70	42.21	42.83	43.00



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	0.950 Rendah	0.974 Rendah	1.136 Rendah	1.140 Rendah	1.167 Rendah	1.186 Rendah	1.195 Rendah	1.200 Sedang
			PDRB per kapita	(Rp. Juta)	56.59	59.12	62.38	65.48	68.21	71.20	74.61	77.00
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	2.30	2.30	2.40	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46
			Total Kredit/PDRB	%	38.96	46.67	47.60	48.12	48.91	49.25	50.35	50.80
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,78	8.47	8.24	7.75-7.85	7.65-7.80	7.50-7.75	7.40-7.70	7.30-7.60
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. Juta	130,83	135,96	140.50	142.60	146.21	150.34	152.05	155.60
<b>2</b>	<b>Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter</b>	<b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	<b>Nilai</b>	<b>80.26</b>	<b>80.89</b>	<b>81.75</b>	<b>81,95-82,30</b>	<b>82.10-82.50</b>	<b>82.55-83.00</b>	<b>82.75-83.10</b>	<b>82.90-83.35</b>
<b>2.1</b>		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.54	15.55	15.92	16.00	16.10	16.15	16.20	16.25
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11.27	11.31	11.50	11.58	11.68	11.75	11.80	11.85
			Angka Literasi SD	Angka	63.32	56.72	59.22	61.72	64.22	66.72	69.22	71.72
			Angka Numerasi SD	Angka	55.43	49.44	52.34	55.24	58.14	61.04	63.94	66.84
			Angka Literasi SMP	Angka	58.36	68.34	69.44	70.54	71.64	72.74	73.84	74.94
			Angka Numerasi SMP	Angka	39.5	59.94	61.44	62.94	64.44	65.94	67.44	68.94

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.76	74.93	74.95	75.12	75.35	75.50	75.68	75.88
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20,70	20.80	18.80	17.50	16.30	15.20	14.20	13.34
2.3		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	10.73	10.44	9.01	9.00-8.85	8.85-8.70	8.69-8.58	8.58-8.45	8.45-8.35
			Pengeluaran Riil Perkapita	Rp.	12.125	12.694	13.263	13.832	14.401	14.970	15,539	15.893
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota	%	36.13	39.55	47.09	48.65	49.55	51.97	52.46	53.39
2.4		Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Nilai	66.26	65.86	67.00	68.00	69.10	70.00	71.00	71.80
			Indeks Desa	Nilai	0.7678	0.7762	77.22	77.72	78.32	79.02	79.82	80.32
			Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0.303	0.331	0.310	0.300	0.291	0.290	0.288	0.285
			Indeks Pembangunan Gender	Nilai	96.55	96.59	96.62	96.65	96.68	96.71	96.74	96.77
			Nilai Kota Layak Anak	Nilai	616.47	728.14	730	740	750	760	780	790
			Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	-	22.10	47.25	47.37	51.08	54.00	54.25	54.76

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>3</b>	<b>Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan</b>	<b>Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan</b>	<b>Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang</b>	%	<b>85.01</b>	<b>87.23</b>	<b>88.15</b>	<b>89.03</b>	<b>89.92</b>	<b>90.82</b>	<b>91.73</b>	<b>92.65</b>
<b>3.1</b>		Meningkatnya pelayanan infrastruktur kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai	-	59.26	59.13	60.87	62.86	64.51	66.42	67.98
			Tingkat Pelayanan Jalan	Level/ Nilai	C 0.50	C 0.50	C 0.50	C 0.50	C 0.52	C 0.52	C 0.52	C 0.52
<b>3.2</b>		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	80.83	81.78	83.29	84.80	86.31	87.82	89.33	90.46
<b>3.3</b>		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63.40	69.40	70.00	73.35- 73.85	75.10- 75.65	76.21- 76.50	77.42- 77.71	79.21- 79.52
<b>3.4</b>			Indeks Risiko Bencana	Nilai	134.83	136.99	134.99	132.99	130.99	128.99	126.99	124.99
<b>4</b>	<b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel</b>	<b>Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah</b>	<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Kategori /Nilai	<b>CC 54.79</b>	<b>B 67.70</b>	<b>BB 71.30</b>	<b>BB 72.85</b>	<b>BB 73.32</b>	<b>BB 74.50</b>	<b>BB 75.64</b>	<b>BB 76.80</b>

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4.1		Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Kategori /Nilai	B 60.18	B 61.12	B 68.40	BB 71.20	BB 72.60	BB 73.50	BB 74.30	BB 75.75
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	76.89 sedang	79.42	80.46	81.67	82.80	83.90	85.00	86.70
			Indeks Integritas/ (SPI)	Nilai	69,44	64,37	70.00	72.50	75.50	77.50	78.00	79.00
			Indeks Maturitas SPIP	Level/ Nilai	Level 3 3.031	Level 3 3.031	Level 3 3.200	Leve3 3.300	Level 3 3.400	Level 3 3.500	Level 3 3.600	Level 3 3.600
4.2		Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	D 1.87	B 3.94	A 4.2	A 4.28	A 4.32	A 4.40	A 4.51	A 4.6
			Indeks SPBE	Nilai	2.35	2.80	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	Nilai	36.38	43.66	50.00	52.36	56.80	58.45	61.90	62.00
5	<b>Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya</b>	<b>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya</b>	<b>Indeks Pembangunan Syariat</b>	Nilai	<b>80.65</b>	<b>83.91</b>	<b>84.24</b>	<b>84.91</b>	<b>85.25</b>	<b>85.83</b>	<b>86.10</b>	<b>86.54</b>
5.1		Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	Nilai	80.65	83.91	84.24	84.91	85.25	85.83	86.10	86.54
5.2		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	-	26.85	26.85	40.74	60.19	77.78	87.04	100

### 3.4 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe dengan tetap memperhatikan dan mempedomani arah kebijakan pembangunan pada arah dan kebijakan pemerintah yang lebih tinggi. Pada tingkat Nasional arah kebijakan pembangunan mengacu pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045 Menuju Indonesia Emas, sedangkan Pada tingkat nasional, arah kebijakan Pembangunan mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029, sedangkan Tingkat provinsi arah kebijakan Pembangunan mengacu pada RPJM Aceh Tahun 2025-2029.

#### 3.4.1 Strategi Pembangunan Daerah

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, strategi pada tujuan dan sasaran RPJMK Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.5**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2025-2029**

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMK		STRATEGI RPJMK	
<b>Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni</b>				
<b>Misi 1 : Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe</b>				
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi	1.1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	1.1.1	Peningkatan kualitas produk, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi
	1.2	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	1.2.1	Peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisien serta menjaga stabilitas harga pangan
	1.3	Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran	1.3.1	Peningkatan iklim investasi. Pengembangan potensi ekonomi lokal, Menjalin kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi
			1.3.2	Mendorong sinergi dan harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah
			1.3.3	Diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer
			1.3.4	Meningkatkan UMKM yang kompetitif dan koperasi yang berkembang usahanya
			1.3.5	Meningkatkan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja



VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMK		STRATEGI RPJMK	
<b>Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat dan Berkarakter</b>				
Tujuan 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing	2.1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	2.1.1	Peningkatan dan Pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan
			2.1.2	Meningkatkan Minat baca dan kegemaran membaca bagi Masyarakat
	2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.2.1	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan.
			2.2.2	Intervensi spesifik dan sensitif serta koordinasi lintas sektoral
	2.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	2.3.1	Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran
			2.4	Meningkatnya kualitas keluarga, pemberdayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta pembangunan pemuda
	2.4.2	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pembangunan perdesaan, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif		
	2.4.3	Peningkatan kesadaran gender, penguatan kebijakan yang responsif gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan		
	2.4.4	Pembangunan komprehensif yang mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak		
	2.4.5	Peningkatan Partisipasi aktif Pemuda dan daya saing Keolahragaan		

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMK	STRATEGI RPJMK		
<b>Misi 3 : Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan</b>				
Tujuan 3 : Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan	3.1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota	3.1.1	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah
	3.2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	3.2.1	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur
	3.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan menurunnya Risiko Bencana	3.3.1	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan
			3.4.2	Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial
<b>Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel</b>				
Tujuan 4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah	4.1	Meningkatnya Akuntabilitas, Profesionalitas dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	4.1.1	Penguatan sistem Perencanaan dan Penganggaran, Penguatan Fungsi Pengawasan dan Audit Internal serta reformasi birokrasi
			4.1.2	Menerapkan sistem Merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN
	4.2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang efektif dan penerapan inovasi	4.2.1	Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi
			4.2.2	Meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat
			4.2.3	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		4.2.4	Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM terkait	
		4.2.5	Peningkatan peran aktif pelaku pembangunan untuk menciptakan inovasi daerah	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMK		STRATEGI RPJMK	
<b>Misi 5 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya</b>				
Tujuan 5 : Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	5.1	Meningkatnya Pembangunan Syariat	5.1.1	Memaksimalkan peningkatan dimensi indeks pembangunan syariah
	5.2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya	5.2.1	Penguatan identitas budaya lokal

### 3.4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun. Dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah mengacu pada isu strategis yang berkembang dan menjadi fokus utama pembangunan daerah.

#### 3.4.2.1 Kebijakan Pembangunan Nasional 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap awal atau pondasi pertama dalam mewujudkan Membangun Indonesia Emas 2045 sebagai cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 sebagai perayaan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Visi Indonesia Emas 2045 dilandasi oleh Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatrend global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi.

**Gambar 3.15 Sasaran Utama Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045**



Sumber RPJMN Tahun 2025-2029

RPJPN Tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tahapan periodisasi pembangunan jangka menengah dimanifestasikan terbagi ke dalam 4 (empat) tema besar sebagai berikut.

**Gambar 3.16 Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2025-2029**



Sumber RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 mengusung Visi yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dimana visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh elemen putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara dengan negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai dengan Delapan misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari dukungan keberhasilan pembangunan daerah, begitu pula pembangunan daerah yang perlu melihat kebijakan dan rencana pembangunan nasional, sehingga perlu penyelarasan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 dengan RPJMN 2025-2029.

Adapun Kebijakan nasional dari tujuan dan sasaran nasional yaitu :

1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui:
  - a. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
  - b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
  - c. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan;
  - d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan.
2. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hilirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, dan industri energi dan green hydrogen)
3. Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu fatty acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit, bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan.
4. Hilirisasi lanjutan gas bumi, terutama untuk Produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti olefin, aromatik, DME.
5. Pengembangan Pelabuhan Krueng Geukeuh Pembangunan rumah murai bersanitasi baik bagi pekeda, MBR, Gen Z, dan mitenial di kawasan perkotaan Lhokseumawe (PHTC)
6. Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara.
7. Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe.
8. Pengembangan kota agropolitan Lhokseumawe
9. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. Fauziah.
10. Bireuen (PHTC) Preservasi jalan ruas Lhokseumawe-Bireuen.
11. Pengembangan Bandar Udara Malikussaleh (peningkatan terminal).



12. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan /pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.

#### **3.4.2.2 Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2025-2029**

Rencana pembangunan daerah Provinsi Aceh tahun 2025-2029 merupakan bentuk implementasi dari filosofi cita-cita Gubernur dan wakil Gubernur Aceh yaitu “*Aceh Maju Meuseuraya*” dimana cita-cita tersebut diejawantahkan dalam rumusan visi Provinsi Aceh sebagai “Aceh Islami, Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan”. RPJM Aceh 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari implementasi RPJP Aceh Tahun 2025-2045. Visi tersebut dilaksanakan melalui sembilan misi yaitu:

1. Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah
2. Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA;
3. Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas;
4. Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional Aceh, koneksitas, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas;
6. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum; dan
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya

#### **3.4.2.3 Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe RPJMN 2025-2029**

Strategi dan arah kebijakan merupakan unsur dalam perencanaan yang berisikan upaya strategis dan langkah-langkah konkrit Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif. Hal ini dimaksudkan agar strategi dan arah kebijakan dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi dalam menjalankan program perangkat daerah. Sehingga dalam implementasi RPJMD ini tidak hanya melaksanakan program-program yang telah ditetapkan, tetapi juga mendorong sebuah pemikiran dan cara baru dalam menjalankan Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang memiliki tantangan dan peluang kompleks ke depan. Pemanfaatan Information and Communication Technology (ICT) menjadi pendukung utama dalam melakukan inovasi pada segala aspek pembangunan Kota Lhokseumawe sebagai kota menengah harus dapat membangun irama pembangunan yang inklusif melibatkan dan sekaligus menyentuh masyarakat di segala level ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai Misi pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.6**  
**Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe**

No	Misi	Arah Kebijakan		Ket
1	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	1.1	Peningkatan nilai tambah produk, mendorong inovasi dalam produksi, pengembangan sistem manajemen SDM yang profesional dan berbasis teknologi untuk mendukung produktivitas SDM pada sektor perdagangan	
		1.2	Meningkatkan dan mendorong usaha mikro (industri rumah tangga), industri pengolahan dan industri kreatif	
		1.3	Meningkatkan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan	
		1.4	Peningkatan daya saing dan produktivitas, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan sektor pertanian (sawit, kakao, kelapa dan tembakau)	
		1.5	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Peningkatan Pekebun di STDB, Peningkatan Jaminan Sosial Pekebun, dan Peningkatan Pekebun ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	
		1.6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Produksi Pangan lokal</li> <li>• Diversifikasi dan Intensifikasi Pangan</li> <li>• Penguatan Cadangan pangan</li> <li>• Perbaikan infrastruktur pertanian</li> <li>• Pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisiensi</li> <li>• Menjaga stabilitas harga pangan</li> </ul>	
		1.7	Meningkatnya akses investasi dengan memudahkan perijinan	
		1.8	Pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas promosi pariwisata	
		1.9	Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Peningkatan Kemandirian Fiskal dan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi	
		1.10	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan produktivitas BUMD serta Penataan kelembagaan dan proses bisnis Perangkat Daerah pengampu	
		1.11	Penguatan kelembagaan, permodalan, dan daya saing UMKM serta usaha koperasi	
		1.12	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta mendorong partisipasi aktif dalam pasar kerja	
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	2.1	Peningkatan akses dan mutu pendidikan formal, informal dan inklusi serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar	

No	Misi	Arah Kebijakan		Ket
		2.2	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah	
		2.3	Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan	
		2.4	Peningkatan sosialisasi budaya baca dan literasi, penyediaan bahan bacaan dan akses buku serta penguatan infrastruktur perpustakaan	
		2.5	Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan Kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga Kesehatan	
		2.6	Penguatan komitmen politik dan kebijakan yang kuat untuk penanganan prevalensi stunting pada balita	
		2.7	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memperkuat rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	
		2.8	Peningkatan akses jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja rentan/informal	
		2.9	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	
		2.10	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan prasarana serta sarana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.	
		2.11	Meningkatkan sistem perencanaan dan Pengelolaan penganggaran dana desa yang transparan, akuntabel dan disiplin.	
		2.12	Meningkatkan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	
		2.13	Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan	
		2.14	Meningkatkan Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan daya saing pemuda	
		2.15	Meningkatkan Pengembangan Atlet dan prestasi olah raga dengan peningkatan sarana dan prasarana olah raga	
3	Memantapkan Penataan Kota Yang Terintegrasi Melalui Infrastruktur dan Lingkungan Yang Berkelanjutan	3.1	Meningkatkan kualitas sanitasi, dan penyediaan air minum, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat ekonomi.	
		3.2	Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota dan pengelolaan sumber daya air	
		3.3	Meningkatkan Pengimplementasian Tata ruang terhadap Pembangunan Kota	
		3.4	Peningkatan prasarana dan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan manajemen lalu lintas	

No	Misi	Arah Kebijakan		Ket
		3.5	Peningkatan dan Perbaikan kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.	
		3.6	Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah	
		3.7	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	
		3.9	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana	
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	4.1	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi serta Peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah	
		4.2	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Penataan Organisasi dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	
		4.3	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN serta peningkatan kualitas SDM ASN	
		4.4	Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik serta peningkatan keterbukaan informasi	
		4.5	Memantapkan Pelaksanaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Pelaksanaan Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	
		4.6	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	
		4.7	Penguatan organisasi dan tata kelola SPBE, pengembangan layanan publik berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur TIK yang terintegrasi, dan peningkatan kompetensi SDM. serta koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah.	
		4.8	Meningkatkan inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	
5	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	5.1	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat islam serta memaksimalkan fungsi dan peran ulama dalam pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius	
		5.2	Peningkatan kualitas edukasi dan dakwah	
		5.3	Peningkatan dan optimalisasi pertumbuhan ZISWAF serta pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF tepat sasaran	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
		5.4 Melakukan legalitas cagar budaya dan pelestarian warisan budaya tak benda serta memajukan kebudayaan lokal	

#### **3.4.2.4 Pentahapan Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030**

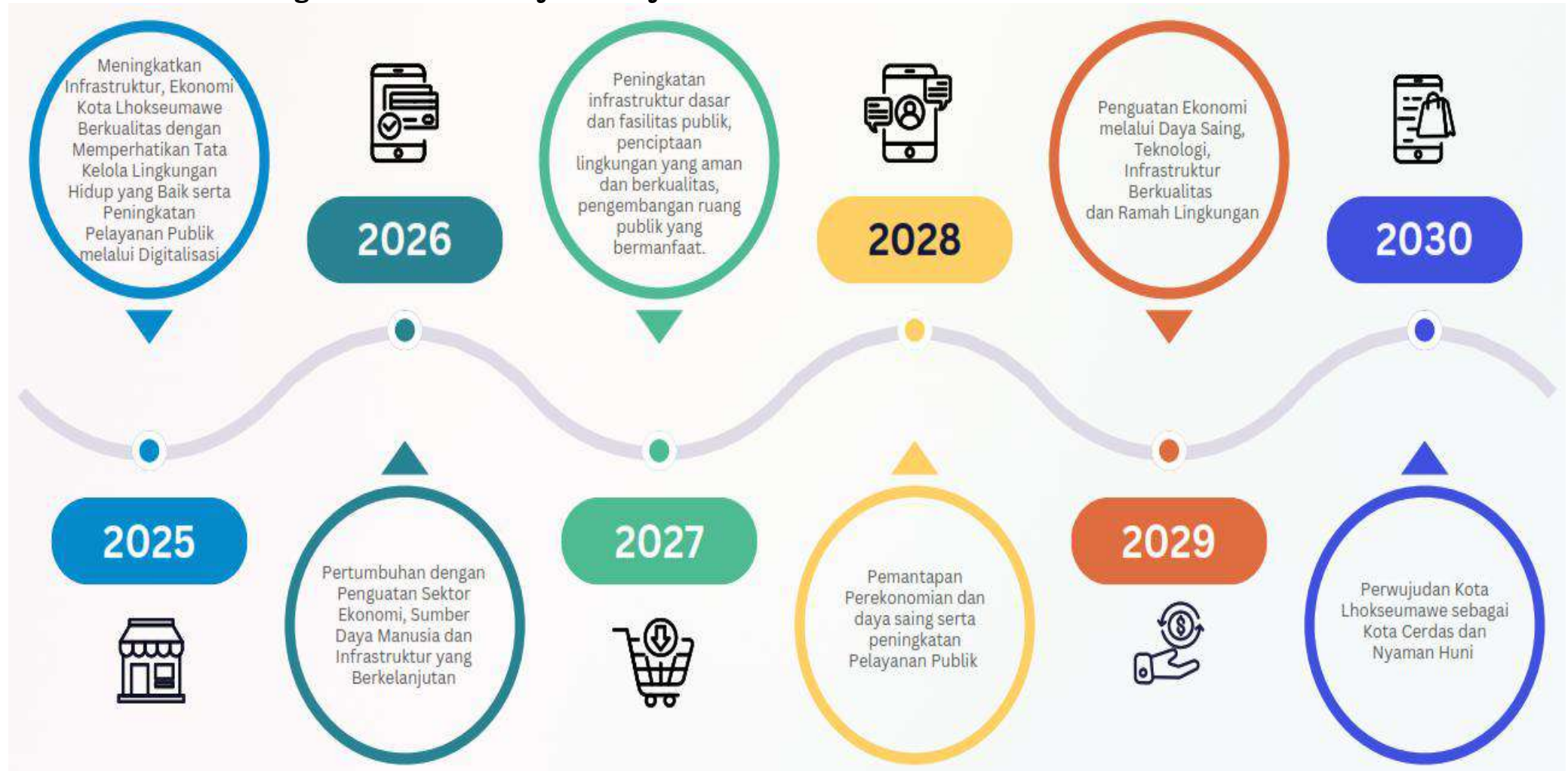
Pentahapan dan prioritas arah kebijakan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan pencapaian masing-masing sasaran pada setiap misi pembangunan. Dengan demikian satu sasaran dapat dilakukan dalam satu periode lima tahunan, bahkan dapat juga lebih dari satu periode pentahapan lima tahunan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pokok, pembangunan jangka menengah membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai agenda utama Kepala Daerah. Tahapan dan skala prioritas mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap tujuan dan sasaran dalam misi pembangunan jangka menengah ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan.

Penetapan tema tahapan pembangunan jangka menengah menggambarkan urutan prioritas waktu pelaksanaan rencana pembangunan sesuai sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan secara simultan. Pentahapan ini terdiri atas 5 tahapan pembangunan yang mempertimbangkan kebijakan dan strategi prioritas untuk masing-masing tahapan. Tahapan pertama RPJMK dilaksanakan pada tahun 2026 yang difokuskan untuk Peningkatan Pertumbuhan dan Penguatan Sektor Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan dikemas kedalam tema pembangunan tahunan yang secara simultan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMK. Tema pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026 sampai dengan tahun 2030 adalah ” “PENGUATAN MODAL DASAR TRANSFORMASI”, sesuai dengan visi RPJPK Lhokseumawe tahap 1 yang dijabarkan kedalam tema tahunan mulai tahun 2026 sampai dengan 2030. Secara skematik, keterkaitan tema pembangunan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030 disajikan pada gambar berikut dan Penetapan periodisasi arah kebijakan pembangunan pada tabel berikut.



**Gambar 3.17**  
**Tema Pembangunan untuk Perwujudan Tujuan dan Sasaran RPJMK Lhokseumawe Tahun 2026-2030**



**Tabel 3.7**  
**Pentahapan dan Prioritas Kewilayah Pembangunan Daerah Tahun 2026-2030**

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1.1 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah</b>	Peningkatan kualitas produk, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi	Peningkatan nilai tambah produk, mendorong inovasi dalam produksi, pengembangan sistem manajemen SDM yang profesional dan berbasis teknologi untuk mendukung produktivitas SDM pada sektor perdagangan	- Optimalisasi pasar rakyat - Optimalisasi TPID	- Meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibutuhkan oleh sektor perdagangan unggulan - Memperkuat peran TPID	- Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja di sektor perdagangan. - Memastikan keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang atau jasa	- Meningkatkan konsumsi produk dalam negeri melalui program-program untuk UMKM - penguatan sisi persediaan guna meningkatkan produktivitas	- Mendorong efisiensi dalam distribusi barang dan jasa untuk memastikan kelancaran arus barang - Menjaga kestabilan harga untuk mendorong daya beli masyarakat	- Mendorong transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal dan produktivitas - Menjaga kestabilan harga untuk mendorong daya beli masyarakat	Kota Lhokseumawe	DISPRINDAG KOP-Perdagangan
		Meningkatkan dan mendorong usaha mikro (industri rumah tangga), industri pengolahan dan industri kreatif	Melakkan pendataan pelaku IKM yang masih produktif dan mendorong untuk legalitas produk	Melakukan pemetaan potensi bahan baku likal, keterampilan tenaga kerja dan produk IKM 2027 2.Mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk peningkstsn keterampilan teknologi dan inofasi untuk peningkatan kualitas produk IKM.	Memantau industri kecil meneengah dalam penyebaran pusat domestik maupun Internasional termasuk dalam Platform digital	Memprioritaskan digitalisasi IKM dengan Platform, market plase untuk memperluas jangkauan pasar dengan meningkatkan daya saing di era digital	Melaksanakan perumusan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitas pemberian izin bidang industri. pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha kawasan industri yang izin nya dikeluarkan oleh pemerintah daerah	Melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri unggulan daerah	Kota Lhokseumawe	DISPRINDAG KOP - Perindustrian
		Peningkatan daya saing dan produktivitas, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan	Meningkatkan pengawasan barang bahan pokok dan penting.	Meningkatkan pengawasan timbangan .	Peningkatan distribusi pemasaran di wilayah kota lhokseumawe serta pendataan usaha dagang wilayah Lhokseumawe.	Meningkatkan Pemantauan harga dan stok barang di pasar	Meningkatkan pengawasan timbangan pedagang di pasar	Peningkatan retribusi daerah di wilayah Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	DISPERINDAGK OP - Perdagangan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatkan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan.	Meningkatkan sumberdaya manusia dalam pengelolaan pertanian dan perikanan	Meningkatkan Pengolahan bahan baku menjadi produk akhir yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi	Meningkatkan produktifitas hasil pertanian	Meningkatkan produktifitas hasil perikanan	Meningkatkan kualitas ternak lokal	Meningkatkan ketahanan pangan		DKPPP
		Peningkatan daya saing dan produktivitas, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan sektor pertanian (sawit, kakao, kelapa dan tembakau)	Meningkatkan Kapasitas Petani dan Perkebunan Sawit Rakyat	Meningkatkan Kapasitas dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Pengembangan Infrastruktur Pengolahan Lokal	Meningkatkan Kemitraan dengan Kelembagaan Pekebun	Melakukan Pemberdayaan UMKM untuk memproduksi hilir dasar hasil perkebunan	Meningkatkan Kemitraan dan Kolaborasi dengan Pemerintah atau Badan Pembiayaan Perkebunan	Kota Lhokseumawe	DKPPP
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Peningkatan Pekebun di STDB, Peningkatan Jaminan Sosial Pekebun, dan Peningkatan Pekebun ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Mempercepat Pembentukan kelembagaan kelompok Pekebun	Mempercepat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	Peningkatan Pekebun yang terdaftar di STDB	Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan dan Sosial Pekebun	Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun	Peningkatan Pekebun yang terdaftar di ISPO	Kota Lhokseumawe	DKPPP
<b>1.2 Ketersediaan dan cadangan pangan</b>	Peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisien serta menjaga stabilitas harga pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Produksi Pangan lokal</li> <li>• Diversifikasi dan Intensifikasi Pangan</li> <li>• Penguatan Cadangan pangan</li> <li>• Perbaikan infrastruktur pertanian</li> <li>• Pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisiensi</li> <li>• Menjaga stabilitas harga pangan</li> </ul>	Meningkatnya Produksi Pangan lokal	Diservikasi Pangan	Penguatan Cadangan pangan	Perbaikan infrastruktur pertanian	Pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisiensi	Menjaga stabilitas harga pangan	Kota Lhokseumawe	DKPPP
<b>1.3 Meningkatnya kemandirian</b>	Peningkatan iklim investasi. Pengembangan	Meningkatnya akses investasi dengan memudahkan perijinan	Perbaikan Iklim Investasi, Daya Saing produl	Optimalisasi Investasi / Penanaman	Pengembangan Sektor Strategis Pendukung	Penguatan Investasi dan kemudahan Penanaman Modal	Pemantapan Penanaman Modal Dalam Negeri	Konsistensi Penyediaan Insentif Penanaman Modal	Kota Lhokseumawe	DPMTSP NAKER

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>daerah dan menurunnya pengangguran</b>	potensi ekonomi lokal, Menjalin kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi		Lokal, Kualitas Pelayanan Perizinan untuk Mendorong Kemandirian Daerah	Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Untuk Mendorong Peningkatan Investasi	Pembangunan Untuk Mendorong Peningkatan Investasi	Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Untuk Mendorong Peningkatan Investasi	(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Melalui Kebijakan Kemudahan Penanaman Modal /Investasi Penanaman Modal	/ Fasilitasi Iklim Investasi		
		Pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas promosi pariwisata	Mendorong pengelolaan destinasi yang ramah lingkungan dan menerapkan Gerakan Wisata Bersih sebagai bagian dari upaya keberlanjutan.	Mempercepat pengembangan desa wisata melalui kelompok sadar wisata (pokdarwis) untuk meningkatkan daya tarik dan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.	- Mengintegrasikan teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, dari perencanaan perjalanan hingga pengelolaan destinasi. - Penyusunan RIPDA	Menciptakan keberagaman produk wisata yang menarik bagi segmen pasar yang berbeda dengan prinsip pariwisata berkelanjutan dan memberikan pengalaman otentik yang mencerminkan budaya, sejarah dan alam lokal.	Melakukan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif secara terpadu dan terintegrasi, termasuk mendukung event daerah dan mendukung promosi investasi di sektor pariwisata	Mewujudkan investasi di sektor pembiayaan usaha pariwisata sebagai bagian dari upaya bersama untuk mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.	Seluruh kecamatan kota Lhokseumawe	DISPORA PAR Pariwisata
	Mendorong sinergi dan harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah	Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Peningkatan Kemandirian Fiskal dan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi	penguatan pendapatan asli daerah (PAD)	optimalisasi transfer ke daerah	menyelaraskan kebijakan fiskal daerah (APBD) dengan kebijakan fiskal nasional	harmonisasi kebijakan fiskal melalui UU HKPD untuk mendukung desentralisasi fiskal	penguatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi dan peningkatan SDM	peningkatan efektivitas dan akuntabilitas anggaran	Kota Lhokseumawe	BPKD
	Diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah peningkatan produktivitas BUMD serta Penataan kelembagaan dan proses bisnis Perangkat Daerah pengampu	Melakukan evaluasi dan akuntabilitas kinerja OPD dan BUMD	Mendorong sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan peran BUMD untuk fokus pada peningkatan pendapatan	Menggali potensi PAD yang belum dimanfaatkan dan Memperkuat kewenangan daerah dalam pemungutan pajak daerah	Menerapkan teknologi digital dalam pemungutan pajak untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi	Memberikan dukungan finansial dan insentif untuk sektor-sektor lokal yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi	kemitraan dengan swasta untuk mengembangkan potensi daerah	Kota Lhokseumawe	BPKD, PUPR, DISHUB, DLH, DISPERINDAGK OPBUMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan UMKM yang kompetitif dan koperasi yang berkembang usahanya	Penguatan kelembagaan, permodalan, dan daya saing UMKM serta usaha koperasi	Peningkatan akses permodalan	Penguatan ekosistem dan kemitraan	Penguatan ekosistem dan kemitraan	Fasilitasi pemasaran hasil UMKM	penguatan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM	Peningkatan literasi digital UMKM	Kota Lhokseumawe	DISPERINDAG KOP
			Menyederhanakan dan memangkas birokrasi dan perizinan dan penerbitan legalitas koperasi	Memperkuat sistem pengawasan koperasi secara berkala untuk memastikan kesehatan dan akuntabilitas koperasi	Mengembangkan dan mengoptimalkan lembaga pembiayaan khusus untuk koperasi	Mendorong koperasi untuk bertransformasi secara digital agar lebih efisien	Mendorong koperasi untuk bertransformasi secara digital agar lebih efisien	Mendorong koperasi untuk mencapai skala ekonomi yang lebih besar agar lebih efisien	Kota Lhokseumawe	DISPERINDAGK OP
	Meningkatkan Kompetensi dan partisipasi tenaga kerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta mendorong partisipasi aktif dalam pasar kerja	Pemetaan kebutuhan kompetensi sesuai prioritas sektor industri	Peningkatan pelatihan vokasi dasar dan Sertifikasi kompetensi berbasis industri	Penguatan program Pelatihan kewirausahaan bagi generasi muda, perempuan, dan kelompok rentan.	Optimalisasi Kolaborasi pendidikan vokasi dengan dunia usaha industri	Meningkatkan Partisipasi angkatan Kerja dalam Sektor Formal dan Produktif Melalui Pelatihan dan Penguatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Pemantapan Kolaborasi Aktif Antara Pemerintah, Industri dan Lembaga untuk pelaksanaan Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Berbasis Kebutuhan Pasar	Kota Lhokseumawe	DPMTSP NAKER (Tenaga Kerja)
<b>2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat</b>	Peningkatan dan Pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan formal, informal dan inklusi serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar	1.Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal untuk pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP 2. Sosialisasi Tentang Wajib Belajar 13 (tiga belas tahun) dan Penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS)	1.Koordinasi dengan instansi terkait tentang Penyusunan Muatan Lokal untuk pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP 2. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)	1.Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal untuk pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP 2. Verifikasi dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS)	1.Pendampingan Kurikulum Muatan Lokal untuk pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP 2. Pendampingan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	1.Pendampingan Kurikulum Muatan Lokal untuk pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP 2. Pendampingan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	1.Pendampingan Kurikulum Muatan Lokal untuk pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP 2. Pendampingan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)	- 75 Satuan Pendidikan Jenjang SD - 35 Satuan Pendidikan Jenjang SMP	DINAS P&K



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			1. Pemenuhan Sarana Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Optimalisasi dan Pemenuhan Sarana /Prasarana pada satuan pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP	1. Pemenuhan Sarana Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Optimalisasi dan Pemenuhan Sarana /Prasarana pada satuan pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP	1. Pemenuhan Sarana Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Optimalisasi dan Pemenuhan Sarana /Prasarana pada satuan pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP	1. Pemenuhan Sarana Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Optimalisasi dan Pemenuhan Sarana /Prasarana pada satuan pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP	1. Pemenuhan Sarana Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Optimalisasi dan Pemenuhan Sarana /Prasarana pada satuan pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP	1. Pemenuhan Sarana Digitalisasi Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Optimalisasi dan Pemenuhan Sarana /Prasarana pada satuan pendidikan dasar Jenjang SD dan SMP	- 75 Satuan Pendidikan Jenjang SD - 35 Satuan Pendidikan Jenjang SMP	DINAS P&K
			Mendorom Implementasi Pendidikan Karakter (Keagamaan)	Mendorom Implementasi Pendidikan Karakter (Keagamaan)	Mendorom Implementasi Pendidikan Karakter (Keagamaan)	Mendorom Implementasi Pendidikan Karakter (Keagamaan)	Mendorom Implementasi Pendidikan Karakter (Keagamaan)	Mendorom Implementasi Pendidikan Karakter (Keagamaan)	Kota Lhokseumawe	DSI-PD Pendidikan (Dayah)
		Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas PK Kota Lhokseumawe	DIS P&K
		Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan	Pengawasan terhadap Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang memadai pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Lhokseumawe	Penguatan Akses MPD terhadap Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Peningkatan Fungsi MPD sebagai Mediator antara Pemerintah Kota dan Masyarakat Pendidikan	Meningkatkan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lhokseumawe	Meningkatkan Pengawasan terhadap Pelestarian Nilai-nilai Islami dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lhokseumawe	Konsolidasi hasil dan keberlanjutan program		MPD
	Meningkatkan Minat baca dan kegemaran membaca bagi Masyarakat	Peningkatan sosialisasi budaya baca dan literasi, penyediaan bahan bacaan dan akses buku serta penguatan	Optimalisasi Pengembangan Bahan Bacaan yang relevan melalui pengadaan	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dan Perpustakaan	Pengembangan Perpustakaan Kecamatan, Pojok Baca Digital dan Perpustakaan dalam Binaan Dinas	Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan dalam Binaan Dinas Perpustakaan dan	Mewujudkan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	Mewujudkan Perpustakaan Perpustakaan Digital dan Hybrid	4 KECAMATAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARPUS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		infrastruktur perpustakaan	koleksi pada Perpustakaan Umum dan penerimaan Bantuan Bahan Bacaan Bermutu pada Perpustakaan Gampong dan Taman Baca Masyarakat	Keliling Bagi SD dan SMP	Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe	Kearsipan Kota Lhokseumawe				
2.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan.	Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan Kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga Kesehatan	Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan	Penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas, Pemenuhan SDM	Optimalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas, Peningkatan status Puskesmas menjadi BLUD, Pembangunan RSU Lhokseumawe, Pelatihan Tenaga Kesehatan,	Optimalisasi Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas dan BLUD Puskesmas, RSU Lhokseumawe, Pelatihan Tenaga Kesehatan	Optimalisasi status Puskesmas menjadi BLUD, RSU Lhokseumawe, Pelatihan Tenaga Kesehatan	Pemantapan status Puskesmas menjadi BLUD, Pelatihan Tenaga Kesehatan	4 KECAMATAN	DINKES
	Intervensi spesifik dan sensitif serta koordinasi lintas sektoral	Penguatan komitmen politik dan kebijakan yang kuat untuk penanganan prevalensi stunting pada balita	Pembangunan rumah gizi gampong dan pengadaan PMT lokal	Pembangunan rumah gizi gampong dan pengadaan PMT lokal	Pembangunan rumah gizi gampong dan pengadaan PMT lokal	Pembangunan rumah gizi gampong dan pengadaan PMT lokal	Pembangunan rumah gizi gampong dan pengadaan PMT lokal	Pembangunan rumah gizi gampong dan pengadaan PMT lokal	Kota Lhokseumawe	Dinas Kesehatan
			Pendampingan dan Penyuluhan '- Pendataan dan Pemantauan data Catin '- Dapur sehat Atasi Stunting '- KIE , Minilokakarya, Kader IMP,	- Pendampingan dan Penyuluhan '- Pendataan dan Pemantauan data Catin '- Dapur sehat Atasi Stunting '- KIE , Genting Kader IMP,	- Pendampingan dan Penyuluhan '- Pendataan dan Pemantauan data Catin '- Dapur sehat Atasi Stunting '- KIE , Genting Kader IMP,	- Pendampingan dan Penyuluhan '- Pendataan dan Pemantauan data Catin '- Dapur sehat Atasi Stunting '- KIE , Minilokakarya, Kader IMP,	- Pendampingan dan Penyuluhan '- Pendataan dan Pemantauan data Catin '- Dapur sehat Atasi Stunting '- KIE , Genting , Kader IMP,	- Pendampingan dan Penyuluhan '- Pendataan dan Pemantauan data Catin '- Dapur sehat Atasi Stunting '- KIE , Genting , Kader IMP,	Lokus Prioritas di 68 Gampong yang ditetapkan dalam SK Walikota Lhokseumawe	DP3AP2KB

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Membangun sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan program pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu.	Peningkatan Kesadaran dan Edukasi Masyarakat melalui kampanye dan edukasi gizi yang melibatkan keluarga, pengasuh, dan masyarakat	Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas melalui program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan kapasitas pekerja sosial di lingkungan dinas sosial	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Sosial yang mendukung pencegahan stunting, dan dukungan sosial bagi keluarga miskin	Mendorong kebijakan daerah yang mendukung penanganan stunting dengan komitmen politik yang kuat, termasuk alokasi anggaran yang memadai serta pengawasan pelaksanaan program.	Pengembangan Sistem Data dan Monitoring Terpadu untuk memantau prevalensi stunting, evaluasi intervensi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti yang responsif dan akurat.	Kota Lhokseumawe	Dinas Sosial
2.3 Meningkatkan taraf hidup masyarakat	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memperkuat rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	. Peningkatan kualitas DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional -Pengadaan Penyediaan Sandang untuk Lansia	. Peningkatan kualitas DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin - Peningkatan bantuan untuk PPKS Pemberdayaan masyarakat miskin	. Peningkatan kualitas DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin - Peningkatan bantuan untuk PPKS Pemberdayaan masyarakat miskin	. Peningkatan kualitas DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin - Peningkatan bantuan untuk PPKS Pemberdayaan masyarakat miskin	. Peningkatan kualitas DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin - Peningkatan bantuan untuk PPKS Pemberdayaan masyarakat miskin	. Peningkatan kualitas DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin - Peningkatan bantuan untuk PPKS Pemberdayaan masyarakat miskin	Kota Lhokseumawe	Dinas Sosial
		Peningkatan akses jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja rentan/informal	Melakukan sinergitas antar sektor dalam penguatan akses untuk jamsostek tenagakerja rentan	Mengidentifikasi pekerja rentan yang berhak mendapatkan perlindungan	Memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi pekerja rentan	Memastikan setiap pekerja rentan menjadi peserta aktif jamsostek tenaga kerja	Memastikan setiap pekerja rentan menjadi peserta aktif jamsostek tenaga kerja	Memastikan setiap pekerja rentan menjadi peserta aktif jamsostek tenaga kerja	Kota Lhokseumawe	DPMTSP NAKER (Tenaga Kerja)
<b>2.4 Meningkatkan Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan</b>	Peningkatan kualitas keluarga dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan keluarga itu sendiri.	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	Pusat Pelayanan Konseling, Keluarga Sejahtera, Penguatan Balai Penyuluhan, Orientasi Tim Pendamping	Pusat Pelayanan Konseling, Keluarga Sejahtera, Penguatan Balai Penyuluhan, Orientasi Tim Pendamping	Pusat Pelayanan Konseling, Keluarga Sejahtera, Penguatan Balai Penyuluhan, Orientasi Tim Pendamping Keluarga, Pembinaan PIKR R	Pusat Pelayanan Konseling, Keluarga Sejahtera, Penguatan Balai Penyuluhan, Orientasi Tim Pendamping Keluarga, Pembinaan PIKR R	Pusat Pelayanan Konseling, Keluarga Sejahtera, Penguatan Balai Penyuluhan, Orientasi Tim Pendamping	Pusat Pelayanan Konseling, Keluarga Sejahtera, Penguatan Balai Penyuluhan, Orientasi Tim Pendamping	Lokus Gampong KB yang ada dalam SIGA	DP3AP2 KB

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>Anak serta pembangunan Pemuda</b>			Keluarga , Pembinaan PIKR R BKR di Gampong termasuk UPPKA	Keluarga , Pembinaan PIKR R BKR di Gampong termasuk UPPKA	BKR di Gampong termasuk UPPKA	BKR di Gampong termasuk UPPKA	Keluarga , Pembinaan PIKR R BKR di Gampong termasuk UPPKA	Keluarga , Pembinaan PIKR R BKR di Gampong termasuk UPPKA		
	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pembangunan perdesaan, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan prasarana serta sarana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	Penataan kelembagaan kemasyarakatan desa dan lembaga adat melalui pendataan dan penertiban regulasi desa terkait lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.	Penguatan kapasitas pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan baik oleh pemerintah daerah, pemerintah desa maupun pihak ketiga.	Optimalisasi fungsi dan sinkronisasi peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dengan pemerintahan desa melalui koordinasi rutin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.	Optimalisasi fungsi dan sinkronisasi peran lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dengan pemerintahan desa melalui koordinasi rutin dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan.	68 Gampong	DPMG
		Menigkatkan sistem perencanaan dan Pengelolaan penganggaran dana desa yang transparan, akuntabel dan disiplin.	Penguatan sistem administrasi pemerintahan desa dengan penataan siklus pengelolaan keuangan desa, dan penataan aparatur pemerintah desa.	Penataan kelembagaan pemerintahan desa dengan pelaksanaan pelaksanaan demokratisasi di desa, peningkatan kapasitas, penataan sarana prasarana desa dan kerja sama antar desa.	Penguatan koordinasi kelembagaan desa dengan meningkatkan sinergi, kerjasama, dan harmonisasi antara pemerintah desa, BPD/tuha peut gampong, lembaga kemasyarakatan desa serta penataan sarana prasarana dan kerja sama antar desa.	Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik desa, penataan kewenangan dan kerja sama desa.	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Penataan Desa dan Efektifitas Kerjasama Desa.	Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Penataan Desa dan Efektifitas Kerjasama Desa.	68 Gampong	DPMG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Peningkatan kesadaran gender, penguatan kebijakan yang responsif gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Meningkakan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Integrasi analisis gender dalam perencanaan penganggaran pelaksanaan dan evaluasi	penegakan aturan yang melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan	pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya kelompok rentan di daerah terpencil/pesisir	audit gender secara berkala untuk mengukur capaian dan kendala	program edukasi masyarakat untuk menghapus budaya kekerasan berbasis gender	Memperluas akses perempuan pada teknologi, internet dan platform ekonomi digital	4 Kecamatan	DP3AP2KB
	Pembangunan komprehensif yang mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak	Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Advokasi dan Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Advokasi dan Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Advokasi dan Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Advokasi dan Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Advokasi dan Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP	Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP 2. Advokasi dan Pendampingan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD dan SMP	- 75 Satuan Pendidikan Jenjang SD - 35 Satuan Pendidikan Jenjang SMP	DP3AP2KB,
			Menjamin Forum Anak sebagai wadah partisipasi resmi di tingkat Kabupaten/Kota dan Nasional, serta peningkatan kualitas perlindungan hak anak, melalui	Mendorong Partisipasi masyarakat dan forum anak sebagai mitra dalam pengambilan keputusan serta peningkatan kualitas	Memperluas cakupan Gampong/Desa Ramah Anak serta peningkatan kualitas perlindungan hak anak, melalui berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan	Monitoring capaian indikator hak anak (pendidikan, kesehatan, perlindungan dan partisipasi) serta peningkatan kualitas perlindungan hak anak, melalui berbagai program	Meningkatkan monitoring dan evaluasi berbasis indikator pemenuhan hak anak serta peningkatan kualitas perlindungan hak anak, melalui	Mendorong pencapaian target KLA menuju Indonesia Layak Anak 2030 serta peningkatan kualitas perlindungan hak anak, melalui berbagai program	Kecamatan dan Gampong	DP3AP2KB,



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan	perlindungan hak anak, melalui berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan		Pencegahan dan penanganan kekerasan	berbagai program pencegahan dan penanganan kekerasan	Pencegahan dan penanganan kekerasan		
	Peningkatan Partisipasi aktif Pemuda dan daya saing Keolahragaan	Meningkatkan Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan daya saing pemuda	Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan karakter pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan berdaya saing.	Membuka akses dan peluang bagi pemuda untuk mendapatkan keterampilan kerja yang relevan dan menciptakan kesempatan usaha, termasuk pemberdayaan pemuda di berbagai sektor.	Mengembangkan karakter pemuda yang kuat melalui pendidikan karakter, kepemimpinan, dan nilai-nilai kebangsaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan.	Mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi oleh pemuda sebagai dasar pembangunan kepemudaan yang lebih modern dan relevan.	Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga, organisasi kepemudaan, serta sektor swasta dan pemerintah untuk menguatkan gerakan kepemudaan.	Mewujudkan pemuda yang berdaya saing, inovatif, dan siap berkontribusi dalam pembangunan nasional, dengan peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui kemitraan dan kerja sama lintas sektor.	Seluruh kecamatan kota Lhokseumawe	DISPORA PAR
		Meningkatkan Pengembangan Atletik dan prestasi olah raga dengan peningkatan sarana dan prasarana olah raga	Membangun fasilitas olahraga baru yang modern dan memenuhi standar internasional untuk berbagai cabang olahraga.	Melakukan pembinaan untuk atlet berprestasi guna meraih prestasi olahraga pada pekan POPDA dan PORA	Melakukan renovasi dan pemeliharaan secara berkala pada sarana dan prasarana yang sudah ada agar tetap layak dan aman digunakan.	Memastikan ketersediaan peralatan olahraga yang memadai dan sesuai dengan standar terbaru untuk mendukung latihan atlet.	Melatih para pengelola fasilitas agar memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dalam mengelola sarana dan prasarana olahraga secara profesional.	Tercapainya prestasi olahraga serta terwujudnya sarana dan prasarana olahraga yang tercukupi sesuai dengan kebutuhan atlet	Seluruh kecamatan kota Lhokseumawe	DISPORA PAR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>3.1 Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Kota</b>	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas sanitasi, dan penyediaan air minum, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat ekonomi	SDA : Pengembangan SPAM jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan PerpipaanCIPTA KARYA :- Penguahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strtegis daerah kabupaten/kota- Peningkatan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SDA : Pengembangan SPAM jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan PerpipaanCIPTA KARYA :Penguahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strtegis daerah kabupaten/kota- Peningkatan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SDA : Pengembangan SPAM jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan PerpipaanCIPTA KARYA :Penguahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strtegis daerah kabupaten/kota- Peningkatan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SDA : Pengembangan SPAM jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan PerpipaanCIPTA KARYA :Penguahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strtegis daerah kabupaten/kota- Peningkatan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SDA : Pengembangan SPAM jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan PerpipaanCIPTA KARYA :Penguahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strtegis daerah kabupaten/kota- Peningkatan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SDA : Pengembangan SPAM jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan PerpipaanCIPTA KARYA :Penguahsuaian bangunan gedung untuk kepentingan strtegis daerah kabupaten/kota- Peningkatan Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	SDA :Kec.Banda Sakti, Muara Dua,Muara Satu dan Blang MangatCIPTA KARYA :4 KECAMATAN	PUPR
			SDA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Prasarana Irigasi  BINA MARGA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan	SDA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Prasarana Irigasi dan Peningkatan Jaringan irigasi  BINA MARGA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan serta Peningkatan Jaringan Jalan	SDA : Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan irigasi  BINA MARGA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan serta Peningkatan Jaringan Jalan	SDA : Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan irigasi  BINA MARGA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan serta Peningkatan Jaringan Jalan	SDA : Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan irigasi  BINA MARGA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan serta Peningkatan Jaringan Jalan	SDA : Peningkatan dan Pemeliharaan jaringan irigasi  BINA MARGA : Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan serta Peningkatan Jaringan Jalan	DI.Blang Buloh, DI Cot Trieng, DI Asan Kareung dan DI. Kandang  BINA MARGA : Kec.Banda Sakti, Muara Dua,Muara Satu dan Blang Mangat	PUPR
		Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota dan pengelolaan sumber daya air	Pembangunan baru jaringan drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan baru jaringan drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan baru jaringan drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan baru jaringan drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan baru jaringan drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase	Pembangunan baru jaringan drainase, peningkatan dan pemeliharaan jaringan drainase	Kec.Banda Sakti dan Muara Dua	PUPR SDA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatkan Pengimplementasian Tata ruang terhadap Pembangunan Kota	TATA RUANG (PUPR): Persub dan Penetapan RDTR dan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan/atau Pernyataan Mandiri	TATA RUANG (PUPR): Persub dan Penetapan RDTR dan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan/atau Pernyataan Mandiri	TATA RUANG (PUPR): Persub dan Penetapan RDTR dan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan/atau Pernyataan Mandiri	TATA RUANG (PUPR): Penilaian Perwujudan RTR dan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan/atau Pernyataan Mandiri	TATA RUANG (PUPR): Penilaian Perwujudan RTR dan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan/atau Pernyataan Mandiri	TATA RUANG (PUPR): Penilaian Perwujudan RTR dan Penilaian Pelaksanaan KKPR dan/atau Pernyataan Mandiri	TATA RUANG (PUPR) : 4 KECAMATAN	PUPR
			Mengidentifikasi dan menginventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir	Mengidentifikasi dan menginventarisasi penggunaan dan pemanfaatan tanah wilayah pesisir	Mengontrol dan mengatur pemanfaatan dan penggunaan lahan di kawasan pesisir pantai agar sesuai dengan fungsi lindung dan kepentingan publik	Mengontrol dan mengatur pemanfaatan dan penggunaan lahan di kawasan pesisir pantai agar sesuai dengan fungsi lindung dan kepentingan publik	Sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan dan penggunaan lahan wilayah pesisir agar sesuai dengan tata ruang	Sinkronisasi dan koordinasi pemanfaatan dan penggunaan lahan wilayah pesisir agar sesuai dengan tata ruang	Daerah pesisir di kecamatan-kecamatan di wilayah Pemerintah Kota Lhokseumawe	DISTAN
		Peningkatan prasarana dan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan manajemen lalu lintas	Optimalisasi sarana prasarana Transportasi	Optimalisasi sarana prasarana pengelolaan transportasi dan keselamatan lalu lintas	Pengembangan sistem pengelolaan sarana dan prasarana transportasi dan keselamatan lalu lintas	Pengembangan sistem pengelolaan sarana dan prasarana transportasi dan keselamatan lalu lintas	Mewujudkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana transportasi dan keselamatan lalu lintas	Mewujudkan sistem pengelolaan sarana dan prasarana transportasi dan keselamatan lalu lintas	4 KECAMATAN	DISHUB
<b>3.2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman</b>	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	Peningkatan dan Perbaikan kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman.	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	4 KECAMATAN	PUPR PERKIM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4 KECAMATAN	PUPR
<b>3.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan menurunnya Risiko Bencana</b>	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	memperbaiki tata kelola lingkungan, menjaga kualitas air dan udara	memperbaiki tata kelola lingkungan, menjaga kualitas air dan udara serta memperluas RTH	memperbaiki tata kelola lingkungan, menjaga kualitas air dan udara serta memperluas RTH	memperbaiki tata kelola lingkungan, menjaga kualitas air dan udara serta memperluas RTH	memperbaiki tata kelola lingkungan, menjaga kualitas air dan udara serta memperluas RTH	memperbaiki tata kelola lingkungan, menjaga kualitas air dan udara serta memperluas RTH	4 KECAMATAN	DLH
			Opotimalisasi sarana prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah	Opotimalisasi sarana prasarana pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah	Pengembangan sistem pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan dan Sanitary Landfill	Pengembangan sistem pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan dan Sanitary Landfill	Mewujudkan sistem pengelolaan dan pengolahan sampah dari hulu ke hilir yang memiliki nilai ekonomis	Mewujudkan sistem pengelolaan dan pengolahan sampah dari hulu ke hilir yang memiliki nilai ekonomis	4 KECAMATAN	DLH
	Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana	optimalisasi regulasi kebencanaan berdasarkan dokumen dasar bencana dan kebijakan-kebijakan terkait kebencanaan	optimalisasi regulasi kebencanaan berdasarkan dokumen dasar bencana dan kebijakan-kebijakan terkait kebencanaan	optimalisasi sarana prasarana penanggulangan pra bencana, saat tanggap darurat bencana, serta pasca bencana	optimalisasi sarana prasarana penanggulangan pra bencana, saat tanggap darurat bencana, serta pasca bencana	optimalisasi sarana prasarana perlindungan diri dalam penanggulangan bencana petugas dan masyarakat	peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana daerah	Kota Lhokseumawe	BPBD
			Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Informasi Bencana yang terintegrasi serta	Membangun Sinergi antara Dinas Sosial dan Instansi Terkait Lainnya dalam	Pengembangan Program Edukasi dan Sosialisasi Mitigasi Bencana Mengadakan melalui	Peningkatan Fasilitas Pendukung Penanggulangan Bencana yang memadai, seperti	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana melalui	Memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial, instansi terkait, untuk		DINSOS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			mekanisme penyebaran informasi bencana secara cepat dan akurat kepada masyarakat	Penanggulangan Bencana secara efektif	kampanye dan pendidikan kepada masyarakat tentang risiko bencana, tindakan mitigasi, serta langkah-langkah kesiapsiagaan	posko darurat, dan peralatan evakuasi.	pembentukan kelompok tanggap bencana di tingkat gampong	pelaksanaan mitigasi dan penanggulangan bencana secara efektif dan terpadu.		
<b>4.1 Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah</b>	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, penguatan fungsi pengawasan dan audit internal serta pemantapan reformasi birokrasi	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi serta peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah	Sinergitas perencanaan pembangunan daerah melalui penyediaan data yang akurat dan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Penguatan penjabaran konsistensi perencanaan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan penyediaan data dan hasil pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah.	Mengoptimalkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan data yang akurat dan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Mewujudkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, kapabel dan akuntabel serta meningkatkan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, kapabel dan akuntabel serta mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	Pencapaian perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, kapabel dan akuntabel serta optimalisasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.		BAPPEDA
			Penguatan sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan BMD berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien	Penguatan sistem Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan BMD berbasis Teknologi Informasi yang efektif dan efisien	pengembangan sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD yang terintegrasi dalam rangka mengurangi resiko penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran	pengembangan sistem pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD yang terintegrasi dalam rangka mengurangi resiko penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran	Meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara menyeluruh	Meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan akurasi data dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan BMD dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara menyeluruh	OPD dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	BPKD,
			Penguatan Anggaran Tahunan Inspektorat dalam rangka pemenuhan	Penguatan Anggaran Tahunan Inspektorat dalam rangka pemenuhan	Peningkatan kualitas Kapabilitas APIP Level 3 yang tergambar pada implementasi pelayanan	Penajaman fokus pengawasan pada peningkatan tata kelola OPD berbasis risiko dalam rangka pencegahan korupsi	Pemantapan kualitas dan kuantitas pengawasan berbasis risiko	Perwujudan pengawasan pembangunan yang transparan dan akuntabel		INSPEKTORAT



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasa dan peningkatan kualitas SDM APIP	sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasa dan peningkatan kualitas SDM APIP	Inspektorat di bidang pengawasan	dan penguatan integritas				
		Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Penataan Organisasi dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penguatan fondasi birokrasi sebagai penggerak utama transformasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (Good Governance and Clean Governance	Penguatan kebijakan, tata kelola dan manajemen transformasi digital pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pemerintah digital yang berkualitas menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan birokrasi yang modern, transparan dan adaptif dalam mendukung prinsip-prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang modern dan transparan.	Penguatan birokrasi yang beretika dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan efektivitas tata kelola untuk mendukung pemerintah digital yang berkualitas menuju pemerintah yang modern dan transparan.	Konsolidasi hasil reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan modern yang transparan, akuntabel, dan adaptif guna mewujudkan pelayanan publik terintegrasi berbasis digital	Pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan pada penguatan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan fokus pada peningkatan kompetensi digital, penguatan integritas, serta pengembangan profesionalisme ASN, sehingga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat	Kota Lhokseumawe	SETDAKO
	Menerapkan sistem Merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan akurat untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan akurat untuk pengembangan karir dan talenta ASN	mewujudkan satu database ASN dalam sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan akurat untuk pengembangan karir dan talenta ASN	mewujudkan satu database ASN dalam sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dan akurat untuk pengembangan karir dan talenta ASN	Lhokseumawe	BKPSDM
			Pemetaan profil ASN berbasis kompetensi	Melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait	Melakukan kerjasama dengan instansi lain terkait	melaksanakan program pengembangan	melaksanakan program pengembangan	evaluasi menyeluruh terkait program peningkatan	Lhokseumawe	BKPSDM

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				pengembangan kompetensi ASN	pengembangan kompetensi ASN	kompetensi berbasis digital	kompetensi berbasis digital	kompetensi ASN dan menyusun road map selanjutnya mengenai peningkatan kompetensi ASN		
<b>4.2 Meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi</b>	Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM terkait	Penguatan organisasi dan tata kelola SPBE, pengembangan layanan publik berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur TIK yang terintegrasi, dan peningkatan kompetensi SDM. serta koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah	penguatan organisasi dan tata kelola SPBE, pengembangan layanan publik berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur TIK yang terintegrasi, dan peningkatan kompetensi SDM. serta koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah.	Peningkatan Tata Kelola SPBE untuk mendukung Pelayanan Publik yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola SPBE, pengintegrasian data dan layanan yang berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola SPBE, dan Penguatan Sumber Daya Manusia pada bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola SPBE dalam mendukung Tata Pemerintahan yang bersih, terbuka dan berorientasi pelayanan secara digital yang terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola SPBE dalam integrasi data dan pelayanan Publik untuk mendukung Kota Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni	34 OPD, Masyarakat	Diskominfo
	Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik serta peningkatan keterbukaan informasi	Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Menggalakkan pemanfaatan arsip sebagai sumber pengetahuan untuk percepatan pembangunan	Melakukan penyelamatan, pengolahan, dan pemanfaatan arsip statis, termasuk arsip milik masyarakat	Memperluas penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan arsip elektronik.	Meningkatkan pelayanan publik bidang kearsipan secara digital	Meningkatkan kompetensi SDM kearsipan melalui pelatihan yang terukur dan sesuai perkembangan teknologi	34 OPD, Masyarakat	Dispursip (Arsip)
			Penerapan Layanan Adminduk Jemput Bola	Pelatihan Petugas Pelayanan Publik Digital	Penerapan Sistem Antrian Online dan Pelayanan Inklusif dasabilitas	Integritas Data Kependudukan dengan Sistem Pelayanan Adminduk	Penguatan Pengawasan dan Perlindungan Data	Evaluasi Kinerja dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Kependudukan	Sekolah Puskesmas Gampong	Disdukcapil
			Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di	Penataan Struktur Organisasi di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang diemban, dengan Mengacu pada	Memastikan Administrasi yang Tertata Baik untuk Mendukung Penyediaan Pelayanan Publik yang berkualitas kepada Masyarakat	Meningkatkan Pengawasan terhadap Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Konsolidasi dan Koordinasi Hasil dan Keberlanjutan Program dengan Pihak Terkait	Kecamatan Banda Sakti	Kec. B.sakti

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Prinsip Efektifitas dan Efisiensi					
			Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Penataan Struktur Organisasi di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang diemban, dengan Mengacu pada Prinsip Efektifitas dan Efisiensi	Memastikan Administrasi yang Tertata Baik untuk Mendukung Penyediaan Pelayanan Publik yang berkualitas kepada Masyarakat	Meningkatkan Pengawasan terhadap Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Konsolidasi dan Koordinasi Hasil dan Keberlanjutan Program dengan Pihak Terkait	Kecamatan Blang Mangat	Kec. Blang Mangat
			Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Penataan Struktur Organisasi di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang diemban, dengan Mengacu pada Prinsip Efektifitas dan Efisiensi	Memastikan Administrasi yang Tertata Baik untuk Mendukung Penyediaan Pelayanan Publik yang berkualitas kepada Masyarakat	Meningkatkan Pengawasan terhadap Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Konsolidasi dan Koordinasi Hasil dan Keberlanjutan Program dengan Pihak Terkait	Kecamatan Muara Satu	Kec. Muara Satu
			Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas, Pelayanan Publik, Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Tingkat Kecamatan sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan	Penataan Struktur Organisasi di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi yang diemban, dengan Mengacu pada Prinsip Efektifitas dan Efisiensi	Memastikan Administrasi yang Tertata Baik untuk Mendukung Penyediaan Pelayanan Publik yang berkualitas kepada Masyarakat	Meningkatkan Pengawasan terhadap Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Konsolidasi dan Koordinasi Hasil dan Keberlanjutan Program dengan Pihak Terkait	Kecamatan Muara Dua	Kec. Muara Dua

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat	Memantapkan Pelaksanaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Pelaksanaan Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	pembinaan kesatuan bangsa dan politik untuk menciptakan masyarakat yang toleran, berwawasan kebangsaan, dan berkarakter Pancasila.	fasilitasi partai politik, ormas, dan lembaga asing, penanganan konflik, serta pengelolaan ketahanan seni dan budaya	Melakukan pemantauan, analisis, serta penanganan konflik dan isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan stabilitas daerah	Melakukan pemantauan, analisis, serta penanganan konflik dan isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan stabilitas daerah	Melakukan pemantauan, analisis, serta penanganan konflik dan isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan stabilitas daerah	Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap partai politik, organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat dan (LSM/NGO)	Kota Lhokseumawe	Badan Kesbangpol
	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Penguatan Dasar & Penataan Kelembagaan - Penyusunan regulasi pendukung (Perwal/Qanun teknis) - Konsolidasi kelembagaan & tata kelola Satpol PP-WH - Pembinaan dasar SDM (disiplin, etika, bela negara) - Penegakan ketertiban di wilayah inti perkotaan	Peningkatan Kapasitas & Sarana Prasarana - Diklat teknis Perda/Qanun - Penguatan SDM Satlinmas di gampong/kelurahan - Penyediaan peralatan operasional & pos pengawasan - Penguatan sistem informasi (database penegakan hukum)	Modernisasi & Sinergi Lintas Sektor - Digitalisasi layanan aduan masyarakat - Kolaborasi dengan TNI, Polri, Mahkamah Syar'iyah, MPU, Kejaksaan - Pengawasan terpadu di kawasan strategis (pasar, wisata, pesisir) - Sosialisasi & edukasi hukum syariat Islam ke masyarakat	Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum & Perlindungan Masyarakat - Penegakan hukum syariat Islam dengan pendekatan humanis, persuasif, dan tegas - Pengawasan ketertiban umum di kawasan pendidikan, industri, dan pemukiman - Perlindungan objek vital daerah (industri energi, pelabuhan, dll.) - Pembinaan masyarakat untuk pencegahan gangguan trantibum	Penguatan Kewilayahan & Stabilitas Politik (Tahun Pemilu) - Optimalisasi peran Linmas dalam pengamanan Pemilu 2029 - Penguatan zona tertib (pusat kota, pasar, kawasan pendidikan) - Deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial - Penegakan hukum syariat di kawasan rawan pelanggaran	Pemantapan & Kemandirian Satpol PP-WH - Satpol PP-WH sebagai aparat penegak Perda/Qanun yang profesional, modern, dan terpercaya - Pemantapan sistem digital penegakan hukum - Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi - Pemantapan masyarakat partisipatif dalam menjaga ketertiban & syariat	1. Pusat Kota (CBD / Inti Perdagangan & Jasa) 2. Kawasan Pendidikan & Pemukiman 3. Wilayah Pesisir & Kawasan Wisata 4. Kawasan Industri & Energi (Arun, Kilang, dsb.) 5. Wilayah Perbatasan & Perdesaan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	Peningkatan peran aktif pelaku pembangunan untuk menciptakan inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	Penataan tata kelola riset dan inovasi daerah mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.	Penguatan tata kelola riset dan inovasi berbasis potensi daerah dan prioritas pembangunan.	Mengoptimalkan penyediaan hasil riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.	Mewujudkan penerapan hasil riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.	Mengimplementasi kan tata kelola hasil riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.	Pencapaian pemanfaatan hasil riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan	Kota Lhokseumawe	BAPPEDA (Litbang)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
								evaluasi pembangunan daerah.		
<b>5.1 Meningkatnya pembangunan syariat</b>	Memaksimalkan peningkatan dimensi indeks pembangunan syariah	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat islam serta memaksimalkan fungsi dan peran ulama dalam pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius	Penguatan Akses Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah terhadap Pelaksanaan Syariat Islam dan Penguatan Pendidikan Dayah	Penguatan Akses Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah terhadap Pelaksanaan Syariat Islam dan Penguatan Pendidikan Dayah	Peningkatan Fungsi Dinas Syariat Islam sebagai pembinaan, pengawasan, dan penegakan Syariat Islam di tengah masyarakat.	Meningkatkan Penerapan Syariat Islam terhadap Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, Edukasi dan Sosialisasi Hukum Syariat, serta Penegakan dan Ketertiban Umum.	Memperkuat Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan	Optimalisasi Capaian dan Keberlangsungan Program	Kota Lhokseumawe	DSI & PD
		Peningkatan kualitas edukasi dan dakwah	Penguatan fungsi-fungsi MPU, Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam serta Penelitian dan Pengembangan Materi Syari'at Islam	Penetapan fatwa hukum syari'at, Penyuluhan Syari'at, Pemberian Pertimbangan dan Saran Kepada Pemerintah Daerah serta Pengkaderan Ulama	Memberikan masukan dan pertimbangan syari'at islam, melakukan pengawasan syari'at islam	Penguatan peran ulama dalam pembangunan daerah berbasis syari'at islam	Pengoptimalan Peran Ulama dalam Pembangunan Syari'at Islam, Penyusunan dan pemantauan kebijakan daerah berbasis syari'at iserta peningkatan pelayanan dan akuntabilitas Sekretariat MPU	Penetapan fatwa syari'at, Peningkatan Optimalisasi Sumber Daya dan Peran Ulama dalam Perumusan Kebijakan daerah.	Kota Lhokseumawe	MPU
		Peningkatan dan optimalisasi pertumbuhan ZISWAF serta pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF tepat sasaran	Optimalisasi penjemputan bagi kewajiban muzaki dan penyaluran Ziswaf	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan semua lembaga untuk menyalurkan Ziswaf melalui Baitul Mal	Memberdayakan mustahik (penerima) menjadi muzaki (pemberi) Ziswaf	Meningkatkan kerjasama lembaga pemerintah dan non pemerintahan dalam pendistribusian penyaluran Ziswaf	Mewujudkan mekanisme profesional dalam pengumpulan dan penyaluran Ziswaf	Membuka akses ruang publikasi ,transparansi untuk menumbuhkan kepercayaan bagi Masyarakat	Masyarakat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe	BAITUL MAL
<b>5.2 Meningkatnya Pelestarian dan pengembangan Budaya</b>	Penguatan identitas budaya lokal	Melakukan legalitas cagar budaya dan pelestarian warisan budaya tak benda serta memajukan kebudayaan lokal	Melakukan Pendataan ulang semua objek cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe	Mendatangkan Tim Ahli Cagar Budaya untuk melakukan penelitian dan penilaian cagar budaya	Mengusulkan SK cagar budaya ke Pemerintah Kota Lhokseumawe	Melakukan restorasi Cagar budaya	Mengusulkan Penetapan cagar budaya oleh Pemerintah Provinsi	Mengusulkan Penetapan cagar budaya oleh Pemerintah Pusat	4 Kecamatan	DINAS P&K



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kebijakan						Lokus Prioritas	Perangkat Daerah
			2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			Memperkuat peran lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dalam pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pelaksanaan adat	Mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Membangun sinergi antara pemerintah daerah, pengelola desa budaya, dan masyarakat untuk melaksanakan program pelestarian adat istiadat	Mengintegrasikan muatan lokal kebudayaan daerah dalam pendidikan formal	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal.	Menggunakan media sosial untuk melestarikan dan mempromosikan budaya	4 Kecamatan	Sekretariat MAA

### **3.4.2.5 Arah Pembangunan Kewilayahan Dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

Kawasan Perkotaan Lhokseumawe dan Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe

1. Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui:
  - Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu;
  - Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau;
  - Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
  - Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
2. Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hitirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, dan industri energi dan green hydrogen
3. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial dikawasan perkotaan Lhokseumawe (PHTC)
4. Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara
5. Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe
6. Pengembangan Kota Agropolitan Lhokseumawe
7. Preservasi jalan ruas Lhokseumawe-Bireuen
8. Pemenuhan Layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas yaitu Kota Lhokseumawe : Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Blang Mangat

Adapun delapan program terbaik cepat (PHTC)/Quick Wins Nasional diantaranya :

1. Memberikan makanan bergizi gratis untuk siswa, Santri, Ibu hamil. Ibu menyusui dan Anak Balita.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis. Menuntaskan TBC dan membangun Rumah Sakit khusus TBC dan membangun Rumah Sakit Lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan Menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BTL) dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenia, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Penyajian Arah Pembangunan Kewilayahan beserta strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.8

#### **3.4.2.6 Penyelarasan antara Arah Pembangunan Wilayah Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

Penyelarasan arah pembangunan wilayah adalah upaya menyatukan visi dan target pembangunan wilayah dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta mempertimbangkan aspek kewilayahan, lingkungan, bencana, dan digitalisasi untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menghindari kesenjangan dan memastikan pembangunan wilayah merata, fokus pada pusat pertumbuhan, peningkatan konektivitas, serta pemanfaatan sumber daya secara optimal. Penyelarasan Arah Pembangunan Wilayah Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV RPJMN 2025-2029) dengan arah kebijakan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 3.8

**Tabel 3.8**  
**Penyelarasan Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029**

No	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Kota Lhokseumawe	Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe	Upaya/Fokus Kota Lhokseumawe
1	Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Lhokseumawe, melalui :			
a	Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah	Meningkatkan Pengimplementasian Tata Ruang terhadap Pembangunan Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Rencana Detail Perkotaan</li> <li>- Menetapkan Kawasan Strategis Perkotaan</li> <li>- Menetapkan Fungsi Kawasan</li> <li>- Menyusun Rencana Pengembangan infrastruktur jalan, utilitas dan prasarana umum perkotaan</li> </ul>
b	Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas sanitasi, dan penyediaan air minum, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak termasuk jaringan distribusi dan TPS bagi kawasan permukiman</li> <li>- Penentuan kawasan/lahan untuk RTH Publik</li> <li>- Perluasan ruang terbuka hijau dan ruang publik</li> </ul>
c	Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan	Meningkatkan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta mendorong partisipasi aktif dalam pasar kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja</li> <li>- Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja</li> <li>- Penguatan Kolaborasi pendidikan, industri dan Pemerintah</li> </ul>
d	Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau serta	Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh dan rumah liar</li> </ul>

No	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Kota Lhokseumawe	Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe	Upaya/Fokus Kota Lhokseumawe
		penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur		- Peningkatan dan penataan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Pusong
			Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	
			Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana	
2	Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe (sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa sawit, hitirisasi kelapa, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, dan industri energi dan green hydrogen	Peningkatan kualitas produk, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi	Peningkatan nilai tambah produk, mendorong inovasi dalam produksi, pengembangan sistem manajemen SDM yang profesioanl dan berbasis teknologi untuk mendukung produktivitas SDM pada sektor perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian insentif dan Fasilitasi kebijakan daerah tentang kemudahan penanaman modal/perizinan</li> <li>- Peningkatan infrastruktur mendukung konektivitas KEK Arun</li> <li>- Pengembangan kerjasama pembangunan dan peningkatan kawasan sekitar KEK Arun</li> <li>- Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengidentifikasi resiko serta mempromosikan investasi daerah</li> <li>- Penyiapan Tenaga Kerja Terampil</li> </ul>
			Meningkatkan dan mendorong usaha mikro (industri rumah tangga), industri pengolahan dan industri kreatif	
3	Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar sawit, yaitu fatty	Peningkatan kualitas produk, inovasi,	Peningkatan daya saing dan produktivitas, penguatan	- Penguatan Kelembagaan Koperasi atau kelompok tani



No	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Kota Lhokseumawe	Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe	Upaya/Fokus Kota Lhokseumawe
	acid, gliserin, biodiesel, serta produk hilirisasi lanjutan sawit, bioplastik, bioavtur, graphene, dan surfaktan	pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi	kelembagaan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan (sawit dan kakao, kelapa dalam,tebakau)	- Peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi tepat guna
			Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Peningkatan Pekebun di STDB, Peningkatan Jaminan Sosial Pekebun, dan Peningkatan Pekebun ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	- Memperkuat kemampuan dan kapasitas pekebun - Penerbitan STDB bagi pekebun - Meningkatkan kesadaran dan pengenalan ISPO - Menjamin pekerja dengan jaminan sosial tenaga kerja dan jaminan kesehatan
4	Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Lhokseumawe (PHTC)	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	Peningkatan dan Perbaikan kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	- Fasilitasi Lahan dan legalitas lahan perumahan - Penentuan zonasi perumahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang - Mendukung Penyediaan aksesibilitas prasarana umum
5	Pengembangan SPAM Regional Lhokseumawe-Aceh Utara.	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas sanitasi, dan penyediaan air minum, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat ekonomi	- Pembangunan atau peningkatan jaringan distribusi pembagi untuk sambungan rumah guna mendukung SPAM Regional yang akan dibangun agar dapat berfungsi - Memberikan input masukan data calon pelanggan dan data penyediaan air bersih selain Pemerintah
6	Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Pusong Lhokseumawe	Peningkatan kualitas produk, inovasi, pengembangan sumber	Meningkatkan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan	- Peningkatan jalan akses dan jalan produksi

No	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Kota Lhokseumawe	Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe	Upaya/Fokus Kota Lhokseumawe
		daya manusia, dan pemanfaatan teknologi		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitas pengolahan dan penyimpanan</li> <li>- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pelelengan Ikan</li> <li>- Peningkatan SDM melalui pembinaan dan pelatihan bagi nelayan dan pengolah ikan</li> <li>- Menyediakan Informasi yang akurat, pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan</li> <li>- Perlindungan lahan, pengaturan dan pembinaan, pengembangan kawasan serta pemanfaatan berkelanjutan</li> </ul>
7	Pengembangan Kota Agropolitan Lhokseumawe	Peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisien serta menjaga stabilitas harga pangan	Meningkatnya Produksi Pangan lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penentuan Kawasan Lokasi pengembangan Agropolitan Lhokseumawe</li> <li>- Mendukung Infrastruktur pendukung kawasan Agropolitan Lhokseumawe</li> </ul>
			Diversifikasi dan Intensifikasi Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan terhadap luasan kawasan pertanian</li> <li>- Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pangan</li> </ul>
			Penguatan Cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat</li> </ul>
			Perbaikan infrastruktur pertanian	
			Pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisiensi	

No	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Kota Lhokseumawe	Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe	Upaya/Fokus Kota Lhokseumawe
			Menjaga stabilitas harga pangan	
		Peningkatan iklim investasi. Pengembangan potensi ekonomi lokal, Menjalin kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi	Meningkatnya akses investasi dengan memudahkan perijinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Layanan pendampingan perizinan</li> <li>- Kolaborasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk menarik investor dengan melibatkan civitas akademika untuk menyelaraskan kebutuhan dunia usaha</li> </ul>
			Pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengembangan kawasan agrowisata</li> <li>- Membuat promosi wisata melalui media cetak dan media digital</li> </ul>
8	Preservasi jalan ruas Lhokseumawe-Bireuen	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas sanitasi, dan penyediaan air minum, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Lahan untuk pelebaran jalan</li> <li>- Mendeteksi titik kerusakan jalan</li> </ul>
9	Preservasi jalan ruas Lhokseumawe-Redelong-Takengon dan Takengon-Blangkejeren		Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota dan pengelolaan sumber daya air	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Lahan untuk pelebaran jalan</li> <li>- Mendeteksi titik kerusakan jalan</li> </ul>
10	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/ peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah.	Meningkatkan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta mendorong partisipasi aktif dalam pasar kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan Lahan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja</li> <li>- Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kebutuhan industri</li> <li>- Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ul>

No	Arah Kebijakan Nasional	Strategi Kota Lhokseumawe	Arah Kebijakan Kota Lhokseumawe	Upaya/Fokus Kota Lhokseumawe
11	Pemenuhan Layanan dasar pada Kecamatan Perbatasan Prioritas yaitu Kota Lhokseumawe : Muara Satu, Muara Dua, Banda Sakti dan Blang Mangat	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas sanitasi, dan penyediaan air minum, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergi Pendidikan Formal dan Dunia Industri</li> <li>- Penguatan tata kelola ketenagakerjaan</li> <li>- Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana dasar kawasan perbatasan</li> <li>- Menentukan batasan tanggungjawab pemeliharaan sarana dan prasarana dasar kawasan perbatasan</li> </ul>

### 3.4.3 Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah mengacu pada Visi dan Misi Wali Kota Lhokseumawe serta Tujuan dan Sasaran Kota Lhokseumawe. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe yang menjadi tumpuan percepatan pembangunan.

**Tabel 3.9**  
**Prioritas Pembangunan RPJMK Lhokseumawe**  
**Tahun 2025-2030**

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator			
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan (%)			
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)			
			Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan perikanan			
			Indeks Ketahanan Pangan			
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)			
			Indeks Kemandirian Fiskal			
			PDRB per kapita			
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum			
			Total Kredit/PDRB			
			Tingkat Pengangguran Terbuka			
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja			
			2	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah
						Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
Angka Literasi SD						
Angka Numerasi SD						
Angka Literasi SMP						
Angka Numerasi SMP						
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)					
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita						
Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan					
Pengeluaran Riil Perkapita						
		Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota			
			Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)			



No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Indikator
		masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda	
			Indeks Desa
			Indeks Ketimpangan Gender
			Indeks Pembangunan Gender
			Nilai Kota Layak Anak
			Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi
3	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi Jalur Distribusi Barang dan Jasa yang Ekonomis, serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Meningkatnya pelayanan Infrastruktur kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
			Tingkat Pelayanan Jalan
		Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Percentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas Lingkungan Hidup
			Indeks Risiko Bencana
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas, Profesionalitas dan Integritas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP
			Opini BPK
			Indeks Profesionalisme ASN
			Indeks Integritas/(SPI)
			Indeks Maturitas SPIP
		Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik
			Indeks SPBE
			Indeks Inovasi Daerah (IID)
5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Meningkatnya Pembangunan Syariat	Indeks Pembangunan Syariat
		Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan

### 3.4.3.1 Program Prioritas Kepala Daerah

Langkah selanjutnya menselaraskan antara janji politik dengan program prioritas, serta dengan mensinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMK karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk

program prioritas. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Wali Kota terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Wali Kota terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi atau kebijakan ataupun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jika bunyi janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi.

**Tabel 3.10**  
**Integrasi Janji Politis dan Implementasi Program Unggulan dengan Program Nomenklatur**

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI	PROGRAM KEMENDAGRI	OPD
1	Pengelolaan Sampah (Broh Jeut Keu Peng)	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	Pengelolaan Sampah berbasis energi terbarukan dan bernilai ekonomis	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA Kota	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
2	Penanganan Banjir	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	Penginterasian sarana dan prasarana pengendalian banjir	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Program pengelolaan sumber daya air	Dinas PUPR
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Dinas PUPR
					Program Penanggulangan Bencana	BPBD
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBD
3	Pemerataan Jaringan Air Bersih	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	Pengembangan jaringan distribusi pipa air minum di seluruh wilayah Kota	Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sistem jaringan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Dinas PUPR

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI	PROGRAM KEMENDAGRI	OPD
4	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	Pengembangan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kreatif, edukasi dan kegiatan lain	Pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau/taman keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
5	Penataan Lingkungan Pesisir, Khususnya Desa Pusong	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	Pembenahan secara berkesinambungan dengan peremajaan permukiman kumuh	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	Program Perumahan dan Kawasan permukiman kumuh	Dinas PUPR
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PUPR
6	Penyelesaian Pembangunan Islamic Center	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	Penyelesaian Pembangunan Islamic Center	Pengubahsuaian bangunan Gedung untuk kepentingan strategis Daerah	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas PUPR
7	Peningkatan Kualitas SDM Dayah	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	Upaya sistematis untuk peningkatan kemampuan, pengetahuan dan motivasi SDM dayah	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dayah, pemberdayaan dan pendidikan santri, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dayah	Program Pendidikan Dayah	DSI-PD
8	Digitalisasi Pelayanan Publik	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik	Peningkatan layanan publik melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Diskominfo
					Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil

NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI	PROGRAM KEMENDAGRI	OPD
					Program Pencatatan Sipil	Disdukcapil
					Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP dan Naker
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKD
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
					Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMG
9	Ruang Kreatif Pemuda	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	Memfasilitasi, mengembangkan kreativitas, mendorong kemandirian dan kewirausahaan pemuda	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat Kota	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Disporapar
10	Peningkatan Kesadaran Spritual para Remaja	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	Memotivasi remaja untuk semangat beragama dan kedisiplinan beribadah untuk menciptakan susana positif dan kondusif		Program Pendidikan Dayah	DSI-PD
11	Bantuan Sosial Untuk Lansia Miskin	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemberian Bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada Lansia miskin yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial	Penyediaan Permakanan, Penyediaan Sandang, Penyediaan Alat Bantu, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spritual dan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
12	Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	bantuan biaya pendidikan berfokus kepada yang memiliki prestasi dalam belajar	Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRIORITAS	KONSEP OPERASIONAL	INDIKASI RENCANA IMPLEMENTASI	PROGRAM KEMENDAGRI	OPD
13	Pengelolaan Hasil Laut	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Mengubah bahan baku menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi untuk meningkatkan nilai tambah/ekonomis produk		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
14	Pemberdayaan Sektor Perikanan	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Pemberdayaan Nelayan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil, Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKPPP
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKPPP
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKPPP
15	Pemberdayaan Sektor Pertanian yang Modern	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DKPPP
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DKPPP

#### **3.4.3.2 Program Pembangunan Daerah**

Untuk mendorong percepatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka perlu diterjemahkan dalam prioritas program akan menjadi akselerator perwujudan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe. Program prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.11**  
**Program Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Tahun 2025-2030**

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni</b>								
1	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	1. Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi						
			1.1 Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Peningkatan kualitas produk, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi	Peningkatan nilai tambah produk, mendorong inovasi dalam produksi, pengembangan sistem manajemen SDM yang profesional dan berbasis teknologi untuk mendukung produktivitas SDM pada sektor perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISPRINDAGKOP-Perdagangan	Dishub, Diskominfo
						PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DISPRINDAGKOP-Perdagangan	
						PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DISPRINDAGKOP-Perdagangan	
						PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DISPRINDAGKOP-Perdagangan	
						PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DISPRINDAGKOP-Perdagangan	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
					Meningkatkan dan mendorong usaha mikro (industri rumah tangga), industri pengolahan dan industri kreatif	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DISPRINDAGKOP - Perindustrian	Dishub, PUPR, Diskominfo, DLH
						PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	DISPRINDAGKOP - Perindustrian	
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DISPRINDAGKOP - Perindustrian	
					Meningkatkan produktivitas pertanian, kehutanan dan perikanan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DKPPP	PUPR, Dishub, Diskominfo
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DKPPP	
						PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DKPPP	
						PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DKPPP	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DKPPP	
						PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKPPP	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DKPPP	
					Peningkatan daya saing dan produktivitas, penguatan kelembagaan, serta perluasan akses pasar dan pembiayaan sektor pertanian (sawit, kakao, kelapa dan tembakau)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DKPPP	PUPR, Dishub, Disperindagkop
						PROGRAM USAHA PERTANIAN	DKPPP	
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DKPPP	
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Peningkatan Pekebun di STDB, Peningkatan Jaminan Sosial Pekebun, dan Peningkatan Pekebun ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DKPPP	PUPR, Bappeda, Setdako, DLH, DPMG, DPMPSTSP, Disperindagkop, DP3AP2KB, Pertanahan
			1.2 Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, penguatan cadangan pangan, perbaikan infrastruktur pertanian, serta pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisien serta menjaga stabilitas harga pangan	Meningkatnya Produksi Pangan lokal, Diservikasi Pangan, Penguatan Cadangan pangan, Perbaikan infrastruktur pertanian, Pengembangan pemasaran dan distribusi yang efisiensi, Menjaga stabilitas harga pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DKPPP	PUPR, Disperindagkop, Dishub
						PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DKPPP	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DKPPP	
			1.3 Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran	Peningkatan iklim investasi. Pengembangan potensi ekonomi lokal, Menjalinkan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi.	Meningkatnya akses investasi dengan memudahkan perijinan	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMTSP NAKER	Diperindagkop, Dishub, PUPR, Diskominfo
						PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMTSP NAKER	
						PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMTSP NAKER	
						PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMTSP NAKER	
						PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMTSP NAKER	
					Pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas promosi pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DISPORAPAR (Pariwisata)	DPMTSP NAKER, Diskominfo, PUPR, Dishub
						PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DISPORAPAR (Pariwisata)	Diperindagkop
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DISPORAPAR (Pariwisata)	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
				Mendorong sinergi dan harmonisasi belanja antara pemerintah pusat dan daerah	Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Peningkatan Kemandirian Fiskal dan penataan kelembagaan dan proses bisnis organisasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD	Disperindagkop Dishub, DLH, PUPR
				Diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah peningkatan produktivitas BUMD serta Penataan kelembagaan dan proses bisnis Perangkat Daerah pengampu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BPKD,	
						PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DISPRINDAGKOP	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PUPR	
				Meningkatkan UMKM yang kompetitif dan koperasi yang berkembang usahanya	Penguatan kelembagaan, permodalan, dan daya saing UMKM serta usaha koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DISPRINDAGKOP	DKPPP, DPMG
						PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DISPRINDAGKOP	
						PROGRAM PENILAIAN	DISPRINDAGKOP	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		
						PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DISPRINDAGKOP	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DISPRINDAGKOP	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DISPRINDAGKOP	
				Meningkatkan Kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan tenaga kerja, serta mendorong partisipasi aktif dalam pasar kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DPMTSP NAKER (Tenaga Kerja)	Dinas PK, Disperindagkop
						PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DPMTSP NAKER (Tenaga Kerja)	
						PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DPMTSP NAKER (Tenaga Kerja)	
						PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMTSP NAKER (Tenaga Kerja)	
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing						

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
	dan Berkarakter							
			2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Peningkatan dan Pemerataan kualitas pendidikan secara berkelanjutan	Peningkatan akses dan mutu pendidikan formal, informal dan inklusi serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS P&K	Dinas Sosial, Dishub, Dispursip
						PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS P&K	
						PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DINAS P&K	
						PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	DSI & PD	
					Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS P&K	
					Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	MPD	
				Meningkatkan Minat baca dan kegemaran membaca bagi Masyarakat	Peningkatan sosialisasi budaya baca dan literasi, penyediaan bahan bacaan dan akses buku serta penguatan infrastruktur perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DISPURSIP	Dinas PK, PUPR
						PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DISPURSIP	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
			2.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan Kesehatan.	Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan Kesehatan serta peningkatan kualitas tenaga Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	
						PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINKES	
						PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINKES	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES	
				intervensi spesifik dan sensitif serta koordinasi lintas sektoral	Penguatan komitmen politik dan kebijakan yang kuat untuk penanganan prevalensi stunting pada balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	DP2AP2KB, PUPR, DKPPP, DPMG, Disdukcapil
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINKES	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3AP2KB	
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP3AP2KB	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
			2.3 Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Penanggulangan Kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran	Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin dengan memperkuat rehabilitasi sosial dan jaminan sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINSOS	Disperindagkop, DP3AP2KB, Dinkes, Naker, DPMG, DKPPP
						PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINSOS	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINSOS	
					Peningkatan akses jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk tenaga kerja rentan/informal	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DPMTSP NAKER,	
			2.4 Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda	Peningkatan kualitas keluarga dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga terkait, dan keluarga itu sendiri.	Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DP3AP2KB	Disdukcapil
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DP3AP2KB	
						PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DP3AP2KB	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DP3AP2KB	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
				Peningkatan Pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana dalam upaya meningkatkan pembangunan perdesaan, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipasif.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi, dan pemanfaatan prasarana serta sarana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.	PROGRAM PENATAAN DESA	DPMG	DP3AP2KB, Disperindagkop
						PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	DPMG	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DPMG	
					Meningkatkan sistem perencanaan dan Pengelolaan penganggaran dana desa yang transparan, akuntabel dan disiplin.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DPMG	
				Peningkatan kesadaran gender, penguatan kebijakan yang responsif gender, peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, serta Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Meningkakan kesetaraan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DP3AP2KB	DPMG, Disperindagkop, DKPPP
						PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DP3AP2KB	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
				Pembangunan komprehensif yang mengintegrasikan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak serta perlindungan anak	Meningkatkan jaminan perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DP3AP2KB	Dinsos, Dinas PK, Dinkes
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DP3AP2KB,	
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DP3AP2KB,	
				Peningkatan Partisipasi aktif Pemuda dan daya saing Keolahragaan	Meningkatkan Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan dan daya saing pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DISPORAPAR	Disperindagkop
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DISPORAPAR	
					Meningktakan Pengembangan Altlit dan prestasi olah raga dengan peningkatan sarana dan prasarana olah raga		DISPORAPAR	
						PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DISPORAPAR	
3	Memantapkan Penataan Kota Yang Terintegrasi Melalui Infrastruktur dan Lingkungan	Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan						

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
	Yang Berkelanjutan							
			3.1 Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota	Peningkatan Kualitas Layanan Infrastruktur yang terintegrasi dan menunjang konektivitas wilayah	Meningkatkan kualitas sanitasi, dan penyediaan air minum, serta infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dan pusat ekonomi.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PUPR	Dishub
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PUPR	
						PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	PUPR	
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PUPR	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PUPR	
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PUPR	
					Meningkatkan Pengelolaan dan pengembangan sistem resapan air serta perbaikan jalur-jalur drainase kota dan pengelolaan sumber daya air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PUPR	
					Meningkatkan Pengimplementasian Tata ruang terhadap Pembangunan Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PUPR	DPMPSTP NAKER
						PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PUPR	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	DISTAN	
						PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	DISTAN	
						PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	DISTAN	
						PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	DISTAN	
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	DISTAN	
						PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	DISTAN	
					Peningkatan prasarana dan perlengkapan jalan untuk meningkatkan keselamatan jalan dan manajemen lalu lintas	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DISHUB	PUPR
						PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	DISHUB	
			3.2 Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau serta penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	Peningkatan dan Perbaikan kondisi infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PUPR	BAITUL MAL



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PUPR	
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PUPR	
					Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi rumah	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PUPR	Dishub
			3.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan menurunnya Risiko Bencana	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	Pemenuhan layanan pengelolaan limbah dan persampahan dari tingkat domestik (mikro) hingga regional	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	PUPR
						PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DLH	
						PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DLH	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DLH	
						PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	DLH	
						PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DLH	
						PROGRAM PENAGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DLH	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DLH	
				Peningkatan sumberdaya dan jangkauan penanggulangan bencana berbasis spasial	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BPBD	PUPR, DLH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	BPBD	
						PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINSOS	
<b>4</b>	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah						
			4.1 Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, penguatan fungsi pengawasan dan audit internal serta pemantapan reformasi birokrasi	Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi serta peningkatan kompetensi ASN perencanaan dan pengelola keuangan daerah	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA	Seluruh OPD
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BAPPEDA	
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BAPPEDA	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	BPKD	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						DAERAH KABUPATEN/KOTA		
						PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BPKD	
						PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BPKD	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT	
						PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT	
					Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan, Penataan Organisasi dan Penataan Peraturan Perundang-undangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	SETDAKO	Seluruh OPD
						PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDAKO	
						PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDAKO	
				Menerapkan sistem Merit dalam penyelenggaraan manajemen ASN	Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN serta peningkatan kualitas SDM ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BKPSDM	Seluruh OPD
						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BKPSDM	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
			4.2 Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi	Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan SDM terkait.	Penguatan organisasi dan tata kelola SPBE, pengembangan layanan publik berbasis elektronik, pembangunan infrastruktur TIK yang terintegrasi, dan peningkatan kompetensi SDM. serta koordinasi dan integrasi antar instansi pemerintah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Diskominfo	Seluruh OPD
						PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Diskominfo	
						PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Diskominfo	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Diskominfo	
				Meningkatkan sistem pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi	Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik serta peningkatan keterbukaan informasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekwan	
						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekwan	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. B.sakti	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. B.sakti	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. B.sakti	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. B.sakti	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Blang Mangat	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Blang Mangat	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Blang Mangat	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Blang Mangat	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Muara Satu	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Muara Satu	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kec. Muara Satu	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PEMERINTAHAN UMUM		
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Muara Satu	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Muara Dua	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Muara Dua	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Muara Dua	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Muara Dua	
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DISPURSIP	
						PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DISPURSIP	
						PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Disdukcapil	
						PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Disdukcapil	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	
						PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Disdukcapil	
				Meningkatkan ketahanan dan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial serta meningkatkan pemahaman politik masyarakat	Memantapkan Pelaksanaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Pelaksanaan Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbangpol	MPU, DSI, Setwan, Setdako, Kecamatan, KIP, Panwaslu
						PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesbangpol	
						PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbangpol	
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kesbangpol	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
						PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesbangpol	
				Peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	Kecamatan
				Peningkatan peran aktif pelaku pembangunan untuk menciptakan inovasi daerah	Meningkatkan inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BAPPEDA (Litbang)	Seluruh OPD
<b>5</b>	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	5. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya						
			5.1 Meningkatnya pembangunan syariat	Memaksimalkan peningkatan dimensi indeks pembangunan syariah	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai syariat islam serta memaksimalkan fungsi dan peran ulama dalam pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	DSI & PD	
					Peningkatan kualitas edukasi dan dakwah	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	MPU	
					Peningkatan dan optimalisasi pertumbuhan ZISWAF serta pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF tepat sasaran	PROGRAM BAITUL MAL	BAITUL MAL	

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Perangkat Daerah	
							Utama	Pendukung
			5.2 Meningkatnya Pelestarian dan pengembangan Budaya	Penguatan identitas budaya lokal	Melakukan legalitas cagar budaya dan pelestarian warisan budaya tak benda serta memajukan kebudayaan lokal	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS P&K	PUPR, Dishub, DLH
						PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS P&K	
						PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	DINAS P&K	
						PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS P&K	
						PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS P&K	
						PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	MAA	



# BAB - IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH

**RPJMK**  
**LHOKSEUMAWE**  
**TAHUN 2025-2029**

**BAB IV**  
**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada bagian ini menyajikan tentang kerangka pendanaan pembangunan yang dilanjutkan dengan rumusan program Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun periode RPJMK. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menjelaskan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan strategi, arah kebijakan dan target program. Mengingat bahwa proses perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan yang utuh, maka penyajian terlebih dahulu terhadap Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah menjadi sangat penting. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dirumuskan memiliki daya dukung pendanaan yang cukup. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kota Lhokseumawe selama 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana disampaikan dalam uraian di bawah ini.



**Tabel 4.1**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030**

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>815,786,503,747</b>	<b>816,489,376,141</b>	<b>820,569,507,421</b>	<b>790,016,858,680</b>	<b>794,109,925,177</b>	<b>796,970,786,046</b>
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>597,233,963,150</b>	<b>619,238,614,223</b>	<b>587,352,157,766</b>	<b>570,437,527,993</b>	<b>568,339,552,018</b>	<b>574,210,332,749</b>
<b>5.1.1.</b>	Belanja Pegawai	340,436,176,707	413,636,835,788	365,812,522,289	366,747,536,043	367,685,607,758	368,626,746,969
<b>5.1.2.</b>	Belanja Barang dan Jasa	187,048,276,820	180,399,431,564	196,439,461,892	186,543,546,160	184,435,203,986	186,956,037,712
<b>5.1.4.</b>	Belanja Subsidi	1,143,000,000	1,000,050,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>5.1.5.</b>	Belanja Hibah	39,556,499,966	11,498,765,637	7,617,968,247	5,567,210,095	6,857,787,828	8,218,863,368
<b>5.1.6.</b>	Belanja Bantuan Sosial	29,050,009,657	12,703,531,234	16,482,205,338	10,579,235,695	8,360,952,445	9,408,684,700
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>102,279,876,677</b>	<b>78,636,668,918</b>	<b>119,392,281,897</b>	<b>105,593,289,944</b>	<b>111,623,129,433</b>	<b>108,451,776,258</b>
<b>5.2.1.</b>	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
<b>5.2.2.</b>	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18,620,998,870	7,687,560,918	21,736,470,736	18,862,769,803	19,961,433,758	19,019,065,187
<b>5.2.3.</b>	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27,920,996,675	24,839,584,283	32,592,447,451	28,282,388,789	30,430,329,078	29,516,743,721
<b>5.2.4.</b>	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,092,283,747	43,068,298,167	58,473,203,687	52,122,863,870	54,876,185,737	54,543,313,536
<b>5.2.5.</b>	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5,645,597,385	3,041,225,550	6,590,160,023	6,325,267,482	6,355,180,860	5,372,653,813
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>457,862</b>	<b>3,435,485,250</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
<b>5.3.1.</b>	Belanja Tak Terduga	457,862	3,435,485,250	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2024*)	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>116,272,206,058</b>	<b>115,178,607,750</b>	<b>113,325,067,758</b>	<b>113,486,040,743</b>	<b>113,647,243,726</b>	<b>113,808,677,039</b>
<b>5.4.1.</b>	Belanja Bagi Hasil	3,847,744,558	5,432,286,550	3,863,150,927	3,870,877,229	3,878,618,984	3,886,376,221
<b>5.4.2.</b>	Belanja Bantuan Keuangan	112,424,461,500	109,746,321,200	109,461,916,830	109,615,163,514	109,768,624,743	109,922,300,818
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>815,786,503,747</b>	<b>816,489,376,141</b>	<b>820,569,507,421</b>	<b>790,016,858,680</b>	<b>794,109,925,177</b>	<b>796,970,786,046</b>

Sumber: Proyeksi, 2025

#### **4.1 Program Perangkat Daerah**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe periode 2025-2029. Selain berpijak pada berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan di atas, maka penyusunan program pembangunan Kota Lhokseumawe selama 5 (lima) tahun ke depan juga memperhatikan kapasitas riil fiskal sebagaimana disajikan dalam tabel di atas. Hal ini dimaksudkan agar penentuan target dan anggaran selama lima tahun akan dapat didukung dengan kemampuan dan kapasitas fiskal daerah.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil-hasil verifikasi terhadap perencanaan program, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Melalui penyajian Program dan Anggaran indikatif yang disusun berdasarkan Aspek-aspek Pembangunan dan Urusan diharapkan dapat menjelaskan program apa saja yang direncanakan dalam RPJMK guna untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) berdasarkan tiap urusan yang diampu.

Penyajian secara detil program-program RPJMD yang selaras dengan Program Perangkat Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini. Penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMK
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah
3. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Gambaran program Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung program disajikan pada tabel berikut:

**TABEL 4.2  
PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026-2030**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp	
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>						816,489,376,141		820,569,507,421		790,016,858,680		794,109,925,177		796,970,786,046	-	4,018,156,453,465	
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						442,967,531,232		397,120,288,713		357,693,011,505		354,970,094,086		358,900,732,700		1,911,651,658,237	
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						1,484,329,412		1,622,300,824		1,622,300,824		1,624,083,892		1,624,083,892		7,977,098,843	MPD
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Point	B (62.55)	B (62.70)	B (62.90)	1,383,612,816	B (63.10)	1,342,300,824	B (63.40)	1,342,300,824	B (63.70)	1,344,083,892	B (64.00)	1,344,083,892	B (64.00)	6,756,382,247	MPD
1 01 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Rekomendasi yang Dihilangkan Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh	Persen	0%	100.00	100.00	100,716,596	100.00	280,000,000	100.00	280,000,000	100.00	280,000,000	100.00	280,000,000	100.00	1,220,716,596	MPD
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						221,891,776,805		185,301,722,050		180,301,500,000		173,574,419,718		175,366,500,000		936,435,918,573	PK
1 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/Nilai	65.60 B	66.30 B	66.32 B	177,620,129,260	66.35 B	134,101,500,000	66.37 B	134,101,500,000	66.40 B	134,166,500,000	66.43 B	134,166,500,000	66.43 B	714,156,129,260	PK
1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun	Angka	90.63	93.18	95.73	43,844,747,545	98.28	50,435,000,000	100.00	45,435,000,000	100.00	38,642,919,718	100.00	40,435,000,000	100.00	218,792,667,263	PK
		2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	Angka	98.95	99.00	99.05		99.10		99.15		99.20		99.25		99.25		PK
		3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun	Angka	41.35	51.08	57.57		64.06		70.55		71.32		72.08		72.08		PK
1 01 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persen	100.00	100.00	100.00	156,900,000	100.00	555,000,000	100.00	555,000,000	100.00	555,000,000	100.00	555,000,000	100.00	2,376,900,000	PK
1 01 04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Indeks Pemerataan Guru	Nilai	0.55	0.57	0.60	150,000,000	0.63	60,000,000	0.65	60,000,000	0.67	60,000,000	0.70	60,000,000	0.70	390,000,000	PK
		2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	29.74	29.96	30.16		30.34		30.56		30.78		31.00		31.00		PK
1 01 05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan /Diperbarui	Persen	100.00	100.00	100.00	120,000,000	100.00	150,222,050	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	150,000,000	100.00	720,222,050	PK
1 01	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>						5,113,286,894		3,676,997,240		3,690,857,185		3,784,401,985		2,784,401,985		19,049,945,289	DSI-PD
1 01 07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Dayah dengan Type A	Persen	10.00	9.38	10.61	5,113,286,894	10.61	3,676,997,240	12.12	3,690,857,185	13.64	3,784,401,985	15.15	2,784,401,985	15.15	19,049,945,289	DSI-PD
1 02	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>						125,971,019,886		99,071,139,158		88,805,152,140		89,979,952,571		91,179,952,571		495,007,216,326	DINKES
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/Nilai	B (66.20)	B (66.75)	B (68.94)	88,731,680,205	B (68.95)	65,834,376,000	B (68.96)	66,834,376,000	B (68.97)	67,834,376,000	B (68.98)	68,834,376,000	B (68.98)	358,069,184,205	DINKES
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	27.96	130.00	109.00	36,167,900,259	97.00	32,292,722,320	86.00	20,887,187,247	77.00	21,096,886,997	77.00	21,296,886,997	77.00	131,741,583,821	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	20.08	18.80	17.50		16.30		15.20		14.20		13.34		13.34		DINKES		
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persen	54.00%	66.13%	77.05%	446,962,422	78.89%	335,955,542	81.02%	335,955,542	83.33%	335,955,542	87.19%	335,955,542	87.19%	1,790,784,590	DINKES
				2. Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	Persen	74.03%	75.25%	78.46%		81.77%		85.58%		89.70%		98.44%		98.44%	DINKES	
				3. Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	Persen	87.50%	72.58%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	DINKES	
				4. Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing	Persen	0.00%	50.57%	52.68%		54.91%		57.47%		60.30%		63.14%		63.14%	DINKES	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persen	79%	100%	100%	456,633,000	100%	398,776,851	100%	435,189,351	100%	477,063,726	100%	477,063,726	100%	2,244,726,654	DINKES
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	75.10%	75.10%	78.10%	167,844,000	83.50%	209,308,445	87.10%	312,444,000	94%	235,670,306	100%	235,670,306	100%	1,160,937,057	DINKES
1	03		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						<b>53,268,023,958</b>		<b>52,560,165,972</b>		<b>34,975,751,140</b>		<b>38,401,505,635</b>		<b>42,001,505,635</b>		<b>221,206,952,340</b>	<b>PUPR</b>
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	B (66.05)	B (66.90)	B (67.20)	8,239,532,018	B (68.10)	8,780,984,653	B (68.90)	8,815,012,834	BB (70.15)	8,850,742,425	BB (70.55)	8,850,742,425	BB (70.55)	43,537,014,355	PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persen	1.53%	6.53%	11.53%	3,648,845,785	16.53%	2,316,902,873	21.53%	3,321,447,030	26.53%	3,563,277,263	31.53%	4,263,277,263	31.53%	17,113,750,213	PUPR
				2. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	0.00%	0.00%	30%		35%		40%		45%		50%		50%	PUPR	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persen	3.98%	4.77%	4.83%	3,400,868,323	4.90%	4,210,132,439	4.92%	4,220,010,320	4.94%	4,830,871,377	4.97%	4,830,871,377	4.97%	21,492,753,836	PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (AirLimbah Domestik Layak dan Aman)	Persen	3.70%	0.00%	0.20%	700,000,000	0.77%	3,548,086,446	1.01%	2,552,947,325	1.24%	3,187,709,467	1.26%	4,187,709,467	1.26%	14,176,452,705	PUPR
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen	74.93%	75.45%	76.02%	4,455,400,000	76.63%	3,091,776,102	77.28%	1,096,011,835	77.97%	1,963,064,355	78.69%	2,363,064,355	78.69%	12,969,316,648	PUPR
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persen	84.28%	84.28%	84.44%	250,000,000								250,000,000		250,000,000	PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persen	50.00%	66.67%	66.67%	2,700,000,000	71.67%	2,031,446,518	76.67%	2,034,229,600	81.67%	2,123,131,563	86.67%	3,123,131,563	86.67%	12,011,939,243	PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	64.40%	59.54%	61.54%	29,512,627,832	64.54%	25,900,537,337	66.54%	11,300,880,732	69.54%	12,500,195,720	71.54%	12,500,195,720	71.54%	91,714,437,341	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp	
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persen	32.31%	32.31%	32.31%	82,000,000	35.38%	95,000,000	35.38%	45,000,000	35.38%	46,000,000	38.45%	46,000,000	38.45%	314,000,000	PUPR
1 03 12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kepatuhan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Persen	52.11%	57.67%	62.08%	278,750,000	65.66%	2,585,299,603	68.62%	1,590,211,463	71.11%	1,336,513,466	73.24%	1,836,513,466	73.24%	7,627,287,999	PUPR
1 04	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						<b>11,996,638,997</b>		<b>14,109,768,835</b>		<b>9,629,099,218</b>		<b>9,847,202,158</b>		<b>8,885,760,490</b>		<b>54,468,469,698</b>	<b>PUPR</b>
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	0.00%	0.00%	0.25%	<b>500,000,000</b>	0.50%	500,000,000	0.75%	500,000,000	1.00%	500,000,000	1.25%	500,000,000	1.25%	2,500,000,000	PUPR
		2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0.00%	0.00%	25.00%		25.00%		50.00%		75.00%		100.00%		100.00%		PUPR
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	18.20%	18.24%	18.27%	678,942,825	18.29%	6,032,616,543	18.32%	3,544,991,227	18.35%	3,544,991,227	18.37%	3,544,991,227	18.37%	17,346,533,049	PUPR
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Peningkatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen	0.321%	0.324%	0.328%	2,126,106,295	0.331%	2,500,000,000	0.334%	2,500,000,000	0.338%	2,500,000,000	0.341%	1,000,000,000	0.341%	10,626,106,295	PUPR
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	64.40%	65.06%	65.73%	8,691,589,877	66.41%	5,077,152,293	67.09%	3,084,107,991	67.79%	3,302,210,930	68.48%	3,840,769,262	68.48%	23,995,830,353	PUPR
1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>						<b>8,337,943,218</b>		<b>17,081,154,941</b>		<b>14,956,154,941</b>		<b>14,031,154,941</b>		<b>14,331,154,941</b>		<b>68,737,562,982</b>	<b>BPBD</b>
1 05 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	B (60.80)	B (62,00)	B (62,50)	7,313,338,818	B (62,80)	8,716,154,941	B (63,10)	8,716,154,941	B (63,30)	8,716,154,941	B (63,80)	8,716,154,941	B (63,80)	42,177,958,582	BPBD
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi	Persen	100%	100%	100%	872,316,000	100%	5,565,000,000	100%	3,990,000,000	100%	4,065,000,000	100%	4,265,000,000	100%	18,757,316,000	BPBD
		2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
		3. Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1. Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan KEBAKARAN	Persen	100%	100%	100%	152,288,400	100%	2,800,000,000	100%	2,250,000,000	100%	1,250,000,000	100%	1,350,000,000	100%	7,802,288,400	BPBD
		2. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		BPBD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp		
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10,344,885,794		12,633,999,861		12,633,999,861		12,633,999,861		12,633,999,861		60,880,885,238	SATPOL PP WH	
1	05	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai/Predikat	61.75 B	62.70 B	63.00 B	10,098,535,352	63.20 B	7,309,888,778	63.51 B	7,309,888,778	63.82 B	7,309,888,778	64.10 B	7,309,888,778	64.10 B	39,338,090,464	SATPOL PP WH
1	05	02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	57.14%	95.71%	95.77%	246,350,442	98.59%	5,324,111,083	97.22%	5,324,111,083	97.26%	5,324,111,083	97.30%	5,324,111,083	97.30%	21,542,794,774	SATPOL PP WH
			2. Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persen	66.40%	66.67%	90.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		SATPOL PP WH
			3. Persentase Cakupan Perlindungan	Persen	17.25	17.26	17.28		17.30		17.33		17.35		17.35		17.35		SATPOL PP WH
			4. Persentase PPNS yang Ditingkatkan	Persen	20%	50%	50%		55.56%		67%		80%		100%		100%		SATPOL PP WH
1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					4,559,626,268		11,063,039,832		11,078,196,197		11,093,373,325		10,093,373,325		47,887,608,947	DINSOS	
1	06	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	B (64.65)	B (66.15)	B (66.45)	3,519,626,268	B (66.60)	5,948,215,753	B (66.65)	5,956,364,808	B (66.67)	5,964,525,028	B (66.70)	5,964,525,028	B (66.70)	27,353,256,885	DINSOS
1	06	02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1. Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	Persen	70%	79.66%	79.66%	145,000,000	79.66%	829,690,018	79.66%	830,826,693	79.66%	831,964,925	79.66%	831,964,925	79.66%	3,469,446,561	DINSOS
			2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	Persen	70.00%	79.66%	79.66%		79.66%		79.66%		79.66%		79.66%		79.66%		DINSOS
			3. Presentase pekerja sosial/Tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Persen	70.00%	80.00%	80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		DINSOS
			4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	Persen	55.00%	59.32%	59.32%		59.32%		59.32%		59.32%		59.32%		59.32%		DINSOS
1	06	04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	80.00%	80.00%	80.00%	720,000,000	80.00%	2,600,844,433	80.00%	2,604,407,589	80.00%	2,607,975,628	80.00%	1,607,975,628	80.00%	10,141,203,278	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	79.59%	80.00%	80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%	DINSOS	
		3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	80.00%	80.00%	80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%	DINSOS	
		4. Presentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0.00%	0.00%	60.00%		60.00%		60.00%		60.00%		60.00%		60.00%		60.00%	DINSOS	
		5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	0.00%	80.00%	80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%		80.00%	DINSOS	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persen	0.00%	50.00%	50.00%	30,000,000	50.00%	851,258,286	50.00%	852,424,509	50.00%	853,592,331	50.00%	853,592,331	50.00%	3,440,867,457	DINSOS
				2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persen	0.00%	50.00%	50.00%		50.00%		50.00%		50.00%		50.00%		50.00%	DINSOS	
				3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data	Persen	0.00%	79.41%	79.41%		79.41%		79.41%		79.41%		79.41%		79.41%	DINSOS	
				4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Persen	3.18%	3.18%	3.18%		3.18%		3.18%		3.18%		3.18%		3.18%	DINSOS	
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	120,000,000	100.00%	616,911,887	100.00%	617,757,056	100.00%	618,603,383	100.00%	618,603,383	100.00%	2,591,875,710	DINSOS
				2. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Persen	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%	DINSOS	
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	Persen	0.00%	100.00%	100.00%	25,000,000	100.00%	216,119,457	100.00%	216,415,540	100.00%	216,712,029	100.00%	216,712,029	100.00%	890,959,056	DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						108,966,834,761		110,223,899,173		113,414,305,548		115,531,862,251		114,215,862,251		562,352,763,984	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						7,234,508,050		5,912,610,230		6,005,110,230		6,066,610,230		6,066,610,230		31,285,448,970	DPMTSP NAKER
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	B (68.20)	B (68,85)	B (68,95)	6,135,636,050	B (69,05)	5,371,610,230	B (69,15)	5,389,110,230	B (69,20)	5,397,610,230	B (69,25)	5,397,610,230	B (69,25)	27,691,576,970	DPMTSP NAKER
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kabupaten/ Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Persen	0.00%	50.00%			50.00%	10,000,000	50.00%	15,000,000	50.00%	30,000,000	50.00%	30,000,000	50.00%	85,000,000	DPMTSP NAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp		
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Persen	15.50%	85.71%	86.49%	903,872,000	87.50%	200,000,000	87.50%	230,000,000	87.80%	270,000,000	88.10%	270,000,000	88.10%	1,873,872,000	DPMTSP NAKER	
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persen	8.91%	10.00%	10.03%	130,000,000	11.11%	161,000,000	12.74%	196,000,000	12.80%	215,000,000	13.36%	215,000,000	13.36%	917,000,000	DPMTSP NAKER	
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	200	200	200	65,000,000	300	170,000,000	400	175,000,000	400	154,000,000	450	154,000,000	450	718,000,000	DPMTSP NAKER	
2 08	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>						<b>5,084,849,752</b>		<b>6,862,000,000</b>		<b>7,554,000,000</b>		<b>7,909,700,000</b>		<b>7,909,700,000</b>		<b>35,320,249,752</b>	<b>DP3AP2 KB</b>	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	B (65.50)	B (66.20)	B (68.50)	4,316,689,152	B (68.51)	5,484,000,000	B (68.52)	6,059,000,000	B (68.53)	6,282,700,000	B (68.54)	6,282,700,000	B (68.54)	28,425,089,152	DP3AP2 KB	
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	3.06%	3.20%	3.50%	45,000,000	3.60%	145,000,000	3.70%	170,000,000	3.80%	185,000,000	3.90%	185,000,000	3.90%	730,000,000	DP3AP2 KB	
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	50.25%	50.27%	50.30%		50.32%		50.38%		50.40%		50.42%		50.42%		DP3AP2 KB	
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	215,300,000	100.00%	325,000,000	100.00%	335,000,000	100.00%	360,000,000	100.00%	360,000,000	100.00%	1,595,300,000	DP3AP2 KB	
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Persen	60.00%	65.38%	65.63%	20,000,000	65.79%	45,000,000	66.67%	55,000,000	69.39%	55,000,000	72.22%	55,000,000	72.22%	230,000,000	DP3AP2 KB	
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	29.41%	35.29%	44.12%	20,000,000	52.94%	40,000,000	58.82%	60,000,000	61.76%	70,000,000	64.71%	70,000,000	64.71%	260,000,000	DP3AP2 KB	
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	65.62	65.80	65.95	116,260,600	66.20	240,000,000	66.35	275,000,000	66.50	315,000,000	66.90	315,000,000	66.90	1,261,260,600	DP3AP2 KB	
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	67.50%	70.00%	71.43%	351,600,000	73.33%	583,000,000	79.07%	600,000,000	80.00%	642,000,000	80.00%	642,000,000	80.00%	2,818,600,000	DP3AP2 KB	
		2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Nilai	77.19	77.50	77.90		78.00		78.10		78.20		78.25		78.25		DP3AP2 KB	
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>						<b>9,422,868,789</b>		<b>8,208,824,229</b>		<b>9,168,196,824</b>		<b>9,180,865,301</b>		<b>9,180,865,301</b>		<b>45,161,620,444</b>	<b>DKPPP</b>	
2 09 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori / Poin	B / 63.65	B / 63.60	B / 64.50	9,372,868,789	B / 65.00	7,863,346,373	B / 65.50	8,822,228,999	B / 66.00	8,834,441,169	B / 66.65	8,834,441,169	B / 66.65	43,727,326,499	DKPPP	
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	77.54	77.80	78.00	40,000,000	78.40	277,407,280	78.95	277,795,650	79.00	278,184,564	79.25	278,184,564	79.25	1,151,572,057	DKPPP	
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Persen	33.82%	22.05%	20.58%	10,000,000	17.64%	50,044,110	16.17%	50,120,472	13.23%	50,162,593	10.29%	50,162,593	10.29%	210,489,768	DKPPP	
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	80.00%	80.00%	86.00%		90.00%	18,026,466	93.33%	18,051,703	94.29%	18,076,975	100.00%	18,076,975	100.00%	72,232,119	DKPPP	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp		
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>					3,542,567,907		4,999,865,350		5,445,368,718		5,922,273,263		5,572,273,263		25,482,348,501	<b>PERTANAHAN</b>	
2	10	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai	B (61.25)	B (61.65)	B (61.86)	3,392,240,000	B (62.17)	4,284,865,350	B (62.48)	4,670,368,718	B (62.79)	5,092,273,263	B (63,11)	5,092,273,263	B (63,11)	22,532,020,594	PERTANAHAN
2	10	12 PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Pengusahaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	3.53%	3.70%	3.89%	25,000,000	4.08%	160,000,000	4.29%	180,000,000	4.50%	200,000,000	4.73%	100,000,000	4.73%	665,000,000	PERTANAHAN
2	10	13 PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Persen	27.34%	28.70%	30.14%	25,000,000	31.65%	50,000,000	33.23%	50,000,000	34.89%	60,000,000	36.63%	60,000,000	36.63%	245,000,000	PERTANAHAN
2	10	14 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase SDM Bidang Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	43.86%	52.63%	59.65%	25,000,000	59.65%	160,000,000	59.65%	180,000,000	59.65%	200,000,000	59.65%	100,000,000	59.65%	665,000,000	PERTANAHAN
2	10	15 PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pertanian di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	Persen	54.17%	58.33%	61.25%	25,000,000	61.74%	50,000,000	62.33%	60,000,000	63.03%	60,000,000	63.81%	60,000,000	63.81%	255,000,000	PERTANAHAN
2	10	16 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Persentase Informasi Pertanian yang Dimanfaatkan	Persen	0%	0%	Persen	0%	0%	50,000,000	0%	60,000,000	0%	60,000,000	0%	60,000,000	0%	230,000,000	PERTANAHAN
2	10	17 PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanian	Persen	60.00%	60.00%	60.00%	50,327,907	60.00%	245,000,000	60.00%	245,000,000	66.67%	250,000,000	66.67%	100,000,000	66.67%	890,327,907	PERTANAHAN
2	11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>					40,887,730,122		30,660,978,465		30,584,758,463		30,639,758,461		30,539,758,461		163,312,983,972	<b>DLH</b>	
2	11	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	B (62.90)	CC (58.05)	B (63.10)	22,783,980,122	B (63.30)	26,234,978,467	B (63.40)	26,498,758,467	B (63.50)	26,498,758,467	B (63.80)	26,498,758,467	B (63.80)	128,515,233,990	DLH
2	11	02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	0.00%	2.00%	1.00%	347,250,000	1.00%	125,000,000	2.00%	125,000,000	1.00%	130,000,000	1.00%	130,000,000	1.00%	857,250,000	DLH
2	11	03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air	Indeks	70.00	71.00%	71.20%	9,183,600,000	71.45%	287,000,000	71.60%	287,000,000	71.80%	287,000,000	72.00%	287,000,000	72.00%	10,331,600,000	DLH
			2. Indeks Kualitas Udara	Indeks	92.89	92.91%	92.93%		92.95%		92.97%		92.99%		93.00%		93.00%	DLH	
2	11	04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	Persen	24.00%	24.00%	24.46%	1,910,900,000	26.00%	1,324,999,998	25.99%	984,999,996	27.03%	1,034,999,994	27.10%	934,999,994	27.10%	6,190,899,982	DLH
2	11	05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	persen	0.00%	40.66%	42.62%	170,000,000	46.03%	170,000,000	49.23%	170,000,000	52.24%	170,000,000	55.22%	170,000,000	55.22%	850,000,000	DLH
2	11	06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	persen	33.00	38.00	43.00%	80,000,000	48.00%	40,000,000	53.00%	40,000,000	58.00%	40,000,000	60.00%	40,000,000	60.00%	240,000,000	DLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	0	0	23.50%	170,000,000	19.12%	170,000,000	19.12%	170,000,000	19.12%	170,000,000	19.12%	170,000,000	19.12%	850,000,000	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	0	0	100.00%	189,000,000	100.00%	189,000,000	100.00%	189,000,000	100.00%	189,000,000	100.00%	189,000,000	100.00%	945,000,000	DLH
2	11	10	PROGRAM PENAGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persen	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%			-	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Angka	43.00	48.00	51.00	6,053,000,000	53	2,120,000,000	56.00	2,120,000,000	58.00	2,120,000,000	58.00	2,120,000,000	58.00	14,533,000,000	DLH
<b>2</b>	<b>12</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>						<b>4,257,344,053</b>		<b>9,236,700,000</b>		<b>9,824,165,000</b>		<b>10,056,847,250</b>		<b>9,956,847,250</b>		<b>43,331,903,553</b>	<b>DISDUK CAPIL</b>
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	63.20 B	63.60 B	64.00 B	3,357,344,053	64.40 B	6,647,900,000	64.80 B	7,177,900,000	65.20 B	7,227,900,000	65.60 B	7,227,900,000	65.60 B	31,638,944,053	DISDUK CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	10.59%	13.00%	20.00%	215,000,000	25.00%	737,600,000	32.00%	818,690,000	40.00%	900,559,000	40.00%	900,559,000	40.00%	3,572,408,000	DISDUK CAPIL
				2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	40.76%	43.00%	47.00%		51.00%		55.00%		60.00%		60.00%		60.00%		DISDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	145,000,000	100.00%	756,150,000	100.00%	828,465,000	100.00%	909,367,250	100.00%	909,367,250	100.00%	3,548,349,500	DISDUK CAPIL
				2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	99.66%	99.70%	99.80%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		DISDUK CAPIL
				3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		DISDUK CAPIL
				4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		DISDUK CAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	530,000,000	100.00%	1,064,800,000	100.00%	965,835,000	100.00%	982,418,500	100.00%	882,418,500	100.00%	4,425,472,000	DISDUK CAPIL
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	10,000,000	100.00%	30,250,000	100.00%	33,275,000	100.00%	36,602,500	100.00%	36,602,500	100.00%	146,730,000	DISDUK CAPIL
<b>2</b>	<b>13</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>						<b>4,349,042,182</b>		<b>5,761,391,785</b>		<b>6,290,846,011</b>		<b>6,673,245,659</b>		<b>6,773,245,659</b>		<b>29,847,771,295</b>	<b>DPMG</b>
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/Point	B / 62.55	B / 62.70	B / 62.80	3,523,542,182	B / 62.90	4,277,951,785	B / 63.15	4,666,562,011	B / 63.30	4,894,033,259	B / 63.45	4,994,033,259	B / 63.45	22,356,122,495	DPMG
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persen	0.00%	8.82%	14.71%	10,000,000	22.06%	84,700,000	29.41%	93,170,000	33.82%	102,487,000	38.24%	102,487,000	38.24%	392,844,000	DPMG
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persen	0.00%	14.71%	17.65%	10,000,000	22.06%	111,300,000	26.47%	114,930,000	29.41%	118,923,000	36.76%	118,923,000	36.76%	474,076,000	DPMG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persen	0.00%	18.15%	19.76%	386,500,000	19.96%	556,600,000	20.97%	612,260,000	22.38%	673,486,000	23.79%	673,486,000	23.79%	2,902,332,000	DPMG
				2. Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persen	0.00%	99.50%	99.55%		99.60%		99.65%		99.70%		99.75%		99.75%		DPMG
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persen	66.67%	73.53%	76.47%	419,000,000	78.92%	730,840,000	81.37%	803,924,000	83.82%	884,316,400	86.27%	884,316,400	86.27%	3,722,396,800	DPMG
				2. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persen	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		DPMG
2	14		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>					<b>2,026,033,000</b>		<b>2,658,000,000</b>		<b>2,752,000,000</b>		<b>3,019,000,000</b>		<b>2,748,000,000</b>		<b>13,203,033,000</b>	<b>DP3AP2 KB</b>	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2.28	2.27	179,400,000	2.27	171,000,000	2.26	177,000,000	2.26	190,000,000	2.25	190,000,000	2.25	907,400,000	DP3AP2 KB	
				2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific FertilityRate/ ASFR 15-19)	Angka	8.5	7.0		6.4		5.9		5.4		5.0		5.0		DP3AP2 KB	
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Angka	50.20	57.10	1,309,233,000	57.20	1,789,000,000	57.50	1,842,000,000	58.00	2,071,000,000	58.20	1,800,000,000	58.20	8,811,233,000	DP3AP2 KB	
				2. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)	Persen	15.90%	8.47%	8.41%		8.30%		8.26%		8.11%		8.11%		8.11%		DP3AP2 KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persen	71.58%	75.56%	86.08%	537,400,000	89.47%	698,000,000	91.89%	733,000,000	91.89%	758,000,000	91.89%	758,000,000	91.89%	3,484,400,000	DP3AP2 KB
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>					<b>6,918,615,760</b>		<b>6,631,380,000</b>		<b>6,865,380,000</b>		<b>7,016,380,000</b>		<b>7,016,380,000</b>		<b>34,448,135,760</b>	<b>DISHUB</b>	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai	B (60.35)	B (62.80)	4,633,219,780.00	B (63.20)	5,077,380,000	B (63.50)	4,921,880,000	B (63.90)	5,187,380,000	B (64.11)	5,187,380,000	B (64.11)	25,007,239,780	DISHUB	
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Konektivitas Darat	Rasio	0.50	0.50	2,285,395,980.00	0.50	1,469,000,000	0.50	1,293,500,000	1.00	1,329,000,000	1.00	1,529,000,000	1.00	7,905,895,980	DISHUB	
				2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	62.50%	62.50%	62.50%		62.50%		87.50%		87.50%		87.50%		87.50%		DISHUB
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Laut	Rasio	0	0	0	0	85,000,000	0	650,000,000	0	500,000,000	0	300,000,000	0	1,535,000,000	DISHUB	
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>6,792,996,749</b>		<b>3,783,340,000</b>		<b>3,696,340,000</b>		<b>3,751,340,000</b>		<b>3,751,340,000</b>		<b>21,775,356,749</b>	<b>KOMINFO</b>	
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai	B (60.95)	B (62.60)	3,332,996,749	B (62.80)	3,643,340,000	B (63.00)	3,554,340,000	B (63.20)	3,602,340,000	B (63.40)	3,602,340,000	B (63.40)	17,735,356,749	KOMINFO	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	Persen	84.54%	84.63%	84.72%	1,485,000,000	84.81%	94,000,000	84.90%	94,000,000	98.49%	99,000,000	85.08%	99,000,000	85.08%	1,871,000,000	KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	Indeks	2.80	3.00	3.10	1,975,000,000	3.15	46,000,000	3.20	48,000,000	3.25	50,000,000	3.30	50,000,000	3.30	2,169,000,000	KOMINFO
<b>2</b>	<b>17</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>				<b>5,614,512,553</b>			<b>6,226,403,644</b>		<b>7,778,544,008</b>		<b>8,206,748,409</b>		<b>8,356,748,409</b>		<b>36,182,957,024</b>	<b>DISKOP</b>	
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Level/Point	65.90 (B)	66.45 (B)	66.95 (B)	5,036,362,553	67.20 (B)	5,031,795,655	67.80 (B)	6,585,475,221	68.00 (B)	6,877,472,743	68.20 (B)	6,977,472,743	68.20 (B)	30,508,578,915	DISKOP
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persen	12.00%	22.20%	26.90%	10,000,000	27.10%	10,000,000	27.30%	10,000,000	27.50%	10,000,000	27.80%	10,000,000	27.80%	50,000,000	DISKOP
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	6.89%	5.28%	7.04%	30,000,000	8.80%	22,000,000	8.80%	24,200,000	10.56%	26,620,000	10.56%	26,620,000	10.56%	129,440,000	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	Persen	38.80	39.4	40.29	10,000,000	41.49	22,000,000	42.08	24,200,000	43.28	26,620,000	44.18	26,620,000	44.18	109,440,000	DISKOP
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persen	0.00%	8.80%	10.56%	40,000,000	10.56%	45,000,000	14.08%	50,500,000	14.08%	65,000,000	17.61%	90,000,000	17.61%	290,500,000	DISKOP
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	0.00%	7.04%	7.75%	20,000,000	8.45%	55,000,000	9.15%	60,500,000	9.86%	75,000,000	10.56%	100,000,000	10.56%	310,500,000	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persen	0.65	0.72	0.76	398,150,000	0.79	820,607,989	0.83	902,668,788	0.86	992,935,666	0.9	992,935,666	0.9	4,107,298,109	DISKOP
				2. Pertumbuhan Wirausaha	Persen	6.02	7.95	10.53		11.43		12.82		12.88		13.42		13.42	DISKOP	
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Persen	0.00%	2.17%	2.24%	70,000,000	2.26%	220,000,000	2.30%	121,000,000	2.34%	133,100,000	2.36%	133,100,000	2.36%	677,200,000	DISKOP
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>				<b>275,000,000</b>			<b>1,142,603,550</b>		<b>1,169,970,000</b>		<b>1,290,488,728</b>		<b>1,290,488,728</b>		<b>5,168,551,005</b>	<b>DPMTSP NAKER</b>	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	105.2	98.04	98.08	15,000,000	99.06	319,451,050	99.09	324,970,000	99.13	331,178,603	99.17	331,178,603	99.17	1,321,778,255	DPMTSP NAKER
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	20.00%	5.30%	5.00%	30,000,000	4.80%	23,152,500	4.50%	20,000,000	4.30%	24,310,125	4.20%	24,310,125	4.20%	121,772,750	DPMTSP NAKER
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	94.74%	94.74%	95.32%	120,000,000	95.79%	280,000,000	96.17%	300,000,000	96.49%	405,000,000	96.76%	405,000,000	96.76%	1,510,000,000	DPMTSP NAKER
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Persen	97.50	97.50	92.62	90,000,000	92.73	500,000,000	90.83	500,000,000	91.00	500,000,000	91.15	500,000,000	91.15	2,090,000,000	DPMTSP NAKER
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persen	40.65	40.65	40.62	20,000,000	40.60%	20,000,000	40.58%	25,000,000	40.55%	30,000,000	40.53%	30,000,000	40.53%	125,000,000	DPMTSP NAKER
<b>2</b>	<b>19</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				<b>6,319,431,789</b>			<b>9,973,140,980</b>		<b>7,948,140,980</b>		<b>6,830,140,980</b>		<b>5,985,140,980</b>		<b>37,055,995,709</b>	<b>DISPORAPAR</b>	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/Nilai	65.45/B	65.50/B	65.75/B	3,356,431,789	65.81/B	3,798,140,980	66.16/B	3,818,140,980	66.45/B	3,830,140,980	67.2/B	3,830,140,980	67.2/B	18,632,995,709	DISPORAPAR
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	12.04%	12.02%	11.92%	460,000,000	11.88%	405,000,000	11.83%	405,000,000	11.81%	405,000,000	11.78%	405,000,000	11.78%	2,080,000,000	DISPORAPAR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang berasal dari kab/Kota yang masuk Pelatda Propinsi	Persen	1.17%	1.00%	1.00%	2,253,000,000	1.00%	5,290,000,000	1.00%	3,245,000,000	1.00%	2,115,000,000	1.00%	1,500,000,000	1.00%	14,403,000,000	DISPORAPAR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persen	0.00%	95.00%	95.00%	250,000,000	96.00%	480,000,000	98.00%	480,000,000	98.00%	480,000,000	100.00%	250,000,000	100.00%	1,940,000,000	DISPORAPAR
<b>2</b>	<b>21</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>						<b>90,000,000</b>		<b>90,000,000</b>		<b>90,000,000</b>		<b>90,000,000</b>		<b>90,000,000</b>		<b>450,000,000</b>	<b>KOMINFO</b>
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai	0.00	1.00	1.01	90,000,000	1.05	90,000,000	1.08	90,000,000	1.09	90,000,000	1.10	90,000,000	1.10	450,000,000	KOMINFO
<b>2</b>	<b>22</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>633,000,000</b>		<b>1,736,244,255</b>		<b>1,743,000,000</b>		<b>1,746,000,000</b>		<b>1,746,000,000</b>		<b>7,604,244,255</b>	<b>PK</b>
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persen	33.33%	33.33	33.33	210,000,000	33.33	595,000,000	33.33	595,000,000	40.00%	595,000,000	40.00%	595,000,000	40.00%	2,590,000,000	PK
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persen	20.00	20.00	40.00	80,000,000	40.00	80,000,000	60.00	85,000,000	60.00	85,000,000	66.67	85,000,000	66.67	415,000,000	PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Persen	58.33	58.33	66.67	65,000,000	66.67	115,244,255	75.00	115,000,000	75.00	115,000,000	83.33	115,000,000	83.33	525,244,255	PK
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persen	61.56%	24.52%	24.52%	233,000,000	29.44%	801,000,000	36.37%	803,000,000	45.30%	806,000,000	55.15%	806,000,000	55.15%	3,449,000,000	PK
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persen	11.00%	26.90%	40.70%		60.20%		77.80%		87.00%		100.00%		100.00%	-	PK
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persen	13.76%	13.76%	13.76%	45,000,000	13.77%	145,000,000	13.77%	145,000,000	13.80%	145,000,000	13.84%	145,000,000	13.84%	625,000,000	PK
<b>2</b>	<b>22</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>						<b>1,980,376,406</b>		<b>1,949,343,050</b>		<b>1,643,736,221</b>		<b>1,542,336,221</b>		<b>1,542,336,221</b>		<b>8,658,128,119</b>	<b>MAA</b>
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/Nilai	B 60.75	B 61.50	B 62.15	1,754,771,286	B 62.75	1,514,243,050	B 63.10	1,463,662,149	B 63.75	1,362,262,149	B 64.00	1,362,262,149	B 64.00	7,457,200,783	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Indeks Adat Istiadat Aceh	Nilai	0.00	97.43	97.44	225,605,120	97.60	435,100,000	97.64	180,074,072	97.69	180,074,072	99.00	180,074,072	99.00	1,200,927,336	MAA
<b>2</b>	<b>23</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>						<b>3,462,957,649</b>		<b>4,109,936,136</b>		<b>4,559,554,718</b>		<b>5,280,173,655</b>		<b>5,380,173,655</b>		<b>22,792,795,813</b>	<b>ARPUS</b>
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai/Predikat	60.75 B	61.20 B	61.95 B	3,317,957,649	62.10 B	3,788,661,136	62.80 B	4,146,880,240	63.20 B	4,737,427,602	63.90 B	4,837,427,602	63.90 B	20,828,354,229	ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68.15	68.19	69.25	140,000,000	70.11	301,275,000	70.29	400,674,478	71.05	522,746,053	71.15	522,746,053	71.15	1,887,441,584	ARPUS
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di miliki	Persen	0%	0%	100%	5,000,000	100%	20,000,000	100%	12,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	77,000,000	ARPUS
<b>2</b>	<b>24</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>						<b>75,000,000</b>		<b>281,137,500</b>		<b>295,194,375</b>		<b>309,954,094</b>		<b>309,954,094</b>		<b>1,271,240,063</b>	<b>ARPUS</b>
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persen	50.76%	51.10%	52.21%	75,000,000	53.68%	132,300,000	55.88%	138,915,000	60.29%	145,860,750	64.71%	145,860,750	64.71%	637,936,500	ARPUS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persen	0.00%	20.00%	40.00%	-	30.00%	148,837,500	40.00%	156,279,375	50.00%	164,093,344	60.00%	164,093,344	60.00%	633,303,563	ARKUS
3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																	
3	25		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>																	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	12852.00	14480.28	14809.50	529,862,278	15138.25	931,367,401	15357.67	932,671,316	15576.57	933,977,056	15906.44	933,977,056	15906.44	4,261,855,106	DKPPP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1731.00	2016.68	2026.77	150,000,000	2036.90	515,830,733	2047.09	512,417,917	2057.32	510,211,189	2067.61	510,211,189	2067.61	2,198,671,028	DKPPP
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	0.00	0.00	0.00	-	1.00	60,000,000	1.00	70,000,000	1.00	73,000,000	1.00	73,000,000	1.00	276,000,000	DKPPP
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	72.15	72.15	72.35	-	72.50	80,117,626	72.63	80,229,791	72.72	80,342,112	72.78	80,342,112	72.78	321,031,641	DKPPP
3	26		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>																	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	-3.86%	1.00%	2.00%	240,000,000	3.00%	945,000,000	4.00%	545,000,000	5.00%	570,000,000	6.00%	300,000,000	6.00%	2,600,000,000	DISPORAPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	0.00%	0.00%	50.00%	267,000,000	66.67%	300,000,000	80.00%	300,000,000	89.00%	300,000,000	94.12%	250,000,000	94.12%	1,417,000,000	DISPORAPAR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persen	0.00%	0.00%	25.00%	35,000,000	28.00%	195,000,000	31.25%	200,000,000	33.33%	200,000,000	35.71%	200,000,000	35.71%	830,000,000	DISPORAPAR
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>																	
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Persen	5.67%	5.69%	5.71%	308,729,000	5.74%	926,520,285	5.77%	927,752,286	5.80%	929,051,139	5.83%	800,000,000	5.83%	3,892,052,710	DKPPP
				2. Peningkatan Produksi Hortikultura	Persen	3.14%	4.48%	4.50%	-	4.52%	-	4.54%	-	4.56%	-	4.58%	-	4.58%	-	DKPPP
				3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Persen	0.3	1.27	1.58	-	2.14%	-	2.49%	-	2.77%	-	3.00%	-	3.00%	-	DKPPP
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	179.85	179.85	179.85	280,000,000	179.85	1,500,268,710	179.85	900,123,032	179.85	949,289,005	179.85	1,049,289,005	179.85	4,678,969,752	DKPPP
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	100.00	100.00	100.00	10,000,000	100.00	200,294,065	100.00	200,534,418	100.00	200,815,166	100.00	200,815,166	100.00	812,458,814	DKPPP
				2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	25.00%	25.00%	43.75%	-	62.50%	-	68.75%	-	75.00%	-	93.75%	-	93.75%	-	DKPPP
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	10.00%	10.00%	20.00%	10,000,000	30.00%	63,092,630	40.00%	63,168,342	50.00%	63,256,777	60.00%	63,256,777	60.00%	262,774,526	DKPPP
				2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persen	95.00%	95.00%	90.00%	-	85.00%	-	80.00%	-	75.00%	-	70.00%	-	70.00%	-	DKPPP
3	27	06	PROGRAM USAHA PERTANIAN	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Persen	0.00%	0.00%	0.00%	-	34.72%	45,000,000	48.61%	47,000,000	66.67%	50,000,000	93.02%	50,000,000	93.02%	192,000,000	DKPPP
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persen	8.33%	8.33%	25.00%	447,431,294	41.67%	1,033,517,374	58.33%	1,034,757,595	75.00%	1,036,206,256	91.67%	450,000,000	91.67%	4,001,912,519	DKPPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp		
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah	11.76	11.76	23.5		35.29		47.00		58.8		70.59		70.59		DKPPP	
3	30	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>3,375,000,000</b>		<b>2,263,140,000</b>		<b>2,489,454,000</b>		<b>2,761,779,400</b>		<b>2,811,779,400</b>		<b>13,701,152,800</b>	<b>DISKOP</b>	
3	30	03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persen	0.22%	8.00%	8.00%	1,820,000,000	8.00%	1,118,150,000	12.00%	1,229,965,000	12.00%	1,352,961,500	16.00%	1,352,961,500	16.00%	6,874,038,000	DISKOP	
3	30	04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persen	60.01%	59.98%	60.01%	1,070,000,000	60.10%	664,290,000	60.35%	730,719,000	60.45%	803,790,900	60.55%	803,790,900	60.55%	4,072,590,800	DISKOP	
3	30	05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp. Juta	34.51	36.20	38.92	415,000,000	40.21	386,100,000	42.25	424,710,000	44.12	467,181,000	46.32	467,181,000	46.32	2,160,172,000	DISKOP	
3	30	06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persen	71.35%	74.07%	71.35%	70,000,000	74.07%	72,600,000	75.00%	79,860,000	77.71%	87,846,000	77.71%	87,846,000	77.71%	398,152,000	DISKOP	
3	30	07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persen	0.00%	45.00%	50.00%		50.00%	22,000,000	55.00%	24,200,000	55.00%	50,000,000	60.00%	100,000,000	60.00%	196,200,000	DISKOP	
3	31	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>273,403,155</b>		<b>698,548,747</b>		<b>768,403,621</b>		<b>845,243,983</b>		<b>548,580,622</b>		<b>3,134,180,127</b>	<b>DISKOP</b>	
3	31	02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persen	5.27%	5.00%	5.27%	233,403,155	5.77%	658,399,473	6.00%	724,239,420	6.27%	796,663,362	6.27%	500,000,000	6.27%	2,912,705,409	DISKOP	
3	31	03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persen	5.00%	5.00%	5.00%	20,000,000	5.33%	22,000,000	5.45%	24,200,000	5.65%	26,620,000	5.65%	26,620,000	5.65%	119,440,000	DISKOP	
3	31	04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persen	88.00	90.00	91.00	20,000,000	92.00	18,149,274	94.00	19,964,201	96.00	21,960,622	98.00	21,960,622	98	102,034,718	DISKOP	
4		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					<b>57,157,911,240</b>		<b>66,720,766,777</b>		<b>70,916,463,555</b>		<b>72,531,972,402</b>		<b>74,731,972,402</b>		<b>342,059,086,375</b>		
4	01	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>					<b>30,226,287,931</b>		<b>34,388,491,786</b>		<b>37,050,961,065</b>		<b>37,779,919,663</b>		<b>38,979,919,663</b>		<b>178,425,580,109</b>	<b>SETDAKO</b>	
4	01	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Level/Point	63.55 (B)	63.95 (B)	64.50 (B)	27,968,751,400	65.00 (B)	31,494,027,098	65.50 (B)	33,942,576,198	66.00 (B)	34,451,776,528	66.50 (B)	35,451,776,528	66.50 (B)	163,308,907,752	SETDAKO	
		2. Indeks Kematangan Organisasi (KOD)	Nilai	n.a	29.00	30.00		30.00		32.00		35.00		35.00		35.00		SETDAKO	
4	01	02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persen	100%	100%	100%	1,507,536,531	100%	1,843,754,688	100%	2,017,130,157	100%	2,196,343,172	100%	2,396,343,172	100%	9,961,107,721	SETDAKO	
		2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SETDAKO	
		3. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SETDAKO	
		4. Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	Persen	100%	100%	100%		100		100%		100		100%		100%		SETDAKO	
4	01	03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persen	100%	100%	100%	750,000,000	100%	1,050,710,000	100%	1,091,254,710	100%	1,131,799,963	100%	1,131,799,963	100%	5,155,564,636	SETDAKO	
		2. Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		SETDAKO	
		3. Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	8.89	9.00	9.15		9.3		9.45		9.6		9.75		9.75		SETDAKO	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4	02	SEKRETARIAT DPRD					26,931,623,309		32,332,274,991		33,865,502,490		34,752,052,739		35,752,052,739		163,633,506,267	SETWAN		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Poin	B 61.10	B 62.70	B 65,50	23,603,623,309	B 67,00	26,775,240,213	B 68,30	27,752,764,235	BB 70,00	28,028,040,658	BB 75,00	29,028,040,658	BB 75,00	135,187,709,074	SETWAN
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat / Tidak tepat	Tepat	Tepat	Tepat	3,328,000,000	Tepat	5,557,034,777	Tepat	6,112,738,255	Tepat	6,724,012,080	Tepat	6,724,012,080	Tepat	28,445,797,193	SETWAN
				2. Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persen	54.55%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	SETWAN	
				3. Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	SETWAN	
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					157,000,543,209		169,880,249,041		171,149,576,322		172,444,551,912		172,072,694,924		842,547,615,408			
5	01	PERENCANAAN					7,219,074,456		8,529,731,922		8,684,417,458		8,883,583,497		8,511,726,509		41,828,533,843	BAPPEDA		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat	B (66.95)	B (67.15)	B (69.10)	6,097,190,651	BB (70.15)	6,372,876,560	BB (73.30)	6,372,876,560	BB (75.00)	6,381,726,509	BB (77.50)	6,381,726,509	BB (77.50)	31,606,396,789	BAPPEDA
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	Persen	93.01%	100%	100%	628,331,095	100%	1,296,855,362	100%	1,426,540,898	100%	1,571,856,988	100%	1,200,000,000	100%	6,123,584,343	BAPPEDA
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	93.01%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	BAPPEDA	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	96.08%	100%	100%	493,552,710	100%	860,000,000	100%	885,000,000	100%	930,000,000	100%	930,000,000	100%	4,098,552,710	BAPPEDA
				2. Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	80%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	BAPPEDA	
				3. Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	BAPPEDA	
5	02	KEUANGAN					141,334,698,847		149,306,302,224		150,305,402,224		150,957,502,224		150,957,502,224		742,861,407,744	BPKD		
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Persen	B (64.85)	B (66.15)	B (66.25)	15,803,548,613	B (66.50)	14,159,348,613	B (66.75)	14,464,448,613	B (67.50)	14,529,548,613	B (68.00)	14,529,548,613	B (68.00)	73,486,443,065	BPKD
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	38.50%	41.58%	41.51%	122,863,061,434	41.49%	132,405,138,611	41.36%	133,015,138,611	41.07%	133,575,138,611	40.85%	133,575,138,611	40.85%	655,433,615,879	BPKD
				2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	40.00%	19.86%	20.07%		20.30%		20.62%		20.94%		21.17%		21.17%	BPKD	
				3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan	Persen	96.60%	98.75%	95.78%		95.35%		98.31%		97.52%		97.87%		97.87%	BPKD	
				4. Persentase Penurunan SILPA	Persen	-65.88%	-36.68%	-37.50%		-20.00%		-12.50%		-14.29%		-16.67%		-16.67%	BPKD	
				5. Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	BPKD	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	1.58%	2.49%	2.74%	1,288,000,000	2.37%	1,311,000,000	2.60%	1,335,000,000	2.54%	1,357,000,000	2.20%	1,357,000,000	2.20%	6,648,000,000	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	8.14%	8.98%	10.29%	1,380,088,800	10.63%	1,430,815,000	9.76%	1,490,815,000	12.09%	1,495,815,000	10.01%	1,495,815,000	10.01%	7,293,348,800	BPKD
				2. Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	100.00%	100.00%	75.00%		75.00%		100.00%		75.00%		100.00%		100.00%		BPKD
				3. Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	90.31%	90.31%	90.14%		90.03%		90.31%		90.58%		91.41%		91.41%		BPKD
5	03		<b>KEPEGAWAIAN</b>						<b>6,786,566,706</b>		<b>8,108,754,894</b>		<b>8,524,296,639</b>		<b>8,978,006,191</b>		<b>8,978,006,191</b>		<b>41,375,630,622</b>	<b>BKPSDM</b>
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai/Kategori	62.75 B	62.85 B	63.5 B	5,113,082,183	64.00 B	5,698,754,894	64.50 B	5,994,296,639	65.00 B	6,302,506,191	65.50 B	6,302,506,191	65.50 B	29,411,146,099	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persen	47.08%	79.21%	81.48%	1,673,484,523	81,88%	2,410,000,000	82,16%	2,530,000,000	82,43%	2,675,500,000	82,56%	2,675,500,000	82,56%	11,964,484,523	BKPSDM
				2. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persen	6,57%	10,32%	14,32%		15,49%		15,83%		16,17%		16,52%		16,52%		BKPSDM
				3. Skor Pengembangan Karir ASN dalam penilaian Sistem Merit	Persen	2.50%	2.50%	15.00%		30.00%		40.00%		50.00%		60.00%		60.00%		BKPSDM
				4. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persen	67.96%	68.39%	68.82%		69.25%		69.69%		70.12%		70.55%		70.55%		BKPSDM
5	04		<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>						<b>1,256,203,200</b>		<b>3,055,460,000</b>		<b>3,065,460,000</b>		<b>3,080,460,000</b>		<b>3,080,460,000</b>		<b>13,538,043,200</b>	<b>BKPSDM</b>
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	Persen	n.a	4.04%	4.33%	1,256,203,200	4.61%	3,055,460,000	4.90%	3,065,460,000	5.05%	3,080,460,000	5.19%	3,080,460,000	5.19%	13,538,043,200	BKPSDM
				2. Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persen	n.a	1.44%	1.59%		1.73%		2.02%		2.31%		2.60%		2.60%		BKPSDM
5	05		<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>						<b>404,000,000</b>		<b>880,000,000</b>		<b>570,000,000</b>		<b>545,000,000</b>		<b>545,000,000</b>		<b>2,944,000,000</b>	<b>BAPPEDA</b>
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persen	0.00%	50.00%	66.67%	200,000,000	75.00%	455,000,000	80.00%	420,000,000	83.33%	295,000,000	100.00%	295,000,000	100.00%	1,665,000,000	BAPPEDA
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persen	63.64%	72.73%	76.00%	204,000,000	78.57%	425,000,000	80.65%	150,000,000	82.35%	250,000,000	83.78%	250,000,000	83.78%	1,279,000,000	BAPPEDA
6			<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>						<b>7,931,647,243</b>		<b>14,205,716,065</b>		<b>13,974,415,320</b>		<b>14,094,177,188</b>		<b>14,194,177,188</b>		<b>64,400,133,003</b>	
6	01		<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						<b>7,931,647,243</b>		<b>14,205,716,065</b>		<b>13,974,415,320</b>		<b>14,094,177,188</b>		<b>14,194,177,188</b>		<b>64,400,133,003</b>	<b>INSPEKTORAT</b>
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai	B 67.65	B 68.20	B 68.30	6,452,480,032	B 68.40	9,106,816,782	B 68.50	8,767,708,546	B 68.60	8,779,652,225	B 68.70	8,779,652,225	B 68.70	41,886,309,810	INSPEKTORAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	81.11%	81.11%	82.40%	1,300,546,764	83.07%	3,961,643,812	84.59%	4,067,893,264	85.13%	4,174,151,277	85.30%	4,274,151,277	85.30%	17,778,386,394	INSPEKTORAT



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 3.031	Level 3 3,2	Level 3 3,3	178,620,447	Level 3 3,4	1,137,255,471	Level 3 3,5	1,138,813,511	Level 3 3,6	1,140,373,685	Level 3 3,6	1,140,373,685	Level 3 3,6	4,735,436,800	INSPEKTORAT	
				2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3 3.00	Level 3 3,2	Level 3 3,2		Level 3 3,2		Level 3 3,5		Level 3 3,5		Level 3 3,5		Level 3 3,5		INSPEKTORAT	
7			<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				<b>12,085,585,802</b>		<b>17,000,401,943</b>		<b>17,448,321,871</b>		<b>17,941,129,651</b>		<b>18,041,129,651</b>		<b>82,516,568,918</b>			
7	01		<b>KECAMATAN</b>				<b>3,611,794,902</b>		<b>4,536,026,196</b>		<b>4,724,259,445</b>		<b>4,912,236,231</b>		<b>4,912,236,231</b>		<b>22,696,553,005</b>		<b>B. SAKTI</b>	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai/Predikat	B 62.15	B 60.45	B 62.28	3,426,591,970	B 62.30	4,102,488,696	B 62.32	4,270,876,945	B 62.34	4,437,184,606	B 62.40	4,437,184,606	B 62.40	20,674,326,823	B. SAKTI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	63.00%	63.00%	65.00%	95,000,000	66.00%	270,112,500	69.00%	283,618,125	69.00%	297,799,031	70.00%	297,799,031	70.00%	1,244,328,688	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	13,002,932	100.00%	38,687,500	100.00%	39,790,000	100.00%	41,779,500	100.00%	41,779,500	100.00%	175,039,432	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	33,200,000	100.00%	38,587,500	100.00%	40,516,875	100.00%	42,542,719	100.00%	42,542,719	100.00%	197,389,813	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	44,000,000	100.00%	86,150,000	100.00%	89,457,500	100.00%	92,930,375	100.00%	92,930,375	100.00%	405,468,250	B. SAKTI
7	01		<b>KECAMATAN</b>				<b>2,899,941,803</b>		<b>4,505,965,524</b>		<b>4,535,965,524</b>		<b>4,655,965,524</b>		<b>4,755,965,524</b>		<b>21,353,803,899</b>		<b>B. MANGAT</b>	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai/Predikat	CC 59.45	B 60.15	B 60.20	2,728,381,343	B 60.30	4,120,965,524	B 60.35	4,150,965,524	B 60.40	4,270,965,524	B 60.42	4,370,965,524	B 60.42	19,642,243,439	B. MANGAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	63.00%	63.00%	65.00%	85,360,460	66.00%	235,000,000	69.00%	235,000,000	69.00%	235,000,000	70.00%	235,000,000	70.00%	1,025,360,460	B. MANGAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	11,000,000	100.00%	40,000,000	100.00%	40,000,000	100.00%	40,000,000	100.00%	40,000,000	100.00%	171,000,000	B. MANGAT
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	33,200,000	100.00%	35,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	35,000,000	100.00%	173,200,000	B. MANGAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	42,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	342,000,000	B. MANGAT
7	01		<b>KECAMATAN</b>				<b>2,722,511,841</b>		<b>3,817,569,104</b>		<b>3,951,672,508</b>		<b>4,050,792,399</b>		<b>4,050,792,399</b>		<b>18,593,338,251</b>		<b>M. SATU</b>	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai/Predikat	CC 59.30	B 60.15	B 60.25	2,523,311,841	B 60.40	3,121,494,104	B 60.60	3,188,198,758	B 60.80	3,249,744,961	B 61.00	3,249,744,961	B 61.00	15,332,494,626	M. SATU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	80.00%	80.00%	90.00%	112,000,000	100.00%	536,975,000	100.00%	591,473,750	100.00%	624,047,438	100.00%	624,047,438	100.00%	2,488,543,625	M. SATU
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	10,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	110,000,000	M. SATU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp			
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	33,200,000	100.00%	44,100,000	100.00%	57,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	254,300,000	M. SATU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	44,000,000	100.00%	90,000,000	100.00%	90,000,000	100.00%	92,000,000	100.00%	92,000,000	100.00%	408,000,000	M. SATU
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>KECAMATAN</b>							<b>2,851,337,256</b>		<b>4,140,841,120</b>		<b>4,236,424,394</b>		<b>4,322,135,497</b>		<b>4,322,135,497</b>		<b>19,872,873,763</b>	<b>M. DUA</b>
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Predikat/Nilai	CC 59.75	B 60.45	B 60.60	2,650,877,404	B 60.80	3,389,741,120	B 61.00	3,452,950,644	B 61.20	3,511,088,059	B 61.40	3,511,088,059	B 61.40	16,515,745,286	M. DUA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	104,279,759	100.00%	580,975,000	100.00%	611,473,750	100.00%	634,047,438	100.00%	634,047,438	100.00%	2,564,823,384	M. DUA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	14,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	25,000,000	100.00%	114,000,000	M. DUA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	25,000,000	100.00%	55,125,000	100.00%	57,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	60,000,000	100.00%	257,125,000	M. DUA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	57,180,093	100.00%	90,000,000	100.00%	90,000,000	100.00%	92,000,000	100.00%	92,000,000	100.00%	421,180,093	M. DUA
<b>8</b>		<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>							<b>5,216,004,336</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>29,316,860,336</b>	
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>							<b>5,216,004,336</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>6,025,214,000</b>		<b>29,316,860,336</b>	<b>KESBANGPOL</b>
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Nilai/Predikat	60.80 B	60.90 B	61.00 B	2,940,527,208	61.10 B	3,505,214,000	61.20 B	3,505,214,000	61.30 B	3,505,214,000	61.40 B	3,505,214,000	61.40 B	16,961,383,208	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen	21.84%	21.74%	25.00%	97,180,800	26.47%	120,000,000	28.13%	120,000,000	30.00%	120,000,000	32.14%	120,000,000	32.14%	577,180,800	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persen	22.50%	24.00%	36.00%	1,431,296,328	38.00%	1,100,000,000	40.00%	1,100,000,000	44.00%	1,100,000,000	50.00%	1,100,000,000	50.00%	5,831,296,328	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Presentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	27.78%	34.72%	38.89%	97,000,000	41.67%	245,000,000	48.61%	245,000,000	50.00%	245,000,000	55.56%	245,000,000	55.56%	1,077,000,000	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		Target	Rp		
					Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persen	0.00%	73.53	77.94	50,000,000	82.35	735,000,000	86.76	735,000,000	95.59	735,000,000	100.00%	735,000,000	100.00%	2,990,000,000	KESBANGPOL	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen	0.00%	50.00%	100.00%	600,000,000	100.00%	320,000,000	100.00%	320,000,000	100.00%	320,000,000	100.00%	320,000,000	100.00%	1,880,000,000	KESBANGPOL	
9	<b>UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN</b>						<b>19,236,892,591</b>		<b>29,635,274,138</b>		<b>30,324,038,243</b>		<b>31,067,751,604</b>		<b>30,467,751,604</b>		<b>140,731,708,179</b>		
9 01	<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>						<b>3,260,805,336</b>		<b>4,608,022,513</b>		<b>4,941,231,513</b>		<b>5,001,562,013</b>		<b>5,001,562,013</b>		<b>22,813,183,388</b>	<b>MPU</b>	
9 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/Nilai	B (60.70)	B (61.50)	B (61.72)	3,245,350,336	B (61.80)	3,488,818,960	B (61.90)	3,672,027,960	B (62.00)	3,882,358,460	B (62.30)	3,882,358,460	B (62.30)	18,170,914,176	MPU	
9 01 03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa yang disosialisasikan	Persen	92.31%	62.50%	85.71%	15,455,000	90.00%	1,119,203,553	90.00%	1,269,203,553	92.16%	1,119,203,553	94.23%	1,119,203,553	94.23%	4,642,269,212	MPU	
9 01	<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>						<b>7,575,535,858</b>		<b>13,131,102,105</b>		<b>13,637,657,210</b>		<b>14,157,040,071</b>		<b>14,157,040,071</b>		<b>62,658,375,314</b>	<b>B. MAL</b>	
9 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/point	61.85 B	61.80 B	61.95 B	1,867,535,858	62.00 B	4,189,084,761	62,05 B	4,398,538,999	62,10 B	4,618,465,949	62,15 B	4,618,465,949	62,15 B	19,692,091,516	B. MAL	
9 01 04	PROGRAM BAITUL MAL	Persentase Peningkatan ZISWAF	Persen	8.47%	11.39%	11.56%	5,708,000,000	12.51%	8,942,017,344	12.68%	9,239,118,211	13.95%	9,538,574,121	15.24%	9,538,574,121	15.24%	42,966,283,798	B. MAL	
9 01	<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>						<b>8,400,551,397</b>		<b>11,896,149,520</b>		<b>11,745,149,520</b>		<b>11,909,149,520</b>		<b>11,309,149,520</b>		<b>55,260,149,477</b>	<b>DSI-PD</b>	
9 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP OPD	Kategori/Poin	B 61.10	B 61.35	B 61.45	4,832,043,071	B 61.65	5,477,149,520	B 61.85	5,577,149,520	B 62.00	5,672,149,520	B 62.20	5,672,149,520	B 62.20	27,230,641,151	DSI-PD	
9 01 02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Angka Melek Al-Qur'an	Angka	84.56	84.90	85.41	3,568,508,326	86.26	6,419,000,000	87.12	6,168,000,000	87.99	6,237,000,000	88.87	5,637,000,000	88.87	28,029,508,326	DSI-PD	

## **4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Makro, Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah indikator tujuan dan sasaran RPJMK yang menggambarkan dampak final/akhir (final impact) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (outcome) multi-urusan pemerintahan daerah.

### **4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMK dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis RPJMK Lhokseumawe 2025-2029, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi tertinggi dan merupakan kinerja dampak (impact) atau ultimate outcome. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja outcome atau intermediate outcome, yang pada umumnya merupakan hasil dari crosscutting beberapa urusan dalam bentuk program sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET TAHUN					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>1)3)</sup>	%	4.21	4.46	4.40-4.50	4.53-4.80	4.53-4.82	4.53-4.84	4.53-4.86	4.53-4.88
2	Indeks Gini <sup>1)3)</sup>	Nilai	0.293	0.326	0.293	0.295-0.322	0,293-0.320	0.290-0.318	0.288-0.316	0.286-0.314
3	Kontribusi PDRB Perdagangan <sup>3)</sup>	%	22,93	23.24	23.40	23.69	23.80	24.00	24.21	24.42
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) <sup>2)3)</sup>	%	18,12	16.70	16.72	16.75	16.80	16.85	17.00	17.35
5	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan <sup>3)</sup>	%	9.18	9.30	9.42	9.54	9.66	9.78	9.83	9.98
6	Indeks Ketahanan Pangan <sup>3)</sup>	Nilai	80.67	83.03	84.89	85.32	86.35	87.24	88.65	89.45
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% ) PDRB) <sup>2)3)</sup>	%	38.77	39.65	40.53	40.95	41.70	42.21	42.83	43.00
8	Indeks Kemandirian Fiskal <sup>1)3)</sup>	Nilai	0.950 Rendah	0.974 Rendah	1.136 Rendah	1.140 Rendah	1.167 Rendah	1.186 Rendah	1.195 Rendah	1.200 Sedang
9	PDRB per kapita <sup>1)3)</sup>	(Rp. Juta)	56.59	59.12	62.38	65.48	68.21	71.20	74.61	77.00
10	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum <sup>2)3)</sup>	%	2.30	2.30	2.40	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46
11	Total Kredit/PDRB <sup>2)3)</sup>	%	38.96	46.67	47.60	48.12	48.91	49.25	50.35	50.80
12	Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>1)2)3)</sup>	%	8,78	8.47	8.24	7.75-7.85	7.65-7.80	7.50-7.75	7.40-7.70	7.30-7.60
13	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja <sup>2)3)</sup>	(Rp. Juta)	130,83	135,96	140.50	142.60	146.21	150.34	152.05	155.60
14	Indeks Pembangunan Manusia <sup>1)3)</sup>	Nilai	80.26	80.89	81.75	81.95-82.30	82.10-82.50	82.55-83.00	82.75-83.10	82.90-83.35

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET TAHUN					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Harapan Lama sekolah <sup>2)3)</sup>	Tahun	15.54	15.55	15.92	16.00	16.10	16.15	16.20	16.25
16	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun <sup>2)3)</sup>	Tahun	11.27	11.31	11.50	11.58	11.68	11.75	11.80	11.85
17	Angka Literasi SD <sup>2)3)</sup>	%	63.32	56.72	59.22	61.72	64.22	66.72	69.22	71.72
18	Angka Numerasi SD <sup>2)3)</sup>	%	55.43	49.44	52.34	55.24	58.14	61.04	63.94	66.84
19	Angka Literasi SMP <sup>2)3)</sup>	%	58.36	68.34	69.44	70.54	71.64	72.74	73.84	74.94
20	Angka Numerasi SMP <sup>2)3)</sup>	%	39.5	59.94	61.44	62.94	64.44	65.94	67.44	68.94
21	Usia Harapan Hidup <sup>2)3)</sup>	Tahun	74.76	74.93	74.95	75.12	75.35	75.50	75.68	75.88
22	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita <sup>2)3)</sup>	%	20,70	20.80	18.80	17.50	16.30	15.20	14.20	13.34
23	Tingkat Kemiskinan <sup>1)2)3)</sup>	%	10.73	10.44	9.01	9.00-8.85	8.85-8.70	8.69-8.58	8.58-8.45	8.45-8.35
24	Pengeluaran Perkapita <sup>3)</sup>	Rp.	12.125,-	12.694,-	13.263.-	13.832,-	14.401,-	14.970,-	15,539.-	15.893,-
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota <sup>3)</sup>	%	36.13	39.55	47.09	48.65	49.55	51.97	52.46	53.39
26	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga) <sup>2)3)</sup>	Nilai	66.26	65.86	67.00	68.00	69.10	70.00	71.00	71.80
27	Indeks Desa <sup>2)3)</sup>	Nilai	0.7678	0.7762	77.22	77.72	78.32	79.02	79.82	80.32
28	Indeks Ketimpangan Gender <sup>2)3)</sup>	Nilai	0.303	0.331	0.310	0.300	0.291	0.290	0.288	0.285
29	Indeks Pembangunan Gender <sup>3)</sup>	Nilai	96.55	96.59	96.62	96.65	96.68	96.71	96.74	96.77
30	Nilai Kota Layak Anak <sup>3)</sup>	Nilai	616.47	728.14	730	740	750	760	780	790



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK)  
LHOKSEUMAWE 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET TAHUN					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
31	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi <sup>3)6)</sup>	%	-	22.10	47.25	47.37	51.08	54.00	54.25	54.76
32	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang <sup>3)6)</sup>	%	85.01	87.23	88.15	89.03	89.92	90.82	91.73	92.65
33	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur <sup>3)</sup>	Nilai	-	59.26	59.13	60.87	62.86	64.51	66.42	67.98
34	Tingkat Pelayanan Jalan <sup>3)</sup>	Level/Nilai	C 0.5	C 0.5	C 0.5	C 0.5	C 0.52	C 0.52	C 0.52	C 0.52
35	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) <sup>2)3)</sup>	%	80.83	81.78	83.29	84.80	86.31	87.82	89.33	90.46
36	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <sup>1)2)3)</sup>	Nilai	63.40	69.40	70.00	73.35-73.85	75.10-75.65	76.21-76.50	77.42-77.71	79.21-79.52
37	Indeks Risiko Bencana <sup>2)3)</sup>	Nilai	134.83	136.99	134.99	132.99	130.99	128.99	126.99	124.99
38	Indeks Reformasi Birokrasi <sup>3)</sup>	Nilai	CC 54.79	B 67.70	BB 71.30	BB 72.85	BB 73.32	BB 74.50	BB 75.64	BB 76.80
39	Nilai SAKIP <sup>3)</sup>	Kategori/ Nilai	B 60.18	B 61.12	B 68.40	BB 71.20	BB 72.60	BB 73.50	BB 74.30	BB 75.75
40	Opini BPK <sup>3)</sup>	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
41	Indeks Profesionalisme ASN <sup>3)</sup>	Nilai	76.89	79.42	80.46	81.67	82.80	83.90	85.00	86.70
42	Indeks Integritas/ SPI <sup>2)3)</sup>	Nilai	69,44	64,37	70.00	72.50	75.50	77.50	78.00	79.00
43	Indeks Maturitas SPIP <sup>2)3)</sup>	Level/ Nilai	Level 3 3.031	Level 3 3.031	Level 3 3.200	Level 3 3.300	Level 3 3.400	Level 3 3.500	Level 3 3.600	Level 3 3.600
44	Indeks Pelayanan Publik <sup>2)3)</sup>	Nilai	D 1.87	B 3.94	A 4.20	A 4.28	A 4.32	A 4.40	A 4.51	A 4.60

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET TAHUN					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
45	Indeks SPBE <sup>2)3)</sup>	Nilai	2.35	2.80	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30
46	Indeks Inovasi Daerah <sup>2)3)</sup>	Nilai	36.38	43.66	50.00	52.36	56.80	58.45	61.90	62.00
47	Indeks Pembangunan Syariah <sup>2)3)6)</sup>	Nilai	80.65	83.91	84.24	84.91	85.25	85.83	86.10	86.54
48	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan <sup>3)6)</sup>	%	-	26.85	26.85	40.74	60.19	77.78	87.04	100

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2025 Hasil Proyeksi

*Keterangan:*

1. Indikator Makro/Indikator Sasaran Visi RPJPK
2. Indikator Utama Pembangunan RPJPD
3. Indikator Tujuan/Sasaran/Program
4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
5. Indikator SPM
6. Indikator Mandiri/Lokal Daerah
7. Indikator Mandatory Lainnya (Indikator Pusat Lainnya)

#### **4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)**

Indikator Kinerja Daerah merupakan sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah kota Lhokseumawe yang akan dicapai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Indikator Kinerja Daerah disajikan berdasarkan urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah, pengawasan, dan pemerintahan umum. Adapun target masing-masing indikator disajikan pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029**

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>										
1	Indeks Ketahanan Pangan <sup>3)</sup>	Nilai	80.67	83.03	84.89	85.32	86.35	87.24	88.65	89.45	
2	Prevalensi Ketidakukupan Konsumsi Pangan <sup>2)3)</sup>	%	6.09	7.08	5.65	5.50	5.35	5.20	5.15	5.07	
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan <sup>3)</sup>	%	16.34	17.07	41.38	67.33	67.57	67.79	68.00	68.21	
4	Akses Rumah Tangga terhadap air siap minum perpipaan <sup>2)</sup>	%	n.a	n.a	10.00	35.00	45.00	46.00	47.00	47.00	
5	Kapasitas Air Baku <sup>2)</sup>	m <sup>3</sup> /detik	n.a	n.a	0.242	0.242	0.242	0.242	0.242	0.242	
6	Indeka Kualitas Lingkungan Hidup Daerah <sup>1)2)3)</sup>	Nilai	63.40	69.40	70.00	73.35-73.85	75.10-75.65	76.21-76.50	77.42-77.71	79.21-79.52	
7	Indeks Kualitas Air <sup>2)3)</sup>	Nilai	58.57	70.00	71.00	71.20	71.45	71.60	71.80	72.00	
8	Indeks Kualitas Udara <sup>2)3)</sup>	Nilai	89.96	92.89	92.91	92.93	92.95	92.97	92.99	93.00	
9	Indeks Tutupan Lahan <sup>2)3)</sup>	Nilai	22.58	24.95	25.10	25.25	25.50	25.65	25.90	26.20	
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman <sup>2)</sup>	%	8.36	9.43	9.43	9.45	9.47	9.49	9.50	9.52	
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah <sup>2)3)</sup>	%	n.a	n.a	0.1	15.2	18.3	20.61	25.45	30.39	
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah <sup>2)</sup>	%	2.79	0.92	1.18	1.52	1.58	1.64	1.71	1.80	
13	Indeks Risiko Bencana <sup>2)3)</sup>	Nilai	134.83	136.99	134.99	132.99	130.99	128.99	126.99	124.99	
14	Indeks Ketahanan Daerah <sup>7)</sup>	Nilai	0.40	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	
15	Laju Pertumbuhan Penduduk <sup>7)</sup>	%	1.66	1.3	1.36	1.40	1.42	1.45	1.5	1.55	
16	Rasio Penduduk <sup>7)</sup>	%	98.59	98.72	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	
17	Kepadatan Penduduk <sup>7)</sup>	Orang/ km <sup>2</sup>	1.083	1.097	1.123	1.15	1.17	1.18	1.19	1.203	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>II</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>1)3)</sup>	%	4.21	4.46	4.40- 4.50	4.53- 4.80	4.53- 4.82	4.53- 4.84	4.53- 4.86	4.53- 4.88	
2	Tingkat Kemiskinan <sup>1)2)3)</sup>	%	10.73	10.44	9.01	9.00- 8.85	8.85- 8.70	8.69- 8.58	8.58- 8.45	8.45- 8.35	
3	PDRB Per Kapita <sup>1)3)</sup>	Rp Juta	56.6	59.12	62.38	65.48	68.21	71.20	74.61	77.00	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka <sup>1)2)3)</sup>	%	8,78	8.47	8.24	7.75- 7.85	7.65- 7.80	7.50- 7.75	7.40- 7.70	7.30- 7.60	
5	Indeks Gini <sup>1)2)3)</sup>	Nilai	0.293	0.326	0.293	0.295- 0.322	0,293- 0.320	0.290- 0.318	0.288- 0.316	0.286- 0.314	
6	Indeks Pembangunan Manusia <sup>1)3)</sup>	Nilai	80.26	80.89	81.75	81,95- 82,30	82.10- 82.50	82.55- 83.00	82.75- 83.10	82.90- 83.35	
7	Usia Harapan Hidup <sup>2)3)</sup>	Tahun	74.76	74.93	74.95	75.12	75.35	75.50	75.68	75.88	
8	Prevalensi Stunting <sup>2)3)</sup>	%	20,70	20.80	18.80	17.50	16.30	15.20	14.20	13.34	
9	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran Hidup) <sup>2)3)7)</sup>	Angka	226.44	27.96	130	109	97	86	77	77	
10	Angka Kematian Bayi <sup>7)</sup>	Angka	15.28	9.50	10.65	9.43	8.97	7.46	6.96	5.50	
11	Angka Kematian Balita <sup>7)</sup>	Angka	0.56	8.60	15.00	13.80	13.10	12.50	11.90	11.90	
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) <sup>2)3)</sup>	%	101.49	145.4	100	100	100	100	100	100	
13	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) <sup>2)3)</sup>	%	60.87	88.85	90.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	
14	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional <sup>2)3)7)</sup>	%	93.84	93.28	93.50	93.65	93.80	93.90	94.00	95.00	
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap <sup>7)</sup>	%	56.50	53.20	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis <sup>7)</sup>	%	-	15.00	30.00	31.00	36.00	40.00	50.00	55.00	
17	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian <sup>7)</sup>	%	84.10	99.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup <sup>7)</sup>	%	-	62.60	63.00	63.50	64.00	65.00	66.00	67.00	
19	Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri <sup>7)</sup>	%	78.00	80.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	92.00	
20	Eliminasi Kusta <sup>7)</sup>	Orang	15	17	17	16	15	14	12	10	
21	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun <sup>7)</sup>	%	-	0.74	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
22	Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun <sup>7)</sup>	%	-	6.50	6.50	6.50	6.20	6.20	6.00	6.00	
23	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun <sup>7)</sup>	%	2.90	6.30	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	
24	Jumlah Desa yang memiliki unit Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar <sup>7)</sup>	Desa	62	62	62	62	62	62	62	62	
25	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna <sup>7)</sup>	%	57.00	57.00	57.00	57.00	71.00	85.00	100.00	100.00	
26	Persentase Puskesmas Dengan SDM Sesuai Standar <sup>7)</sup>	%	85.70	85.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
27	Rata-rata Lama Sekolah <sup>2)3)</sup>	Tahun	11.27	11.31	11.50	11.58	11.68	11.75	11.80	11.85	
28	Harapan Lama Sekolah <sup>2)3)</sup>	Tahun	15.54	15.55	15.92	16.00	16.10	16.15	16.20	16.25	
29	Angka Literasi SD <sup>2)3)</sup>	Angka	63.32	56.72	59.22	61.72	64.22	66.72	69.22	71.72	
30	Angka Numerasi SD <sup>2)3)</sup>	Angka	55.43	49.44	52.34	55.24	58.14	61.04	63.94	66.84	
31	Angka Literasi SMP <sup>2)3)</sup>	Angka	58.36	68.34	69.44	70.54	71.64	72.74	73.84	74.94	
32	Angka Numerasi SMP <sup>2)3)</sup>	Angka	39.50	59.94	61.44	62.94	64.44	65.94	67.44	68.94	
33	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD) <sup>3)4)5)</sup>	Angka	-	90.63	93.18	95.73	98.28	100	100	100	
34	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 (SD/SMP) <sup>4)5)</sup>	Angka	-	98.95	99.00	99.05	99.10	99.15	99.20	99.25	
35	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan <sup>4)5)</sup>	Angka	-	41.35	51.08	57.57	64.06	70.55	71.32	72.08	
36	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B <sup>7)</sup>	%	-	60.34	60.76	61.17	61.58	61.99	62.40	62.81	
37	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 <sup>7)</sup>	%	-	69.71	74.77	75.52	76.27	77.02	77.77	78.52	



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Iklm Inklusivitas SD <sup>7)</sup>	Angka	-	58.07	60.57	63.07	65.57	68.07	70.57	73.07	
39	Iklm Inklusivitas SMP <sup>7)</sup>	Angka	-	56.55	58.95	61.35	63.75	66.15	68.55	70.95	
40	Iklm Keamanan SD <sup>7)</sup>	Angka	-	74.60	75.50	76.40	77.30	78.20	79.10	80.00	
41	Iklm Keamanan SMP <sup>7)</sup>	Angka	-	71.06	72.56	74.06	75.56	77.06	78.56	80.06	
42	Iklm Kebinekaan SD <sup>7)</sup>	Angka	-	71.47	72.47	73.47	74.47	75.47	76.47	77.47	
43	Iklm Kebinekaan SMP <sup>7)</sup>	Angka	-	69.77	70.77	71.77	72.77	73.77	74.77	75.77	
44	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat <sup>3)</sup>	Angka	68.25	58.41	60.25	62.68	64.12	66.91	68.30	70.10	
45	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja <sup>2)3)</sup>	%	36.13	39.55	47.09	48.65	49.55	51.97	52.46	53.39	
46	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan <sup>3)</sup>	%	51.50	50.25	50.40	50.55	50.70	50.85	51.00	51.25	
47	Pengeluaran Perkapita <sup>3)</sup>	Rp.	12.125,-	12.694,-	13.263,-	13.832,-	14.401,-	14.970,-	15.539,-	15.893,-	
48	Nilai Kota Layak Anak <sup>3)</sup>	Nilai	616.47	728.14	730	740	750	760	780	790	
49	Indeks Perlindungan Anak <sup>7)</sup>	Nilai	67.93	-	70.66	72.13	73.60	75.07	76.54	77.55	
50	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga <sup>2)3)</sup>	Nilai	66.26	65.86	67.00	68.00	69.10	70.00	71.00	71.80	
51	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) <sup>7)</sup>	Nilai	-	67.6	68.6	69.6	70.5	71.3	72.2	73.0	
52	Angka Kelahiran Total (TFR) <sup>7)</sup>	Angka	2.32	2.28	2.28	2.27	2.27	2.26	2.26	2.25	
53	Angka kelahiran remaja umur 15-19 (ASFR 15-19) <sup>7)</sup>	Angka	11.90	8.50	7.70	7.00	6.40	5.90	5.40	5.00	
54	Demand Satisfied <sup>7)</sup>	%	-	74.10	76.10	77.30	78.40	79.40	80.40	81.20	
55	Persentase Kehamilan tidak direncanakan (KTD) <sup>7)</sup>	%	-	14.30	12.00	10.40	9.40	8.80	8.30	8.00	
56	Indeks Lansia Berdaya <sup>7)</sup>	Nilai	-	57.70	58.80	59.90	61.00	62.00	62.90	63.90	
57	Indeks Pengasuhan Remaja <sup>7)</sup>	Nilai	-	87.80	88.90	89.80	90.70	91.40	92.20	92.80	
58	Persentase Kampung KB Mandiri <sup>7)</sup>	%	-	94.10	94.90	95.60	96.10	96.60	97.10	97.50	
59	Indeks Ketimpangan Gender <sup>2)3)</sup>	Nilai	0.303	0.331	0.310	0.300	0.291	0.290	0.288	0.285	
60	Indeks Pembangunan Gender <sup>2)</sup>	Nilai	96.55	96.59	96.62	96.65	96.68	96.71	96.74	96.77	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi <sup>3)6)</sup>	%	-	22.10	47.25	47.37	51.08	54.00	54.25	54.76	
62	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal <sup>7)</sup>	%	0	0.25	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>											
1	Angka Ketergantungan <sup>7)</sup>	%	47.21	46.45	45.80	46.20	46.50	46.90	47.00	47.30	
2	Kontribusi PDRB Perdagangan <sup>3)</sup>	%	22,93	23.24	23.40	23.69	23.80	24.00	24.21	24.42	
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan <sup>2)3)</sup>	%	18,12	16.70	16.72	16.75	16.80	16.85	17.00	17.35	
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum <sup>2)3)</sup>	%	2.30	2.30	2.40	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46	
5	Rasio Kewirausahaan <sup>2)</sup>	%	6.92	7.36	7.76	8.16	8.56	8.96	9.36	9.76	
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja <sup>2)</sup>	%	64.36	64.61	64.90	65.20	65.45	65.78	66.00	66.25	
7	Indeks Inovasi Daerah <sup>2)3)</sup>	Nilai	36.38	43.66	50.00	52.36	56.80	58.45	61.90	62.00	
8	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan <sup>2)3)</sup>	%	9.18	9.30	9.42	9.54	9.66	9.78	9.83	9.98	
9	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Kab/Kota <sup>2)3)</sup>	%	5.96	5.92	5.93	5.90	5.88	5.87	5.86	5.85	
10	Indeks Masyarakat Digital Indonesia <sup>2)</sup>	Nilai	44.43	45.76	46.31	47.60	48.32	49.60	50.23	51.87	
11	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten/kota <sup>2)</sup>	%	-	6.10	6.15	6.25	6.30	6.35	6.40	6.45	
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) <sup>2)</sup>	%	0.79	0.21	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.60	
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto <sup>2)3)</sup>	%	38.77	39.65	40.53	40.95	41.70	42.21	42.83	43.00	
14	Ekspor Barang dan Jasa <sup>2)</sup>	%	1.35	0.42	1.00	1.20	1.35	1.50	1.45	1.50	
15	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang <sup>3)6)</sup>	%	85.01	87.23	88.15	89.03	89.92	90.82	91.73	92.65	
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur <sup>3)</sup>	Nilai	-	59.26	59.13	60.87	62.86	64.51	66.42	67.98	
17	Tingkat Pelayanan Jalan <sup>3)</sup>	Level/Nilai	C 0.5	C 0.5	C 0.5	C 0.5	C 0.52	C 0.52	C 0.52	C 0.52	
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak <sup>2)3)</sup>	%	80.83	81.78	83.29	84.80	86.31	87.82	89.33	90.46	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Indeks Desa <sup>2)3)</sup>	Nilai	0.7678	0.7762	77.22	77.72	78.32	79.02	79.82	80.32	
20	Persentase Desa Mandiri <sup>2)</sup>	%	26.47	36.76	42.65	48.53	52.94	57.35	61.76	66.18	
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB <sup>2)</sup>	%	0.71	0.73	0.75	0.76	0.78	0.79	0.80	0.81	
22	Indeks Kemandirian Fiskal <sup>1)3)</sup>	Nilai	0.950	0.974	1.136	1.140	1.167	1.186	1.195	1.200	
			Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	
23	Tingkat Inflasi <sup>2)</sup>	%	1.56	2.73	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1	
24	Total Kredit/PDRB <sup>2)3)</sup>	%	38.96	46.67	47.60	48.12	48.91	49.25	49.82	50.35	
25	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB <sup>2)</sup>	%	39.18	40.90	41.35	41.97	42.28	42.86	43.50	43.90	
26	Indeks Akses Keuangan Daerah <sup>7)</sup>	Nilai	n.a	3.88	3.91	3.93	3.94	3.95	3.97	3.98	
27	Indeks Zakat Nasional <sup>7)</sup>	Nilai	-	0.65	0.68	0.71	0.74	0.77	0.80	0.83	
28	Persentase Pekerja Informal <sup>7)</sup>	%	42.71	50.69	50.19	49.67	49.19	48.69	48.19	47.69	
29	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi <sup>7)</sup>	%	-	1.93	2.69	2.82	2.73	2.66	2.59	2.52	
<b>IV</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
1	Indeks Reformasi Birokrasi <sup>2)3)</sup>	Kategori / Nilai	CC 54.79	B 67.70	BB 71.30	BB 72.85	BB 73.32	BB 74.50	BB 75.64	BB 76.80	
2	Nilai SAKIP <sup>2)3)</sup>	Kategori / Nilai	B 60.18	B 61.12	B 68.40	BB 71.20	BB 72.60	BB 73.50	BB 74.30	BB 75.75	
3	Indeks Reformasi Hukum <sup>2)3)</sup>	Nilai	55.13	77.72	78.12	79.32	80.25	81.36	82.65	83.81	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik <sup>2)3)</sup>	Nilai	2.35	2.80	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30	
5	Opini BPK <sup>3)</sup>	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
6	Indeks Profesionalisme ASN <sup>3)</sup>	Nilai	76.89	79.42	80.46	81.67	82.80	83.90	85.00	86.70	
7	Indeks Pembangunan Statistik <sup>7)</sup>	Nilai	1.79 Kurang	1.69 Kurang	1.70 Kurang	1.80 Cukup	1.85 Cukup	1.90 Cukup	2.00 Cukup	2.6 Baik	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Indeks Pelayanan Publik <sup>2)3)</sup>	Nilai	D 1.87	B 3.94	A 4.20	A 4.28	A 4.32	A 4.40	A 4.51	A 4.60	
9	Indeks kualitas Kebijakan <sup>7)</sup>	Nilai	n.a	n.a	50 Kurang	52 Cukup	64 Cukup	67 Baik	70 Baik	78 Baik	
10	Indeks Integritas Nasional <sup>2)3)</sup>	Nilai	69.44	64.37	70.52	71.35	71.95	72.64	73.36	74.59	
11	Indeks Maturitas SPIP <sup>2)3)</sup>	Nilai	Level 3 3.031	Level 3 3.031	Level 3 3.200	Level 3 3.300	Level 3 3.400	Level 3 3.500	Level 3 3.600	Level 3 3.600	
12	Persentase Penegakan Perda <sup>2)3)</sup>	%	88.00	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100	100	
13	Persentase Capaian Aksi HAM <sup>7)</sup>	%	46.97	67.50	67.60	67.70	67.80	67.90	68.00	68.10	
14	Indeks Daya Saing Daerah <sup>2)</sup>	Nilai	3.4	3.75	3.90	4.10	4.30	4.50	4.70	4.90	
15	Indeks Pembangunan Syariah <sup>2)3)6)</sup>	Nilai	80.65	83.91	84.24	84.91	85.25	85.83	86.10	86.54	
16	Persentase Dayah Mandiri <sup>2)3)6)</sup>	%	-	7.81	7.81	10.9	14.06	17.18	20.31	23.43	
17	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan <sup>2)3)6)</sup>	Nilai	-	26.85	26.85	40.74	60.19	77.78	87.04	100	
18	Jumlah Konflik SARA <sup>2)</sup>	Nilai	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>											
<b>A Pendidikan</b>											
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) <sup>3)4)5)</sup>	%	-	90.63	93.18	95.73	98.28	100	100	100	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) <sup>3)4)5)</sup>	%	-	98.95	99.00	99.05	99.10	99.15	99.20	99.25	
3	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) <sup>3)4)5)</sup>	%	-	41.35	51.08	57.57	64.06	70.55	71.32	72.08	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional <sup>3)4)</sup>	Angka	63.32	56.72	59.22	61.72	64.22	66.72	69.22	71.72	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional <sup>3)4)</sup>	Angka	55.43	49.44	52.34	55.24	58.14	61.04	63.94	66.84	
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional <sup>3)4)</sup>	Angka	58.36	68.34	69.44	70.54	71.64	72.74	73.84	74.94	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional <sup>3)4)</sup>	Angka	39.50	59.94	61.44	62.94	64.44	65.94	67.44	68.94	
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B <sup>4)</sup>	%	-	60.34	60.76	61.17	61.58	61.99	62.40	62.81	
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV <sup>4)</sup>	%	-	69.71	74.77	75.52	76.27	77.02	77.77	78.52	
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD <sup>4)</sup>	Angka	-	74.60	75.50	76.40	77.30	78.20	79.10	80.00	
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP <sup>4)</sup>	Angka	-	71.06	72.56	74.06	75.56	77.06	78.56	80.06	
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD <sup>4)</sup>	Angka	-	71.47	72.47	73.47	74.47	75.47	76.47	77.47	
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP <sup>4)</sup>	Angka	-	69.77	70.77	71.77	72.77	73.77	74.77	75.77	
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD <sup>4)</sup>	Angka	-	58.07	60.57	63.07	65.57	68.07	70.57	73.07	
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP <sup>4)</sup>	Angka	-	56.55	58.95	61.35	63.75	66.15	68.55	70.95	
<b>B Kesehatan</b>											
1	Jumlah Kematian Ibu <sup>2)3)4)</sup>	Angka	226.44	27.96	122	109	97	86	77	77	
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita <sup>2)3)4)</sup>	%	20,70	20.80	19.00	18.00	17.00	16.00	15.00	14.00	
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	82.87	98.47	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	84.4	85.06	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	83.83	89.47	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	77.86	79.08	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	67.35	97.79	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	99.91	112.03	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	96.99	1047.58	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	84.11	96.81	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	86.71	97.65	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	96.21	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	91.18	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar <sup>4)5)</sup>	%	48.19	98.44	100	100	100	100	100	100	
<b>C</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>										
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota <sup>4</sup>	%	-	1.53	6.51	11.53	16.51	21.54	26.52	31.54	



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota <sup>4</sup>	%	-	61.11	62.10	63.10	64.09	65.08	66.07	67.06	
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota <sup>4</sup>	%	-	0.00	0.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	-	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota <sup>4)</sup>	%	-	19.36	20.34	21.09	22.03	23.05	24.05	25.03	
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman <sup>4)</sup>	%	-	93.71	93.71	93.89	94.61	95.57	96.75	97.97	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	-	71.50	72.57	73.66	74.77	75.89	77.03	78.18	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	69.52	64.40	59.54	61.54	64.54	66.54	69.54	71.54	
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis <sup>4)</sup>	%	-	32.31	32.31	32.31	37.69	37.69	37.69	43.08	
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan <sup>4)</sup>	%	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah <sup>4)</sup>	Hari	20	20	20	20	20	20	20	20	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota <sup>4)</sup>	%	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>D</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>										
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni <sup>4)</sup>	%	0.00	0.00	0.00	5.00	5.26	5.56	5.88	6.25	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni <sup>4)</sup>	%	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	75.00	100.00	
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani <sup>4)</sup>	%	-	0.92	1.20	1.40	1.80	2.40	3.20	4.21	
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani <sup>4)</sup>	%	-	1.19	1.50	1.83	2.17	2.54	2.93	3.35	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	-	64.40	65.06	65.73	66.41	67.09	67.79	68.48	
<b>E</b>	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>										
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP <sup>4)5)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	4	5	5	8	9	9	10	10	
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	100	100	54.10	100	100	100	100	100	
7	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana <sup>4)5)</sup>	%	100	101.12	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana <sup>4)5)</sup>	%	100	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.12	
9	Persentase Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana <sup>4)5)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ilegal <sup>4)5)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>F</b>	<b>Sosial</b>										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti <sup>4)5)</sup>	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	70.00	70.00	79.66	79.66	79.66	79.66	79.66	79.66	
7	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	0	0	50.00	53.33	53.67	60.00	63.33	67.33	
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	kali	2	2	2	12	12	12	12	12	
<b>G Tenaga Kerja</b>											
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja <sup>4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi <sup>4)</sup>	%	10.34	5.95	7.02	7.65	8.21	8.35	8.6	9.00	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja <sup>3)4)</sup>	Rp.Juta	130.83	135.96	140.50	142.60	146.21	150.34	152.05	155.60	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). <sup>4)</sup>	%	83.89	3.42	46.31	46.71	47.74	48.73	49.69	50.00	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota <sup>4)</sup>	%	7.46	8.91	10.00	10.03	11.11	12.74	12.80	13.36	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>H</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>										
1	Indeks Pembangunan Gender <sup>2)3)4)</sup>	Nilai	96.55	96.59	96.62	96.65	96.68	96.71	96.74	96.77	
2	Indeks Ketimpangan Gender <sup>2)3)4)</sup>	Nilai	0.303	0.331	0.310	0.300	0.291	0.290	0.288	0.285	
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD <sup>3)4)</sup>	%	0.41	3.06	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif <sup>3)4)</sup>	%	0.054	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif <sup>4)</sup>	%	49.48	35	32.1	30.5	28.12	26.52	24.81	22.71	
<b>I</b>	<b>Pangan</b>										
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	0	0	0	0	100	100	100	100	
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	Nilai	77.54	77.54	77.80	78.00	78.40	78.95	79.00	79.25	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan <sup>4)</sup>	%	10.29	33.82	22.05	20.58	17.64	16.17	13.23	10.29	
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan <sup>4)</sup>	%	79.00	80.00	80.00	86.00	90.00	93.33	94.29	100	
<b>J</b>	<b>Pertanahan</b>										
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0	0	



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0	0	
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0	0	
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0	0	
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	66.67	19.23	20.19	21.20	22.26	23.38	24.54	25.77	
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0	0	
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah <sup>4)</sup>	%	18.99	18.99	19.94	20.94	21.99	23.09	24.24	25.45	
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0	0	
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0	0	0	0	0	0	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>K</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota <sup>1)2)3)4)</sup>	Angka	63.40	69.40	70.00	73.35-73.85	75.10-75.65	76.21-76.50	77.42-77.71	79.21-79.52	
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) <sup>4)</sup>	%	25,5	43,00	48,00	51,00	53,00	56,00	58,00	58,00	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota <sup>4)</sup>	%	155.5	0	100	100	100	100	100	100	
<b>L</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>										
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan <sup>3)4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan <sup>3)4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan <sup>3)4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan <sup>3)4)</sup>	%	-	99.66	99.70	99.80	100	100	100	100	
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak <sup>3)4)</sup>	%	-	43.00	47.00	51.00	55.00	60.00	60.00	60.00	
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun <sup>3)4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital <sup>3)4)</sup>	%	-	10.59	13.00	20.00	25.00	32.00	40.00	40.00	
<b>M</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>										
1	Persentase peningkatan status desa mandiri <sup>3)4)</sup>	%	0	38.89	16.00	13.33	9.09	8.33	7.69	7.14	
2	Persentase Fasilitas Penataan Desa <sup>3)4)</sup>	%	0	0	8.82	14.71	22.06	29.41	33.82	38.24	
3	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa <sup>3)4)</sup>	%	0	0	14.71	17.65	22.06	26.47	29.41	36.76	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa <sup>3)4)</sup>	%	0	66.67	73.53	76.47	78.92	81.37	83.82	86.27	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat <sup>3)4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>N Pengendalian penduduk dan keluarga berencana</b>											
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun <sup>3)4)</sup>	Angka	2.32	2.28	2.28	2.27	2.27	2.26	2.26	2.25	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) <sup>4)7)</sup>	%	43.82	50.20	57.00	57.10	57.20	57.50	58.00	58.20	
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) <sup>3)4)</sup>	%	18.50	15.90	8.47	8.41	8.30	8.26	8.11	8.11	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) <sup>3)4)</sup>	Angka	11.90	8.5	7.7	7.0	6.4	5.9	5.4	5.0	
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) <sup>3)4)</sup>	Nilai	66.26	65.86	67.00	68.00	69.10	70.00	71.00	71.80	
<b>O Perhubungan</b>											
1	Konektivitas Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	Rasio	-	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota <sup>3)4)</sup>	%	-	62.50	62.50	62.50	62.50	87.50	87.50	87.50	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan <sup>4)</sup>	%	-	0.00	0.00	14.29	14.29	42.86	42.86	57.14	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>P</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>										
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo <sup>4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah <sup>4)</sup>	%	33.33	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) <sup>4)</sup>	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Q</b>	<b>Koperasi, usaha kecil dan menengah</b>										
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi <sup>4)</sup>	%	39.60	12.00	22.20	26.90	27.10	27.30	27.50	27.80	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal <sup>4)</sup>	%	0.58	0.65	0.72	0.76	0.79	0.83	0.86	0.90	
3	Pertumbuhan Wirausaha <sup>4)</sup>	%	3.75	6.02	7.95	10.53	11.43	12.82	12.88	13.42	
<b>R</b>	<b>Penanaman Modal</b>										
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota <sup>3)4)</sup>	%	-77.57	110.86	-4.98	2.00	2.94	3.81	4.59	5.26	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi <sup>3)4)</sup>	%	7.19	105.20	98.04	98.08	99.06	99.09	99.13	99.17	
<b>S</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>										
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat <sup>4)</sup>	Nilai	0	0	0.31	0.33	0.35	0.37	0.38	0.48	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi <sup>4)</sup>	%	0	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
<b>T Statistik</b>											
1	Indeks Pembangunan Statistik <sup>4)</sup>	%	1.79 Kurang	1.69 Kurang	1.70 Kurang	1.80 Cukup	1.85 Cukup	1.90 Cukup	2.00 Cukup	2.6 Baik	
<b>U Persandian</b>											
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah <sup>4)</sup>	%	n.a	n.a	0.31	0.31	0.39	0.47	0.50	0.51	
<b>V Kebudayaan</b>											
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan <sup>3)4)</sup>	%	0	0	3.70	14.81	37.04	55.56	74.07	100	
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan <sup>4)</sup>	%	-	26.9	26.9	40.7	60.2	77.8	87.0	100	
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan <sup>4)</sup>	%	-	0	0	13.00	17.40	21.70	26.10	30.4	
<b>W Perpustakaan</b>											
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat <sup>3)4)</sup>	Nilai	67.05	68.15	69.25	70.11	70.29	71.05	71.15	71.60	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat <sup>3)4)</sup>	Nilai	68.247	58.41	65.32	67.42	69.36	71.2	73.32	75.80	
<b>X Kearsipan</b>											
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah <sup>4)</sup>	%	19.12	20.49	21.03	21.40	21.90	22.16	23.47	24.10	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Y</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
1	Produksi Perikanan Tangkap <sup>4)</sup>	%	90.91	89.87	91.35	92.00	92.70	94.12	95.58	96.41	
2	Produksi Perikanan Budi Daya <sup>4)</sup>	%	99.94	100	99.49	99.50	99.50	99.50	99.50	99.51	
<b>Z</b>	<b>Pariwisata</b>										
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum <sup>4)</sup>	%	13.63	6.24	6.30	6.48	6.59	6.64	6.71	6.73	
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) <sup>4)</sup>	%	-	14.9	15.00	16.50	17.20	17.80	18.40	18.70	
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual <sup>4)</sup>	%	-	0.90	1.70	2.60	3.40	4.20	5.10	5.90	
<b>AA</b>	<b>Pertanian</b>										
1	Peningkatan produksi tanaman pangan <sup>4)</sup>	%	4.42	5.67	5.69	5.71	5.74	5.77	5.80	5.83	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura <sup>4)</sup>	%	1.36	3.14	4.48	4.50	4.52	4.54	4.56	4.58	
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan <sup>4)</sup>	%	28.17	0.30	1.27	1.58	2.14	2.49	2.77	3.00	
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan <sup>4)</sup>	%	0.31	1.34	1.64	1.94	2.54	2.84	3.14	3.44	
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan <sup>4)</sup>	%	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) <sup>4)</sup>	%	99.03	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
<b>BB</b>	<b>Perdagangan</b>										
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota <sup>4)</sup>	%	93.51	93.99	94.15	94.15	94.15	94.32	94.32	94.32	



No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku <sup>4)</sup>	%	75.19	76.41	76.41	76.46	77.07	77.30	78.01	78.24	
<b>CC</b>	<b>Perindustrian</b>										
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi :										
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	1.35	0.57	1.50	1.80	2.10	2.40	2.70	3.00	
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	18.12	16.70	16.72	16.75	16.80	16.85	17.00	17.35	
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	4.00	4.50	5.50	7.00	9.00	10.50	11.50	12.00	
	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	80.00	85.00	86.00	89.00	92.00	93.00	94.00	95.00	
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota <sup>4)</sup>	%	50.00	55.00	60.00	68.00	75.00	70.00	65.00	60.00	
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor <sup>4)</sup>	%	60.00	65.00	68.00	75.00	80.00	75.00	70.00	65.00	
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan <sup>4)</sup>	%	85.45	51.04	89.47	93.10	95.00	96.77	96.88	98.51	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan <sup>4)</sup>	%	85.45	51.04	89.47	93.10	95.00	96.77	96.88	98.51	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini <sup>4)</sup>	%	85.00	88.00	90.00	91.00	92.00	94.00	96.00	98.00	
<b>DD</b>	<b>Perencanaan</b>										
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah <sup>4)</sup>	%	85.71	85.71	87.50	100	100	100	100	100	
<b>EE</b>	<b>Keuangan</b>										
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD <sup>4)</sup>	%	36.40	38.50	41.58	41.51	41.49	41.36	41.07	40.85	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah <sup>4)</sup>	%	8.98	8.14	8.98	10.29	10.63	9.76	12.09	10.01	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar <sup>4)</sup>	%	89.31	96.60	98.75	95.78	95.35	98.31	97.52	97.87	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap <sup>4)</sup>	%	-1.38	1.58	2.49	2.74	2.37	2.60	2.54	2.20	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik <sup>4)</sup>	%	37.80	40.00	19.86	20.07	20.30	20.62	20.94	21.17	
6	Persentase Penurunan SILPA <sup>4)</sup>	%	251.29	-65.88	-36.68	-37.50	-20.00	-12.50	-14.29	-16.67	
<b>FF</b>	<b>Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan</b>										
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN <sup>4)</sup>	Kategori/ Nilai	C 59.36	B 76.54	B 76.87	B 77.37	B 77.87	B 78.37	B 78.87	B 78.95	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>GG</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah <sup>4)</sup>	%	0	0	50.00	66.67	75.00	80.00	83.33	100	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah <sup>4)</sup>	Rasio	0	63.64	72.73	76.00	78.57	80.66	82.35	83.78	
<b>HH</b>	<b>Fungsi Pengawasan</b>										
1	Opini Laporan Keuangan <sup>3)4)</sup>	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) <sup>3)4)</sup>	Level/Nilai	Level 3 3.031	Level 3 3.031	Level 3 3.200	Level 3 3.300	Level 3 3.400	Level 3 3.500	Level 3 3.600	Level 3 3.600	
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) <sup>3)4)</sup>	Level/Nilai	Level 3 3.00	Level 3 3.00	Level 3 3,2	Level 3 3,2	Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 3 3,5	Level 3 3,5	
4	Manajemen Risiko Indeks <sup>4)</sup>	Level/Nilai	Level 2 2,092	Level 2 2.832	Level 3 3.00	Level 3 3.06	Level 3 3.12	Level 3 3.18	Level 3 3.24	Level 3 3.30	
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 <sup>4)</sup>	%	80.89	81.11	81.11	82.40	83.07	84.59	85.13	85.30	
<b>II</b>	<b>Fungsi Pengadaan</b>										
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan <sup>4)</sup>	poin	24.20	24.20	25.00	25.50	26.00	26.50	27.00	27.50	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ <sup>4)</sup>	poin	3.33	3.33	3.50	3.65	3.80	3.95	4.10	4.25	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ <sup>4)</sup>	poin	8.89	8.89	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Tahun						Ket
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>JJ Hubungan dengan Perwakilan Daerah</b>											
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N <sup>4)</sup>	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N <sup>4)</sup>	%	-	54.55	100	100	100	100	100	100	100
<b>KK Pelayanan Publik</b>											
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N <sup>4)</sup>	Nilai	86.69	91.35	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	

Keterangan:

1. Indikator Makro/Indikator Sasaran Visi RPJPK
2. Indikator Utama Pembangunan RPJPD
3. Indikator Tujuan/Sasaran/Program
4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)
5. Indikator SPM
6. Indikator Mandiri/Lokal Daerah
7. Indikator Mandatory Lainnya (Indikator Pusat Lainnya)



# **BAB - V**

## **PENUTUP**

**RPJMK**  
**LHOKSEUMAWE**  
**TAHUN 2025-2029**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, terhitung mulai dari pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Penyusunan RPJMK ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Lhokseumawe. RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan searah dengan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029.

RPJMK merupakan dokumen rencana pembangunan kota yang otentik sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan kota dalam lima tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah, agar Visi **Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni** dapat tercapai. Untuk menjamin pelaksanaan RPJMK, maka diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMK. Sedangkan untuk penjabaran dalam pelaksanaan tahunan, RPJMK ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

#### **5.1 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi**

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari siklus pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan arah, kebijakan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, guna mengidentifikasi potensi deviasi serta mengambil langkah-langkah korektif secara cepat dan tepat.

Evaluasi terhadap RPJMK berfungsi sebagai alat ukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, serta sebagai dasar untuk penyesuaian strategi dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Wali Kota/Wakil Wali Kota. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap capaian indikator kinerja, pemanfaatan sumber daya, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui proses pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berkelanjutan, Pemerintah Kota Lhokseumawe berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

#### **5.2 Pedoman Transisi**

Pedoman transisi dalam penyusunan RPJMK ini adalah:

1. RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan perubahan RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 dan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran serta



- APBK masa transisi yaitu tahun pertama pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
2. RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan untuk menyelesaikan permasalahan yang belum dapat terselesaikan pada RPJMK sebelumnya dan masalah yang dihadapi pada periode RPJMK masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
  3. RKPK Perubahan Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMK periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

### 5.3 Kaidah Pelaksanaan

RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Lhokseumawe dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan selama 5 tahun. Oleh karena itu, diperlukan komitmen, kesepahaman dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan target-target yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Wali Kota dengan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMK dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target target yang telah ditetapkan dalam RPJMK;
3. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Sekretariat, Kantor dan perangkat daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
4. Penjabaran lebih lanjut RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe;
5. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMK, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan RKPK, KUA, PPAS serta APBK setiap tahunnya.
6. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan RPJMK Tahun 2025-2029 menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja RPJMK tahun 2025-2029, maka dokumen RPJMK ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.







# LAMPIRAN

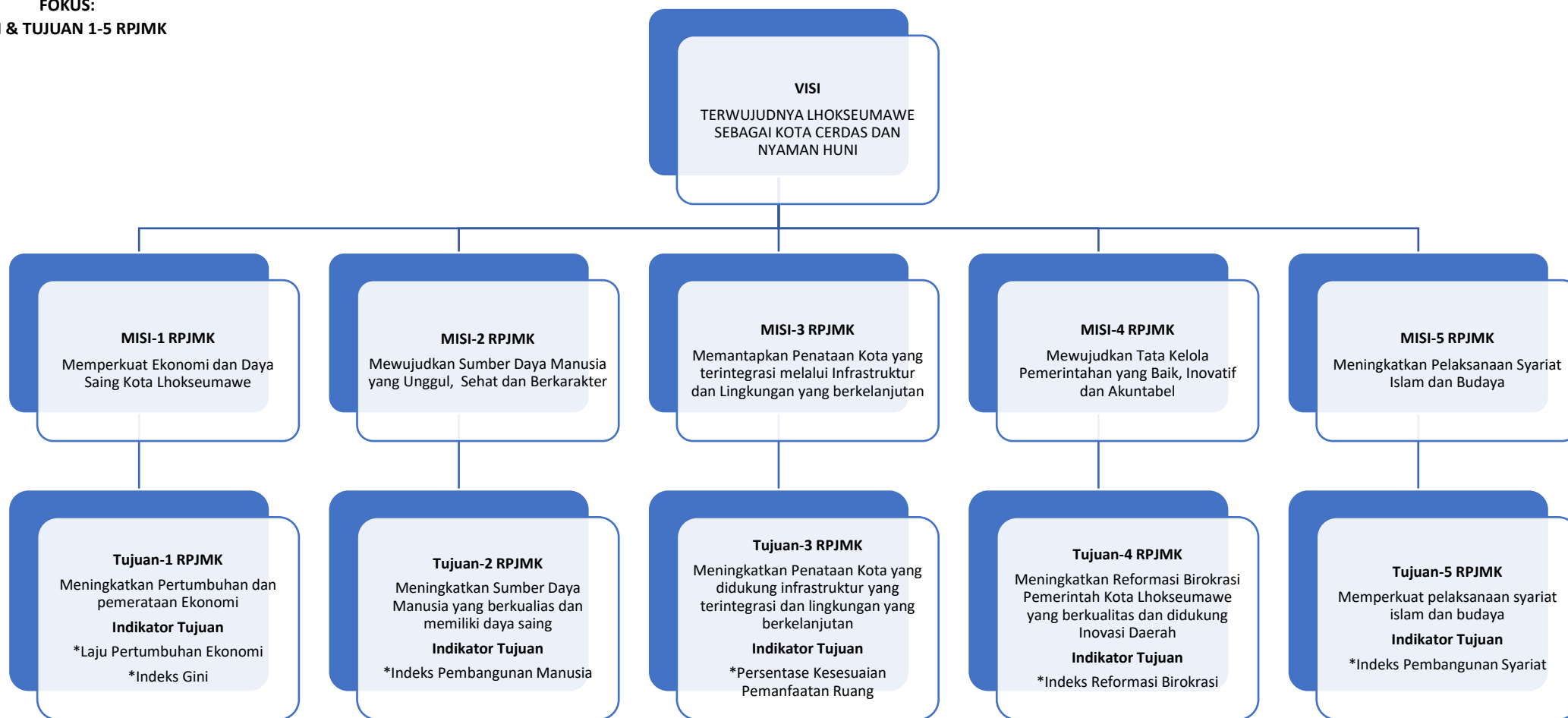
**RPJMK**  
**LHOKEUMAWE**  
**TAHUN 2025-2029**

# RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA (RPJMK) LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

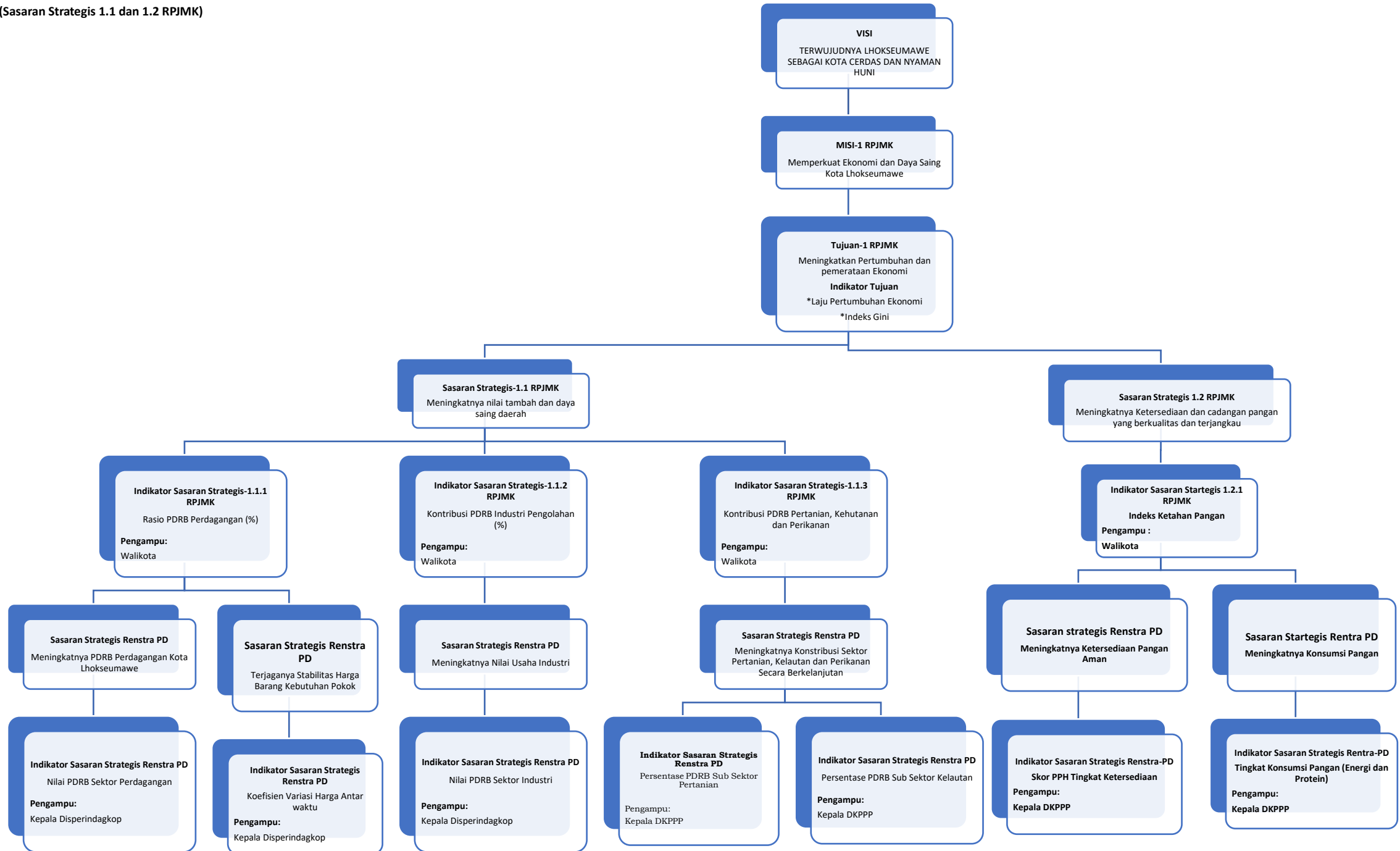
VISI & MISI KOTA LHOKSEUMAWE

FOKUS:

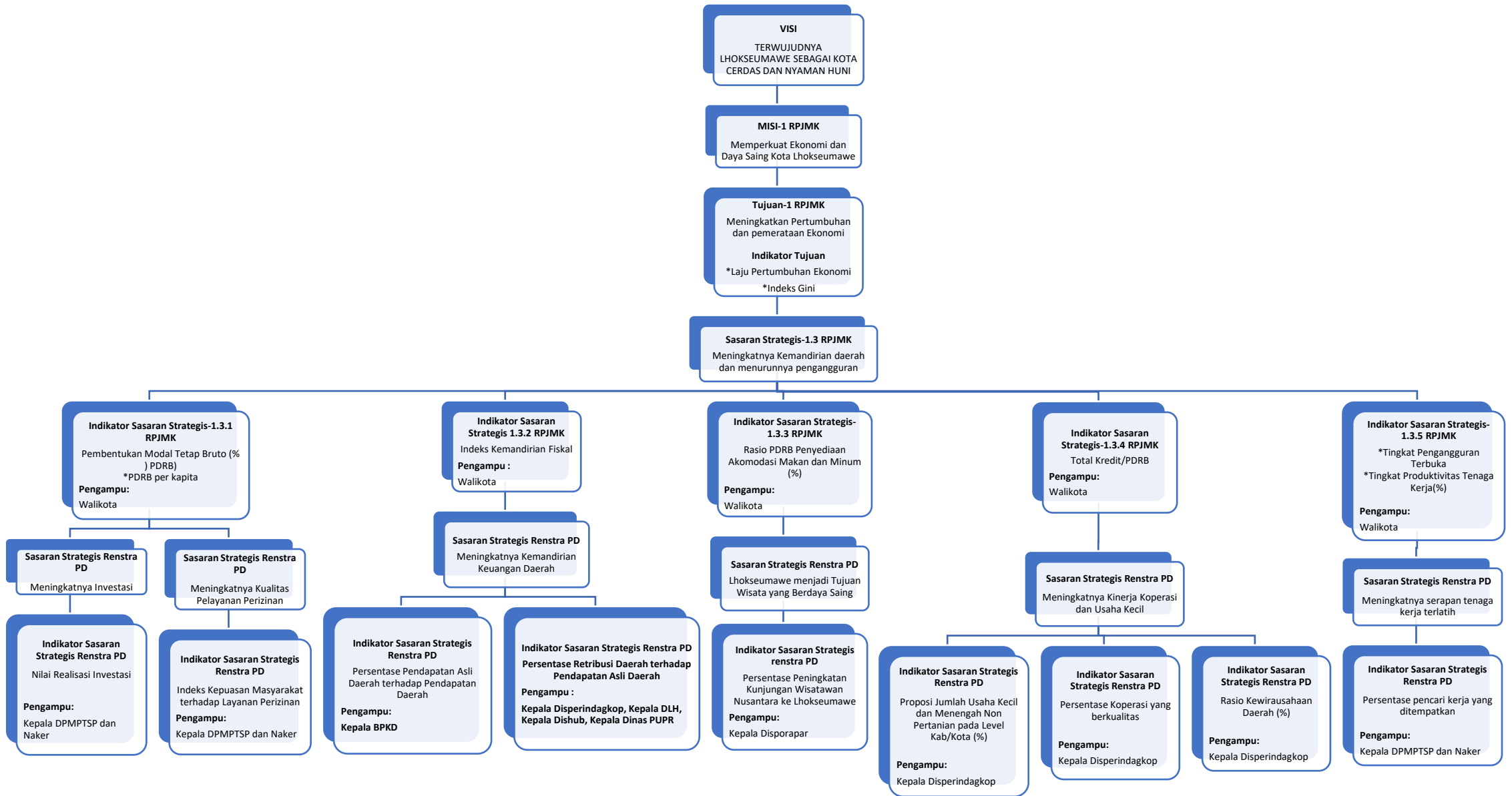
MISI & TUJUAN 1-5 RPJMK



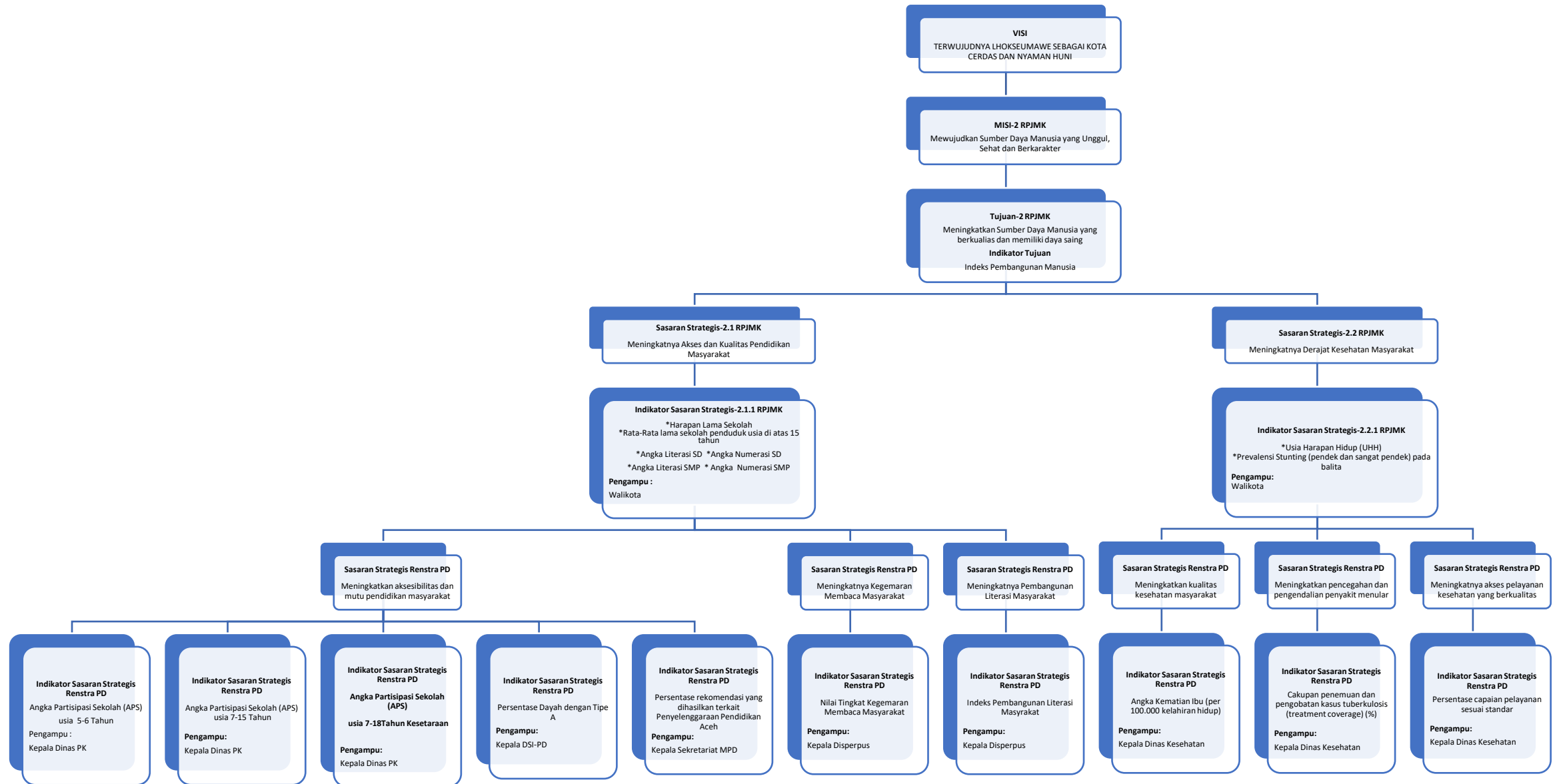
**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-1/TUJUAN-1**  
**(Sasaran Strategis 1.1 dan 1.2 RPJMK)**



**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-1/TUJUAN-1**  
**(Sasaran Strategis 1.3 RPJMK)**

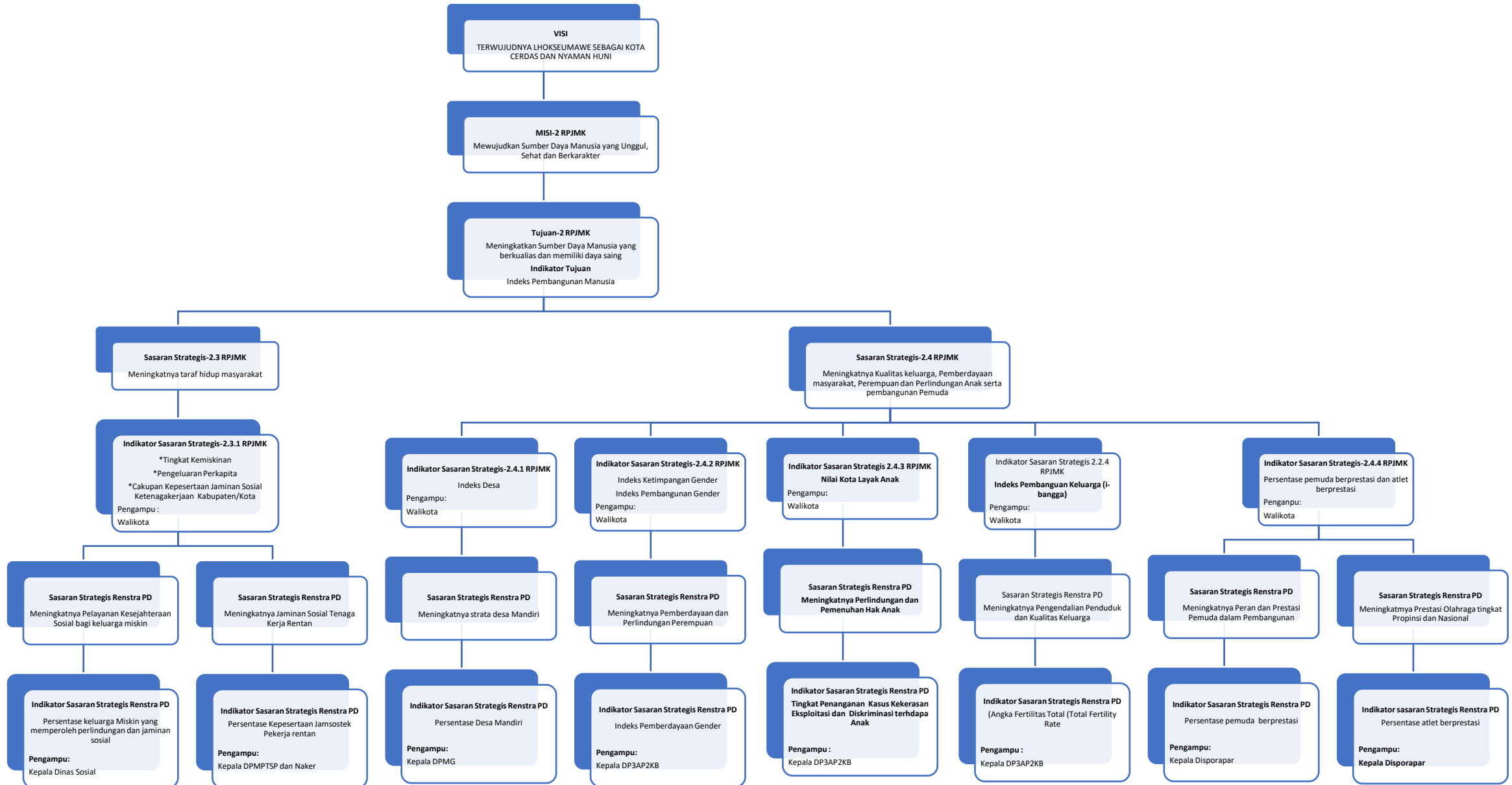


**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-2/TUJUAN-2**  
**(Sasaran Strategis 2.1 dan 2.2 RPJMK)**

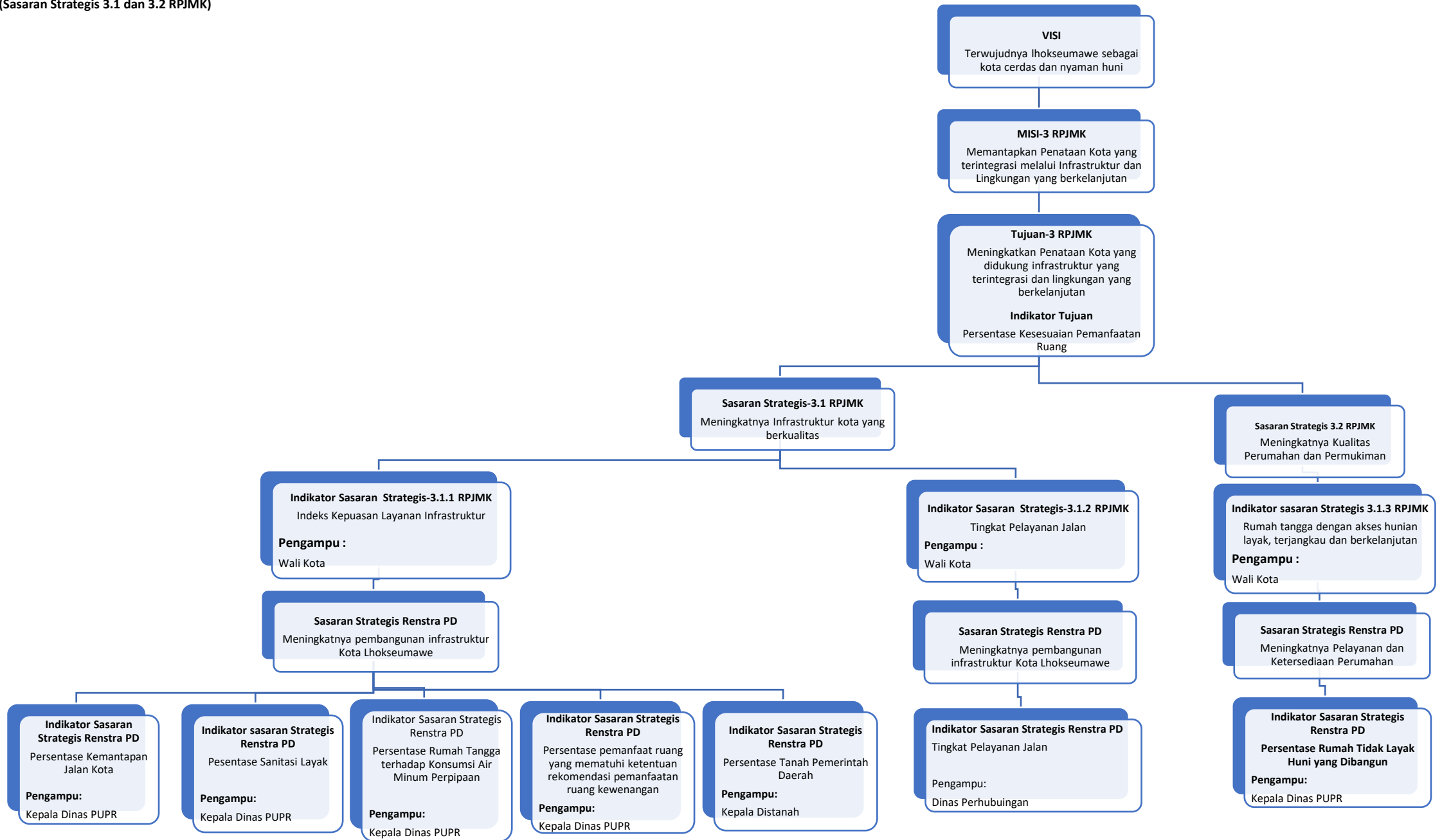




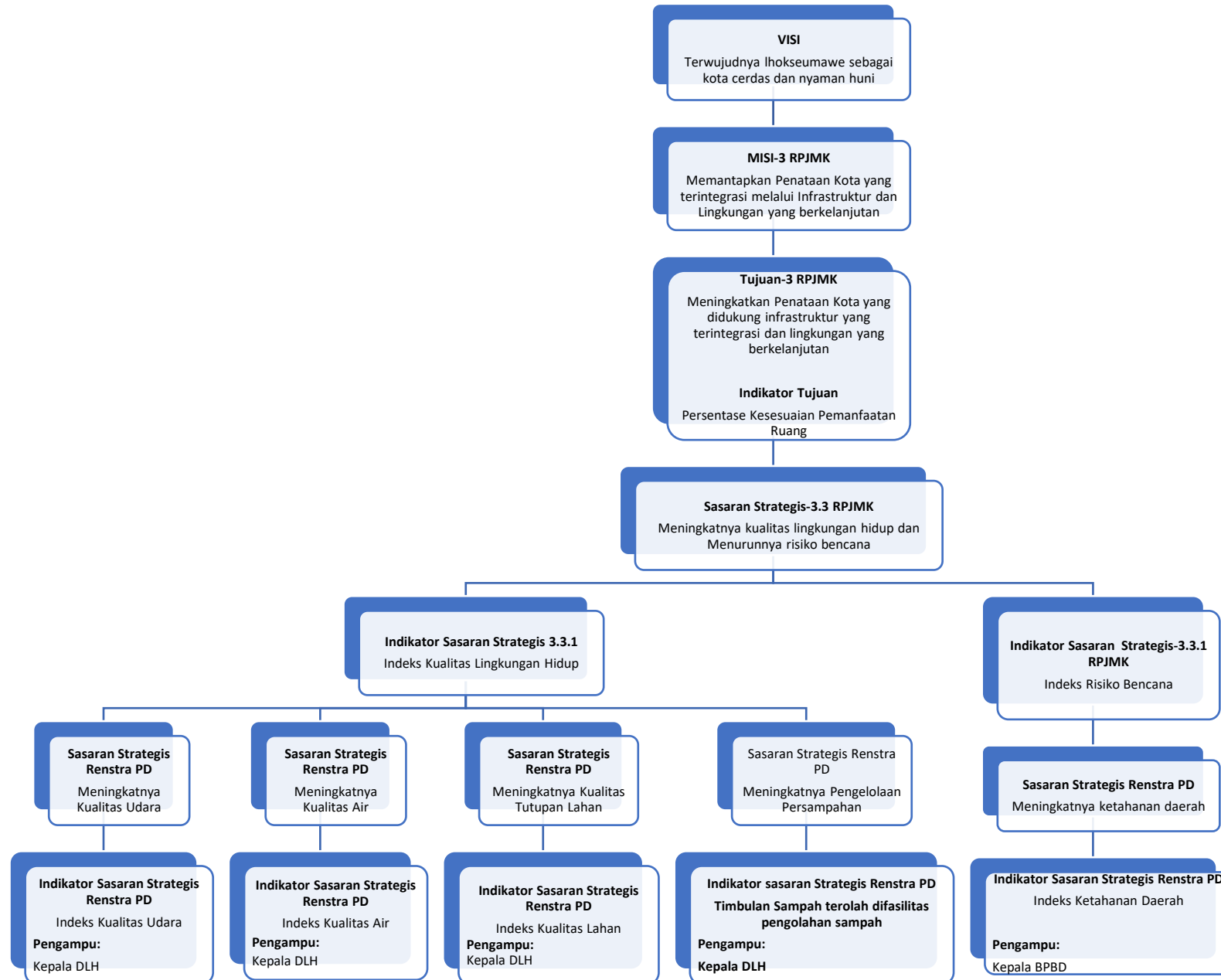
**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWA**  
**FOKUS: MISI-2/TUJUAN-2**  
**(Sasaran Strategis 2.3 dan 2.4 RPJMK)**



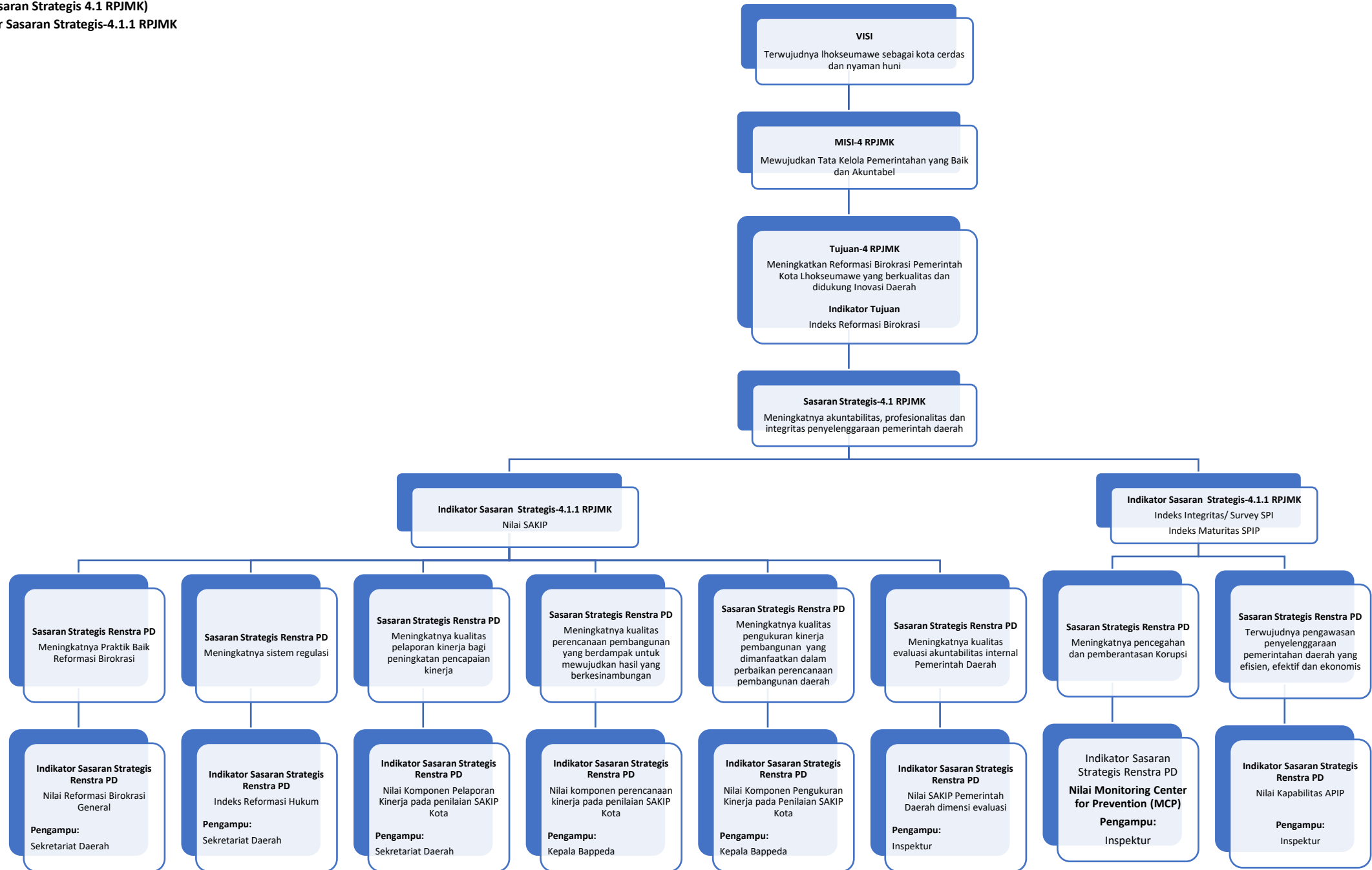
**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-3/TUJUAN-3**  
 (Sasaran Strategis 3.1 dan 3.2 RPJMK)



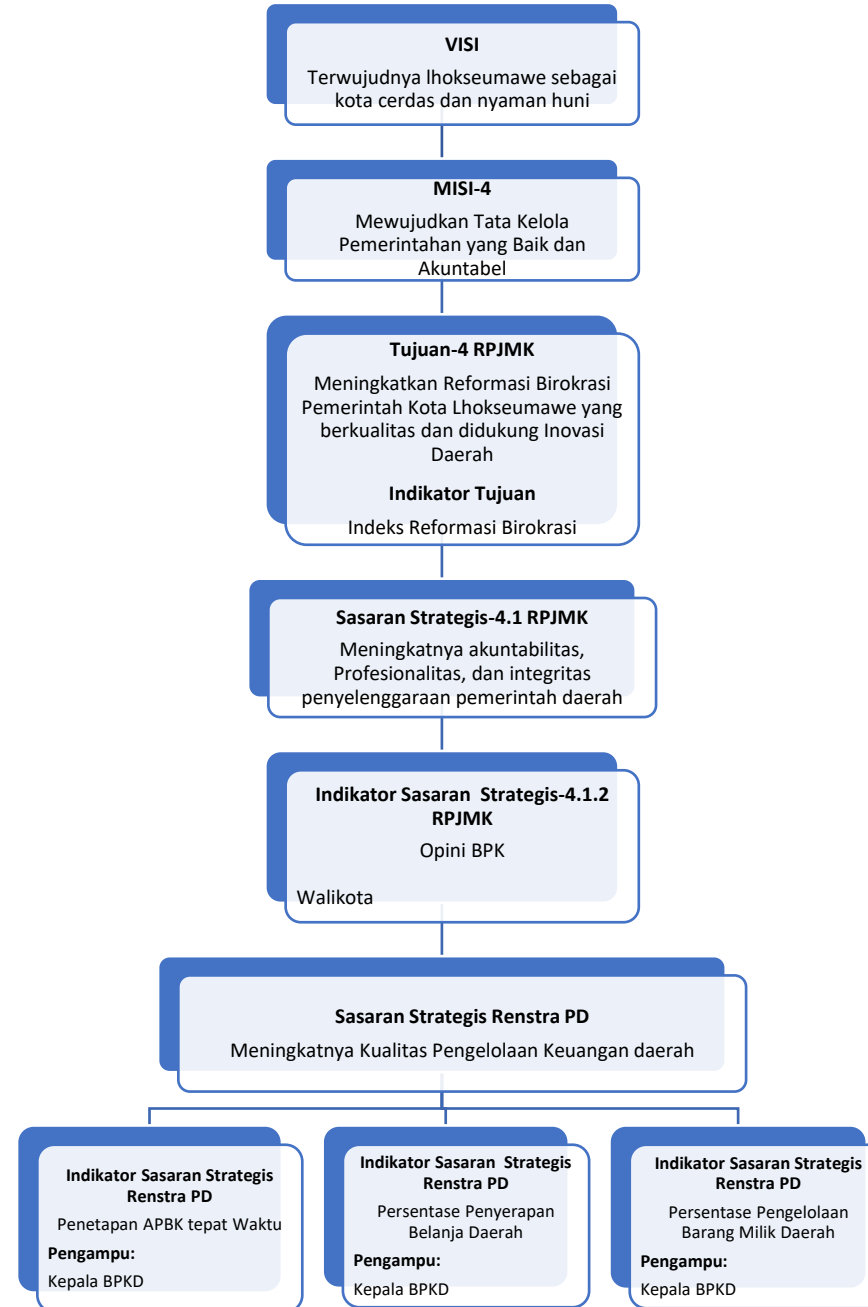
**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-3/TUJUAN-3**  
 (Sasaran Strategis 3.3 dan 3.4 RPJMK)



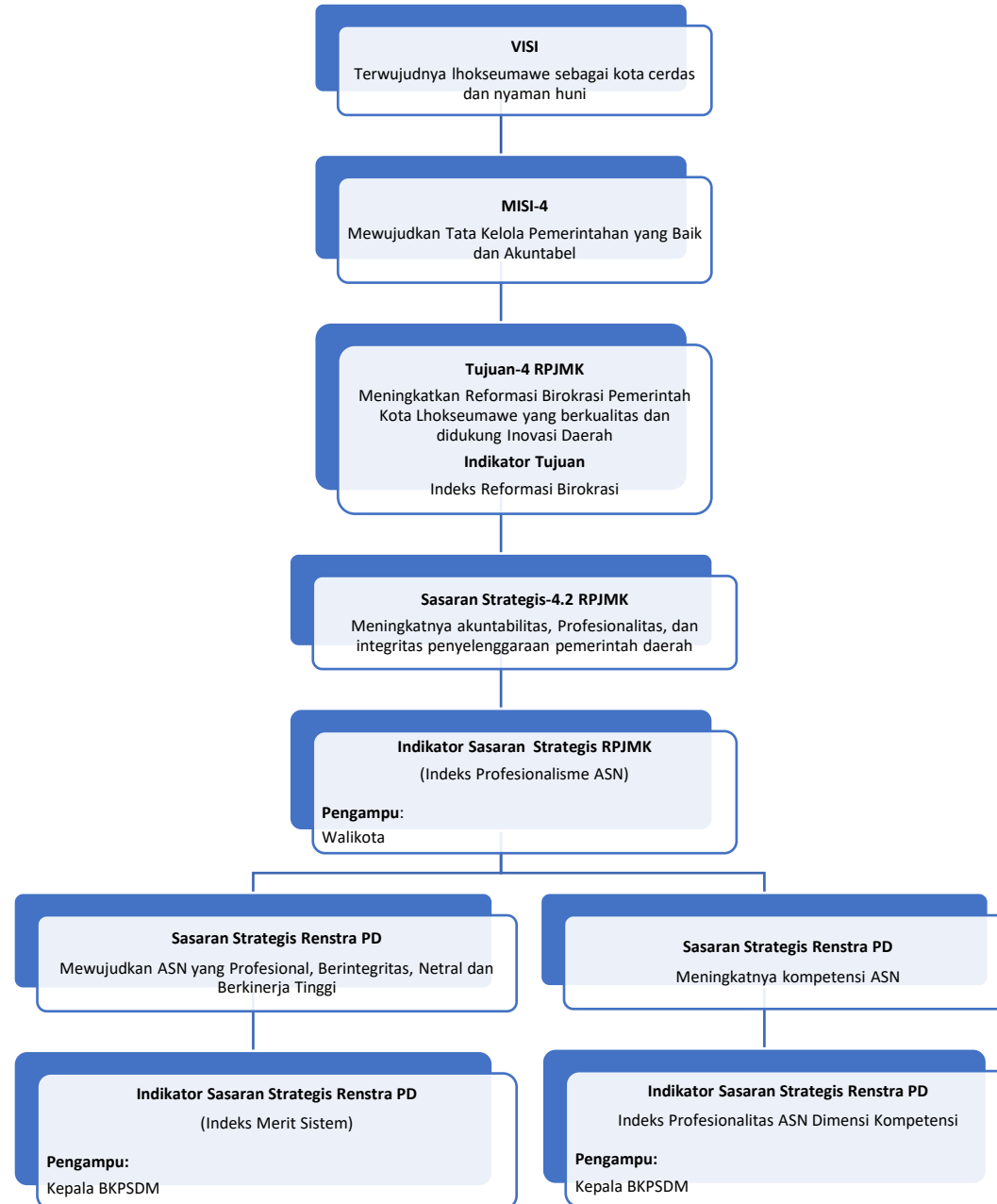
**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-4/TUJUAN-4**  
**(Sasaran Strategis 4.1 RPJMK)**  
**Indikator Sasaran Strategis-4.1.1 RPJMK**



**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWA**  
**FOKUS: MISI-4/TUJUAN-4**  
**(Sasaran Strategis 4.1 RPJMK)**  
**Indikator Sasaran Strategis-4.1.2 RPJMK**

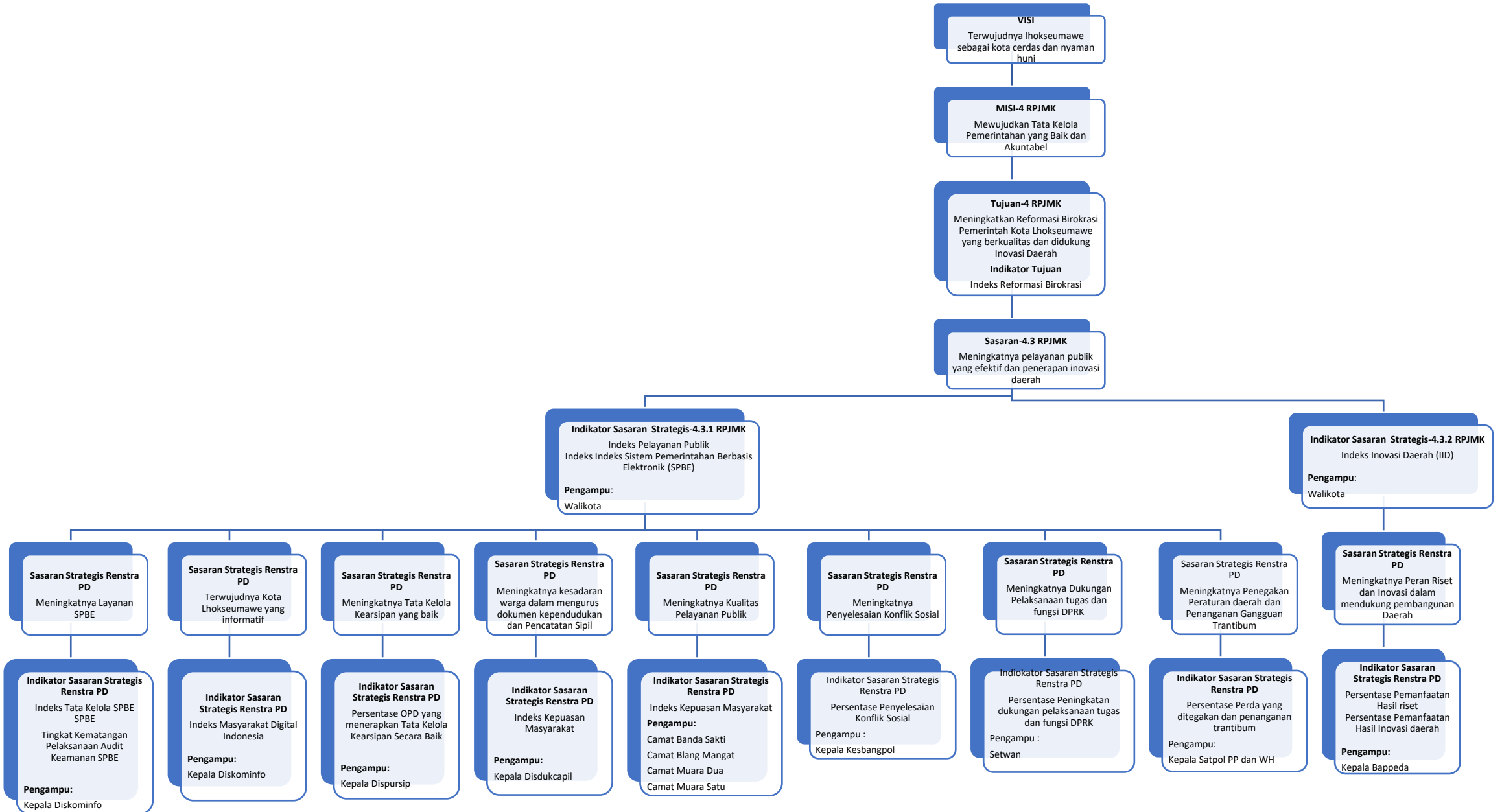


**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-4/TUJUAN-4**  
**(Sasaran Strategis 4.2 RPJMK)**

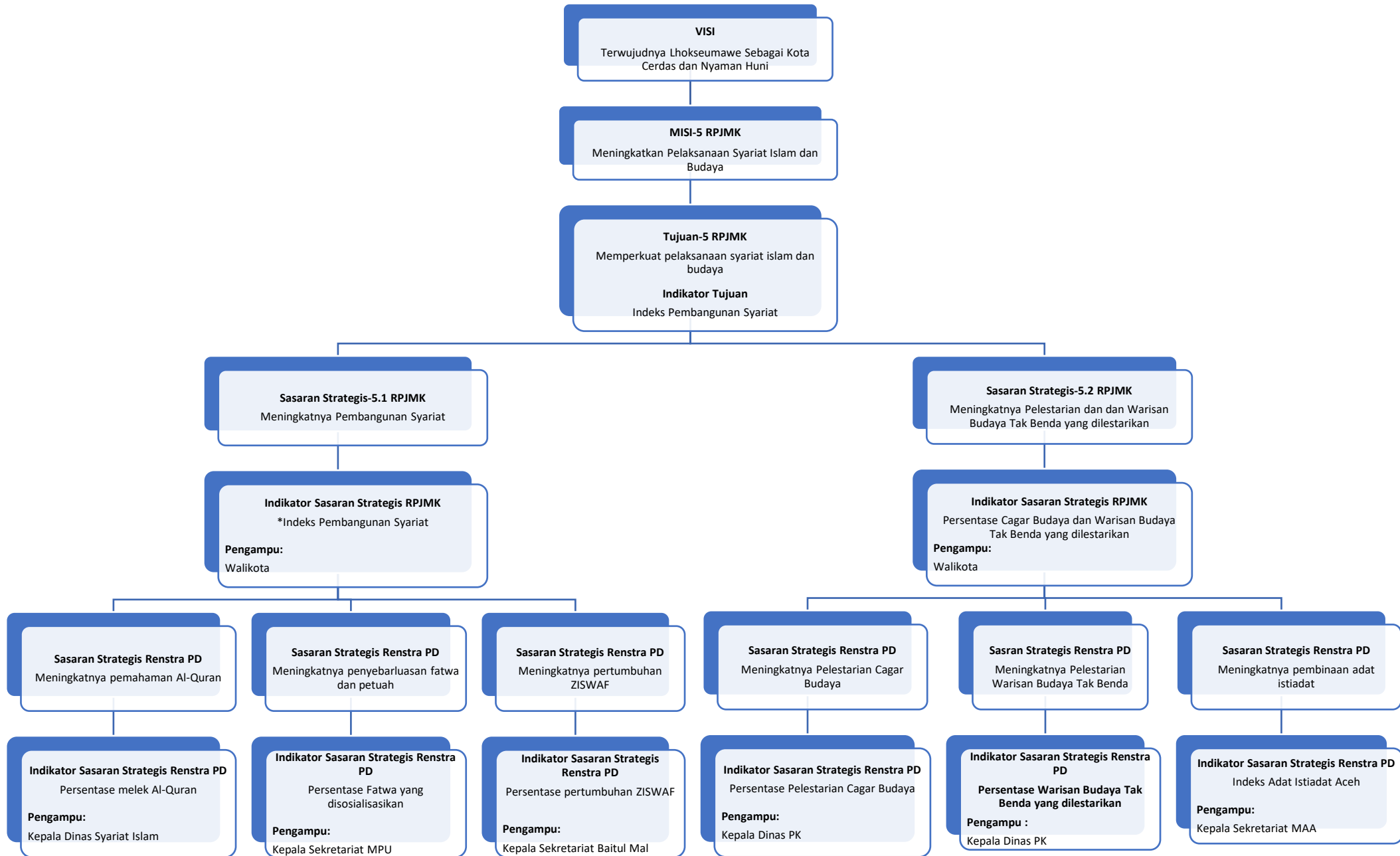




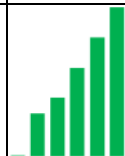

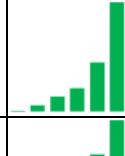

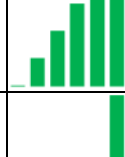

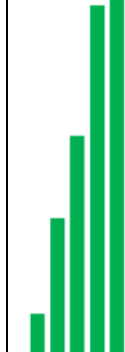

**VISI & MISI KOTA LHOEKSEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-4/TUJUAN-4**  
**(Sasaran Strategis 4.3 RPJMK)**



**VISI & MISI KOTA LHOKEUMAWE**  
**FOKUS: MISI-5/TUJUAN-5**  
**(Sasaran Strategis 5.1 dan 5.2 RPJMK)**



## METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni</b>																
1	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	PDRB tahun pengamatan - PDRB tahun sebelumnya/ PDRB tahun sebelumnya* 100%	Perkembangan Produksi Barang dan Jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan	4.21	4.46	4.40-4.50	4.53-4.80	4.53-4.82	4.53-4.84	4.53-4.86	4.53-4.88		
			Indeks Gini	Angka	BPS	Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.	0.293	0.326	0.293	0.295-0.322	0,293-0.320	0.290-0.318	0.288-0.316	0.286-0.314		
1.1		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan (%)	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan dibagi jumlah PDRB x100%	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Perdagangan yang terdiri dari 2 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor perdagangan terhadap PDRB.	22,93	23.24	23.40	23.69	23.80	24.00	24.21	24.42		
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri pengolahan dibagi jumlah PDRB x100%	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.	18,12	16.7	16.72	16.75	16.80	16.85	17.00	17.35		
			Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dibagi jumlah PDRB x100%	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB.	9.18	9.30	9.42	9.54	9.66	9.78	9.83	9.98		
1.2		Meningkatnya Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	%	Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator. Khusus perkotaan 8 indikator dari aspek keterjangkauan pangan yaitu : Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran, Persentase rumah tangga tanpa akses listrik dan aspek Pemanfaatan Pangan yaitu : Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun, Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk, Persentase balita stunting, Angka harapan hidup pada saat lahir	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan suatu wilayah, yang mencakup tiga pilar utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. IKP berfungsi sebagai alat untuk memetakan wilayah rentan pangan dan menentukan prioritas program intervensi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.	80.67	83.03	84.89	85.32	86.35	87.24	88.65	89.45		

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.3		Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% ) PDRB)	%	BPS	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Kab/Kota	38.77	39.65	40.53	40.95	41.70	42.21	42.83	43.00		
			PDRB per kapita	(Rp. Juta)	PDRB dibagi penduduk pertengahan tahun	PDRB perkapita adalah pembagian antara PDRB suatu daerah	56.59	59.12	62.38	65.48	68.21	71.20	74.61	77.00		
			Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	Kementerian Keuangan	Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) adalah alat ukur yang menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerahnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Nilai IKF berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 1 berarti semua belanja didanai sepenuhnya oleh PAD, dan nilai 0 berarti semua belanja dibiayai oleh dana transfer. Semakin tinggi nilai IKF, semakin tinggi pula kemandirian fiskal suatu daerah	0.95 Rendah	0.97 Rendah	1.136 Rendah	1.140 Rendah	1.167 Rendah	1.186 Rendah	1.195 Rendah	1.200 Sedang		
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	%	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dibagi jumlah PDRB x100	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.	2.30	2.30	2.40	2.42	2.43	2.44	2.45	2.46		
			Total Kredit/PDRB	%	Bank Indonesia	Total Kredit per Kabupaten/Kota adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup provinsi. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit per Provinsi /PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu provinsi terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) provinsi tersebut pada suatu waktu tertentu.	38.96	46.67	47.60	48.12	48.91	49.25	50.35	50.80		

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja	8,78	8.47	8.24	7.75- 7.85	7.65- 7.8	7.50- 7.75	7.40- 7.7	7.30- 7.6		
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Rp. Juta)	Metode perhitungannya adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar yaitu PDRB ADHB dibagi dengan jumlah tenaga kerja	Menurut definisi dari Kemnaker, produktivitas tenaga kerja adalah rasio antara produk barang/jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok, dalam satuan waktu tertentu. Rasio itu mencerminkan besaran kontribusi tenaga kerja dalam kegiatan ekonomi.	130,83	135,96	140.50	142.60	146.21	150.34	152.05	155.60		
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	$IPM = 1/3 [X(1) + X(2) + X(3)]$ $X(1) : Indeks harapan hidup$ $X(2) : Indeks pendidikan = (indeks harapan lama sekolah + indeks ratarata lama sekolah)/2$ $X(3) : Indeks pengeluaran$	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.	80.26	80.89	81.75	81,95-82,30	82.10-82.50	82.55-83.00	82.75-83.10	82.90-83.35		
2.1		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas)	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.	15.54	15.55	15.92	16.00	16.10	16.15	16.20	16.25		
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	lama sekolah penduduk ke- i di suatu wilayah dan n jumlah penduduk (i=1,2,3,...,n).	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut: a. Tidak punya ijazah = 0 b. SD = 6 c. SMP = 9 d. SMA = 12 e. D1/D2 = 14 f. D3 = 15 g. D4 = 16 h. S1 = 17 i. S2 = 19 j. S3 = 22 tahun. Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: a. Tidak pernah sekolah = 0 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir	11.27	11.31	11.50	11.58	11.68	11.75	11.80	11.85		
			Angka Literasi SD	Angka	Rapor Pendidikan	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	63.32	56.72	59.22	61.72	64.22	66.72	69.22	71.72		

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Angka Numerasi SD	Angka	Rapor Pendidikan	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	55.43	49.44	52.34	55.24	58.14	61.04	63.94	66.94		
			Angka Literasi SMP	Angka	Rapor Pendidikan	Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah	58.36	68.34	69.44	70.54	71.64	72.74	73.84	74.94		
			Angka Numerasi SMP	Angka	Rapor Pendidikan	Definisi Konseptual Indikator: Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah	39.50	59.94	61.44	62.94	64.44	65.94	67.44	68.94		
2.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu	74.76	74.93	74.95	75.12	75.35	75.50	75.68	75.88		
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	jumlah balita pendek dan sangat pendek dibagi jumlah balita dikali 100	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek: Zscore < -3,0 b. Pendek: Zscore ? -3,0 s/d Zscore & -2,0	20,70	20.80	18.80	17.50	16.30	15.20	14.20	13.34		
2.3		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	BPS	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)	10.73	10.44	9.01	9.00-8.85	8.85-8.7	8.69-8.58	8.58-8.45	8.45-8.35		
			Pengeluaran Riil Perkapita	Rp.	BPS	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.	12.125	12,694	13,263	13,832	14,401	14970	15,539	15,893		



No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	(%)	jumlah pekerja yang memiliki BPJS ketenagakerjaan dibagi jumlah penduduk bekerja dikali 100	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja	36.13	39.55	47.09	48.65	49.55	51.97	52.46	53.39		
2.4		Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	BKKBN	Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua wilayah di Indonesia, serta mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga maju, berkembang atau rentan	66.26	65.86	67.00	68.00	69.10	70.00	71.00	71.80		
			Indeks Desa Membangun	Indeks	1/3 (Indeks Sosial dikali Indeks Ekonomi dikali Indeks Lingkungan)	Indikator komposit yang digunakan untuk mengukur perkembangan suatu desa. IDM merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam memajukan desa.	0.7678	0.7762	77.22	77.72	78.32	79.020	79.82	80.32		
			Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	BPS	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.	0.303	0.331	0.310	0.300	0.291	0.290	0.288	0.285		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	BPS	alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara. IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan	96.55	96.59	96.62	96.65	96.68	96.71	96.74	96.77		
			Nilai Kota Layak Anak	Angka	Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak	ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu kabupaten atau kota memenuhi standar dan kriteria sebagai lingkungan yang mendukung hak-hak anak. KLA merupakan upaya untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan pelayanan yang memadai sesuai dengan hak-haknya.	616.47	728.14	720	730	740	750	760	770		

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja							Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	(Persentase pemuda Berprestasi + Persentase atlet berprestasi)/2	Persentase Pemuda berprestasi adalah jumlah pemuda yang berprestasi dalam perlombaan kepemudaan tingkat propinsi dibandingkan dengan jumlah total pemuda yang mengikuti perlombaan Persentase atlet berprestasi adalah jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat propinsi dan nasional dibandingkan dengan jumlah atlet		22.10	47.25	47.37	51.08	54.00	54.25	54.76			
			<b>Persentase pemuda berprestasi</b>	<b>Persen</b>	<b>(Jumlah Pemuda berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional / Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%</b>	pemuda yang unggul dan memberikan kontribusi positif di berbagai bidang, baik akademik (nilai tinggi, inovasi riset), non-akademik (olahraga, seni, UMKM), maupun sosial, dengan semangat pantang menyerah, kerja keras, dan mengembangkan potensi diri secara seimbang (IPTEK & IMTAQ) untuk mengharumkan nama daerah ditingkat propinsi dan nasional		0	50.00	50.00	57.14	62.50	62.50	62.50			
					(Jumlah Pemuda berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional			0	3	3	4	5	5	5			
					Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi atau Nasional			5	6	6	7	8	8	8			
			<b>Persentase atlet berprestasi</b>		(Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional / Jumlah Atlet peserta kejuaraan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100	Atlet berprestasi adalah seorang olahragawan daerah yang menunjukkan keunggulan dan pencapaian baik ditingkat provinsi dan nasional		44.20	44.51	44.74	45.03	45.50	46.00	47.03			
				orang	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional			80	81	85	86	91	92	95			
				orang	Jumlah Atlet peserta kejuaraan tingkat Provinsi atau Nasional			181	182	190	191	200	200	202			
3	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Angka	pekerjaan pemanfaatan ruang sesuai zonasi dibagi dengan luas pola ruang sesuai RTRW dikali 100	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang ukuran seberapa banyak area di suatu wilayah yang sudah digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Ini adalah indikator penting untuk mengukur seberapa patuh kegiatan pembangunan terhadap peraturan tata ruang,	85.01	87.28	88.15	89.03	89.92	90.82	91.73	92.65			
3.1		Meningkatnya pelayanan Infrastruktur kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	Tingkat Kemantapan Jalan x 30% + Persentase Rumah Tangga Air Minum Layak x 20% + Persentase Rumah Tangga Sanitasi Layak x 20% + Cakupan drainase dalam kondisi baik x 10% + Persentase kepatuhan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang x 20%	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur adalah ukuran kinerja pembangunan infrastruktur suatu wilayah	-	59.26	59.13	60.87	62.86	64.51	66.42	67.98			
					<b>Persentase jalan mantap</b>			69.53	64.40	59.54	61.54	64.54	66.54	69.54	71.54		
					Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap			286.78	265.62	203.98	210.832	221.111	227.963	238.241	245.093		
					Jumlah Panjang Keseluruhan			412.47	412.468	342.61	342.61	342.61	342.61	342.61	342.61		
					<b>Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Perpipaan</b>				16.43	17.21	18.04	18.93	19.91	20.94	22.04		
					PDAM Ie Beusare Rata			2241	2243	2416	2923	3485	4085	4725			
					PDAM Tirta Mon Pase			4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909			

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja		
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					PAMSIMAS			49	0	0	0	0	0	0			
					Sumur Dalam terlindungi perpipaan (DAK)			410	900	1200	1200	1200	1200	1200			
					Jumlah total rumah tangga			46315	46778	47246	47714	48196	48678	49164			
					<b>Persentase RT Sanitasi Layak</b>			<b>93.71</b>	<b>93.71</b>	<b>93.89</b>	<b>94.61</b>	<b>95.57</b>	<b>96.75</b>	<b>97.97</b>			
					<b>Air Limbah Domestik Layak</b>			<b>84.28</b>	<b>84.28</b>	<b>84.44</b>	<b>84.61</b>	<b>84.78</b>	<b>84.95</b>	<b>85.11</b>			
					Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak			39033	39423	39896	40375	40860	41350	41846			
					Jumlah total keseluruhan rumah tangga			46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164			
					<b>Air Limbah Domestik Aman</b>			<b>9.43</b>	<b>9.43</b>	<b>9.45</b>	<b>10.00</b>	<b>10.79</b>	<b>11.81</b>	<b>12.86</b>			
					Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi aman			4367	4411	4464	4772	5201	5747	6322			
					Jumlah total keseluruhan rumah tangga			46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164			
					<b>Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik</b>			<b>74.93</b>	<b>75.45</b>	<b>76.02</b>	<b>76.63</b>	<b>77.28</b>	<b>77.97</b>	<b>78.69</b>			
					Panjang drainase dalam kondisi baik			98.502	101.457	104.501	107.636	110.865	114.191	117.617			
					Panjang total drainase			131.462	134.462	137.462	140.462	143.462	146.462	149.462			
					<b>Persentase Kepatuhan Penilaian Pelaksanaan KKPR</b>			<b>52.11</b>	<b>57.67</b>	<b>62.08</b>	<b>65.66</b>	<b>68.62</b>	<b>71.11</b>	<b>73.24</b>			
					Jumlah Dokumen KKPR Patuh			198	248	298	348	398	448	498			
					Jumlah Dokumen KKPR yang Terbit			380	430	480	530	580	630	680			
			Tingkat Pelayanan Jalan	Level	Volume Capacity Ratio (VCR) Kab/Kota adalah rasio antara volume lalu lintas (Q) dengan kapasitas jalan (C), lalu gunakan nilai DS untuk menentukan Tingkat Pelayanan (LOS) dari skala A hingga F berdasarkan tabel standar. Prosesnya meliputi survei kondisi jalan, survei lalu lintas untuk volume kendaraan (Q), perhitungan kecepatan arus bebas, penyesuaian untuk berbagai faktor penentuan	V/C Ratio (Volume-to-Capacity Ratio) di jalan Kab/Kota adalah rasio antara volume lalu lintas yang mengalir melalui suatu jalan dengan kapasitas maksimum jalan tersebut untuk menampung lalu lintas. Rasio ini digunakan untuk menilai kinerja operasional jalan dan tingkat kemacetan atau kepadatan lalu lintas.	C 0.5	C 0.5	C 0.5	C 0.5	C 0.52	C 0.52	C 0.52	C 0.52			
3.2		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan adalah keluarga yang menempati rumah memenuhi kriteria luas cukup (min 7,2 m <sup>2</sup> /orang), punya akses air bersih & sanitasi layak, bangunan kokoh (atap, dinding, lantai memadai), pencahayaan & sirkulasi udara baik, serta lokasi aman (tidak banjir), dengan pembiayaan mudah melalui skema subsidi pemerintah (Program 3 Juta Rumah, KUR perumahan) untuk mengatasi backlog dan meningkatkan kualitas hidup	80.83	81.78	83.29	84.80	86.31	87.82	89.33	90.46			
					Jumlah Total Rumah Tangga Layak Huni/Total Jumlah Rumah Tangga x 100%			<b>80.83</b>	<b>81.78</b>	<b>83.29</b>	<b>84.80</b>	<b>86.31</b>	<b>87.82</b>	<b>89.33</b>	<b>90.46</b>		
					Jumlah Total Rumah Tangga Layak Huni			36780	37878	38962	40063	41186	42325	43486	44476		
					Jumlah keseluruhan rumah tangga			45504	46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164		

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.3		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) = (0.376 x Indeks Kualitas Air) + (0.405 x Indeks Kualitas Udara) + (0.219 x Indeks Kualitas Tutupan Lahan)	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).	63.40	69.40	70.00	73.35-73.85	75.10-75.65	76.21-76.5	77.42-77.7	79.21-79.5		
			Indeks Risiko Bencana	Indeks	tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana dari BNPB	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan	134.83	136.99	134.99	132.99	130.99	128.99	126.99	124.99		
4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kemenpan RB	menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.	CC 54.8	B 67.7	BB 71.3	BB 72.85	BB 73.32	BB 74.5	BB 75.64	BB 76.8		
4.1		Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Kategori/ Poin	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kemenpan RB	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari	B 60.18	B 61.12	B 68.4	BB 71.2	BB 72.6	BB 73.5	BB 74.3	BB 75.75		
			Opini BPK	Opini	Pernyataan Profesional BPK mengenai Kewajaran Informasi Keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan	Opini BPK adalah pernyataan profesional BPK atas kewajaran informasi dalam laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan dari pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kriteria penilaiannya meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Terdapat empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Penolakan Memberikan Opini (Disclaimer).	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
			Indeks Profesionalisme ASN	Angka	menjumlahkan hasil perkalian antara bobot masing-masing dimensi/indikator dengan skor dari jawaban ASN	Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik kuantitatif yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam menjalankan tugas jabatannya	76.89 sedang	79.42	80.46	81.67	82.8	83.9	85.00	86.70		

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	Angka	KPK	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).	69,44	64,37	70	72.5	75.5	77.50	78.00	79.00		
			Indeks Maturitas SPIP	Angka	BPKP	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan atau perkembangan implementasi dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam suatu instansi pemerintah. SPIP adalah rangkaian proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi akan tercapai dengan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Level 3.3	Level 3.3	Level 3.3.2	Level 3.3.3	Level 3.3.4	Level 3.3.5	Level 3.3.6	Level 3.3.6		
4.2		Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	Angka	Hasil evaluasi atas pelayanan publik Instansi Pemerintah dari Kemenpan RB	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks	D 1.87	B 3.94	A 4.2	A 4.28	A 4.32	A 4.4	A 4.51	A 4.6		
			Indeks SPBE	Angka	Indeks SPBE adalah INKS = Σ (NDj x BDj), di mana NDj adalah nilai indeks domain ke-j dan BDj adalah bobot domain ke-j, yang kemudian diakumulasikan untuk mendapatkan nilai kumulatif dan menentukan predikat kematangan SPBE suatu instansi pemerintah	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	2.35	2.8	3.00	3.10	3.15	3.2	3.25	3.3		
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	Indeks	Hasil penilaian Inovasi daerah dari Kemendagri	Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian untuk melihat seberapa inovatif suatu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memotivasi pemerintah daerah, mendorong kompetisi positif, mendorong pembangunan yang sesuai kebijakan nasional, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memberikan penghargaan bagi daerah yang berinovasi, melalui laporan tahunan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.	36.38	43.66	50.00	52.36	56.8	58.45	61.9	62.00		

No	Visi/ Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Cara Perhitungan	Definisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja						Tren Target Kinerja	
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Colum Chart	Line Chart
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	Hasil Survey Indeks Pembangunan Syariat oleh Dinas Syariat Islam Aceh dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat	Indeks Pembangunan Syariat (IPS) adalah survei yang mengukur penerapan syariat Islam di suatu wilayah, seperti di Aceh, yang melibatkan tujuh dimensi: aqidah, qanun LKS, kepatuhan membayar zakat, hukum jinayat, manajemen masjid, melek Al-Quran, dan akhlak. Indeks ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kebijakan dan merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas penerapan syariat Islam di daerah	80.65	83.91	84.24	84.91	85.25	85.83	86.1	86.54		
5.1		Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	Indeks	Hasil Survey Indeks Pembangunan Syariat oleh Dinas Syariat Islam Aceh dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat	Indeks Pembangunan Syariat (IPS) adalah survei yang mengukur penerapan syariat Islam di suatu wilayah, seperti di Aceh, yang melibatkan tujuh dimensi: aqidah, qanun LKS, kepatuhan membayar zakat, hukum jinayat, manajemen masjid, melek Al-Quran, dan akhlak. Indeks ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kebijakan dan merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas penerapan syariat Islam di daerah	80.65	83.91	84.24	84.91	85.25	85.83	86.1	86.54		
5.2		Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	Persentase cagar budaya yang dilestarikan + Persentase pengembangan budaya daerah	Cagar budaya adalah warisan kebendaan (benda, bangunan, situs, kawasan) yang dilestarikan karena nilai sejarahnya, sementara Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) adalah warisan tak berwujud seperti tari (Saman, Kecak), musik (Angklung), kuliner (Gudeg, Rendang), bahasa, dan adat istiadat yang hidup dan diwariskan turun-temurun, keduanya dilestarikan agar tidak punah dan menjadi identitas bangsa.	-	26.85	26.85	40.74	60.19	77.78	87.04	100.00		
						<b>Persentase Cagar yang dilestarikan</b>		<b>3.70</b>	<b>3.70</b>	<b>14.81</b>	<b>37.04</b>	<b>55.56</b>	<b>74.07</b>	<b>100.00</b>		
						Jumlah cagar budaya yang dilestarikan		1	1	4	10	15	20.0	27		
						Jumlah total cagar budaya		27	27	27	27	27	27	27		
						<b>Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>66.67</b>	<b>83.33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
						Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		3	3	4	5	6	6	6		
						Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		6	6	6	6	6	6	6		



**METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA PD  
PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE 2025-2029**

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Colum Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 62.55	B 62.7	B 62.9	B 63.1	B 63.4	B 63.7	B 64	MPD		
		Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat	Persentase rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh	Persen	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Daerah/ Jumlah Target Rekomendasi*100	Rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPD kepada kepala Daerah untuk peningkatan	0	100	100	100	100	100	100	MPD		
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 65.6	B 66.3	B 66.32	B 66.35	B 66.37	B 66.4	B 66.43	PK		
		Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 Tahun	Persen	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan dikali 100	Defenisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah	90.63	93.18	95.73	98.28	100.00	100.00	100.00	PK		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 Tahun	Persen	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100	Defenisi Konseptual Indikator: Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan (APS) Sumber Data : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) Tersedia dalam Rapor Pendidikan Daerah	98.95	99.00	99.05	99.10	99.15	99.20	99.25	PK		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 Tahun Kesetaraan	Persen	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dikali 100	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	41.35	51.08	57.57	64.06	70.55	71.32	72.08	PK		
		Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	Persen	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah total cagar budaya x 100	Cagar budaya adalah warisan kebendaan (benda, bangunan, situs, kawasan) yang dilestarikan karena nilai sejarahnya	3.70	3.70	14.81	37.04	55.56	74.07	100.00	PK		
					<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i>		1	1	4	10	15	20	27	PK		
					<i>Jumlah total cagar budaya</i>		27	27	27	27	27	27	27	PK		
		Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persen	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan dibagi Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan x100	Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) adalah warisan tak berwujud seperti tari (Saman, Kecak), musik (Angklung), kuliner (Gudeg, Rendang), bahasa, dan adat istiadat yang hidup dan diwariskan turun-temurun, keduanya dilestarikan agar tidak punah dan menjadi identitas bangsa.	50	50	66.67	83.33	100.00	100	100	PK		
					<i>Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan</i>		3	3	4	5	6	6	6	PK		
					<i>Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan</i>		6	6	6	6	6	6	6	PK		
3	Dinas Kesehatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 66.2	B 66.75	B 68.94	B 68.95	B 68.96	B 68.97	B 68.98	DINKES		
		Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 KH	Rasio Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu = Jumlah Kematian Ibu /Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000	Jumlah Kematian Perempuan pada saat Hamil atau dalam 42 Hari setelah berakhirnya Kehamilan yang disebabkan oleh masalah terkait kehamilan atau penanganannya, bukan kareanan penyebab lain seperti kecelakaan	27.96	130	109	97	86	77	77	DINKES		
		Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (Persen)	Persen	Jumlah Kasus TB yang berhasil ditemukan dan diobati/Perkiraan Jumlah Total Kasus TB yang ada di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu x 100Persen	Persentase dari total kasus TBC yang berhasil ditemukan dan diobati disuatu wilayah dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan perkiraan jumlah total kasus TBC yang ada di wilayah tersebut	62.7	100	100	100	100	100	100	DINKES		
		Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase capaian pelayanan sesuai standar	Persen	(Total Pencapaian seluruh indikator SPM selama 1 tahun /Target Pencapaian seluruh Indikator SPM selama 1 Tahun x 100)Persen	Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal	95	100	100	100	100	100	100	DINKES		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 66.05	B 66.9	B 67.2	B 68.1	B 68.9	BB 70.15	BB 70.55	PUPR		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1								9	10	11	12	13	14	15		
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe	Persentase Kemantapan Jalan Kota	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dihitung berdasarkan Jumlah seluruh panjang jalan dalam kondisi mantap (baik + sedang) dibandingkan dengan Panjang jalan keseluruhan yang ada dalam periode tertentu	Persen		Kondisi mantap jalan kab/kota (%): merupakan proporsi dari panjang jalan kab/kota yang memenuhi kategori kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kab/kota. Kategori kondisi baik dan sedang yaitu kondisi jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai bagi kendaraan untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman, dengan dimana angka Roughness Indeks (RI, di bawah 4 untuk kondisi baik dan di bawah 8 untuk kondisi sedang. Pengukuran kondisi jalan ini menggunakan alat roughometer dengan satuan Internasional Roughness Indeks (IRI) yang menyatakan akumulasi naik turunnya muka jalan sepanjang 1 kilometer jalan (m/km). Ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu (Permen PU No. 13/PRT/M/2011).	64.40	59.54	61.54	64.54	66.54	69.54	71.54	PUPR		
				KM	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap		265.62	273.87	284.19	292.43	302.75	311.00	321.31	PUPR		
				KM	Jumlah Panjang Keseluruhan		412.47	412.47	412.47	412.47	412.47	412.47	412.47	PUPR		
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dihitung berdasarkan Jumlah Rumah Tangga yang memiliki sarana pemuangan ALD (septictank) Aman ditambah layak dibandingkan dengan Jumlah Rumah Tangga keseluruhan	Persen		Definisi operasional untuk akses sanitasi layak biasanya mencakup kriteria seperti akses ke fasilitas sanitasi yang layak dan bersih, seperti toilet atau jamban yang memenuhi standar kesehatan dan tidak mencemari sumber air. Persentase ini memberikan gambaran tentang seberapa besar proporsi rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang sesuai dengan standar kesehatan	93.71	93.71	93.89	94.61	95.57	96.75	97.97	PUPR		
				Persen	Air Limbah Domestik Layak		84.28	84.28	84.44	84.61	84.78	84.95	85.11	PUPR		
				RT	Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak		39033	39423	39896	40375	40860	41350	41846	PUPR		
				RT	Jumlah total keseluruhan rumah tangga		46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164	PUPR		
				Persen	Air Limbah Domestik Aman		9.43	9.43	9.45	10.00	10.79	11.81	12.86	PUPR		
				RT	Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi aman		4367	4411	4464	4772	5201	5747	6322	PUPR		
				RT	Jumlah total keseluruhan rumah tangga		46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164	PUPR		
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase drainase dalam kondisi baik dihitung berdasarkan Panjang drainase dalam kondisi baik dibandingkan dengan Panjang total drainase	Persen		adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan perbandingan antara panjang jaringan drainase yang berfungsi dengan baik terhadap total panjang jaringan drainase yang ada di suatu wilayah	74.93	75.45	76.02	76.63	77.28	77.97	78.69	PUPR		
				KM	Panjang drainase dalam kondisi baik		98.502	101.457	104.501	107.636	110.865	114.191	117.617	PUPR		
				KM	Panjang total drainase		131.462	134.462	137.462	140.462	143.462	146.462	149.462	PUPR		
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe	Persentase Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum perpipaan	Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM jaringan pipa dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM perpipaan dibandingkan dengan Jumlah total rumah tangga	Persen		Persentase rumah tangga dalam suatu populasi atau area tertentu yang memiliki akses ke air minum melalui sistem jaringan perpipaan yang terhubung dengan penyedia layanan air bersih. Kriteria ini biasanya mencakup: 1. Sumber Air: Air yang disuplai melalui sistem perpipaan harus berasal dari sumber yang dikelola dengan baik dan memenuhi standar kualitas air minum. 2. Jaringan Perpipaan: Rumah tangga harus terhubung secara langsung dengan sistem jaringan perpipaan, yang mencakup pipa distribusi air dari penyedia layanan air. 3. Ketersediaan: Air harus tersedia secara konsisten dari sistem perpipaan dan dapat diakses oleh rumah tangga dengan cara yang wajar. 4. Aksesibilitas: Rumah tangga harus memiliki sambungan perpipaan yang memadai dan dapat mengakses air dengan mudah tanpa kendala yang signifikan.	16.43	17.21	18.04	18.93	19.89	20.91	22.03	PUPR		
				RT	PIDAM ke Beusare Rata		2241	2243	2416	2923	3479	4070	4721			
				RT	PIDAM Tirta Mon Pase		4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909			
				RT	PAMSIMAS		49	0	0	0	0	0	0			
				RT	Sumur Dalam terlindungi perpipaan IDAKI		410	420	1200	1200	1200	1200	1200			
				RT	Jumlah total rumah tangga		46315	46778	47246	47714	48196	48678	49164	PUPR		
	Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe	Persentase Kepatuhan Penilaian Pelaksanaan KKPR	Persentase Kepatuhan Penilaian Pelaksanaan KKPR dihitung berdasarkan Jumlah penilaian dokumen KKPR patuh dibanding Jumlah dokumen KKPR yang terbit	Persen		Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan dalam dokumen KKPR	52.11	57.67	62.08	65.66	68.62	71.11	73.24	PUPR		
				KKPR	Jumlah Dokumen KKPR Patuh		198	248	298	348	398	448	498	PUPR		
				KKPR	Jumlah Dokumen KKPR yang Terbit		380	430	480	530	580	630	680	PUPR		
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	(Realisasi Retribusi Daerah / Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah) x 100	Persen		Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Ini dihitung dengan membandingkan total realisasi PAD dengan total realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, semakin mandiri daerah tersebut secara fiskal.	1.01	0.55	0.59	0.57	0.57	0.54	0.53	PUPR		
				Rp (M)	Realisasi Retribusi Daerah (Keseluruhan OPD)		0.65	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	PUPR		
				Rp (M)	Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah		64.52	90.15	80.80	84.18	87.85	91.78	94.47	PUPR		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Colum Chart	Line Chart
1								9	10	11	12	13	14	15		
		Meningkatnya Pelayanan dan Ketersediaan Perumahan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Dibangun	Persen	Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni yang Dibangun/Jumlah Total Rumah Tangga Tidak Layak Huni x 100%	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang Dibangun, persentase jumlah rumah tangga atau unit rumah yang semula dikategorikan sebagai tidak layak huni dan telah dibangun/ditingkatkan menjadi layak huni dalam periode tertentu, dibandingkan dengan total jumlah rumah tidak layak huni pada awal periode tersebut.	1.19	1.50	1.83	2.17	2.54	2.93	3.35	PUPR		
				Unit	Jumlah Rumah Tangga Tidak Layak Huni yang Dibangun		100	125	150	175	200	225	250	PUPR		
				Unit	Jumlah Total Rumah Tangga Tidak Layak Huni		8430	8330	8205	8055	7880	7680	7455	PUPR		
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.8	B 62	B 62.5	B 62.8	B 63.1	B 63.3	B 63.8	BPBD		
		Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) karena IKD merupakan hasil dari perhitungan berbagai indikator yang mencakup aspek kerentanan, kapasitas, dan risiko suatu daerah terhadap bencana. Secara umum, rumus risiko bencana adalah $\sqrt{R} = \sqrt{H \times (V \times E)}$ di mana $\sqrt{R}$ adalah Risiko, $\sqrt{H}$ adalah Hazard (kemungkinan terjadinya bencana), $\sqrt{V}$ adalah Vulnerability (kerentanan), dan $\sqrt{E}$ adalah Exposure (paparan)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah alat ukur untuk menilai kapasitas suatu wilayah (kabupaten/kota atau provinsi) dalam menghadapi dan mengurangi bencana. IKD mengukur kemampuan daerah untuk memitigasi risiko, beradaptasi, meminimalkan dampak, serta pulih secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pasca-bencana, dan merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	0.40	0.41	0.41	0.42	0.42	0.43	0.43	BPBD		
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hiabih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 61.75	B 62.7	B 63	B 63.2	B 63.51	B 63.82	B 64.1	SATPOL PP dan WH		
		Meningkatnya Penegakan Peraturan daerah dan Penanganan Gangguan Trantibum	Persentase Penegakan Qanun dan penanganan gangguan trantibum	Persen	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x100	Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	61.77	81.19	92.89	99.30	98.61	98.63	98.65	SATPOL PP dan WH		
				Perda	Persentase Perda yang ditegakkan		57.14	95.71	95.77	98.59	97.22	97.26	97.30	SATPOL PP dan WH		
				Perda	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan		40	67	68	70	70	71	72	SATPOL PP dan WH		
				Perda	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		70	70	71	71	72	73	74	SATPOL PP dan WH		
					Persentase penanganan trantibum		66.40	66.67	90.00	100	100	100	100			
					Jumlah penanganan trantibum yang ditangani		4	9	5	5	5	5	5			
					Jumlah keseluruhan penanganan trantibum		6	10	5	5	5	5	5			
7	Dinas Sosial	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 64.65	B 66.15	B 66.45	B 66.6	B 66.65	B 66.67	B 66.7	DINSOS		
		Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi keluarga miskin	Persentase keluarga Miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Persen	((Jumlah Fasilitas KK yang mendapat bantuan kebutuhan dasar/Jumlah Penduduk Miskin yang Terdata Dalam DTKS) x 35%)+(Jumlah anak terlantar, disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terlantar diluar panti/jumlah anak terlantar,disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar/45%)+(Jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani/jumlah kejadian bencana sosial dan alam yang dilaporkan) x 20%)	Keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial adalah keluarga yang masuk dalam kategori fakir miskin dan rentan, yang diidentifikasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan berhak menerima bantuan melalui program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) / Sembako. Bantuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan, serta melindungi mereka dari risiko sosial melalui berbagai program lainnya.	-	68.91	69.01	69.11	69.21	69.32	69.42	DINSOS		
					Jumlah Fasilitas KK yang Mendapat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar		10500	10763	11032	11307	11590	11880	DINSOS			
					Jumlah Penduduk Miskin yang Berdala		93996	93996	93996	93996	93996	93996	DINSOS			
					Jumlah anak terlantar,disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar		50	50	50	50	50	50	DINSOS			
					Jumlah anak terlantar,disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar,tuna sosial terlantar diluar panti yang harus mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar		50	50	50	50	50	50	DINSOS			
					jumlah laporan kejadian bencana sosial dan alam yang ditangani		20	20	20	20	20	20	DINSOS			
					jumlah kejadian bencana sosial dan alam yang dilaporkan		20	20	20	20	20	20	DINSOS			

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APPIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 65.5	B 66.2	B 68.5	B 68.51	B 68.52	B 68.53	B 68.54	DP3AP2KB		
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Nilai	BPS	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender melalui partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, serta akses terhadap sumber daya. Ini mengukur tiga komponen utama: keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan	68.86	68.87	68.88	68.89	68.90	68.91	68.92	DP3AP2KB		
		Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Tingkat Penanganan Kasus Kekerasan Eksploitasi dan Diskriminasi terhadap Anak	Persen	Jumlah kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak yang ditangani dibagi dengan total kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak	Tingkat penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak adalah sebuah sistem perlindungan yang komprehensif, mulai dari pelaporan, pendampingan psikologis dan hukum, hingga rehabilitasi. Upaya ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, kepolisian, lembaga perlindungan anak seperti UPTD PPA dan KPAI, serta masyarakat, dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	DP3AP2KB		
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kualitas Keluarga	Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate)	Nilai	TFR (Total Fertility Rate) adalah penjumlahan Angka Kesuburan Spesifik Usia (ASFR) untuk semua kelompok usia subur yang dikalikan dengan interval usia (biasanya 5). Ini berarti TFR dihitung dengan menjumlahkan ASFR dari semua kelompok usia (misalnya 15-19, 20-24, dst.) kemudian hasilnya dikalikan lima jika ASFR disajikan dalam kelompok usia lima tahun	Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya.	2.28	2.28	2.27	2.27	2.26	2.26	2.25	DP3AP2KB		
9	Dinas Pertanahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APPIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 61.25	B 61.65	B 61.86	B 62.17	B 62.48	B 62.79	B 63.11	DISTANAH		
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah	Persen	Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah / Total Lahan Milik Pemerintah * 100	Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) sebagai aset daerah. Aset ini dapat berupa tanah yang sudah bersertifikat atau belum, dan digunakan untuk berbagai keperluan publik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	18.99	19.94	20.94	21.99	23.09	24.24	25.45	DISTANAH		
				m²	Jumlah Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah		619,550	650,528	683,054.00	717,207	753,067	790,720	830,256	DISTANAH		
				m²	Total Lahan Milik Pemerintah		3,261,811	3,261,811	3,261,811	3,261,811	3,261,811	3,261,811	3,261,811	DISTANAH		
10	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APPIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 62.9	CC 58.05	B 63.1	B 63.3	B 63.4	B 63.5	B 63.8	DLH		
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	Untuk menghitung indeks kualitas udara (IKU), pertama ukur konsentrasi beberapa polutan utama seperti (PM <sub>2.5</sub> ), (PM <sub>10</sub> ), (SO <sub>2</sub> ), (NO <sub>2</sub> ), (CO), dan (O <sub>3</sub> ). Kemudian, ubah nilai konsentrasi masing-masing polutan menjadi nilai sub-indeks dengan membandingkannya terhadap standar yang telah ditetapkan	Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NOx mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SOx mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO <sub>2</sub> , SO <sub>2</sub> dan PM <sub>2.5</sub> .	92.89	92.91	92.93	92.95	92.97	92.99	93	DLH		
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	Cara menghitung Indeks Kualitas Air (IKA) melibatkan perhitungan Indeks Pencemaran (IP) untuk setiap parameter, lalu mengolahnya menjadi satu nilai indeks tunggal. Metode umum adalah menghitung IP dengan membandingkan konsentrasi sampel ((C <sub>i</sub> )/I <sub>ij</sub> ) dengan baku mutu ((L <sub>ij</sub> )) untuk setiap parameter, dan kemudian menggunakan bobot untuk menggabungkan nilai-nilai ini menjadi satu angka IKA	Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan	70.00	71.00	71.20	71.45	71.60	71.80	72.00	DLH		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	$IKL = 100 - ((84.3 \cdot ((TL - DKK) \times 100)) \times 50/54.3)$	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (coverage area) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90-100.	24.95	25.1	25.25	25.5	25.65	25.9	26.2	DLH		
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Timbulan Sampah terolah, difasilitasi pengolahan sampah	Jumlah Sampah terolah/ Total timbulan sampah per tahun x 100		Persentase Terolah mengukur seberapa besar proporsi dari total timbulan sampah yang telah diproses atau dikelola oleh fasilitas pengolahan dibandingkan dengan total sampah yang dihasilkan. Dalam konteks ini, terolah mencakup segala bentuk pengolahan, seperti daur ulang, pemrosesan, atau pengurangan volume sampah.	n.a	0.1	15.2	18.3	20.61	25.45	30.39	DLH		
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	$(\text{Realisasi Retribusi Daerah} / \text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}) \times 100$	Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Ini dihitung dengan membandingkan total realisasi PAD dengan total realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, semakin mandiri daerah tersebut secara fiskal.	0.44	1.11	1.24	1.19	1.14	1.09	1.06	DLH		
				Rp (M)	Realisasi Retribusi Daerah (Persampahan)		0.29	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DLH		
				Rp (M)	Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah		64.52	90.15	80.80	84.18	87.85	91.78	94.47	DLH		
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 63.2	B 63.6	B 64	B 64.4	B 64.8	B 65.2	B 65.6	DISDUKCAPIL		
		Meningkatnya kesadaran warga dalam mengurus dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau layanan lainnya, yang didasarkan pada survei dan pendapat masyarakat. IKM mengukur seberapa puas masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kecepatan, prosedur, biaya, dan kompetensi petugas. Tujuan utamanya adalah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.	93.49	93.5	93.51	93.52	93.53	93.54	93.55	DISDUKCAPIL		
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 62.55	B 62.7	B 62.8	B 62.9	B 63.15	B 63.3	B 63.45	DPMG		
		Meningkatnya strata desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	Persen	Jumlah Desa Mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun / Jumlah Desa x 100 %	Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencakup, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelesaian pemerintahan yang sudah sangat baik. Desa mandiri adalah desa yang memiliki nilai IPD lebih dari 75.	36.76	42.65	48.53	52.94	57.35	61.76	66.18	DPMG		
					Jumlah Desa Mandiri		25	29	33	36	39	42	45	DPMG		
					Total Jumlah Desa		68	68	68	68	68	68	68	DPMG		
13	Dinas Perhubungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.35	B 62	B 62.8	B 63.2	B 63.5	B 63.9	B 64.11	DISHUB		
		Meningkatnya pembangunan infrastruktur Kota Lhokseumawe	Tingkat Pelayanan Jalan	Rasio	V/C Ratio ( Volume-to-Capacity) di Jalan Kota Lhokseumawe	V/C Ratio ( Volume-to-Capacity) di Jalan Kota Lhokseumawe Adalah rasio antara volume lalu lintas yang mengalir melalui suatu jalan dengan kapasitas maksimum jalan tersebut untuk menampung lalu lintas. Rasio ini digunakan untuk kinerja operasional Jalan dan tingkat kemacetan atau kepadatan lalu lintas	0.50	0.50	0.50	0.52	0.52	0.52	0.52	DISHUB		
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	$(\text{Realisasi Retribusi Daerah} / \text{Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah}) \times 100$	Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Ini dihitung dengan membandingkan total realisasi PAD dengan total realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, semakin mandiri daerah tersebut secara fiskal.	1.33	1.23	1.41	1.39	1.37	1.34	1.32	DISHUB		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Rp (M)	Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum		0.81	1.06	1.09	1.12	1.15	1.18	1.20	DISHUB		
				Rp (M)	Retribusi Penyediaan Tanah dan Bangunan		0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05			
				Rp (M)	Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah		64.52	90.15	80.80	84.18	87.85	91.78	94.47	DISHUB		
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APPIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.95	B 62.4	B 62.6	B 62.8	B 63	B 63.2	B 63.4	DISKOMINFO		
		Meningkatnya Layanan SPBE	Indeks Tata Kelola SPBE	Nilai	Indeks Tata Kelola SPBE dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	dimensi tata kelola ini merupakan tulang punggung penerapan SPBE, memastikan bahwa teknologi yang digunakan didukung oleh kebijakan, SDM, dan proses yang tepat, bukan sekedar aplikasi semata.	1.80	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00	DISKOMINFO		
			Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	Nilai	Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai tingkat kematangan pelaksanaan Audit keamanan SPBE pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE	1.00	1.00	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	DISKOMINFO		
		Terwujudnya Kota Lhokseumawe yang informatif	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Nilai	Indeks Masyarakat Digital Indonesia yang dinilai oleh Badan pengembangan Sumber Daya Manusia dan Informatika dibawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya, yang diinformasikan melalui <a href="https://imdi.sdmdigital.id">https://imdi.sdmdigital.id</a>	45.76	46.31	47.60	48.32	49.6	50.23	51.87	DISKOMINFO		
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APPIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 68.2	B 68.85	B 68.95	B 69.05	B 69.15	B 69.2	B 69.25	DPMPPTSP		
		Meningkatnya Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	Jumlah Nilai Investasi pada Tahun N	Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah seluruh pengeluaran modal yang telah dikeluarkan oleh investor (baik PMA maupun PMDN) untuk merealisasikan suatu proyek investasi, yang dihitung berdasarkan data laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang disampaikan oleh investor	526	500	510	525	545	570	600	DPMPPTSP		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Angka	Nilai SKM pada Tahun N	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perizinan adalah data dan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, yang diukur melalui survei kepuasan masyarakat. IKM ini digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan perizinan, serta sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan	89.56	89.58	89.60	89.62	89.65	89.67	89.69	DPMPPTSP		
		Meningkatnya serapan tenaga kerja terlatih	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Persen	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan / Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar * 100	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pencari kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan dari total pencari kerja yang terdaftar, dihitung dalam bentuk persentase	8.91	10.00	10.03	11.11	12.74	12.80	13.36	DPMPPTSP		
				Orang	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan		23	30	35	45	60	70	85	DPMPPTSP		
				Orang	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar		258	300	349	405	471	547	636	DPMPPTSP		
		Meningkatnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Rentan	Persentase Kepesertaan Jamsostek Pekerja rentan	Persen	Jumlah Peserta Jamsostek Pekerja Rentan / Jumlah Pekerja *100	Persentase Kepesertaan Jamsostek Pekerja Rentan adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pekerja rentan yang telah terdaftar dan aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek)	2.77	3.77	4.77	5.76	6.77	7.76	8.76	DPMPPTSP		
				Orang	Jumlah Peserta Jamsostek Pekerja Rentan		460	633	808	987	1170	1356	1546	DPMPPTSP		
				Orang	Jumlah Pekerja		16618	16,784	16,952	17,122	17,293	17,466	17,641	DPMPPTSP		
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APPIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 65.45	B 65.5	B 65.75	B 65.81	B 66.16	B 66.45	B 67.2	DISPORAPAR		
		Lhokseumawe menjadi Tujuan Wisata yang Berdaya Saing	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Nusanantara ke Lhokseumawe	Persen	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun N - Wisatawan tahun N-1/ Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun N-1 *100	Kunjungan wisatawan nusantara adalah perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia di dalam wilayah geografis Indonesia secara sukarela, dengan durasi kurang dari 6 bulan, dan bukan untuk tujuan sekolah atau bekerja	-4	1	2	3	4	5	6	DISPORAPAR		
				orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun N		309,092	312,183	318,427	327,980	341,099	358,154	379,643	DISPORAPAR		



No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart	
1																	
				orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun N-1		321,499	309,092	312,183	318,427	327,980	341,099	358,154	DISPORAPAR			
		Meningkatnya Peran dan Prestasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase pemuda berprestasi	Persen	(Jumlah Pemuda berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional / Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%	pemuda yang unggul dan memberikan kontribusi positif di berbagai bidang, baik akademik (nilai tinggi, inovasi riset), non-akademik (olahraga, seni, UKM), maupun sosial, dengan semangat pantang menyerah, kerja keras, dan mengembangkan potensi diri secara seimbang (IPTEK & IMTQAQ) untuk mengharumkan nama daerah ditingkat propinsi dan nasional	0	50.00	50.00	57.14	62.50	62.50	62.50	DISPORAPAR			
				orang	Jumlah Pemuda berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional		0	3	3	4	5	5	5	DISPORAPAR			
				orang	Jumlah Pemuda peserta lomba kepemudaan tingkat Provinsi atau Nasional		5	6	6	7	8	8	8	DISPORAPAR			
		Meningkatnya Prestasi Olahraga tingkat Propinsi dan Nasional	Persentase atlet berprestasi	Persen	(Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional / Jumlah Atlet peserta kejuaraan tingkat Provinsi atau Nasional) x 100%	Atlet berprestasi adalah seorang olahragawan daerah yang menunjukkan keunggulan dan pencapaian baik ditingkat provinsi dan nasional	44.20	44.51	44.74	45.03	45.50	46.00	47.03	DISPORAPAR			
				orang	Jumlah Atlet berprestasi tingkat Provinsi atau Nasional		80	81	85	86	91	92	95	DISPORAPAR			
				orang	Jumlah Atlet peserta kejuaraan tingkat Provinsi atau Nasional		181	182	190	191	200	200	202	DISPORAPAR			
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.75	B 61.5	B 62.15	B 62.75	B 63.1	B 63.75	B 64	MAA			
		Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh	Persen	Sekretariat MAA Aceh	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan perkembangan kebudayaan di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan adat dan istiadat.	97.46	97.43	97.44	97.60	97.64	97.69	99.00	MAA			
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.75	B 61.2	B 61.95	B 62.1	B 62.8	B 63.2	B 63.9	DISPERPUS			
		Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai-kategori	Perpusnas	Tingkat Kegemaran Membaca adalah sejauh mana individu atau masyarakat memiliki minat dan kebiasaan membaca buku, artikel, majalah, atau bahan bacaan lainnya. Ini bisa diukur melalui beberapa indikator seperti: Frekuensi Membaca: Seberapa sering individu membaca dalam jangka waktu tertentu (misalnya, jumlah buku yang dibaca per bulan). Durasi Membaca: Waktu yang dihabiskan untuk membaca dalam periode tertentu (misalnya, jam per minggu). Keragaman Bacaan: Jenis dan variasi bahan bacaan yang dibaca (misalnya, fiksi, non fiksi, koran, majalah). Akses ke Bahan Bacaan: Kemudahan akses terhadap bahan bacaan, baik secara fisik maupun digital. Motivasi dan Minat: Tingkat ketertarikan individu terhadap kegiatan membaca.	68.15	69.25	70.11	70.29	71.05	71.17	71.6	DISPERPUS			
		Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai-kategori	Perpusnas	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah ukuran yang menggambarkan tingkat perkembangan literasi dalam suatu masyarakat. Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Definisi operasional dari variabel ini dapat dipecah menjadi beberapa komponen utama: Tingkat Melek Huruf: Persentase populasi yang dapat membaca dan menulis pada usia tertentu. Akses ke Pendidikan: Kemudahan akses ke fasilitas pendidikan dan bahan bacaan. Kualitas Pendidikan: Kualitas pengajaran dan kurikulum yang berfokus pada pengembangan literasi. Infrastruktur Literasi: Ketersediaan perpustakaan, pusat belajar, dan fasilitas lain yang mendukung kegiatan literasi. Partisipasi dalam Kegiatan Literasi: Jumlah dan jenis kegiatan literasi yang diikuti oleh masyarakat, seperti klub buku, seminar, dan lokakarya. Penggunaan Teknologi untuk Literasi: Akses dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan literasi.	58.41	65.32	67.42	69.36	71.20	73.32	75.80	DISPERPUS			
		Meningkatnya tata kelola kearsipan yang baik	Persentase OPD yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan Secara Baik	Persen	Jumlah OPD yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan Secara Baik dibagi jumlah total OPD dikali 100	OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan baik adalah yang sudah mengadopsi sistem modern seperti Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), memiliki SDM kearsipan berkualitas (Arsiparis), melakukan digitalisasi, memiliki kebijakan retensi jelas, keamanan data terjamin, dan menjalankan pembinaan kearsipan secara berkelanjutan	5.8	14.70	29.40	44.10	58.80	73.50	88.50	DISPERPUS			

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Colum Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 63.65	B 63.6	B 64.5	B 65	B 65.5	B 66	B 66.5	DKPPP		
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan	Persentase PDRB Sub Sektor Pertanian	Persen	BPS	Nilai kontribusi Sub sektor Pertanian terhadap PDRB	1.89	1.90	1.90	1.91	1.91	1.92	1.92	DKPPP		
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian, Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan	Persentase PDRB Sub Sektor Kelautan	Persen	BPS	Nilai kontribusi sub sektor kelautan/perikanan terhadap PDRB	7.38	7.39	7.40	7.41	7.42	7.43	7.45	DKPPP		
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Aman	Skor PPH Tingkat Ketersediaan	Nilai	Data hasil Susenas diolah dengan Aplikasi Harmonisasi PPH Susenas. Dihitung berdasarkan standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan AKP 57 Gt/kap/Hari	Skor Pola Pangan Harapan, yang merupakan indikator untuk mengukur kualitas konsumsi pangan masyarakat berdasarkan keragaman dan keseimbangan kelompok pangan.	77.54	77.80	78.00	78.40	78.95	78.00	79.25	DKPPP		
		Meningkatnya Konsumsi Pangan	Tingkat Konsumsi Pangan (Energi dan Protein)	kkal	Energi = Jumlah Konsumsi Energi Rumah Tangga per hari di bagi Jumlah Angka Rumah Tangga (ART) Protein = Ketersediaan pangan /kapita x kandungan protein x BDD / 100	Konsumsi protein merujuk pada jumlah protein yang dikonsumsi dari makanan dan minuman, sementara konsumsi energi adalah jumlah energi yang diperoleh dari makanan dan minuman yang dikonsumsi.	E=1873,1; P=58,7	E=1770,1; P=55,7	E=1874; P=59	E=1875; P=60	E=1880; P=62	E=1885; P=64	E=1890; P=67	DKPPP		
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 65.9	B 66.45	B 66.95	B 67.2	B 67.8	B 68	B 68.2	DISKOP		
		Rasio PDRB Perdagangan (%)	Nilai PDRB Sektor Perdagangan	Rp	Mengikuti Data BPS	Rasio PDRB Perdagangan (%) adalah indikator yang mengukur kontribusi sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Secara lebih rinci, rasio ini menunjukkan seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan (baik perdagangan besar maupun secara) terhadap total nilai tambah seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.	2.753 juta	2.8 juta	2.855 juta	2.9 juta	2.95 juta	2.98 juta	2.995 juta	DISKOP		
		Terjaganya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok	Koefisien Variasi Harga Antar waktu	Persen	Total Persen (%) Bahan Pokok/ 9 Bahan Pokok*100%	Koefisien variasi harga antar waktu adalah perbandingan antara simpangan baku harga pada suatu periode terhadap harga rata-rata pada periode tersebut, yang diukur dalam bentuk persentase. Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar fluktuasi atau penyebaran harga dari waktu ke waktu, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan variabilitas harga yang lebih besar dan nilai yang lebih rendah menunjukkan stabilitas harga yang lebih tinggi.	6.10	6.15	6.25	6.30	6.35	6.40	6.45	DISKOP		
		Meningkatnya Nilai Usaha Industri	Nilai PDRB Sektor Industri	Rp	Mengikuti Data BPS	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) adalah persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Secara lebih rinci, ini adalah ukuran seberapa besar sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap keseluruhan kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu	1.978 juta	1.985 juta	1.994 juta	2.011 juta	2.101 juta	2.195 juta	2.231 juta	DISKOP		
		Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota (%)	Persen	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian/ Jumlah UKM keseluruhan*100%	Proporsi jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) non pertanian pada level kabupaten/kota (%) adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah UKM non pertanian terhadap total jumlah UKM di suatu kabupaten/kota.	5.92	5.93	5.90	5.88	5.87	5.86	5.85	DISKOP		
					Jumlah Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian		408	409	409	409	409	409	409	DISKOP		
					Jumlah UMKM Keseluruhan		6897	6900	6930	6950	6970	6980	6995	DISKOP		
		Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset / jumlah seluruh koperasi aktif *100	Koperasi dikatakan berkualitas jika memiliki kinerja baik dalam aspek kelembagaan, usaha, dan keuangan, serta memberikan manfaat bagi seluruh anggota.	3.21	3.53	4.17	4.81	5.45	5.77	6.41	DISKOP		
					Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset		10	11.00	13.00	15.00	17.00	18.00	20.00	DISKOP		
					Jumlah seluruh koperasi aktif		312	312	312	312	312	312	312	DISKOP		
		Meningkatnya Kinerja Koperasi dan Usaha Kecil	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Persen	Jumlah Wirausaha / Jumlah Angkatan Kerja*100	Rasio kewirausahaan daerah adalah angka yang menunjukkan persentase jumlah wirausaha di suatu daerah terhadap total penduduk atau angkatan kerja di daerah tersebut. Rasio ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat semangat berwirausaha di suatu wilayah.	7.37	7.37	7.40	7.43	7.45	7.46	7.47	DISKOP		
					Jumlah Wirausaha		6,897	6,900	6,930	6,950	6,970	6,980	6,995	DISKOP		
					Jumlah Angkatan Kerja		93,594	93,594	93,594	93,594	93,594	93,594	93,594	DISKOP		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja		
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Colum Chart	Line Chart	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persen	(Realisasi Retribusi Daerah / Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah) x 100	Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Ini dihitung dengan membandingkan total realisasi PAD dengan total realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, semakin mandiri daerah tersebut secara fiskal.	1.34	0.99	1.15	1.10	1.05	1.01	0.98	DISKOP			
				Rp (M)	Realisasi Retribusi Daerah (Pelayanan Pasar)		0.86	0.90	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	DISKOP			
				Rp (M)	Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah		64.52	90.15	80.80	84.18	87.85	91.78	94.47	DISKOP			
21	Sekretariat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APMP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 63.55	B 63.95	B 64.5	B 65	B 65.5	B 66	B 66.5	SETDAKO			
		Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi General	Poin	Hasil Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dari Kemenpan RB	Nilai Reformasi Birokrasi General (RB General) mengukur perbaikan tata kelola internal pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Penilaiannya mencakup efektivitas pelaksanaan rencana aksi, digitalisasi pemerintahan, serta budaya kerja birokrasi yang profesional dan ber-AKHLAK.	55.70	56.00	57.00	58.00	59.00	60.01	61.00	SETDAKO			
		Meningkatnya sistem regulasi	Indeks Reformasi Hukum	Kategori/ Poin	Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut: a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PPU yang berkualitas, dengan bobot 25%. c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PPU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%. d. Penataan database PPU, dengan bobot 15%. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori AA >90-100 = Istimewa. A >80-90 = Sangat baik. BB >70-80 = Baik. B >60-70 = Cukup Baik. CC >50-60 = Cukup	77.72	78.12	79.32	80.25	81.36	82.65	83.81	SETDAKO				
		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja bagi peningkatan pencapaian kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada penilaian SAKIP Kota	Poin	Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dari Kemenpan RB untuk Komponen Pelaporan Kinerja	Komponen pelaporan pada nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah laporan kinerja yang berisi ikhtisar capaian pelaksanaan rencana kerja, yang menjadi bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Komponen ini dinilai berdasarkan keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan, serta menjadi salah satu dari lima komponen utama evaluasi SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.	9.37	9.57	9.77	9.97	10.17	10.37	10.57	SETDAKO			
22	Sekretariat DPRK	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APMP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 61.1	B 62.7	B 65.5	B 67	B 68.3	BB 70	BB 75	SETWAN			
		Meningkatnya Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK	Persentase Peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK	Persen	((Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan / Jumlah rancangan Qanun dalam Prolegdal) x 100%) + ((Jumlah Keputusan DPRK/ Persetujuan Bersama yang ditetapkan / Jumlah Keputusan DPRK / Persetujuan Bersama yang direncanakan) x 100%) + ((Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu / Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang seharusnya disepakati) x 100%) + ((Jumlah rekomendasi DPRK yang dikirim kepada Wali Kota / Jumlah rekomendasi DPRK kepada Walikota yang direncanakan) x 100%) / 4	Peningkatan pelayanan terhadap DPRK merupakan tugas pokok sekretariat DPRK dalam memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK	100	100	100	100	100	100	100	SETWAN			
					Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan		11	12	11	10	10	10	12	SETWAN			
					Jumlah Rancangan Qanun dalam Prolegdal		11	12	11	10	10	10	12	SETWAN			
					Jumlah Keputusan DPRK / Persetujuan Bersama yang direncanakan		26	28	28	28	28	28	28	28	SETWAN		
					Jumlah Keputusan DPRK/ Persetujuan Bersama yang ditetapkan		26	28	28	28	28	28	28	28	SETWAN		
					Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang disepakati tepat waktu		5	5	5	5	5	5	5	5	SETWAN		
					Jumlah kebijakan perencanaan & anggaran yang seharusnya disepakati		5	5	5	5	5	5	5	5	SETWAN		
					Jumlah Rekomendasi DPRK yang dikirim kepada Walikota		1	1	1	1	1	1	1	1	SETWAN		
					Jumlah Rekomendasi DPRK kepada Walikota yang direncanakan		1	1	1	1	1	1	1	1	SETWAN		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 66.95	B 67.15	B 69.1	BB 70.15	BB 73.3	BB 75	BB 77.5	BAPPEDA		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Kota	Angka	Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setiap Tahunnya untuk Komponen Perencanaan Kinerja.	Komponen perencanaan kinerja dalam penilaian SAKIP memiliki bobot 30% dan dinilai berdasarkan dua subkomponen: keberadaan dan kualitas. Penilaian ini mengevaluasi ketersediaan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan pendek, serta menilai apakah dokumen tersebut menetapkan tujuan yang jelas, berorientasi hasil, terukur (SMART), menggunakan cascading, dan memperhatikan kinerja lintas bidang	22.37	23.00	23.25	23.50	24.00	25.25	25.50	BAPPEDA		
		Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kota	Angka	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kemenpan RB untuk komponen Pegukuran Kinerja	Komponen penilaian pengukuran kinerja pada SAKIP berfokus pada tiga aspek utama: keberadaan (bobot 20%), kualitas (bobot 30%), dan pemanfaatan (bobot 50%). Aspek ini menilai apakah tujuan, sasaran, dan indikator kinerja telah ditetapkan, dirumuskan, dan diukur dengan baik, serta sejauh mana hasilnya digunakan untuk pengendalian dan perbaikan kinerja organisasi	14.32	14.50	15.00	15.50	16.00	16.50	17.00	BAPPEDA		
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil riset	Persen	(Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan / Jumlah Semua Hasil Kajian) x 100	Pemanfaatan hasil riset adalah proses mengaplikasikan pengetahuan dari penelitian untuk berbagai tujuan, seperti meningkatkan kualitas pembangunan daerah, memecahkan masalah pembangunan, menghasilkan kebijakan, dan menciptakan inovasi baru. Tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pengembangan teknologi, peningkatan efisiensi produksi, atau pembuatan produk yang lebih berkualitas dan bernilai tambah.	66.67	75.00	83.33	87.50	90.00	91.67	92.86	BAPPEDA		
				Laporan	Jumlah Semua Hasil Kajian		3.00	4.00	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00	BAPPEDA		
				Laporan	Jumlah Kajian yang Dimanfaatkan		2.00	3.00	5.00	7.00	9.00	11.00	13.00	BAPPEDA		
		Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam mendukung pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Hasil Inovasi daerah	Persen	(Jumlah Inovasi yang Dipakai / Jumlah Inovasi yang Dihasilkan) x 100	bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan menumbuhkan daya saing daerah. Inovasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan publik (seperti aplikasi pelayanan online), mempercepat tata kelola pemerintahan (misalnya sistem manajemen kearsipan), serta meningkatkan perekonomian daerah dengan memberdayakan masyarakat dan UMKM melalui fasilitasi hasil riset dan inovasi.	68.42	72.73	76.00	78.57	80.65	82.35	83.78	BAPPEDA		
				Inovasi	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan		19	22	25	28	31	34	37	BAPPEDA		
				Inovasi	Jumlah Inovasi yang Dipakai		13	16	19	22	25	28	31	BAPPEDA		
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 64.85	B 66.15	B 66.25	B 66.5	B 66.75	B 67.5	B 68	BPKD		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah dan aset Daerah	Penetapan APBK tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan digunakan untuk menilai sejauhmana kepatuhan OPD dalam menyelesaikan penetapan APBK Tepat Waktu	Penetapan APBK tepat waktu, yaitu paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai (paling lambat 30 November). Indikator ini digunakan untuk menilai sejauhmana kepatuhan Pemda dalam menyelesaikan penetapan APBK Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKD		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah dan aset Daerah	Persentase Penyerapan Belanja Daerah	Persen	(Total Belanja Terealisasi / Total Anggaran Belanja) * 100%	Persentase penyerapan belanja daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Penyerapan belanja daerah yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sementara penyerapan yang tinggi menandakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah	96.31	95.56	98.67	96.98	97.14	96.57	96.64	BPKD		
				(Rp) M	Total Belanja Terealisasi		815.79	764.53	822.71	810.63	814.43	812.43	816.35	BPKD		
				(Rp) M	Total Anggaran Belanja		847.03	800.08	833.80	835.89	838.39	841.33	844.69	BPKD		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan daerah dan aset Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	(jumlah Aset dalam kondisi baik / Total Aset) x 100%	Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan digunakan untuk menilai jumlah aset dalam kondisi baik dibagi dengan total aset kemudian dikalikan 100%.	98.52	97.57	96.62	95.68	94.75	93.83	92.92	BPKD		
				Unit	Aset dalam kondisi baik		1,090,689.00	1,112,502.78	1,134,752.84	1,157,447.89	1,180,596.85	1,204,208.79	1,228,292.96	BPKD		
				Unit	Total Aset		1,107,051.00	1,140,262.53	1,174,470.41	1,209,704.52	1,245,995.65	1,283,375.52	1,321,876.79	BPKD		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Persen	(Realisasi PAD / Total Realisasi Pendapatan Daerah) x 100	Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase (%) dan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemandirian daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Ini dihitung dengan membandingkan total realisasi PAD dengan total realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, semakin mandiri daerah tersebut secara fiskal.	8.14	8.98	10.29	10.63	9.76	12.09	10.01	BPKD		
				Rp (M)	Realisasi PAD		64.52	72.34	70.00	72.11	75.34	100.15	77.13	BPKD		
				Rp (M)	Total Realisasi Pendapatan Daerah		792.39	805.26	679.98	678.65	771.75	828.40	770.85	BPKD		
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 62.75	B 62.85	B 63.5	B 64	B 64.5	B 65	B 65.5	BKPSDM		
		Meningkatnya kompetensi ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Persen	Hasil Verifikasi BKN Berdasarkan Riwayat Kompetensi, Bobot 40%	Dimensi kompetensi dalam Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN melalui data riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti, seperti diklat kepemimpinan, diklat teknis, seminar, atau workshop. Dimensi ini memiliki bobot terbesar, yaitu (40%) dari nilai total IPASN. Untuk meningkatkan nilai pada dimensi ini, ASN diwajibkan untuk terus mengikuti pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, minimal (20\%) jam pelajaran per tahun.	25.89	25.89	26.24	27	28.3	29	30.2	BKPSDM		
		Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	Indeks Merit Sistem	Indeks/Kategori	Hasil verifikasi KASN berdasarkan pada 8 aspek: 1. Perencanaan Kebutuhan bobot 20% 2. Pengadaan bobot 10% 3. Pengembangan Karier 25% 4. Promosi Mutasi bobot 10% 5. Manajemen Kinerja bobot 15% 6. Penghargaan, Penghargaan, disiplin bobot 10% 7. Perlindungan Pelayanan bobot 5% 8. Sistem Informasi bobot 5% Kategori Indeks Penerapan Sistem Merit ASN: i. Kategori I Buruk, nilai 100 - 174, indeks 0,2 - 0,4 ii. Kategori II Kurang, nilai 175 - 249, indeks 0,41 - 0,6 iii. Kategori III Baik, nilai 250	Indeks Sistem Merit adalah ukuran standar yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah menerapkan prinsip sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Indeks ini mengukur penerapan sistem merit berdasarkan delapan aspek, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi, dan kinerja, untuk menghasilkan ASN yang profesional dan berintegritas.	0.23	0.32	0.39	0.45	0.54	0.58	0.61	BKPSDM		
26	Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 67.65	B 68.2	B 68.3	B 68.4	B 68.5	B 68.6	B 68.7	INSPEKTORAT		
		Meningkatnya kualitas evaluasi akuntabilitas internal Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah dimensi evaluasi	Nilai	Hasil Penilaian Kemenpan	Penilaian terhadap dampak evaluasi internal dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi SAKIP	15.06	15.36	15.51	15.66	15.81	15.96	16.11	INSPEKTORAT		
		Meningkatnya pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP)	Persen	Hasil Penilaian KPK RI	Indikator yang mengukur sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan program pencegahan korupsi dan pengawasan, dinyatakan dalam skor atau persentase dengan mengukur delapan area kunci seperti perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan, untuk mendorong tata kelola yang lebih bersih dan transparan.	87.64	87.7	87.76	87.82	87.88	87.94	88.00	INSPEKTORAT		
		Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif dan ekonomis	Nilai Kapabilitas APIP	Level/ Point	Hasil Penilaian BPKP	Hasil penilaian tingkat kematangan dan kemampuan APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan suatu model, seperti Internal Audit Capability Model (IACM), yang mengukur tiga unsur utama: Kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan kualitas hasil pengawasan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik	Level 3 /3.0	Level 3 /3.2	Level 3 /3.2	Level 3 /3.2	Level 3 /3.5	Level 3 /3.5	Level 3 /3.5	INSPEKTORAT		
27	Kecamatan Banda Sakti	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 62.15	B 60.45	B 62.28	B 62.3	B 62.32	B 62.34	B 62.4	BANDA SAKTI		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau layanan lainnya, yang didasarkan pada survei dan pendapat masyarakat. IKM mengukur seberapa puas masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kecepatan, prosedur, biaya, dan kompetensi petugas. Tujuan utamanya adalah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang	90.00	90.00	90.40	90.82	90.87	91.26	92.82	BANDA SAKTI		

No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
28	Kecamatan Blang Mangat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	CC 59.45	B 60.15	B 60.2	B 60.3	B 60.35	B 60.4	B 60.42	BLANG MANGAT		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau layanan lainnya, yang didasarkan pada survei dan pendapat masyarakat. IKM mengukur seberapa puas masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kecepatan, prosedur, biaya, dan kompetensi petugas. Tujuan utamanya adalah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.	86.06	87.56	88.06	88.56	89.06	89.56	90.00	BLANG MANGAT		
29	Muara Satu	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	CC 59.3	B 60.15	B 60.25	B 60.4	B 60.6	B 60.8	B 61	MUARA SATU		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau layanan lainnya, yang didasarkan pada survei dan pendapat masyarakat. IKM mengukur seberapa puas masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kecepatan, prosedur, biaya, dan kompetensi petugas. Tujuan utamanya adalah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.	91	91.00	91.40	91.82	92.26	92.40	92.82	MUARA SATU		
30	Muara Dua	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	CC 59.75	B 60.45	B 60.6	B 60.8	B 61	B 61.2	B 61.4	MUARA DUA		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Survey tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau layanan lainnya, yang didasarkan pada survei dan pendapat masyarakat. IKM mengukur seberapa puas masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan seperti kecepatan, prosedur, biaya, dan kompetensi petugas. Tujuan utamanya adalah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.	88.81	90.00	90.40	90.82	90.87	91.26	92.82	MUARA DUA		
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.8	B 60.9	B 61	B 61.1	B 61.2	B 61.3	B 61.4	KESBANGPOL		
		Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	Jumlah konflik sosial yang diselesaikan/Jumlah konflik yang dilaporkan +100%	Persentase penyelesaian konflik sosial adalah indikator untuk mengukur keberhasilan penyelesaian konflik	0	50	100	100	100	100	100	KESBANGPOL		
					<i>Jumlah konflik sosial yang diselesaikan</i>			2	4	3	2	2	2	KESBANGPOL		
					<i>Jumlah konflik yang dilaporkan</i>			4	4	3	2	2	2	KESBANGPOL		
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 60.7	B 61.5	B 61.72	B 61.8	B 61.9	B 62	B 62.3	MPU		
		Meningkatnya penyebaran fatwa dan petunjuk	Persentase fatwa yang disosialisasikan		Jumlah fatwa yang disosialisasikan/jumlah fatwa keseluruhan	Keputusan atau panduan keagamaan yang bertujuan untuk memberikan pedoman hukum mengenai isu-isu kontemporer	92	63	86	90	92	94	96	MPU		
					<i>Jumlah fatwa yang disosialisasikan</i>		24	30	42	45	47	49	50	MPU		
					<i>Jumlah fatwa keseluruhan</i>		26	48	49	50	51	52	52	MPU		
33	Sekretariat Baitul Mal	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 61.85	B 61.8	B 61.95	B 62	B 62.05	B 62.1	B 62.15	BAITUL MAL		



No	Organisasi Perangkat Daerah	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan Formulasi	Defenisi Operasional	Baseline 2024	TARGET TAHUN						Sumber Data	Tren Target Kinerja	
								2025	2026	2027	2028	2029	2030		Column Chart	Line Chart
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		Meningkatnya pertumbuhan ZISWAF	Persentase Pertumbuhan ZISWAF		Jumlah ZIS yg dikumpulkan di Tahun N - Jumlah ZIS N-1/jumlah ZIS N-1 x 100	Upaya mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan masyarakat	8.47	11.39	11.56	12.51	12.68	13.95	15.24	BAITUL MAL		
					<i>Jumlah ZIS yg dikumpulkan di Tahun N - Jumlah ZIS N-1</i>		569,824,450.56	766,824,451	789,824,951	866,824,451	878,824,451	1,080,924,451	1,180,924,451	BAITUL MAL		
					<i>Jumlah ZIS N-1</i>		6,726,500,196.23	6729500196	6830500196	6929500196	6930500196	7749500196	7749500196	BAITUL MAL		
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP-OPD	Angka	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APJP Kota Lhokseumawe)	SAKIP adalah sebuah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja di instansi pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. SAKIP merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan akuntabilitas sektor publik.	B 61.1	B 61.35	B 61.45	B 61.65	B 61.85	B 62	B 62.2	DSI-PD		
		Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan masyarakat	Persentase Dayah dengan Tipe A	Persen	Jumlah Dayah Tipe A+ dan Tipe A dibagi dengan Total Keseluruhan Dayah dikali 100	Dayah Tipe A adalah klasifikasi untuk lembaga pendidikan tradisional Islam (dayah/pesantren) di Aceh yang memenuhi standar kualitas tertinggi di terungkap, memiliki legalitas resmi, kurikulum terstruktur (terkadang terintegrasi dengan sekolah formal), sarana-prasarana memadai, serta SDM pengajar yang kompeten, sebagai bagian dari sistem pembinaan mutu dayah oleh pemerintah Aceh melalui Badan Akreditasi Dayah (BADA) Aceh untuk memastikan pendidikan Islam berkualitas sesuai data dan peraturan yang ada	10	9.375	10.61	10.61	12.12	13.64	15.15	DSI-PD		
							6	6	7	7	8	9	10			
							60	64	66	66	66	66	66			
		Meningkatkan pemahaman Al Quran	Persentase melek Al-Quran	Persen	Dinas Syariat Islam Aceh	Melek Al-Qur'an" adalah istilah yang merujuk pada upaya untuk menjadi melek huruf dan melek pemahaman terhadap Al-Qur'an, termasuk kemampuannya membaca dengan benar, memahami isinya, dan mengamalkannya. Ini adalah gerakan literasi untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an, baik bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Qur'an (misalnya, menggunakan iqra) maupun bagi mereka yang ingin memperdalam pemahaman maknanya	84.56	84.9	85.41	86.26	87.12	87.99	88.87	DSI-PD		

**METADATA PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026-2030**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>												MPD	
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (62.55)	B 62.7	B 62.9	B 63.1	B 63.4	B 63.7	B 64	B 64	MPD
1	01	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Daerah/ Jumlah Target Rekomendasi*100	Persen	0	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	MPD
					Var	<i>Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Majelis Pendidikan Daerah</i>	Rekomendasi	0	2	2	2	3	3	3	15	MPD
					Var	<i>Jumlah Rekomendasi yang ditargetkan</i>	Rekomendasi	0	2	2	2	3	3	3	15	MPD
1	01		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>													PK
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	65.60 B	B 66.3	B 66.32	B 66.35	B 66.37	B 66.4	B 66.43	B 66.43	PK
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 Tahun	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan dikali 100	Angka	90.63	93.18	95.73	98.28	100.00	100.00	100.00	100.00	PK
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 Tahun	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan dibagi jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan dikali 100	Angka	98.95	99.00	99.05	99.10	99.15	99.20	99.25	99.25	PK
					Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 Tahun Kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dikali 100	Angka	41.35	51.08	57.57	64.06	70.55	71.32	72.08	72.08	PK
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah Satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal/Total Keseluruhan satuan pendidikan*100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	PK
					Var	<i>Jumlah Satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal</i>	Satuan Pendidikan	109	109	109	109	109	109	109	109	PK
					Var	<i>Total Keseluruhan satuan pendidikan</i>	Satuan Pendidikan	109	109	109	109	109	109	109	109	PK
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1. Indeks Pemerataan Guru	Nilai pada Rapor Pendidikan	Nilai	0.55	0.57	0.60	0.63	0.65	0.67	0.70	0.70	PK
					2. Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik/jumlah guru keseluruhan *100%	Persen	29.74	29.96	30.16	30.34	30.56	30.78	31.00	31.00	PK
					Var	<i>Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik</i>		1353	1363	1372	1380	1390	1400	1410	1410	PK
					Var	<i>jumlah guru keseluruhan</i>		4549	4549	4549	4549	4549	4549	4549	4549	PK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030			
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Jumlah sekolah swasta yang memperoleh Izin/Jumlah sekolah swasta mengajukan Izin *100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	PK
					Var	Jumlah sekolah swasta yang memperoleh Izin		7	7	8	9	9	9	9	PK
					Var	Jumlah sekolah swasta mengajukan		7	7	8	9	9	9	9	PK
<b>1</b>	<b>01</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>												<b>DSI-PD</b>
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Meningkatnya jumlah dayah yang bertipe A	Persentase Dayah dengan Type A	Jumlah Dayah Tipe A / Jumlah Dayah keseluruhan * 100	Persen	10.00	9.38	10.61	10.61	12.12	13.64	15.15	DSI-PD
					Var	Jumlah Dayah Tipe A	Dayah	6	6	7	7	8	9	10	DSI-PD
					Var	Jumlah Dayah keseluruhan	Dayah	60	64	66	66	66	66	66	DSI-PD
<b>1</b>	<b>02</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>												<b>DINKES</b>
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya alcutabilitasi penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B 66.2	B 66.75	B 68.94	B 68.95	B 68.96	B 68.97	B 68.98	DINKES
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Rasio Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu = Jumlah Kematian Ibu /Jumlah Kelahiran Hidup x 100.000	Angka	27.96	130	109	97	86	77	77	DINKES
					2. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek Pada Balita	Hasil Survey SGGI Kemenkes RI	Persen	20.8	18.8	17.5	16.3	15.2	14.2	13.34	DINKES
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1. Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	(Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP+Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu+Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing)/3	Persen	54.00	66.13	77.05	78.89	81.02	83.33	87.19	DINKES
					2. Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP / Jumlah nakes di fasyankes pemerintah x 100%	Persen	74.03	75.25	78.46	81.77	85.58	89.70	98.44	DINKES
					Var	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	orang	972	988	1038	1090	1145	1202	1322	DINKES
					Var	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah	orang	1313	1313	1323	1333	1338	1340	1343	DINKES
					3. Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu / Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK x 100%	Persen	87.50	72.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
					Var	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	orang	45	65	70	70	75	75	75	DINKES
					Var	Jumlah nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK	orang	62	65	70	70	75	75	75	DINKES
					4. Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing	Jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang dilakukan kredensialing / jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang akan dilakukan kredensialing x 100%	Persen	0.00	50.57	52.68	54.91	57.47	60.30	63.14	DINKES

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Var	Jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang dilakukan kredensialing	orang		664	697	732	769	808	848	848	DINKES		
			Var	jumlah nakes (dokter, drg, bidan, perawat) fasyankes yang akan dilakukan kredensialing	orang		1313	1323	1333	1338	1340	1343	1343	DINKES		
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	((Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan x 40%) + jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT / Jumlah PIRT yang mengajukan x 30% + jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi / jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi x 20%) + (jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat / jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market x 10%) / 4	Persen	79.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINKES
				Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi / Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan x 40%	Persen		40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	DINKES	
			Var	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatkan rekomendasi			30	32	32	33	33	34	34	DINKES		
			Var	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengajukan			30	32	32	33	33	34	34	DINKES		
				Jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT / Jumlah PIRT yang mengajukan x 30%	Persen		30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	DINKES	
			Var	jumlah PIRT yang mendapatkan sertifikat PIRT / jumlah PIRT yang mengajukan			104	104	105	105	110	110	110	DINKES		
			Var	Jumlah PIRT yang mengajukan			104	104	105	105	110	110	110	DINKES		
				Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi / jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi x 20%	Persen		20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	DINKES	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Var	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapatkan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi			25	25	30	30	35	35	35	DINKES		
			Var	jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mengajukan Sertifikat Penyuluhan (HSM) dalam pemenuhan mendapatkan Srtifikast Laik Higiene Sanitasi			25	25	30	30	35	35	35	DINKES		
				Jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market yang memenuhi syarat / jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market x 10%	Persen		10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	DINKES		
			Var	Jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaaan post market yang memenuhi syarat			120	120	120	120	120	120	120	DINKES		
			Var	Jumlah produk makanan minuman IRT yang dilakukan pemeriksaan post market			120	120	120	120	120	120	120	DINKES		
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	(Jumlah Desa Siaga kategori mandiri / jumlah desa yang ada x 30%) + (jumlah RT yang ber PHBS / Jumlah RT yang dibina x 40%) + (jumlah posyandu strata purnama mandiri / jumlah posyandu yang ada x 30%)	Persen	75.10	75.10	78.10	83.50	87.10	94.00	100.00	100.00	DINKES
<b>1</b>	<b>03</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>												<b>PUPR</b>	
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (66.05)	B (66,90)	B (67,20)	B (68,10)	B (68,90)	BB (70,15)	BB (70,55)	BB (70,55)	PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Jumlah luasan daerah rawan banjir yang ditangani dibanding luas daerah rawan banjir keseluruhan x 100	Persen	1.53	6.53	11.53	16.53	21.53	26.53	31.53	31.53	PUPR
					Var	Jumlah luasan daerah rawan banjir yang ditangani	Ha	0.31	1.32	2.34	3.35	4.37	5.38	6.40	6.40	PUPR
					Var	luas daerah rawan banjir keseluruhan	Ha	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	20.29	PUPR
						2. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persen	0.00	0.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	PUPR
					Var	Luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dioperasikan dan dipelihara (Ha)	Ha	0.00	0.00	180.21	210.25	240.28	270.32	300.35	300.35	PUPR
					Var	Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/ Kota (Ha)	Ha	600.70	600.70	600.70	600.70	600.70	600.70	600.70	600.70	PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	Persentase kapasitas yang terlayani Tahun (n) - Persentase kapasitas yang terlayani Tahun (n-1)/Persentase kapasitas yang terlayani Tahun (n-1) x 100	Persen	3.98	4.77	4.83	4.90	4.92	4.94	4.97	4.97	PUPR
						Persentase jumlah rumah tangga berakses air minum melalui SPAM jaringan pipa dan bukan jaringan pipa dihitung berdasarkan Jumlah berakses air minum melalui SPAM ditambah dengan jaringan pipa bukan jaringan perpipaan dibanding dengan Jumlah total rumah tangga	Persen	16.43	17.21	18.04	18.93	19.91	20.94	22.04	22.04	PUPR
					Var	PDAM Ie Beusare Rata	RT	2241	2243	2416	2923	3485	4085	4725	4725	PUPR
					Var	PDAM Tirta Mon Pase	RT	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	4909	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Var	PAMSIMAS	RT	49	0	0	0	0	0	0	0	0	PUPR	
			Var	Sumur Dalam terindungi perpipaan (DAK)	RT	410	900	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	PUPR	
			Var	Jumlah total rumah tangga	RT	46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164	49164	PUPR		
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (AirLimbah Domestik Layak dan Aman)	Persentase RT dengan Sanitasi Aman dan layak Tahun (n) - Persentase RT dengan Sanitasi Aman dan layak Tahun (n-1)/Tahun (n-1) x 100	Persen	3.70	0.00	0.20	0.77	1.01	1.24	1.26	PUPR	
							93.71	93.71	93.89	94.61	95.57	96.75	97.97	97.97		
							<b>Air Limbah Domestik Layak</b>	<b>84.28</b>	<b>84.28</b>	<b>84.44</b>	<b>84.61</b>	<b>84.78</b>	<b>84.95</b>	<b>85.11</b>	<b>85.11</b>	PUPR
			Var	Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak	RT	39033	39423	39896	40375	40860	41350	41846	41846	41846	PUPR	
			Var	Jumlah total keseluruhan rumah tangga	RT	46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164	49164	49164	PUPR	
							<b>Air Limbah Domestik Aman</b>	<b>9.43</b>	<b>9.43</b>	<b>9.45</b>	<b>10.00</b>	<b>10.79</b>	<b>11.81</b>	<b>12.86</b>	<b>12.86</b>	PUPR
			Var	Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi aman	RT	4367	4411	4464	4772	5201	5747	6322	6322	6322	PUPR	
			Var	Jumlah total keseluruhan rumah tangga	RT	46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164	49164	49164	PUPR	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase drainase dalam kondisi baik dihitung berdasarkan Panjang drainase dalam kondisi baik dibanding dengan Panjang total drainase dikali 100	Persen	74.93	75.45	76.02	76.63	77.28	77.97	78.69	78.69	PUPR
			Var	Panjang drainase dalam kondisi baik	Km	98.502	101.457	104.501	107.636	110.865	114.191	117.617	117.617	117.617	PUPR	
			Var	Panjang total drainase	Km	131.462	134.462	137.462	140.462	143.462	146.462	149.462	149.462	149.462	PUPR	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persentase Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak dibanding Jumlah total keseluruhan rumah tangga x 100	Persen	84.28	84.28	84.44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	PUPR
			Var	Jumlah rumah tangga yang sudah berakses sanitasi layak	RT	39033	39423	39896	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	PUPR	
			Var	Jumlah total keseluruhan rumah tangga	RT	46315	46778	47246	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	PUPR	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik dihitung berdasarkan Jumlah bangunan gedung dalam kondisi tidak baik yang ditangani per tahun dibanding dengan Jumlah total bangunan yang ditangani PUPR dikalikan kenaikan 3%	Persen	50	66.67	66.67	71.67	76.67	81.67	86.67	86.67	PUPR
			Var	Jumlah bangunan gedung dalam kondisi tidak baik yang ditangani	Unit	3	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	PUPR	
			Var	Jumlah total bangunan keseluruhan yang ditangani PUPR	Unit	6	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	PUPR	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kernantapan Jalan	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dihitung berdasarkan Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap dibanding dengan Panjang jalan keseluruhan yang ada dalam periode tertentu	Persen	64.40	59.54	61.54	64.54	66.54	69.54	71.54	71.54	PUPR
			Var	Jumlah Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	Km	265.62	203.98	210.83	221.11	227.96	238.24	245.09	245.09	245.09	PUPR	
			Var	Jumlah Panjang Keseluruhan	Km	412.47	342.61	342.61	342.61	342.61	342.61	342.61	342.61	342.61	PUPR	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Kompetensi Tenaga	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Rata-rata dari Persentase jumlah pekerja kualifikasi ahli konstruksi bidang Perumahan dan Permukiman dibanding dengan Total Keseluruhan pekerja konstruksi dengan Persentase Total pekerja kualifikasi ahli konstruksi bidang Cipta Karya dibanding dengan Total pekerja konstruksi	Persen	32.31	32.31	32.31	35.38	35.38	35.38	38.46	38.46	PUPR



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030		
							Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Persentase jumlah pekerja kualifikasi ahli konstruksi bidang Perumahan dan Permukiman dibanding dengan Total Keseluruhan pekerja konstruksi	Persen	32.31	32.31	32.31	35.38	35.38	35.38	38.46	38.46	PUPR
			Var	Jumlah Pekerja Kualifikasi Ahli	Orang	21	21	21	23	23	23	25	25	PUPR
			Var	Total Keseluruhan pekerja konstruksi	Orang	65	65	65	65	65	65	65	65	PUPR
				Persentase Total pekerja kualifikasi ahli konstruksi bidang Cipta Karya dibanding dengan Total pekerja konstruksi		32.31	32.31	32.31	35.38	35.38	35.38	38.46	38.46	PUPR
			Var	Jumlah Pekerja Kualifikasi Ahli Konstruksi	Orang	21	21	21	23	23	23	25	25	PUPR
			Var	Total Keseluruhan pekerja konstruksi	Orang	65	65	65	65	65	65	65	65	PUPR
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	52.11	57.67	62.08	65.66	68.62	71.11	73.24	73.24	PUPR
			Var	Jumlah KKPR Patuh	KKPR	198	248	298	348	398	448	498	498	PUPR
			Var	Jumlah KKPR yang Terbit	KKPR	380	430	480	530	580	630	680	680	PUPR
1	04		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>											<b>PUPR</b>
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0.00	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.25	PUPR
			Var	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	KK	0.00	0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.25	PUPR
			Var	Jumlah warga negara korban bencana	KK	20	20	20	20	20	20	20	20	PUPR
				2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni		0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	75.00	100.00	100.00	PUPR
			Var	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	KK	0.00	0.00	300	300	600	900	1200	1200	PUPR
			Var	Jumlah warga negara korban bencana	KK	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	PUPR
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	18.20	18.24	18.27	18.29	18.32	18.35	18.37	18.37	PUPR
			Var	Jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani	Unit	8430	8530	8630	8730	8830	8930	9030	9030	PUPR
			Var	Jumlah keseluruhan rumah tangga	RT	46315	46778	47246	47718	48196	48678	49164	49164	PUPR
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase Peningkatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	0.321	0.324	0.328	0.331	0.334	0.338	0.341	0.341	PUPR
			Var	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh yang Ditangani	Ha	42.67	43.11	43.55	44.00	44.46	44.91	45.38	45.38	PUPR
			Var	Total Luas Wilayah Permukiman	Ha	13297.36	13297.36	13297.36	13297.36	13297.36	13297.36	13297.36	13297.36	PUPR
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	64.40	65.06	65.73	66.41	67.09	67.79	68.48	68.48	PUPR
			Var	Luas PSU perumahan yang layak	Ha	964.90	974.84	984.88	995.02	1005.27	1015.63	1026.09	1026.09	PUPR
			Var	Total Luas PSU perumahan	Ha	1498.29	1498.29	1498.29	1498.29	1498.29	1498.29	1498.29	1498.29	PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	05		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>												BPBD	
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (60.80)	B (62,00)	B (62,50)	B (62,80)	B (63,10)	B (63,30)	B (63,80)	B (63,80)	BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi	jumlah individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan kebakaran/jumlah target individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan bencana x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
					Var	jumlah individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan kebakaran	juwa	50	50	50	50	50	50	50	50	BPBD
					Var	jumlah target individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan bencana	juwa	50	50	50	50	50	50	50	50	BPBD
				Meningkatnya penanganan bencana pada saattanggap	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi/jumlah kejadian bencana yang terjadi x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
					Var	Jumlah kejadian bencana yang ditanggulangi	kejadian	22	20	18	16	14	12	10	8	BPBD
					Var	jumlah kejadian bencana yang terjadi	kejadian	22	20	18	16	14	12	10	8	BPBD
				Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	jumlah penanganan pasca bencana/jumlah kejadian bencana yang ditetapkan kepala daerah*100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
					Var	jumlah penanganan pasca bencana	kejadian	22	20	18	16	14	12	10	8	BPBD
					Var	jumlah kejadian bencana yang ditetapkan kepala daerah	kejadian	22	20	18	16	14	12	10	8	BPBD
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan	jumlah individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan kebakaran/jumlah target individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan bencana x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
					Var	jumlah individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan kebakaran	juwa	50	50	50	50	50	50	50	50	BPBD
					Var	jumlah target individu yang mendapat layanan informasi dan edukasi rawan bencana	juwa	50	50	50	50	50	50	50	50	BPBD
				Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Jumlah korban kebakaran yang ditanggulangi/ Total jumlah korban kebakaran yang terjadi x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	BPBD
					Var	Jumlah korban kebakaran yang ditanggulangi	juwa	100	80	70	60	50	40	30	20	BPBD
					Var	Total jumlah korban kebakaran yang terjadi	juwa	100	80	70	60	50	40	30	20	BPBD
1	05		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>													SATPOL PP WH
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	61.75 B	62.70 B	63.00 B	63.20 B	63.51 B	63.82 B	64.10 B	64.10 B	SATPOL PP WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan/Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi x100	Persen	57.14	95.71	95.77	98.59	97.22	97.26	97.30	97.30	SATPOL PP WH
					Var	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Perda/Perkada	40	67	68	70	70	71	72	72	SATPOL PP WH
					Var	Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Perda/Perkada	70	70	71	71	72	73	74	74	SATPOL PP WH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030			
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/Jumlah keseluruhan gangguan trantibum x 100	Persen	66.40%	66.67	90.00	100	100	100	100	100	SATPOL PP WH
				Var	<i>Jumlah gangguan trantibum yang ditangani</i>	gangguan		4	9	5	5	5	5	5	SATPOL PP WH
				Var	<i>Jumlah keseluruhan gangguan trantibum</i>	gangguan		6	10	5	5	5	5	5	SATPOL PP WH
			Meningkatnya perlindungan terhadap	Persentase Cakupan Perlindungan	Jumlah Satinmas gampong dibagi jumlah total Stinmas x 100	Persen	17.25	17.26	17.28	17.30	17.33	17.35	17.35	17.35	SATPOL PP WH
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya dibagi total jumlah PPNS x 100	Persen	20.00	50.00	50.00	55.56	66.67	80.00	100.00	100.00	SATPOL PP WH
				Var	<i>Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	Orang	1	4	4	5	6	8	10	10	SATPOL PP WH
				Var	<i>total jumlah PPNS</i>		5	8	8	9	9	10	10	10	SATPOL PP WH
<b>1</b>	<b>06</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>												<b>DINSOS</b>
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (64.65)	B (66.15)	B (66.45)	B (66.60)	B (66.65)	B (66.67)	B (66.70)	DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1. Persen tase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	Jumlah Pekerja Sosial/tenaga Kesejahteraan Sosial yang melayani diluar panti / Jumlah Pekerja Sosial/tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Terdata * 100	Persen	70%	79,66%	79,66%	79,66%	79,66%	79,66%	79,66%	DINSOS
				Var	<i>Jumlah Pekerja Sosial/tenaga Kesejahteraan Sosial yang melayani diluar panti</i>	orang		47	47	47	47	47	47	47	DINSOS
				Var	<i>Jumlah Pekerja Sosial/tenaga Kesejahteraan Sosial Yang Terdata</i>	orang		59	59	59	59	59	59	59	DINSOS
					2. Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA	Jumlah Pekerja Sosial yang Melayani PPKS Non-HIV/ NAPZA di Luar Panti /jumlah Pekerja Sosial yang terdata *100	Persen	70%	79.66	79.66	79.66	79.66	79.66	79.66	DINSOS
				Var	Jumlah Pekerja Sosial yang Melayani PPKS Non-HIV	Orang		47	47	47	47	47	47	47	DINSOS
				Var	jumlah Pekerja Sosial yang terdata	Orang		59	59	59	59	59	59	59	DINSOS
					3. Presentase pekerja sosial/Tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan yang Menangani Bencana Sesuai Standar / Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan yang tersedia *100	Persen	70	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	DINSOS
				Var	<i>Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan yang Menangani Bencana Sesuai Standar</i>	Orang		8	8	8	8	8	8	8	DINSOS
				Var	<i>Jumlah Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan yang tersedia</i>	Orang		10	10	10	10	10	10	10	DINSOS
					4. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensi dalam Pelayanan Sosial	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensi Meningkatkan / Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Yang Terdata *100	Persen	55.00	59.32	59.32	59.32	59.32	59.32	59.32	DINSOS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030			
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			Var	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang Kompetensinya Meningkat	Orang		35	35	35	35	35	35	35	DINSOS	
			Var	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial Yang Terdata	Orang		59	59	59	59	59	59	59	DINSOS	
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Penyandang Disabilitas yang tertangani / Jumlah Penyandang Disabilitas yang terdata * 100%	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	DINSOS
			Var	Jumlah Penyandang Disabilitas yang tertangani	Orang		40	40	40	40	40	40	40	DINSOS	
			Var	Jumlah Penyandang Disabilitas yang terdata	Orang		50	50	50	50	50	50	50	DINSOS	
					2. Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani / Jumlah Anak Terlantar yang terdata * 100%	Persen	79.59	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	DINSOS
			Var	Jumlah Anak Terlantar yang tertangani	Orang		40	40	40	40	40	40	40	DINSOS	
			Var	Jumlah Anak Terlantar yang terdata	Orang		50	50	50	50	50	50	50	DINSOS	
					3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang tertangani / Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terdata * 100%	Persen	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	DINSOS
			Var	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang tertangani	Orang		40	40	40	40	40	40	40	DINSOS	
			Var	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang terdata	Orang		50	50	50	50	50	50	50	DINSOS	
					4. Presentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang tertangani / Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terdata * 100%	Persen	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	DINSOS
			Var	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang tertangani	Orang		0	0	12	12	12	12	12	DINSOS	
			Var	Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terdata	Orang		0	0	20	20	20	20	20	DINSOS	
					5. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhannya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang tertangani / Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terdata * 100%	Persen	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	DINSOS
			Var	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV	Orang		0	8	8	8	8	8	8	DINSOS	
			Var	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terdata	Orang		0	10	10	10	10	10	10	DINSOS	
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Jumlah Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhannya / Jumlah Penerima Manfaat yang di Evaluasi *100	Persen	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	DINSOS
			Var	Jumlah Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhannya	Orang		0	15	15	15	15	15	15	DINSOS	
			Var	Jumlah Penerima Manfaat yang di Evaluasi	Orang		0	30	30	30	30	30	30	DINSOS	
					2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Jumlah Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian Ekonomi / Jumlah total Penerima Manfaat *100	Persen	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	DINSOS
			Var	Jumlah Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian Ekonomi	Orang		0	15	15	15	15	15	15	DINSOS	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Var	Jumlah Tota Penerima Manfaat	Orang	0	30	30	30	30	30	30	30	DINSOS		
			3. Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	Jumlah Gampong yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan Fakir Miskin / Total Gampong yang ada dalam wilayah Kota Lhokseumawe *100	Persen	0.00	79.41	79.41	79.41	79.41	79.41	79.41	79.41	DINSOS		
			Var	Jumlah Gampong yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan Fakir Miskin	Gampong	0	54	54	54	54	54	54	54	DINSOS		
			Var	Total Gampong yang ada dalam wilayah Kota Lhokseumawe	Gampong	0	68	68	68	68	68	68	68	DINSOS		
			4. Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang Tergraduasi dari Kemiskinan / Total Penerima Penerima Sosial *100	Persen	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	DINSOS		
			Var	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	270	270	270	270	270	270	270	270	DINSOS		
			Var	Total Penerima Bantuan Sosial PKH	Keluarga	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	DINSOS		
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun / Jumlah korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun * 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DINSOS	
			Var	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Orang	60	60	60	60	60	60	60	60	DINSOS		
			Var	Jumlah korban bencana yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun	Orang	60	60	60	60	60	60	60	60	DINSOS		
			3. Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial /Jumlah Korban Bencana yang seharusnya mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial *100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS		
			Var	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Orang	60	60	60	60	60	60	60	60	DINSOS		
			Var	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Orang	60	60	60	60	60	60	60	60	DINSOS		
1	06	07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	PersentaseTaman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	Jumlah TMP yang dikelola/Jumlah TMP yang terdata*100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	DINSOS	
			Var	Jumlah TMP yang dikelola	TMP	1	1	1	1	1	1	1	1	DINSOS		
			Var	Jumlah TMP yang terdata	TMP	1	1	1	1	1	1	1	1	DINSOS		
2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
2	07		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>											<b>DPMTSP NAKER</b>		
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (68,20)	B (68,85)	B (69,95)	B (69,05)	B (69,15)	B (69,20)	B (69,25)	B (69,25)	DPMTSP NAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030					
							Target	Target	Target	Target	Target	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja/Jumlah Seluruh Perusahaan yang Melaporkan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja *100	Persen	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	DPMTSP NAKER	
					Var	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	Perusahaan	0	1	0	1	1	1	1	1	DPMTSP NAKER	
					Var	Jumlah Seluruh Perusahaan yang Melaporkan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja	Perusahaan	0	2	0	2	2	2	2	2	DPMTSP NAKER	
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	Jumlah Peserta yang Dilatih / Jumlah Calon Peserta yang Mendaftar Pelatihan * 100	Persen	15.50	85.71	86.49	87.50	87.50	87.80	88.10	88.10	DPMTSP NAKER	
					Var	Jumlah Peserta yang Dilatih	Orang		30	32	35	35	36	37	37	DPMTSP NAKER	
					Var	Jumlah Calon Peserta yang Mendaftar Pelatihan	Orang		35	37	40	40	41	42	42	DPMTSP NAKER	
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan / Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar * 100	Persen	8.91	10.00	10.03	11.11	12.74	12.80	13.36	13.36	DPMTSP NAKER	
					Var	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan	Orang	23	30	35	45	60	70	85	85	DPMTSP NAKER	
					Var	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar	Orang	258	300	349	405	471	547	636	636	DPMTSP NAKER	
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Total Pekerja yang Terpenuhi Hak-Hak Pekerja pada Tahun n	Orang	200	200	200	300	400	400	450	450	DPMTSP NAKER	
<b>2</b>	<b>08</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>													<b>DP3AP2 KB</b>	
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (65.50)	B (66.20)	B (68,50)	B (68,51)	B (68,52)	B (68,53)	B (68,54)	B (68,54)	DP3AP2 KB	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Jumlah anggaran belanja yang dilakukan proses analisis gender/ Jumlah anggaran belanja keseluruhan X 100	Persen	3.06	3.2	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	3.9	DP3AP2 KB	
					Var	Jumlah anggaran belanja yang dilakukan proses analisis gender	Rp. (Milyar)		27	30.00	32.00	33.50	35.50	38.30	38.30	DP3AP2 KB	
					Var	Jumlah anggaran belanja keseluruhan	Rp. (Milyar)		833	855.00	888.00	900.00	930.00	980.00	980.00	DP3AP2 KB	
						2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Hasil perhitungan BPS	Persen	50.25	50.27	50.30	50.32	50.38	50.40	50.42	50.42	DP3AP2 KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif /Jumlah total perempuan korban kekerasan * 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DP3AP2 KB	
					Var	Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	Orang	17	17	14	14	14	14	14	14	DP3AP2 KB	
					Var	Jumlah total perempuan korban kekerasan	Orang	17	17	14	14	14	14	14	14	DP3AP2 KB	
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Jumlah peserta yang memahami kualitas layanan yang diberikan dalam program pembelajaran keluarga (kesehatan, pendidikan dan perlindungan)/jumlah peserta yang mengikuti program pembelajaran keluarga baik perempuan dan laki-laki*100	Persen	60.00	65.38	65.63	65.79	66.67	69.39	72.22	72.22	DP3AP2 KB	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Var	Jumlah peserta yang memahami kualitas layanan yang diberikan dalam program pembelajaran keluarga (kesehatan, pendidikan dan perlindungan)	Orang	15	17	21	25	28	34	39	39	DP3AP2 KB		
			Var	Jumlah peserta yang mengikuti program pembelajaran keluarga baik perempuan dan laki-laki	Orang	25	26	32	38	42	49	54	54	DP3AP2 KB		
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	Jumlah Perangkat Daerah memanfaatkan data SIGA / jumlah perangkat daerah seluruhnya X 100	Persen	29.41	35.29	44.12	52.94	58.82	61.76	64.71	64.71	DP3AP2 KB
			Var	Jumlah Perangkat Daerah memanfaatkan data SIGA	PD	10.00	12	15	18	20	21	22	22	DP3AP2 KB		
			Var	jumlah perangkat daerah seluruhnya	PD	34.00	34	34	34	34	34	34	34	DP3AP2 KB		
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Kementerian PPA	Nilai	65.62	65.80	65,95	66,20	66,35	66,50	66,90	66,90	DP3AP2 KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	(Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif/ Jumlah total anak Korban kekerasan) x 100	Persen	67.50	70.00	71.43	73.33	79.07	80.00	80.00	80.00	DP3AP2 KB
			Var	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	orang	27	28	30	33	34	32	32	32	DP3AP2 KB		
			Var	Jumlah total anak Korban kekerasan	orang	40	40	42	45	43	40	40	40	DP3AP2 KB		
				2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Kementerian PPA	Nilai	77.19	77.50	77.90	78.00	78.10	78.20	78.25	78.25	DP3AP2 KB	
<b>2</b>	<b>09</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>												<b>DKPPP</b>	
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B / 63.65	B /63.60	B / 64.50	B / 65.00	B / 65.50	B / 66.00	B / 66.65	B / 66.65	DKPPP
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Data hasil Susenas diolah dengan Aplikasi Harmonisasi PPH Susenas, Dihitung berdasarkan standar AKE sebesar 2100 kkal/Kap/Hari dan AKP 57 Gr/kap/Hari	Angka	77.54	77.80	78.00	78.40	78.95	79.00	79.25	79.25	DKPPP
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Jumlah desa dan/atau kelurahan rentan rawan pangan dibagi Jumlah total desa dan/atau kelurahan di kota/kabupaten x 100	Persen	33.82	22.05	20.58	17.64	16.17	13.23	10.29	10.29	DKPPP
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu pangan dan keamanan pangan dihitung berdasarkan capaian kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan post market (pengambilan contoh dan pengujian) dengan bobot sebesar 60% dan pre market (registrasi/sertifikasi/surveilan) sebesar 40%	Persen	80.00%	80.00%	86.00%	90.00%	93.33%	94.29%	100.00%	100.00%	DKPPP
<b>2</b>	<b>10</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>												<b>PERTANAHAN</b>	
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (61.25)	B (61.65)	B (61.86)	B (62.17)	B (62.48)	B (62.79)	B (63,11)	B (63,11)	PERTANAHAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030					
							Target	Target	Target	Target	Target	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Meningkatnya kejelasan hak- hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat mi skin	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	Jumlah hak- hak atas tanah bagi pemerintah dibandingkan dengan Jumlah Keseluruhan Hak Atas Tanah Pemerintah x 100	Persen	3.53	3.70	3.89	4.08	4.29	4.50	4.73	4.73	PERTANAHAN	
					Var	Jumlah hak- hak atas tanah bagi pemerintah dibandingkan	m <sup>2</sup>	6,703,841	7,039,033.05	7,390,985	7,760,534	8,148,561	8,555,989	8,555,989		PERTANAHAN	
					Var	Jumlah Keseluruhan Hak Atas Tanah Pemerintah	m <sup>2</sup>	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000		PERTANAHAN
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah	Jumlah sertifikat hak milik atas tanah dibandingkan dengan hak milik atas tanah yang belum disertifikasi x 100	Persen	27.34	28.70	30.14	31.65	33.23	34.89	36.63	36.63	PERTANAHAN	
					Var	Jumlah sertifikat hak milik atas tanah	m <sup>2</sup>	51,971,847	54,570,439.35	57,298,961	60,163,909	63,172,105	66,330,710	66,330,710		PERTANAHAN	
					Var	Jumlah hak milik atas tanah yang belum disertifikasi	m <sup>2</sup>	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000	181,060,000		PERTANAHAN
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanian	Persentase SDM Bidang Pertanian yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanian dibandingkan dengan total SDM bidang Pertanian x 100	Persen	43.86	52.63	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	59.65	PERTANAHAN	
					Var	Jumlah kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanian	Orang	60	68	68	68	68	68	68	68		PERTANAHAN
					Var	total SDM bidang Pertanian	Orang	114	114	114	114	114	114	114	114		PERTANAHAN
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Meningkatnya tata kelola pertanian di wilayah pesisir, laut dan pulau	Persentase Pertanian di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	Jumlah pengelolaan pertanian di wilayah pesisir, laut dibanding dengan total luas wilayah pertanian di wilayah pesisir, laut x 100	Persen	54.17%	58.33	61.25	61.74	62.33	63.03	63.81	63.81	PERTANAHAN	
					Var	Jumlah pengelolaan pertanian di wilayah pesisir, laut	Ha	14	15	15	16	17	18	18	18		PERTANAHAN
					Var	total luas wilayah pertanian di wilayah pesisir, laut	Ha	24	24	25	26	27	28	28	28		PERTANAHAN
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanian	Persentase Informasi Pertanian yang Dimanfaatkan	Jumlah pengelolaan sistem informasi manajemen pertanian dibandingkan dengan total pengelolaan sistem informasi manajemen pertanian x 100	Persen	0	0	0	0	0	0	0	0	PERTANAHAN	
					Var	Jumlah pengelolaan sistem informasi manajemen pertanian	aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0		PERTANAHAN
					Var	total pengelolaan sistem informasi manajemen pertanian	aplikasi	0	0	0	0	0	0	0	0		PERTANAHAN
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanian	Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanian	Jumlah penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanian (kasus) dibandingkan dengan total konflik, sengketa, dan perkara pertanian (kasus) x 100	Persen	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	66.67	66.67	66.67	PERTANAHAN	
					Var	Jumlah penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanian (kasus)	kasus	3	3	3	3	3	4	4	4		PERTANAHAN
					Var	total konflik, sengketa, dan perkara pertanian (kasus)	kasus	5	5	5	5	5	6	6	6		PERTANAHAN
<b>2</b>	<b>11</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>													<b>DLH</b>	
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	B (62.90)	CC (58.05)	B (63.10)	B (63.30)	B (63.40)	B (63.50)	B (63.80)	B (63.80)	DLH	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup yang ada dibandingkan dengan total dokumen pengelolaan pengendalian lingkungan hidup seharusnya ada*100	Persen	0.00%	2.00%	1.00%	1.00%	2.00%	1.00%	1.00%	1.00%	DLH	
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air	Kementerian Lingkungan Hidup	Indeks	70.00	71.00	71.20	71.45	71.60	71.80	72.00	72.00	DLH	
					2. Indeks Kualitas Udara	Kementerian Lingkungan Hidup	Indeks	92.89	92.91	92.93	92.95	92.97	92.99	93.00	93.00	DLH	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Luas RTH Publik tersedia/luas RTH Publik yang seharusnya tersedia*100	Persen	24.00%	24.00%	24.46%	26.00%	25.99%	27.03%	27.10%	27.10%	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Jumlah limbah B3 yang terkelola dibandingkan dengan jumlah B3 yang seharusnya dikelola	Persen	0.00%	40.66%	42.62%	46.03%	49.23%	52.24%	55.22%	55.22%	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dibagi Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung dikali 100	Persen	33.00	38.00	43.00%	48.00%	53.00%	58.00%	60.00%	60.00%	DLH
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah MHA Gampong yang di latih / Jumlah Gampong Keseluruhan x 100	Persen	0	0	23.50%	19.12%	19.12%	19.12%	19.12%	19.12%	DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup yang terlatih / Jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup x 100	Persen	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DLH
2	11	10	PROGRAM PENAGAPAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus yang ditangani / Jumlah Keseluruhan Kasus X 100	Persen	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Kementerian Lingkungan Hidup	Angka	43.00	48.00	51.00	53.00	56.00	58.00	58.00	58.00	DLH
2	12		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>													<b>DISDUK CAPIL</b>
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe)	Predikat/Nilai	63.20 B	63.60 B	64.00 B	64.40 B	64.80 B	65.20 B	65.60 B	65.60 B	DISDUK CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Jumlah Yang Sudah Melakukan Aktivasi IKD/Jumlah Yang Sudah Melakukan Perekaman KTP Elektronik x 100	Persen	10.59%	13.00	20.00	25.00	32.00	40.00	40.00	40.00	DISDUK CAPIL
					Var	Jumlah Yang Sudah Melakukan Aktivasi IKD	juwa		17715	27450	34307	44240	55692	56088	56088	DISDUK CAPIL
					Var	Jumlah Yang Sudah Melakukan Perekaman KTP Elektronik	juwa		136237	137229	137229	138229	139229	140229	140229	DISDUK CAPIL
					2. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Jumlah Anak Usia Wajib KIA yang Memiliki KIA / Jumlah Total Anak Usia Wajib KIA) x 100%	Persen	40.76	43.00	47.00	51.00	55.00	60.00	60.00	60.00	DISDUK CAPIL
					Var	Jumlah Anak Usia Wajib KIA yang Memiliki KIA	juwa		25,537	26,137	27,137	28,137	29,137	31,137	31,137	DISDUK CAPIL
					Var	Jumlah Total Anak Usia Wajib KIA	juwa		59,390	55,610	53,210	51,162	48,562	51,892	51,892	DISDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	(Jumlah Akta Kematian yg diterbitkan/ jumlah laporan kematian yg diterima) * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	DISDUK CAPIL
					Var	Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	akta		1172	1182	1192	1200	1210	1220	1220	DISDUK CAPIL
					Var	jumlah laporan kematian yang diterima	laporan		1172	1182	1192	1200	1210	1220	1220	DISDUK CAPIL
					2. Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	(Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan/ Jumlah laporan kelahiran yang diterima) * 100	Persen	99.66	99.70	99.80	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUK CAPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Var	Jumlah Akta Kelahiran yang diterbitkan	akta		4236	4256	4279	4298	4315	4334	4334	DISDUK CAPIL		
			Var	Jumlah laporan kelahiran yang diterima	laporan		4249	4264	4279	4298	4315	4334	4334	DISDUK CAPIL		
			3. Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	(Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan/Jumlah Laporan Akta Perkawinan yang diterima) * 100	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUK CAPIL		
			Var	Jumlah Akta Perkaawinan yang diterbitkan	akta		2	2	2	2	2	2	2	DISDUK CAPIL		
			Var	Jumlah laporan perkaawinan yang diterima	laporan		2	2	2	2	2	2	2	DISDUK CAPIL		
			4. Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	(Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan/Jumlah laporan perceraian yg diterima) * 100	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUK CAPIL		
			Var	Jumlah Akta Perceraian yang diterbitkan	akta		1	1	1	1	1	1	1	DISDUK CAPIL		
			Var	Jumlah laporan perceraian yang diterima	laporan		1	1	1	1	1	1	1	DISDUK CAPIL		
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	(Jumlah Informasi Kependudukan anyg dimanfaatkan/Total Jlh Informasi Kependudukan yg tersedia) * 100	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUK CAPIL	
			Var	Jumlah Informasi Kependudukan anyg dimanfaatkan	Dok		2	2	2	2	2	2	2	DISDUK CAPIL		
			Var	Total Jlh Informasi Kependudukan yg tersedia	Dok		2	2	2	2	2	2	2	DISDUK CAPIL		
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang terkelola/Total Jumlah Profil Kependudukan yg harus terkelola) * 100	Persen	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DISDUK CAPIL	
			Var	Jumlah Profil Kependudukan yang terkelola	laporan		5	5	5	5	5	5	5	DISDUK CAPIL		
			Var	Total Jumlah Profil Kependudukan yg harus terkelola	laporan		5	5	5	5	5	5	5	DISDUK CAPIL		
2	13		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											DPMG		
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Kategori/Point	B / 62.55	B / 62.70	B / 62.80	B / 62.90	B / 63.15	B / 63.30	B / 63.45	DPMG	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa /Jumlah Desa x 100	Persen	0.00%	8.82	14.71	22.06	29.41	33.82	38.24	38.24	DPMG
			Var	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Desa	Desa		0.00	6.00	10	15	20	23	26	26	DPMG	
			Var	Jumlah Desa	Desa		0.00	68.00	68	68	68	68	68	68	DPMG	
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerjasama Desa / Jumlah Desa * 100	Persen	0.00%	14.71	17.65	22.06	26.47	29.41	36.76	36.76	DPMG
			Var	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Kerjasama Desa	Desa		0.00	10	12	15	18	20	25	25	DPMG	
			Var	Jumlah Desa	Desa		0.00	68	68	68	68	68	68	68	DPMG	
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	((Jumlah Aparatur Desa yang ditingkatkan kapasitasnya / Jumlah Aparatur Desa Seluruh Desa * 100) + (Jumlah Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya / Jumlah Anggota BPD Seluruh Desa * 100)) / 2	Persen	0.00%	18.15	19.76	19.96	20.97	22.38	23.79	23.79	DPMG
			Var	Persentase Aparatur Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen		0	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	DPMG	
			Var	Jumlah Aparatur Desa yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Administrasi Pemerintahan Desa	Orang		0	204	204	204	204	204	204	204	DPMG	
			Var	Jumlah Aparatur Desa Seluruh Desa	Orang		0	816	816	816	816	816	816	816	DPMG	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				Persentase Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	0	11.29	14.52	14.92	16.94	19.76	22.58	22.58	DPMG		
			Var	Jumlah Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Pengawasan Pemerintahan Desa	Orang	0	56	72	74	84	98	112	112	DPMG		
			Var	Jumlah Anggota BPD Seluruh Desa	Desa	0	496	496	496	496	496	496	496	DPMG		
				2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	Persen	0.00%	99.50	99.55	99.60	99.65	99.70	99.75	99.75	DPMG		
			Var	Jumlah Realisasi Penyaluran Anggaran DD, ADG, BHPD dan BHRD / Jumlah Anggaran DD, ADG, BHPD dan BHRD Seluruh Desa * 100	Milyar Rp		114.60	116.21	117.89	119.66	121.52	123.40	123.40	DPMG		
			Var	Jumlah Anggaran DD, ADG, BHPD dan BHRD Seluruh Desa	Milyar Rp		115.18	116.73	118.37	120.08	121.88	123.71	123.71	DPMG		
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	{(Jumlah LKD yang Terfasilitasi Pemberdayaan / Jumlah LKD Seluruh Desa * 100)	Persen	66.67	73.53	76.47	78.92	81.37	83.82	86.27	86.27	DPMG
				Var	Jumlah LKD yang Terfasilitasi Pemberdayaan	Lembaga	136	150	156	161	166	171	176	176	DPMG	
				Var	Jumlah LKD Seluruh Desa	Lembaga	204	204	204	204	204	204	204	204	DPMG	
				2. Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pemberdayaan LAD / Jumlah Desa * 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DPMG	
				Var	Jumlah Desa yang terfasilitasi Pemberdayaan LAD	Desa	68	68	68	68	68	68	68	68	DPMG	
				Var	Jumlah Desa	Lembaga	68	68	68	68	68	68	68	68	DPMG	
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												DP3AP2 KB	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	1. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Total Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota dibagi Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100	Angka	2.28	2.28	2.27	2.27	2.26	2.26	2.25	2.25	DP3AP2 KB
					2. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	BKKBN	Angka	8.5	7.70	7.00	6.40	5.90	5.40	5.00	5.00	DP3AP2 KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Banyaknya Peserta KB aktif modern dibagi Banyaknya pasangan usia subur dikali 100	Angka	50.20	57.00	57.10	57.20	57.50	58.00	58.20	58.20	DP3AP2 KB
					2. Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota dibagi Target Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dikali 100	Persen	15.90	8.47	8.41	8.30%	8.26	8.11	8.11	8.11	DP3AP2 KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Jumlah keluarga yang berpartisipasi aktif dalam kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga / Jumlah keluarga * 100	Persen	71.58	75.56	86.08	89.47	91.89	91.89	91.89	91.89	DP3AP2 KB
					Var	Jumlah keluarga yang berpartisipasi aktif dalam kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	Keluarga		68	68	68	68	68	68	68	DP3AP2 KB
					Var	Jumlah keluarga yang hadir	Keluarga		90	79	76	74	74	74	74	DP3AP2 KB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	15		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>												DISHUB	
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe	Kategori/Point	B (60.35)	B (62.00)	B (62.80)	B (63.20)	B (63.50)	B (63.90)	B (64.11)	B (64.11)	DISHUB
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas ayanan transportasi darat	1. Konektivitas Darat	Jumlah Bobot Konektivitas Transportasi Darat di tambahkan jumlah Bobot Konektivitas Transportasi Laut	Rasio	0.5	0.50	0.50	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	DISHUB
					2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang di bagi Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan dikali seratus	Persen	62.5	62.50	62.50	62.50	87.50	87.50	87.50	87.50	DISHUB
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut	jumlah Bobot Konektivitas Transportasi Laut	Rasio	0	0	0	0	0	0	0	0	DISHUB
2	16		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													KOMINFO
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe	Kategori/Point	B (60.95)	B (62.40)	B (62.60)	B (62.80)	B (63.00)	B (63.20)	B (63.40)	B (63.40)	KOMINFO
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	((Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Kominfo Tahun N - Nilai Hasil Survei Masyarakat (SKM) Dinas Kominfo Tahun N-1)/Nilai Hasil Survei Masyarakat (SKM) Dinas Kominfo Tahun N) x 100	Persen	84.54	84.63	84.72	84.81	84.90	98.49	85.08	85.08	KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	Nilai Hasil Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Nilai	2.80	3.00	3.10	3.15	3.20	3.25	3.30	3.30	KOMINFO
2	17		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>													DISKOP
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe	Level/Point	65.90 (B)	66.45 (B)	66.95 (B)	67.20 (B)	67.80 (B)	68.00 (B)	68.20 (B)	68.20 (B)	DISKOP
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	(Σ Volume usaha Koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya) dibagi Σ Volume usaha Koperasi tahun sebelumnya dikali 100	Persen	12.00	22.20	26.90	27.10	27.30	27.50	27.80	27.80	DISKOP
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperas	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan koperasi dibagi total pengawasan dan pemeriksaan koperasi seharusnya dikali 100	Persen	6.89%	5.28%	7.04%	8.80%	8.80%	10.56%	10.56%	10.56%	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi x 100	Persen	38.80	39.4	40.29	41.49	42.08	43.28	44.18	44.18	DISKOP
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan dibagi jumlah seluruh koperasi x 100	Persen	0.00%	8.80%	10.56%	10.56%	14.08%	14.08%	17.61%	17.61%	DISKOP
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya dibagi dengan jumlah seluruh koperasi x 100	Persen	0.00%	7.04%	7.75%	8.45%	9.15%	9.86%	10.56%	10.56%	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Σ usaha Mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dibagi Σ Jumlah UMKM dikali 100	Persen	0.65	0.72	0.76	0.79	0.83	0.86	0.9	0.9	DISKOP
					2. Pertumbuhan Wirausaha	(Σ Wirausaha tahun berjalan - Σ Wirausaha tahun sebelumnya) dibagi Σ Wirausaha tahun sebelumnya dikali 100	Persen	6.02	7.95	10.53	11.43	12.82	12.88	13.42	13.42	DISKOP



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Jumlah ukm yang menjalin kemitraan/jumlah keseluruhan Ukm *100	Persen	0.00%	2.17%	2.24%	2.26%	2.30%	2.34%	2.36%	DISKOP	
<b>2</b>	<b>18</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>												<b>DPMTSP NAKER</b>	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Total Realisasi Investasi Kab/Kota /Target Investasi Kab/Kota yang ditetapkan oleh BKPM Provinsi kepada Kab/Kota yang bersangkutan x 100	Persen	105.2	98.04	98.08	99.06	99.09	99.13	99.17	99.17	DPMTSP NAKER
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	(Jumlah Investor Tahun n - Jumlah Investor Tahun n-1) / Jumlah Investor Tahun n-1 * 100	Persen	20.00%	5.3	5.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.2	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Investor Tahun n	Investor	100	105	110	115	120	125	125	125	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Investor Tahun n-1	Investor	95	100	105	110	115	120	120	120	DPMTSP NAKER
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Izin Usaha yang Memenuhi Persyaratan / Jumlah Permohonan Izin Usaha *100	Persen	94.74	94.74	95.32	95.79	96.17	96.49	96.76	96.76	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Izin Usaha yang Memenuhi Persyaratan	Izin Usaha	378	378	428	478	528	578	628	628	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Permohonan Izin Usaha	Izin Usaha	399	399	449	499	549	599	649	649	DPMTSP NAKER
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	((Jumlah Penyelesaian Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha / Jumlah Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha)*50) + ((Jumlah Perusahaan yang melaksanakan LKPM dalam Satu Tahun / Jumlah Perusahaan Wajib LKPM) *50))	Persen	97.50	97.50	92.62	92.73	90.83	91.00	91.15	91.15	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Penyelesaian Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha	Permasalahan	11	11	18	18	18	18	18	18	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Permasalahan yang Dihadapi Pelaku Usaha	Permasalahan	11	11	20	20	20	20	20	20	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan LKPM dalam Satu Tahun	Perusahaan	95	95	100	105	110	115	120	120	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	Perusahaan	100	100	105	110	120	125	130	130	DPMTSP NAKER
2	18	06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	((Jumlah Dokumen yang Disajikan / Jumlah Dokumen Data yang Wajib Disajikan) *50) + ((Profil Pelaku Usaha / Profil Pelaku Usaha yang Wajib Disajikan) *50))	Persen	40.65	40.65	40.62	40.60	40.58	40.55	40.53	40.53	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Dokumen Data yang Wajib Disajikan	Dokumen	1895	1895	1900	1905	1910	1915	1920	1920	DPMTSP NAKER
					Var	Jumlah Dokumen yang Disajikan	Dokumen	3923	3923	3938	3953	3968	3983	3998	3998	DPMTSP NAKER
					Var	Profil Pelaku Usaha yang Wajib Disajikan	Profil	32	32	33	34	35	36	37	37	DPMTSP NAKER
					Var	Profil Pelaku Usaha	Profil	97	97	100	103	106	109	112	112	DPMTSP NAKER
<b>2</b>	<b>19</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA</b>												<b>DISPORAPAR</b>	
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Kategori/Nilai	65.45/B	65.50/B	65.75/B	65.81/B	66.16/B	66.45/B	67.2/B	67.2/B	DISPORAPAR
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	(jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan wirausaha / Jumlah pemuda yang berwirausaha x 100)	Persen	12.04%	12.02%	11.92%	11.88%	11.83%	11.81%	11.78%	11.78%	DISPORAPAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Propinsi	(Jumlah Atlet dari Daerah Kab/Kota yang masuk Pelatda Provinsi / Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor) x 100)	Persen	1.17	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DISPORAPAR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	(Jumlah gugus depan aktif / Jumlah Keseluruhan gugus depan x 100)	Persen	0	95	95	96	98	98	100	100	DISPORAPAR
					Var	Jumlah gugus depan aktif	Gudep	126	126	128	130	130	133	133	133	DISPORAPAR
					Var	Jumlah Keseluruhan gugus depan	Gudep	133	133	133	133	133	133	133	133	DISPORAPAR
2	21		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>													<b>KOMINFO</b>
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Nilai Indeks KAMI oleh BSSN	Nilai	0.00	1.00	1.01	1.05	1.08	1.09	1.10	1.10	KOMINFO
2	22		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>													<b>PK</b>
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Jumlah orang yang ikut aktif dalam kegiatan Pengembangan Kebudayaan /total orang yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut x 100	Persen	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	40.00	40.00	40.00	PK
					Var	Jumlah orang yang ikut aktif dalam kegiatan Pengembangan Kebudayaan	10	10	10	10	10	12	12	12	12	PK
					Var	total orang yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut	30	30	30	30	30	30	30	30	30	PK
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Jumlah kesenian tradisional yang ikut dalam festival /Jumlah total jenis kesenian tradisional yang ditetapkan dengan SK x 100	Persen	20.00	20.00	40.00	40.00	60.00	60.00	66.67	66.67	PK
					Var	Jumlah kesenian tradisional yang ikut dalam festival	1	1	2	2	3	3	4	4	4	PK
					Var	Jumlah total jenis kesenian tradisional yang ditetapkan dengan SK	5	5	5	5	5	5	6	6	6	PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Jumlah Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Tahun n /Jumlah Partisipasi Masyarakat yang diharapkan Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal x 100	Persen	58.33	58.33	66.67	66.67	75.00	75.00	83.33	83.33	PK
					Var	Jumlah Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal Tahun n	Orang	7	7	8	8	9	9	10	10	PK
					Var	Jumlah Partisipasi Masyarakat yang diharapkan Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	Orang	12	12	12	12	12	12	12	12	PK
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi Jumlah total warisan x 100	Persen	61.56	24.52	24.52	29.44	36.37	45.30	55.15	55.15	PK
					2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Jumlah Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Total Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang x100	Persen	11.00%	26.90%	40.70%	60.20%	77.80%	87.00%	100.00%	100.00%	PK
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Jumlah Partisipasi yang berkunjung ke museum/Jumlah kunjungan ke museum yang diharapkan tahun n	Persen	13.76%	13.76%	13.76%	13.77%	13.77%	13.80%	13.84%	13.84%	PK
2	22		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>													<b>MAA</b>
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Kategori/Nilai	B 60.75	B 61.50	B 62,15	B 62,75	B 63,10	B 63,75	B 64.00	B 64.00	MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Indeks Adat Istiadat Aceh	Sekretariat MAA Aceh	Nilai	0.00	97.43	97.44	97.6	97.64	97.69	99.00	99.00	MAA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2	23		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>												ARPUS	
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Kategori/Nilai	60.75 B	61.20 B	61.95 B	62.10 B	62.80 B	63.20 B	63.90 B	63.90 B	ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Perpusnas	Nilai	68.15	68.19	69.25	70.11	70.29	71.05	71.15	71.15	ARPUS
2	23	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dimiliki	Jumlah koleksi Nasional dan naskah kuno yang dilestarikan dibagi Jumlah koleksi Nasional dan naskah kuno yang dimiliki	Persen	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	ARPUS
2	24		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>													ARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	jumlah arsip yang tersedia dibagi jumlah arsip yang seharusnya x 100	Persen	50.76	51.10	52.21	53.68	55.88	60.29	64.71	64.71	ARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah perlindungan dan penyelamatan arsip dilakukan tahun n dibagi jumlah seluruh arsip x 100	Persen	0.00	20.00	40.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	ARPUS
3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
3	25		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													DKPPP
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Total produksi perikanan tangkap	Ton	12,852.00	14,480.28	14,809.50	15,138.25	15,357.67	15,576.57	15,906.44	15,906.44	DKPPP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Total produksi perikanan budidaya	Ton	1,731.00	2,016.68	2,026.77	2,036.90	2,047.09	2,057.32	2,067.61	2,067.61	DKPPP
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi	luasan kawasan yang akan dikonservasi tahun n	Ha	-	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	DKPPP
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	AKI = Jumlah Ikan yang dikonsumsi (Kg) / Jumlah Penduduk / 1.000	Kg/Kapita/ Tahun	72.15	72.15	72.35	72.50	72.63	72.72	72.78	72.78	DKPPP
3	26		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>													DISPORAPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun N - Jumlah kunjungan Wisatawan tahun N-1/ Jumlah Kunjungan N *100	Persen	-3.86	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	6.00	DISPORAPAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Jumlah Media Pemasaran Pariwisata Tahun N - Jumlah Media Pemasaran Pariwisata Tahun N - 1 / Jumlah Media Pemasaran Pariwisata Tahun N - 1 *100	Persen	0.00	0.00	50.00	66.67	80.00	89.00	94.12	94.12	DISPORAPAR
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekraf yang aktif dan tervalidasi / Jumlah seluruh Pelaku Pariwisata dan Ekraf Tahun *100	Persen	0.00	0.00	25.00	28.00	31.25	33.33	35.71	35.71	DISPORAPAR
3	27		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>													DKPPP
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	(Produksi Tanaman Pangan Tahun n - Produksi Tanaman Pangan Tahun n-1) dibagi Produksi Tanaman Pangan Tahun n-1 x 100	Persen	5.67	5.69	5.71	5.74	5.77	5.8	5.83	5.83	DKPPP
					2. Peningkatan Produksi Hortikultura	(Produksi Hortikultura Tahun n - Produksi hortikultura Tahun n-1) dibagi Produksi hortikultura Tahun n-1 x 100	Persen	3.14	4.48	4.5	4.52	4.54	4.56	4.58	4.58	DKPPP
					3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	(Produksi komoditas Peternakan Tahun n - Produksi komoditas Peternakan Tahun n-1) dibagi Produksi komoditas Peternakan Tahun n-1 x 100	Persen	0.3	1.27	1.58	2.14	2.49	2.77	3.00	3.00	DKPPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Laban Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Luas Lahan yang Dilindungi - Luas Lahan yang tidak Dilindungi	Ha	179.85	179.85	179.85	179.85	179.85	179.85	179.85	DKPPP	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun n dibagi Luas wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis x 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	DKPPP	
					2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase = (Jumlah unit usaha dengan sertifikat / Total unit usaha PAH) x 100%	Persen	25.00	25.00	43.75	62.50	68.75	75.00	93.75	DKPPP	
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1. Persentase Penanganan Bencana Pertanian	jumlah kasus bencana pertanian yang tertangani dibagi dengan total kasus bencana pertanian yang terjadi x 100	Persen	10.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	DKPPP	
					2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Jumlah penanganan dampak perubahan iklim yang teratasi dibagi jumlah total dampak perubahan iklim terhadap pertanian x 100	Persen	95.00	95.00	90.00	85.00	80.00	75.00	70.00	DKPPP	
3	27	06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Perantanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha pertanian yang diterbitkan dibagi dengan Total jumlah Izin Usaha Pertanian yang diajukan	Persen	0.00	0.00	0.00	34.72	48.61	66.67	93.02	DKPPP	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya pertanian bidang penyuluh kapasitas SDM	1. Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan dibagi jumlah total seluruh penyuluh x 100	Persen	8.33	8.33	25.00	41.67	58.33	75.00	91.67	DKPPP	
					2. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Jumlah koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi dibagi total jumlah koperasi tani x 100	Persen	11.76	11.76	23.5	35.29	47.00	58.80	70.59	DKPPP	
3	30		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>												<b>DISKOP</b>	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	((Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang direvitalisasi / Jumlah Keseluruhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Sudah Ada * 100) + (Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun / Jumlah Keseluruhan Sarana Distribusi Perdagangan yang Sudah Ada * 100))/2	Persen	0.22	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00	16.00	16.00	DISKOP
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang venting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	((Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya yang Dipantau / Jumlah Keseluruhan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya * 100) + ((Harga Barang Pokok Sekarang - Harga Barang Pokok Sebelumnya) / Harga Barang Pokok Sebelumnya) * 100%) + (Jumlah Operasi Pasar / Operasi Pasar yang Seharusnya Dilaksanakan dalam Setahun * 100) / 3	Persen	60.01	59.98	60.01	60.10	60.35	60.45	60.55	60.55	DISKOP
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	BPS	Rp. Juta	34.51	36.20	38.92	40.21	42.25	44.12	46.32	46.32	DISKOP
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Tera Tera Ulang UTTP / Jumlah Yang Seharusnya Ditera Tera Ulang dalam Setahun* 100	Persen	71.35	74.07	71.35	74.07	75.00	77.71	77.71	77.71	DISKOP
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	jumlah pengadaan berasal dari PDN/jumlah seluruh pengadaan *100	Persen	0.00	45.00	50.00	50.00	55.00	55.00	60.00	60.00	DISKOP
3	31		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>												<b>DISKOP</b>	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Nilai investasi sektor industri dan kawasan industri dibagi total investasi seluruh sektor dikali 100%	Persen	5.27	5.00	5.27	5.77	6.00	6.27	6.27	6.27	DISKOP
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Jumlah izin usaha industri yang diterbitkan dibagi jumlah izin usaha yang diajukan x 100	Persen	5.00	5.00	5.00	5.33	5.45	5.65	5.65	5.65	DISKOP
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Laporan informasi industri dan informasi lain sektor industri secara akurat, lengkap, dan tepat waktu dengan ketentuan: - Jika laporan disampaikan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret maka berbobot 100% - Jika laporan disampaikan setelah tanggal 31 Maret maka berbobot 0%	Persen	88.00	90.00	91.00	92.00	94.00	96.00	98.00	98.00	DISKOP
4			<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
4	01		<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>													<b>SETDAKO</b>
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	1. NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Level/Point	63.55 (B)	63,95 (B)	64,50 (B)	65,00 (B)	65,50 (B)	66,00 (B)	66,50 (B)	66,50 (B)	SETDAKO
					2. Indeks Kematangan Organisasi (KOD)	Total Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	Nilai	n.a	29.00	30.00	30.00	32.00	35.00	35.00	35.00	SETDAKO
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah Yang Difasilitasi / Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah Yang Diajukan * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETDAKO
					Var	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah Yang Difasilitasi	Dok		2	3	3	3	4	4	4	SETDAKO
					Var	Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah Yang Diajukan	Dok		2	3	3	3	4	4	4	SETDAKO
					Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang Disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah * 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETDAKO
					Var	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah yang Disampaikan Tepat Waktu (LPPD, LKPJ Walikota, SPM)	Dok		2	3	3	3	4	4	4	SETDAKO
					Var	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD, LKPJ Walikota, SPM)	Dok		2	3	3	3	4	4	4	SETDAKO
					Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Perangkat Daerah koordinasi bagian Kesejahteraan Rakyat / Jumlah Kebijakan yang ditetapkan * 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETDAKO
					Var	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Perangkat Daerah koordinasi bagian Kesejahteraan Rakyat	Dok		4	4	4	4	4	4	4	SETDAKO
					Var	Jumlah Kebijakan yang ditetapkan	Dok		4	4	4	4	4	4	4	SETDAKO
					Persentase Produk Hukum Yang Dihilangkan	Jumlah Produk Hukum Yang Dihilangkan/ Jumlah Produk Hukum Yang Ditargetkan dalam satu Tahun * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETDAKO
					Var	Jumlah Produk Hukum Yang Dihilangkan	Dok		695	764	840	924	1016	1108	1108	SETDAKO
					Var	Jumlah Produk Hukum Yang Ditargetkan dalam satu Tahun	Dok		695	764	840	924	1016	1108	1108	SETDAKO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030						
							Target	Target	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang Dihasilkan / Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang direncanakan * 100)	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETDAKO		
					Var	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang	Dok		5	5	5	5	5	5	5	SETDAKO		
					Var	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengelolaan Perekonomian yang	Dok		5	5	5	5	5	5	5	SETDAKO		
						Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Realisasi Yang Disampaikan Tepat Waktu / Jumlah Laporan Realisasi Dalam 1 Tahun * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETDAKO	
					Var	Jumlah Laporan Realisasi Yang Disampaikan Tepat Waktu	Dok		36	36	36	36	36	36	36	SETDAKO		
					Var	Jumlah Laporan Realisasi Dalam 1 Tahun	Dok		36	36	36	36	36	36	36	SETDAKO		
						Tingkat Kematangan UKPBJ	Skor Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ (Hasil Verifikasi Dokumen Pendukung dari LKPP RI)		8.89	9	9.15	9.3	9.45	9.6	9.75	9.75	SETDAKO	
<b>4</b>	<b>02</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>													<b>SETWAN</b>		
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Level/Point	B 61.10	B 62.70	B 65,50	B 67,00	B 68,30	BB 70,00	BB 75,00	BB 75,00	SETWAN		
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	1.Tepat 2.Tidak Tepat	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	SETWAN		
						Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Jumlah Ranperda yang ditetapkan/jumlah ranperda pada proleg pada tahun N*100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETWAN	
					Var	Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan	Ragan		12	12	12	12	12	12	12	12	SETWAN	
					Var	Jumlah Rancangan Qanun pada Proleg	Ragan		12	12	12	12	12	12	12	12	SETWAN	
						Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan pada Tahun T / Jumlah kegiatan Pelaksanaan pengawasan yang direncanakan pada tahun N * 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	SETWAN
					Var	Jumlah kegiatan Pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan	keg		22	22	22	22	22	22	22	22	SETWAN	
					Var	Jumlah kegiatan Pelaksanaan pengawasan yang direncanakan	keg		22	22	22	22	22	22	22	22	SETWAN	
<b>5</b>			<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
<b>5</b>	<b>01</b>		<b>PERENCANAAN</b>													<b>BAPPEDA</b>		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Level/Point	B (66.95)	B (67.15 )	B (69,10)	BB (70,15)	BB (73,30)	BB (75.00)	BB (77,50)	BB (77,50)	BAPPEDA		
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	(Jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus di laksanakan tahun berkenaan) x 100	Persen	93.01	100	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA	
					Var	Jumlah program RKPD tahun berkenaan	program		173	189	189	189	189	189	189	189	BAPPEDA	
					Var	jumlah program RPJMD yang harus di laksanakan tahun berkenaan	program		186	189	189	189	189	189	189	189	BAPPEDA	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
				2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	(Jumlah program Renstra PD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus di laksanakan tahun berkenaan) x 100	Persen	93.01	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA	
				Var	Jumlah program Renstra PD tahun berkenaan	program	173	189	189	189	189	189	189	189	BAPPEDA	
				Var	jumlah program RPJMD yang harus di laksanakan tahun berkenaan	program	186	189	189	189	189	189	189	189	BAPPEDA	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	(Jumlah program Renja PD tahun berkenaan koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia / jumlah program RKPd yang harus dilaksanakan tahun berkenaan koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) x 100	Persen	96.08	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA	
				Var	Jumlah program Renja PD tahun berkenaan koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	program	98	114	114	114	114	114	114	114	BAPPEDA	
				Var	jumlah program RKPd yang harus di laksanakan tahun berkenaan koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	program	102	114	114	114	114	114	114	114	BAPPEDA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	(Jumlah program Renja PD tahun berkenaan koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/ jumlah program RKPd yang harus di laksanakan tahun berkenaan koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) x 100	Persen	80.00	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA	
				Var	Jumlah program Renja PD tahun berkenaan koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	program	36	43	43	43	43	43	43	43	BAPPEDA	
				Var	jumlah program RKPd yang harus di laksanakan tahun berkenaan koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	program	45	43	43	43	43	43	43	43	BAPPEDA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	(Jumlah program Renja PD tahun berkenaan koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA/ jumlah program RKPd yang harus di laksanakan tahun berkenaan koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA) x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	BAPPEDA	
				Var	Jumlah program Renja PD tahun berkenaan koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	program	39	32	32	32	32	32	32	32	BAPPEDA	
				Var	jumlah program RKPd yang harus di laksanakan tahun berkenaan koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	program	39	32	32	32	32	32	32	32	BAPPEDA	
5	02		<b>KEUANGAN</b>												<b>BPKD</b>	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APiP Kota Lhokseumawe	Level/Point	B (64,85)	B (66,15)	B (66,25)	B (66,50)	B (66,75)	B (67,50)	B (68,00)	B (68,00)	BPKD
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		1. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	(Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD / Anggaran Belanja dalam APBD) x 100%	Persen	38.50	41.58	41.51	41.49	41.36	41.07	40.85	40.85	BPKD
				Var	Anggaran Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	Rp. Milyar	308.04	346.73	347.00	347.84	347.98	346.90	346.63	346.63	BPKD	
				Var	Anggaran Belanja dalam APBD	Rp. Milyar	800.08	833.80	835.89	838.39	841.33	844.69	848.49	848.49		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030			
							Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	(Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik / Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa) x 100%	Persen	40.00	19.86	20.07	20.30	20.62	20.94	21.17	21.17	BPKD	
			Var	Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Rp. Milyar	271.63	140.81	142.51	144.32	146.91	149.32	151.19	151.19	BPKD	
			Var	Total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa	Rp. Milyar	679.07	709.09	710.09	711.12	712.56	713.22	714.15	714.15	BPKD	
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan	(Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N/Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N) x 100%	Persen	96.60	98.75	95.78	95.35	98.31	97.52	97.87	97.87	BPKD	
			Var	Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N	Rp. Milyar	417.59	432.86	436.98	438.89	456.98	470.69	485.78	485.78	BPKD	
			Var	Alokasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun N	Rp. Milyar	432.27	438.34	456.24	460.27	464.83	482.68	496.36	496.36	BPKD	
			2. Persentase Penurunan SILPA	(Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1) / Nilai SILPA Tahun N - 1 * 100%	Persen	-65.88	-36.68	-37.50	-20.00	-12.50	-14.29	-16.67	-16.67	BPKD	
			Var	Nilai SILPA Tahun N dikurangi Nilai SILPA Tahun N - 1	Rp. Milyar	37.03	12.63	8.00	5.00	4.00	3.50	3.00	3.00	BPKD	
			Var	Nilai SILPA Tahun N	Rp. Milyar	12.63	8.00	5.00	4.00	3.50	3.00	2.50	2.50	BPKD	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	(Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu/jumlah laporan keuangan yang seharusnya tersedia) x 100	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	BPKD	
			Var	Jumlah laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan tepat waktu	Lap	40	40	40	40	40	40	40	40	BPKD	
			Var	Jumlah laporan keuangan yang seharusnya tersedia	Lap	40	40	40	40	40	40	40	40	BPKD	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	((Nilai Aset Tetap tahun N - Nilai Aset Tetap Tahun N-1) / Nilai Aset Tetap Tahun N-1) x 100	Persen	1.58	2.49	2.74	2.37	2.60	2.20	2.20	BPKD
			Var	Nilai Aset Tetap Tahun N	Rp (T)	3.21	3.29	3.38	3.46	3.55	3.64	3.72	3.72	BPKD	
			Var	Nilai Aset Tetap tahun N-1	Rp (T)	3.16	3.21	3.29	3.38	3.46	3.55	3.64	3.64	BPKD	
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	(Realisasi PAD / Total Realisasi Pendapatan Daerah) x 100	Persen	8.14	8.98	10.29	10.63	9.76	12.09	10.01	BPKD
			Var	Realisasi PAD	Rp (M)	64.52	72.34	70.00	72.11	75.34	100.15	77.13	77.13	BPKD	
			Var	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Rp (M)	792.39	805.26	679.98	678.65	771.75	828.40	770.85	770.85	BPKD	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	(Nilai Pengawasan/Indikator Pengawasan )X 100%	Persen	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	100.00	BPKD	
			Var	Nilai Pengawasan		4	4	3	3	4	3	4	4	BPKD	
			Var	Indikator Pengawasan		4	4	4	4	4	4	4	4	BPKD	
		Meningkatnya penerapan sisteen informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	(Jumlah Entitas Digital / Total Entitas) * 100%	Persen	90.31	90.31	90.14	90.03	90.31	90.58	91.41	91.41	BPKD	
			Var	Jumlah Entitas Digital		327,290	327,290	326,690	326,290	327,290	328,290	331,290	331,290	BPKD	
			Var	Total Entitas		362,420	362,420	362,420	362,420	362,420	362,420	362,420	362,420	BPKD	
5	03		<b>KEPEGAWAIAN</b>											<b>BKPSDM</b>	
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Nilai/Kategori	62.75 B	62.85 B	63.5 B	64.00 B	64.50 B	65.00 B	65.50 B	BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Bezetting ASN/Formasi atau kebutuhan jabatan*100%	Persen	47.08%	79.21	81.48	81.88	82.16	82.43	82.56	BKPSDM
			Var	Bezetting ASN	Orang			5833	6000	6030	6050	6070	6080	6080	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Var	Formasi/kebutuhan jabatan	Orang		7364	7364	7364	7364	7364	7364	7364	BKPSDM		
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya/Jumlah ASN*100%	Persen	6,57%	10.32	14.32	15.49	15.83	16.17	16.52	16.52	BKPSDM		
			Var	Jumlah ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Orang		300	416	450	460	470	480	480	BKPSDM		
			Var	Jumlah PNS	Orang		2906	2906	2906	2906	2906	2906	2906	BKPSDM		
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Skor Pengembangan Karir ASN dalam penilaian Sistem Merit	Hasil Penilaian KASN Indeks Sistem merit aspek pengembangan karir	Nilai	2.50	2.50	15.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	BKPSDM		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	jumlah pegawai dengan SKP bernilai Baik dibagi total pegawai	Persen	67.96%	68.39	68.82	69.25	69.69	70.12	70.55	70.55	BKPSDM		
			Var	jumlah pegawai dengan SKP bernilai Baik	pegawai		2371	2386	2401	2416	2431	2446	2446	BKPSDM		
			Var	total pegawai	pegawai		3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	BKPSDM		
5	04	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>												<b>BKPSDM</b>		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dasar, manajerial dan fungsional / total ASN x 100%	Persen	n.a	4.04	4.33	4.61	4.90	5.05	5.19	BKPSDM	
				Var	ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	orang		140	150	160	170	175	180	180	BKPSDM	
				Var	total ASN	orang		3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	BKPSDM	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis/total ASN x 100%	Persen	n.a	1.44	1.59	1.73	2.02	2.31	2.60	2.60	BKPSDM	
				Var	Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	orang		50	55.00	60.00	70.00	80.00	90.00	90.00	BKPSDM	
				Var	total ASN	orang		3467	3467	3467	3467	3467	3467	3467	BKPSDM	
5	05	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>												<b>BAPPEDA</b>		
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkat pemanfaatan hasil Kelitbangan dalam Perencanaan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	(Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Digunakan / Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan) x 100	Persen	-	50.00	66.67	75.00	80.00	83.33	100.00	100.00	BAPPEDA
				Var	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan yang Dihasilkan	Rekomendasi	-	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6	6	BAPPEDA	
				Var	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan	Rekomendasi	-	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	6	6	BAPPEDA	
5	05	03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	(Jumlah Inovasi yang Dimanfaatkan / Jumlah Inovasi yang Dihasilkan) x 100	Persen	63.64	72.73	76.00	78.57	80.65	82.35	83.78	83.78	BAPPEDA
				Var	Jumlah Inovasi yang Dimanfaatkan	Inovasi	7	16.00	19.00	22.00	25.00	28.00	31.00	31.00	BAPPEDA	
				Var	Jumlah Inovasi yang Dihasilkan	Inovasi	11	22.00	25.00	28.00	31.00	34.00	37.00	37.00	BAPPEDA	
6	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>															
6	01	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>												<b>INSPEKTORAT</b>		
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Nilai/Kategori	B 67.65	B 68.20	B 68.30	B 68.40	B 68.50	B 68.60	B 68.70	INSPEKTORAT	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Hasil Evaluasi BPK RI	Persen	81.11	81.11	82.4	83.07	84.59	85.13	85.3	INSPEKTORAT	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Hasil penilaian BPKP	Level/Point	Level 3 3.031	Level 3 3,2	Level 3 3,3	Level 3 3,4	Level 3 3,5	Level 3 3,6	Level 3 3,6	INSPEKTORAT	
					Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Hasil penilaian BPKP	Level/Point	Level 3 3.00	Level 3 3,2	Level 3 3,2	Level 3 3,2	Level 3 3,5	Level 3 3,5	Level 3 3,5	INSPEKTORAT	
7	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
7	01		<b>KECAMATAN</b>												<b>B. SAKTI</b>	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi oleh APIP Kota Lhokseumawe	Nilai/Kategori	B 62.15	B 60.45	B 62.28	B 62.30	B 62.32	B 62.34	B 62.40	B 62.40	B. SAKTI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	((Jumlah PKK Gampong yang aktif / jumlah keseluruhan Gampong * 100)+ (Jumlah Mukim yang diTingkatkan Kapasitasnya / Jumlah Keseluruhan Mukim * 100)+Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi / Jumlah Total Masyarakat yang diundang * 100 ))/3	Persen	63.00%	63.00%	65.00%	66.00%	69.00%	69.00%	70.00	70.00	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tenang	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan (t) / jumlah pengaduan yang masuk x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
					Var	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	pengaduan	5	5	5	5	5	5	5	5	B. SAKTI
					Var	Jumlah Pengaduan yang Masuk	pengaduan	5	5	5	5	5	5	5	5	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec / Jumlah permasalahan di kec *100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
					Var	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec	penanganan	18	18	18	18	18	18	18	18	B. SAKTI
					Var	Jumlah permasalahan di kec	penanganan	18	18	18	18	18	18	18	18	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong / Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	B. SAKTI
					Var	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Gp	18	18	18	18	18	18	18	18	B. SAKTI
					Var	Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gp	18	18	18	18	18	18	18	18	B. SAKTI
7	01		<b>KECAMATAN</b>												<b>B. MANGAT</b>	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi APIP Lhokseumawe	Nilai/Predikat	CC 59.45	B 60.15	B 60.20	B 60.30	B 60.35	B 60.40	B 60.42	B 60.42	B. MANGAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	((Jumlah PKK Gampong yang aktif / jumlah keseluruhan Gampong * 100)+ (Jumlah Mukim yang diTingkatkan Kapasitasnya / Jumlah Keseluruhan Mukim * 100)+Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi / Jumlah Total Masyarakat yang diundang * 100 ))/3	Persen	63.00%	63.00%	65.00%	66.00%	69.00%	69.00%	70.00	70.00	B. MANGAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tenang	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan (t) / jumlah pengaduan yang masuk x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	B. MANGAT
					Var	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	pengaduan	5	5	5	5	5	5	5	5	B. MANGAT
					Var	Jumlah Pengaduan yang Masuk	pengaduan	5	5	5	5	5	5	5	5	B. MANGAT
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec/Jumlah permasalahan di kec *100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	B. MANGAT
					Var	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec	Kasus	22	22	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
					Var	Jumlah permasalahan di kec	Kasus	22	22	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong/Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	B. MANGAT
					Var	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Dokumen	22	22	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
					Var	Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gampong	22	22	22	22	22	22	22	22	B. MANGAT
7	01		<b>KECAMATAN</b>												<b>M. SATU</b>	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030						
							Target	Target	Target	Target	Target	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi APIP Lhokseumawe	Nilai/Predikat	CC 59.30	B 60.15	B 60.25	B 60.40	B 60.60	B 60.80	B 61.00	B 61.00	M. SATU		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	((Jumlah PKK Gampong yang aktif / jumlah keseluruhan Gampong * 100)+ (Jumlah Mukim yang diTingkatkan Kapasitasnya / Jumlah Keseluruhan Mukim * 100)+Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi / Jumlah Total Masyarakat yang diundang * 100 )/3	Persen	80.00	80.00	90.00	100	100	100	100	100	100	M. SATU	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan (t) / jumlah pengaduan yang masuk x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M. SATU	
					Var	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	pengaduan	6	6	7	8	9	10	11	11	11	M. SATU	
					Var	Jumlah Pengaduan yang Masuk	pengaduan	6	6	7	8	9	10	11	11	11	11	M. SATU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec/Jumlah permasalahan di kec *100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M. SATU	
					Var	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec	Kasus	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	M. SATU
					Var	Jumlah permasalahan di kec	Kasus	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	M. SATU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong/Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M. SATU	
					Var	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Dokumen	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	M. SATU
					Var	Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gampong	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	M. SATU
<b>7</b>	<b>01</b>		<b>KECAMATAN</b>														<b>M. DUA</b>	
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi APIP Lhokseumawe	Nilai/Predikat	CC 59.75	B 60.45	B 60.60	B 60.80	B 61.00	B 61.20	B 61.40	B 61.40	M. DUA		
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan	((Jumlah PKK Gampong yang aktif / jumlah keseluruhan Gampong * 100)+ (Jumlah Mukim yang diTingkatkan Kapasitasnya / Jumlah Keseluruhan Mukim * 100)+Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi / Jumlah Total Masyarakat yang diundang * 100 )/3	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M. DUA	
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan (t) / jumlah pengaduan yang masuk x 100	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M. DUA	
					Var	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan pada tahun berjalan	pengaduan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	M. DUA	
					Var	Jumlah Pengaduan yang Masuk	pengaduan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	M. DUA	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec/Jumlah permasalahan di kec *100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M. DUA	
					Var	Jumlah penanganan Urusan Pemerintahan di Kec	Kasus	17	17	17	17	17	17	17	17	17	M. DUA	
					Var	Jumlah permasalahan di kec	Kasus	17	17	17	17	17	17	17	17	17	M. DUA	
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong/Jumlah Gampong dalam Kecamatan x 100%	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M. DUA	
					Var	Jumlah Pengawasan Dokumen Gampong	Dokumen	17	17	17	17	17	17	17	17	17	M. DUA	
					Var	Jumlah Gampong dalam Kecamatan	Gampong	17	17	17	17	17	17	17	17	17	M. DUA	
<b>8</b>			<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
8	01		<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>												<b>KESBANGPOL</b>	
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi APIP Lhokseumawe	Nilai/Predikat	60.80 B	60.90 B	61.00 B	61.10 B	61.20 B	61.30 B	61.40 B	61.40 B	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Jumlah pelajar terpilih jadi anggota paskibra/jumlah pelajar yang mendaftar menjadi anggota paskibra*100	Persen	21.84	21.74	25.00	26.47	28.13	30.00	32.14	32.14	KESBANGPOL
				Var		Jumlah pelajar terpilih jadi anggota paskibra	orang	45	45	45	45	45	45	45	45	KESBANGPOL
				Var		jumlah pelajar yang mendaftar menjadi anggota paskibra	orang	206	207	180	170	160	150	140	140	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang paham pendidikan politik / jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik x 100	Persen	22.50	24.00	36.00	38.00	40.00	44.00	50.00	50.00	KESBANGPOL
				Var		Jumlah masyarakat yang paham pendidikan politik	orang	9	12	18	19	20	22	25	25	KESBANGPOL
				Var		jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	orang	40	50	50	50	50	50	50	50	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	(jumlah ormas yang dibina / jumlah ormas yang tercatat) x 100	Persen	27.78	34.72	38.89	41.67	48.61	50.00	55.56	55.56	KESBANGPOL
				Var		jumlah ormas yang dibina	ormas	20	25	28	30	35	36	40	40	KESBANGPOL
				Var		jumlah ormas yang tercatat	ormas	72	72	72	72	72	72	72	72	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Jumlah gampong yang ditetapkan sebagai gampong bebas narkoba / Jumlah gampong x 100	Persen	0.00%	73.53	77.94	82.35	86.76	95.59	100.00	100.00	KESBANGPOL
				Var		Jumlah gampong yang ditetapkan sebagai gampong bebas narkoba	Gp	0	50	53	56	59	65	68	68	KESBANGPOL
				Var		Jumlah gampong	Gp	0	68	68	68	68	68	68	68	KESBANGPOL
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Jumlah konflik sosial yang diselesaikan/Jumlah konflik yang dilaporkan *100%	Persen	0.00%	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	KESBANGPOL
				Var		Jumlah konflik sosial yang diselesaikan	Konflik	0	2	4	3	2	2	2	2	KESBANGPOL
				Var		Jumlah konflik yang dilaporkan	Konflik	0	4	4	3	2	2	2	2	KESBANGPOL
9			<b>UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN</b>													
9	01		<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>													<b>MPU</b>
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi APIP Lhokseumawe	Nilai/Predikat	B (60.70)	B (61.50)	B (61.72)	B (61.80)	B (61.90)	B (62.00)	B (62.30)	B (62.30)	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Meningkatnya penyebaran fatwa	Persentase Fatwa yang di sosialisasikan	Jumlah fatwa yang disosialisasi/jumlah fatwa keseluruhan	Persen	92.31	62.50	85.71	90.00	90.00	92.16	94.23	94.23	MPU
				Var		Jumlah fatwa yang disosialisasi	Fatwa	24	30	42	45	45	47	49	49	MPU
				Var		jumlah fatwa keseluruhan	Fatwa	26	48	49	50	50	51	52	52	MPU
9	01		<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>													<b>B. MAL</b>



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Outcome	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Cara Perhitungan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja s.d Tahun 2030	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030				
							Target	Target	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi APIP Lhokseumawe	Nilai/Predikat	61.85 B	61,80 B	61,95 B	62,00 B	62,05 B	62,10 B	62,15 B	62,15 B	B. MAL
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Meningkatnya pertumbuhan ZISWAF	Persentase Peningkatan ZISWAF	Jumlah ZIS yg dikumpulkan di Tahun N - Jumlah ZIS N-1/jumlah ZIS N-1 x 100	Persen	8.47	11.39	11.56	12.51	12.68	13.95	15.24	15.24	B. MAL
					Var	Jumlah ZIS yg dikumpulkan di Tahun N Jumlah ZIS N-1	Rp. Juta	569.82	766.82	789.82	866.82	878.82	1080.92	1180.92	1180.92	B. MAL
					Var	Jumlah ZIS N-1	Rp. Juta	6,726.50	6729.5	6830.50	6929.50	6930.50	7749.50	7749.50	7749.50	B. MAL
<b>9</b>	<b>01</b>		<b>KEKHUSUSAN ACEH</b>													<b>DSI-PD</b>
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP OPD	Hasil Evaluasi APIP Lhokseumawe	Nilai/Predikat	B 61.10	B 61.35	B 61.45	B 61.65	B 61.85	B 62.00	B 62.20	B 62.20	DSI-PD
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Meningkatnya pemahaman Al-Quran	Angka Melek Al-Qur'an	Dinas Syariat Islam Aceh	Persen	84.56	84.90	85.41	86.26	87.12	87.99	88.87	88.87	DSI-PD



## GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR 000.7.2.2 /1276/ 2025

### TENTANG

EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 ayat (2) dan Pasal 270 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Surat.../2



2. Surat Walikota Lhokseumawe Nomor 100.3/1802 tanggal 22 Agustus 2025 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Walikota Lhokseumawe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Walikota Lhokseumawe menyampaikan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan nomor register.
- KEEMPAT : Walikota Lhokseumawe segera menetapkan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjadi Qanun setelah mendapatkan Nomor Register sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga.
- KELIMA : Walikota Lhokseumawe segera menyampaikan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 22 Oktober 2025  
30 Rabiul Akhir 1447



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI;
3. Walikota Lhokseumawe;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
6. Kepala Biro Hukum Setda Aceh-----



HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029

A. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039 dan 2040-2044. Oleh karena itu, RPJM Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe, yang selaras dengan periode RPJM Aceh Tahun 2025-2029.
2. Penyajian sistematika Rancangan Akhir (Rankhir) sampai dengan penetapan RPJM Kota Lhokseumawe disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
3. Penyelarasan RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 mengikuti Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
4. Penyelarasan Rankhir RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan Rankhir RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan Keputusan Gubernur Aceh tentang Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.
5. Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMK dengan RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJM Kota Lhokseumawe.
6. Pemerintah Kota/Kota agar menginput dan memproses RPJMD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

B. SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR

1. BAB I. PENDAHULUAN

- a. Dalam narasi pendahuluan agar disajikan tahapan penyusunan RPJMK yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, lengkap dengan tanggal pelaksanaannya sampai dengan tahapan evaluasi di provinsi.
- b. Hubungan Antar Dokumen. Menyempurnakan kembali penyajian hubungan antar dokumen, narasi yang disajikan terlalu general atau normatif sehingga tidak dapat menggambarkan keterhubungan antara RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagai contoh hubungan antara RPJMD Kota Lhokseumawe dengan RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 meliputi: (a). Periodisasi RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai dengan periodisasi tahapan pertama RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;

(b) Visi.../2



(b) Visi dan Misi RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 selaras dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; (c). Permasalahan dan isu strategis RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 selaras dengan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; (d) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029; (e) Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menjadi IKU dan/atau IKD dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

- c. Maksud dan Tujuan: Menyempurnakan kembali narasi maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan menambahkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah meliputi (a) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran pembangunan agar lebih efisien dan efektif, serta tepat sasaran dengan kebutuhan daerah; (b) Memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, menjaga kesinambungan antara satu periode kepemimpinan dengan periode berikutnya; (c) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD; (d) Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan; (e) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- d. Gambar 1.1 capaian indikator makro Tahun 2024 disarankan agar disajikan pada BAB II Gambaran Umum.

## 2. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- a. Grafik capaian-capaian pembangunan Kota Lhokseumawe agar dibandingkan dengan dengan capaian nasional dan provinsi.
- b. Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 dibuatkan satuannya.
- c. Gambar 2.9 agar dipisahkan IKA, IKU, IKL dan IKLH Tahun 2020-2024 buat perbandingan dengan provinsi.
- d. Tabel 2.13 buat perbandingan dengan provinsi.
- e. Gambar 2.11 buat perbandingan dengan provinsi dan menggunakan grafik *line*.
- f. Gambar 2.15 buat sandingan dengan provinsi dan nasional menggunakan grafik *line* untuk memberikan informasi capaian pembangunan Kota Lhokseumawe dan nasional.
- g. Tabel 2.59 Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024, menyajikan capaian angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Kota Lhokseumawe, namun angka ini tidak konsisten dengan Tabel 2.60 yang juga menyajikan angka kematian bayi, sehingga perlu dicermati kembali data mana yang harus disajikan agar kedua tabel tersebut konsisten (angkanya sama).
- h. Permasalahan Pembangunan Daerah. Beberapa saran dan masukan dalam penyajiannya antara lain:
  1. Menambahkan permasalahan pelaksanaan syariat Islam pada permasalahan yang disajikan pada poin 2.3.1.1 Belum optimalnya implementasi keistimewaan Aceh;
  2. Menyempurnakan kembali penyajian permasalahan pembangunan daerah. Contoh: Sub Bab 2.3.1.1 Belum optimalnya implementasi keistimewaan Aceh, 2.3.1.1.1. Belum optimalnya pelaksanaan syariat Islam hal ini ditandai dengan indeks pembangunan syariat Islam yang masih rendah di bawah Aceh.....dan seterusnya. Sub bab 2.3.1.1.2. Belum optimalnya pelaksanaan kebudayaan Aceh ditandai dengan masih rendahnya .....



- i. Isu Strategis. Isu strategis nasional dan Aceh yang disajikan masih berupa pointer, sebaiknya dijelaskan secara singkat dapat diadopsi dari narasi yang terdapat dalam RPJMN dan RPJMA Tahun 2025-2029. Kemudian dapat juga ditambahkan atau dijelaskan isu-isu pembangunan berkelanjutan (Isu KLHS).
  - j. Sebaiknya penyajian Sub Bab Isu Strategis sebagai berikut: 2.3.2.1. Isu Strategis Global; 2.3.2.2. Isu Strategis Nasional; 2.3.2.3. Isu Strategis Aceh; 2.3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Isu KLHS); 2.3.2.5. Rumusan Isu Strategis Kota Lhokseumawe.
  - k. Pada Tabel 2.95 untuk Capaian Persentase Jalan dalam Kondisi mantap terus mengalami penurunan, dari data terlihat menurun banyak dari capaian lima tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 sebesar 67,47 persen menjadi 64,40 persen, seharusnya mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan. Agar dapat menjadi perhatian terkait penurunan capaian untuk Persentase Jalan dalam Kondisi mantap dan perlu upaya dari Pemerintah Kota Lhokseumawe agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
  - l. Salah satu permasalahan di Kota Lhokseumawe adalah akses air minum di Kota Lhokseumawe masih rendah, karena tidak memiliki sumber air baku. Sehingga perlu dijabarkan lebih detail dalam isu strategis. Sudah dijabarkan dalam isu strategis hanya tidak spesifik, hanya secara umum saja. Agar dapat lebih dijabarkan lebih detail terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan terkait permasalahan air minum di Kota Lhokseumawe.
  - m. Halaman II. 332-338, Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih di bawah rata-rata nasional dan Aceh. Terdapat ketergantungan pada belanja transfer dan nilai tambah komoditas pertanian dan perikanan yang rendah. Agar diverifikasi sumber pendapatan daerah. Perluasan akses pasar, pembiayaan dan teknologi digital bagi UMKM, petani dan nelayan untuk meningkatkan nilai tambah.
  - n. Halaman II. 332-338, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih tinggi meskipun menurun, terutama di kalangan pemuda. Masih ada ketimpangan IPM antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang disarankan antara lain: (1) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja; (2) Peningkatan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang merata.
  - o. Halaman II. 35-36; II. 147-148; dan II. 155, Rasio jalan mantap menurun. Capaian SPM air minum dan sanitasi belum 100%. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistem *open dumping* yang tidak ramah lingkungan. Dilakukan dengan cara peningkatan investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan pelabuhan. Pengadaan mesin pengolah sampah menjadi energi terbarukan dan pembangunan SPAM regional.
  - p. Halaman II. 324, Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi dan SPBE menunjukkan peningkatan, Indeks Integritas masih menunjukkan kerentanan terhadap korupsi. Disarankan dengan penguatan lembaga pengawasan internal, peningkatan kapasitas ASN dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi untuk akuntabilitas dan transparansi.
  - q. Buat arah kebijakan terhadap dana desa pada gambaran keuangan daerah.
3. BAB III. VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- a. Kebijakan Pembangunan Nasional: Cukup menyajikan kebijakan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

b. Dalam.../4



- b. Dalam sub bab ini seharusnya hanya menjelaskan terkait strategi dan arah kebijakan pembangunan, tapi dijelaskan keterkaitan antara prioritas dengan tujuan dan sasaran (tidak *matching*), kalau memang mau disandingkan ya dibuat saja di sub bab yang tujuan dan sasaran.
- c. Gambar 3.5 s.d. Gambar 3.9 *Logframe* Perencanaan Terintegrasi Misi 1 s.d Misi 5, pelajari kembali penyajian *logframe*, karena yang ditampilkan lebih menggambarkan skema;
- d. Tabel 3.10. Program Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2025-2030. Agar disesuaikan judul tabel karena tabel yang disajikan tidak memuat angka nilai pagu indikatif.
- e. Gambar 3.10 s.d. 3.24. *Cascading* Pencapaian Tujuan 1 s.d Tujuan 5, menggambarkan kondisi penjabaran dari misi tujuan sasaran s.d program prioritas. Misalnya pada gambar 3.10, pencapaian misi 1 akan terpenuhi oleh program prioritas "Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, Industri dan peningkatan investasi serta peningkatan pendapatan asli daerah" jika dikaitkan dengan tabel 3.9. Integrasi Janji Politis dan Implementasi Program Unggulan dengan Program Nomenklatur, maka program prioritas tersebut pada poin 13, 14 dan 15 hanya memuat 5 program kemendagri (program nomenklatur) yang pelaksanaannya adalah OPD DKPPP. Selanjutnya jika dikaitkan dengan tabel 3.10. Program Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang disertai Pagu Indikatif, maka akan tergambar bahwa pada misi 1 tujuan 1 didukung oleh 3 sasaran, masing-masing sasaran selanjutnya didukung oleh beberapa program nomenklatur, sasaran 1 (19 program), sasaran 2 (5 program), sasaran 3 (10 program) dengan total 34 Program dan OPD pelaksanaannya ada 5 bukan hanya DKPPP namun ada juga Disperindagkop, DPMTSP, Naker, Disporapar. Penjabaran ini berbeda dengan penjabaran pada tabel 3.9 sebelumnya. Mohon penjelasan keterkaitan tabel. Perlu menjadi perhatian terhadap data informasi yang disajikan jika terkait dengan tabel lainnya agar disampaikan secara benar, jelas dan dipastikan sinkron antar tabel terkait;
- f. Menyesuaikan kembali misi, tujuan dan sasaran RPJMA Tahun 2025-2029 sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMA Tahun 2025-2029. Menyesuaikan kembali Misi RPJMA Tahun 2025-2029 yang disajikan dari 9 (sembilan) menjadi 7 (tujuh) Misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah; (2) Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA; (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas; (4) Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusi regional aceh, koneksitas dan berkelanjutan; (5) Mewujudkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas; (6) Mewujudkan transformasi tata kelola Pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum; (7) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya.
- g. Arah Pembangunan Kewilayahan. Penyajian disesuaikan kembali dengan menyelaraskan *highlight* intervensi (Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029) dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.
- h. Prioritas Pembangunan. Penyajian belum ada penjelasannya, sebaiknya dijelaskan terkait fokus, sasaran pembangunan, indikator yang mendukung dan OPD yang mendukung.
- i. Menambahkan.../5



- i. Menambahkan sub bab tersendiri terkait penyelarasan antara Arah Pembangunan Wilayah Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV RPJMN 2025-2029) dengan arah kebijakan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.
- j. Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional khusus Kota Lhokseumawe, sudah cukup baik, sudah dicantumkan dalam narasi dokumen RPJMD. Untuk Kota Lhokseumawe fokus ke Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe melalui Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu. Kemudian Pemenuhan layanan dasar air minum dan penanganan limbah, termasuk penataan permukiman kumuh terpadu. Kemudian juga fokus pada pengembangan KEK Arun. Termasuk pembangunan rumah murah bersanitasi bagi pekerja dan MBR. Tapi saya belum melihat upaya atau strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Lhokseumawe dalam mendukung kawasan-kawasan yang diintervensi tersebut. Dukungan dapat berupa program-program pembangunan yang merupakan kewenangan Kota Lhokseumawe. Saat ini untuk pembangunan SPAM Regional Lhokseumawe - Aceh Utara sudah memasuki tahap penyiapan dokumen pendukung atau *readiness criteria*, untuk dokumen RISPAM, DED IPA, Amdal sudah ada di Dinas Perkim Provinsi Aceh. Untuk periode RPJMD ini provinsi fokus ke pembebasan lahan dan pembentukan UPTD Pengelola. Agar pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mendukung penyiapan SPAM Regional ini. Misalnya Pembangunan atau peningkatan jaringan distribusi pembagi untuk sambungan rumah guna mendukung Spam Regional yang akan dibangun agar dapat berfungsi. Agar dicantumkan upaya-upaya dan strategi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut. Program-program dukungan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan dalam bentuk narasi atau pun tabel.

4. BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH

- a. Indeks Kinerja Utama (IKU): Sub Bab 4.2 sesuai Inmendagri hanya terdiri dari 2 Sub Bab yaitu IKU dan IKD. Menyesuaikan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan pada Tabel 4.4. Sebaiknya IKU yang disajikan merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan kata lain IKU merupakan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b. Halaman IV. 35, IV. 38, IV. 45, perlu perhatian dan perbaikannya terhadap beberapa indikator yang disajikan pada tabel 4.5, berikut beberapa informasinya yang belum lengkap :
  1. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota, target 2030 adalah 0 (nol).
  2. Indikator huruf J. Pertanahan yang belum ada targetnya antara lain: (1) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%); (2) Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal (Ha); (3) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%); (4) Tersedianya tanah untuk masyarakat (%).
  3. Indikator huruf Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain: (1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%); (2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%); Bahasa Indikator meningkatnya agar disesuaikan kembali dengan bahasa indikator, misalnya dapat menggunakan kata peningkatan atau persentase;
  4. Indikator huruf II. Manajemen Keuangan yaitu indikator Manajemen Aset disajikan tanpa satuan dan tanpa target Tahun 2025-2030.

c. Untuk.../6



- c. Untuk Indikator Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada kolom 5 disebut kondisi kinerja awal Tahun 2024 sebesar 120,13% dan pada kolom 6 target 2024 sebesar 120,13%, sedang di target tahun 2026 sebesar 62,69%, kemudian target di Tahun 2027 sd 2030 sebesar 0,.. persen. Target dari Tahun 2025 sampai dengan 2030 targetnya naik turun secara signifikan. Agar dapat diperiksa kembali, karena ini merupakan dokumen perencanaan menengah 5 tahunan sehingga jika terdapat kesalahan penulisan target akan menjadi masalah pada saat penyusunan dokumen RKPD dan target yang ingin dicapai agar dapat dicek kembali. Karena ini merupakan dokumen perencanaan menengah 5 tahunan sehingga jika terdapat kesalahan penulisan target akan menjadi masalah pada saat penyusunan dokumen RKPD dan target yang ingin dicapai.
- d. Untuk tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebaiknya Indikator yang digunakan selaras dengan indikator RPJP nasional dan provinsi, tetapi saya melihat masih ada indikator yang belum selaras misalnya Akses Rumah Tangga terhadap konsumsi air minum diganti menjadi Persentase Rumah Tangga terhadap air siap minum perpipaan. Untuk indikator akses sanitasi sudah sesuai. Agar dapat dilakukan penyesuaian indikator agar selaras dengan indikator RPJP Provinsi dan Nasional.
- e. Hasil audit BPKP saat ini kondisi PDAM le Beusare Rata dalam kondisi sakit, agar dapat menjadi perhatian pemerintah Kota Lhokseumawe. Agar dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja PDAM le Beusare Rata Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- f. Penyelarasan Indikator Kinerja Kesehatan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) Tahun 2025-2029 dalam RPJMD Renstra-Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029, sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029. Terdapat 11 indikator wajib masuk ke RPJMD dan 23 indikator masuk ke dalam Renstra Perangkat Daerah.

## 5. BAB V PENUTUP

Tidak terdapat masukan dan rekomendasi dalam penyajian.

  
GUBERNUR ACEH  
  
MUZAKIR MANAF



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 10 November 2025

Nomor : 050/ 2558  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun  
Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah Kota Lhokseumawe  
Tahun 2025-2029

Yth. Gubernur Aceh  
c.q. Kepala Bappeda Aceh

di-  
Tempat

Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2025 dan hasilnya telah disampaikan kepada kami melalui surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 000.7.2.2/1276/2025 tanggal 22 Oktober 2025, dengan ini kami sampaikan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

  
WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
DESAJUTI ABUBAKAR, SH., MH

Tembusan :  
1. Ketua DPRK sebagai laporan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR : 000.7.1.2/1276/2025  
 TENTANG EVALUASI RANCANGAN QANUN TENTANG  
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH  
 TAHUN 2025-2029

**TINDAK LANJUT HASIL CATATAN EVALUASI RANCANGAN QANUN LHOKEUMAWE TENTANG RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2029**

NO	CATATAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN RPJMK LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2029	TINDAK LANJUT	KET
<b>A</b>	<b>UMUM</b>		
	1 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 bahwa adanya kesamaan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama 20 (dua puluh) tahun ke depan, yaitu 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2044. Oleh karena itu, RPJM Kota Lhokseumawe merupakan bagian dari periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe yang selaras dengan periode RPJM Aceh Tahun 2025-2029.		
	2 Penyajian sistematika Rancangan Akhir (Rankhir) sampai dengan penetapan RPJM Kota Lhokseumawe disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;		
	3 Penyelarasan RPJM Kota Kota Tahun 2025-2029 dengan RPJM Aceh Tahun 2025-2029 mengilom Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;		
	4 Penyelarasan Rankhir RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan Rankhir RPJM Aceh Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan Keputusan Gubernur tentang Aceh Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029		
<b>B</b>	<b>SUBSTANSI RANCANGAN AKHIR</b>		
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
	a. Dalam narasi pendahuluan agar disajikan tahapan penyusunan RPJMK yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Lengkap dengan tanggal pelaksanaannya sampai dengan tahapan evaluasi di provinsi	Sudah ditindaklanjuti pada Bab I Halaman 1-3 s.d 1-4	
	b. Hubungan Antar Dokumen. Menyempurnakan kembali penyajian hubungan antar dokumen, narasi yang disajikan terlalu general atau normalif sehingga tidak dapat menggambarkan keterhubungan antara RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagai contoh hubungan antara RPJMD Kota Lhokseumawe dengan dengan RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 meliputi: (a). Periodisasi RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai dengan periodisasi tahapan penama RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; (b) Visi dan Misi RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 selaras dengan Visi dan Misi RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; (c). Permasalahan dan isu strategis RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 selaras dengan permasalahan dan isu strategis RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; (d) Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam penyusunan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029; (e) Indikator Utama Pembangunan (IUP) RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 menjadi IKU dan/atau IKD dalam RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.	Sudah ditindaklanjuti pada Bab I Halaman 1-7 s.d 1-10	
	c. Maksud dan Tujuan: Menyempurnakan kembali narasi maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan menambahkan tujuan penyusunan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah meliputi: (a) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan anggaran pembangunan agar lebih efisien dan efektif, serta tepat sasaran dengan kebutuhan daerah; (b) Memastikan bahwa pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan, menjaga kesinambungan antara satu periode kepemimpinan dengan periode berikutnya. (c) Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD; (d) Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan; (e) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Sudah ditindaklanjuti pada Bab I Halaman 1-10 s.d 1-11	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN RPJMK LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2029	TINDAK LANJUT	KET
	d Gambar 1.1 capaian indikator makro tahun 2024 disamping agar disajikan pada BAB II Gambaran Umum	Sudah ditindaklanjuti dengan menyajikan capaian indikator makro pada Bab II	
2	<b>BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>		
	a Grafik capaian-capaian pembangunan Kota Lhokseumawe agar dibandingkan dengan dengan capaian nasional dan provinsi.	Sudah ditindaklanjuti dengan menambahkan capaian nasional dan provinsi	
	b Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 dibuatkan satuannya	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II Tabel 2.6 dan Tabel 2.7	
	c Gambar 2.9 agar dipisahkan IKA, IKU, IKL dan IKLH tahun 2020-2024 buat perbandingan dengan provinsi	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II pada Gambar 2.9 Halaman II-24 dan Gambar 2.10 Halaman II-25	
	d Tabel 2.13 buat perbandingan dengan provinsi.	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II Tabel 2.13 Halaman II-28	
	e Gambar 2.11 buat perbandingan dengan provinsi dan menggunakan grafik line	Perbandingan Indeks Ketahanan Daerah dengan Provinsi tidak dapat ditampilkan dikarenakan Indeks Ketahanan Daerah dihitung hanya sampai level Kabupaten/Kota. Sumber BNPB	
	f Gambar 2.15 buat sandingan dengan provinsi dan nasional menggunakan grafik line untuk memberikan informasi capaian pembangunan Kota Lhokseumawe dan Nasional	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II Gambar 2.16 pada halaman II-41	
	g Permasalahan Pembangunan Daerah. Beberapa saran dan masukan dalam penyajiannya antara lain:		
	1 Menambahkan permasalahan pelaksanaan syariat Islam pada permasalahan yang disajikan pada poin 2.3.1.1 Belum optimalnya implementasi keistimewaan Aceh,	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II pada Sub Bab 2.3.1.1 halaman II-242	
	2 Menyempurnakan kembali penyajian permasalahan pembangunan daerah. Contoh: Sub Bab 2.3.1.1 Belum optimalnya implementasi keistimewaan Aceh, 2.3.1.1.1. Belum optimalnya pelaksanaan syariat Islam hal ini ditandai dengan indeks pembangunan syariat Islam yang masih rendah dibawah Aceh ...dan seterusnya. Sub bab 2.3.1.1.2. Belum optimalnya pelaksanaan kebudayaan Aceh ditandai dengan masih rendahnya .....	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II pada Sub Bab 2.3.1.1 halaman II-242	
	h Isu Strategis Isu strategis nasional dan Aceh yang disajikan masih berupa pointer, sebaiknya dijelaskan secara singkat dapat diadopsi dari narasi yang terdapat dalam RPJMN dan RPJMA Tahun 2025-2029 Kemudian dapat juga ditambahkan atau dijelaskan isu-isu pembangunan berkelanjutan (Isu	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II pada Sub Bab 2.3.2.2 halaman II-263 s.d II-278 dan Sub Bab 2.3.2.3 halaman II-266-278	
	i Sebaiknya penyajian Sub Bab Isu Strategis sebagai berikut: 2.3.2.1. Isu Strategis Global; 2.3.2.2. Isu Strategis Nasional; 2.3.2.3. Isu Strategis Aceh; 2.3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan (Isu KLHS); 2.3.2.5. Rumusan Isu Strategis Kota Lhokseumawe	Sudah ditindaklanjuti pada sub bab Isu Strategis 2.3.2.4 halaman II-273 dengan memasukkan isu KLHS	
	j Pada Tabel 2.95 untuk Capaian Persentase Jalan dalam Kondisi mantap terus mengalami penurunan, dari data terdahulu menurun banyak dan Capaian lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar 67,47 persen menjadi 64,40 persen, seharusnya mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan yang cukup signifikan Agar dapat menjadi perhatian terkait penurunan capaian untuk Persentase Jalan dalam Kondisi mantap dan perlu upaya dari Pemerintah Kota Lhokseumawe agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.	Untuk peningkatan capaian persentase jalan dalam kondisi mantap Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menganggarkan Rekonstruksi Jalan melalui sumber pendanaan Dana Otonomi Khusus pada tahun 2026 untuk peningkatan ruas jalan dan mengupayakan belanja pemeliharaan rutin bertala jalan yang lebih besar	
	k Salah satu permasalahan di Kota Lhokseumawe adalah Akses air minum di Kota Lhokseumawe masih rendah, karena tidak memiliki sumber air baku. Sehingga perlu dijabarkan lebih detail dalam isu strategis. Sudah dijabarkan dalam isu strategis hanya tidak spesifik, hanya secara umum saja. Agar dapat lebih dijabarkan lebih detail terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam 5 tahun ke depan terkait permasalahan air minum di Kota Lhokseumawe.	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II sub bab 2.3.2.5.5 pada halaman II-273	
	l Halaman II. 332-338. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih di bawah rata-rata nasional dan Aceh. Terdapat ketergantungan pada belanja transfer dan tidak tumbuh komoditas pertanian dan perikanan yang produktif. Agar diversifikasi sumber pendapatan daerah. Perluasan akses pasar, pembiayaan, dan teknologi digital bagi UMKM, petani, dan nelayan untuk meningkatkan nilai tambah	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II Sub Bab 2.3.1.2 halaman II-242	



NO	CATATAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN RPJMK LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2029	TINDAK LANJUT	KET
	m Halaman II. 132-136, Tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih tinggi meskipun menurun, terutama di kalangan pemuda. Masih ada ketimpangan IPM antara laki-laki dan perempuan. Beberapa hal yang disarankan antara lain: (1) Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja; (2) Peningkatan fasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga medis yang merata	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II poin 2.3.1.2 halaman II-243	
	n Halaman II. 35-36, II. 147-148, dan II. 155. Rasio jalan macap menurun. Capaian SPM air minum dan sanitasi belum 100%. Pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping yang tidak ramah lingkungan. Dilakukan dengan cara peningkatan investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan pelabuhan. Pergolaan mesin pengolahan sampah menjadi energi terbarukan dan pembangunan SPAM regional	Untuk pengelolaan sampah pada tahun 2025 Kota Lhokseumawe telah menganggarkan pengadaan mesin pengolah sampah menjadi energi terbarukan	
	o Halaman II. 124, Meskipun Indeks Reformasi Birokrasi dan SPBE menunjukkan peningkatan, Indeks Integritas masih menunjukkan kerentanan terhadap korupsi. Disarankan dengan penguatan lembaga pengawasan internal, peningkatan kapasitas ASN, dan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi untuk akuntabilitas dan transparansi	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II Sub bab 2.3.1.4 halaman II-252	
	p Buat arah kebijakan terhadap dana desa pada gambaran keuangan daerah	Sudah ditindaklanjuti pada Bab II Sub bab gambaran keuangan daerah pada Sub sub bab 2.2.3.1.2 belanja halaman II-300-301	
3	<b>BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
	a Kebijakan Pembangunan Nasional: Cukup menyajikan kebijakan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029	Sudah ditindaklanjuti dengan menyajikan kebijakan yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029	
	b Dalam sub bab ini seharusnya hanya menjelaskan terkait strategi dan arah kebijakan pembangunan, tapi dijelaskan keterkaitan antara prioritas dengan tujuan dan sasaran (tidak matching). Kalau memang mau dibandingkan ya dibuat saja di sub bab yang tujuan dan sasaran	Sudah ditindaklanjuti dengan menampilkan sub bab arah kebijakan pembangunan nasional 2025-2029	
	c Gambar 3.5 s.d. Gambar 3.9 Logframe Perencanaan Terintegrasi Misi 1 s.d. Misi 5, pelajan kembali penyajian logframe, karena yang ditampilkan lebih menggambarkan skema.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan judul gambar menjadi Kerangka Kerja	
	d Tabel 3.10. Program Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang disertai Pagu Indikatif Tahun 2025-2030. Agar disesuaikan judul tabel karena tabel yang disajikan tidak memuat angka nilai pagu indikatif.	Sudah ditindaklanjuti dengan menyesuaikan judul tabel menjadi Program Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe sesuai Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2030	
	e Gambar 3.10 s.d. 3.24. Cascading Pencapaian Tujuan 1 s.d. Tujuan 5, menggambarkan kondisi pejabaran dari misi tujuan asaran s.d. program prioritas. Misalnya pada gambar 3.10, pencapaian misi 1 akan terpenuhi oleh program prioritas "Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, Industri dan peningkatan investasi serta peningkatan pendapatan asli daerah" jika dikaitkan dengan tabel 3.9. Integrasi Janji Politik dan Implementasi Program Unggulan dengan Program Nonwenklatur, maka program prioritas tersebut pada poin 13, 14 dan 15 hanya memuat 5 program kewadagra (program nonwenklatur) yang pelaksananya adalah OPD DKPPP. Selanjutnya jika dikaitkan dengan tabel 3.10, Program Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe yang disertai Pagu Indikatif, maka akan tergambar bahwa pada misi 1 tujuan 1 didukung oleh 5 sasaran, masing-masing sasaran selanjutnya didukung oleh beberapa program nonwenklatur, sasaran 1 (19 program), sasaran 2 (5 program), sasaran 3 (10 program) dengan total 34 Program dan OPD pelaksananya ada 5 bukan hanya DKPPP namun ada juga Disperindagkop, DPMTSP, Naker, Dispercapa, pejabaran itu berbeda dengan pejabaran pada tabel 3.9 sebelumnya. mohon penjelasan keterkaitan tabel. Perlu menjadi perhatian terhadap data informasi yang disajikan jika terkait dengan tabel lainnya agar disampaikan secara benar, jelas dan dipantulkan sinkron antar tabel terkait.	Program Prioritas yang dimaksud dalam cascading pencapaian Tujuan 1 s.d. tujuan 5 adalah Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe dalam 5 (lima) tahun kedepan dan jika dikaitkan dengan tabel 3.9 Integrasi Janji Politik dan Implementasi Program Unggulan Walikota yang disampaikan dalam masa Kampanye merupakan salah satu program unggulan untuk mencapai Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe yang hanya dilaksanakan oleh OPD terkait	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN RPJMK LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2029	TINDAK LANJUT	KET
	<p>f Menyesuaikan kembali misi, tujuan dan sasaran RPJMA Tahun 2025-2029 sesuai dengan Rancangan Akhir RPJMA Tahun 2025-2029. Menyesuaikan kembali Misi RPJMA Tahun 2025-2029 yang disajikan dari 9 (sembilan) menjadi 7 (tujuh) Misi sebagai berikut: (1) Mewujudkan Pelaksanaan Syariah Islam dalam kehidupan masyarakat secara kaffah; (2) Mewujudkan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan IIRPA; (3) Mewujudkan kemandirian ekonomi, hilirisasi, industrialisasi, pariwisata dan transformasi digital berbasis sektor unggulan dan skala prioritas; (4) Mewujudkan infrastruktur dasar dengan menjaga keseimbangan dan inklusif regional aceh, konektivitas, dan berkelanjutan; (5) Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM), pemuda dan olahraga, sosial, penguatan kesetaraan gender, hak perempuan dan anak, serta disabilitas; (6) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan Aceh, serta membina stabilitas politik dan supremasi hukum; (7) Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistemnya</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian Misi RPJMA yang tercantum dalam Rancangan Akhir RPJMA Tahun 2025-2029</p>	
	<p>g Arah Pembangunan Kewilayahan. Penyajian disesuaikan kembali dengan menyelaraskan highlight intervensi (Lampiran IV RPJMN Tahun 2025-2029) dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada Sub Bab 3.4.2.6 Penyelarasan antara Arah Pembangunan Wilayah Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Tabel 3.8</p>	
	<p>h Prioritas Pembangunan. Penyajian belum ada penjelasannya, sebaiknya dijelaskan terkait fokus, sasaran pembangunan, indikator yang mendukung dan OPD yang mendukung</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada Sub Bab 3.4.3 Prioritas Pembangunan dan Tabel 3.9</p>	
	<p>i Menambahkan sub bab tersendiri terkait penyelarasan antara Arah Pembangunan Wilayah Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029 (Lampiran IV RPJMN 2025-2029) dengan arah kebijakan RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada Sub Bab 3.4.2.6 Penyelarasan antara Arah Pembangunan Wilayah Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Tabel 3.8</p>	
	<p>j Penyelarasan Pembangunan Kewilayahan Nasional khusus Kota Lhokseumawe, sudah cukup baik, sudah dicantumkan dalam naskah dokumen RPJMD. Untuk Kota Lhokseumawe fokus ke Kawasan Pengembangan Industri Arun-Lhokseumawe melalui Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu. Kemudian Pemanfaatan layanan dasar air minum dan pembangunan limbah termasuk penataan pemukiman kumuh terpadu. Kemudian juga fokus pada pengembangan KEK Arun. Termasuk pembangunan rumah murah bersantitas bagi pekerja dan MBR. Tapi saya belum melihat upaya atau strategi apa yg dilakukan oleh pemerintah Lhokseumawe dalam mendukung kawasan2 yg diintervensi tersebut dukungan dapat berupa program2 pembangunan yang merupakan kewenangan Kota Lhokseumawe. Saat ini untuk pembangunan SPAM Regional Lhokseumawe - Aceh Utara sudah memasuki tahap penyusunan dokumen pendukung atau readiness criteria, untuk dokumen RISPAM, DED IPA, Amdal sudah ada di Dinas Perkim Provinsi Aceh. Untuk periode RPJMD ini provinsi fokus ke pembebasan lahan dan pembentukan UPTD Pengelola. Agar pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mendukung penyiapan SPAM Regional ini, misalnya Pembangunan atau peralihan jaringan distribusi perbagi untuk sambungan rumah guna mendukung Spam Regional yang akan dibangun agar dapat berfungsi. Agar dicantumkan upaya2 dan strategi apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut. Program-program dukungan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan dalam bentuk naskah atau pun tabel</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti pada Sub Bab 3.4.2.6 Penyelarasan antara Arah Pembangunan Wilayah Kota Lhokseumawe dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan Tabel 3.8</p>	
	<p><b>4 BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH</b></p>		
	<p>a <b>Indek Kinerja Utama (IKU):</b> Sub Bab 4.2 sesuai kemendagri hanya terdiri dari 2 Sub Bab yaitu IKU dan IKD. Menyesuaikan kembali Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan pada Tabel 4.4. Sebaiknya IKU yang disajikan merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan kata lain IKU merupakan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti dengan menghilangkan Tabel Indikator Makro sehingga hanya terdiri dari IKU dan IKD pada Bab IV Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 IKU yang ditampilkan merupakan indikator tujuan dan sasaran RPJMK Lhokseumawe</p>	
	<p>b Halaman IV. 35, IV. 38, IV. 45, perlu pertuzian dan perbaikannya terhadap beberapa indikator yang disajikan pada tabel 4.5, berikut beberapa informasinya yang belum lengkap :</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:</p>	
	<p>l Rasio kepatuhan INTB kab/ kota, target 2030 adalah 0 (nol)</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki target pada tahun 2030</p>	

NO	CATATAN HASIL EVALUASI RANCANGAN QANUN RPJMK LHKSEUMAWE TAHUN 2025-2029	TINDAK LANJUT	KET
	2 Indikator huruf J. Pertanahan yang belum ada targetnya antara lain: (1) Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum (%); (2) Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal (Ha); (3) Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%); (4) Tersedianya tanah untuk masyarakat (%).	Sudah ditindaklanjuti dengan menghilangkan indikator tersebut dikarenakan ketersediaan data yang tidak ada	
	3 Indikator huruf Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain: (1) Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%); (2) Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha (%); Bahasa Indikator meningkatnya agar disesuaikan kembali dengan bahasa indikator, misalnya dapat menggunakan kata peningkatan atau persentase;	Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki narasi indikator	
	4 Indikator huruf II. Manajemen Keuangan yaitu indikator Manajemen Aset disajikan tanpa satuan dan tanpa target tahun 2025-2030.	Sudah ditindaklanjuti dengan menyajikan satuan dan target pada indikator tersebut berpedoman pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2020	
	c Untuk Indikator Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada kolom 5 disebut Kondisi kinerja awal tahun 2024 sebesar 120,13% dan pada kolom 6 target 2024 sebesar 120,13%, sedang di target tahun 2026 sebesar 62,69%, kemudian target di tahun 2027 sd 2030 sebesar 0, ... persen. Target di tahun 2025 sampai dengan 2030 targetnya naik turun secara signifikan. Agar dapat diperiksa kembali, karena ini merupakan dokumen perencanaan menengah 5 tahunan sehingga jika terdapat kesalahan penulisan target akan menjadi masalah pada saat penyusunan dokumen RKKPD dan target yang ingin dicapai. Agar dapat dicek kembali, karena ini merupakan dokumen perencanaan menengah 5 tahunan sehingga jika terdapat kesalahan penulisan target akan menjadi masalah pada saat penyusunan dokumen RKKPD dan target yang ingin dicapai	Sudah ditindaklanjuti dengan menyesuaikan kembali target indikator Program Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
	d Untuk tabel Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebaiknya indikator yang digunakan selaras dengan indikator RPJP nasional dan provinsi, tetapi saya melihat masih ada indikator yang belum selaras misalnya Akses Rumah Tangga terhadap konsumsi air minum diganti menjadi Persentase Rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan . untuk indikator akses sanitasi sudah sesuai. Agar dapat dilakukan penyesuaian indikator agar selaras dengan indikator RPJP Provinsi dan Nasional.	Untuk Indikator Persentase Rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan sudah tersaji pada Tabel IKD untuk Aspek Geografi dan Demografi Nomor Urut 4	
	e Hasil audit BPKP saat ini kondisi PDAM le Beusare Rata dalam kondisi sakit, agar dapat menjadi perhatian pemerintah kota Lhokseumawe. Agar dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja PDAM le Beusare rata pemerintah kota Lhokseumawe	Pemerintah Kota Lhokseumawe akan melakukan: (1). mengevaluasi kinerja PDAM le Beusare Rata; (2) merumuskan strategi dan program untuk peningkatan pelayanan PDAM	
5	<b>BAB V PENUTUP</b>		
	Tidak terdapat masukan dan rekomendasi dalam penyajiannya		


  
 W A L I K O T A L H O K S E U M A W E
   

  
 Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH



**BERITA ACARA**

**NOMOR : 100.3.1.1/3/BA/2025**

**NOMOR : 04 / BA / TAHUN 2025**

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT KOTA LHOakseumawe TENTANG  
PENGESAHAN RANCANGAN QANUN KOTA LHOakseumawe**

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Agustus, Tahun Dua Puluh Dua Lima, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Sayuti Abubakar,SH, MH : Wali kota Lhokseumawe dalam Hal ini bertindak untuk dan Atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe yang beralamat Jalan Merdeka No.2, Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. 1. Faisal : Ketua DPRK Lhokseumawe  
2. Sudirman Amin, SE : Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe  
3. Zulya Zaini, SH : Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRK Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Merdeka, No. 1 Lhokseumawe, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan Bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menyetujui Pengesahan Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 untuk disahkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe;
2. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Aceh paling lama 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 19 Agustus 2025

WALI KOTA LHOKSEUMAWE



DR. SAYUTI ABUBAKAR, SH, MH

KETUA DPRK LHOKSEUMAWE



FAISAL

WAKIL KETUA



SUDIRMAN AMIN, SE

WAKIL KETUA



ZULYA ZAINI, SH





**INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**

**LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH (RPJMK) LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2025-2029**

**PADA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR : 700/92/LHR-IL/2025**

**TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025**





**INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE**  
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMK)**  
**KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029**

Kami telah mereviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai dengan Standar yang berlaku dan Pedoman Reviu atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Terhadap substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap data dan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaedah dan tata cara perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang berkualitas. Pengujian yang dilakukan dalam reviu atas dokumen RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini untuk memastikan keandalan, keabsahan dan akurasi data dan informasi dalam penyajian Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu kami, mekanisme dalam proses penyusunan dan penyajian Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku, namun terdapat substansi informasi dan data yang masih memerlukan perbaikan dan perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti terkait dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Lhokseumawe, 19 Agustus 2025.

**PI INSPEKTOR KOTA LHOKSEUMAWE,**

**Nur Hafidha, S.STP, S.Sos, M.S.M, CGCAE**

19770706 199511 2 001





PEMERINTAH KOTA LHOEKSEUMAWE

# INSPEKTORAT

Jl. T. Nyak Adam Kamil No. 4 Telp/Fax (0645) 43543 Lhokseumawe

Email : [inspektorat.lhokseumawe@yahoo.com](mailto:inspektorat.lhokseumawe@yahoo.com)

Lhokseumawe, 19 Agustus 2025

Nomor : 700/92/IKL-LHR/2025  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : **Laporan Hasil Reviu Rancangan  
Akhir Rencana Pembangunan  
Jangka Menengah (RPJMK)  
Lhokseumawe Tahun 2025-2029.**

Yth. Wali Kota Lhokseumawe

C/q. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe

di –

Lhokseumawe

## I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kota Lhokseumawe sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan Reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Reviu yang dilakukan berupa Pengujian atas keterhubungan dan kesesuaian visi/misi dengan tujuan dan sasaran, serta Program-Program Prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, pengujian terhadap keterhubungan dan kesesuaian program-program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan program strategis perangkat daerah dalam renstra OPD Tahun 2025-2029, pengujian terhadap konsistensi antar bab dalam rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029, pengujian atas mekanisme terhadap sistematika penyusunan antar bab dalam rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, pengujian kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir RPJMD tahun 2025-2029 dengan laporan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode 2020-2024, pengujian keterhubungan dan kesesuaian antara dokumen RPJMD 2025-2029 dengan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, pengujian keselarasan antara rancangan akhir RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029, pengujian keselarasan antara rancangan akhir RPJMD dengan RPJMA Tahun 2025-2029



serta pengujian keselarasan antara dokumen RPJMD tahun 2025-2029 dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044.

Reviu yang dilaksanakan Tim Inspektorat Kota Lhokseumawe ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai keakuratan data, keabsahan informasi, dan kepatuhan terhadap kaidah dan tata cara perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga penyajian dokumen Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 lebih berkualitas dan proses penyusunannya telah mempedomani ketentuan yang berlaku.

Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku sebagaimana diatur dalam Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2021. Tim Reviu telah melakukan serangkaian aktivitas melalui prosedur dan teknik reviu untuk menguji kesesuaian data dan informasi terkait sistematika penyusunan dan substansi penyajian antar bab dalam dokumen Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Pelaksanaan Reviu untuk memastikan bahwa penyusunan dan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dapat memenuhi kriteria sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu

atas rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis perangkat daerah.

2. Sehubungan dengan hal di atas, Tim Inspektorat telah melaksanakan pengawasan berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor: 800/92/2025 tanggal 11 Agustus 2025 dalam rangka melakukan Reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Hasil reviu ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum ditetapkan oleh kepala daerah.

Berdasarkan hasil reviu terhadap Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, masih terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian, sebagai berikut:

- 1) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe TA 2025-2029 tidak dapat diuji untuk keselarasan terhadap data dan informasinya karena dokumen Renstra PD tersebut belum selesai disusun;
- 2) Terdapat Misi Nomor 2 (dua) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, sehat dan berkarakter dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, yang menunjukkan sasaran yang belum cukup untuk mendukung pencapaian tujuan dan misi kepala daerah terkait dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM yang berkualitas.
- 3) Terdapat Misi Nomor 5 (lima) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya dengan tujuan Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya, namun sasaran yang ditetapkan belum menunjukkan kualitas yang berorientasi hasil serta kinerja sasaran belum spesifik sebagai sasaran strategik level pemerintah daerah.
- 4) Terdapat satu tujuan dan sasaran yaitu terkait misi dan tujuan nomor 5 (lima) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya yang belum memiliki

program unggulan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pembangunan syariat dan meningkatna pelestarian dan pengembangan budaya.

- 5) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam dokumen RPJMK Tahun 2018-2022, secara substantif tidak dilanjutkan atau tidak selaras dengan indikator yang disajikan dalam RPK Tahun 2023-2026 maupun dalam Rancangan Akhir RPJMK Tahun 2025-2029.
- 6) Tidak terdapat sasaran dan tujuan dalam RPJMK Lhokseumawe yang memiliki keterkaitan dengan sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
- 7) Belum menyajikan sistematika dan substansi yang memadai dalam penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan mempedomani Intruksi Menteri dalam Negeri No 2 Tahun 2025 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025.

Inspektorat menyarankan kepada Tim Penyusun Reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 agar :

- 1) Segera menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe TA 2025-2029 yang selaras dengan Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- 2) Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Sasaran yang belum lengkap terkait dengan meningkatnya kualitas kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian Misi Nomor 2 (dua) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat Dan Berkarakter dengan tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing.
- 3) Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Sasaran yang mendukung Misi Nomor 5 (lima) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dan budaya dengan tujuan Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya sehingga



dapat menunjukkan kualitas sasaran yang berorientasi hasil serta kinerja sasaran belum spesifik sebagai sasaran strategik level pemerintah daerah.

- 4) Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran yaitu terkait pelaksanaan syariat islam dan budaya yang belum memiliki program prioritas terkait tujuan dan sasaran Meningkatnya Pembangunan Syariat Dan Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya untuk mendukung tercapainya Misi Nomor 5 (ima).
- 5) Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam dokumen RPJMK Tahun 2018-2022, sehingga secara substantif dapat dilanjutkan atau selaras dengan indikator yang disajikan dalam RPK Tahun 2023-2026 maupun dalam Rancangan Akhir RPJMK Tahun 2025-2029.
- 6) Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap sasaran dan tujuan dalam RPJMK Lhokseumawe yang belum memiliki keterkaitan dengan sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
- 7) Menyajikan sistematika dan substansi yang memadai dalam penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri dalam Negeri No 2 Tahun 2025 serta ketentuan lainnya.

## **II. Dasar Hukum**

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu dokumen Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis perangkat daerah;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- 11) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 12) Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: Per-01/AAIPI/DPN/2021 Tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;

- 13) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2025;
- 14) Surat Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Nomor: 050/1086 tanggal 1 Agustus 2025 hal Reviu Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029; dan
- 15) Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 800/92/2025 tanggal 11 Agustus 2024.

### **III. Tujuan Reviu**

Reviu dokumen Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah penelaahan atas penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 oleh APIP daerah yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan.

Tujuan Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 oleh APIP Kota Lhokseumawe adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah untuk memastikan bahwa mekanisme perumusan dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah selaras dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJPK Tahun 2025-2045, RPJMA Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Tahun 2024-2044 Lhokseumawe TA. 2025-2029 dan memenuhi substansi informasi serta konsistensi terhadap sistematika penyajian antar bab.

### **IV. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 ini adalah pengujian terbatas terhadap kesesuaian Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJPK Tahun 2025-2045, RPJMA Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Tahun 2024-



2044 Lhokseumawe TA. 2025-2029 dan memenuhi substansi informasi serta konsistensi terhadap sistematika penyajian antar bab yang disusun telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

#### **V. Batasan Tanggung Jawab**

Semua Informasi yang disajikan dalam Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 merupakan tanggung jawab Tim Penyusun Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Oleh karena itu Tim Reviu Inspektorat Lhokseumawe tidak bertanggungjawab atas informasi yang tidak diberikan oleh Tim Penyusun Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, sampai dengan pelaksanaan kegiatan reviu berakhir.

#### **VI. Metodologi Reviu**

Reviu Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas rencana pembangunan jangka menengah dan rencana strategis perangkat daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Reviu dokumen Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dilakukan dengan cara pengujian terbatas terhadap kesesuaian Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah selaras dengan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RPJPK Tahun 2025-2045, RPJMA Tahun 2025-2029, RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Tahun 2024-2044 Lhokseumawe TA. 2025-2029 dan memenuhi substansi informasi serta konsistensi terhadap sistematika penyajian antar bab berikut ini:

- A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Penyusunan Rancangan Akhir RPJMK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan ketentuan yang berlaku;
- B. Pengujian Atas Keterhubungan Dan Kesesuaian Visi/ Misi Dengan Tujuan Dan Sasaran, Serta Program-Program Prioritas Dengan Tujuan Dan Sasaran Dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, dengan melakukan pengujian terhadap:
  - 1. Pengujian Atas kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
  - 2. Pengujian terhadap kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara Program Prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- C. Pengujian terhadap Keterhubungan dan Kesesuaian Program-Program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Strategik Perangkat Daerah Dalam Renstra OPD Tahun 2025-2029;
- D. Pengujian Terhadap Konsistensi Antar Bab Dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;
- E. Pengujian Atas Mekanisme Terhadap Sistematisa Penyusunan Antar Bab Dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
- F. Pengujian Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode 2020-2024;
- G. Pengujian Keterhubungan dan Kesesuaian antara Dokumen RPJMD 2025-2029 Dengan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045;
- H. Pengujian Keselarasan antara Rancangan Akhir RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2025-2029, dengan melakukan pengujian terhadap:
  - 1. Pengujian Atas kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-20 kesesuaian dan keselarasan antara tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 telah mengakomodir sasaran - sasaran pokok pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN Tahun 2025 - 2029;
  - 2. Pengujian terhadap kesesuaian dan keselarasan antara strategis dan arah kebijakan yang mana saja dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe

Tahun 2025 - 2029 memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025 - 2029;

3. Pengujian terhadap kesesuaian dan keselarasan antara prioritas program pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 telah mendukung prioritas program pembangunan untuk masing - masing wilayah sesuai yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025 – 2029;
- I. Pengujian Keselarasan antara Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJMA Tahun 2025-2029;
- J. Pengujian Keselarasan antara Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044;

Reviu dilaksanakan berdasarkan keputusan Plt. Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor: 800/92/2025 tanggal 11 Agustus 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	NIP
1	Nurliana, S.STP., S.Sos., M.S.M., CGCAE	Penanggung Jawab	19770706 199511 2 001
2	Muhammad Halim, ST, M.CIO	Pembantu Penanggung Jawab	19841202 201003 1 001
3	Marlaini, SE.M.Si, Ak.CA	Pengendali Teknis	19751210 200504 2 001
4	Agus Zuliana, SE	Ketua Tim	19830817 200504 2 001
5	Muhammad Husni, S.Sos	Anggota	19830626 200701 1 001
6	Mariati, S.SE	Anggota	19791204 200901 2 001
7	Ida Yusnur, SE	Anggota	19830701 201001 2 003

## VII. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun dokumen perencanaan daerah lainnya.



RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis pembangunan daerah yang berfungsi mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode pemerintahan kepala daerah terpilih. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan yang akan dicapai. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

### **VIII. Uraian Hasil Reviu**

Berdasarkan pengujian terbatas yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025–2029 secara garis besar telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan Catatan Hasil Reviu (CHR) yang telah diberikan tanggapan oleh tim penyusun Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025–2029. Adapun hasil reviu yang telah sesuai dan masih diperlukan perbaikan untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut :

#### **A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Penyusunan Rancangan Akhir RPJMK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan ketentuan yang berlaku;**

Berdasarkan hasil *ceklist* kelengkapan dokumen penyusunan Rancangan Akhir RPKP TA. 2026 yang bertujuan untuk menguji bahwa rumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 yang telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku, semua tahapan kelengkapan dokumen di setiap tahap penyusunan dan terdapat dokumen yang belum dilampirkan Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai hasil verifikasi.

#### **B. Pengujian Atas Keterhubungan Dan Kesesuaian Visi/ Misi Dengan Tujuan Dan Sasaran, Serta Program-Program Prioritas Dengan Tujuan Dan Sasaran Dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, dengan melakukan pengujian terhadap:**



1. Pengujian Atas kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

Berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan adanya hubungan dan kesesuaian antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah menunjukkan :

- a. Terdapat 3 (tiga) Misi yaitu memperkuat ekonomi dan daya saing Kota Lhokseumawe, memantapkan penataan kota yang terintegrasi melalui infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan akuntabel sudah dijabarkan secara berjenjang (cascading) sampai dengan tujuan dan sasaran.
  - b. Terdapat Misi Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan berkarakter dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, yang menunjukkan sasaran yang belum cukup untuk mendukung pencapaian tujuan dan misi kepala daerah terkait dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM yang berkualitas.
  - c. Terdapat Misi Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dan budaya dengan tujuan Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya, namun sasaran yang ditetapkan belum menunjukkan kualitas yang berorientasi hasil serta kinerja sasaran belum spesifik sebagai sasaran strategik level pemerintah daerah
2. Pengujian terhadap kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara Program Prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara Program Prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah menunjukkan kesesuaian dan keterhubungan, namun masih terdapat satu tujuan dan sasaran yaitu terkait pelaksanaan syariat islam dan budaya yang belum memiliki program unggulan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya pembangunan syariat dan meningkatkan pelestarian dan pengembangan budaya.

**C. Pengujian terhadap Keterhubungan dan Kesesuaian Program-Program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Strategik Perangkat Daerah Dalam Renstra OPD Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Keterhubungan dan Kesesuaian Program-Program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Strategik Perangkat Daerah Dalam Renstra OPD Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk menguji dan memastikan kesesuaian program dalam rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan program strategik dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Tim tidak dapat melakukan pengujian tersebut karena dokumen Renstra OPD Tahun 2025-2029 tidak diserahkan.

**D. Pengujian Terhadap Konsistensi Antar Bab Dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan Pengujian terhadap konsistensi penyusunan antar bab pada bab III terkait Strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dengan Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah diidentifikasi berdasarkan hasil capaian indikator kinerjanya pada Bab II Gambaran Umum Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa terhadap Penentuan strategi, arah kebijakan dan Penyusunan Program Pembangunan Daerah serta pemilihan program perangkat daerah sudah disusun berdasarkan indentifikasi hasil capaian Indikator Kinerja yang belum menunjukkan keberhasilan sesuai hasil evaluasi RPK sebelumnya.

**E. Pengujian Atas Mekanisme Terhadap Sistematika Penyusunan Antar Bab Dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap mekanisme terhadap Sistematika Penyusunan Antar Bab Dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk menguji dan memastikan Mekanisme Perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah mempedomani sistematika penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD sesuai kaidah - kaidah perencanaan. Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang disusun secara umum telah mempedomani sistematikan



sesuai Pedoman Penyusunan RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 berdasarkan Intruksi Menteri dalam Negeri No 2 Tahun 2025, namun belum semua substansi terkait data dan informasi yang disajikan telah konsisten antara lain :

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029
A	Analisis rancangan akhir RPJMK yang disusun berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri No 2 Tahun 2025, sebagai berikut :		
1	<b>Bab I Pendahuluan</b>		
a	1.1 Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, tahap penyusunan RPJMD, Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dari dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah	Bab I Pendahuluan dalam latar belakang telah menyajikan informasi secara umum terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah 5 (lima) tahunan tahapan pertama RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yaitu Penguatan Modal Transformasi yang tidak terlepas dari capaian indikator makro daerah pada kondisi terakhir di tahun 2024. Rancangan Akhir RPJMK telah menyajikan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah. Namun belum menyajikan informasi terkait jadwal tahapan penyusunan dan penyusunan RPJMK Tahun 2025-2029
b.	1.2 Dasar hukum penyusunan	Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	Dasar Hukum dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
c	1.3 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;	Menjelaskan hubungan antara RPJMD Tahun 2025- 2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID,	Sudah menjelaskan adanya hubungan yang terkait dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya keterhubungan antara RPJMK Tahun 2025- 2029, RPJM Aceh 2025-2029 RPJMN 2025-2029, RTRW

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil revidi atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029
		Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.	2025-2029 , Rentra PD 2025-2029 dan RPKP
d	1.4 Maksud dan tujuan	Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.	Maksud dan tujuan telah disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029
e	1.5 Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Urutan Bab dan Sub Bab sudah sesuai dengan sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
<b>2</b>	<b>BAB. GAMBARAN UMUM DAERAH</b>		
a.	2.1 Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:a.Aspek geografi dan demografi;b.Aspek Kesejahteraan Masyarakat;c.Aspek Daya Saing Daerah;d.Aspek Pelayanan Umum.	Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Data-data lain yang relevan sesuai dengan ketentuan seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Sudah menjelaskan tentang kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, sesuai hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024
b.	2.2 Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.	Menyajikan penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 ( dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir berkaitan dengan capaian IKD dengan memuat informasi tentang koposisi struktur APBK	Sudah menyajikan terkait penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Data dan Informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar telah dinarasikan hasilnya.Namun Informasi dan data terkait postur dan struktur APBK secara keseluruhan belum disajikan



NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029
c.	<p>2.3 Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat:</p> <p>a. Permasalahan pembangunan daerah; dan</p>	<p>Mengidentifikasi permasalahan dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data-data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya</p>	<p>Sudah menguraikan pokok-pokok permasalahan Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang menjadi kendala hingga saat ini seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh</li> <li>2. Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional</li> <li>3. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal</li> <li>4. Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan</li> <li>5. Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan</li> <li>6. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal</li> </ol> <p>Namun belum mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dapat dirumuskan berdasarkan tahapan KLHS, RPJMD 2025-2029 atau hasil penjarangan aspirasi</p>
b.	<p>Isu strategis daerah.</p>	<p>Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung</p>	<p>Bab II telah menyajikan isu-isu strategis yang menjadi internasional, isu strategis nasional, isu strategis Aceh, dan kondisi Kota Lhokseumawe yang membutuhkan penanganan serius dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 20 tahun mendatang.</p> <p>Dengan memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan prioritas karena memiliki dampak bagi daerah dan selaras dengan Isu Internasional, Isu Nasional dan Isu Aceh pembangunan Aceh serta nasional, maka disusun 7 isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe untuk dapat teratasi dalam 5 tahun mendatang (2025-2030), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita</li> <li>2. Penanggulangan Kemiskinan dan</li> </ol>

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Raakhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029  Pengangguran Terbuka 3.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat 4.Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana 5.Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas 6.Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal 7.Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan  Namun belum menguraikan apa saja potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mempercepat kesejahteraan dan keadilan masyarakat sebagai solusi penyelesaian isu
3	<b>BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>		
	a. 3.1 Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:a. Visi dan Misi; dan	Berisikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun.	Sudah memaparkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) yaitu 'Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni'. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:Misi 1 Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe.Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter.Misi 3 Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan.Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel.Misi 5 Meningkatkan



NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil revidi atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029
			Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.
	b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.	Berikan tujuan yang mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita dan Sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD	Sudah memaparkan tujuan yang mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita dan Sasaran yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Tujuan pembangunan sebagai berikut : 1.Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi 2.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing 3.Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan 4.Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah 5.Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya
			Sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut : 1.Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah 2.Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau 3.Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil revidi atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029
			4.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat 5.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 6.Meningkatnya taraf hidup masyarakat 7.Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda 8.Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota 9.Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman 10.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risikobencana 11.Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah 12.Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah 13.Meningkatnya pembangunan syariat 14.Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya
	b. 3.2 Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan	Berisikan uraian mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD	Sudah menyajikan analisis terkait Arah Kebijakan Keuangan Kota Lhokseumawe Pemerintah untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD dan Program prioritas yang diampu oleh PD

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil revidi atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029
	b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.	Menyajikan tentang Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator)	Telah menyajikan Program prioritas dihasilkan dari cascading dan menetapkan program unggulan kepala daerah yaitu: 1.Pengelolaan Sampah (Broh Jeut Keu Peng)2.Penanganan Banjir3.Pemerataan Jaringan Air Bersih4.Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota5.Penataan Lingkungan Pesisir, Khususnya Desa Pusong6.Penyelesaian Pembangunan Islamic Center7.Peningkatan Kualitas SDM Dayah8.Digitalisasi Pelayanan Publik9.Jajan Subuh Berjamaah untuk para Remaja10.Jajan Subuh Berjamaah untuk para Remaja11.Bantuan Sosial Untuk Lansia Miskin12.Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi13.Pengelolaan Minyak Ikan14.Pemberdayaan Sektor Perikanan15.Pemberdayaan Sektor Pertanian yang Modern
4	<b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
a.	4.1 Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat: a.Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan b.Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	Menyajikan tentang program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Sudah menyajikan program Perangkat Daerah, Indikator Program, target dan pagu indikatif program Tahun 2025-2029 yang disajikan pada tabel 4.2 Program Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030.  Namun Rencana Program tersebut belum disajikan berdasarkan seluruh Program yang tersebut dalam Rensytra PD karena Proses Penyusunan belum selesai



NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil revidi atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029
	b. 4.2 Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat: a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).	Menyajikan informasi terkait Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030	Sudah menyajikan informasi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030 yang disajikan dalam Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
	b. 4.2 Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat: a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).	Menyajikan informasi terkait Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD) IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030	Sudah menyajikan informasi terkait Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD) IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. yang disajikan dalam Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029
9	<b>Bab V Penutup</b>	Berisikan kesimpulan	Sudah disajikan

**F. Pengujian Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode 2020-2024;**

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir RPJMD Tahun 2025 - 2029 dengan laporan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode 2020-2024 menunjukkan bahwa salah satu permasalahan paling krusial dari proses revidi dokumen perencanaan adalah terputusnya benang merah pengukuran kinerja strategis antar periode

perencanaan. Hal ini didasarkan pada adanya diskontinuitas fundamental di mana Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam dokumen RPJMK Tahun 2018-2022, secara substantif tidak dilanjutkan atau tidak selaras dengan indikator yang disajikan dalam RPK Tahun 2023-2026 maupun dalam Rancangan Akhir RPJMK Tahun 2025-2029.

Pergantian total atau perubahan substansial pada metrik pengukuran ini memiliki dampak yang signifikan, yaitu terputusnya kesinambungan data kinerja. Hal ini secara langsung menghalangi kemampuan untuk melakukan analisis tren capaian (trend analysis) secara longitudinal yang akurat dan objektif. Upaya untuk menyandingkan capaian historis (2018-2022) dengan target masa depan (2025-2029) dalam sebuah perbandingan yang setara (apple-to-apple comparison) menjadi tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Konsekuensinya, tujuan utama dari pengujian ini—yaitu untuk memastikan bahwa penetapan target kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMK 2025-2029 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian sebelumnya—tidak dapat dipenuhi secara kuantitatif. Data capaian dari periode RPJMK sebelumnya tidak dapat lagi digunakan sebagai baseline yang andal untuk menguji apakah target-target baru yang diusulkan bersifat realistis dan menantang. Dengan kata lain, proses validasi target kinerja tidak dapat didasarkan pada data kinerja historis yang terukur secara langsung, sehingga penilaiannya menjadi lebih bersifat kualitatif dan asumtif. Dengan demikian, kesinambungan perencanaan dan pengukuran akuntabilitas kinerja daerah dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya menjadi sulit untuk dinilai secara objektif, yang merupakan sebuah tantangan signifikan dalam menjaga kualitas dan konsistensi pembangunan daerah.

Selanjutnya berdasarkan analisis tabel, ditemukan bahwa realisasi capaian kinerja yang dijadikan dasar pembanding hanya dapat disajikan untuk tahun 2023 dan 2024. Data ini bersumber dari dokumen RPK 2023-2026, yang mana data untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk indikator yang sama tidak tersedia. Akibatnya, perhitungan "Tren Pertumbuhan" dan "Rata-Rata Pertumbuhan Historis" secara matematis hanya merefleksikan perubahan



kinerja dari satu tahun ke tahun berikutnya (yaitu dari 2023 ke 2024), bukan sebuah tren jangka panjang yang representatif dari periode 2020-2024.

Penggunaan data series yang sangat singkat ini (hanya dua titik data) menjadikan dasar pembandingan historis menjadi rapuh dan kurang andal. Sebuah tren yang hanya didasarkan pada satu periode perubahan sangat rentan terhadap anomali atau kondisi sesaat, sehingga kurang representatif untuk dijadikan acuan dalam memproyeksikan target untuk lima tahun ke depan. Hal ini secara langsung melemahkan validitas pengujian untuk menentukan apakah target kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMK 2025-2029 benar-benar realistis dan menantang, karena baseline historis yang digunakan tidak cukup kuat. Namun demikian, berikut kami sajikan hasil analisis penentuan target kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) untuk memastikan target kinerja tersebut realistis dan menantang pada table berikut :

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,94%	1,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
2	Indeks Gini	11,26%	-1,47%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
3	Kontribusi PDRB Perdagangan	1,35%	0,83%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
4	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,31%	1,14%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
5	Indeks Ketahanan Pangan	2,93%	1,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	2,27%	1,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
7	Total Kredit/PDRB	19,79%	1,58%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,92%	2,37%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
9	Indeks Pembangunan Manusia	0,78%	0,50%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
10	Angka Literasi SD	-10,42%	4,41%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
11	Angka Numerasi SD	-10,81%	5,87%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
12	Angka Literasi SMP	17,10%	1,61%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
13	Angka Numerasi SMP	51,75%	2,50%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
14	Usia Harapan Hidup	0,23%	0,20%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
15	Pengeluaran Perkapita	4,69%	4,48%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	9,47%	6,53%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
17	Indeks Ketimpangan Gender	9,24%	-2,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
18	Indeks Pembangunan Gender	0,04%	0,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2,61%	1,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	31,50%	0,10%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	9,46%	2,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
22	Indeks Risiko Bencana	1,60%	-1,56%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
23	Indeks Reformasi Birokrasi	23,56%	2,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
24	Indeks Profesionalisme ASN	3,34%	1,39%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
25	Indeks Pelayanan Publik	110,70%	3,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
26	Indeks SPBE	19,15%	3,21%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
27	Indeks Inovasi Daerah	20,01%	8,36%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
28	Indeks Pembangunan Syariah	4,04%	0,52%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
29	Indeks Pembangunan Syariah	4,04%	0,52%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKU
30	Indeks Ketahanan Pangan	2,93%	1,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
31	Prevalensi Ketidakukupan Konsumsi Pangan	16,26%	-5,45%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
32	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,80%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
33	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	-67,03%	17,17%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
34	Indeks Risiko Bencana	1,60%	-1,56%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
35	Indeks Ketahanan Daerah	-11,11%	12,50%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
36	Laju Pertumbuhan Penduduk	-21,69%	3,08%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
37	Rasio Penduduk	0,13%	0,02%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
38	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,94%	1,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
39	Indeks Gini	11,26%	-1,47%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
40	Indeks Pembangunan Manusia	0,78%	0,50%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
41	Usia Harapan Hidup	0,23%	0,20%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
42	Prevalensi Stunting	-15,94%	-7,36%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
43	- Numerasi SD	26,90%	1,64%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
44	- Literasi SMP	8,17%	2,97%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
45	- Numerasi SMP	49,01%	3,36%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
46	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-14,42%	3,39%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
47	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	9,47%	6,53%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
48	Indeks Perlindungan Anak	2,60%	0,56%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
49	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	-0,60%	0,98%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
50	Indeks Ketimpangan Gender	9,24%	-2,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
51	Indeks Pembangunan Gender	0,04%	0,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
52	Angka Ketergantungan	-1,61%	0,24%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
53	Kontribusi PDRB Perdagangan	1,35%	0,83%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
54	Rasio Kewirausahaan	6,36%	5,43%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
55	Indeks Inovasi Daerah	20,01%	8,36%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
56	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,31%	1,14%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
57	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	2,99%	1,95%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
58	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,27%	1,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
59	Ekspor Barang dan Jasa	-68,89%	49,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
60	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	31,50%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
61	Persentase Desa Mandiri	38,87%	8,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
62	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	2,82%	1,92%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
63	Tingkat Inflasi	75,00%	-7,18%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
64	Total Kredit/PDRB	19,79%	1,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
65	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	4,39%	1,27%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
66	Indeks Reformasi Birokrasi	23,56%	2,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
67	Indeks Reformasi Hukum	40,98%	1,27%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	19,15%	3,21%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
69	Indeks Pelayanan Publik	110,70%	2,89%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
70	Indeks Integritas Nasional	-7,30%	2,79%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
71	Persentase Penegakan Perda	7,95%	1,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
72	Persentase Capaian Aksi HAM	43,71%	0,15%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
73	Indeks Daya Saing Daerah	10,29%	5,07%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
74	Indeks Pembangunan Syariah	4,04%	0,52%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
75	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	6,25%	0,02%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
76	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang: berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	364,32%	0,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
77	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	-4,78%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
78	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
79	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	18,82%	0,31%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
80	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6,73%	2,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
81	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	45,20%	0,45%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
82	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	12,13%	-2,15%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
83	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	980,09%	-18,09%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
84	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15,10%	0,66%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
85	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12,62%	0,48%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
86	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3,94%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
87	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	9,67%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
88	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	104,27%	0,32%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
89	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,09%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
90	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	-65,28%	277,04%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
91	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	35,54%	0,30%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
92	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	-10,03%	-0,64%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
93	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	-7,36%	2,83%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
94	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	-82,76%	-2,55%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
95	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	852,59%	1,52%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
96	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
97	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
98	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,52%	-0,22%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
99	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-99,89%	18161,82%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
100	Jumlah warga negara yang memperoleh	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata -	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
	layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	
101	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-39,48%	13,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
102	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,20%	-2,01%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
103	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar parti (Indikator SPM)	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
104	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota & nbsp; & nbsp; & nbsp;	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
105	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
106	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-42,46%	8,91%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
107	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,92%	2,37%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
108	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	-95,92%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
109	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	24,66%	11,40%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
110	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	646,34%	4,84%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
111	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	185085,19%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
112	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-29,26%	-5,82%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
113	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	9,46%	2,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
114	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	-99,69%	6431,61%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
115	Perekaman KTP elektronik	2,96%	0,27%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
116	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	14,49%	8,94%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
117	Kepemilikan akta kelahiran	0,04%	0,14%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
118	Persentase peningkatan status desa mandiri	-70,01%	25,58%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
119	TFR (Angka Kelahiran Total)	-4,60%	-0,18%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
120	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,13%	0,39%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
121	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
122	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	200,03%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
123	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	144,86%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
124	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-67,19%	30,43%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
125	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	-85,60%	44,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
126	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	-237,43%	-11,82%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
127	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	36,78%	27,57%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
128	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
129	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
130	Terlestarikannya Cagar Budaya	-12,00%	11,82%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
131	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	1,64%	1,61%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
132	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-14,41%	5,11%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
133	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U. 43/2009)	-53,84%	67,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
134	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	28,86%	-0,51%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
135	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-112,41%	-51,17%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
136	Tingkat hunian akomodasi	-35,63%	9,22%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
				realistis & menantang.	
137	Produktivitas &nbsp; pertanian per hektar per tahun Produktivitas &nbsp; pertanian per tahun	198,45%	-19,59%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
138	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	15,90%	-4,11%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
139	Persentase alat &ndash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-0,04%	2,09%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
140	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	-35,29%	1,26%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
141	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	-0,75%	-0,47%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
142	Rasio PAD	-16,68%	5,14%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
143	Opini Laporan Keuangan	25,00%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
144	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,55%	4,58%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025 - 2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
145	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-86,04%	-1,15%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
146	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-3,54%	-9,84%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
147	Manajemen Aset	-25,00%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
148	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	-41,96%	-4,62%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD
149	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	-16,70%	4,01%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025 - 2029 kurang realistis & menantang.	IKD

#### G. Pengujian Keselarasan antara Rancangan Akhir RPJMD Dengan RPJMN

**Tahun 2025-2029**, yang bertujuan untuk menguji dan memastikan Perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun. 2025 - 2029 telah selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029, dengan melakukan pengujian terhadap:

1. Pengujian Atas kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-20 kesesuaian dan keselarasan antara tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 telah mengakomodir sasaran - sasaran pokok pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN Tahun 2025 - 2029;

Berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan adanya hubungan dan kesesuaian antara tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPJMK

Lhokseumawe dengan sasaran pokok pembangunan nasional tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, antara lain :

- a. Telah menunjukkan empat tujuan yaitu Misi 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi, Misi 2 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing, dan Misi 3 Meningkatkan penataan kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan sudah dijabarkan secara berjenjang (cascading).
- b. Terdapat tujuan memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya dan sasaran meningkatnya pembangunan syariat dan sasaran meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya yang tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran pokok pembangunan nasional dikarenakan Lhokseumawe memiliki otonomi khusus yang berfokus pada penegakan syariat Islam.
- c. Tidak terdapat sasaran dan tujuan dalam RPJMK Lhokseumawe yang memiliki keterkaitan dengan sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.

#### **H. Penujian Keselarasan antara Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJMA Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kesesuaian dan keselarasan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMA tahun 2025 – 2029, bertujuan untuk menguji dan memastikan Perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun. 2025-2029 telah selaras dengan RPJMA Tahun 2025-2029, hasil telaah ulang dan analisis kesesuaian dan keselarasan antara 5 Tujuan dan 24 sasaran, 22 strategi, 38 arah dan kebijakan serta 15 program prioritas dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025 - 2029 sudah selaras dan sesuai dengan 12 Tujuan dan sasaran, 5 arah kebijakan beserta tahapannya serta 53 program prioritas dalam dokumen RPJMA Tahun 2025 – 2029.



## **IX. Rekomendasi**

Inspektorat menyarankan kepada Tim Penyusun Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 agar :

1. Segera menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe TA 2025-2029 yang selaras dengan Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
2. Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Sasaran yang belum lengkap terkait dengan meningkatnya kualitas kompetensi SDM untuk mendukung pencapaian Misi Nomor 2 (dua) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat Dan Berkarakter dengan tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Memiliki Daya Saing.
3. Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Sasaran yang mendukung Misi Nomor 5 (lima) Meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dan budaya dengan tujuan Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya sehingga dapat menunjukkan kualitas sasaran yang berorientasi hasil serta kinerja sasaran belum spesifik sebagai sasaran strategik level pemerintah daerah.
4. Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran yaitu terkait pelaksanaan syariat Islam dan budaya yang belum memiliki program prioritas terkait tujuan dan sasaran Meningkatnya Pembangunan Syariat Dan Meningkatnya Pelestarian Dan Pengembangan Budaya untuk mendukung tercapainya Misi Nomor 5 (lima).
5. Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam dokumen RPJMK Tahun 2018-2022, sehingga secara substantif dapat dilanjutkan atau selaras dengan indikator yang disajikan dalam RPK Tahun 2023-2026 maupun dalam Rancangan Akhir RPJMK Tahun 2025-2029.
6. Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap sasaran dan tujuan dalam RPJMK Lhokseumawe yang belum memiliki keterkaitan dengan sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat.
7. Menyajikan sistematika dan substansi yang memadai dalam penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK)



Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Intruksi Menteri dalam Negeri No 2 Tahun 2025 serta ketentuan lainnya.

**X. Apresiasi**

Inspektorat Kota Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim Penyusun Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

Lhokseumawe, 19 Agustus 2025

**PE INSPEKTUR KOTA LHOKSEUMAWE**



**NURLIANA, S.STP., S.Sos., M.S.M., CGCAE**  
19770706 199511 2 001





**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 2 TELP. (0645) 630835 FAXIMILE (0645) 630253

Website : [www.bappeda.lhokseumawekota.go.id](http://www.bappeda.lhokseumawekota.go.id)

**LHOKSEUMAWE - 24351**

Lhokseumawe, 21 Agustus 2025

Nomor : 050/ 1114  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Jawaban Atas Catatan Hasil  
Reviu Rancangan Akhir RPJMK  
Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Yth. Inspektur Kota Lhokseumawe

di-

Tempat

Sehubungan dengan Catatan Hasil Reviu Inspektorat Kota Lhokseumawe tanggal 19 Agustus 2025 terhadap Dokumen Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang Bappeda terima pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025, Kami dari Tim Penyusun RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 menjelaskan sebagai berikut:

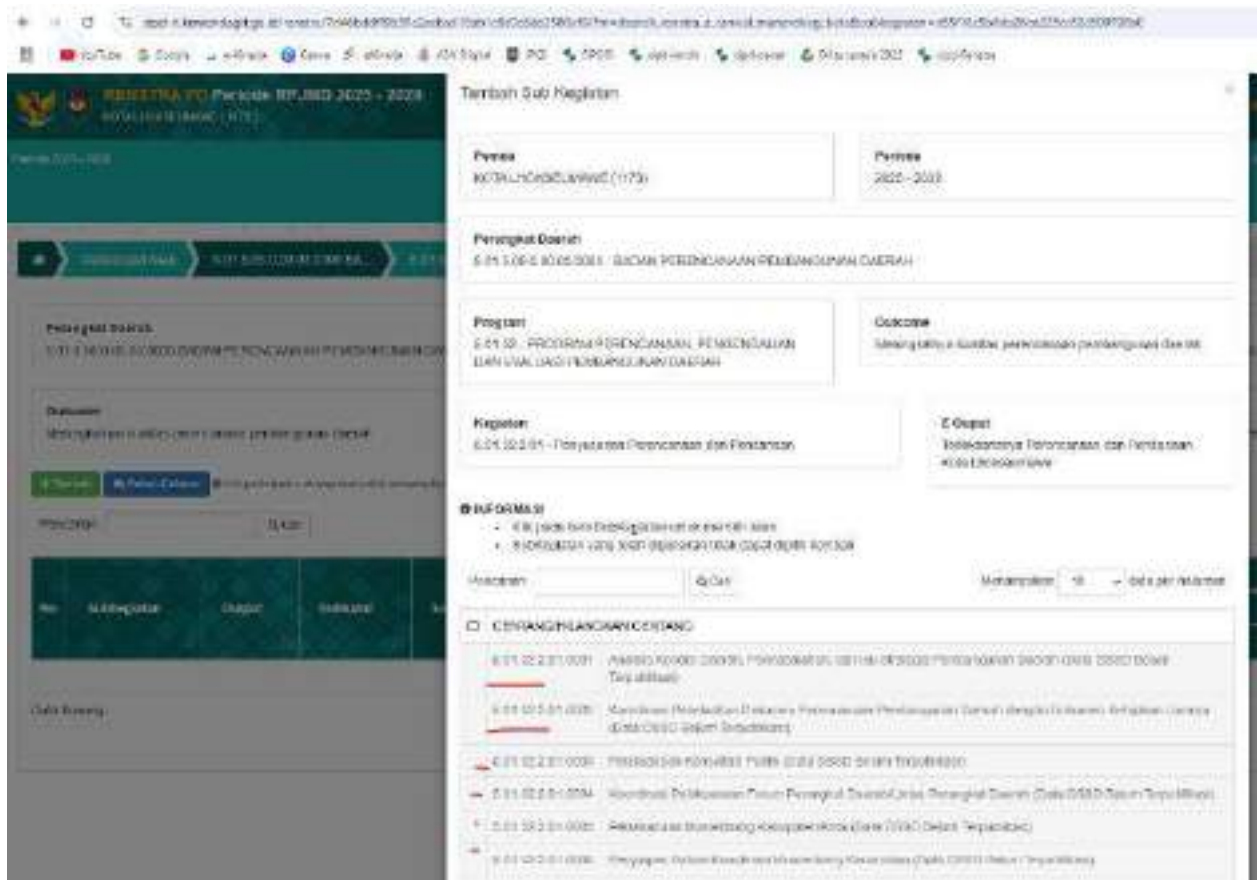
**A. Pengujian Atas Kelengkapan Dokumen Perumusan Rancangan Akhir RPJMK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 Telah Memadai Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;**

Berdasarkan hasil *ceklist* kelengkapan dokumen penyusunan Rancangan Akhir RKPK TA. 2026 yang bertujuan untuk menguji bahwa rumusan Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Dari semua tahapan penyusunan Rancangan Awal, Rancangan dan rumusan Rancangan Akhir terdapat kelengkapan dokumen yang belum disusun yaitu:

1. Hasil Forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda dengan pendekatan tematik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah yang mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.
2. Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang menjadi salah satu acuan untuk pengujian keselarasan dengan program perangkat daerah sesuai ketentuan berlaku.

**Jawaban:**

1. Hasil Forum Perangkat Daerah terlampir kami sampaikan.
2. Rancangan Renstra-PD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, belum dapat kami sampaikan sampai saat ini dikarenakan untuk penyusunan Renstra sangat erat kaitannya dengan pengisian e-Walidata. Dan sampai saat ini e-Walidata Kota Lhokseumawe belum di publis sehingga penginputan RENSTRA-PD pada SIPD-RI Modul Renstra belum dapat dilakukan dikarenakan Sub Kegiatan belum dapat ditarik.



**B. Pengujian Atas Keterhubungan Dan Kesesuaian Visi/ Misi Dengan Tujuan Dan Sasaran, Serta Program-Program Prioritas Dengan Tujuan Dan Sasaran Dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029, dengan melakukan pengujian terhadap:**

1. Pengujian Atas kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMD Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

Berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan adanya hubungan dan kesesuaian antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPJMD Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah menunjukkan :

a. Terdapat 3 (tiga) Misi Pembangunan kota Lhokseumawe, terdiri dari Misi 1 (satu) Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe, misi 3 (tiga) Memantapkan Penataan Kota Yang Terintegrasi Melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dan Misi 4 (empat) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel sudah dijabarkan secara berjenjang (cascading) dengan kerangka berfikir sampai dengan tujuan dan sasaran.

**Jawaban: -**

b. Terdapat Misi Pembangunan nomor 2 (dua) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter dengan tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing, menunjukkan hasil bahwa sasaran yang

disusun belum lengkap yang terkait dengan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten untuk mendukung pencapaian tujuan dalam rangka mewujudkan misi.

**Jawaban:**

Untuk Misi Pembangunan Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter dengan tujuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing akan dicapai dengan 4 Sasaran yaitu : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat, Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda. Dengan masing-masing sasaran mempunyai indikator yang telah disesuaikan atau mengikuti Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Seperti contoh Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat dan dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikatornya sesuai Inmendagri yaitu:

1) **Urusan Pendidikan**

<b>TUJUAN</b>	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah
<b>INDIKATOR</b>	1. Skor Literasi/Numerasi 2. Harapan Lama Sekolah 3. Rata-Rata Lama Sekolah

2) **Urusan Kesehatan**

<b>TUJUAN</b>	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
<b>INDIKATOR</b>	1. Umur Harapan Hidup 2. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

- c. Terdapat Misi Pembangunan nomor 5 lima) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya dengan tujuan Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya, menunjukkan bahwa terhadap sasaran yang disusun yaitu Meningkatnya Pembangunan Syariat kualitas sarannya belum berorientasi hasil serta kinerja sasaran yang belum spesifik sebagai sasaran strategik level pemerintah daerah.

**Jawaban:**

Untuk Misi Pembangunan nomor 5 (lima) Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya dengan tujuan Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya merupakan salah satu misi untuk keistimewaan Aceh yang tidak terdapat di daerah lainnya. Untuk sasaran tersebut mengikuti indikator sasaran yang juga ditetapkan oleh Propinsi. Pada saat audit kinerja RPK 2023-2026 BPK-RI menyarankan untuk sasaran syariat islam indikatornya mengikuti Propinsi sehingga dapat diukur mulai dari Propinsi sampai Kabupaten/Kota. Dan dalam Indeks Pembangunan Syariah ada Dimensi Perhitungan yang meliputi Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat diBaitul Mal, Melek Al-Quran, Manajemen Masjid, Hukum Jinayat dan Akhlak

2. Pengujian terhadap kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara Program Prioritas dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara Program Prioritas dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah menunjukkan adanya kesesuaian dan keterhubungan. Namun masih terdapat tujuan nomor 5 (lima) Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam Dan Budaya yang belum memiliki program unggulan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya Pembangunan Syariat dan Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya.

**Jawaban:**

Untuk Tujuan Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam Dan Budaya memiliki program unggulan yang merupakan janji politiknya Walikota pada saat kampanye yaitu : Peningkatan Kesadaran Spritual para remaja atau jajan subuh berjamaah dimana memotivasi remaja untuk semangat beragama dan kedisiplinan beribadah untuk menciptakan suasana positif dan kondusif.

**C. Pengujian terhadap Keterhubungan dan Kesesuaian Program-Program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Strategik Perangkat Daerah Dalam Renstra OPD Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Keterhubungan dan Kesesuaian Program-Program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Program Strategik Perangkat Daerah dalam Renstra OPD Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara program program dalam rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan program strategik dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah. Tim Reviu tidak dapat melakukan pengujian keselarasan tersebut karena dokumen Renstra OPD Tahun 2025-2029 belum selesai disusun, sehingga tahapan perumusan Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 belum memenuhi semua tahapan penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

**Jawaban:**

Rancangan Renstra-PD Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, belum dapat kami sampaikan sampai saat ini dikarenakan untuk penyusunan Renstra sangat erat kaitannya dengan pengisian e-Walidata. Dan sampai saat ini e-Walidata Kota Lhokseumawe belum di publis sehingga penginputan RENSTRA-PD pada SIPD-RI Modul Renstra belum dapat dilakukan dikarenakan Sub Kegiatan belum dapat ditarik.





**D. Pengujian Terhadap Konsistensi Antar Bab Dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan Pengujian terhadap konsistensi penyusunan antar bab pada bab III terkait Strategi, arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah dengan Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah diidentifikasi berdasarkan hasil capaian indikator kinerjanya pada Bab II Gambaran Umum Kota Lhokseumawe. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terhadap penentuan strategi, arah kebijakan dan penyusunan program pembangunan daerah serta pemilihan program perangkat daerah sudah disusun berdasarkan indentifikasi hasil capaian Indikator Kinerja yang menunjukkan tingkat keberhasilan sesuai dengan hasil evaluasi Rencana Kerja Pembangunan (RPK) Lhokseumawe sebelumnya sudah konsistensi data dan informasinya telah dipenuhi.

**Jawaban: -**

**E. Pengujian Atas Mekanisme Terhadap Sistematika Penyusunan Antar Bab Dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap mekanisme terhadap Sistematika Penyusunan Antar Bab dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk memastikan mekanisme perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah mempedomani sistematika penyusunan dokumen Rancangan Akhir RPJMD sesuai kaidah - kaidah perencanaan dan aturan lainnya yang berlaku menunjukkan bahwa sistematika penyusunan dan perumusan Rancangan Akhir telah sesuai ketentuan. Namun terhadap substansi penyajian terkait data dan informasi belum semuanya memenuhi ketentuan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reuiu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
A	Analisis rancangan akhir RPJMK yang disusun berpedoman pada Intruksi Menteri dalam Negeri No 2			

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
	Tahun 2025, sebagai berikut :			
1	<b>Bab I Pendahuluan</b>			
	a 1.1 Latar belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, tahap penyusunan RPJMD, Merumuskan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 dari dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah	Bab I Pendahuluan dalam latar belakang telah menyajikan informasi secara umum terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah 5 (lima) tahunan tahapan pertama RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yaitu Penguatan Modal Transformasi yang tidak terlepas dari capaian indikator makro daerah pada kondisi terakhir di tahun 2024. Rancangan Akhir RPJMK telah menyajikan definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis RPJMD serta tanggal pelantikan dan masa bakti/periodisasi kepala daerah.  Namun belum menyajikan informasi terkait jadwal tahapan penyusunan dan penyusunan RPJMK Tahun 2025-2029	Sudah disajikan pada Bab I Halaman 1-3 s.d 1-5
	b. 1.2 Dasar hukum penyusunan	Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.	Dasar Hukum dalam pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	-
	c 1.3 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;	Menjelaskan hubungan antara RPJMD Tahun 2025- 2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektoral) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.	Sudah menjelaskan adanya hubungan yang terkait dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya ,keterhubungan antara RPJMK Tahun 2025- 2029, RPJM Aceh 2025-2029 RPJMN 2025-2029, RTRW 2025-2029 , Rentra PD 2025-2029 dan RKPK	-
	d 1.4 Maksud dan tujuan	Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025- 2029.	Maksud dan tujuan telah disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029	-
	e 1.5 Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029	Urutan Bab dan Sub Bab sudah sesuai dengan sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025	-

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reuiu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
2	<b>BAB. GAMBARAN UMUM DAERAH</b>			
	a. 2.1 Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat: a.Aspek geografi dan demografi; b.Aspek Kesejahteraan Masyarakat; c.Aspek Daya Saing Daerah; d.Aspek Pelayanan Umum.	Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 Data-data lain yang relevan sesuai dengan ketentuan seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Sudah menjelaskan tentang kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe, meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, sesuai hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024	-
	b. 2.2 Subbab Gambaran Keuangan Daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020- 2024 (dari tahun 2020 hingga tahun 2024) dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.	Menyajian pejelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 ( dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir berkaitan dengan capaian IKD dengan memuat informasi tentang koposisi struktur APBK	Sudah menyajikan terkait pejelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Data dan Informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan gambar telah dinarasikan hasilnya.  Namun Informasi dan data terkait postur dan struktur APBK secara keseluruhan belum disajikan	Sudah Disajikan pada Sub Bab 2.2 tabel 2.244 halaman 307-309
	c. 2.3 Subbab Permasalahan Dan Isu Strategis paling sedikit memuat: a. Permasalahan pembangunan daerah; dan	Mengidentifikasi permasalahan dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam subbab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan. Permasalahan agar disajikan ringkas tanpa menuangkan data- data yang berlebih dan berpotensi menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di bab-bab sebelumnya	Sudah menguraikan pokok-pokok permasalahan Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang menjadi kendala hingga saat ini seperti : 1.Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh 2.Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional 3.Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal 4.Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan 5.Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan 6.Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal.	Sudah disajikan pada Bab II Tabel 2.245 halaman II-339-344

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
			<p>Namun belum mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dapat dirumuskan berdasarkan tahapan KLHS, RPJMD 2025-2029 atau hasil penjarangan aspirasi</p>	
	<p>b. Isu strategis daerah.</p>	<p>Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung</p>	<p>Bab II telah menyajikan isu-isu strategis yang menjadi internasional, isu strategis nasional, isu strategis Aceh, dan kondisi Kota Lhokseumawe yang membutuhkan penanganan serius dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa 20 tahun mendatang. Telah memperhatikan isu-isu strategis yang menjadi perhatian dan prioritas karena memiliki dampak bagi daerah dan selaras dengan Isu Internasional, Isu Nasional dan Isu Aceh pembangunan Aceh serta nasional, maka disusun 7 isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe untuk dapat teratasi dalam 5 tahun mendatang (2025-2030), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita</li> <li>2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka</li> <li>3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana</li> <li>5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas</li> <li>6. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal</li> <li>7. Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan</li> </ol> <p>Namun belum menguraikan apa saja potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mempercepat kesejahteraan dan keadilan masyarakat sebagai solusi penyelesaian isu</p>	<p>Sudah disajikan pada Bab II Tabel 2.245 halaman II-339-344</p>

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
3	<b>BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
	a. 3.1 Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran paling sedikit memuat:a. Visi dan Misi; dan	Berisikan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun.	Sudah memaparkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) yaitu ‘Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni’. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: Misi 1 Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe. Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter. Misi 3 Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan. Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel. Misi 5 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.	-
	b. Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.	Berikan tujuan yang mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita dan Sasaran merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD	Sudah memaparkan tujuan yang mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita dan Sasaran yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD Tujuan pembangunan sebagai berikut : 1.Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi 2.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing 3.Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan 4.Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah	-



NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
			5.Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya	
			<p>Sasaran pembangunan ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah</li> <li>2.Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau</li> <li>3.Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran</li> <li>4.Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat</li> <li>5.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</li> <li>6.Meningkatnya taraf hidup masyarakat</li> <li>7.Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda</li> <li>8.Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota</li> <li>9.Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman</li> <li>10.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risikobencana</li> <li>11.Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>12.Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah</li> <li>13.Meningkatnya pembangunan syariat</li> <li>14.Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya</li> </ol>	-
	b. 3.2 Subbab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah paling sedikit memuat: a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan	Berisikan uraian mengenai arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD	Sudah menyajikan analisis terkait Arah Kebijakan Keuangan Kota Lhokseumawe Pemerintah untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD dan Program prioritas yang diampu oleh PD	-

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reuiu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
	<p>b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.</p>	<p>Menyajikan tentang Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja (bukan cascading indikator)</p>	<p>Telah menyajikan Program prioritas dihasilkan dari cascading dan menetapkan program unggulan kepala daerah yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sampah (Broh Jeut Keu Peng)</li> <li>2. Penanganan Banjir</li> <li>3. Pemerataan Jaringan Air Bersih</li> <li>4. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota</li> <li>5. Penataan Lingkungan Pesisir, Khususnya Desa Pusong</li> <li>6. Penyelesaian Pembangunan Islamic Center</li> <li>7. Peningkatan Kualitas SDM Dayah</li> <li>8. Digitalisasi Pelayanan Publik</li> <li>9. Jajan Subuh Berjamaah untuk para Remaja</li> <li>10. Jajan Subuh Berjamaah untuk para Remaja</li> <li>11. Bantuan Sosial Untuk Lansia Miskin</li> <li>12. Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi</li> <li>13. Pengelolaan Minyak Ikan</li> <li>14. Pemberdayaan Sektor Perikanan</li> <li>15. Pemberdayaan Sektor Pertanian yang Modern</li> </ol>	
4	<p><b>BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b></p>			
	<p>a. 4.1 Subbab Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah; dan</li> <li>b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.</li> </ol>	<p>Menyajikan tentang program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030. dan Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029</p>	<p>Sudah menyajikan program Perangkat Daerah, Indikator Program, target dan pagu indikatif program Tahun 2025-2029 yang disajikan pada tabel 4.2 Program Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030.</p> <p>Namun Rencana Program tersebut belum disajikan berdasarkan seluruh Program yang tersebut dalam Rensytra PD karena Proses Penyusunan belum selesai</p>	<p>Sudah disajikan program yang nantinya akan diturunkan dalam Renstra</p>

NO	Sistematika Penyusunan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai ketentuan yang berlaku	Substansi antar bab dalam penyusunan Rankhir RPJMK sesuai ketentuan yang berlaku	Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029	Jawaban
	b. 4.2 Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat: a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).	Menyajikan informasi terkait Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030	Sudah menyajikan informasi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030 yang disajikan dalam Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	-
	b. 4.2 Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah paling sedikit memuat: a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).	Menyajikan informasi terkait Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD) IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030	Sudah menyajikan informasi terkait Penentuan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui indikator kinerja daerah (IKD) IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. yang disajikan dalam Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029	-
9	<b>Bab V Penutup</b>	Berisikan kesimpulan	Sudah disajikan	-

**F. Pengujian Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Periode 2020-2024;**

Berdasarkan hasil pengujian kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir RPJMD Tahun 2025-2029 dengan laporan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja periode 2020-2024 menunjukkan bahwa terdapat diskontinuitas fundamental terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam dokumen RPJMK Tahun 2018-2022. Hasil analisis menggambarkan bahwa secara substantif terdapat indikator kinerja yang tidak dilanjutkan atau tidak selaras dengan indikator yang disajikan dalam RPK Tahun 2023-2026 maupun dalam Rancangan Akhir RPJMK Tahun 2025-2029. Selanjutnya berdasarkan analisis tabel, ditemukan bahwa realisasi capaian kinerja yang dijadikan dasar pembanding hanya dapat disajikan untuk tahun 2023 dan 2024. Data ini bersumber dari dokumen RPK 2023-2026, yang mana data untuk tahun 2020, 2021, dan 2022 untuk indikator yang sama tidak tersedia. Akibatnya, perhitungan "Tren Pertumbuhan" dan "Rata-Rata Pertumbuhan Historis" secara matematis hanya merefleksikan perubahan kinerja dari satu tahun ke tahun berikutnya (yaitu dari 2023 ke 2024), bukan sebuah tren jangka menengah yang representatif dari periode 2020-2024. Penggunaan data series yang sangat singkat ini (hanya dua titik data) menjadikan dasar pembanding historis menjadi rapuh dan kurang andal. Hal ini secara langsung melemahkan validitas pengujian untuk menentukan apakah target kinerja dalam Rancangan Akhir RPJMK 2025-2029 benar-benar realistis dan menantang, karena baseline historis yang digunakan tidak cukup kuat. Hasil ini dapat kami sajikan hasil analisis penentuan target kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) untuk memastikan target kinerja tersebut realistis dan menantang pada table berikut :

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,94%	1,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
2	Indeks Gini	11,26%	-1,47%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
3	Kontribusi PDRB Perdagangan	1,35%	0,83%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
4	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,31%	1,14%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
5	Indeks Ketahanan Pangan	2,93%	1,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto ( % ) PDRB)	2,27%	1,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
7	Total Kredit/PDRB	19,79%	1,58%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3,92%	2,37%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
9	Indeks Pembangunan Manusia	0,78%	0,50%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
10	Angka Literasi SD	-10,42%	4,41%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
11	Angka Numerasi SD	-10,81%	5,87%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
12	Angka Literasi SMP	17,10%	1,61%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
13	Angka Numerasi SMP	51,75%	2,50%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
14	Usia Harapan Hidup	0,23%	0,20%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
15	Pengeluaran Perkapita	4,69%	4,48%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
16	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	9,47%	6,53%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
17	Indeks Ketimpangan Gender	9,24%	-2,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
18	Indeks Pembangunan Gender	0,04%	0,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
19	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	2,61%	1,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	31,50%	0,10%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	9,46%	2,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
22	Indeks Risiko Bencana	<b>1,60%</b>	<b>-1,56%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
23	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>23,56%</b>	<b>2,35%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
24	Indeks Profesionalisme ASN	<b>3,34%</b>	<b>1,39%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
25	Indeks Pelayanan Publik	<b>110,70%</b>	<b>3,35%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
26	Indeks SPBE	<b>19,15%</b>	<b>3,21%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
27	Indeks Inovasi Daerah	<b>20,01%</b>	<b>8,36%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
28	Indeks Pembangunan Syariah	<b>4,04%</b>	<b>0,52%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
29	Indeks Pembangunan Syariah	<b>4,04%</b>	<b>0,52%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKU
30	Indeks Ketahanan Pangan	<b>2,93%</b>	<b>1,35%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
31	Prevalensi Ketidakukupan Konsumsi Pangan	16,26%	-5,45%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
32	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12,80%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
33	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	-67,03%	17,17%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
34	Indeks Risiko Bencana	1,60%	-1,56%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
35	Indeks Ketahanan Daerah	-11,11%	12,50%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
36	Laju Pertumbuhan Penduduk	-21,69%	3,08%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
37	Rasio Penduduk	0,13%	0,02%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
38	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,94%	1,05%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
39	Indeks Gini	11,26%	-1,47%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
40	Indeks Pembangunan Manusia	<b>0,78%</b>	<b>0,50%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
41	Usia Harapan Hidup	<b>0,23%</b>	<b>0,20%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
42	Prevalensi Stunting	<b>-15,94%</b>	<b>-7,36%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
43	- Numerasi SD	<b>26,90%</b>	<b>1,64%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
44	- Literasi SMP	<b>8,17%</b>	<b>2,97%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
45	- Numerasi SMP	<b>49,01%</b>	<b>3,36%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
46	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<b>-14,42%</b>	<b>3,39%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
47	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<b>9,47%</b>	<b>6,53%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
48	Indeks Perlindungan Anak	<b>2,60%</b>	<b>0,56%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
49	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	-0,60%	0,98%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
50	Indeks Ketimpangan Gender	9,24%	-2,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
51	Indeks Pembangunan Gender	0,04%	0,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
52	Angka Ketergantungan	-1,61%	0,24%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
53	Kontribusi PDRB Perdagangan	1,35%	0,83%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
54	Rasio Kewirausahaan	6,36%	5,43%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
55	Indeks Inovasi Daerah	20,01%	8,36%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
56	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,31%	1,14%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
57	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	2,99%	1,95%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
58	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,27%	1,60%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata -	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
				rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	
59	Ekspor Barang dan Jasa	<b>-68,89%</b>	<b>49,05%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
60	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	<b>31,50%</b>	<b>-20,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
61	Persentase Desa Mandiri	<b>38,87%</b>	<b>8,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
62	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	<b>2,82%</b>	<b>1,92%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
63	Tingkat Inflasi	<b>75,00%</b>	<b>-7,18%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
64	Total Kredit/PDRB	<b>19,79%</b>	<b>1,35%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
65	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	<b>4,39%</b>	<b>1,27%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
66	Indeks Reformasi Birokrasi	<b>23,56%</b>	<b>2,35%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
67	Indeks Reformasi Hukum	<b>40,98%</b>	<b>1,27%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
				RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	
68	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<b>19,15%</b>	<b>3,21%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
69	Indeks Pelayanan Publik	<b>110,70%</b>	<b>2,89%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
70	Indeks Integritas Nasional	<b>-7,30%</b>	<b>2,79%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
71	Persentase Penegakan Perda	<b>7,95%</b>	<b>1,05%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
72	Persentase Capaian Aksi HAM	<b>43,71%</b>	<b>0,15%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
73	Indeks Daya Saing Daerah	<b>10,29%</b>	<b>5,07%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
74	Indeks Pembangunan Syariah	<b>4,04%</b>	<b>0,52%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
75	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	<b>6,25%</b>	<b>0,02%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
76	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang;	<b>364,32%</b>	<b>0,05%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
	berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
77	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	<b>-4,78%</b>	<b>-20,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
78	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
79	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	<b>18,82%</b>	<b>0,31%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
80	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<b>6,73%</b>	<b>2,35%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
81	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>45,20%</b>	<b>0,45%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
82	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<b>12,13%</b>	<b>-2,15%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
83	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<b>980,09%</b>	<b>-18,09%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
84	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>15,10%</b>	<b>0,66%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
85	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<b>12,62%</b>	<b>0,48%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
86	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	3,94%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
87	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	9,67%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
88	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	104,27%	0,32%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
89	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0,09%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
90	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	-65,28%	277,04%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
91	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	35,54%	0,30%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
92	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	-10,03%	-0,64%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
93	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	-7,36%	2,83%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
94	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	-82,76%	-2,55%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
				Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	
95	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	<b>852,59%</b>	<b>1,52%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
96	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
97	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
98	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<b>0,52%</b>	<b>-0,22%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
99	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<b>-99,89%</b>	<b>18161,82%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
100	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
101	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<b>-39,48%</b>	<b>13,05%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
102	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	<b>11,20%</b>	<b>-2,01%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
103	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
	gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)			RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	
104	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota & nbsp; & nbsp; & nbsp;	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
105	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
106	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	<b>-42,46%</b>	<b>8,91%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
107	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<b>3,92%</b>	<b>2,37%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
108	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	<b>-95,92%</b>	<b>-20,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
109	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	<b>24,66%</b>	<b>11,40%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
110	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	<b>646,34%</b>	<b>4,84%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
111	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	185085,19%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
112	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-29,26%	-5,82%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
113	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	9,46%	2,35%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
114	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	-99,69%	6431,61%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
115	Perekaman KTP elektronik	2,96%	0,27%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
116	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	14,49%	8,94%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
117	Kepemilikan akta kelahiran	0,04%	0,14%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
118	Persentase peningkatan status desa mandiri	-70,01%	25,58%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
119	TFR (Angka Kelahiran Total)	-4,60%	-0,18%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
120	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	65,13%	0,39%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
121	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
122	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	200,03%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
123	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	144,86%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
124	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-67,19%	30,43%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
125	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	-85,60%	44,03%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
126	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/ kota	-237,43%	-11,82%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
127	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	36,78%	27,57%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
128	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam	0,00%	0,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
	menyusun perencanaan pembangunan daerah			RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	
129	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
130	Terlestarikannya Cagar Budaya	<b>-12,00%</b>	<b>11,82%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
131	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<b>1,64%</b>	<b>1,61%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
132	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<b>-14,41%</b>	<b>5,11%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
133	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	<b>-53,84%</b>	<b>67,35%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
134	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	<b>28,86%</b>	<b>-0,51%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
135	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	<b>-112,41%</b>	<b>-51,17%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
136	Tingkat hunian akomodasi	<b>-35,63%</b>	<b>9,22%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
137	Produktivitas &nbsp; pertanian per hektar per tahun Produktivitas &nbsp; pertanian per tahun	<b>198,45%</b>	<b>-19,59%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
138	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	<b>15,90%</b>	<b>-4,11%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
139	Persentase alat &ndash; alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	<b>-0,04%</b>	<b>2,09%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
140	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	<b>-35,29%</b>	<b>1,26%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
141	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	<b>-0,75%</b>	<b>-0,47%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
142	Rasio PAD	<b>-16,68%</b>	<b>5,14%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
143	Opini Laporan Keuangan	<b>25,00%</b>	<b>-20,00%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
144	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<b>17,55%</b>	<b>4,58%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
145	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	<b>-86,04%</b>	<b>-1,15%</b>	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD



No.	Indikator Kinerja (RPJMK Tahun 2025-2029 Tabel 4.4)	Rata - Rata Pertumbuhan Historis	Kebutuhan Pertumbuhan	Keterangan	Jenis Indikator
146	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-3,54%	-9,84%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
147	Manajemen Aset	-25,00%	-20,00%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
148	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	-41,96%	-4,62%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD
149	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	-16,70%	4,01%	Kebutuhan pertumbuhan lebih rendah dari kemampuan rata - rata pertumbuhan historis. Target yang ditetapkan dalam RPJMK 2025-2029 kurang realistis & menantang.	IKD

**Jawaban:**

Target indikator pada setiap IKU dan IKD dalam dokumen RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 diproyeksikan dengan menyesuaikan capaian 5 (lima) tahun terakhir Kota Lhokseumawe dan yang termasuk dalam indikator makro telah disesuaikan dengan target Aceh dan Nasional.

**G. Pengujian Keterhubungan dan Kesesuaian antara Dokumen RPJMD 2025-2029 Dengan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045;**

Berdasarkan hasil pengujian Keterhubungan dan Kesesuaian antara Dokumen RPJMD 2025-2029 dengan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, yang bertujuan untuk memastikan bahwa perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun. 2025-2029 telah selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Hasil penelaahan ulang dan analisis terhadap kesesuaian dan keselarasan antara Bab III RPJMK 2025-2029 terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disusun menunjukkan adanya kesesuaian dan keselarasan karena telah mengacu pada Arah Kebijakan dan sasaran pokok daerah dalam RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025 -2045.

**Jawaban: -**

## **H. Pengujian Keselarasan antara Rancangan Akhir RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2025-2029**

Berdasarkan pengujian penelaahan ulang yang bertujuan untuk memastikan perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun. 2025-2029 telah selaras dengan RPJMN Tahun 2025-2029, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pengujian kesesuaian untuk memastikan adanya keterhubungan antara visi, misi dengan tujuan dan sasaran dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah mengakomodir sasaran - sasaran pokok pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN Tahun 2025 - 2029;

Berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan adanya hubungan dan kesesuaian antara tujuan dan sasaran dalam rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe dengan sasaran pokok pembangunan nasional tahun 2025-2029 dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Telah terdapat hubungan yang saling terkait dan menunjukkan kesesuaian dan keselarasan antara tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

### **Jawaban: -**

- b. Terdapat sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang tidak menjadi pedoman dan acuan untuk disusun menjadi tujuan dan sasaran dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sesuai dengan prioritas sasaran pembangunan daerah.

### **Jawaban :**

Untuk sasaran pokok pembangunan nasional dalam RPJMN yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional bukan kewenangan Kabupaten/Kota sehingga tidak menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Dan pada saat penyusunan RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 untuk sasaran pokok tersebut diarahkan untuk disesuaikan dengan karakteristik daerah

2. Pengujian terhadap kesesuaian dan keselarasan antara strategis dan arah kebijakan yang mana saja dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2025-2029;

Berdasarkan hasil pengujian untuk memastikan adanya hubungan dan kesesuaian antara strategi dan arah kebijakan dalam rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe dengan agenda

pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 telah menunjukkan kesesuaian dan keselarasan dengan Asta Cita Presiden.

**Jawaban: -**

3. Pengujian terhadap kesesuaian dan keselarasan antara prioritas program pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah mendukung prioritas program pembangunan untuk masing-masing wilayah sesuai yang tercantum dalam RPJMN tahun 2025-2029.

Berdasarkan Hasil pengujian dan analisis terhadap Prioritas Program Pembangunan dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang disusun telah menunjukkan bahwa Prioritas Program Pembangunan dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 telah sesuai dan selaras dengan Prioritas Program Pembangunan untuk masing-masing wilayah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029.

**Jawaban: -**

**I. Pengujian Keselarasan antara Rancangan Akhir RPJMD dengan RPJMA Tahun 2025-2029;**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kesesuaian dan keselarasan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas dalam Rancangan Akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMA tahun 2025-2029, bertujuan untuk memastikan perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun. 2025-2029 telah selaras dengan RPJMA Tahun 2025-2029. Hasil telaah ulang dan analisis kesesuaian dan keselarasan terhadap 5 Tujuan , 24 sasaran, 22 strategi, 38 arah dan kebijakan serta 15 program prioritas dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sudah selaras dan sesuai dengan 12 Tujuan dan sasaran, 5 arah kebijakan beserta tahapannya serta 53 program prioritas dalam dokumen RPJMA Tahun 2025 – 2029.

**Jawaban: -**

**J. Pengujian Keselarasan antara Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044;**

Berdasarkan hasil pengujian terhadap Keselarasan antara Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044, yang bertujuan untuk memastikan Perumusan rancangan akhir RPJMK Lhokseumawe Tahun. 2025-2029 telah selaras dengan RTRW Tahun 2024-2044. Terhadap kesesuaian dan keselarasan antara BAB 2 terkait pemanfaatan ruang dengan jumlah program sebanyak 5 dan

lokasi yang dituju berdasarkan beberapa isu yang strategis yang penting karena harus segera diselesaikan, menunjukkan bahwa data dan informasinya telah sesuai dengan data dan informasi pada lampiran indikasi program pemanfaatan ruang dalam RTRW Tahun 2024-2044.

**Jawaban: -**

Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Lhokseumawe



**REZA MAHNUR, S.STP., M. Kesos**  
NIP. 198505162003121001



**PEMERINTAH ACEH**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Bauru-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (hunting), Fax. 33654 email:bappeda@acehprov.go.id  
**BANDA ACEH-23121**

Banda Aceh, 25 Juni 2025  
29 Dzulhijjah 1446

Nomor : 000.7.4/322  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eks  
Hal : **Hasil Konsultasi Rancangan Awal Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  
Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.-----**

Yth, Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe  
di-

Lhokseumawe

1. Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Aceh melalui Bappeda Aceh telah melaksanakan konsultasi rancangan Awal RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 s.d 24 Juni 2025 bertempat di Bappeda Aceh dengan dihadiri oleh pejabat terkait dari unsur Pemerintah Aceh dan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota terkait sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan.
2. Berdasarkan hasil konsultasi dimaksud, maka kami harap kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk segera:
  - a. Melakukan penyempurnaan Rancangan Awal RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan beberapa catatan hasil konsultasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
  - b. Rancangan Awal RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyusunan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan rancangan Renstra SKPD, selanjutnya surat edaran dimaksud disampaikan kepada Kepala SKPD dengan melampirkan rancangan awal RPJM Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagai dasar bagi SKPD untuk menyempurnakan Ranwal Renstra SKPD; dan
  - c. Kami harap Saudara agar menyampaikan hasil tindak lanjut konsultasi dimaksud kepada kami dalam bentuk *soft copy/pdf* melalui link: [https://bit.ly/Tinjuthasil\\_konsultasirpjmkabkota25-29](https://bit.ly/Tinjuthasil_konsultasirpjmkabkota25-29).
3. Demikian disampaikan dan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH ACEH



**Dr. HUSNAN, ST, MP**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19690530 199603 1 002

**Tembusan:**

1. Gubernur Aceh;
2. Plt. Sekretaris Daerah Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Walikota Lhokseumawe.



Lampiran : Surat Kepala Bappeda Aceh  
Nomor : 000.7.4/322  
Tanggal : 25 Juni 2025

## **HASIL KONSULTASI RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029**

### **I. KELENGKAPAN PERSYARATAN KONSULTASI**

Konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dapat dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang terdiri dari:

- a. Surat permohonan konsultasi dari Bupati kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Bappeda Aceh;
- b. Rancangan Awal RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
- c. Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJM Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dengan DPR Kabupaten/Kota;
- d. Hasil Pengendalian dan Evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2020-2024).

### **II. HASIL KONSULTASI**

Beberapa hal yang perlu disempurnakan di dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029, antara lain:

#### **BAB I Pendahuluan**

##### **1. Latar Belakang**

Agar dapat menambahkan latar belakang penyusunan antar hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ada pada tingkat nasional dan provinsi

##### **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Menambahkan:

Menambahkan:

- a. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
- b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangk Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- c. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh tahun 2025-2045

##### **3. Hubungan Antara Dokumen RPMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya**

Menyempurnakan kembali narasi hubungan antar dokumen sehingga tidak hanya menjelaskan secara konsep namun memberikan penekanan secara aplikatif serta menambahkan keterkaitan dengan hasil dokumen perencanaan sektoral lainnya seperti dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

##### **4. Maksud dan Tujuan**

Agar menambahkan hubungan yang terkait dengan dokumen lainnya pada substansi yang saling berhubungan dalam menjaga konsistensi dan penyelarasan antara dokumen perencanaan pembangunan dan tidak hanya dijeslaskan secara umum terkait keterkaitan dokumen tersebut.

##### **5. Sistematika Penulisan**

Sudah Sesuai

#### **BAB II Gambaran Umum Daerah**

1. Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal agar disajikan secara time series dalam lima periode waktu yaitu 2020-2024 dan data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Agar data yang disajikan tidak hanya sebatas dalam bentuk tabel, grafik dan gambar namun lebih pada narasi yang disinkronisasikan dengan permasalahan yang akan disajikan pada

pembahasan baik pada sub bab dan bab selanjutnya sehingga menjaga konsistensi penyusunan dokumen.

3. Agar menambahkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKD dengan menguraikan factor yang menghambat dan juga mendukung sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan untuk perencanaan ke depan.
4. Dalam pembahasan terkait aspek geograsif dapat menambahkan kontribusi terhadap pengembangan dan pertumbuhan terhadap ekonomi, infratraktur, lingkungan hidup dan lainnya sesuai karakteristik daerah.
5. Menambahkan terkait adanya potensi alam yang dapat dijadikan keunggulan komperatif sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
6. Narasi terkait penanganan persampahan dapat lebih dijelaskan secara lebih terperinci dengan menambahkan data dan kebijakan yang lebih komprehensif serta dihubungkan dengan program nasional dan provinsi.
7. Mencermati kembali narasi terkait data jalan yang disajikan sesuai dengan SK jalan yang telah dikeluarkan.
8. Menambahkan narasi atau penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
9. Pada narasi terkait Indeks Pembangunan Manusia agar dapat dielaborasi kembali komponen-komponen pembentuk yang masih bisa ditingkatkan sehingga penyajian capaian lebih komprehensif dan konsisten dengan permasalahan dan kebijakan yang akan ditempuh pada bab selanjutnya,
10. Data terkait capaian pada bidang kesehatan agar dapat disajikan dalam bentuk grafik dan tabel sehingga mudah untuk dilihat dan dianalisis dengan melengkapi narasi yang menjelaskan aspek tersebut.
11. Melengkapi data capaian IPM berbasis gender sehingga dapat disesuaikan dengan kebijakan pada bab selanjutnya
12. Mencermati kembali penyajian data dan capai terkait UMKM dan dapat dipisahkan berdasarkan kewenangan penanganan sehingga konsisten dengan bab selanjutnya.
13. Agar dalam setiap data yang disajikan dalam tabel menyampaikan narasi terkait perkembangan dan dihubungkan dengan kondisi daerah dalam mempengaruhi indikator capaian yang ada di daerah.
14. Agar dalam pembahasan terkait gambaran keuangan daerah paling sedikit memuat tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK.
15. Menyesuaikan kembali proyeksi keuangan agar dapat disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024 untuk proyeksi tahun 2026-2030, dan juga menyesuaikan kembali format tabel yang disajikan terkait hal tersebut.
16. Agar dapat menambahkan upaya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah yang akan berkurang sehubungan dengan berakhirnya Dana Otsus Aceh pada tahun 2028.
17. Menambahkan penyajian sandingan permasalahan daerah, nasional dan kabupaten.
18. Agar dalam penyajian permasalahan dapat menyajikan data perbandingan dengan menghindari narasi yang bersifat duplikasi pada bab sebelumnya.
19. Merumuskan atau memilah kembali permasalahan sehingga syariat Islam dan kearifan budaya lokal serta tata kelola menjadi satu permasalahan tersendiri;
20. Mencermati kembali semua permasalahan yang disajikan sesuai dengan data capaian pada Sub bab sebelumnya.
21. Dalam penyajian isu strategis agar dapat menyikronkan dengan isu yang ada di nasional maupun provinsi sehingga dapat dilihat posisi daerah dalam mendukung pelaksanaan dari perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif.
22. Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dapat disajikan dengan menyajikan berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.
23. Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan belum optimal dapat dinarasikan dengan dukungan data yang lebih mendukung permasalahan.

### **BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

1. Agar dalam penyajian visi daerah dapat disajikan juga visi Nasional dan Provinsi dan disandingkan dengan daerah
2. Agar dapat menyajikan focus pencapaian visi dalam indicator pembangunan dalam pelaksanaan visi tersebut.
3. Menyesuaikan kembali target sasaran visi dalam upaya mendukung pencapaian target Pemerintah Aceh berdasarkan juga trend pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya
4. Mencermati kembali penyajian narasi pada misi dengan memperhatikan penyajian data-data capaian dan permasalahan pada bab sebelumnya,
5. Mencermati kembali penyajian narasi terkait sinkronisasi dan konsistensi antara visi dan misi dengan nasional dan Aceh
6. Agar dapat menambah pembahasan terkait dukungan daerah terhadap program dan proyek prioritas nasional yang ada di daerah sesuai dengan lampiran pada RPJMN 2025-2029
7. Agar dalam penyajian arah kebijakan menyandingkan dengan misi kepala daerah sehingga lebih mangacu pada pencapaian prioritas dari kepala daerah.
8. Menyajikan terkait kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Arun, hilirisasi minyak dan pengembangan pelabuhan Perikanan TPI Pusong
9. Menyajikan arah pengembangan RSUD Kota Lhokseumawe ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
10. Arah pengembangan terkait kebijakan peningkatan swasembada pangan agar dapat disajikan dengan dukungan program yang akan diintervensi.
11. Terkait pencapaian ekonomi hijau dan ekonomi biru agar dapat menyampaikan arah kebijakan dalam pencapaian hal tersebut.
12. Agar menyajikan kebijakan dan arah pengembangan dalam upaya penurunan indeks resiko bencana.

### **BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah**

1. Menyesuaikan kembali tabel 4.1 terkait rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan yang dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 baik pada target dan pendanaan dalam upaya menjaga sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain RPJPK.
2. Menyempurnakan kembali isian pada tabel 4.2 dan 4.3 upaya menjaga sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain RPJPK.
3. Agar mencermati indicator yang dimasukkan pada tabel 4.2 dan 4.3 sesuai dengan yang ada pada Bab II dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan data,

### **BAB V Penutup**

1. Menambahkan analisis manajemen risiko dengan menitikberatkan pada kontekstual dan praktek di daerah sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti dan dikawal dengan komitmen yang kuat sebagai upaya untuk menjaga pencapaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Menambahkan uraian terkait kaidah pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan pembangunan, Kerangka pengendalian dan evaluasi, serta mekanisme perubahan.

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH ACEH



**Dr. HUSNAN, ST, MP**

PEMBINA TK. I

NIP. 19690530 199603 1 002



**PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 2 TELP. (0645) 630835 FAXIMILE (0645) 630253

Website : [www.bappeda.lhokseumawekota.go.id](http://www.bappeda.lhokseumawekota.go.id)

LHOKEUMAWE - 24351

Lhokseumawe, 26 Juni 2025

Nomor : 050/769  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Rancangan Awal  
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)  
Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Bappeda Aceh

di-  
Tempat

Menindaklanjuti Hasil Konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 dan hasilnya telah disampaikan kepada kami melalui surat Nomor 000.7.4/322 tanggal 25 Juni 2025, dengan ini kami sampaikan Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan terima kasih.

**Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KOTA LHOKEUMAWE**



**REZA MAHMUR, S.STP, M.Kesos**

**NIP.19850516 200312 1 001**



Lampiran Surat Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe

Nomor : 050/

Tanggal : Juni 2025

**TINDAK LANJUT HASIL KONSULTASI RANCANGAN AWAL RPJMK LHOKSEUMAWE TAHUN 2025-2029**

NO	CATATAN HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMK	TINDAK LANJUT	KET
I	Pemerintah Kota Lhokseumawe telah memenuhi kelengkapan persyaratan konsultasi rancangan awal RPJMD sebagaimana ketentuan yang diatur dalam lampiran Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA PD Tahun 2025-2029		
II	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
1	Latar Belakang		
	Agar dapat menambahkan latar belakang penyusunan antar hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang ada pada tingkat nasional dan provinsi	Sudah disajikan pada Bab I Halaman 18	
2	Dasar Hukum Penyusunan		
	Menambahkan		
a	Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029	Sudah disajikan pada Bab I Halaman 16	
b	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	Sudah disajikan pada Bab I Halaman 17	
c	Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh tahun 2025-2045	Sudah disajikan pada Bab I Halaman 17	
3	Hubungan Antara Dokumen RPMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya Menyempurnakan kembali narasi hubungan antar dokumen sehingga tidak hanya menjelaskan secara konsep namun memberikan penekanan secara aplikatif serta menambahkan keterkaitan dengan hasil dokumen perencanaan sektoral lainnya seperti dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).	Sudah disajikan pada Bab I Halaman 19	
4	Maksud dan Tujuan		



NO	CATATAN HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMK	TINDAK LANJUT	KET
	Agar menambahkan hubungan yang terkait dengan dokumen lainnya pada substansi yang saling berhubungan dalam menjaga konsistensi dan penyesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dan tidak hanya dijabarkan secara umum terkait keterkaitan dokumen tersebut.	Sudah disajikan pada Bab I Halaman I-12	
5	Sistematika Penulisan		
	Sudah Sesuai		
	<b>BAB II Gambaran Umum Daerah</b>		
1	Dalam penyajian berbagai data dan informasi pembangunan secara ideal agar disajikan secara time series dalam lima periode waktu yaitu 2020-2024 dan data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.	Sudah disajikan data secara time series lima periode waktu yaitu 2020-2024	
2	Agar data yang disajikan tidak hanya sebatas dalam bentuk tabel, grafik dan gambar namun lebih pada narasi yang disinkronisasikan dengan permasalahan yang akan disajikan pada pembahasan baik pada sub bab dan bab selanjutnya sehingga menjaga konsistensi penyusunan dokumen.	Sudah ditindaklanjuti	
3	Agar menambahkan hasil evaluasi capaian pembangunan daerah lima tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKD dengan menguraikan faktor yang menghambat dan juga mendukung sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan untuk perencanaan ke depan.		
4	Dalam pembahasan terkait aspek geospasial dapat menambahkan kontribusi terhadap pengembangan dan pertumbuhan terhadap ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup dan lainnya sesuai karakteristik daerah.		
5	Menambahkan terkait adanya potensi alam yang dapat dijadikan keunggulan komparatif sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.	Sudah disajikan pada Bab II halaman II-10 s.d II-11	
6	Narasi terkait penanganan persampahan dapat lebih dijelaskan secara lebih terperinci dengan menambahkan data dan kebijakan yang lebih komprehensif serta dihubungkan dengan program nasional dan provinsi.	Sudah disajikan pada Bab II halaman II-34 s.d II-36 dan halaman II-183 s.d II-185	



NO	CATATAN HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMK	TINDAK LANJUT	KET
	7 Mencermati kembali narasi terkait data jalan yang disajikan sesuai dengan SK jalan yang telah dikeluarkan.	Data jalan yang disajikan telah sesuai dengan SK jalan yang dikeluarkan yaitu SK Wali Kota Lhokseumawe Nomor 206 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kota Lhokseumawe	
	8 Menambahkan narasi atau penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	Sudah disajikan pada Bab II halaman II-55	
	9 Pada narasi terkait Indeks Pembangunan Manusia agar dapat dielaborasi kembali komponen-komponen pembentuk yang masih bisa ditingkatkan sehingga penyajian capaian lebih komprehensif dan konsisten dengan permasalahan dan kebijakan yang akan ditempuh pada bab selanjutnya.	Sudah disajikan pada Bab II halaman II-58 s.d II-59	
	10 Data terkait capaian pada bidang kesehatan agar dapat disajikan dalam bentuk grafik dan tabel sehingga mudah untuk dilihat dan dianalisis dengan melengkapi narasi yang menjelaskan aspek tersebut.	Data terkait capaian pada bidang kesehatan sudah disajikan dalam bentuk grafik dan tabel pada Bab II	
	11 Melengkapi data capaian IPM berbasis gender sehingga dapat disesuaikan dengan kebijakan pada bab selanjutnya	Sudah disajikan pada Bab II Gambar 2.17 pada halaman II-59	
	12 Mencermati kembali penyajian data dan capai terkait UMKM dan dapat dipisahkan berdasarkan kewenangan penanganan sehingga konsisten dengan bab selanjutnya.	Sudah disajikan pada Bab II Tabel 2.36	
	13 Agar dalam setiap data yang disajikan dalam tabel menyampaikan narasi terkait perkembangan dan dihubungkan dengan kondisi daerah dalam mempengaruhi indicator capaian yang ada di daerah.	Sudah disesuaikan pada Bab II	
	14 Agar dalam pembahasan terkait gambaran keuangan daerah paling sedikit memuat tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dengan menggunakan data yang telah diaudit oleh BPK	Sudah Ditindaklanjuti dan Sudah Disajikan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2020-2024 dengan menggunakan data Hasil Audit BPK pada Bab II Tabel 2.199	
	15 Menyesuaikan kembali proyeksi keuangan agar dapat disusun berdasarkan kinerja keuangan tahun 2020-2024 untuk proyeksi tahun 2026-2030, dan juga menyesuaikan kembali format tabel yang disajikan terkait hal tersebut.	Sudah ditindaklanjuti dan disajikan pada proyeksi pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030 Tabel 2.230 sampai Tabel 2.232.	
	16 Agar dapat menambahkan upaya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah yang akan berkurang sehubungan dengan berakhirnya Dana Otsus Aceh pada tahun 2028.	Sudah disajikan pada subbab 2.2.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (2.2.3.1.1. Pendapatan).	



NO	CATATAN HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMK	TINDAK LANJUT	KET
	17 Menambahkan penyajian sandingan permasalahan daerah, nasional dan kabupaten.	Akan kita sajikan pada subbab permasalahan	
	18 Agar dalam penyajian permasalahan dapat menyajikan data perbandingan dengan menghindari narasi yang bersifar duplikasi pada bab sebelumnya.	Untuk data pembanding sudah kita sajikan, data Aceh dan Nasional	
	19 Merumuskan atau memilah kembali permasalahan sehingga syariat Islam dan kearifan budaya lokal serta tata kelola menjadi satu permasalahan tersendiri;	Berdasarkan data yang dipaparkan untuk syariat islam tidak terdapat permasalahan karena data yang ditampilkan untuk indeks syariat islam mengalami peningkatan.	
	20 Mencermati kembali semua permasalahan yang disajikan sesuai dengan data capaian pada Sub bab sebelumnya.	Sudah disajikan sesuai dengan data yang tersedia	
	21 Dalam penyajian isu startegis agar dapat menyikronkan dengan isu yang ada di nasional maupun provinsi sehingga dapat dilihat posisi daerah dalam mendukung pelaksanaan dari perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif.	Sudah disajikan isu strategis nasional dan provinsi pada subbab 2.3.2 Isu Strategis Halaman 304-315	
	22 Permasalahan pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dapat disajikan dengan menyajikan berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan tersebut.	Akan disajikan	
	23 Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan belum optimal dapat dinarasikan dengan dukungan data yang lebih mendukung permasalahan.	permasalahan sudah disajikan sesuai data yang ada	
	<b>BAB III Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah</b>		
	1 Agar dalam penyajian visi daerah dapat disajikan juga visi Nasional dan Provinsi dan disandingkan dengan daerah	Sudah disajikan pada Bab III halaman III-2, Tabel 3.1	
	2 Agar dapat menyajikan fokus pencapaian visi dalam indikator pembangunan dalam pelaksanaan visi tersebut.	Sudah disajikan pada Bab III halaman III-3, Gambar 3.1	
	3 Menyesuaikan kembali target sasaran visi dalam upaya mendukung pencapaian target Pemerintah Aceh berdasarkan juga trend pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya	Sudah disesuaikan pada Bab III halaman III-3, Gambar 3.1	
	4 Mencermati kembali penyajian narasi pada misi dengan memperhatikan penyajian data-data capaian dan permasalahan pada bab sebelumnya,		
	5 Mencermati kembali penyajian narasi terkait sinkronisasi dan konsistensi antara visi dan misi dengan nasional dan Aceh	Sudah disajikan pada Bab III halaman III-14 s.d III-15, pada Tabel 3.3	



NO	CATATAN HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMK	TINDAK LANJUT	KET
6	Agar dapat menambah pembahasan terkait dukungan daerah terhadap program dan proyek prioritas nasional yang ada di daerah sesuai dengan lampiran pada RPJMN 2025-2029		
7	Agar dalam penyajian arah kebijakan menyandingkan dengan misi kepala daerah sehingga lebih mangacu pada pencapaian prioritas dari kepala daerah.	Sudah disajikan misi kepala daerah dengan strategi dan kebijakan pada tabel 3.3	
8	Menyajikan terkait kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Arun, hilirisasi minyak dan pengembangan pelabuhan Perikanan TPI Pusong	Akan disajikan, pada halaman III-35 subbab 3.4.2 Arah Pengembangan Kewilayahan dalam RPJMN 2025-2029	
9	Menyajikan arah pengembangan RSUD Kota Lhokseumawe ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Telah disajikan pada tabel 3.4 Staretdgi dan Arah Kebijakan RPJMK Tahun 2025-2029, yaitu arah kebijakan Penyediaan fasilitas Penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan, Peningkatan kualitas tenaga Kesehatan, Pemenuhan pencapaian IKK Kesehatan sesuai dengan wewenang Kab/Kota. pada halaman III-39	
10	Arah pengembangan terkait kebijakan peningkatan swasembada pangan agar dapat disajikan dengan dukungan program yang akan diintervensi.	Sudah disajikan, pada halaman III-33 pada tabel 3.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMK dengan Prioritas RPJMN 2025-2029	
11	Terkait pencapaian ekonomi hijau dan ekonomi biru agar dapat mencyampaikan arah kebijakan dalam pencapaian hal tersebut.	Sudah disajikan, pada halaman III-33 pada tabel 3.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMK dengan Prioritas RPJMN 2025-2029	
12	Agar menyajikan kebijakan dan arah pengembangan dalam upaya penurunan indeks resiko bencana.	Sudah disajikan, pada halaman III-33 pada tabel 3.3 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMK dengan Prioritas RPJMN 2025-2029	
	<b>BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah</b>		
1	Menyesuaikan kembali tabel 4.1 terkait rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan yang dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 baik pada target dan pendanaan dalam upaya menjaga sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain RPJPK.	Sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Target dan Pagu Indikatif rencana program perangkat daerah pada tabel 4.2 dimulai tahun 2026 s.d 2030	
2	Menyempurnakan kembali isian pada tabel 4.2 dan 4.3 upaya menjaga sinkronisasi dengan dokumen perencanaan lainnya antara lain RPJPK.	Telah disempurnakan isian Tabel 4.2 dan 4.3	

NO	CATATAN HASIL KONSULTASI RANWAL RPJMK	TINDAK LANJUT	KET
	3 Agar mencermati indicator yang dimasukkan pada tabel 4.2 dan 4.3 sesuai dengan yang ada pada Bab II dan disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan data.	Indikator yang dimasukkan dalam Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 telah disesuaikan dengan ketersediaan data	
	<b>BAB V Penutup</b>		
	1 Menambahkan analisis manajemen risiko dengan menitikberatkan pada kontekstual dan praktek di daerah sehingga hal tersebut dapat ditindaklanjuti dan dikawal dengan komitmen yang kuat sebagai upaya untuk menjaga pencapaian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Sudah disajikan di Bab V halaman V-31	
	2 Menambahkan uraian terkait kaidah pelaksanaan, pendanaan dan pembiayaan pembangunan, Kerangka pengendalian dan evaluasi, serta mekanisme perubahan.	Sudah disajikan di Bab V halaman V-3	

Plt. Kepala BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE



REZA HANUR, S.STP., M. Kesos  
Nip. 19850516 200312 1 001





## BERITA ACARA

**NOMOR : 050/ 01 /BA/TAHUN 2025**

**NOMOR : 02 TAHUN 2025**

**PERSETUJUAN BERSAMA WALI KOTA LHOKEUMAWE DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKEUMAWE  
TENTANG  
RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA  
(RPJMK) LHOKEUMAWE TAHUN 2025-2029**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

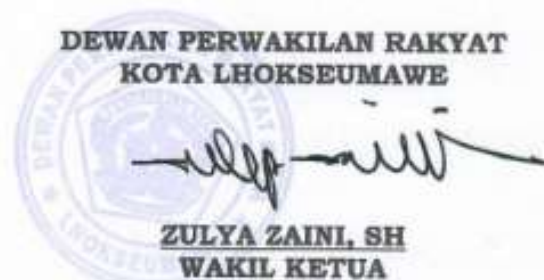
Dr. Sayuti Abubakar, SH., MH : Wali Kota Lhokseumawe, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Lhokseumawe yang beralamat di Kota Lhokseumawe selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Zulya Zaini, SH : Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

### **Menyatakan bahwa :**

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**